



*Siti Uswatun Khasanah*

# DAKWAH KONTEMPORER NAHDLATUL 'ULAMA

**Perubahan & Disrupsi Sosial-Budaya, Keagamaan, & Politik**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**Syarif Hidayatullah**  
JAKARTA - INDONESIA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**Syarif Hidayatullah**  
**JAKARTA – INDONESIA**

**DAKWAH KONTEMPORER NAHDLATUL ULAMA:  
PERUBAHAN DAN DISRUPSI SOSIAL-BUDAYA, KEAGAMAAN, DAN POLITIK**

**DISERTASI**

**Diajukan Kepada Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang  
Dakwah dan Komunikasi**

**Oleh:**

**Siti Uswatun Khasanah  
NIM: 31161200000019**

**Pembimbing**

- 1. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA**
- 2. Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA**



**DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA  
2021**





Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, karya ilmiah (disertasi) ini bisa penulis selesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan juga kepada Nabi Muhammad SAW.

Proses panjang menyelesaikan disertasi ini banyak rintangan dan tantangannya namun Alhamdulillah berkat izin Allah SWT, dukungan serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya segala hambatan dan rintangan itu bias terlewati. Penulis dengan rasa hormat yang tinggi dan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA (2015-2019), Prof. Dr. Amany Lubis, Lc, MA (2019-2024);
2. Direktur Sekolah Pascasarjana (SPS) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, MA (2015-2019), Prof. Dr. Jamhari, MA (2019-2020), Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA (2020);
3. Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, selaku promotor I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi;
4. Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA, selaku promotor II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam pertemuan demi pertemuan;
5. Prof. Didin Saepudin, MA, Prof. Dr. Jamhari, MA, Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA, Prof. Dr. Abdul Mut'i, M. Ed, Prof. Dr. Murodi, MA, Prof. Dr. Masri Mansoer, MA, Dr. Yusuf Rahman, MA, Dr. JM. Muslimin, MA, Dr. Kusmana, Dr. Hamami, Dr. Ikhliah Muzayyanah, Suparto, M.Ed, Ph.D, dan seluruh dosen yang telah memberikan keluasaan dan kedalaman ilmu pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya yang berkenaan dengan kajian yang penulis ajukan dalam disertasi ini;
6. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj, MA, (Ketua Umum PBNU) Dr. Imdadun Rahmat, MA (Wakil Ketua PBNU), KH. Agus Salim (Ketua LDNU Pusat), KH. Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat); Dr. Maria Ulfa Anshor, MA (Ketua Prodi S3 Islam Nusantara), Sahabat Khairul Anam, MA (Sekretaris NU *Online*), Sahabat Ayi Fahmi (Direktur 164 *Channel*), yang telah menjadi narasumber sekaligus memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyusun disertasi ini;
7. Ayahanda Suyoto Puspo Hartono dan Ibunda Sri Umyati, yang tidak henti-hentinya berusaha memberikan yang terbaik untuk putra putrinya dan terimakasih pula terus dan selalu mendoakan serta menjaga Isy'aa, Nafa dan Nisa ketika putrimu sedang tidak bisa menjaganya;
8. Terimakasih untuk suamiku Syaefudin Ahmad, SH dan anak-anakku tersayang; Muhammad Isy'aa'u Nur Hubbi, Malikha

Nafahatus Sakhariyyah, dan Annisa Afiqatul Alesha; terimakasih sudah menjadi anak-anak yang membanggakan, anak-anak yang baik, penurut dan *anteng*, dan maaf kalau kalian masih sering bunda tinggal kemana-mana dan maaf juga kalau kalian sering kena marah bundamu kalau bundamu sudah dalam posisi lelah, kelak dewasa InsyaAllah kalian akan tahu, kalau apa yang bundamu lakukan adalah untuk yang terbaik bagi kalian ;

9. Adik-adikku, Kholifatuz Rozania, S.Pd.I, Titian Siti Nur Jannah, S.Pd.I, Muhammad Fajrun Najah al-Fatih, Khairul Huda, S.Pd.I dan Endro Suharyanto, S.Pd.I.
10. Kakak iparku: Alm. Mustafa Anwar, S.Pd dan keluarga, Siti Muflichah dan keluarga, Siti Ma'rifah, M.Pd dan keluarga, Muharno dan keluarga, Umi Salamah, M.Pd dan keluarga, Emi Karyati, S.Ag dan keluarga, adik iparku; Ely Sukesih, MA dan keluarga, Suci Yuli Astuti, S. Pd dan keluarga;
11. Keluarga Besar FAI Universitas Islam Attahiriyyah (UNIAT) Jakarta, Ahmad Kamaludin, MA, Ahmad Syaefudin, M.Pd.I, Dr. Mulyadi, MA, MA, Ahmad Ibrahim, MA, Muhammad Alwi, M.Pd, M. Nidzom Chotib, M.Pd, Drs. Sholeh Asri, MA, Akhiruddin, MA, Dr. Ina Salma, MA, Syafrudin, MA, Ahmad Zulfikar, dan Khairul Anwar, S.Kom;
12. Sahabat Anggia Ermarini, M.KM, Margaret Aliyatul Maimunah, SS, M.Si, Titik Masudah, S.Ag, Nur Nadifah, M.Pd, Siti Mukaromah, M.Pd, Nenik Eem Marhamah Zulfa Hiz, MM, Anisa Rahmawati, M.Pd, Umi Kulsum, S.Ag, Ai Mariati Solihah, M.Si, Erfi Wahdiyah N, S.Ag, Erni Sugiyanti, MM, Dini Suhardiany, Dewi Ani, MA, Ina Mutmainah, M.Ag, Laili Nurfaridatus Shalihah, M.Pd, Efin Faridho, dan sahabat PP Fatayat NU yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah memotivasi penulis untuk terus maju;
13. Sahabat-sahabat seperjuangan: Dr. Musyarofah, MA, Dr. Siti Nasihatun, MA, Dr. Abdullah Khusairi, MA, Dr. Moh. Nor Ichwan, MA, Dr. Yuminah, MA, Dr. Ai Nur Bayinah, Dr. Roni Faslah, Dr. Faisal Amin, Dr. Komaruddin, Dr. Izzudin, Dr. Canra Krisna, Dr. Mujib El-Sirazy, Dr. Ahmad Khoirul Fata, Dr. Oki Setiana Dewi, Dr. Maryamah, Dr. Ali Mutaqin, Dr. Muhammad, Dr. Shinta Dewi, Ahmad Khoirul Anam, S. Mahmudah Noorhayati, Inda Kartika, Fitriyani, Rifki Abror Ananda, Moh. Khamdan, Isa Anshori, Tahir, Hamam Faizin, Faisal Attamimi, Ibnu, Nur Fitri Habi, Syifa Auliya, Pepen Irfan, Hasan Mawardi, Fauzan, Syarifuddin, Gultom Harahap, Abdurahman Hakim; semoga semua dorongan baik yang bersifat moral maupun spiritual menjadi amal yang baik dan mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, begitu pula dengan karya ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaannya dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri pada khususnya dan pada pihak yang berkepentingan (pembaca) pada umumnya.

**Jakarta, 22 Desember 2020**

**Siti Uswatun Khasanah**





## ABSTRAK

Tujuan penulisan disertasi ini adalah: untuk menganalisis (mengeksplorasi) dakwah kontemporer Nahdlatul Ulama: perubahan dan disrupti sosial budaya, keagamaan dan politik. Disertasi ini melahirkan kaidah keilmuan bahwa: massifnya aktualisasi ideologi melalui beragam varian kekuasaan mendorong luas pulanya pengakuan publik terhadap dakwahnya (khususnya disrupti sosial budaya, keagamaan dan politik).

Disertasi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan/landasan keilmuan yang bersifat transdisipliner (*transdisciplinary*), yakni melalui pendekatan sosiologi, pendekatan historis (sejarah/heuristik) dan budaya (*cultural*), dengan penekanan utama pada ilmu komunikasi Islam (integrasi ilmu dakwah dan komunikasi). Disertasi ini dibingkai sesuai dengan pendapatnya (1): Gill Branston and Roy Stafford (2003) tentang: *ideologi and politik*, dengan unsur-unsur teori di antaranya: diskursus ideologi; hegemoni dan kekuasaan (*power*); aliran kiri baru dan pluralisme kritis. (2) Kazuo Shimogaki yang menjelaskan bahwa Kiri Islam terletak antara Moderisme dan Postmoderisme. (3) M.C. Ricklefs yang mengatakan bahwa Islamisasi masyarakat Jawa adalah tradisi-tradisi budaya yang terus berlanjut. (4) Abdurrahman Wahid meyakini bahwa pribumisasi Islam yang berpijak pada tradisi kelokalan, dan kekinian. Dengan proses tersebut, Islam tidak hadir sebagai pemberangus budaya lokal. Disertasi ini menolak (1) pandangan Geertz yang menyangsikan ke-Muslim-an mayoritas orang Jawa, karena fenomena sinkretisme dan praktik keagamaan orang Jawa campur yang aduk dengan unsur-unsur tradisi-tradisi non Islam. (2) pendapatnya Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, yang mengatakan pluralisme di tubuh NU adalah mitos.

Berdasarkan hasil riset ini, menunjukkan empat hal penting, yaitu: (1) Meskipun sekarang eranya digital media dakwah kontemporer dan konvensional tetap dilakukan oleh PBNU; (a) Media dakwah kontemporer NU : Medsos (*Twitter, facebook, intagram, youtube, google plus*), NU *Online*, 146 Chanel, Aswaja TV, Nutizen, Islamic.com dan Film. (b) Materi dakwah kontemporer NU adalah: melawan fundamentalisme, radikalisme, terorisme dan Wahabisme dengan memperkuat *content* Aswaja, trilogi ukhwah (*ukhuwwah bashāriyyah, ukhūwwah waṭaniyyah, ukhuwwah Islāmiyyah*), *Hubb al-Waṭan Min al-Imān*, Perdamaian. (2). Ideologi yang diterapkan dalam NU adalah *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah An-Nahdhiyah*. Dalam hal politik, bagi NU terdapat tiga macam politik: politik kenegaraan, politik kerakyatan (keagamaan), dan politik kekuasaan (praktis). Penggambaran Politik NU di era Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi dan Said Aqil Siraj adalah lebih mengedepankan politik kenegaraan dan politik kerakyatan. (3) (a) Terdapat pro dan kontra dalam istilah pemikiran Kiri baru dalam NU. Ada yang sepakat dan setuju dengan istilah tersebut. Sepakat kalau fenomena kiri baru dilihat secara longgar

dan tidak terlalu ketat penggunaannya namun bentuk dakwah NU yang sekarang tidak mencerminkan tentang pemikiran kiri baru tetapi lebih mencerminkan tentang moderasi beragama. Hal tersebut bisa dilihat dalam dakwah kontemporer NU. (b) Pluralisme kritis yang dikembangkan oleh NU adalah: Pertama, aspek keadilan sosial tanpa keluar dari garis kemanusiaan. Kedua, dalam pemikiran politik NU menggunakan *maqāṣid al-shārī'ah*. Ketiga, *civil society*. (4) Beberapa contoh budaya yang terus dihidupkan NU adalah: *slametan*, *puji-pujian sebelum shalat*, tahlilan, dzikir sehabis shalat, maulid nabi, pembacaan al-berzanji (biografi nabi), *ḥalāl bi ḥalāl* pasca lebaran, memakai sarung, peci, *sorban*, *blangkon*, *istighāṣah*, pengajian akbar, ada tradisi ziarah walisongo, makam leluhur, *haul*, *baḥth al-masā'il*, mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

*Keyword:* dakwah kontemporer, disrupsi sosial budaya, keagamaan dan politik



## ABSTRACT

The purpose of writing this dissertation is: to analyze (explore) the Contemporary Da'wah of Nahdlatul Ulama: Socio-Cultural, Religious and Political Change and Disruption. This dissertation gave birth to a scientific principle that: the massive actualization of ideology through various variants of power led to widespread public recognition of its preaching (particularly socio-cultural, religious and political disruption).

This dissertation uses a type of qualitative research with a transdisciplinary approach / scientific foundation (transdisciplinary), namely through a sociological approach, a historical (historical / heuristic) and cultural (cultural) approach, with a major emphasis on Islamic communication (integration of dakwah and communication). This dissertation is framed according to their opinion (1): Gill Branston and Roy Stafford (2003) on: ideology and politics, with theoretical elements including: ideological discourse; hegemony and power (power); the new left and critical pluralism. However (2) it is Kazuo Shimogaki who explains that the Islamic Left lies between Modernism and Postmodernism. (3) M.C. Ricklefs who said that the Islamization of Javanese society is a cultural tradition that continues. (4) Abdurrahman Wahid believed that the indigenization of Islam was based on local traditions and the present. With this process, Islam does not exist as a suppressor of local culture. This dissertation rejects (1) Geertz's view that doubts the Muslim majority of Javanese people, because of the syncretism and religious practices of Javanese mixed with elements of non-Islamic traditions. (2) the opinion of Marcus Mietzner and Burhanuddin Muhtadi, which states that pluralism in the body of NU is a myth.

Based on the results of this research, it shows four important things, namely: (1) Even though nowadays digital media of contemporary and conventional preaching are still being carried out by PBNU; (a) NU's contemporary preaching media: Medsos (Twitter, facebook, intagram, youtube, google plusme), NU Online, 146 Chanel, Aswaja TV, Nutizen, Islamic.com and Film. (b) The materials for contemporary NU da'wah are: against fundamentalism, radicalism, terrorism and Wahhabism by strengthening Aswaja content, trilogy ukhwah (ukhuwwah bashā riyyah, ukhū wwah waṭ aniyyah, ukhuwwah Islā miyyah), Hı ubb al-Waṭ an Min al-Imā n, Peace. (2). The ideology applied in NU is Ahl al-sunnah wa al-jamā 'ah An-Nahdiyah. In terms of politics, for NU there are three types of politics: state politics, popular politics (religion), and power politics (practical). The description of NU politics in the era of Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi and Said Aqil Siraj is to prioritize state politics and populist politics. (3) (a) There are pros and cons to the term new Leftist in NU. There are those who agree and agree with the term. It is agreed that the new left phenomenon is seen loosely and not too strictly in



use, but the current form of NU's preaching does not reflect the new left but rather reflects religious moderation. This can be seen in NU's contemporary preaching. (b) The critical pluralism developed by NU is: First, aspects of social justice without leaving the line of humanity. NU accepts the finalists of Pancasila and the necessity of democracy solely for the benefit of mankind without being restricted by the walls of religion, ethnicity, race, or culture. Second, in political thought NU uses *maqāṣid al-shāri'ah*. Third, civil society. (4) Some examples of the culture that NU continues to live up to are: slametan, praises before prayer, tahlilan, dzikir after prayer, the prophet's birthday, reading al-berzanji (prophet's biography), *ḥalāl bi ḥalāl*, wearing *sarong*, *cap*, *turban*, *blangkon*, *istighālah*, grand recitation, there is a tradition of *walisongo* pilgrimage, ancestral graves, *haul*, *baḥth al-masā'il*, defending NKRI and pancasila as the ideology of the Indonesian nation.

Keyword: contemporary da'wah, socio-cultural, religious and political disruption



## الملخص

الغرض من كتابة هذه الرسالة هو: تحليل (استكشاف) الدعوة المعاصرة لنهضة العلماء: التغيير والاضطراب الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي. ولدت هذه الأطروحة مبدأً علمياً مفاده أن: التفعيل الهائل للأيديولوجيا من خلال متغيرات مختلفة للسلطة أدى إلى اعتراف عام واسع النطاق بوعظها (لا سيما الاضطراب الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي).

تستخدم هذه الرسالة نوعاً من البحث النوعي مع منهج متعدد التخصصات / أساس علمي (متعدد التخصصات) ، أي من خلال نهج اجتماعي ، ومنهج تاريخي (تاريخي / إرشادي) وثقافي (ثقافي) ، مع التركيز بشكل كبير على التواصل الإسلامي (دمج علم الدعوة والتواصل) . تم تأطير هذه الأطروحة وفقاً لرأيهم (١): جيل برانستون وروي ستافورد (٢٠٠٣) حول: الأيديولوجيا والسياسة ، مع عناصر نظرية تشمل: أولاً ، الخطاب الأيديولوجي ؛ الثاني ، الهيمنة والسلطة (السلطة) ؛ الثالث ، اليسار الجديد والرابع ، التعددية النقدية ، التعددية النقدية). ومع ذلك (٢) هو كازو شيموجاكي الذي يشرح أن اليسار الإسلامي يقع بين الاعتدال وما بعد الحداثة. (٣) م. Ricklefs الذي قال أن أسلمة المجتمع الجاوي تقليد ثقافي مستمر. (٤) يعتقد عبد الرحمن وحيد أن نشأة الإسلام تقوم على التقاليد المحلية والحاضر. مع هذه العملية ، لا يوجد الإسلام كقمع للثقافة المحلية. ترفض هذه الأطروحة (١) وجهة نظر غيرتز التي تشكك في الأغلبية المسلمة من الشعب الجاوي ، بسبب التوفيق بين المعتقدات والممارسات الدينية للجأوية الممزوجة بعناصر من التقاليد غير الإسلامية. (٢) رأي ماركوس ميتزنر وبرهان الدين مهدي ، الذي ينص على أن التعددية في جسد NU هي أسطورة. بناءً على نتائج هذا البحث ، يظهر أربعة أشياء مهمة ، وهي: (١) على الرغم من أن PBNU لا تزال تقوم في الوقت الحاضر بالوسائط الرقمية للوعظ التقليدي والمعاصر. (أ) وسائط الوعظ المعاصرة لجامعة NU: Medsos (Twitter و facebook و intagram و youtobe و google plusme) و NU Online و ١٤٦ Chanel و Aswaja TV و Nutizen و Islamic.com و Film. (ب)

مادة دعوة NU المعاصرة هي: ضد الأصولية والتطرف والإرهاب والوهابية من خلال تعزيز محتوى Aswaja ، وثلاثية الأخوة. (٢). الأيديولوجية المطبقة في جامعة النيل هي أهل السنة والجماعة > آه النهضة. فيما يتعلق بالسياسة ، هناك ثلاثة أنواع من السياسة لجامعة النيل: سياسة الدولة ، والسياسة الشعبية (الدين) ، وسياسة القوة (العملية). إن وصف سياسات الجامعة في عصر عبد الرحمن وحيد ، وحسيم مزادي ، وسعيد عقيل سراج ، هو إعطاء الأولوية لسياسة الدولة والسياسة الشعبية. (٣) (أ) هناك إيجابيات وسلبيات لمصطلح يساري جديد في NU. هناك من يوافق ويتفق مع المصطلح. متفقون على أن الظاهرة اليسارية الجديدة تُرى بشكل فضفاض وليست صارمة للغاية في الاستخدام ، لكن الشكل الحالي لوعظ NU لا يعكس اليسار الجديد بل يعكس الوسطية الدينية. يمكن رؤية هذا في الوعظ المعاصر لجامعة NU. (ب) التعددية النقدية التي طورتها NU هي: أولاً ، جوانب العدالة الاجتماعية دون ترك خط الإنسانية. تقبل NU المتأهلين إلى نهائيات Pancasila وضرورة الديمقراطية لمصلحة البشرية فقط دون التقييد بجدران الدين أو العرق أو العرق أو الثقافة. ثانيًا ، في الفكر السياسي ، تستخدم جامعة NU مقالًا. ثالثًا ، المجتمع المدني. (٤) بعض الأمثلة على الثقافة التي ما زالت جامعة NU تعيشها هي: سلاميتان ، المديح قبل الصلاة ، التحليلان ، الذكر بعد الصلاة ، المولد النبوي ، قراءة الزنجي (سيرة النبي) ، يرتدي السارونغ ، القبعة ، العمامة ، بلانغكون ، الاستيقه > قانوني ، تلاوة كبيرة ، هناك تقليد لحج واليسونغو ، قبور الأجداد ، الباه الزمان > ، الدفاع عن NKRI و Pancasila باعتبارهما أيديولوجية الأمة الإندونيسية.

الكلمة المفتاحية: الدعوة المعاصرة ، الاضطراب الاجتماعي والثقافي والديني والسياسي



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### ARAB – LATIN

#### A. KONSONAN

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Th	Tedan es
ج	J	Je
ح	Ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kh	Ka dan ha
د	D	De
ذ	Dh	De dan ha
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sh	es dan ha
ص	Ṣ	es dan titik dibawah
ض	Ḍ	de dan titik dibawah
ط	ṭ	te dan titik dibawah
ظ	Ẓ	zet dan titik di bawah
ع	‘	Koma terbalik di atas hadap kanan

غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
لا	Lā	el dan a garis di atas
ع	'	Apostrof
ي	Y	Ye

## B. VOKAL

### 1. Vokal Tunggal

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
—	A	<i>Fathah</i>
—	I	<i>Kasrah</i>
—	U	<i>Dhammah</i>

## 2. Vokal Rangkap

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ—	Ai	a dan i
اُوْ—	Au	a dan u

Contoh:

حسين : Ḥusain      حول : Ḥaula

## C. VOKAL PANJANG

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ—	Ā	a dengan garis di atas
يَ—	Ī	i dengan garis di atas
وَ—	Ū	u dengan garis di atas

## D. KATA SANDANG

Kata sandang “ ” dialih aksarakan dengan huruf /l/ baik diikuti dengan huruf *syamsiyyah* maupun diikuti dengan huruf *qamariyah*.

Contoh:

الشمس : al-Syams      القمر : al-Qamar



## E. SYADDAH (TASYDÍD)

*Syaddah* atau *tasydíd* dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal itu tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*.

Contoh :

ربنا : rabbanâ      نزل : nazzal

## F. TA MARBÛTHAH

Jika huruf ta *marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. Hal yang sama juga berlaku jika ta *marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*). Namun, jika huruf ta *marbûthah* tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi /t/.

Contoh:

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Ṭarīqa
2	الجامعة الإسلامية	Al-jāmi'ah al-islāmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdat al-wujūd

## DAFTAR SINGKATAN



ASWAJA	: <i>Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah</i>
BPUPKI	: Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
DDII	: Dewan Dakwah Islam Indonesia
FMI	: Front Mahasiswa Islam
FPI	: Front Pembela Islam
FPKB	: Forum Peduli Krisis Bangsa
FPIS	: Front Pemuda Islam Surakarta
GARIS	: Gerakan Reformis Islam
GPI	: Gerakan Pemuda Islam
GOLKAR	: Golongan Karya
HAM	: Hak Asasi Manusia
HAMMAS	: Himpunan Mahasiswa Islam Antar kampus
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
IM	: Ikhwanul Muslimin
IN	: Islam Nusantara
ISIS	: <i>Islamic State of Iraq and Syiria</i>
JI	: Jamaah Islamiyah
JT	: Jamaah <i>Tabligh</i>
KAMMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia
KISDI	: Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam
KKI	: Konferensi Khilafah International
KWI	: Konferensi Wali Gereja
LDNU	: Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPMNU	: Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama
LPNU	: Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama
LPPNU	: Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama
LKKNU	: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama
LAKPESDAM	: Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama
LPBHNU	: Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama
LESBUMI NU	: Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama
LAZISNU	: Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama
LWPNU	: Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama
LBMNU	: Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
LTMNU	: Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama
LKIS	: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat



LFNU	: Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama
LTNNU	: Lembaga <i>Ta'lif wan Nasyr</i> Nahdlatul Ulama
LPTNU	: Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama
LPBI NU	: Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama
LP3ES	: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
ORBA	: Orde Baru
Ornop	: Organisasi Non Pemerintah.
PAN	: Partai Amanat Nasional
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PBR	: Partai Bintang Reformasi
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PERSIS	: Persatuan Islam
PINTAR	: Pergerakan Islam Untuk Tanah Air
PITI	: Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPNU	: Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera.
PPI	: Persatuan Pelajar Islam
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPMI	: Persatuan Pekerja Muslim Indoensia
PSI	: Partai Serikat Indonesia
P3M	: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
RMINU	: Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama
SAW	: <i>Shalallahu 'Alaihi Wasalam</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SWT	: <i>Subhanallahu Wa Taala</i>
TBC	: <i>Takhayul, Bidh'ah dan Churafat</i>

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Pernyataan Bebas Plagiarisme .....	iv
Surat Persetujuan Penguji .....	v
Absrak .....	vi
Pedoman Transliterasi.....	xii
Daftar Singkatan .....	xvi
Daftar Isi .....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan .....	15
1. Identifikasi Masalah .....	15
2. Pembatasan Masalah .....	16
3. Perumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Signifikansi dan Manfaat Penelitian .....	17
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	17
F. Metodologi Penelitian .....	28
G. Sistematika Penulisan .....	31

### BAB II PEMIKIRAN DAKWAH DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Pemikiran Keagamaan .....	34
1. Ideologi Islam .....	35
2. Ideologi dan Politik .....	46
a. Pemikiran Kiri Baru .....	46
b. Pluralisme Kritis .....	50
c. Budaya Hidup (Budaya Amali) .....	52
B. Perubahan Sosial .....	59

### BAB III POLITIK NU

A. Profil NU .....	67
B. Politik NU .....	73
1. Politik Kebangsaan.....	75
2. Politik Kemasyarakatan .....	76
3. Politik Kekuasaan.....	77
C. Aplikasi Politik dan Kekuasaan NU .....	79
1. Era Abdurrahman Wahid .....	79
2. Era Hasyim Muzadi .....	92
3. Era Said Aqil Siraj.....	94

#### **BAB IV DAKWAH KONVENSIONAL NAHDLATUL ULAMA**

A. Sejarah Perkembangan Dakwah NU .....	108
B. Unsur-Unsur Dakwah NU .....	109
C. Dakwah Konvensional NU .....	117
1. Dakwah dengan Lisan .....	117
2. Dakwah dengan Tulisan .....	118
3. Dakwah dengan Teknologi .....	122
a. Radio .....	122
b. Televisi .....	125
4. Dakwah Dengan Perbuatan .....	129

#### **BAB V DAKWAH KONTEMPORER NAHDLATUL ULAMA**

A. Dinamika Dakwah Kontemporer .....	141
1. <i>New Media</i> .....	143
2. Media Sosial .....	149
a. <i>Twitter</i> .....	152
b. <i>Facebook</i> .....	153
c. <i>Instagram</i> .....	153
d. <i>Youtube</i> .....	154
e. <i>NU Online</i> .....	155
f. <i>164 Chanel</i> .....	155
g. <i>Aswaja TV</i> .....	159
h. <i>Nutizen</i> .....	160
i. <i>Film</i> .....	160
B. Respon NU Terhadap Dakwah Kontemporer .....	162

#### **BAB VI KEBERAGAMAN DALAM NAHDLATUL ULAMA**

A. Pemikiran Kiri Baru dalam NU .....	169
B. Pluralisme Kritis .....	181
C. Budaya Hidup/Amali .....	190
D. Sejarah Keberagaman (pluralisme) dalam NU .....	191
1. Aswaja Arus Utama .....	197
2. Progresif .....	201
3. NU Garis Lurus .....	213
4. NU Moderat .....	221
E. Aktualisasi Dakwah dalam politik NU .....	232

#### **BAB VII ISLAM NUSANTARA NU; SUBSTANSI DAKWAH KONTEMPORER**

A. Islam Nusantara Nahdlatul Ulama .....	240
B. Kontekstualisasi Islam Nusantara .....	254
C. Menghadapi Radikalisme, Arabisme dan Wahabisme .....	270
1. Tindakan NU terhadap Radikalisme .....	286
2. Tindakan NU terhadap Wahabisme dan Arabisme .....	290



## **BAB VIII KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	293
B. Saran .....	297
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>299</b>
<b>GLOSARIUM .....</b>	<b>323</b>
<b>INDEKS .....</b>	<b>327</b>
<b>CURICULUM VITAE</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dakwah kontemporer adalah dakwah di era kekinian (sekarang) dengan cara menggunakan teknologi yang sedang berkembang, baik materinya, media, maupun metodenya. Terdapat tiga indikator adanya dakwah kontemporer yaitu (1) da'i kontemporer, (2) dakwah dengan menerapkan materi dakwah yang kontemporer, (3) kegiatan dakwah dengan menggunakan media teknologi kontemporer.<sup>1</sup>

Istilah dakwah kontemporer adalah gabungan dari tiga suku kata yaitu strategi, dakwah dan kontemporer. Penggabungan ini melahirkan satu makna tersendiri yaitu adanya satu sistem atau teknik dakwah di era teknologi modern. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa strategi dakwah kontemporer dimaksudkan adalah sebuah strategi dalam melancarkan dakwah di era modern dalam menghadapi kehidupan yang menggunakan teknologi.

Pada disertasi ini sengaja dipilih istilah kontemporer, meskipun ada istilah lain yang kadang digunakan sebagai padanannya, yaitu posmodernisme. Ada dua alasan dalam kesengajaan di atas, yakni: pertama, penulis mengikuti tradisi beberapa referensi yang kredibel untuk mendeskripsikan gagasan makro-konseptualnya; di antaranya adalah Josep Bleicher<sup>2</sup> dan Ian G. Barbour.<sup>3</sup> Kedua: istilah kontemporer penulis pandang lebih aman dari perdebatan terminologis dibandingkan dengan istilah posmodernisme.<sup>4</sup> Alasan kedua ini terutama dimaksudkan oleh penulis untuk tercapainya harmoni isi topik secara utuh dan kokoh.

Substansi istilah kontemporer terkandung dalam arti sekarang, kini, terutama direferensikan pada pendapat Foucault yang mengatakan bahwa masa ketika kita hidup adalah sangat menarik; hal ini perlu

---

<sup>1</sup> Fahrurrozi, *Model-model Dakwah di Era Kontemporer (Strategi Merestorasi Umat Menuju Moderasi dan Deradikalisasi)*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017), h. 19.

<sup>2</sup> Josep Bleicher, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique* (London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1980).

<sup>3</sup> Ian G. Barbour, *Contemporary Issues in Science and Religion* (New York: Torchbooks Harpers Row Publishers, 1996). Barbour menggunakan istilah kontemporer untuk menggambarkan isu-isu dalam ilmu pengetahuan dan agama menurut tipologi zaman sejarah.

<sup>4</sup> Perdebatan terminologis tentang istilah "posmodernisme" dapat dibaca pada Bryan S. Turner, *Teori-Teori Sosiologi Modernitas dan Posmodernitas*, terj. Imam Bachaqi dan Ahmad Baidlowi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 3- 45, pada bab Pendahuluan: Mendefinisikan Posmodernitas.

dianalisis dan dirincikan. Kita patut bertanya kepada diri kita sendiri: apakah hakikat zaman kita.<sup>5</sup>

Menurut Mahmuddin, dakwah kontemporer adalah dakwah yang menggunakan fasilitas teknologi modern.<sup>6</sup> Dakwah kontemporer sangat cocok dilakukan di lingkungan kota atau masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan menengah atas. Persaingan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang periklanan merupakan tantangan bagi para dai untuk segera berpindah dari kebiasaan dakwah kultural ke dakwah kontemporer).

Menurut Sokhi Huda skesta konsep dakwah kontemporer meliputi dua hal, yaitu: (1) kerangka filosofis dan (2) kerangka metodis.<sup>7</sup> Menurutnya, ada tiga alasan dalam penentuan fokus tersebut, yakni: (1) istilah kontemporer merupakan istilah tipologi zaman historis, dan oleh karenanya niscaya diperlukan kerangka filosofis sebagai pisau bedah utama, (2) agar diperoleh landasan bagi metode aktivitas, maka kerangka metodis perlu diproporsikan, (3) alasan pertama dan kedua dipandang layak untuk ukuran sketsa konsep.

Menurut Abdul Basit ada beberapa cara yang cerdas dalam berdakwah di era modern. Menurutnya, ada empat hal yang bisa dilakukan dalam berdakwah di era kontemporer: (1) Dakwah dapat dikembangkan sebagai objek ilmu yang dapat diteliti dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, (2) Mengubah paradigma ilmu dakwah menjadi ilmu komunikasi Islam dengan cara menyintesis teori-teori ilmu komunikasi dengan teori-teori dakwah yang bersumber dari ajaran Islam, (3) Dai harus memiliki kemampuan sesuai dengan perkembangan IPTEK, (4) Memanfaatkan media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Hal ini senada sesuai dengan pendapat Andi Faisal Bakti yang menyebutkan bahwa pengembangan teori komunikasi seperti, media massa memang digunakan untuk menyebarkan informasi, baik melalui radio maupun televisi dengan format programnya yang bervariasi seperti pertunjukan *spot*, drama, laporan, diskusi, dan serial reguler.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Michel Foucault, *Strucrualism dan Post-Structuralism: an Interview*, (Telos: 1983), h. 206.

<sup>6</sup> Mahmuddin, "Dakwah Kontemporer dan Radikalisme Agama di Bulukumba", *Jurnal al Ulum*, Volume 16 No.02 Desember 2016.

<sup>7</sup> Sokhi Huda, *Menggagas Sketsa Konsep Dakwah Kontemporer (Perspektif historis-paradigmatik)*, t.th.

<sup>8</sup> Abdul Basit, "Berdakwah Dengan Cerdas", *Jurnal Komunikasi Islam UIN Surabaya*, Nomor 01, Juni 2013, h. 77.

<sup>9</sup> Andi Faisal Bakti, *"Communication and Family Planing in Islam Indonesia: South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program"*, Jakarta: INIS, 2004. h. 40.

Tabel 1  
*Development-communication Theory*

<i>Theory/Model</i>		<i>Strategy</i>	<i>Determinant Factor</i>
1	<i>Diffusion of innovation</i>	<i>Transfer of technology</i>	<i>Receiver is passive</i>
2	<i>Social marketing</i>	<i>Ideas, processes, practices through mass media</i>	<i>Receiver is passive</i>
3	<i>Participatory</i>	<i>Empowerment to act on their own behalf</i>	<i>Dynamic interactions between S-R (through agents of change)</i>
4	<i>Active-reception</i>	<i>Promotion of individuals</i>	<i>Meaning is negotiated for emancipation, freedom and democracy.</i>

Sumber Andi Faisal Bakti.<sup>10</sup>

Perubahan paradigma keilmuan dakwah menuju komunikasi Islam, menurut Andi Faisal Bakti, dengan cara mengadopsi bangunan teori yang ada di dalam ilmu komunikasi umum (sekuler). Menurutnya, penafsiran modern dari nilai-nilai Islam harus dibawa ke dalam komunitas non muslim sehingga Islam dapat dipahami. Demikian juga, nilai-nilai yang bersumber dari Barat dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan Islam. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, Bakti membuat matrik tentang ilmu komunikasi Islam (ilmu dakwah) sebagai berikut:

Tabel 2  
Matrik Ilmu Komunikasi Islam

<i>Islamic communication (da'wah)</i>	<i>Secular communication</i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tabligh (tanzir, ta'aruf)</i></li> <li>2. <i>Taghyir (nafs, qaum, ummah, tawhid)</i></li> <li>3. <i>Amar ma'ruf nahi munkar (amanu, amal shalch, al-haq, al-sabr)</i></li> <li>4. <i>Akhlaq (al-maw'izah, al-hikmah, ahsanul mujadalah, al-karimah, la-fitnah, la-zhan, ta'awun, mushawarah/shura)</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Information (SMCR, EConvergence, Active Recipient)</i></li> <li>2. <i>Change (modernization, dependency, multiplicity)</i></li> <li>3. <i>Development (Diffusion of Innovation, social marketing, participatory, self Help)</i></li> <li>4. <i>Ethics / wisdom</i></li> </ol>

Sumber: Andi Faisal Bakti<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Ibid*, Andi Faisal Bakti, h. 39-40.

Pendapat Bakti diperkuat oleh pendapat Hamid Mowlana<sup>12</sup> yang menyatakan bahwa dakwah (*tabligh*) merupakan sebuah teori tentang komunikasi dan etika (*tabligh is a theory of communication and ethics*). Dalam bahasa yang lain, Toto Tasmara<sup>13</sup> menyatakan bahwa dakwah adalah komunikasi khas yang berbeda dengan komunikasi lainnya, terutama berkaitan dengan cara dan tujuan yang akan dicapai.

Era kontemporer yang diwarnai oleh kemajuan bidang teknologi informasi, turut memacu akselerasi dalam transformasi budaya, ideologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, pada realitas objektif, dakwah tertuntut untuk merespons kecenderungan era kontemporer tersebut dengan mengakselerasi pendekatan-pendekatan yang efektif dan produktif, sama halnya pada metode-metode dan teknik-tekniknya. Karena dakwah pada era kontemporer menghadapi tantangan baru searah dengan kecenderungan arus zaman. Berbagai pendekatan yang sudah mapan atau dianggap mapan pada dekade sebelumnya<sup>14</sup> memerlukan koreksi dan revisi di era ini. Beberapa problema besar yang dihadapi dalam dakwah di era kontemporer ini adalah:

- 1) Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral *communication* (*tabligh*) sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan ceramah.
- 2) Problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, tetapi memerlukan rujukan teori-teori dakwah sehingga lebih efektif.
- 3) Problem yang menyangkut SDM.
- 4) Aktivitas dakwah masih dilakukan sambil lalu atau menjadi profesi sampingan. Implikasinya banyak bermunculan dai yang kurang profesional.

---

<sup>11</sup> Andi Faisal Bakti, “*Applied Communication to Dakwah for Peace*”, makalah dipresentasikan pada Kuliah Umum di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar 1 September, 2009, h. 9.

<sup>12</sup> Hamid Mowlana, *Global Communication in Transition the End of Diversity* London: Sage Publications, 1996, h. 116.

<sup>13</sup> Toto Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 1997, h. 39.

<sup>14</sup> Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, Edisi Revisi ke-3, 2012), 345-349; Muhammad Abû al-Fath al-Bayânûnî, *al-Madkhal ilâ ‘Ilm al-Da‘wah* (Beirut: Muassasat al-Risâlah, 1993), h. 195-198. Rabi‘ b. Hâdî al-Madkhalî, *Manhaj al-Anbiyâ’ fi al-Da‘wah ilâ Allâh fi al-Hikmah wa al-‘Aql* (Kuwait: Dâr al- Salafiyah, 1987); ‘Alî ‘Abd Halîm Mahmûd, *Fiqh al-Da‘wah al-Fardiyyah* (Mesir: Dâr al- Wafâ, 1992); A. Ezzati, *The Sprcad of Islam: Contrbuting Factors* (Willesden, London: Islamic College for Advanced Studies Press/ICAS, 2002).

- 5) Rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi dan lemahnya managerial yang dilakukan dai dalam mengemas kegiatan dakwah.

Fenomena mengaji al-Qur'an dengan menggunakan *hand phone*, seorang muslimah menggunakan jilbab yang modis, umrah sebagai *trend* wisata *religius*, curhat masalah agama dengan menggunakan *Twitter* dan *Facebook*, pengajian di kantor-kantor dan hotel-hotel, *training* keagamaan dengan biaya mahal, gerakan shalat dhuha di perusahaan-perusahaan, gerakan wakaf uang dan lain sebagainya, merupakan fenomena adanya perubahan-perubahan dalam keberagamaan seorang muslim.<sup>15</sup>

Di era modern inipun, dakwah tidak hanya disampaikan di dalam suatu majlis dan podium saja (dakwah dengan media konvensional)<sup>16</sup> namun dakwah bisa dilakukan di mana saja, kapan saja dan dengan berbagai cara, orang bisa belajar agama Islam. Masyarakat sekarang ini tidak hanya mengandalkan ulama sebagai sumber satu-satunya untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan. Masyarakat bisa memanfaatkan televisi, radio, surat kabar, *hand phone*, video, CD-room, buku, majalah dan buletin. Bahkan, internet sekarang ini menjadi media yang begitu mudah dan praktis untuk mengetahui berbagai persoalan keagamaan, mulai dari masalah-masalah ringan seputar ibadah sampai dengan persoalan yang pelik sekalipun, semua sangat mudah untuk diketahui dan didapatkan. "*Mbah Google*" seringkali dijadikan sebagai sumber dan rujukan utama untuk mendapatkan pengetahuan keagamaan.

Kemajuan IPTEK ditengah arus globalisasi yang cepat saat ini adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Selain memberikan berbagai manfaat yang telah dirasakan, kemajuan IPTEK juga membawa disruptif atau perubahan cepat yang mendasar. Dampak disruptif akibat kemajuan IPTEK ini, telah dan akan mengubah cara manusia dalam beraktifitas, berbisnis, memproduksi, bertransaksi dan berinteraksi.

Kata-kata seperti *disruption*, *disruptive innovation*, *disruptive tech- nology*, *disruptive mindset*, *disruptive leader*, dan seterusnya kian menjadi begitu populer dalam kalangan pendidikan tinggi dan

---

<sup>15</sup> Abdul Basit, "Berdakwah Dengan Cerdas", *Jurnal Komunikasi Islam UIN Surabaya*, Nomor 01, Juni 2013, h. 77. Pengguna *twitter* di Indonesia sebesar 9,9 juta (per 2011) merupakan pengguna terbesar keempat di dunia setelah Belanda, Jepang dan Brasil. Sedangkan pengguna *facebook* di Indonesia sebesar 35 juta per 2011 merupakan pengguna terbesar kedua di dunia setelah AS, 152 juta. (Kompas 2011).

<sup>16</sup> Dakwah konvensional adalah semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan banyak orang. Arti kata konvensional seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang ketinggalan jaman kuno atau cara-cara tradisional yang sudah tidak sesuai dengan kondisi jaman sekarang.



masyarakat luas. Seperti diuraikan secara luas oleh Rhenald Kasali dalam bukunya *Dis-ruption*, istilah “*disruption*” mula-mula muncul dalam konteks bisnis, investasi dan keuangan.<sup>17</sup> Tetapi kemudian meluas pengaruhnya dalam banyak bidang kehidupan: politik, dunia hiburan, pemerintahan, sosial, kepemimpinan, dan pendidikan.

Menurut Bayu Setiaji,<sup>18</sup> disrupsi adalah sebuah inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disrupsi berpotensi menggantikan pemain-pemain lama dengan yang baru. Disrupsi menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat. Era disrupsi sudah banyak memengaruhi berbagai sektor bisnis. Seperti contoh, (1) Penyewaan film ternama seperti Blockbuster, mengalami kebangkrutan dan terpaksa menutup 129 gerainya pada awal 2013 setelah kalah bersaing dengan Netflix dan iTunes. (2) Raksasa penyewaan buku, Barnes & Noble juga kewalahan menghadapi persaingan dengan toko buku online seperti Amazon.com. Terlebih, maraknya website-website digital yang menyediakan file buku berbentuk PDF dan *ebook* turut memengaruhi perubahan dalam sektor bisnis tersebut.<sup>19</sup>

Beberapa contoh disrupsi lainnya adalah media cetak menjadi media *online* atau situs berita, ojek tradisional yang mati karena ojek *online*, atau manajemen taksi Blue Bird yang menghadapi serbuan Uber dan Grab, taksi konvensional atau taksi argo menjadi taksi *online* dan pada akhirnya harus bekerja sama, *mall* atau pasar menjadi *marketplace* atau toko *online* (*e-commerce*), dan digitalisasi lainnya. Contoh disrupsi di bidang politik, misalnya kampanye, kini lebih “meriah” di media sosial dan memiliki daya jangkauan *audience* yang jauh lebih luas dan merata. konten-konten yang diproduksi melalui proses produksi yang standar, profesional dan akuntabel itu begitu mudah berpindah medium karena praktik agregasi konten di media berbasis Internet. Kampanye di media sosial, seperti “perang tagar” dan “*tweet war*” (*twar*) lebih seru dari pada orasi di lapangan terbuka dengan ratusan atau ribuan orang dan lain-lain.

Menurut Bayu Setiaji era disrupsi juga disebut era gangguan yang mengakibatkan industri tidak berjalan seperti biasanya karena bermunculannya kompetitor baru yang jauh lebih efisien dan efektif,

---

<sup>17</sup> Rhenald Kasali, *Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi, Motivasi saja tidak cukup* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm.139

<sup>18</sup> Bayu Setiaji, Direktur dari PT Lutan Edukasi. <https://biz.kompas.com/read/2020/03/11/230918328/tips-tips-agar-siap-menghadapi-era-disrupsi>. Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020.

<sup>19</sup> Bayu Setiaji, <https://biz.kompas.com/read/2020/03/11/230918328/tips-tips-agar-siap-menghadapi-era-disrupsi>. Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020.

serta penemuan teknologi baru yang mengubah peta bisnis. Tentunya pemain lama harus berpikir ulang bagaimana mengubah dan meng*upgrad* sekaligus mengimplementasikan strategi baru dalam era disrupsi ini.

Banyak organisasi dan bisnis yang cemas akan mengalami kebangkrutan karena disrupsi teknologi. Apalagi dalam dua dekade terakhir, evolusi teknologi informasi dan komunikasi yang telah menghadirkan perubahan fundamental diberbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktek bisnis modern. Perubahan yang cepat dari lingkungan bisnis serta kebutuhan pelanggan, membuat tantangan baru bagi pelaku bisnis agar dapat beradaptasi dan bertransformasi dengan lingkungan baru. Jika tidak dilakukan, bukan tidak mungkin kejadian Blockbuster dan Barnes & Noble akan menimpa para pembisnis lainnya.

Dalam Performance Consulting, Acara diskusi *Reinventing a New Corporate Growth with Radical Change, Creativity, Agility, & Technology in Disruptive* Era pada tanggal 15-16 April 2020 di Jakarta, Bayu Setiaji menyebutkan beberapa tips agar siap menghadapi era disrupsi karena suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*). Beberapa tips tersebut di antaranya: meningkatkan kualitas SDM, melakukan inovasi, mengadopsi teknologi digital, dan bersiap menghadapi perubahan.

Dakwah kontemporer telah memberikan banyak perubahan (disrupsi) pada sektor social budaya, keagamaan, maupun politik. Perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat akibat perubahan teknologi komunikasi, di antaranya meliputi : (1) berubahnya tata dan perilaku masyarakat; (2) timbulnya norma-norma dan kebiasaan baru; (3) perubahan pada status/kedudukan; (4) perubahan pada tingkat kecerdasan; (5) perubahan pada tingkat kekuasaan ekonomi/politik; (6) budaya baru, budaya kosmopolitan.<sup>20</sup>

Era disrupsi pun telah memberikan dampak pada perubahan sosial, politik dan keagamaan di Indonesia. Menurut Arif Budisusilo *Political disruption* yang tak terkendali bisa mengarahkan perubahan ideologi, apabila tidak ditangkal dengan cara-cara yang *disruptive* pula. Sebaliknya, *disruption* akan menjadi berkah, apabila dapat dimanfaatkan untuk membangun nilai-nilai kebangsaan yang efektif. Kuncinya adalah narasi dan konten, antara lain disiplin, cinta Tanah Air, dan mentalitas produktif. Bukan sebaliknya, hari-hari kita digerogeti virus kontraproduktif, karena setiap saat melihat gadget

---

<sup>20</sup> Assegaff Djafar H, *Islam dan Tantangan Abad Informasi*, (Jakarta: Media Sejahtera, 1993), h. 35.

dengan informasi-informasi yang memecah belah, provokatif dan membuat kita menjadi bangsa yang lemah dan tidak produktif.<sup>21</sup>

Menurutnya (Arif Budisusilo)<sup>22</sup> Mungkin tak banyak yang menyadari bahwa kemenangan Presiden baru Prancis, Emmanuel Macron, sedikit banyak adalah bagian dari proses, bolehlah saya pinjam istilah: *political disruption*. Dia menggunakan cara-cara “*disruptive*” untuk mengalahkan Le Pen, pesaingnya yang dimotori gerakan “ultra kanan” yang dijuluki sebagai “patriot”, versus pengikut Macron yang dicap “globalis”. Maka, kemenangan Macron seolah membalik proses disrupsi yang terjadi pada kemenangan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat.

Di Indonesiapun pernah mengalami peristiwa politik luar biasa, bukan hanya warga Jakarta, melainkan dirasakan oleh hampir mayoritas Indonesia, yaitu peristiwa Anies Baswedan yang telah memenangi Pilkada DKI yang berhasil menggulingkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Yang sudah kalah dalam pemilihan namun masuk penjara juga. Tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa politik tersebut, bagi para politisi dan seluruh warga, bukan hanya Jakarta melainkan seluruh Indonesia. Anies memenangi Pilgub dengan proses politik yang sepertinya kompleks dan rumit, tetapi sebenarnya sederhana. Pilkada DKI adalah bagian dari disrupsi politik, sebuah proses perubahan yang telah terjadi di mana-mana.

Ideologi dan politik (kekuasaan) merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya membutuhkan eksistensi (keberlangsungan) berupa kebudayaan hidup (*lived culture* atau budaya *amali*). Branston dan Stafford berpendapat bahwa keberlangsungan yang dimaksud selalu diwujudkan dalam bentuk hegemoni. Akal sehat atau perasaan bersama (*common sense*) sebagai bagian dari ideologi<sup>23</sup> yang dibentuk dari pendapat dominan dan eksistensi fisik (material) dalam tradisi

---

<sup>21</sup><https://kabar24.bisnis.com/read/20170606/15/659930/political-disruption-berkah-atau-kutukan>. Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020.

<sup>22</sup> Praktisi komunikasi, lahir di Wonogiri pada tanggal 26 Mei 1968. Menjabat sebagai direktur pemberitaan sejak tahun 2012 dan Chief Editor sejak tahun 2009 di Bisnis Indonesia (PT Jurnalindo Aksara Grafika) hingga sekarang.

<sup>23</sup> Pengertian Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, budaya (kebudayaan), dan agama (keagamaan). Salah satu teori klasik tentang ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted* (Suharyo, Surono, Mujid F. Amin, *HUMANIKA* Vol. 19 No. 1 (2014) ISSN 1412-9418 “Bahasa dan Ideologi : Mengungkap Ideologi dan Kekuasaan Simbolik”, h. 46-47).

atau budaya. Hal ini diperkuat oleh Connell dan Strinati dengan analogi nasionalisme.<sup>24</sup>

Menurut Azyumardi Azra, pada dasarnya di dalam Islam tidak ada pemisahan antara agama (*din*) dan politik (*siyasah*). Pada masa awal Islam, setelah Islam hijrah ke Madinah, nabi Muhammad membangun bentuk negara-negara kota (*city state*) di Madinah yang bersifat ketuhanan.<sup>25</sup> Dalam perjalanan sejarah, dari bentuk Negara semacam itu berkembang konsep yang disebut sementara pemikir politik Islam, seperti al-Mawdudi, sebagai negara teo-demokratik, karena juga berdasarkan pada prinsipnya *shūrā* (musyawarah).

Menurut John L. Esposito Fenomena yang dikenal sebagai Islam politik berakar pada kebangkitan agama kontemporer dalam kehidupan pribadi dan publik.<sup>26</sup> Di satu sisi, banyak Muslim menjadi lebih taat terhadap praktik keimanan mereka (sholat, puasa, pakaian, dan keluarga). Di sisi lain, Islam telah muncul kembali sebagai alternatif dari anggapan kegagalan ideologi sekuler seperti nasionalisme, kapitalisme, dan sosialisme. Simbol, retorika, aktor, dan organisasi Islam telah menjadi sumber legitimasi dan mobilisasi, menginformasikan aktivisme politik dan sosial.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Islam, politik hanyalah salah satu media untuk mencapai tujuan dakwah. Bukan sebaliknya, dakwah justru dijadikan media untuk mencapai tujuan politik. Istilah kebangkitan dakwah tidak memiliki arti berbeda dengan istilah kebangkitan Islam yang digunakan secara luas ketika mempertimbangkan *al-sahwah* atau kebangkitan politik Islam. Dakwah merupakan konsep penting dalam Islam yang mengandung arti kewajiban seluruh umat Islam untuk menjalankan kewajiban menyampaikan pesan-pesan Islam kepada

---

<sup>24</sup> Robert Connell, *Masculinities* (Cambridge : Polity, 1995), 7. Lihat juga Dominic Strinati, *An Introduction to Theories of Popular Culture* (London : Routledge, 1995), h. 7. Keduanya berpendapat bahwa dunia modern bukan penghalang terhadap kolektivitas nasionalisme di kala genting atau damai. Hal ini didasari oleh perasaan bersama (berupa berkewarganegaraan yang sama) dan eksistensi fisik (berupa ID Card dan bertempat tinggal di negara yang sama).

<sup>25</sup> Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media Group (Kencana), h. 25.

<sup>26</sup> John O. Voll, and John L. Esposito, *The Contemporary Islamic Re-vival: A Critical Survey and Bibliography* (New York: Greenwood Press, 1991); John L. Esposito, *Islam and Politics, 3rd ed.* (Syracuse: Syracuse University Press, 1991); John L. Esposito, editor, *Islam in Asia: Religion, Politics and Society* (New York: Oxford University Press, 1987); James P. Piscatori (ed.), *Islam in the Political Process* (New York: Cambridge University Press, 1983); and Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (New York: Routledge, 1991).

<sup>27</sup> John L. Esposito, *Political Islam and the West*, Center for Counterproliferation Research National Defense University Washington, DC 20319-5066, JFQ/Spring, 2000, h. 50.

seluruh umat manusia. Kewajiban yang diserukan oleh Islam bagi umat Islam untuk memanggil orang-orang untuk menyembah Allah sebagai Tuhan, satu-satunya Tuhan (Surat al-Nahl: 36) dan menetapkan Islam sebagai cara hidup (Ali Imran: 85).

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

Artinya: “Dan sungguh, Kami mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah, dan jauhilah *Thaghut*” kemudian diantara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul) (QS. al-Nahl: 36).<sup>28</sup>

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi (QS. Ali Imran: 85).”<sup>29</sup>

Dakwahpun terus mengalami transformasi menjadi kebangkitan Islam yang kadang-kadang disebut sebagai Islam politik. Kebangkitan dakwah Islam dianggap sebagai upaya untuk memulihkan atau mengubah jenis negara. Negara dipandang sebagai alat dakwah yang paling strategis. Dakwah struktural memegang tesis bahwa dakwah yang sesungguhnya adalah ajaran Islam yang berusaha mewujudkan negara bangsa yang berdasar atas Islam, para pelaku politik menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam perilaku politik mereka, serta penegakan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara dan kekuasaan. Dalam perspektif dakwah struktural, negara adalah instrumen paling penting dalam kegiatan dakwah.

Di sinilah reaktualisasi dakwah perlu terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Foucault, kekuasaan bukan merupakan sebuah benda yang bisa dimiliki, diberikan atau dipindahtangankan. Kekuasaan merupakan suatu strategi yang kompleks dalam sebuah masyarakat dengan mekanisme tertentu. Kekuasaan pada dasarnya dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan senantiasa mengalami pergeseran.<sup>30</sup>

Salah satu contoh politik dakwah yang pernah di terapkan oleh pemerintahan Orde Baru telah menyebabkan polarisasi umat Islam

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2007, h. 271.

<sup>29</sup> *Ibid*, Departemen Agama RI, h. 61.

<sup>30</sup> Kurnia Novianti, “Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama Dalam Perspektif Antropologi”, *Harmoni*, Mei-Agustus 2013, h. 16.



menjadi tiga kategori besar. 1) Kelompok yang menerima dan terlibat secara intens dalam dakwah secara struktural sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kelompok ini menjadi bagian dari kekuasaan dan karenanya dakwah yang disampaikan dimaksudkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan sesuai dengan kepentingan stabilitas kenegaraan sebagai garis utama Orde Baru. Oleh karena itu, pilihan dakwah di balik kekuasaan tersebut bisa menjadi jalan yang mendekatkan pemerintah dengan umat Islam yang karena beberapa kasus mengalami kerenggangan. 2) Kelompok yang menerima kebijakan pemerintah sebagai bagian (keniscayaan) dari upaya pembangunan nasional, tetapi tidak terlibat secara struktural dalam dakwah pemerintah. Kelompok tersebut memperlihatkan jalan (dakwah) simbolis mutualisme dan mereka menjadi partner pemerintah tanpa harus melibatkan dirinya di dalam kekuasaan. 3) Kelompok yang mengambil jalan besebrangan dengan pemerintah. Mereka menjadikan dakwah sebagai sarana kritik terhadap pemerintah yang dianggapnya anti Islam dan karenanya harus dilawan. Di era kebebasan dan keterbukaan politik inilah dakwah menjadi mercusuar sehingga mampu menjadi penerang dan petunjuk jalan kebenaran agama.

Di sinilah strategi berlangsung di mana-mana. Artinya, di mana terdapat susunan, aturan-aturan, dan sistem regulasi, serta manusia yang saling berhubungan dengan yang lain, maka di situ pula kekuasaan bekerja.

NU adalah organisasi sosial keagamaan yang independen dan mempunyai kebebasan dalam menentukan sikap dan langkahnya. NU menjunjung tinggi demokrasi, konstitusi, dan hukum. NU menghargai keterbukaan, kooperatif, ideologis, moderat, dan pluralis.<sup>31</sup> Karena itu NU menentang segala bentuk diskriminasi, radikalisme, anarkisme, dan terorisme.<sup>32</sup> Spesifikasi NU yang membedakan dengan organisasi lainnya adalah agenda mengusung Aswaja (*ahl al-sunnah wa al-jamā'ah An Nahdliyah*). Dalam tataran aplikatif, paham aswaja dijabarkan dalam naskah khittah NU 1926 yang merupakan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai Aswaja NU.

Wacana yang ada didalam organisasi kemasyarakatan NU sering menjadi daya tarik tersendiri bagi para ilmuwan dan para peneliti untuk menelitinya dan tak jarang juga banyak yang kemudian mengulitinya. hal tersebut disebabkan karena selain sebagai organisasi kemasyarakatan yang terbesar di Indonesia yang diperhitungkan, juga

---

<sup>31</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam; Muslim and Democration in Indonesia*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000).

<sup>32</sup> Aceng Abdul Aziz, M. Harfin Zuhdi, dkk, *Islam Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 2016), h. 175.



karena keberanian NU yang tampil beda ditengah konstelasi sosial politik.

Sebagai contoh, istilah Islam Nusantara yang kembali mencuat pada tahun 2015an yang lalu. Dalam NU, Islam Nusantara bukan hanya sebatas kajian/wacana/konsep yang ditawarkan oleh ulama-ulama Indonesia,<sup>33</sup> tetapi PBNU sebagai cendekiawan-cendekiawan Indonesia bertujuan agar Islam Nusantara bisa menjadi modal penting dalam membangun peradaban global, sesuai dengan tujuan dan wawasan Islam Nusantara yang berprinsip Aswaja dan mengedepankan ciri Islam yang *rahmatan li al-‘ālamīn*. Implementasi dari hal itu adalah terciptanya kehidupan keagamaan yang harmonis walaupun berbeda agama, keyakinan dan pemahaman.<sup>34</sup>

Karakter Islam Nusantara adalah sikap *tawassut*, sikap *i’tidāl*; Sikap *tasāmuh*; sikap *tawāzun*, serta selalu berupaya mencari titik temu (konvergensi) di antara berbagai madzhab pemikiran dan aliran keagamaan.<sup>35</sup> Islam Nusantara, sebuah ciri khas dalam memaknai sekaligus mengekspresikan nilai-nilai Islam. Islam Nusantara warisan Wali Songo.<sup>36</sup>

Azyumardi Azra mengartikan Islam Nusantara secara umum adalah Islam yang berbeda (*distingtif*) sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara (kalam Asy’ari, fikih Syafi’i, dan tasawuf Ghazali) menumbuhkan karakter *wasatiyyah* yang moderat dan toleran.<sup>37</sup> Islam

---

<sup>33</sup> Mukhtar ke-33 tahun Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur. 1 Agustus hingga 5 Agustus 2015 dengan tema utama “*Mengguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia*”. Menurut A. Khairul Anam, wakil pimpinan redaksi NU Online PBNU menyebutkan istilah Islam Nusantara mulai *booming* ketika menjadi tema mukhtar, namun penyebutannya itu sudah lama, 3 tahun saya bersama mas Baso mengelola buletin jum’at Islam Nusantara dari semenjak 2007-2008an dan sebelumnya juga ada jurnal IN, bisa di cek di NU *Online*. (Wawancara penulis pada hari: Minggu, tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

<sup>34</sup> PBNU, *Hasil-hasil Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta’lif wan Nasyr PBNU/LTN: 2016), h. 212.

<sup>35</sup> Said Aqil Siraj, *Rekonstruksi Aswaja Sebagai Etika Sosial*, dalam Sahal dan Aziz (eds.), *Islam Nusantara*, h. 148-149.

<sup>36</sup> Khabibi Muhammad Lutfi, “Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal”, *Shahih*, Vol. I. Nomor I, Januari-Juni 2016 (LP2M IAIN Surakarta), h. 2

<sup>37</sup> Azyumardi Azra, *Islam Nusantara*, 2000. [www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1](http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1) Azyumardi Azra membantah identitas IN yang melekat pada diri NU (Mukhtar NU ke-33 pada 2015). Hal ini diwujudkan dengan tulisannya yang berjudul: *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* di tahun 2002 (Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Jakarta: Mizan, 2002), 1-300).

Nusantara yang kaya dengan warisan Islam (*Islamic legacy*) menjadi harapan renaissance peradaban Islam global.

Menurut Ahmad Baso, Islam Nusantara menjadi kunci dalam mengamalkan Islam Aswaja, yakni mengajarkan kita istiqamah menjalani sunnah Rasulullah, sekaligus membangun kehidupan beragama dan berbangsa yang selalu *guyub*,<sup>38</sup> hidup bersama, dan solid dengan sesama.<sup>39</sup>

Dalam kajian ideologi dan kekuasaan (politik), Gill Branson dan Roy Stafford menyebutkan banyak unsur-unsur turunannya diantaranya pendekatan marxist, post marxist, critical pluralism, kebudayaan yang hidup, namun penulis membatasi kepada tiga hal yaitu: 1) Aliran kiri baru,<sup>40</sup> 2) Pluralisme kritis (*critical pluralisme*)<sup>41</sup> dan 3) Kebudayaan amali (*lived culture*).<sup>42</sup>

Pro kontra terhadap pemikiran-pemikiran yang terjadi di dalam tubuh NU sebagai corak pemikiran NU yang terlalu ke kanan (fundamentalisme religius) maupun ke kiri (liberalisme religius) yang dipelopori oleh kader-kader muda NU. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemikiran yang ada di dalam NU yang kemudian

---

Islam Nusantara representasi identitas Nahdlatul Ulama. Dijk membenarkan pendapat tersebut dengan menjabarkan identitas melalui tiga kategori berupa identitas personal, identitas kelompok (group), dan identitas sosial (Teun A. Van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach* (London dan New Delhi: SAGE Publication, 1998), h. 118-122.

<sup>38</sup> *Guyub* adalah istilah Jawa yang memiliki arti rukun/hidup rukun, bersama dan damai.

<sup>39</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Afid: 2015), h. 33

<sup>40</sup> Kiri Baru adalah gerakan politik pada tahun 1960-an dan 1970-an, terutama terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, yang terdiri dari pendidik, agitator dan lain-lain yang berusaha untuk menerapkan berbagai reformasi pada isu-isu seperti hak gay, aborsi, peran gender, obat-obatan, dll. Kaitannya dengan disertasi: apakah didalam PBNU itu terdapat aliran-aliran kiri baru/ pemikiran-pemikiran kiri? mengingat wacana-wacananya/ ide-idenya yang kerap menimbulkan pro dan kontra, karena corak pemikiran NU yang terlalu ke kanan (fundamentalisme religius) maupun ke kiri (liberalisme religius) yang dipelopori oleh kader-kader muda NU, seperti mengenai masalah; perempuan, menurut Gus Dur perlu ada pergeseran paradigma (*shifting paradigma*) bahwa perempuan memiliki kesetaraan dengan lawan jenisnya. Bahwa Kesadaran gender perlu disosialisasikan agar perempuan Indonesia *self confident*, kajian HAM, termasuk kajian Islam Nusantara.

<sup>41</sup> Ada yang mengatakan bahwa NU itu dikatakan oportunis, sinkritisme, mencampuradukan ajaran agama dari pluralisme kritis ini saya akan mengetahui bagai mana pluralisme ini diperjuangkan, dipertahankan dan di bela dalam NU?

<sup>42</sup> *Lived culture* adalah tradisi budaya yang selalu berubah-ubah atau cultur yang hidup. Bagaimana tradisi/ budaya ini tetap hidup mengingat tradisi-tradisi itu yang kemudian tetap dihidupkan oleh NU dan seperti apa bentuk budaya yang dikembangkan oleh NU itu?

menggelisahkan warga NU dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Hal tersebut disebabkan: (1) Secara historis, pemikiran moderat NU tidak menolak adanya dinamika dan modernisme paradigma berfikir. Hal tersebut merupakan cerminan dari fleksibilitas pemikiran yang bisa ke kanan, ke kiri, atau tetap di garis tengah. Menurut Abdurrahman Wahid, aneka pemikiran yang dilontarkan cukup brilian dan tidak melampaui batas normatif ke-NU-an. Bisa ke kanan, bisa kekiri atau tetap di tengah. Menurutnya, corak pemikiran NU merupakan “kawin campur” antara agama dan ilmu-ilmu sosial humaniora.<sup>43</sup>

Menurut R. William Liddle dalam seminar internasional di *Czech Academy of Sciences*, Praha, 9/6/2006. Ia mengatakan bahwa, Tidak ada sayap kiri dalam lingkungan politik Indonesia. Namun kemunculan parpol-parpol Islam telah menggantikan posisi sayap kiri itu. Saat meletus gerakan reformasi 1998 dan presiden Soeharto tumbang, sebenarnya terdapat peluang untuk membentuk partai berhaluan kiri, namun hal itu tidak terjadi karena sayap kiri di Indonesia diidentikan dengan komunis. Kemunculan parpol-parpol Islam telah menggantikan kekosongan peran sayap kiri itu.<sup>44</sup>

Adanya tuduhan lain terhadap NU yang oportunis muncul karena tindakan politik kiai NU yang sering berubah, bergeser atau berpindah pindah. Karena adanya kontroversi ini, ada urgensi untuk mencari perspektif baru yang lebih tajam dan telaah yang lebih mendalam tentang hal tersebut Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*, Greg menulis bahwa ada dua wacana ilmiah utama dalam historiografi NU. Pertama, yang sangat kritis terhadap NU, dapat disebut sebagai wacana yang didominasi modernis. Kedua, yang

---

<sup>43</sup> Menurut Jabir Alfaruqi dalam tulisannya “NU, Fundamentalisme dan Liberalisme, *Nahdatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik ke Negara*”, h. 152; Lahirnya embrio pemikiran Islam liberal dan fundamentalis yang merestui banyak tokoh ulama dan kiai NU adalah ketika NU berganti pemimpin dari Abdurrahman Wahid ke Hasyim Muzadi. Ketika NU berganti pemimpin, NU tidak bisa lagi memberi angin segar dan ladang subur bagi proses berkembangnya pemikiran keislaman, sosial, dan kebudayaan bahkan dinilai telah menjerumuskan NU pada kubangan politik praktis yang berkutat pada kekuasaan. Tampilnya Hasyim Muzadi sebagai calon wapres tahun 2004 merupakan klimaks dari krisis di tubuh NU dalam aspek pemikiran kritis. Hal tersebut membuat NU tidak lagi sebagai produsen pemikiran segar, tetapi telah berubah menjadi organisasi yang defensif terhadap pembaruan pemikiran, sehingga NU menjadi statis, resisten, sibuk mengurus isu-isu internal yang kian kurang memikat untuk diwacanakan. Situasi dan kondisi seperti itu menjadikan kader-kader NU yang memiliki intelektual brilian mencoba mencari model pemikiran Islam Liberal dan Fundamental.

<sup>44</sup> R. William Liddle, “Islam Mengisi Sayap Kiri Politik Indonesia, *detikNews*”, Rabu, 11 Jun 2008. Diakses pada 03 Agustus 2019. Pukul. 11:19 WIB.

menggunakan pendekatan simpatik, dapat disebut wacana yang menghargai tradisi (tradisionalis).<sup>45</sup>

Sikap oportunis NU lainnya di era Orde Baru digambarkan oleh Munir Mulkan, yang menyebut NU menggunakan pendekatan fiqhiyah sebagai upaya legalisasi *religi* sesuai dengan rumusan teologisnya terhadap realitas objektif kehidupan sosial politik yang dihadapi. Berdasarkan hal itu, maka sikap dan perilaku politik NU dapat dengan segera berubah drastis. Misalnya, jika dalam pemilu 1982 dan sebelumnya NU berfatwa bahwa wajib hukumnya bagi pemeluk agama Islam untuk memilih partai Islam, maka dalam pemilu 1987, NU mengeluarkan fatwa yang sama sekali berbeda yaitu mewajibkan anggotanya untuk memilih Golkar.<sup>46</sup>

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti dalam penelitian ini ingin meneliti dan menganalisis dakwah kontemporer Nahdhatul Ulama (NU) persepsi disrupsi perubahan sosial, politik dan religius.

## **B. Pemasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

- a. Era kontemporer diwarnai oleh kemajuan yang pesat, utamanya bidang teknologi informasi, turut memacu akselerasi dalam trnasformasi budaya, ideologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Dakwah kontemporer menurut sebagian orang hanyalah dakwah yang menggunakan media dan teknologi saja, padahal indikator dalam dakwah kontemporer ada tiga yaitu, dai, media dan juga materi.
- c. Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral *communication* (*tabligh*) sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan ceramah (dakwah konvensional).

---

<sup>45</sup> Greg Fealy dalam *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta : LKiS, Cetakan IV, Desember 2009), h. 1-15. Greg menulis bahwa ada dua wacana ilmiah utama dalam historiografi NU. Pertama, yang sangat kritis terhadap NU, dapat disebut sebagai wacana yang didominasi modernis. Kedua, yang menggunakan pendekatan simpatik, dapat disebut wacana yang menghargai tradisi

<sup>46</sup> Abdul Munir Mulkan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Islam* (Yogyakarta: SIPRESS), 1984, h.114. Salah satu kiai sekaligus politisi NU yang dianggap oportunis adalah KH. Idham Chalid. Lihat Greg Fealy dalam Ahmad Muhajir, Idham Chalid: *Guru Politik Orang NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007), h. ix-xiii.

- d. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, tetapi memerlukan rujukan teori-teori dakwah sehingga lebih efektif oleh karena itu persepsi disrupsi terhadap perubahan sangat diperlukan baik dalam level perubahan social, politik maupun keagamaan.
- e. Di era disrupsi ini, masih ada sebagian kelompok yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak akomodatif terhadap tradisi lokal dan *ikhtilāf* ulama dalam memahami ajaran agamanya.
- f. Ada sebagian kelompok yang belum mengakui doktrinal Islam terhadap keabsahan eksistensi budaya dan kearifan lokal meskipun tidak bertentangan dengan prinsip tauhid.
- g. Adanya kesalahpahaman dan penolakan pelabelan Nusantara terhadap Islam karena dianggap sebagai pelemahan dan wujud ketidakpercayaan diri dari umat Islam itu sendiri.
- h. Adanya anggapan bahwa NU adalah organisasi masyarakat yang kekirian (berideologi kiri).
- i. Adanya anggapan bahwa NU itu oportunis.

## 2. Perumusan Masalah

Dari kerangka permasalahan di atas, rumusan masalah atau pertanyaan besar dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana strategi dakwah kontemporer NU dalam persepsi disrupsi perubahan sosial budaya, keagamaan dan politik?. Adapun rumusan pertanyaan turunan masalah tersebut adalah:

- a. Bagaimana dinamika dakwah konvensional dan kontemporer NU di era disrupsi?
- b. Bagaimana ideologi dakwah NU dan politik NU di era Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi dan Said Aqil Siraj?
- c. Apakah ada pemikiran kiri baru dan pluralism kritis dalam NU?
- d. Seperti apa tradisi/ budaya hidup/ budaya *amali* yang dijadikan instrumen dakwah NU?

## 3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka pembahasan penelitian ini dapat dibatasi sebagai berikut:

- a. Fokus pada Dakwah kontemporer NU persepsi disrupsi perubahan social, politik dan religious dengan mengacu pada teori Gill Brantson dan Roy Stafford.
- b. Penelitian ini disusun pada tahun 2017-2020 untuk melihat, mengukur dan memetakan praktik strategi dakwah NU Sejak 1998-2019.
- c. Pembatasan masalah ini difokuskan pada praktik dan strategi budaya sebagai instrumen dakwah NU di Pengurus Besar NU tahun 1998-2019.



### C. Tujuan dan Pernyataan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis dan mengkritisi konsep ideologi dan politik dalam dakwah kontemporer NU?, 2) Untuk menilai kecenderungan apakah ada pemikiran kiri baru dalam NU 3) untuk mengetahui sejauh mana pluralisme (pluralisme kritis) diperjuangkan dan dipertahankan dalam NU? 4) mencoba menganalisis tradisi/ budaya dijadikan instrumen dakwah NU (*lived culture*)?

Singkatnya tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisis dakwah kontemporer NU, perubahan dan disrupsi sosial budaya, politik dan keagamaan. sehingga penelitian ini menghasilkan kaidah keilmuan berupa: semakin masif aktualisasi ideologi melalui beragam varian politik, maka semakin luas pula pengakuan publik terhadap dakwahnya.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi telaah pengkajian Islam khususnya *trend* pemikiran Islam kontemporer (*trend of contemporary Islamic thought*) dan ilmu komunikasi khususnya berupa elaborasi teori-teori tentang wacana di media dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dan pembaca.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi konflik dan dapat memberikan masukan dan gambaran bagi khalayak khususnya para dai dan mahasiswa jurusan dakwah dan komunikasi tentang Islam Nusantara sebagai wacana atau model dakwah kontemporer yang elegan dan mencerahkan.

### E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

#### 1. Dakwah Konvensional dan Kontemporer NU

Tesis Siti Uswatun Khasanah tentang Memoar Dakwah; Semangat Dakwah Antara Dai yang terlahir Muslim dengan Dai yang Muallaf, dengan studi kasus PBNU, PP Muhammadiyah, Dewan Dakwah Pusat. Dengan melakukan wawancara kepada KH. Zakky Mubarak, KH. Syukron Makmun (Nahdatul Ulama), KH. Syuhada Bakhri (Ketua Dewan Dakwah Pusat), Drs. H. Buya Risman (Muhammadiyah), Hj. Irena Handono, H. Koko Liem, SQ.MA, dan H. Insan LS Mokoginta. Hasil riset menunjukkan bahwa semangat dakwah Islamiyyah yang dilakukan oleh dai muallaf terhadap penyebaran agama Islam lebih besar dibanding dai yang terlahir muslim karena dai yang terlahir muslim di dalam dakwahnya menggunakan *advance* (perkembangan atau pengembangan), ilmu kalam dan improvisasi dari syari'ah (fiqih). Sedangkan dai muallaf



didalam dakwahnya dengan menggunakan aqidah barunya, serta penyelaman pribadinya. Metode dakwah yang digunakan oleh dai-dai muslim adalah metode pengembangan dan lebih lembut (*soft*), sedangkan metode dakwah yang dilakukan oleh dai muallaf adalah *purification* dan cenderung lebih keras sedangkan media yang digunakan oleh dai yang terlahir muslim lebih menggunakan media tradisional/ konvensional dan dai yang terlahir muslim dengan menggunakan media kontemporer.

## 2. Pemikiran Kiri Baru

Beberapa pemikiran yang berkaitan dengan kiri Islam yang pernah diekspos oleh Kazuo Shimogaki, Judul buku asli: *Between Modernity and Postmodernity The Islamic Left and Dr. Hassan Hanafi's Thought: A Critical Reading* yang diterjemahkan dalam versi Indonesia oleh M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula, "Kiri Islam, antara Modernisme dan Postmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi." Membahas tentang gagasan kiri Islam Hassan Hanafi. Kiri menurut Kazuo adalah sebuah kelompok radikal, sosialis, komunis, anarkhis, reformis, progresif, atau liberal. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang konstruksi struktur masyarakat dan gagasan kiri Islam Hassan Hanafi juga menjelaskan tentang relevansi kiri Islam dengan Teologi Pembebasan.

Kiri Islam Hassan Hanafi; Mengurai Kemapanan Agama dan Politik adalah buku yang ditulis oleh Abad Badruzzaman, yang menjelaskan relevansi "Kiri" dengan agama Islam. dalam buku ini ditegaskan, bahwa Islam pada dasarnya adalah agama "Kiri", karena setiap nabi membawa ajaran pembebas bagi kaum yang tertindas.

Greg Barton, dalam bukunya Biografi Gus Dur. Judul Asli Gus Dur: *The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua (2002), membahas tentang perjalanan hidup Gus Dur dari semasa kecilnya dan perlawanannya atas rezim Orde Baru (ORBA), serta menjelaskan pula tentang kebijakannya selama membawa negara Republik Indonesia. Gus Dur dikatakan sebagai tokoh Kiri karena pembelaannya atas kaum minoritas yang marjinal dan kekritisannya dalam menjawab problema sosial kemasyarakatan dengan menggunakan keilmuan Barat dan Islam.

Ken Miichi, Peneliti JSPS (Japan Society for Promotion of Science) menulis tentang Kiri Islam, Jaringan Intelektual dan Partai Politik: Sebuah Catatan Awal. Tulisan tersebut memfokuskan pembahasan mengenai aktivis muda Nahdlatul Ulama dan keterlibatan mereka dalam jaringan intelektual kota dan gerakan sosial sejak 1970-an. Pada paruh terakhir 1990-an, terdapat banyak aktivis Organisasi Non Pemerintah (Ornop) jaringan NU yang memiliki buku-buku Kiri dan Post-Strukturalis, dan di sisi lain berkenalan dengan berbagai macam gerakan

sosial. Dalam riset tersebut, ia menuangkan tulisannya bahwa, orang memahami NU sebagai: Pertama, NU bukan organisasi modern yang birokratik dalam pengertian Max Weber, tetapi lebih tepat sebagai sebuah jaringan ulama dan pesantren mereka. Kedua, berbagai perubahan NU mengenai peranannya dalam politik nasional dan ranah kemasyarakatan selalu dipelopori oleh sejumlah kecil pemimpin secara individual terutama pada periode awal Orde Baru Soeharto.<sup>47</sup> Dalam artikel tersebut menunjukkan jalan bagi kemungkinan muncul kembalinya Kiri di perpolitikan Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya terus menerus untuk mencari "ideologi tandingan" melawan Liberalisme global, Liberalisme Amerika dan Liberalisme pasar, menurut Miichi fundamentalisme Islam mungkin merupakan jawaban dari kelompok kanan dan kiri Islam mungkin jawaban dari "Kiri Tengah". Ketiga, Dua orang muda NU pada tahun 1970-an dan 80-an, Abdurrahman Wahid dan Masdar F. Mas'udi menjadi fokus bahasan juga. Keempat, Pemusatan pembahasan pada kelompok aktif pada kelompok intelektual aktif di Yogyakarta yang memulai aktivitas intelektual dan sosial dan membentuk jaringan luas pada akhir 1990-an. Terakhir, Miichi menyimpulkan bagaimana kalangan intelektual aktif anak muda NU membentuk pemikiran dan aktivitas mereka termasuk menghadapi Islam non tradisional, Barat dan ide-ide Kiri pada beberapa dekade yang lalu dan akan secara singkat menganalisis permasalahan mereka pada masa era pasca Soeharto.

Penelitian Rumadi tentang wacana post-tradisionalisme Islam dalam komunitas NU. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa munculnya generasi muda NU dengan cakrawala pemikiran baru

---

<sup>47</sup> Seperti contoh, NU sebagai organisasi memiliki partai politik pada tahun 1970-an, tetapi kemudian bergeser ke kegiatan-kegiatan sosial pada pertengahan 1980-an. Intelektual kota dan anak muda NU, yang bukan ulama memainkan peran penting dalam pergeseran tersebut. "Kaum Intelektual aktif" ini diatur secara organik dan berbeda dari ulama tradisional. NU merubah kebijakan formalnya setelah aksi-aksi individual oleh mereka sendiri atau dengan membentuk kelompok-kelompok kecil yang independen. Miichi menggabungkan "intelektual aktif" anak muda NU ke dalam "intelektual organik" dan ulama ke dalam "intelektual tradisional" meminjam dikotomi Gramsci. Menurut Gramsci intelektual tradisional meliputi tokoh agama, pengacara, notaris, guru, dokter dan sebagainya.. Tipe intelektual ini membawa ke arah persentuhan massa petani dengan administrasi lokal dan negara (pengacara, notaris, dan sebagainya). Karena aktivitas ini, mereka memiliki fungsi sosial-politik yang penting, semenjak "perantara" profesional sulit dipisahkan dari politik. Antonio Gramsci, *Quintin Howare* dan Geoffrey Nowell Smith diedit dan diterjemahkan dari *Selections From Prison Note-book*, (Lawrence and Wishart, 1971). Ken Miichi, "Kiri Islam, Jaringan Intelektual dan Partai Politik: Sebuah Catatan Awal", *Afkar*, Edisi No. 10 Tahun 2001, h. 155-156.

yang lebih progresif merupakan fenomena yang cukup unik dan menarik. Dikatakan unik dan menarik karena NU yang diklaim sebagai "tradisional" dengan stigma terbelakang, bodoh, jumud dan seterusnya ternyata di dalamnya ada sekelompok anak muda yang berpikir dan melakukan gerakan yang mampu melampaui stigma-stigma tersebut. Kelompok-kelompok kecil tersebut menyebut dirinya sebagai post tradisionalisme Islam, yaitu sekelompok anak-anak muda NU yang dengan modal tradisinya melakukan revitalisasi dan transformasi. Beberapa spektrum pemikiran yang diangkat dan menjadi concern post-tradisionalisme Islam di kalangan anak-anak muda NU seperti: 1) Kritik wacana agama (KWA) sebagai perspektif pembacaan terhadap realitas dan wacana agama. 2) Problem di sekitar politik kewarganegaraan (civil society) dan juga implikasi politiknya.. 3) Isu di sekitar feminisms juga mendapat perhatian yang diterjemahkan dalam program Belajar Bersama. 4) Wacana tentang pluralisme dan dialog antar agama. 5) Islam dan kebudayaan lokal.

### 3. Keberagaman (Pluralisme Kritis)

Disertasi Irawan UIN Jakarta, yang membahas tentang Diskursus Pluralisme Agama dan Relevansinya dalam Konteks Kehidupan Beragama di Indonesia. Selama ini pluralisme agama hanya dipahami dari perspektif eksoteris tanpa memandang sisi esoteris, sehingga sering menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan menyalahkan orang atau kelompok lain yang berseberangan pandangan. Melalui pemikiran Nasr, Legenhausen, Gus Dur, dan Cak Nur, disertasi tersebut menjelaskan perbedaan-perbedaan agama yang dianalisa dengan pendekatan fenomenologi dan objeknya adalah agama, sehingga keragaman agama bisa ditemukan (*kalimahsawā*) dan sikap moderasi dalam beragama bisa direalisasikan. Disertasi tersebut juga menjelaskan pentingnya sikap moderasi dalam beragama (*wasatīyah*), karena *wasatīyah* tanpa *al-ta'addudīyahal-dīnīyah* (pluralisme agama) menjadikan Islam *rahmatan li al-ālamīn* tidak berjalan secara harmonis.

Menurut Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur (tokoh pluralisme Indonesia), ketika menjelaskan tentang makna pluralisme, setidaknya selalu mengaitkannya ke tiga ayat al-Qur'an sebagai berikut: "Tidak ada paksaan dalam agama (QS.Al-Baqarah/2; 256) "Bagimu agamamu dan ba giku agamaku"(QS.Al-Kafirun/109: 6) dan "Agama (yang diridai) di sisi Allah adalah Islam." Dari ketiga ayat yang sering disampaikan tersebut menunjukkan bahwa Gus Dur memegang teguh dan bersikap konsisten terhadap agamanya, bahkan bisa dibilang, Gus

Dur bersikap “intoleran” dalam berteologi.<sup>48</sup> Konsep pluralisme yang dijalani Gus Dur sebenarnya lebih dekat pada konsep yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang mengatur diri sendiri dan saling berhubungan serta berdampingan, namun masing-masing kelompok tersebut mempunyai eksistensi yang berbeda.

Menurut Hasyim Muzadi, pluralitas sebenarnya adalah kodrati. Bahkan dalam al-Qur'an menyebut berbagai jenis manusia untuk menunjukkan macam-macam golongan itu ada dan akan terus ada. Jenis-jenis itu, antara lain, muslim, *muttaqīn*, *kafirīn*, *fasiqīn*, *munāfiqīn*, *zālimīn*, *naṣārā* (Nasrani), *yahūdī* (Yahudi), *ṣabi'īn* (agama lokal). Tidak mungkin Alquran menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Hanya mungkin tempat, volume, minor, dan mayornya, serta pergeserannya yang tidak sama. Menurutny, pluralitas adalah keniscayaan kodrati yang harus dikelola<sup>49</sup> demi menciptakan Islam yang *rahmat li al-‘ālamīn*.

Tak hanya Gus Dur dan Hasyim Muzadi yang memiliki pandangan atau sikap terkait perbedaan agama. Said Aqil Siraj (Ketua Umum PBNU periode 2010- 2020) juga memiliki pandangan yang lebih singkat daripada keduanya. Ia menjelaskan tentang perbedaan agama adalah sebuah fitrah dan umat Islam tidak boleh memaksakan seseorang dalam beragama. Islam, Nasrani, dan Yahudi adalah agama yang sama-sama bersumber dari Allah dan sama-sama membawa pesan perdamaian. Oleh karena itu, masyarakat NU harus menghormati perbedaan agama dan keyakinan.<sup>50</sup>

Pernyataan Said Aqil ini menegaskan corak pemahamannya yang menggunakan pendekatan historis dalam memaknai pluralitas agama, baik di Indonesia maupun di dunia. Menurut Said Aqil Siradj: “Pluralisme atau kebhinnekaan itu anugerah. Pluralisme ini harus kita jaga untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang kuat dan berperadaban, yang *mutamaddīn*,” katanya saat memberikan taushiyah di kantor Lemhanas Jakarta, Rabu (1/9).<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Ahmad Husnul Hakim, “*Rahasia Pluralisme Gus Dur*”, dalam Pusat Studi alQur'an dan Kebangsaan PTIQ Jakarta, <http://pusaka.ptiq.ac.id/?p=47> (diakses 24 Desember 2013).

<sup>49</sup><http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/23/193670/Ramadan-Pluralitas-Pluralisme> (diakses 2 Januari 2013). Hasyim Muzadi, “*Ramadhan, Pluralitas, dan Pluralisme*, Suara Merdeka”, 23 Juli 2012 .

<sup>50</sup> Said Aqil Siraj, dalam silaturahmi tokoh agama Serbia-Indonesia di Gedung Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) Lt. 5 Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, 25 Oktober 2013.

<sup>51</sup><http://www.nu.or.id/post/read/24478/said-aqil-pluralisme-itu-anugerah>. Diakses tanggal 06 Juni 2019, jam.21.26 WIB.

#### 4. Akomodasi Islam Terhadap Budaya

Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, mengatakan bahwa: Berdasarkan fakta sejarah, bahwa dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip Islam, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan-bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara. Baik agama maupun budaya tidak dapat mengelak dari proses yang tak mungkin terhindarkan, yakni perubahan. Memang benar, ajaran agama sebagaimana tercantum secara tekstual dalam kitab suci, kata demi kata tetap seperti keadaannya semula. Akan tetapi, begitu ajaran agama harus dipahami, ditafsirkan, dan diterjemahkan ke dalam perbuatan nyata dalam suatu setting budaya, politik, dan ekonomi tertentu, maka pada saat itu pemahaman yang didasari ajaran agama tersebut pada dasarnya telah berubah menjadi kebudayaan.<sup>52</sup>

Clifford Geertz dalam studi Islam Jawa yang mengatakan praktik keagamaan orang Jawa campur aduk dengan unsur-unsur tradisi-tradisi non Islam. Menurutnya, kelompok *priyayi* dan *abangan* dengan jelas mencerminkan tipisnya pengaruh Islam dalam kehidupan orang Jawa. Bahkan, dalam pandangannya, kelompok yang dianggap paling Islami, yaitu *santri* tidak terlepas dari pengaruh tradisi pra-Islam. Identitas ke-Islaman orang Jawa kurang lebih sama dengan “Islam Nominal.”<sup>53</sup>

Penelitian Mark R. Woodward, yang berupaya menggambarkan Islam Jawa dari sudut yang berbeda dengan Clifford Geertz. Mark R. Woodward bukan hanya menepis pandangan Clifford Geertz (seniornya) yang dengan terang-terangan melihat Islam Jawa sebagai fenomena sinkretik. Tesis utama Woodward adalah konsepsi keagamaan, dalam hal ini konsepsi Islam, mampu mentransformasi kebudayaan Jawa sehingga kebudayaan Jawa tampil dalam balutan yang Islami. Karya Woodward dapat disebut sebagai antitesis pandangan Geertz. Bagi Mark R. Woodward, kalau ditelaah secara mendalam dan ditinjau dari segi perspektif Islam secara luas, didapati bahwa hampir seluruh ajaran, tradisi, dan penekanan yang bersifat spiritual yang selama ini berkembang dalam masyarakat Jawa, pada dasarnya bersumber dari ajaran Islam di Timur Tengah. Apa yang dikenal dalam upacara keagamaan Jawa, seperti *grebeg*,<sup>54</sup> *selametan*,<sup>55</sup> *kalimasodo*,<sup>56</sup> dsb adalah bagian dari ajaran Islam.

---

<sup>52</sup> Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita, 1999), h. 20.

<sup>53</sup> Hendro Prasetyo, “Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia,” *Studi Islamika* No.3, Januari-Maret 1994, h. 75.

<sup>54</sup> Kata “*grebeg*” berasal dari kata “*gumrebeg*” artinya riuh, ribut dan ramai. Istilah *grebeg* awalnya berarti “gerak bersama”, kemudian menjadi “jalan maja”,



Di samping sebagai respons terhadap pandangan Geertz tentang Islam Jawa, tulisan Woodward juga secara eksplisit dinyatakan Woodward<sup>57</sup> untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Hodgson<sup>58</sup> menyatakan betapa kemenangan Islam di Indonesia begitu sempurna. Jawaban sederhana diberikan Woodward dengan menyatakan bahwa hal itu “karena Islam merasuk begitu cepat dan mendalam ke dalam struktur kebudayaan Jawa. Hal ini

---

“iring-iringan”. Upacara grebeg merupakan upacara terpenting karena mengungkapkan pada tingkat tertinggi, yaitu tindakan raja yang menggerakkan dunia. *Grebeg Maulud* adalah suatu acara yang diprakarsai Sunan Kalijaga. Acara ini adalah *tabligh* atau pengajian akbar yang diselenggarakan para wali di depan masjid Demak untuk memperingati Maulud Nabi.

<sup>55</sup> *Slametan (wilujengan)* berasal dari kata slamet yang berarti selamat, bahagia, sentausa. Selamat dapat dimaknai sebagai keadaan lepas dari insiden-insiden yang tidak dikehendaki. Sehingga slametan bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan masyarakat Jawa yang biasanya digambarkan sebagai tradisi ritual, baik upacara di rumah maupun di desa, bahkan memiliki skala yang lebih besar. Dengan demikian, *slametan* memiliki tujuan akan penegasan dan penguatan kembali tatanan kultur umum. Di samping itu juga untuk menahan kekuatan kekacauan (talak balak).

<sup>56</sup> Sebagian pendapat mengatakan bahwa istilah *Kalimasada* berasal dari kata *Kalimat Syahadat*, yaitu sebuah kalimat utama dalam agama Islam. Kalimat tersebut berisi pengakuan tentang adanya Tuhan yang tunggal, serta Nabi Muhammad sebagai utusan-Nya. Menurut pendapat tersebut, istilah *Kalimasada* diciptakan oleh Sunan Kalijaga, salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-16. Konon, Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah, antara lain ia memasukkan istilah *Kalimat Syahadat* ke dalam dunia pewayangan. Namun pendapat lain mengatakan bahwa sebelum datangnya agama Islam, istilah *Kalimasada* sudah dikenal dalam kesusastraan Jawa. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh Dr. Kuntara Wiryamartana, SJ. Istilah *Kalimasada* bukan berasal dari kata *Kalimat Syahadat*, melainkan berasal dari kata *Kalimahosaddha*. Istilah *Kalimahosaddha* ditemukan dalam naskah *Kakawin Bharatayuddha* yang ditulis pada tahun 1157 atau abad ke-12, pada masa pemerintahan Maharaja Jayabhaya di Kerajaan Kadiri. Istilah tersebut jika dipilah menjadi *Kali-Maha-Usaddha*, yang bermakna "obat mujarab Dewi Kali". *Kakawin Bharatayuddha* mengisahkan perang besar antara keluarga Pandawa melawan Korawa. Pada hari ke-18 panglima pihak Korawa yang bernama Salya bertempur melawan Yudistira. Yudistira melemparkan kitab pusaknya yang bernama *Pustaka Kalimahosaddha* ke arah Salya. Kitab tersebut berubah menjadi tombak yang menembus dada Salya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah *Kalimahosaddha* sudah dikenal masyarakat Jawa sejak beberapa abad sebelum munculnya Sunan Kalijaga. Mungkin yang terjadi adalah Sunan Kalijaga memadukan istilah *Kalimahosaddha* dengan *Kalimat Syahadat* menjadi *Kalimasada* sebagai sarana untuk berdakwah.

<sup>57</sup> Mark R. Woodward, *Islam in Java: Normatif Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta* (Islam Jawa; Kesalehan Normatif versus Kebatinan), LKis Yogyakarta, 1999, h. 4.

<sup>58</sup> Hodgson, *The Venture of Islam* (1974).



disebabkan Islam dipeluk oleh keraton sebagai basis untuk Negara teokratik”.<sup>59</sup>

Dalam pandangan Ricklefs, Islamisasi masyarakat Jawa adalah tradisi-tradisi budaya yang terus berlanjut. Setelah mungkin seribu tahun menerima Hindu, orang-orang Jawa mulai menerima Islam. Tetapi Islamisasi Jawa tidaklah berjalan linear; sejarah Islamisasinya sangat kompleks, penuh dengan kejutan-kejutan sepanjang lebih 600 tahun sejak Islam pertama kali datang, dan itu belum selesai.<sup>60</sup>

Islam pedalaman juga menggambarkan wajah varian-varian yang menonjol. Kajian Nakamura<sup>61</sup> dan Mulkhan (1999) tentang Islam murni di wilayah pusatnya Yogyakarta maupun Islam murni di Wuluhan<sup>62</sup> Jember tentunya merupakan gambaran varian Islam ketika berada di dalam lokus sosial budayanya.

##### 5. Nuansa Islam Budaya Lokal di Indonesia

Hasil riset tesis Fatkhul Mujib mengatakan: dakwah Islam yang terjadi di masyarakat Samin, berjalan beriringan dengan tradisi Samin yang telah mengakar, dan dilakukan secara intensif oleh anak-anak Samin itu sendiri. Sehingga proses masuknya nafas ajaran Islam dalam praktik tradisi yang telah ada bersifat internal. Semua ritual (slametan) seperti bersih desa, *suronan*, *besaran*, *muludan*, *maleman* dan dalam acara kelahiran, kematian, perkawinan, sunatan, yang berlangsung di dusun Jepang, selalu diakhiri dengan pembacaan doa-doa berbahasa Arab oleh tokoh agama Islam. Yang terjadi dan berkembang di masyarakat Samin kemudian adalah masuknya unsur-unsur baru berjalan secara bersamaan dalam tradisi dan tidak menghilangkan tradisi lama yang telah ada. Kecuali dalam hal-hal tertentu seperti adat kerukunan, yang nyatanya bertentangan

---

<sup>59</sup> Mark R. Woodward, *Islam in Java: Normatif Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta* (Islam Jawa; Kesalehan Normatif versus Kebatinan), LKis Yogyakarta, 1999, h. 4.

<sup>60</sup> M.C. Ricklefs, *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Century* (Norwalk, CT: Eastbridge, 2006).

<sup>61</sup> Nakamura, *The Cultural and Religious Identity of Javanese Muslims: Problems of Conceptualization and Approach* (Prisma, no 31), 1984.

<sup>62</sup> Muhammadiyah di Wuluhan juga menggambarkan fenomena seperti itu. Gerakan Muhammadiyah belum tuntas, sehingga Muhammadiyah di tangan Petani juga memberikan gambaran bahwa belum semua orang Muhammadiyah melakukan Islam sebagaimana penafsiran para elitnya tentang Islam. Empat tipe penggolongan orang Muhammadiyah di Wuluhan yang dilakukan oleh Mulkhan yaitu: Islam-Ikhlas yang lebih puris, Islam-Munu atau golongan Muhammadiyah-NU yang orientasinya kurang puris dan ada lagi Islam-Ahmad Dahlan yang tidak melakukan praktik *bidh'ah* tetapi membiarkan dan ada Islam-Munas atau Muhammadiyah-Nasionalisme.

dengan ajaran Islam, budaya Jawa (masyarakat sekitar) dan peraturan pemerintah.”<sup>63</sup>

Abdurrahman Wahid yang juga biasa dikenal dengan panggilan Gus Dur menulis “*Pribumisasi Islam*” merupakan suatu proses yang tidak pernah berhenti dalam mengupayakan berkurangnya ketegangan antara “norma agama” dengan “manifestasi budaya”. Dalam pribumisasi Islam tergambar mengenai Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing sehingga tidak ada lagi pemurnian Islam atau menyamakan dengan praktik keagamaan masyarakat muslim di Timur Tengah.<sup>64</sup>

## 6. Islam Nusantara

Secara akademik pemaknaan Islam Nusantara tergambar dari beberapa konsep yang sudah dicetuskan oleh para pengkaji Islam Indonesia terdahulu seperti *Islam sinkretik* (Geertz, 1981: Beatty 1999; Mulder, 2001), *Islam akulturatif* (Woodward, 1988), *Islam sintesis* (Ricklef, 2012), *Islam Kolaboratif* (Nur Syam, 2005), *Islam distingtif*, (Azyumardi Azra, 2005) *Pribumisasi Islam* (Gus Dur, 1998), dan *Islam Inklusif* (Caknun, 1991). Konsep-konsep tersebut memiliki kesamaan dalam konteks bahwa Islamisasi baik dalam bentuk penanaman nilai, perilaku maupun pemikiran keagamaan di Nusantara berlangsung damai, harmonis dengan budaya, tradisi, nilai dan adat istiadat lokal.

Abdurrahman Wahid, pribumisasi Islam<sup>65</sup> ini sangat berbeda dengan pola atau cara berislam yang sangat berorientasi pada purifikasi atau pemurnian yang mempunyai hasrat kuat pada keaslian dan masa lalu. Pribumisasi Islam tidak berorientasi pada masa lalu, namun berpijak pada tradisi, kelokalan, dan kekinian. Proses panjang perjumpaan Islam dengan budaya lokal di nusantara

---

<sup>63</sup> Fatkhul Mujib, *Islam dalam Ajaran Samin Kajian Atas Pemahaman Samin terhadap Ajaran Islam di Dusun Jepang Bojonegoro Jawa Timur*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2004.

<sup>64</sup> Islam mempertimbangkan kebutuhan lokal dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukan berarti meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan menggunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash dengan tetap memberi peranan kepada *ushul fiqh* dan *qaidah fiqh*. Inti Islam kultural adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dan budaya, melainkan menemukan jembatan yang menghubungkan antara agama dan budaya

<sup>65</sup> Inti dari pribumisasi Islam, Islam transnasional, Islam Nusantara yakni ingin merespon dinamika corak masyarakat Islam Indonesia yang begitu beragam dalam mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam.

juga telah melahirkan beragam ekspresi kebudayaan yang khas nusantara seperti arsitektur bangunan, tari, dan perayaan keagamaan, yang bagi sebagian orang kemudian dituduh sebagai *bid'ah*. Dengan proses semacam itu Islam tidak hadir sebagai pemberangus budaya lokal. Islam hadir di nusantara yang saat itu sudah merupakan peradaban dengan khazanah dan keragaman yang begitu kaya.

*Islam Inklusif*<sup>66</sup> (Caknun, 1991). Salah satu ciri mendasar teologi tersebut adalah memberikan formulasi bahwa Islam itu merupakan agama terbuka (open religion). Keterbukaan bahkan merupakan sikap yang dianut umat Islam. Sikap ini harus ditonjolkan, mengingat kondisi umat Islam dan masyarakat Indonesia yang pluralis. Dalam masyarakat demikian menurut Nurcholish, umat Islam seharusnya bisa memberikan teladan sebagai “mediator atau penengah (*wasith*) antara berbagai kelompok umat manusia, dan diharapkan untuk menjadi saksi yang adil dan fair dalam hubungan antar kelompok itu. Prinsip Islam seperti tersebut, menolak eksklusivisme dan absolutisme. Sebaliknya ia justru memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pluralisme. Dalam perspektif ini, kata Nurcholish, umat Islam harus menjadi golongan terbuka, yang bisa tampil dengan rasa percaya diri yang tinggi, dan bersikap sebagai pamong yang bisa ngemong golongan-golongan lain. Sementara penolakan terhadap absolutisme mengandung makna bahwa Islam itu memberikan tempat yang tinggi yakni paradigma tentang etos gerak yang dinamis dalam ajaran Islam.

Nakamura, menyebutkan bahwa konsep sabar, ikhlas, slamet yang diperkenalkan Geertz sebagai nilai utama dalam pandangan masyarakat tradisional Jawa, sebenarnya bersumber dari ajaran Islam. Istilah-istilah yang menjadi kunci tata nilai masyarakat Jawa sebenarnya berasal dari bahasa Arab dan bersumber dari ajaran Islam, dan pemakaian istilah-istilah tersebut dalam bahasa Jawa kontemporer sangat serasi dengan pengertian religiusnya yang asli.<sup>67</sup>

Ahmad Baso,<sup>68</sup> yang mengatakan “Islam Nusantara” itu bukan subyek yang pasif yang asal menerima saja apa yang datang dari Arab (Persia, India atau Eropa) namun kita juga membawa kepada mereka sana ide-ide kita juga, mengolah ilmu mereka menjadi kekuatan kita sehingga Islam Nusantara bisa me- Nusantara-kan Arab, Persia, India hingga Eropa. Dalam bukunya ia memaparkan

---

<sup>66</sup> Nurcholis Madjid, *Islam Inklusif*, 1991.

<sup>67</sup> Nakamura, “The Cultural and Religious Identity of Javanese Muslims: Problems of Conceptualization and Approach”, (*Prisma*, no 31), 1984, h. 72.

<sup>68</sup> Ahmad Baso, *Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia Jilid I*, Jakarta: Pustaka Afid, 2015.

tentang Islam Nusantara. Buku tersebut merupakan hasil dialog-dialog Santri- Kiai tentang Studi Islam dan Kajian ke-Indonesiaan, yang didalamnya membahas tentang: Ngaji Islam Nusantara, Ngaji Islam *rahmatan li al-‘ālamīn*, Aswaja dan Ijma’ Ulama Islam Nusantara, Silsilah dan Sanad Islam Nusantara, Arti dan Posisi Strategis Islam Nusantara di Dunia, Manhaji (Metodologi) Islam Nusantara dan juga membahas Peradaban Nusantara Untuk Dunia; Contoh-contoh Ijtihad Islam Nusantara dan Membahas tentang Kontribusi Para Ulama dan Para Pemikir Islam Nusantara.

TW Arnold<sup>69</sup> dalam karya klasiknya, *The Preaching of Islam*, merupakan “*penetration pacifique*”. Dalam penyebaran secara damai tersebut memang sulit dielakkan terjadinya percampuran antara Islam dengan kepercayaan dan praktek keagamaan dan budaya lokal. Tetapi, gelombang-gelombang pembaharuan dan pemurnian Islam sejak abad 17 terus berlangsung, yang pada satu segi mengorientasikan Islam di kawasan ini ke arah skripturalisme; tetapi pada saat yang sama, dalam proses-proses ini juga berlangsung kontekstualisasi Islam dengan realitas-realitas lokal di Indonesia.

Disisi lain, Islam Indonesia umumnya termasuk ke dalam kelompok besar umat Islam yang disebut sebagai “*ummatan wasaʿatan*”. Gagasan dan konsep tentang “*ummatan wasaʿatan*” sebenarnya tidak terlalu baru di Indonesia. Jauh sebelum terjadinya Peristiwa 11 September 2001 di AS, Menteri Agama Tarmizi Taher (1992-97) misalnya sangat getol mengkampanyekan Islam Indonesia sebagai contoh aktualisasi “*ummatan wasaʿatan*” dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam pada masa kontemporer. Ini dapat dilihat dari karya Tarmizi Taher tentang “*ummatan wasaʿatan*” yang diterbitkan dalam tiga bahasa; Indonesia, Arab, dan Inggris.<sup>70</sup>

## 7. Budaya Hidup (*Lived Culture*)

Setelah para Walisanga menyebarkan ajaran Islam di pulau Jawa, kepercayaan animisme dan dinamisme serta budaya Hindu-Budha sedikit demi sedikit berubah atau termasuk oleh nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat kagum atas nilai-nilai Islam yang begitu besar manfa’atnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga membuat mereka langsung bisa menerima ajaran Islam. Dari sini derajat orang-orang miskin mulai terangkat yang pada awalnya tertindas oleh para penguasa kerajaan. Islam sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa setelah para Wali berhasil mendidik murid-muridnya. Salah satu generasi yang meneruskan

---

<sup>69</sup> TW Arnold, *The Preaching of Islam*.

<sup>70</sup> Tarmizi Taher, *Aspiring for the Middle Path Islam: Religious Harmony in Indonesia*, (Jakarta: Center for the Study of Islam and Society IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997).

perjuangan para Wali sampai Islam tersebar ke pelosok desa adalah Jaka Tingkir. Islam di Jawa yang paling menonjol setelah perjuangan para Wali songo adalah perpaduan adat Jawa dengan nilai-nilai Islam, salah satu diantaranya adalah tradisi Wayang Kulit.

Mark Woodward, kalau ditelaah secara mendalam dan ditinjau dari segi perspektif Islam secara luas, didapati bahwa hampir seluruh ajaran, tradisi, dan penekanan yang bersifat spiritual yang selama ini berkembang dalam masyarakat Jawa, pada dasarnya bersumber dari ajaran Islam di TimurTengah. Apa yang dikenal dalam upacara keagamaan Jawa, seperti *grebeg*, *selametan*, *kalimasodo* dsb adalah bagian dari ajaran Islam.

## F. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahkan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*.<sup>71</sup>

Penelitian kualitatif interaktif dibagi menjadi lima metode ; yaitu metode etnografik (biasanya digunakan dalam antropologi dan sosiologi), metode fenomenologis (psikologi dan filsafat), studi kasus (digunakan dalam ilmu- ilmu sosial, kemanusiaan dan ilmu terapan), teori dasar (*grounded theory*) (digunakan dalam sosiologi), studi kritikal (digunakan dalam berbagai bidang ilmu).

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode etnografi.<sup>72</sup> Metode etnografi digunakan karena etnografi arahnya meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa dan pandangan yang dianut bersama. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material berupa buku-buku dan dokumen lainnya.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), h. 159.

<sup>72</sup> Spradley, *Metode Etnografi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).

<sup>73</sup> Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 10.



## 2. Pendekatan dan Teori

Suatu pendekatan dalam penelitian merupakan hal penting dengan tujuan menjaga komitmen dalam memakai metodologi guna menjelaskan metode yang digunakan dalam melihat fenomena serta fakta yang ada dilapangan. Disertasi ini menggunakan pendekatan/ landasan keilmuan yang bersifat interdisipliner (*interdisciplinary*), yakni melalui etnografi (antropologi dan sosiologi), pendekatan historis (sejarah/heuristik), kepustakaan (*library research*), dan budaya (*cultural*), dengan penekanan utama pada ilmu komunikasi Islam<sup>74</sup> (ilmu dakwah dan komunikasi). Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teori Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book* (London & New York: Routledge Taylor & Francis Groups Fifth Edition Published, 2003) tentang: *Ideologies and Power* dengan unsur-unsur teori di antaranya: kiri baru, pluralisme kritis dan budaya hidup).

## 3. Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah tokoh PBNU (Ketua-ketua di PBNU, periode kepengurusan tahun 2015-2020) dan kepustakaan Abdurahman Wahid dan Hasyim Muzadi.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer diperoleh dari data lapangan yang berupa wawancara dengan tokoh PBNU; Ketum PBNU, ketua LDNU dan ketua/anggota yang mewakili periode kepengurusan tahun 2015-2020), NU *Online*, hasil observasi, karya-karya/ buku yang telah diterbitkan oleh NU dan ditulis oleh tokoh NU dan dokumentasi NU tahun 1998-2019.

### b. Data Sekunder

Data sekunder meliputi, data-data yang diperoleh secara tidak langsung yang berkaitan dengan penelitian ini, baik melalui wawancara maupun yang bersifat tertulis seperti melalui studi kepustakaan terhadap teori dan informasi yang relevan dengan penelitian ini, seperti internet, buku-buku, jurnal penelitian, majalah, media cetak dan elektronik.

---

<sup>74</sup> Sebagaimana yang dinyatakan oleh Wood (Julia T. Wood, *Communication in Our Lives* (Boston: Wadsworth, 2009), bahwa komunikasi dan budaya tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memengaruhi satu sama lain. Budaya tercermin dalam praktik komunikasi, begitu pula sebaliknya praktik komunikasi membentuk kehidupan budaya. Di sinilah letak pentingnya komunikasi yang efektif dalam hubungannya dengan budaya dan Agama. Hal senada dikatakan Pearson (Judy C. Pearson, *Human Communication* (New York: McGraw-Hill, 2003).



## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) ini merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula, yakni dengan kontak langsung dengan sumber informasi. Dalam hal ini penulis akan melakukan dialog langsung dengan pengurus PBNU periode 2015-2020.

Pedoman wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah *semi structured*, yaitu penulis mula-mula mengajukan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan mengorek keterangan lebih lanjut. Dengan demikian, jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variabel, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>75</sup>

Alasan penggunaan tersebut di atas hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan teknis saja, yaitu untuk mempermudah penulis dalam melakukan wawancara sehingga lebih akurat dan sistematis.

### b. Observasi Partisipan (*Participant Observation*).

Dalam metode ini, dilakukan pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung, dengan ikut terlibat menjadi peserta dan mengamati langsung yang sifatnya natural.

### c. Dokumentasi

Hal ini dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan dari buku, surat kabar, jurnal, dan hasil *research*. Terutama untuk menggali data penelitian dari tahun 1998-2019.

## 6. Analisis Data

Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendiskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, diuji, dan dijawab secara cermat dan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan cara reduksi data (*reduction*), pengujian atau penyajian data (*display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)<sup>76</sup> dan verifikasi.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: RineKa Cipta, 2002 ), h. 202.

<sup>76</sup> Matthew B. Milles dan Micheal Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Bavary Hills: Sage Publication, 1986), h. 16.

<sup>77</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah (edt.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 170.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan disertasi ini, penulis membuat sistematika sebagaimana berikut:

Pertama (bab satu), merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan pembatasan masalah. Memaparkan tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknis analisis data, serta pendekatan penelitian dan teori yang digunakan. Tinjauan pustaka yang merupakan kumpulan penelitian terdahulu yang relevan dari berbagai macam bentuk hasil penelitian yang lain. Terakhir dalam bab pertama ini adalah sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian serta dapat mengetahui kerangka pikir dari peneliti.

Kedua (bab dua), tentang pemikiran dakwah dan perubahan sosial, yang memaparkan teori Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book* (London & New York: Routledge Taylor & Francis Groups Fifth Edition Published, 2003) tentang: *Ideologies and Power* dengan unsur-unsur teori diantaranya : Pertama, diskursus ideologi. Kedua, hegemoni dan kekuasaan (power). Ketiga, pemikiran kiri baru. Keempat, pluralisme kritis (*Critical Pluralism*). Kelima, Budaya Hidup (*Lived Culture*).

Ketiga (bab tiga) tentang politik NU, yang meliputi politik dan kekuasaan pada era Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi, dan Saidj Aqil Siradj.

Keempat dakwah Konvensional NU, yang memaparkan profil NU, sejarah perkembangan dakwah konvensional NU baik meliputi dakwah dengan lisan, tulisan maupun dakwah bil hal.

Kelima, Dakwah Kontemporer NU, yang meliputi: dinamika dakwah kontemporer antara New Media dan media media social. bab ini juga mengulas tentang respon NU terhadap dakwah kontemporer.

Keenam tentang Keberagaman dalam NU (Pluralisme kritis), yang meliputi: Sejarah keberagaman dalam NU, Aswaja Arus Utama, Progresif Liberal, NU jalan lurus, kiri Baru, dan keberagaman NU dalam ke Indonesiaan.

Ketujuh; Islam Nusantara NU; substansi dakwah kontemporer, yang meliputi kontekstualisasi budaya nusantara dan bagaimana NU menghadapi radikalisme, Arabisme dan wahabisme.

Bab kedelapan: Penutup berisi: kesimpulan dan saran.



## BAB II

### PEMIKIRAN DAKWAH DAN PERUBAHAN SOSIAL

Ilmu dakwah dan ilmu komunikasi merupakan dua aspek bidang keilmuan yang nyaris punya banyak persamaan, namun juga memiliki kekhasan dan keunikan masing-masing. Dalam konteks ini, misalnya pengembangan ilmu komunikasi pada majelis taklim memperlihatkan perbedaan epistemik dengan apa yang dikembangkan pada lembaga-lembaga keislaman dan sebagainya, yaitu dengan menggunakan kerangka pemikiran perdebatan akademik ilmu dakwah sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Andi Faisal Bakti,<sup>1</sup> terdiri dari teori SMRC-E, teori Konvergensi, dan teori peserta aktif atau dalam keimuan dakwah dalam metodologi *tablīgh*, *taghyīr*, *binā al-ummah*, dan akhlak.

Dakwah Islamiyah juga melibatkan dua jenis komunikasi, yakni: pertama, Allah terhadap umatNya demikian pula sebaliknya; kedua, manusia dengan sesamanya. Suatu komunikasi Islam harus tergambar jelas melalui dakwah Islami, yang harus dibangun di atas prinsip al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama.<sup>2</sup> Kemajuan dan kemunduran umat Islam berkaitan erat dengan kegiatan dakwah yang dilakukannya. Semakin gencar dan tepat dakwah itu disampaikan, maka akan semakin baik pula hasilnya.

Dalam perubahan sosial, peranan dakwah selain berfungsi sebagai penyampai informasi juga sebagai sarana mendidik, mengkritik,

---

<sup>1</sup> Andi Faisal Bakti (ed.), "Pitfalls of the Past Government of Indonesia: Good Governance from the Perspectives of Communication and Development" dalam *Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society*, (Jakarta: Logos, 2004), h. 44; Andi Faisal Bakti, *Communication and Family Planning in Islam in Indonesia; South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program*, (Jakarta: INIS, 2004), h. 37; Andi Faisal Bakti, *Communication, Islam, and Development in Indonesia; An Analysis of the Different Perspective of the South Sulawesi Muslim Population on Family Welfare and Planning*, (Montreal: University of Quebec A Montreal, 1998), h. 38-41; Andi Faisal Bakti, "Mengkaji Islam Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Tinjauan Interdisipliner Komunikasi" dalam *Perta*, Vol. VII, No.2, (2005), h. 28-32; Lihat Andi Faisal Bakti, "The Contribution of Dakwah to Communication Studies: Risale-I Nur Collection Perspective", dalam International Bediuzzaman Symposium, *Knowledge, Faith, Morality and the Future of Humanity*, (Istanbul: Istanbul Offset, 2010), h. 195-213.

<sup>2</sup> Andi Faisal Bakti, "Trendsetter Komunikasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam" dalam *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2012. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel-Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia, h. 2-3.

pengawasan sosial, menjaga lingkungan, pengembangan keilmuan, membangun kesejahteraan umat, memberdayakan masyarakat untuk hidup lebih produktif dan berperadaban.

#### A. Pemikiran Keagamaan

Pemikiran keagamaan merupakan hasil pemikiran, hasil penafsiran, filosofi, sudut pandang, dan filsafat manusiawi. Oleh sebab itu pemikiran keagamaan kebenarannya bersifat relatif, bisa benar, bisa melenceng menjadi salah. Menurut M. Imdadun Rahmat, Gerakan-gerakan sosial keagamaan, terutama dalam abad XIX, mempunyai beragam sebutan. Di antara sebutan itu adalah gerakan juru selamat (mesianisme), gerakan ratu adil (millinarianisme), gerakan pribumi (nativisme), gerakan kenabian (profetisme), penghidupan kembali (revitalisasi), atau menghidupkan kembali (revivalisme). Istilah gerakan-gerakan keagamaan ini tidak selalu digunakan melalui tingkat kacamata yang sama atau melalui tingkat ketajaman yang tinggi.<sup>3</sup> Fenomena-fenomena ini juga terjadi pada abad-abad sesudahnya.<sup>4</sup> Contoh hasil pemikiran atau modifikasian manusia seperti Islam liberal, fundamental, radikal, pribumisasi Islam, Islam nusantara, Islam nusantara, Islam *rahmatan li al-'alamîn* dan masih banyak lagi.

Termasuk pemikiran mengenai ideologi, politik dan kekuasaan yang merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan. Keduanya membutuhkan eksistensi (keberlangsungan) berupa kebudayaan hidup (*lived culture*). Branston dan Stafford berpendapat bahwa keberlangsungan yang dimaksud selalu diwujudkan dalam bentuk hegemoni. Akal sehat atau perasaan bersama (*common sense*) sebagai bagian dari ideologi<sup>5</sup> yang dibentuk dari pendapat dominan dan eksistensi fisik (material) dalam tradisi atau budaya. Hal ini diperkuat oleh Connell dan Strinati dengan analogi nasionalisme.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2005), h. xv.

<sup>4</sup> Nor Huda, *Islam Nusantara: Sejarah Sosial*, h. 141.

<sup>5</sup> Pengertian Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, budaya (kebudayaan), dan agama (keagamaan). Salah satu teori klasik tentang ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted* (Suharyo, Surono, Mujid F. Amin, *HUMANIKA* Vol. 19 No. 1 (2014) ISSN 1412-9418 Bahasa dan Ideologi : Mengungkap Ideologi dan Kekuasaan Simbolik , h. 46-47).

<sup>6</sup> Robert Connell, *Masculinities* (Cambridge : Polity, 1995), h. 7. Lihat juga Dominic Strinati, *An Introduction to Theories of Popular Culture* (London : Routledge, 1995), h. 7. Keduanya berpendapat bahwa dunia modern bukan penghalang terhadap kolektivitas nasionalisme di kala genting atau damai. Hal ini

## 1. Ideologi Islam

Pengertian Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, budaya (kebudayaan), dan agama (keagamaan). Salah satu teori klasik tentang ideologi di antaranya mengatakan bahwa ideologi dibangun oleh kelompok yang dominan dengan tujuan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka. Salah satu strategi utamanya adalah dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted*.<sup>7</sup>

Branston dan Stafford berpendapat bahwa ideologi mengacu pada studi media dan beragam varian kekuasaan.<sup>8</sup> Pendapat keduanya didasarkan pada tiga prinsip. *Pertama*, kompilasi gagasan tentang dunia sosial yang bersifat parsial dan selektif. *Kedua*, relasi gagasan atau nilai dengan cara pendistribusian kekuasaan secara sosial. *Ketiga*, cara pembentukan nilai dan makna sebagai produk yang “alami” dan “jelas” dibanding menyesuaikan atau mengkontraskan dengan dominasi kekuasaan tertentu secara sosial.

Kedua pendapat tersebut menyimpulkan bahwa ideologi yang dilahirkan dari gagasan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan sosial. Curran membenarkan keterlibatan sosial yang berbanding seajar dengan kekuasaan yang dipersatukan dengan demokratisasi pengembangan media massa modern.<sup>9</sup> Hal ini diperkuat dengan doktrin Marx berupa “kapitalisme”<sup>10</sup> dan “kelas”. Kelas kapitalisme (menurut Marx) selalu mempertahankan kepentingan ekonominya. Konsep hegemoni ini menghadirkan sistem nilai yang dominan berupa pergulatan kehidupan sehari-hari dengan “akal sehat” secara terus-menerus.

Pengungkapan konsensus atau *hidden message* dari ideologi yang beragam (plural) dapat dilakukan dengan cara propaganda dan penyensoran. Propaganda dapat membuat perubahan secara efektif

---

didasari oleh perasaan bersama (berupa berkewarganegaraan yang sama) dan eksistensi fisik (berupa *ID Card* dan bertempat tinggal di negara yang sama).

<sup>7</sup> Suharyo, Surono, Mujid F. Amin, *HUMANIKA* Vol. 19 No. 1 (2014) ISSN 1412-9418 Bahasa dan Ideologi : Mengungkap Ideologi dan Kekuasaan Simbolik , h. 46-47.

<sup>8</sup> Gill Branston dan Roy Stafford, *The Media Student's Book*, edisi ketiga (New York: Routledge, 2003), h. 117.

<sup>9</sup> James Curran, *Media and Power* (London : Routledge, 2002), h. 4.

<sup>10</sup> Definisi kapitalisme diutarakan sebagaimana berikut “*a competitive social system, emerging in the late feudal period in Europe, based on commodification and the drive of the owners of the means of productions to maximize the profits of their companies*”. Gill Branston dan Roy Stafford, *The Media Student's Book*, edisi ketiga (New York: Routledge, 2003), h. 118.



dengan perantara media yang kritis dalam mengkonstruksi dengan mereinformasikan data dan temuan secara selektif.<sup>11</sup> Sensor dilakukan oleh hegemoni pihak tertentu untuk mempertahankan kekuasaannya. Sensor merupakan indikasi kepanikan yang memungkinkan adanya *hidden message*. Propaganda dan sensor juga dapat menampilkan momen dan waktu karena ia bersifat simulatif.<sup>12</sup> Hal ini diperkuat dengan momen politik berupa “keadaan darurat nasional” yang memaksa penyelenggaraan propaganda dilakukan oleh pemerintah sebagai pengendali kekuasaan.

Menurut Karl Marx,<sup>13</sup> ideologi adalah alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Ideologi juga merupakan sistem simbol atau kepercayaan yang berhubungan dengan tindakan sosial atau praktik politik. Dengan ideologi, suatu kelompok masyarakat atau kelompok sosial tertentu bisa melakukan kritik dan reaksi terhadap fenomena yang terjadi. Karena itu, ideologi dapat dinyatakan sebagai wajah kesadaran kelas yang diorientasikan pada tindakan politik.<sup>14</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>15</sup> pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari kata ideologi, yaitu:

- 1) Ideologi sebagai kesadaran palsu (biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial, teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya dan sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya);
- 2) Ideologi dalam arti netral (dalam hal ini ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap penting adanya suatu “ideologi negara”. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut);<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> James Curran, *Media and Power* (London : Routledge, 2002), h. 4.

<sup>12</sup> Gill Branston dan Roy Stafford, *The Media Student's Book*, edisi ketiga (New York: Routledge, 2003), h. 119-121.

<sup>13</sup> Magnis-Suseno, *Franz. Pemikiran Karl Marx Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama , 2005), h. 122-123.

<sup>14</sup> Umi Sumbullah, “Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang: Studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea”, *Istiqro*, Vol. VI, No. 01, (Jakarta: DEPAG RI, 2007), h.10.

<sup>15</sup> Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

<sup>16</sup> Franz Magnis-Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Jakarta; Kanisius, 1992), h. 230.

- 3) Ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah (biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat dibuktikan secara logis-matematis atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, asumsi-asumsi normatif, dan pemikiran-pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi).<sup>17</sup>

Ideologi juga didefinisikan sebagai ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita.<sup>18</sup> Pengertian yang lebih luas menurut Steger<sup>19</sup> mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem sebaran ide, kepercayaan yang membentuk sistem nilai dan norma serta peraturan ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu.

Sedangkan menurut Lane<sup>20</sup> ideologi dicirikan oleh; *pertama*, ideologi politik berkaitan dengan pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin? Bagaimana mereka dipilih, dan dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin?. *Kedua*, ideologi mengandung banyak sekali argumen untuk persuasi atau melawan (*counter*) ide-ide berlawanan. *Ketiga*, ideologi sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia, mulai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya. *Kempat*, ideologi sangat terkait dengan hal-hal penting dalam kehidupan sosial. *Kelima*, ideologi mencoba merasionalisasikan kepentingan kelompok sehingga kepentingan tersebut sangat beralasan dan layak diperjuangkan. *Kenam*, ideologi berisikan hal-hal yang bersifat normatif, etis, dan moral. Dalam perkembangannya, ideologi memberi pengaruh yang cukup besar terhadap suatu bangsa dan negara.

Dalam Islam, ideologi disebut juga Islamisme (الإسلام السياسي), juga dikenal dengan politik Islam, adalah seperangkat ideologi yang berkeyakinan bahwa Islam harus menjadi pedoman bagi segala segi kehidupan manusia, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, serta kehidupan pribadi.

---

<sup>17</sup> Karl Mannheim misalnya, menyatakan bahwa pengetahuan yang bersifat ideologis berarti pengetahuan yang lebih sarat dengan keyakinan subyektif seseorang. Lihat, Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Judul Asli: *Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998), h. xvii.

<sup>18</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 238.

<sup>19</sup> Firmansyah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011), h. 96.

<sup>20</sup> Firmansyah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 97.

Menurut Jose Luis Rodriguez Zapatero (mantan Perdana Menteri Spanyol) dalam bukunya Azyumardi Azra mengatakan bahwa, agama hampir sama dengan ideologi politik yang dapat menimbulkan fanatisme dan radikalisme. “Orang-orang yang memiliki fanatisme agama mempercayai bahwa hanya mereka yang memegang kebenaran; dan mereka tidak mau menerima pendapat dan kebenaran orang lain”. Di sinilah Zapatero melihat peran krusial para pemimpin agama. Mereka memainkan peran penting mengajar para pengikutnya untuk saling menghargai, menghormati nyawa manusia, menjunjung tinggi keragaman dan kebebasan beragama.<sup>21</sup>

Ideologi Menurut Taqiyuddin An Nabhani adalah *aqidah aqliyah* (akidah yang lahir dari sebuah proses berpikir secara rasional) yang melahirkan peraturan. Yang dimaksud *aqidah* adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan hidup serta tentang apa yang ada sebelum dan setelah kehidupan, disamping hubungannya dengan sebelum dan sesudah alam kehidupan. Mencakup dua bagian yaitu, *fikrah* (ide) dan *thariqah* (metode). Sedangkan peraturan yang lahir dari *aqidah* tidak lain berfungsi untuk memecahkan dan mengatasi problematika hidup manusia, menjelaskan bagaimana cara pelaksanaan pemecahannya, memelihara *aqidah* serta untuk mengemban ideologi.<sup>22</sup>

Dilihat dari praktik Nabi Muhammad SAW mendirikan dan memimpin Negara Madinah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah Negara adalah penting dalam Islam. Dengan adanya Negara, maka wahyu-wahyu Allah akan diterapkan secara efektif dalam ruang dan waktu, sehingga terciptalah kebahagiaan, ketentraman, dan keharmonisan kehidupan manusia. Namun Negara bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Disinilah relevansi kebijakan Nabi Muhammad SAW yang tidak menyebutkan Islam sebagai agama Negara dalam konstitusi Madinah. Konstitusi ini bahkan tidak menyinggung sama sekali tentang agama Negara.<sup>23</sup>

Hal tersebut merupakan isyarat bahwa dalam soal kenegaraan dan pemerintahan, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan ketentuan dan peraturan yang baku dan mutlak harus diikuti oleh umatnya. Dia hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan, sedangkan formulasinya dan lain-lain yang bersifat

---

<sup>21</sup> Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media Group (Kencana), h. 11-12.

<sup>22</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *Peraturan Hidup Dalam Islam* (Nizham al-Islam), alih bahasa Abu Amin dkk, cet. III (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003), h. 37.

<sup>23</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1990), h.16.

teknis diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam.<sup>24</sup> Oleh karena itu dalam sejarah Islam, gerakan yang dilakukan umat Islam lebih merupakan *fath* (pembebasan) dan bukan *qahr* (penaklukan), sebagaimana yang dilakukan Nabi Ketika membebaskan Makkah.<sup>25</sup> Ini adalah salah satu bukti historis tentang peradaban tinggi yang telah dibangun oleh Nabi. Oleh karena itu, Islam merupakan agama yang Unik. Keunikan Islam bukan terletak pada hubungan erat antara agama dengan politik namun dalam pandangan-pandangan politiknya yang terbilang sangat maju.<sup>26</sup>

Tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa awal Islam merupakan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus kompleks.<sup>27</sup> Seperti argumen banyak pemikir tradisional, Islam adalah sebuah system kepercayaan atau agama yang mempunyai hubungan erat dengan politik. dengan demikian, pada dasarnya tidak ada pemisahan antara agama dan politik.<sup>28</sup>

Fazlur Rahman mengatakan masyarakat muslim berdiri berdasarkan ideologi Islam<sup>29</sup> adalah pada dataran ideologi kesempurnaan yang berangkat dari artikulasi umum Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 256, yang menyatakan bahwa tidak bisa pola keagamaan itu dipaksakan.<sup>30</sup> Yang diperlukan adalah setelah pemahaman yang benar dan tepat tentang keuniversalan ajaran

---

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 119.

<sup>25</sup> Nurcholish Madjid, dalam *Kedaulatan Rakyat dalam Masyarakat Madani*, dalam T. Jacob (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 81.

<sup>26</sup> Nurcholish Madjid, dalam *Kedaulatan Rakyat dalam Masyarakat Madani*, dalam T. Jacob (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 81-82.

<sup>27</sup> Pembahasan yang lengkap dan padat dapat dilihat dalam Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Aliran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: 1980, h. 1-40; bandingkan W.M. Watt, *Islamic Political Thought*, Edinburgh: 1980; E.I.J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam*, Cambridge: 1958; A.K.S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam*, Oxford: 1981; Manzooruddin Ahmed, *Islamic Political System in the Modern Age: Theory and Practice*, Karachi: 1991. Istilah "*modern age*" yang digunakan buku terakhir tersebut dapat menyesatkan, karena pengarangnya, dalam kenyataannya tidak membahas system politik Islam di masa modern, melainkan system politik Islam di masa pramodern.

<sup>28</sup> Azyumardi Azra, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media Group (Kencana), h. 11-12.

<sup>29</sup> Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 62.

<sup>30</sup> Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Al- Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang, Dipenogoro, 2007), h. 42.

(secara doktrin atau ideologis-penulis), pemahaman yang benar dan tepat pula pada lingkungan budaya (Islam partikular sebagai sistem kebudayaan praktis), dan memenuhi tuntutan-tuntutannya yang pasti tidak terhindarkan itu.<sup>31</sup>

Samsuri mengatakan bahwa Islam merupakan kompromis antara komunisme dan kapitalisme.<sup>32</sup> Beberapa persamaan antara Islam dengan marxisme-komunisme adalah mengenai keadilan sosial, pengakuan adanya kelas dan golongan di dalam masyarakat. Persamaan inilah yang menyebabkan antara golongan komunis dan Islam dapat berdampingan melawan imperialisme-kapitalisme Belanda di zaman pergerakan, sehingga hampir sebagai suatu blok, (keduanya) tidak kelihatan siapa komunis yang tulen dan siapa kaum Muslimin yang asli. Berjoang bersama-sama.<sup>33</sup>

Secara sederhana, rumusan agama sebagai sebuah “ideologi” tampak pada ranah transendensinya, sedangkan sebagai sebuah budaya tampak pada *setting* praksisme agama tersebut. Pembicaraan mengenai Islam sebagai sistem ideologi dan sebagai fenomena budaya, kebudayaan sebagai proses kreativitas dan inovasi manusia *par-excellence*, merupakan tema yang selalu aktual dan menarik sepanjang masa. Hal ini karena di samping memancing polemik yang berkepanjangan sejak terbentuknya agama-agama itu sendiri hingga perkembangan agama dan keberagamaannya dewasa ini, fenomena ini menjadi penyebab dominan pasang-surutnya perkembangan pemikiran di berbagai kawasan benua Islam.<sup>34</sup>

Menurut Kuntowijoyo,<sup>35</sup> umat Islam di Indonesia sebenarnya sudah meninggalkan periode ideologi sejak 1985, dan memasuki periode baru yang disebut dengan periode ilmu. Kuntowijoyo menggambarkan dua periode ini secara paradoksal. Pada periode ideologi, Islam bersifat tertutup. Orientasi perjuangannya lebih menyempit ke politik. Sedangkan pada periode ilmu, umat Islam lebih terbuka (inklusif). Adapun orientasi perjuangannya lebih bersifat kultural. Setelah masa orde baru berakhir, disamping umat Islam kembali terobsesi oleh politik formal,<sup>36</sup> juga ditandai dengan

---

<sup>31</sup> Nurcholish Madjid, 1995. *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Paramadina, h. xviii.

<sup>32</sup> Sjafruddin Prawiranegara. *Islam dalam Pergolakan Dunia*, h. 13.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 14-19.

<sup>34</sup> Muhammad Sholikhin, “Orientasi Dakwah Islam Keindonesiaan Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Lokal”, *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi (KOMUNIKA)*, Vol.3 No.2 Juli-Desember 2009, h. 298-311.

<sup>35</sup> Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. (Bandung: Mizan, 2001), h. 311-312.

<sup>36</sup> Sejak awal reformasi, banyak partai politik peserta pemilu 1999 yang berasaskan Islam berdiri, antara lain: PPP, PBB, PNU, PKU, Partai Masyumi,



gerakan kelompok fundamentalis yang secara terbuka mengusung tema ideologi Islam.

Kelompok-kelompok yang mengusung ideologi Islam sebagai dasar pergerakan organisasinya, seperti: Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ikhwanul Muslimin, Laskar Jihad, Jama'ah Islamiyah, Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan, Lembaga Penelitian Pengkajian Islam (LPPI), Front Mahasiswa Islam (FMI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Himpunan Mahasiswa Islam Antar kampus (HAMMAS), Gerakan Reformis Islam (GARIS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Pergerakan Islam Untuk Tanah Air (PINTAR), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), al-Irsyad al-Islamiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Front Pemuda Islam Surakarta (FPIS), Forum Peduli Krisis Bangsa (FPKB), dan Persatuan Pelajar Islam (PPI).<sup>37</sup>

Beberapa Konsep Umum Kepemimpinan dalam Islam.

Secara konseptual, kajian kepemimpinan dalam Islam muncul dalam berbagai istilah dan konteks yang berbeda-beda. Namun secara umum, paling tidak dapat diidentifikasi 3 (tiga) konsep besar mengenai kepemimpinan yang paling sering ditemui dalam khazanah keislaman. Namun dalam hal ini penulis hanya membahas 2 saja, yaitu *khilafah* dan *imamah*.

#### 1) Khilafah

Konsep pertama mengenai kepemimpinan Islam adalah *khilafah*. Secara harfiah, *khilafah* berarti penggantian atau suksesi. Maksudnya adalah penggantian kepemimpinan selepas Nabi Muhammad Saw., bukan dalam kedudukannya sebagai Nabi namun sebagai pemimpin umat. Orang yang memegang jabatan khilafah disebut dengan khalifah. Namun demikian, kata khalifah

---

PSII, PSII 1926, Partai Sunni, dan PK. Namun, pada pemilu selanjutnya, 2004, banyak partai Islam tidak masuk dalam electoral threshold, sehingga banyak partai harus dibubarkan dan yang lainnya berganti nama, misalnya: PK menjadi PKS, PNU menjadi PNUI, dan muncul partai baru PBR, yang merupakan pecahan dari PPP. Yang kemudian berlanjut pada pemilu 2009. Pasca Pemilu 2009, partai politik yang berafiliasi Islam tinggal dua, yaitu PPP dan PKS, melawan partai-partai nasional, seperti Partai Demokrat, PDI-P, Partai Golkar, PAN, PKB, Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

<sup>37</sup> Umar Basalim, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002), h. 140-154.



kemudian lebih populer diartikan sebagai kepala negara dalam Islam sepeninggal Nabi Muhammad Saw.<sup>38</sup>

Gagasan di atas mengemukakan pendapat bahwa *khilafah*, dalam konteks politik pemerintahan Islam adalah para pemimpin sepeninggal Nabi yang menggunakan sistem pemerintahan teokrasi dengan prinsip-prinsip syari'ah. Mereka bukan hanya pemimpin pemerintahan, tetapi juga pemimpin keagamaan.<sup>39</sup>

Menurut al-Faruqi, *al-khilafah* adalah tatanan sosial yang merupakan aktualisasi dari kemauan Allah pada kaum Muslim. Sesuai kemauan Tuhan, manusia diwajibkan mengatur diri mereka sendiri dan memakmurkan bumi sebaik mungkin dalam kerangka Ilahiah; membangun kebudayaan dan peradaban; dan menambah nilai limpah bagi kosmos. Karena pola Tuhan dan aktualisasinya dalam sejarah bersifat individual dan komunal, rohani dan jasmani, internal dan eksternal, kaum Muslim harus mengorganisasi diri secara bersama-sama; menegakkan system untuk mengatur hubungan antarmanusia untuk menyelesaikan perselisihan secara adil, dan mewujudkan tujuan Tuhan di dunia, di dalam sejarah.<sup>40</sup>

Menurutnya, *khilafah* tidak berarti melenyapkan kebhinnekaan, melainkan merupakan pengejawantahan syariah bertanggungjawab melindungi keragaman, misalnya dalam hal agama. Di bawah hukum Islam, *khilafah* wajib melindungi pemeluk Kristiani, Yahudi, Budha, Hindu, dan lain sebagainya, karena memang tidak ada paksaan dalam memeluk agama (QS. Al-Baqarah 2: 3256, Yunus 10: 99). Pemaksaan adalah salah satu perbuatan criminal besar di mata Tuhan: bukan hanya pemaksaan dalam hal agama, namun juga dalam semua aktivitas kemanusiaan.<sup>41</sup>

Azyumardi Azra,<sup>42</sup> Al-Mawardi memberikan gambaran ideal mengenai kekhalifahan. Namun diklaim bahwa para pemikir ini sama sekali tidak membuat sistem politik atau garis-garis besar aturan pemerintahan yang komprehensif, melainkan sekedar membuat gambaran ideal moral bagi para penguasa dan kekuasaannya. Diawali dengan pemikiran mengenai proses

---

<sup>38</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 57.

<sup>39</sup> Moch Fahroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis. Teoritik terhadap konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No 12, Juli-Desember 2008, h. 297.

<sup>40</sup> Ismail Raji al Faruqi, *The Cultural Atlas of Islam*, 58; al-Faruqi, *The Hijrah*, 20-1. Lihat juga Ismail Raji Al-Faruqi, *The Islaamic State and World Order*, dalam bukunya Islam, Brentwood, Maryland; 1984, h. 61-8.

<sup>41</sup> Al-Faruqi, *Islam and Zionisme*, h. 266.

<sup>42</sup> Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*. (Jakarta: Paramadina, 1996).

terbentuknya negara, para ahli mendominasi pemikiran dari alam pikiran Yunani, bahwa manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain guna memenuhi hajat dalam kehidupan. Ditambah dengan pernyataan- pernyataan lanjutan yang kelihatannya terjadi satu sama lain antara satu tokoh dengan tokoh yang lain, namun dalam pola pikir para ahli juga diwarnai dengan pengaruh- pengaruh dari aqidah Islam, seperti Al-Mawardi yang menganggap proses berdirinya negara bukan hanya didasari sekadar untuk membentuk regenerasi manusia pada satu komunitas.

Namun juga untuk mengingatkan manusia pada Allah, bahwa manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah, karenanya saling membutuhkan. Menurut Al-Mawardi,<sup>43</sup> manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Oleh karena banyak binatang misalnya yang sanggup hidup sendiri dan mandiri lepas dari binatang sejenisnya, sedangkan manusia selalu memerlukan manusia lain. Dan ketergantungannya satu sama lain merupakan suatu yang tetap dan langgeng.

Dalam pandangan Al-Mawardi agar negara dapat ditegakkan, dari segi politik hal itu mempunyai enam unsur pokok<sup>44</sup>: pertama, agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Kedua, penguasa yang kharismatik, berwibawa dan dapat dijadikan teladan. Ketiga, keadilan yang menyeluruh. Keempat, keamanan yang merata. Kelima, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Keenam, harapan kelangsungan hidup. Melalui sendi dasar etik yang demikian diharapkan negara benar-benar mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan umat dan saling tolong menolong sesama mereka, memperbanyak sarana kehidupan yang baik bagi setiap warga sehingga seluruh rakyat dapat menjadi laksana bangunan yang kokoh.

Dalam pendapat berbeda, terkait konstruksi negara dan syari'ah, pemikiran Abdullahi Ahmed An Na'im perlu ditelaah. Abdullahi Ahmed An-Na'im dalam karyanya, *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, menegaskan pemisahan institusi negara dan Islam seraya tetap menjaga hubungan antara Islam dan politik. Bagi An-Na'im, negara harus bersikap netral terhadap agama, karena manusia cenderung mengikuti pandangan pribadinya, termasuk agama. Bagaimanapun, An-Na'im juga menegaskan negara tetap perlu mengakui fungsi publik Islam dan pengaruhnya dalam pembuatan

---

<sup>43</sup> Syadzali, M. *Islam dan Tata Negara*. (Jakarta: UI Press, 1990).

<sup>44</sup> al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, ed.I, cet.4, h. 227.

kebijakan publik dan undang-undang. An-Na'im menyatakan syariah bisa berperan dalam ruang publik tetapi harus melalui *public reason* (nalar publik) dalam kerangka konstitusionalisme, HAM, dan Kewarganegaraan.<sup>45</sup>

Konsep syariah An-Na'im yang relativistik dan pluralistik mendorongnya untuk membongkar makna ijihad, menolak fatwa, melakukan reformasi islami, menganggap syariah yang selama ini dipahami kaum Muslimin sebagai syariah tradisional, mereformasi ushul fikih, dan menguji syariah terus-menerus dalam nalar publik (*public reason*), yang alasan, maksud, dan tujuan kebijakan publik atau perundang-undangan harus didasarkan pada pemikiran yang didalamnya warga pada umumnya bisa menerima atau menolak, dan membuat usulan tandingan melalui debat publik tanpa ketakutan dituduh kafir atau murtad.<sup>46</sup>

## 2) Imamah

Dalam wacana *fiqih siyasah*, kata *imamah* (imamah), biasanya diidentikkan dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni.

Imamah adalah *ism maṣḍar* atau kata benda dari kata *amama* yang artinya di depan. Sesuatu yang di depan disebut dengan imam. Itulah sebabnya, dalam kehidupan sehari-hari, kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan.<sup>47</sup>

Secara teknis, hampir tidak ada perbedaan antara khilafah dan imamah sebagai lembaga kepemimpinan. Namun dalam praktisnya, kata imamah tidak disandarkan pada proses suksesi sebagaimana yang terjadi dalam proses khilafah yang sebetulnya lebih bernuansa sosial. Konsep imamah pada akhirnya lebih cenderung dipahami bersifat doktrinal. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai persyaratan tertentu yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki posisi imam.

Imamah dalam konsep Syi'ah terdiri dari tiga hal pengertian. Pertama, imamah mengandung arti sebagai pemimpin

---

<sup>45</sup> Na'im, A. A. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2009).

<sup>46</sup> Na'im, A. A. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, (Bandung: Mizan, 2009).

<sup>47</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 57

masyarakat. Dalam hal ini Syi'ah mempertanyakan siapa pemimpin masyarakat sepeninggal Nabi. Syi'ah mengatakan bahwa Nabi sendiri telah menunjuk penerusnya dan mengumumkan bahwa sepeninggal dirinya Imam Alilah yang memegang kendali urusan kaum Muslim.

Kedua, imamah mengandung arti otoritas keagamaan. Imamah merupakan spesialisasi dalam Islam, suatu spesialisasi yang luar biasa dan ilahiah, yang jauh di atas derajat spesialisasi yang dapat dicapai mujtahid. Para imam adalah pakar dalam Islam. Pengetahuan istimewa mereka mengenai Islam bukan didapat dari akal pikiran mereka sendiri yang bisa saja salah. Mereka menerima pengetahuan dengan cara yang tak diketahui.

Ketiga, imamah mengandung arti wilayah. Dalam ajaran Syiah, pengertian ini sangat dititikberatkan. Masalah wilayah menurut Kaum Syi'ah dapat disamakan dengan masalah manusia sempurna dan penguasa zaman. Kaum Syi'ah mengakui eksistensi wilayah dan imamah dalam pengertian ini, dan percaya bahwa imam memiliki roh universal.

Dalam konsep imamah, terdapat aturan dasar atas penunjukkan seseorang yang ditunjuk menjadi imam. Menurut Imam Mawardi,<sup>48</sup> seseorang yang diperbolehkan menjadi imam harus memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama, Islam, merdeka, laki-laki, *baligh*, dan berakal; kedua, *a'dalah* (adil) yaitu selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama; ketiga, mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang mencukupi baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan; keempat, punya kepribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah.

Dalam memimpin sebuah Negara, seorang imam juga memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan guna mencapai kemakmuran Negara dan rakyatnya. Para ulama memberikan cakupan tentang tugas-tugas yang menjadi kewajiban imam, yaitu pertama, menjaga dan melestarikan hukum-hukum keagamaan, lebih-lebih yang menyangkut aqidah serta membrantas tindakan-tindakan yang berbau bid'ah dan keluar dari syariat Islam; kedua, memerangi musuh yang mengancam keamanan Negara dan bangsa; ketiga, mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan Negara, seperti *ghanimah*, *fai'*, dan shadaqah wajib; dan keempat, menjaga keamanan dan keadilan warganya.

---

<sup>48</sup> Nafi, M. (2010, Desember 14). *Konsep Imamah dan Negara Islam*. Diambil kembali dari Alhikam Bem Staima: <http://www.alhikambemstaima.co.cc/2010/11/konsep-imamah-dan-negara-islam.html>.

Ideologi dan kekuasaan (*power*)<sup>49</sup> memang membutuhkan eksistensi (keberlangsungan) berupa kebudayaan hidup (*lived culture*). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Branston dan Stafford yang mengatakan bahwa keberlangsungan yang dimaksud selalu diwujudkan dalam bentuk hegemoni. Akal sehat atau perasaan bersama (*common sense*) sebagai bagian dari ideologi dibentuk dari pendapat dominan dan eksistensi fisik (material) dalam tradisi atau budaya. Hal ini diperkuat oleh Connell dan Strinati dengan analogi nasionalisme.<sup>50</sup>

## 2. Ideologi dan Politik

Ideologi dan politik (*power*) sebagai pisau analisa (teori dakwah dan komunikasi yang saya gunakan untuk meneliti disertasi ini, sesuai dengan tulisan Gill Baranston dalam *The Media Student's Book*, edisi ketiga, New York: Routledge, 2003 Connell, Robert, *Masculinities*, Cambridge : Polity, 1995 yang juga merupakan rangkuman dari berbagai, memiliki banyak unsur-unsur turunanya, namun penulis membatasi kepada tiga hal yaitu: Kiri baru, Pluralisme Kritis dan *lived culture*.

### 1) Kiri Baru;

Kiri Baru adalah gerakan politik pada tahun 1960-an dan 1970-an, terutama terjadi di Inggris dan Amerika Serikat, yang terdiri dari pendidik, agitator dan lain-lain yang berusaha untuk menerapkan berbagai reformasi pada isu-isu seperti hak gay, aborsi, peran gender, dan obat-obatan,<sup>51</sup> berbeda dengan gerakan kiri atau Marxis sebelumnya yang telah mengambil pendekatan yang lebih kepada

---

<sup>49</sup> Kekuasaan (*power*) tidak hanya sebatas kekuasaan politik dan birokrasi. Bisa juga kekuasaan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Bisa dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dan lainnya. Di sinilah reaktualisasi dakwah perlu terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Budaya hidup (*lived culture*) menjadi urgensi-signifikansi dalam memperluas ideologi dan kekuasaan Islam Nusantara dengan bantuan media. Majid Tehranian, *Global Communication and World Politics*, London: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1999, hlm. 61 menyebutkan: di dalam dunia politik kekuatan (*power*) baik yang bersifat *hard power* maupun *soft power* banyak ditentukan oleh kekuatan yang bersumber dari teknologi dan jaringan informasi.

<sup>50</sup> Rober t Connell, *Masculinities* (Cambridge : Polity, 1995), h. 7. Lihat juga Dominic Strinati, *An Introduction to Theories of Popular Culture* (London : Routledge, 1995), h. 7. Keduanya berpendapat bahwa dunia modern bukan penghalang terhadap kolektifitas nasionalisme di kala genting atau damai Hal ini didasari oleh perasaan bersama (berupa berkewarganegaraan yang sama) dan eksistensi fisik (berupa *ID Card* dan bertempat tinggal di negara yang sama).

<sup>51</sup> Carmines, Edward G., and Geoffrey C. Layman. 1997. "Issue Evolution in Postwar American Politics." In Byron Shafer, ed., *Present Discontents*. NJ:Chatham House Publishers.



kepeloporan untuk keadilan sosial dan sebagian besar terfokus pada serikat pekerja buruh dan pertanyaan dari kelas sosial.<sup>52</sup>

Istilah kiri baru dikemukakan oleh C. Wright Mill pada tahun 1958 dalam majalah *The New Left Review* yang dikelola oleh tokoh Marxis- Liberal.<sup>53</sup> Istilah Kiri Baru mengacu pada gerakan yang berupaya menciptakan perdamaian dunia, persamaan hak-hak sipil, serta berbagai upaya untuk menciptakan suatu masyarakat alternatif. Istilah Kiri Baru juga merupakan antitesa atas gerakan Kiri Lama.

Menurut beberapa sarjana ilmu politik sepenuhnya, sebenarnya terminologi akademik. Istilah itu biasa dipakai dalam wacana-wacana keilmuan, lebih khususnya ilmu politik. “Kiri” menurut Kazuo Shimogaki adalah sebuah kelompok radikal, sosialis, komunis, anarkhis, reformis, progresif atau liberal. Dari perspektif sejarah, beberapa orang diidentifikasi sebagai kaum “Kiri” menurutnya dimulai sejak zaman Revolusi Prancis (1789).<sup>54</sup>

Paul John Diggins, menyebutkan karakteristik “Kiri” sebagai suatu kelompok sosial-politik sebagai berikut; Pertama, “Kiri” pada umumnya dinisbahkan kepada mereka orang-orang/masyarakat yang menghendaki perubahan tatanan sosial-politik yang ada (kebalikan dari Kiri adalah Kanan, yaitu mereka yang berusaha mempertahankan kemapanan). Kedua; “Kiri” memiliki konotasi pada cita-cita politik Eropa, seperti kebebasan, keadilan, persamaan dan demokrasi. Ketiga; “Kiri” sering diasosiasikan sebagai pembelaan terhadap (hak-hak) demokrasi ekonomi.<sup>55</sup>

Kiri Islam bukanlah Islam yang berbaju Marxisme, karena itu menafikan makna revolusioner dari Islam itu sendiri. Kiri Islam juga tidak berarti bentuk eklektik antara Marxisme dan Islam, karena hal demikian hanya menunjukkan bentuk pemikiran yang tercerabut dari akar, tanpa pertautan yang erat dengan realitas kaum muslimin.

---

<sup>52</sup> Cynthia Kaufman *Ideas For Action: Relevant Theory For Radical Change* Grant Farred (2000). “*Endgame Identity? Mapping the New Left Roots of Identity Politics*”, *New Literary History*. 31 (4): 627–648. doi:10.1353/nlh.2000.0045. JSTOR 20057628.

<sup>53</sup> Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer, Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo: 2016), h. 18.

<sup>54</sup> Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 371.

<sup>55</sup> Menurut orang-orang Kiri bahwa liberalisme telah berhasil mendemokratisasi lembaga-lembaga politik di satu sisi, tetapi pada sisi yang lain liberalisasi telah gagal mendemokratisasi kehidupan ekonomi mayoritas rakyat. Kebanyakan rakyat tetap miskin, sedangkan segelintir kapitalis menguasai akumulasi modal dan alat-alat produksi. Realitas demikian, menurut kaum “Kiri” harus diubah dengan mengakhiri kapitalisma dan mempromosikan sosialisma. Pandangan itulah memiliki akarnya pada tradisi Marxisma. Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Gramedia, 2007), h. 371.



Namun jelas, Kiri Islam akan mengusik kemapanan, kemapanan politik dan Agama.<sup>56</sup>

Lahirnya Kiri Islam yang jika dirangkum merupakan respon Hanafi atas berbagai kegagalan dalam metode pembaruan masyarakat Islam untuk mengentaskan keterbelakangan dan kemiskinan.

Pertama, seperti yang disebutkan di atas, latar belakang lahirnya Kiri Islam adalah kooptasi kekuasaan terhadap agama yang menjadikannya ritual semata, sedangkan di sisi lain keagamaan yang tidak terkooptasi kekuasaan terjebak dalam fanatisme primordial, kejudan, dan berorientasi pada kekuasaan.

Kedua, praktik-praktik liberalisme dan pahamnya yang pernah berkuasa sebelum masa revolusi berakhir, hanya menghasilkan eksploitasi ekonomi golongan lemah, sementara penguasa hanya menjadi kepanjangan tangan kelas elit yang menguasai aset negara.

Ketiga, kecenderungan Marxisme yang juga melawan kolonialisme namun belum mampu mengembangkan khazanah ilmu dalam Islam sehingga belum mampu untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan.

Keempat, kecenderungan nasionalisme revolusioner yang membawa perubahan fundamental dalam kebudayaan Arab-Islam dan sistem politik-ekonomi ternyata tidak berumur lama, dan tidak mempengaruhi kesadaran masyarakat muslim.

Dari latar belakang ini, Kiri Islam muncul untuk merevitalisasi khazanah intelektual klasik yang berdimensi revolusioner dan berpijak pada kesadaran rakyat. Hanafi merumuskan misi Kiri Islam sebagai berikut:

1. Memanifestasikan keadilan sosial;
2. Menegakkan masyarakat yang bebas dan demokratis dimana tiap individu bebas mengeluarkan kritik dan pendapat;
3. Membebaskan tanah-tanah kaum muslim dari segala macam kolonialisme imperialisme, termasuk di dalamnya masalah Palestina;
4. Membangun Pan-Islamisme;
5. Membangun sistem politik nasional yang independen dan mempererat jalinan persahabatan dengan bangsa-bangsa Islam dan dunia ketiga, serta;
6. Mendukung gerakan revolusioner kaum terjajah dan tertindas.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Kazuo Shimogaki, Kiri Islam; *Antara Modernisme dan Posmodernisme; Telaah Pemikiran Kritis Hassan Hanafi*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), cover akhir.

<sup>57</sup> Kiri Islam mengakui bahwa kecenderungan fundamentalisme mereka masih kuat, tetapi mereka menawarkan dialog untuk mencari persamaan. Karena 'sesungguhnya perbedaan di antara kita hanyalah dalam bentuk, simbol, bahasa, dan metode tidak dalam substansi, isi, makna, dan tujuan akhir.' Dengan golongan Marxisme, Kiri Islam menegaskan bahwa mereka tidaklah bertentangan. Bagi Kiri

Tabel 3.

Ciri dan Tema sentral yang terdapat dalam Gerakan Kiri Baru

No	Ciri dan Tema sentral yang terdapat dalam Gerakan Kiri Baru
1	Berupaya mengubah sistem universitas yang dalam pandangan mereka sistem universitas tersebut terkait sistem kapitalis modern yang manipulatif. Para mahasiswa yang dipengaruhi aliran ini mengkritik para dosen, media massa dan berbagai kegiatan kampus yang dianggap membawa gaya, nilai dan pola pikir borjuis.
2	Berupaya membebaskan rakyat kecil dari struktur sosial yang tidak adil. Gerakan negro dan gerakan feminis contohnya banyak melakukan ini.
3	Berupaya menyiapkan program-program aksi (gerakan) bagi pemberdayaan kaum minoritas, miskin dan tertindas tanpa mengenal batas ras, etnis dan sebagainya.
4	Melakukan gerakan bawah tanah ( <i>grassroot-movement</i> ) untuk memunculkan pemerintahan alternatif sebagai pengganti dari pemerintahan atau masyarakat kapitalis modern yang ada. Gerakan budaya alternatif atau budaya tandingan ( <i>counter-culture</i> ) masuk dalam poin ini.
5	Berupaya membentuk satu tatanan atau bentuk masyarakat ideal (semacam <i>extended family</i> pada masyarakat tradisional) sebagai alternatif masyarakat modern yang teralienasi (terasing) dengan keruwetan birokrasinya.
6	Memperjuangkan isu-isu mengenai persamaan dan kebebasan. Terkait persamaan, Kiri Baru melalui gerakan intelektualnya memperjuangkan persamaan dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Persamaan ini merupakan syarat bagi terciptanya keadilan dan masyarakat sipil.

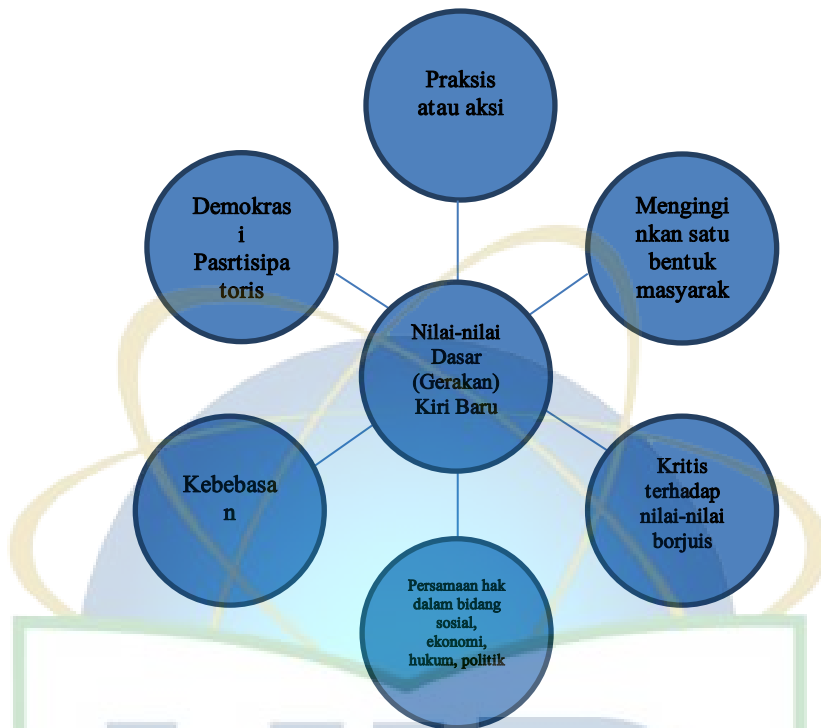
Sumber : Hardiman<sup>58</sup>

Dari sejumlah ciri dan tema sentral yang terdapat dalam (gerakan) Kiri Baru (gerakan ) diatas, ada nilai-nilai dasar

Islam, golongan Marxisme masing-masing terikat oleh tanah air dan sama-sama revolusioner. Perbedaan di antara mereka adalah Kiri Islam menggali akar revolusi dari kebudayaan rakyat. Marxisme menginginkan revolusi sekuler, Kiri Islam menginginkan revolusi Islami, hasilnya tergantung rakyat nanti yang memilih. Juga, bagi Kiri Islam, revolusi sekuler yang menurut mereka diinginkan golongan Marxis adalah juga bagian dari revolusi Islam yang merupakan revolusi yang komprehensif, bersifat kerakyatan dan menyejarah (h. 173).

<sup>58</sup> Hardiman, F. Budi, *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h.19.

(gerakan) Kiri Baru seperti yang sudah digambarkan oleh Akhyar Yusuf Lubis<sup>59</sup>:



Gambar 1: Nilai-nilai Dasar (Gerakan) Kiri Baru

## 2) Pluralisme Kritis

Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan bangsa. Kemajemukan ini diapresiasi sebagai *sunnatullah*. Masyarakat majemuk memiliki budaya dan aspirasi yang beraneka ragam, namun memiliki kedudukan yang sama, tidak ada superioritas antara satu suku, etnis atau kelompok sosial dengan yang lainnya.

Beberapa arti pluralisme keagamaan: pertama adalah sikap menerima kehadiran orang lain atas dasar konsep hidup berdampingan secara damai. Kedua adalah mengembangkan kerjasama sosial-keagamaan melalui berbagai kegiatan yang secara simbolik memperlihatkan dan fungsional mendorong proses

<sup>59</sup> Akhyar Yusuf Lubis, *Pemikiran Kritis Kontemporer, Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo: 2016), h. 18.

pengembangan kehidupan beragama yang rukun. Ketiga adalah mencari, mengembangkan dan merumuskan titik-titik temu agama-agama untuk menjawab problem, tantangan dan keprihatinan umat manusia.

Dalam perspektif Islam, perbedaan pada hakikatnya bukanlah suatu masalah yang serius karena merupakan garis ketentuan Allah. Dalam hal ini Islam secara tegas menjamin hak-hak dasar kemanusiaan yaitu apa yang menjadi tujuan diturunkannya syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang meliputi jaminan atas: Pertama, kebebasan agama atau mempertahankan keyakinan, yang berarti syariat diturunkan bertujuan untuk melindungi agama dan keyakinan setiap orang (*hifẓ al-dīn*). Kedua, keselamatan jiwa atau fisik dari tindakan di luar ketentuan hukum (*hifẓ al-nafs*). Ketiga, keselamatan atau kelangsungan hidup keturunan atau keluarga (*hifẓ al-nasl wa al-'ird*). Keempat, keamanan harta benda atau hak milik pribadi (*hifẓ al-māl*). Dan kelima, kebebasan berpendapat dan berekspresi (*hifẓ al-'aql*).<sup>60</sup>

Kaitannya teori kritikal pluralisme (pluralisme kritis) adalah di dunia yang dikuasai oleh media, banyak ide dan identitas yang berbeda, beredar bebas dan bercampur di media. Kita masih membutuhkan kekuasaan untuk menyebarkan ide-ide tersebut. Dari sini penulis ingin mengetahui bagaimana pluralisme (pluralisme kritis) diperjuangkan, dipertahankan dan dibela dalam NU?

Gill Branston and Roy Stafford menyebutkan:

*Such approaches are sometimes called critical pluralism. These acknowledge that there may be a struggle between competing discourses or accounts of the world, but insists that this is not an amicable free-for-all. Some discourses are parts of powerful institutions and have easier access to material resources, legal power, publicity and legitimacy, access which will be fought for if necessary.*<sup>61</sup>

Pendekatan pluralisme kritis, mengakui bahwa mungkin ada perjuangan antara wacana yang bersaing di akun dunia dan tidak semua media itu bersahabat. Beberapa wacana adalah bagian dari

---

<sup>60</sup> Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa* (Jakarta: Logos, 1999), h. 55. Lihat juga Abdurahman Wahid, "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme", dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah* (Jakarta, Paramadina, 1995), hlm. 546. Selain itu, lihat juga Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta, Bumi Aksara, 1992), h. 62.

<sup>61</sup> Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book* (London & New York: Routledge Taylor & Francis Groups Fifth Edition Published, 2003), h. 123.

lembaga yang kuat dan memiliki akses lebih mudah ke sumber daya materi, kekuatan hukum, publisitas dan legitimasi, atau akses yang akan diperjuangkan jika perlu.

### 3) Budaya Hidup atau Budaya *Amali*

Dalam era globalisasi informasi menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam mempengaruhi pola pikir manusia. Untuk mengatasi hal ini, perlu kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai jati diri bangsa. Kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankannya, dimana peran generasi muda sangat diharapkan untuk terus berusaha mewarisi budaya lokal dan akan menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri walaupun diterpa arus globalisasi.

Ketertarikan pada budaya hidup sebagian berasal dari karya Gramsci. Dia berpendapat bahwa 'akal sehat', seperti panduan yang 'jelas' bagi banyak orang di dunia, dapat dieksplorasi sebagai bagian dari serangkaian jejak yang kompleks daripada ideologi berbasis kelas yang sederhana. Jejak-jejak ini mungkin berasal dari ratusan tahun yang lalu (misalnya dalam kata-kata keagamaan) dan mungkin agak bertentangan (Tuhan membantu mereka yang membantu diri sendiri) tetapi juga terus-menerus berpindah-pindah.<sup>62</sup>

Disisi lain Gramsci juga menekankan cara-cara bahwa hegemoni adalah proses yang dijalani, tidak pernah hanya dipaksakan atau mengambang bebas dalam ide-ide saja. Tetapi tumbuh karena keberadaan material - dalam praktik budaya, ritual dan kegiatan. Dia menyarankan bahwa versi identitas nasional yang kuat bukanlah sesuatu yang selalu ada. Sebaliknya, orang perlu mencari alasan mengapa orang-orang di dunia kontemporer tidak melupakan kebangsaan mereka. Praktek budaya hidup sehari-hari lainnya, yang melibatkan wacana visual maupun verbal, berhubungan dengan ideologi gender dan keluarga, apakah itu akhir yang bahagia (yaitu cinta dan pernikahan) dari dongeng dan bentuk romantase yang tak terhitung jumlahnya, atau keluarga akrab album foto dan kesempatan saat ini ditambahkan.<sup>63</sup>

Proses persentuhan antara Islam dan budaya diakui telah menghasilkan kombinasi dan manifestasi yang cukup unik dan variatif. Fenomena tersebut mungkin saja menjadi tanda suatu perubahan radikal dalam konteks hubungan antara Islam dan Kapitalisme. Dalam konteks tersebut, para pelaku bisnis dan media telah menggunakan Islam secara produktif dengan cara mengemas

---

<sup>62</sup> Gill Branston and Roy Stafford, *The Media Student's Book* (London & New York: Routledge Taylor & Francis Groups Fifth Edition Published, 2003), h. 125.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 130.

barang-barang material dan produk-produk budaya dengan simbol-simbol Islam sehingga Islam pada gilirannya mulai mengalami transformasi menjadi merek-merek populer (*popular brands*) bagi komoditas, media dan produk-produk budaya. Di sisi lain, fenomena tersebut mungkin pula mencerminkan peningkatan kesadaran keagamaan masyarakat Muslim Indonesia yang pada gilirannya dapat mendorong proses islamisasi lebih jauh ke dalam ruang publik dan arena kebudayaan.

Namun hal tersebut (budaya populer) diasumsikan tidak lebih dari sekedar produk budaya massa atau budaya instan yang semata-mata berfungsi sebagai hiburan pengisi waktu luang (*leisure*). Bahkan, terminologi budaya populer sering kali diasosiasikan dengan praktik-praktik atau bentuk-bentuk kebudayaan yang diproduksi oleh industri kapitalis dalam rangka meraih tujuan-tujuan komersil. Karena alasan itulah kekuatan moral, politik dan ideologis budaya populer kerap diterima secara ambivalen dan dinilai sebagai sesuatu yang bersifat lazim atau biasa dan artifisial.<sup>64</sup> Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika budaya populer mengalami interkoneksi dengan simbol-simbol keagamaan yang pada gilirannya menghasilkan apa yang disebut oleh sosiolog dengan istilah komodifikasi agama.<sup>65</sup>

Di Indonesia, Pasca keruntuhan rezim Orde Baru akibat hempasan gelombang reformasi, fenomena liberalisasi dalam media yang ditandai oleh ekspansi dramatik sektor penyiaran, pembentukan stasiun televisi swasta dan ledakan publikasi media baru mulai menyeruak kepermukaan. Liberalisasi media telah memicu munculnya sejumlah media yang memfokuskan sorotannya pada *hot topics* seperti kriminalitas, seksualitas, mistisme dan

---

<sup>64</sup> Dominic Strinati, *An Introduction to Theories of Popular Culture* (London and New York: Routledge Taylor & Francis 2-Library, 2015), h. 37; dan Ariel Heryanto, *Pop Culture and Competing Identities*, dalam Ariel Heryanto, ed., *Popular Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-authoritarian Politic* (London and New York: Routledge Taylor & Francis 2-Library, 2008 ), h. 3.

<sup>65</sup> Komodifikasi (*commodification*) adalah titik masuk awal untuk menteorisasikan ekonomi politik komunikasi. Vincent Mosco mendefinisikan komodifikasi sebagai “proses mengubah barang dan jasa, termasuk komunikasi, yang dinilai karena kegunaannya, menjadi komoditas yang dinilai karena apa yang akan mereka berikan di pasar. Mosco menjelaskan komodifikasi merupakan sebuah proses yang melibatkan perubahan atau transformasi pesan media menjadi produk yang dapat dipasarkan. Di samping itu, komunikasi menjadi dagangan yang paling digemari di era kapitalisme ini sebab nilai surplus yang dimiliki produk-produk komunikasi. Produk komunikasi terdiri dari simbol-simbol yang dapat membentuk kesadaran. Kesadaran inilah yang dimanfaatkan kapitalis untuk melanggengkan kekuasaannya.



*entertainment* dalam rangka melanggengkan eksistensinya di tengah arus kompetensi pasar.

Pada saat bersamaan terjadi *milieu* kebangkitan dakwah Islam yang lebih besar, seperti tumbuhnya kelas menengah Muslim perkotaan, dan maraknya kesalehan luar selama lebih dari satu dekade. Akibatnya, sirkulasi massif tabloit-tabloit sensual dan reportase kolosal berita-berita sensasional di kota-kota besar telah memicu kepanikan moral di kalangan aktivis-aktivis Muslim dan organisasi-organisasi Islam yang memandang bahwa hal tersebut sebagai proses westernisasi dan sekulerisasi yang ofensif dan immoral. Mereka khawatir fenomena tersebut akan menggoncang nilai-nilai dan identitas Islam yang telah mapan. Sebagai respon atas situasi tersebut, kalangan Muslim mulai melancarkan serangan balik dengan mengambil alih kontrol atas produksi dan konsumsi media serta produk-produk budaya populer. Pada akhirnya, transformasi radikal *mediascape* dan perubahan rezim politik pasca reformasi pada saat bersamaan telah membuka kanal baru bagi pertumbuhan “budaya populer Islam” di Indonesia.<sup>66</sup>

Pada saat itu, kita dengan mudah menyaksikan fenomena berkembangnya produk-produk berlabel Islam dan maraknya penggunaan simbol-simbol Islam dalam program-program media dan Industri budaya Indonesia. Intensitas produksi dan konsumsi sinetron religi bercorak Islam semakin meningkat baik di bioskop-bioskop maupun layar televisi Indonesia, seperti, film Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Emak Ingin Naik Haji, Sang Pencerah, Di Bawah Lindungan Ka'bah, sinetron Safa dan Marwa, Pesantren Rock n Roll, Amanah Dalam Cinta, Islam KTP, Ku Pinang Engkau Dengan Basmallah, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah eksposur/ film (pencahaya film) simbol-simbol Islam dalam dunia perfilman dan sinetron ini mendapat respons antusias dari pasar Muslim Indonesia.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Hariyadi, “*Islamic Popular Culture and The New Identity of Indonesian Muslim Youths*”, Makalah dipresentasikan dalam 18th Biennial Conference of The Asian Studies Association of Australia di Adelaide, 5-8 Juli 2010, dalam <http://asaa.asn.au/ASAA2010/Paper/Hariyadi.Pdf>, diakses 6 Juni 2018; dan Amrih Widodo, “Writing for God: Piety and Consumption in Popular Islam”, *Inside Indonesia* (Aug-Oct 2008), dalam <http://www.insideindonesia.org/edition-93/writing-for-god-14091121>, diakses 6 Juni 2018.

<sup>67</sup> Arsal Aminudin, “*Islam dalam Film Indonesia: Studi Semiotika Terhadap Film-Film Pasca Orde Baru*”, dalam <http://pusmedunhas.or.id/wp-content/uploads/2010/05/Islam-Dalam-Film-Indonesia.pdf>, diakses, 10 Juni 2018; Andrimaila, “*Film Religi Sebagai Tren Masa Kini*”, dalam <http://andrimaila.blogspot.com>, diakses 10 Juni 2018, Celebrity Okezone, “*Film Religi Masih Booming*”, dalam <http://celebrity.okezone.com>, diakses 10 Juni 2018; Lukman Hakim, “Citra Islam Dalam Film dan Sinetron”, *Surya Online*, 06

Selain film dan sinetron religi, *genre* musik pop religi juga mendapat sambutan luas di pasar industri musik Indonesia. Tahun 2005, *Istighfar* (Opic/menjelang ramadhan), sebulan pertama setelah dirilis, album tersebut mampu mencetak *double platinum* dengan penjualan lebih dari 300 ribu kopi.<sup>68</sup> September 2006, Band Ungu (Menyambut Ramadhan 1427 H), merilis lagu *SurgaMU*, hanya dengan waktu 10 hari sejak dirilis, album tersebut telah terjual sebanyak 150 ribu keping dan dalam tempo satu bulan telah memperoleh *double platinum* untuk penjualan di atas 300 keping.<sup>69</sup> Tahun 2010, Gita Gutawa/ Balada Shalawat, pada saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap album tersebut.<sup>70</sup> Tahun 2011, *single* album Wali, *Tobat Maksiat*, Abatas juga begitu populer setelah dijadikan soundtrack sinetron Islam KTP pada program Ramadhan 2011 oleh stasiun televisi SCTV.<sup>71</sup>

Dalam industri media cetak, beberapa lembaga penerbitan Islam juga telah memproduksi majalah-majalah Islami dengan artikulasi yang beragam, mulai dari yang terkesan murah, sensasional dan populis. Seperti majalah *Hidayah*,<sup>72</sup> *Sabili*,<sup>73</sup> hingga majalah-majalah elit seperti *Paras* dan *NooR*. Majalah *Paras* dan *NooR* lebih menekankan potret dan gaya hidup Islami seperti fashion, mode, desain rumah, tips memasak dan artikel-artikel bertema Islami.<sup>74</sup>

---

Februari 2010, dalam <http://eprints.sunsu-ampel.ac.id/547/1/citra-islam-dalam-film-dan-sinetron-lukmaan-hakim-juni-2010.pdf>. Diakses 10 Juni 2018; dan Antara News, “Film AAC Penuhi Kerinduan Umat Pada Sosok Cerdas”, dalam <http://www.antara.co.id>, diakses 10 Juni 2018.

<sup>68</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/istighfar-\(album\)](http://id.wikipedia.org/wiki/istighfar-(album)), diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

<sup>69</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/ungu-\(grup\\_musik\)](http://id.wikipedia.org/wiki/ungu-(grup_musik)), diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

<sup>70</sup> Pos Kota Online, “Gita Gutawa Didukung MUI”, dalam <http://www.poskota.co.id/liburan/2010/08/16/gita-gutawa-didukung-mui>, diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

<sup>71</sup> “Tren Lagu Religi di Bulan Ramadhan”, dalam <http://nagaswaramusic.com/berita/detail/891/trend-lagu-religi-di-bulan-ramadhan>, dan Single Abasa Wali di Posisi 1 Weekly Top 10 Flexy Tone, dalam <http://www.nagaswaramusic.com/berita/detail/933/Single-Abatas-Wali-Posisi-1-Weekly-Top-10-Flexy-Tone>.

<sup>72</sup> Hidayah adalah majalah yang kerap menampilkan cerita-cerita moral sederhana dengan latar tema umum seputar siksa kubur dan adab di akhirat.

<sup>73</sup> Sabili adalah majalah yang bernada konservatif dan puritan, yang secara berkala memunculkan cerita-cerita tentang konspirasi Yahudi dan Kristen serta artikel-artikel yang mengecam kelompok-kelompok Islam liberal dan sekte-sekte yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah dan Wahidiyah.

<sup>74</sup> Greg Fealy, “Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia”, dalam Greg Fealy dan Sally White, ed.,

Selain itu ada majalah-majalah Islami lain yang secara khusus di alamatkan kepada wanita Muslim remaja, seperti Amanah, Muslimah, Ummi, Annida dan sebagainya.

Era kontemporer yang diwarnai oleh kemajuan yang pesat, utamanya bidang teknologi informasi, turut memacu akselerasi dalam trnasformasi budaya, ideologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya pada realitas- objektif, dakwah tertuntut untuk merespons kecenderungan era kontemporer tersebut dengan mengakselerasi pendekatan-pendekatan yang efektif dan produktif, sama halnya pada metode-metode dan teknik-tekniknya.

Budaya hidup (*lived culture*) menjadi urgensi-signifikansi dalam memperluas ideologi dan kekuasaan dengan bantuan media. Heryanto mengutarakan bahwa *new media* (internet atau media *online*) dalam demokrasi (sistem politik) dan kemajuan ICT (*Information and Communication Technology*) mampu mempermudah akses informasi.<sup>75</sup> Terlebih, Shoemaker memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan bahwa media adalah entitas ekonomi.<sup>76</sup>

Menurut Foucault konsep kekuasaan berbeda dari konsep-konsep kekuasaan yang mewarnai perspektif politik dari sudut pandang Marxian atau Weberian.<sup>77</sup> Kekuasaan bagi Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (Marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau stuktur, bukan kekuatan

---

*“Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia”*, (Singapore: ISEAS Publishing, 2009), h. 21-22.

<sup>75</sup> Gun-gun Heryanto (Oktober 2015), “Konvergensi Simbolik di Media Online: Studi Perbincangan Netizens tentang Polemik Kasus Century di Era Pemerintahan SBY-Boediono”, *Journal Communication*, Vol. 6, No. 2, h. 173.

<sup>76</sup> Pamela J. Shoemaker dan Stephen D. Reese, *Mediating the Message Theories of Influence on Mass Media Content* (New York: Longman Publishing Group, 1991), h. 121.

<sup>77</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 18, No. 1, Januari 2013, h. 77.

yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat.<sup>78</sup>

Dalam bukunya *The History of Sexuality* Vol. I, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudnya dengan kekuasaan, yakni:<sup>79</sup>

1. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan, atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
2. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
3. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi *distingsi binary oppositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
4. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
5. Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya.

Menurut Miftah Toha, Kekuasaan terbagi menjadi dua, yaitu secara vertikal dan secara horizontal.<sup>80</sup> Kekuasaan bukan hanya milik pemerintahan saja, melainkan kekuasaan itu juga menghingapi kehidupan seseorang sepanjang hidupnya. Kekuasaan ada juga pada sebuah keluarga, pada setiap jenis pekerjaan, pada jenis lingkungan hidup yang cenderung mengatur, memaksa, menata dan mengarahkan tanpa mereka sadari dan pahami. Dalam kehidupan manusia tanpa disengaja ataupun tidak mereka terlibat dalam lingkaran kekuasaan pada jenis dan kadar yang berbeda satu sama lain. Kekuasaan ada di sekitar kehidupan manusia. Manusia hidup bebas, akan tetapi manusia terikat oleh kekuasaan yang hidup bersama kehidupan manusia.

---

<sup>78</sup> Kurnia Novianti, "Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama Dalam Perspektif Antropologi", *Harmoni*, Mei-Agustus 2013, h. 16. Dalam hal ini kekuasaan, menurut Foucault, tidak dipahami dalam konteks pemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerful* dengan *powerless*. Kekuasaan bukan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

<sup>79</sup> *Ibid*, "The History of Sexuality: An Introduction", Vol. 1, h. 94-95.

<sup>80</sup> Distribusi kekuasaan dan fungsi pemerintahan secara horizontal mengarah kepada alokasi kekuasaan diantara divisi pemerintah, seperti kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Sumber kekuasaan di dalam suatu organisasi termasuk organisasi pemerintahan terdapat pada banyak sumber. Dalam dakwah membutuhkan *power* (kekuasaan). Dakwah dalam konteks tertentu harus dilakukan melalui kekuasaan, ketika penguasa memiliki otoritas sentralistik dalam masyarakat yang homogen. Berdakwah melalui kekuasaan merupakan salah satu strategi dakwah yang efektif dan sistematis. Dalam hal ini saya sependapat dengan Miftah Toha bahwa Kekuasaan bukan hanya milik pemerintahan saja, melainkan kekuasaan itu juga menghinggapai kehidupan seseorang sepanjang hidupnya. Kekuasaan ada juga pada sebuah keluarga, pada setiap jenis pekerjaan, pada jenis lingkungan hidup yang cenderung mengatur, memaksa, menata dan mengarahkan tanpa mereka sadari dan pahami. Dalam kehidupan manusia tanpa disengaja ataupun tidak mereka terlibat dalam lingkaran kekuasaan pada jenis dan kadar yang berbeda satu sama lain. Kekuasaan ada di sekitar kehidupan manusia. Manusia hidup bebas, akan tetapi manusia terikat oleh kekuasaan yang hidup bersama kehidupan manusia.

Kekuasaan (*power*) tidak hanya sebatas kekuasaan politik dan birokrasi. Bisa juga kekuasaan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Bisa dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dan lainnya. Di sinilah reaktualisasi dakwah perlu terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman.

Mayjen TNI (Purn) Kurdi Mustofa,<sup>81</sup> dalam mukadimah bukunya menyebutkan: Politik dakwah yang pernah diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru telah mempolarisasi umat Islam menjadi tiga kategori besar. Pertama, kelompok yang menerima dan terlibat secara intens dalam dakwah secara struktural sesuai dengan kebijakan pemerintah. Kelompok ini menjadi bagian dari kekuasaan dan karenanya dakwah yang disampaikan dimaksudkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan sesuai dengan kepentingan stabilitas kenegaraan sebagai garis utama Orde Baru. Oleh karena itu pilihan dakwah dibalik kekuasaan tersebut bisa menjadi jalan yang mendekatkan pemerintah dengan umat Islam yang karena beberapa kasus mengalami kerenggangan. Kedua, kelompok yang menerima kebijakan pemerintah sebagai bagian (keniscayaan) dari upaya pembangunan nasional, tetapi tidak terlibat secara struktural dalam dakwah pemerintah. Kelompok tersebut memperlihatkan jalan (dakwah) simbiotik mutualisme dan mereka menjadi patner pemerintah tanpa harus melibatkan dirinya di dalam kekuasaan. Ketiga, kelompok yang mengambil jalan berseberangan dengan pemerintah. Mereka menjadikan dakwah sebagai sarana kritik terhadap pemerintah yang di anggapnya anti Islam dan karenanya harus dilawan. Di era kebebasan dan keterbukaan politik

---

<sup>81</sup> Kurdi Mustofa, *Dakwah di Balik Kekuasaan*, (Bandung: ROSDA, 2012), h. Vii.



inilah dakwah menjadi mercusuar sehingga mampu menjadi penerang dan petunjuk jalan kebenaran agama.

Asep Nurjaman mengelompokan ideologi dengan partai politik, kedalam empat kategori, yaitu (1) partai yang berideologi Islam, (2) Partai yang berideologi Nasionalis Sekuler, (3) Partai yang berideologi Nasionalis Religius, serta (4) partai yang berideologi Kristen seperti yang ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 4. Peta Ideologi Partai Politik

Ideologi		Partai Politik
1	Islam	Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang.
2	Nasionalis Religius	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Serikat Indonesia, Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Patriot Pancasila, Partai Demokrat, Partai Persatuan Daerah, Partai Merdeka, Partai Indonesia Baru, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan.
3	Nasionalis Sekuler	PDI-P, PNBK, Partai Pelopor, PNI, Marhaenisme, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Sosial Demokrat.
4	Kristen	Partai Damai Sejahtera.

Sumber: Asep Nurjaman<sup>82</sup>

## B. Disrupsi dan Perubahan Sosial

Perubahan sosial adalah proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta semua unsur-unsur budaya dan sistem-sistem sosial, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal meninggalkan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri atau menggunakan pola-pola kehidupan, budaya, dan sistem sosial baru.<sup>83</sup> Perubahan sosial juga, dapat dibayangkan sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial.<sup>84</sup>

Perubahan sosial dianggap sebagai sebuah fenomena yang bersifat problematik sampai sekarang. Perubahan sosial yang dituju

<sup>82</sup> Asep Nurjaman, *ejournal.umm.ac.id*.

<sup>83</sup> H. M. Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi Di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007), h. 91.

<sup>84</sup> Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Psikolonial*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.



dalam aktivitas dakwah adalah perubahan yang terencana (*planned changed*). Dalam hal ini dakwah gerakan sosial yang berhasil mereformasi masyarakat adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Secara garis besar, dakwah Rasul mencakup berbagai aspek, di antaranya: penguatan aspek sosio-religius berupa pemantapan akidah umat yang dimulai dengan pembangunan masjid, dan penguatan sosio-politik dan sosio-ekonomi dengan penerapan perintah zakat dan pelarangan riba serta mendorong etos kerja.<sup>85</sup>

Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat; dimulai dari yang bersifat individual hingga yang lebih kompleks. Juga perubahan sosial dapat dilihat dari segi gejala-gejala terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial, walaupun keadaannya relatif kecil. Perubahan ini, meliputi: struktur, fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari interaksi antarmanusia, organisasi atau komunitas, termasuk perubahan dalam hal budaya.<sup>86</sup> Dengan demikian, perubahan sosial merupakan suatu perubahan menuju keadaan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya.

Teori perubahan sosial mengasumsikan terjadinya *progress* atau kemajuan masyarakat.<sup>87</sup> Gagasan tentang kemajuan (*idea of progress*) terutama berkembang secara nyata pada abad ke 19 Eropa Barat, walaupun bibit-bibitnya dapat ditemukan sebelum sejak zaman Yunani Kuno dan pada Abad Pertengahan Islam maupun Kristen dan menjelang zaman modern pada abad ke-17 dan 18.<sup>88</sup>

Paham disrupsi yang populer dewasa ini berasal dari buku *The Innovator's Dilemma* (1997) yang ditulis oleh Clayton M. Christensen.<sup>89</sup> Teori Christensen tidak segera menjadi terkenal. Baru dalam tahun 2015 teorinya direspons dan dikoreksi, antara lain oleh King

---

<sup>85</sup> AB Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), h. 179.

<sup>86</sup> AB Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, h. 181.

<sup>87</sup> M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensi, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 161.

<sup>88</sup> Teori tentang kemajuan menyangkut dua fokus perkembangan. Pertama adalah perkembangan dalam “struktur atas” atau kesadaran manusia tentang diri sendiri dan alam sekitarnya dan kedua perkembangan “struktur bawah” atau kondisi sosial dan material dalam kehidupan manusia. Pemikir pertama pada zaman modern yang berbicara mengenai kesadaran atau cara berpikir manusia adalah August Comte. Para pemikir evolusi sosial itu sebagian besar sebenarnya mengikuti teori Darwin yang mengemukakan suatu teori evolusi dalam biologi. Mereka ini menerapkan teori Darwin di bidang sosial. Tetapi, menurut Dawam Rahardjo, perlu dicatat di sini bahwa Comte mengemukakan teori evolusi pemikirannya sebelum Darwin.

<sup>89</sup> Clayton M. Christensen, *The Innovator's Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to Fail*, (Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1997).

dan Baatartogtokh.<sup>90</sup> Sangat berdekatan waktu dengan terbitnya *The Innovator's Dilemma*, Francis Fukuyama menerbitkan *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order* (1999).<sup>91</sup>

Christensen dan Fukuyama memahami “*disruption*” dalam arti yang tidak sama, melainkan bisa dikatakan saling bertentangan. Kesamaan Christensen dan Fukuyama ialah mereka menulis dalam konteks zaman yang sama ketika teknologi informasi mulai mencapai kemajuan yang definitif dan dengan cepat mempengaruhi pola-pola relasi dan komunikasi. Buku *The Innovator's Dilemma* dan *The Great Disruption* terbit ketika internet sebagai wujud konkret teknologi informasi mulai memendekkan jarak sehingga dunia menjadi bagaikan “daun kelor” atau *a global village* menurut istilah Marshall McLuhan.<sup>92</sup>

MacLuhan membayangkan dunia menjadi semakin sempit berkat teknologi elektrik dan arus informasi yang sama derasnya ke setiap bagian dunia. Hal itu berarti, perkembangan teknologi informasi secara radikal turut mengubah struktur kehidupan secara sosiologis. Bentuk-bentuk komunikasi, terutama cara-cara menyampaikan pesan, opini, kritik, dan evaluasi berubah secara radikal. Berkat kecepatan informasi dan transportasi yang diciptakan teknologi, maka kebudayaan-kebudayaan yang terasing, atau paling kurang dianggap jauh, menjadi dekat dan saling berbaur. Dunia yang luas menjadi padat. Terciptalah jaringan-jaringan sosial yang menjadi katalisator bagi perubahan sosial. Dalam konteks zaman itu, di akhir abad ke-20 mulai berkembang *e-commerce* yang menyebabkan kegiatan-kegiatan komersial menjangkau seluruh dunia. Akan tetapi, teknologi informasi yang menciptakan *global village* tersebut dimanfaatkan pula sebagai instrumen kriminal. Pelaku terorisme dan berbagai tindak kejahatan menggunakan fasilitas yang sama. Jadi, perkembangan teknologi canggih berdampak baik terhadap kekacauan sosial maupun terhadap perubahan-perubahan fundamental pada dunia industri barang dan jasa. Dalam konteks itu Fukuyama dan Christensen berbicara tentang “*disruption*”, namun dengan paham yang berbeda. Fukuyama memahami disrupsi sebagai gangguan terhadap tata sosial, sedangkan Christensen melihat disrupsi sebagai peluang inovasi yang menguntungkan.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Andrew A. King and Baljir Baatartogtokh, “How Useful is the Theory of Disruptive Innovation?”, in *MIT Sloan Management Review* (Fall 2015)

<sup>91</sup> Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*, (London: Profile Books, 1999).

<sup>92</sup> Istilah “*global village*” menjadi populer berkat dua buku yang ditulis Marshall McLuhan, yaitu *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man* (1962) dan *Understanding Media* (1964).

<sup>93</sup> Johanis Ohoitmur, “Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi”, *RESPON*, Volume 23 no.02 (2018), h. 145.

Menurut Fukuyama, suatu masyarakat yang dikondisikan oleh kekuatan informasi cenderung menghargai nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi, yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesetaraan (*equality*). Kebebasan memilih mencuat tinggi sebagai hak, sementara semua jenis hirarki (dalam agama, politik, pemerintahan, bisnis, dan lain-lain) digerogeti daya regulasi dan kecenderungan koersifnya.<sup>94</sup> Fukuyama mengakui keuntungan atau manfaat yang timbul dari perubahan-perubahan teknologi, sehingga masyarakat menjadi suatu “masyarakat-informasi” (*information society*). Kesejahteraan, demokrasi, kesadaran akan hak asasi dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, merupakan contohnya. Akan tetapi, Fukuyama bertanya, apakah semua konsekuensi dari perkembangan baru teknologi positif? Ia menjawab: Tidak. Masyarakat-informasi, di negara manapun, ditandai oleh kondisi-kondisi sosial yang memburuk. Kejahatan dan kekacauan sosial menciptakan ketidak-nyamanan hidup, bahkan di pusat-pusat kota yang terbilang sejahtera. Kekerbatan dan keluarga sebagai institusi sosial terguncang, sementara jumlah perceraian meningkat dan kelahiran *unwanted-children* bertambah. Fukuyama tidak mereduksi persoalan-persoalan sosial pada krisis moral atau kemunafikan zaman. Ia menunjuk data-data statistik tentang tingkat kejahatan, perceraian, kelahiran anak-anak tanpa ayah, kualitas pendidikan yang menurun, dan hilangnya saling percaya (*trust*) dalam kehidupan sosial. Fenomena itu menjadi indikator munculnya dua gangguan serius, yaitu melemahnya ikatan sosial dan pudarnya nilai-nilai bersama (*common values*) yang menjadi modal sosial. Hubungan antara dua faktor itu, ikatan sosial dan *common values*, bercorak kultural, ekonomis, sosial-politik, dan teknologis. Kompleksitas itu secara kumulatif menjadi gangguan yang besar (*great disruption*) bagi kehidupan sosial.<sup>95</sup>

Disrupsi dalam arti gangguan terhadap nilai dan tata sosial punya risiko memerosotkan peradaban. Arah peradaban manusia telah meninggalkan proposisi Thomas Hobbes (1588-1679) bahwa masyarakat ditandai oleh perang semua melawan semua (*bellum omnium contra omnes*). *Civil society* sebagai masyarakat beradab tidak mungkin ada tanpa ikatan sosial yang erat dan adanya nilai-nilai (kultural, sosial, moral) sebagai modal sosial. Dalam konteks dan kondisi perkembangan teknologi dan perubahan sosial-ekonomi yang serba cepat, memang *the great disruption* tampaknya tak terhindarkan. Selama ilmu pengetahuan dan teknologi masih terus berkembang, maka selama itu pula disrupsi akan terjadi. Namun disrupsi mesti diatasi.

---

<sup>94</sup> Fukuyama, *The Great Disruption*, h. 4.

<sup>95</sup> Johanis Ohoitumur, “Disrupsi: Tantangan bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Peluang bagi Lembaga Pendidikan Tinggi”, *RESPON*, Volume 23 no.02 (2018), h. 146.

Menurut Fukuyama, agar kita bisa menata kembali masyarakat secara sosial, perhatian perlu diarahkan kepada dua kapasitas manusiawi, yaitu kesadaran akan kodrat manusia dan kecenderungan manusia untuk mengorganisasi diri. Faktor pertama menjadi sumber nilai-nilai, sedangkan yang kedua merupakan wilayah operasional bagi modal sosial.<sup>96</sup>

Christensen memahami disrupsi dalam perspektif yang berbeda, yaitu industri, bisnis dan keuangan. Pandangan atau teori Christensen tentang disrupsi kemudian menjadi sangat populer sejalan dengan berkembangnya aplikasi-aplikasi teknologi informasi. Gagasan disrupsi menurut Christensen dalam buku *The Innovator's Dilemma* dapat diringkaskan sebagai berikut.<sup>97</sup>

Disrupsi berarti inovasi yang menguntungkan, bukan karena suatu perusahaan memiliki *highly regulated procedures*, melainkan karena suatu penyangkalan (*deception*) atau pengabaian terhadap apa yang dianggap remeh. Kecenderungan perusahaan atau industri yang besar dan sukses ialah memiliki sistem yang tertata dengan prosedur-prosedur kerja yang menjamin kualitas produk. Mereka menciptakan produk dengan kualitas terbaik untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen-konsumennya. Di sana inovasi dalam organisasi dan proses produksi berarti menjaga kualitas produk atau mengembangkan produk dengan mutu yang lebih memuaskan konsumen. Begitu pula inovasi teknologi diadopsi dalam rangka mempertahankan kualitas produk dan permintaan pasar. Mereka yakin bahwa pasar mereka sudah jelas dan pasti, dan keuntungan dapat diprediksi, karena itu relasi dengan konsumen (pasar) benar-benar dijaga.

Disrupsi adalah masalah bagi lembaga-lembaga besar, baik lembaga bisnis maupun lembaga negara. Menurut Kasali, disrupsi “terjadi secara kait-mengait dalam banyak bidang kehidupan, baik pemerintahan, politik, dunia hiburan, maupun sosial.”<sup>98</sup> Dalam artikel yang berjudul “Disruptive Innovation and Catalytic Change in Higher Education”, Christensen menunjuk arah bagi pengembangan teori disrupsi dalam bidang pendidikan tinggi.<sup>99</sup> Menurutnya, perguruan tinggi yang besar dan ternama selalu mengandalkan kekuatannya yang terletak pada sistem yang terintegrasi, manajemen yang tertata, dan nama besar (*branding*) yang terpelihara. Dalam konteks Indonesia, Kasali menyebut situasi tersebut sebagai “zona nyaman” universitas-

---

<sup>96</sup> Fukuyama, *The Great Disruption*, h. 137-139; baca juga bab 9 tentang *Human Nature and Social Order*, dan bab 11 tentang *Self-Organization*.

<sup>97</sup> Uraian singkat di sini bersandar pada pembahasan Kasali dalam bukunya *Disruption*, khususnya bab 6 yang berjudul “Disruption Theory: Suatu Perjalanan Inovatif,” h.142-158.

<sup>98</sup> Kasali, *Disruption*, h. 139

<sup>99</sup> Clayton Christensen, “Disruptive Innovation and Catalytic Change in Higher Education,” in *Forum for the Future of Higher Education* (2008), h. 43-48

universitas. Mereka melakukan *iteration* atau perubahan, tapi bukan inovasi disruptif. Zona nyaman itu tidak lain dari program studi dan fakultas yang itu-itu saja, mata kuliah dan proses pengajaran tidak banyak berubah, pengajarnya kurang kompetitif, dan birokrasi administrasi yang kaku dan berliku-liku.<sup>100</sup>

Kini disrupsi mengambil tempat. Apapun pengertiannya, disrupsi paling tidak telah membantu kita untuk melihat dengan lebih tajam gelombang perubahan yang sedang melanda dunia dan masyarakat dan untuk menanggapi secara positif perubahan-perubahan tersebut. Walaupun demikian, tersirat dalam tulisan ini bahwa disrupsi bukanlah segalanya.<sup>101</sup>

Dakwah sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang kemudian dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi dalam proses pembangunan ekonomi. Pembangunan sosial sebagai pendekatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya umat Islam secara paripurna. Dengan kata lain, dakwah harus mampu memberikan sumbangan yang berarti dalam kehidupan masyarakat (khususnya umat Islam), jika materi dakwah dikemas tidak semata-mata bercorak normatif-teologis, tetapi lebih dari itu, bagaimana materi dakwah dibingkai dengan pendekatan-pendekatanyang bercorak multidisipliner. Oleh karena itu, lembaga dakwah secara kelembagaan harus dilakukan penataan kembali, perumusan pesan harus ditinjau kembali, penanganan masalah secara keseluruhan sistem dakwah harus ditinjau kembali baik efektifitas, efisiensi, maupun jangkauan penanganan masalah yang dihadapi. Dengan itu, pesan-pesan dakwah dapat menyentuh dan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Disrupsi yang terjadi pada dunia media dengan kehadiran media *online*. Seperti diprediksikan oleh teori disrupsi,<sup>102</sup> media *online* pada

---

<sup>100</sup> Bdk. Kasali, *Disruption*, h. 397-398.

<sup>101</sup> Bdk. Robert H. Smith, "The Myth of "Disruptive Innovation," dalam <https://www.rhsmith.umd.edu/news/myth-disruptive-innovation/>, diunduh pada tanggal 7 Oktober 2017.

<sup>102</sup> Teori disrupsi banyak dipergunakan untuk menjelaskan perubahan besar, tidak semata pada dunia bisnis, tetapi juga komunikasi. Christensen sendiri tidak secara langsung mengaitkan disrupsi dengan dunia digital. Tetapi banyak ahli (seperti Paul Pactz) meyakini bahwa dunia digital mempercepat proses disrupsi. Jurnal Komunikasi Indonesia (JKI) membahas fenomena disrupsi dalam bidang media, komunikasi pemasaran, *branding* hingga komunikasi politik. Dunia *e-commerce* adalah salah satu contoh disrupsi. Pada awalnya, bisnis *online* mengambil pasar bawah (*low-end*), lebih mengandalkan harga murah sementara kualitas nomor sekian. Ini membuat kehadiran mereka kurang diperhatikan oleh *department store* konvensional. Seiring waktu, kualitas *e-commerce* terus membaik, dan perlahan bergerak masuk ke pasar atas (*high-end*). Sistem reputasi penjual



awalnya mengambil pasar bawah (*low-end*) dengan menawarkan kecepatan dan akses gratis untuk membaca media. Kualitas tidak menjadi perhatian utama. Karena kualitasnya yang “buruk” kehadiran media *online* pada awalnya tidak mendapat perhatian dari media konvensional yang percaya bahwa publik masih memilih media konvensional. Media *online* tidak dianggap sebagai pesaing, dan pada titik ini proses disrupsi dimulai. Ketika media *online* telah punya pijakan kuat, mereka sedikit demi sedikit akan memperbaiki kualitas, dan seperti prediksi teori disrupsi, akan mengarah ke atas (*high-end*) untuk kemudian berhadapan dengan media konvensional.

Di sisi lain perkembangan media atau diversifikasi<sup>103</sup> ini mengakibatkan perubahan paradigma di mana awalnya media dakwah sebelumnya memiliki jadwal tayang dengan versi analog hanya dapat dinikmati melalui radio dan televisi analog atau digital dengan frekuensi, sinyal dan channel yang terbatas oleh wilayah dan daerah, tetapi kini dapat dinikmati dengan koneksi internet melalui media komputer atau *mobile phone* di manapun dan kapan pun. Perubahan tersebut dapat dilihat secara signifikan pada aspek frekuensi, mekanisme kerja, operasional maupun konten isi yang ada pada media tersebut.



---

dalam transaksi *online* merupakan bukti bagaimana *e-commerce* bergerak dari pasar bawah mengarah ke pasar atas dengan kualitas lebih baik.

<sup>103</sup> Diversifikasi merupakan proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan besarnya badan usaha media. Dalam memanfaatkan segala kemajuan teknologi untuk menyebarkan ajaran agama Islam supaya menjadi yang terdepan, maka diperlukan strategi dan berfokus pada bentuk bentuk pengambilan kebijakan dengan melakukan diversifikasi untuk mengimplementasikan dakwah dalam bentuk media baru yaitu media *live streaming*.





### BAB III

#### POLITIK NAHDLATUL ULAMA

NU telah mengalami dinamika yang begitu besar sejak mulai berdirinya tahun 1926. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia ikut bertanggung jawab untuk memberikan kontribusinya dalam membangun cita-cita keadaban bangsa. Hal tersebut dikarenakan kontribusi NU tidak hanya diperuntukkan bagi jamaahnya, namun lebih besar dari itu bagaimana NU bisa berkontribusi kepada bangsa. Dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan organisasi ini tetap konsisten mempertahankan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. NU berhasil mendefinisikan Islam dalam konteks kebangsaan sesuai dengan paham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*.

Meskipun NU bukanlah organisasi politik dan secara organisatoris tidak terikat dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan manapun. Namun dalam hal politik, bagi NU terdapat tiga macam politik, yaitu: politik kenegaraan, politik kerakyatan (keagamaan), dan politik kekuasaan (praktis).

#### A. Profil NU

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 M oleh beberapa ulama pesantren, yang dilatar belakangi oleh semangat perjuangan untuk berkhidmah kepada umat Islam di Indonesia pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya. Perjuangan NU tidak hanya didasari pada kehidupan keagamaan saja, tetapi juga pada berbagai aspek (aspek kemasyarakatan) yang meliputi: aspek sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Dalam hal keagamaan Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al- Ijma', dan Al-Qiyas. Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut faham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* dalam bidang aqidah mengikuti *madzhab* Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.<sup>1</sup>

Dalam hal kemasyarakatan dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada: (1) Sikap *tawassu'* dan *i'tidāl*. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. (2) Sikap *tasāmuḥ*, Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah

---

<sup>1</sup> Khitah Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 98.

keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. (3) Sikap *Tawazun*; Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. (4) *Amr al-Ma'rūf Nahyi al-Munkar*; Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,<sup>3</sup> dan menjadikan NKRI harga mati.<sup>4</sup>

Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan

---

<sup>2</sup> Khitah Nahdlatul Ulama, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 99.

<sup>3</sup> Pedoman, Aqidah dan Asas NU, Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 25-26.

<sup>4</sup> Maksudnya adalah NKRI tidak akan dijual dengan harga berapa pun karena sudah menjadi komitmen bersama oleh semua komponen bangsa. NKRI menyangkut kedaulatan rakyat, bentuk, dasar dan tujuan bernegara, yang bersumber dari teks proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembukaan UUD 1945, Adagium 'NKRI Harga Mati' ini, mulai terkenal saat ulama-ulama NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal dalam Munas Alim Ulama di Situbondo pada tahun 1983. (<https://www.kompasiana.com/ijhal/592d0deeff22bdc51d5114ca/nu-dan-nkri-harga-mati?page=all>). Menurut KH Ahmad Azhar Shofwan yang juga Ketua PW Lembaga *bahṡh al-masā'il*, NU Jawa Timur. Dalam diskusi rutin PW Aswaja NU Center Jawa Timur, Sabtu (2/5) dan diunggah di NU Online Ahad 3 Mei 2015 03:15 WIB, setidaknya ada tiga alasan mendasar yang akhirnya menjadikan NU tetap berkomitmen untuk menjadikan NKRI sebagai harga mati. (1) Bagi NU, negara bukanlah sebagai tujuan. Selama negara bisa menjamin bagi terlindunginya lima hal pokok atau *ushulul khamis*, maka sudah seharusnya keberadaan negara didukung. (2) Secara substantif keberadaan NKRI sesuai dengan syariat. Karena dalam praktiknya, masyarakat muslim atau warga negara bisa menjalankan syariat Islam secara penuh. Azhar, memerinci bahwa selama ini banyak undang-undang atau peraturan di negara Indonesia yang bisa mengakomodir pelaksanaan syariat Islam. Seperti berlakunya undang-undang perkawinan, waris, zakat, juga pengelolaan fakir dan miskin. Bahkan untuk yang terakhir ini yakni penanganan fakir miskin di tanah air sesuai dengan tatanan yang disyariatkan dalam Islam, lanjutnya. (3) NU menyadari akan kebhinnekaan dari bangsa Indonesia, karenanya menghadapi keberagaman itu harus dihadapi dengan arif agar kemajemukan yang ada bisa terjaga dengan baik. Karenanya, NKRI menjadi solusi terbaik bagi upaya menebarkan rasa aman dan damai, tanpa harus ada pihak yang diciderai. Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/59266/ini-alasan-nkri-harga-mati-bagi-nu>.

masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.<sup>5</sup>

Struktur Organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari : (1) Pengurus Besar (2) Pengurus Wilayah. (3) Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa. (4) Pengurus Majelis Wakil Cabang. (5) Pengurus Ranting.(6). Pengurus Anak Ranting.<sup>6</sup>

Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari: (1) Lembaga.<sup>7</sup> (2) Badan Otonom.<sup>8</sup> (3) Badan Khusus.<sup>9</sup> Lembaga meliputi :

1. Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlussunnah wal Jama'ah.
2. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pendidikan dan pengajaran formal.
3. *Rabi'ah Ma'ahid Islamiyyah* Nahdlatul Ulama (RMINU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.
4. Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
5. Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pengelolaan pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup.

---

<sup>5</sup> Anggaran Dasar NU, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), h. 25-27.

<sup>6</sup> Anggaran Dasar NU, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), h. 28.

<sup>7</sup> Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus. Anggaran Rumah Tangga NU, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), h. 46.

<sup>8</sup> Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. Anggaran Rumah Tangga NU, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), h. 48.

<sup>9</sup> Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu. Anggaran Rumah Tangga NU, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), h. 50.

6. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.
7. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia.
8. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum.
9. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan seni dan budaya.
10. Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada *mustahiqnya*.
11. Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU), bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.
12. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU), bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik) dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
13. Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
14. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
15. Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama (LFNU), bertugas mengelola masalah ru'yah, hisab dan pengembangan ilmu falak.
16. Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* Nahdlatul Ulama (LTNNU), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jama'ah.
17. Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
18. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Anggaran Rumah Tangga NU, *Hasil-Hasil Mukhtamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 46.



Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:

1. Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
2. Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun.
3. Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal 40 (empat puluh) tahun.
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 (tiga puluh) tahun.
5. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.
6. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun.<sup>11</sup>

Adapun mengenai keanggotaan Nahdlatul Ulama terdiri dari<sup>12</sup>:

1. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.<sup>13</sup>
2. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, baligh, menyetujui akidah, asas dan tujuan Nahdlatul Ulama namun yang bersangkutan bukan warga negara Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Anggaran Rumah Tangga NU, *Hasil-Hasil Mukhtar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga *Ta'lim wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 49.

<sup>12</sup> Anggaran Rumah Tangga NU, *Hasil-Hasil Mukhtar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga *Ta'lim wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 39-41.

<sup>13</sup> Anggota biasa diterima melalui Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting setempat. Anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui Pengurus Cabang Istimewa. Apabila tidak ada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting di tempat tinggalnya maka pendaftaran anggota dilakukan di Ranting terdekat. Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Cabang. (h.38, pasal 2)

<sup>14</sup> Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama setempat. Anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri diterima dan disahkan oleh Pengurus Cabang Istimewa setempat. Apabila tidak ada Pengurus Cabang Istimewa di tempat tinggalnya maka penerimaan dan pengesahan dilakukan di Pengurus Cabang Istimewa terdekat. (h. 39. Pasal 3)



3. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Nahdlatul Ulama dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Besar.<sup>15</sup>

Kewajiban dan hak anggota adalah:

1. Anggota biasa berkewajiban:
  - a. Menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah.
  - b. Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip bernegara NKRI.
  - c. Memupuk dan memelihara *Ukhuwah Islamiyah*, *Ukhuwah Wathoniyah* dan *Ukhuwah Basyariyah*.
  - d. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi.
  - e. Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.
  - f. Membayar i'tanah yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.<sup>16</sup>
2. Anggota luar biasa<sup>17</sup> dan anggota kehormatan<sup>18</sup> berkewajiban menjaga nama baik organisasi, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah organisasi serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

---

<sup>15</sup> Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, Pengurus Cabang Istimewa atau Pengurus Wilayah kepada Pengurus Besar. Pengurus Besar menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Dalam hal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan. (h. 39. Pasal 4.)

<sup>16</sup> Anggota biasa berhak: 1. Mendapatkan pelayanan keagamaan. 2. Mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan. 3. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Menjalankan tradisi dan adat-istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah. 5. Mendapatkan perlindungan diri dan keluarganya dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jama'ah An-Nahdliyah. 6. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

<sup>17</sup> Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih. Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Nahdlatul Ulama tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Nahdlatul Ulama. (AD/ART NU, h. 38-41)

<sup>18</sup> Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama karena: permintaan sendiri<sup>19</sup> atau diberhentikan.<sup>20</sup>

## B. Politik NU

Politik merupakan suatu fenomena yang berkaitan dengan manusia yang selalu hidup bermasyarakat. Ia adalah makhluk sosial yang selalu hidup dinamis dan berkembang. Karena itulah politik selalu merupakan gejala yang mewujudkan diri manusia dalam rangka proses perkembangannya.

Pada hakekatnya politik sebagai aktivitas yang menentukan pola hubungan dan hubungan manusia dan negara, maka hal ini tidak dapat dipisahkan dari aspek konstitusional yang merupakan hukum dasar baik tertulis maupun tidak tertulis yang menyelenggarakan pemerintahan negara. Ia memuat pengorganisasian jabatan-jabatan kenegaraan, lembaga yang memerintah dan tujuan yang hendak dicapai.

Menurut Deliar Noer, “politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat”.<sup>21</sup>

Melihat definisi ini, maka hakekat politik menunjukkan perilaku atau tingkah laku manusia, baik berupa kegiatan, aktivitas, ataupun sikap, yang tentunya bertujuan akan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan kelompok masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik, meskipun harus diakui tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar suatu kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Politik sebagai kegiatan dikemukakan Miriam Budiardjo (1982: 8) sebagai berikut: “pada umumnya dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Seseorang berhenti karena permintaan sendiri mengajukan secara tertulis kepada Pengurus Anak Ranting dan/atau Pengurus Ranting dimana dia terdaftar. (h. 39. Pasal 5).

<sup>20</sup> Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Nahdlatul Ulama. (h. 39. Pasal 5)

<sup>21</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta : Rajawali, 1983), h. 6.

<sup>22</sup> Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1982), h. 8.

Pada pihak lain, ideologi merupakan salah satu faktor yang penting dalam rekrutmen politik, hal ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan dua hal, yaitu:

1. Berkenaan dengan dukungan rakyat, di mana rakyat memberi dukungan kepada pemerintah jika mereka yakin bahwa pemerintahan menganut dan bertindak sesuai dengan ideologi yang mereka miliki;<sup>23</sup>
2. Berhubungan dengan pertama, relevan dengan pelaksanaan program politik. Dalam hal ini pejabat yang direkrut dari mereka yang memiliki kesetiaan dan tanggung jawab terhadap ideologi negara lebih diharapkan melaksanakan program politik dibandingkan mereka yang tidak mendukung. Hal ini amat membahayakan ideologi negara. Bahkan adanya kemungkinan penyimpangan ideologi tidak tertutup, terutama jika karena kepentingan politik yang memerlukan, seorang pejabat melakukan interpretasi sendiri terhadap ideologi negara. Ideologi negara itu dapat ditelusuri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, walaupun tidak semua diserap atau ditingkatkan menjadi cita-cita politik. Berdasarkan sumberdaya, ideologi dapat dibedakan atas beberapa macam atau kategori, sebagaimana dikatakan Deliar Noer bahwa:

“ideologi mungkin sekali tumbuh dari kepentingan dan pemikiran manusia, bisa pula karena pengaruh agama, pengaruh lingkungan dan tradisi serta pemikiran yang datang dari luar turut pula mewarnai ideologi itu, malahan dalam suatu agama, ajarannya sering dijabarkan sedemikian rupa sehingga ia merupakan ideologi. Tentu saja pemikiran yang tumbuh dari manusia serta pemikiran yang bersumber pada ajaran agama bisa pula tercampur”.<sup>24</sup>

Apabila uraian di atas ditelaah, maka dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam konsep politik, ialah:

- a. Nilai-nilai/ajaran-ajaran agama atau falsafah dan pemikiran manusia secara sendiri atau bersama, yang ditransformasi menjadi ideologi politik.
- b. Ideologi politik yang pada satu titik merupakan pedoman dan kriteria pembuatan aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan penilaian terhadap aktivitas politik. Pada sisi lain konstitusi mengungkapkan tujuan-tujuan politik yang hendak dicapai.
- c. Konstitusi berfungsi sebagai hukum dasar sistem politik dari negara bersangkutan.

---

<sup>23</sup> Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik”, (Suatu Telaah dari Sistem Politik), Volume XXI No. 2 April - Juni 2005, h. 274.

<sup>24</sup> Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, (Jakarta : Rajawali, 1983), h. 29-31.

- d. Aktivitas politik yang dapat disimpulkan dalam lembaga fungsi-fungsi politik.
- e. Subyek politik sebagai penyelenggaraan aktivitas politik dan yang terdiri dari lembaga-lembaga pemerintahan dan masyarakat.
- f. Tujuan-tujuan politik baik merupakan tujuan-tujuan antara ataupun tujuan akhir.
- g. Kekuasaan politik atau kewenangan untuk menyelenggarakan aktivitas-aktivitas politik.

Bagi NU, ada tiga macam model politik yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu politik kebangsaan (kenegaraan), politik kerakyatan, dan politik kekuasaan.

#### 1) Politik Kebangsaan (kenegaraan).

Seiring dengan perkembangan politik Indonesia, perkembangan politik NU juga berkembang, puncaknya ketika menjelang kemerdekaan dan pascakemerdekaan. Kontribusi politik kenegaraan NU yang paling jelas adalah dukungan Wahid Hasyim, wakil NU pada PPKI, untuk tidak mencantumkan piagam Jakarta di dalam dasar Negara.

Kemudian NU berkiprah secara kongkrit setelah terjun dalam kancah kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang politik keagamaan, politik budaya dan politik kemasyarakatan. Untuk itu klaim NU sebagai organisasi tradisionis mulai berubah, bahkan mengalami pergeseran drastis. Nakamura menyatakan bahwa klaim NU sebagai organisasi tradisional dalam perkembangannya tidak lagi identik dengan konservatisme, kaum sarungan yang membawakan kepada kejumudan, dekadensi dan kebakuan, para pengikutnya tidak lagi dianggap sebagai penghambat kemajuan.<sup>25</sup>

Fenomena tersebut antara lain mulai tampak sejak awal tahun 1980-an, terutama dalam era kepemimpinan Abdurrahman Wahid selama lima belas tahun menakhodai NU selaku ketua umum PBNU. Ia cukup berhasil meletakkan dasar-dasar pemikiran progresif, modern dan inklusif. Meskipun demikian, corak dan warna ketradisionalannya tetap dipertahankan berdasarkan pada kaidah: *al- muḥāfaz̤ah ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhd bi al-jadīd al-aṣlah*, Mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik dan mempertahankan nilai-nilai lama yang masih relevan.

---

<sup>25</sup> Mitsio Nakamura, "Tradisionalisme Radikal: Catatan Mukhtar Semarang 1979", dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, Terj. Ahmad Suedi (dkk), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 58.

Nakamura menyatakan adanya indikator ke arah NU progresif,<sup>26</sup> yakni sebuah fenomena baru NU yang mencerminkan kiprahnya menjadi kaum tradisional yang radikal, sulit diingkari bahwa NU telah menunjukkan langkah yang semakin radikal tentu dalam pengertian luas.<sup>27</sup> Fenomena menarik lainnya adalah keterlibatan NU secara langsung dalam memberdayakan *Civil Society* melalui gerakan politik dan kultural NU. Mengamati fenomena kiprah NU di jalur kultural ini, maka peran dan kiprah kaum muda NU tidak dapat disangsikan keberadaannya. Beberapa di antara tokoh muda NU eksis di jalur kultural dan memilih pada pengembangan pemikiran dan gerakan politik, seperti pemberdayaan anak jalanan.<sup>28</sup>

## 2) Politik Kemasyarakatan (keagamaan).

Nahdlatul Ulama yang sejak berdiri merupakan organisasi politik keagamaan yang menjadikan figur kiai menjadi penyangga utama dengan berbasis pada pesantren (kiai-santri). Sepanjang sejarahnya NU mengalami proses transformasi yang mewarnai dinamika perjalanannya, di mana NU sejak awal berdirinya diklaim sebagai kelompok tradisional kini merambah dalam kancah kehidupan yang lebih terbuka di samping lahirnya sarjana-sarjana NU yang telah bersentuhan wacana modernitas dan komunitas akademis. Hal itu merupakan fenomena baru dalam organisasi keagamaan ini.

Proses transformasi politik keagamaan yang mewarnai dinamika perjalanan politik NU. Disamping adanya pergeseran

---

<sup>26</sup> Langkah-langkah progresif dan aksi atau gerakan politik kaum muda NU yang eksis di jalur kultural menjadi fenomena menarik, khususnya dalam membangun proyek pemberdayaan *civil society*. Kiprah kaum muda NU di jalur kultural ini menjadi bagian proses transformasi yang menunjukkan bahwa NU ke depan semakin eksis dengan mengadopsi perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspeknya. Kelompok kaum muda NU juga terbagi dua, yakni sekelompok berkiprah di pentas politik nasional seperti Muhaimin Iskandar, Efendi Choiri, Masykur Musa, Khofifah Indar Parawansa dan lainnya. Kelompok kedua adalah mereka yang eksis pada jalur kultural seperti Ulil Abhsar Abdalla, Ahmad Baso, Rumadi, Zuhairi Misrawi dll, mereka memilih berkiprah di jalur kultural dengan mengembangkan nalar kritis wacana pemikiran keagamaan dan gerakan politik menuju pada pemberdayaan *Civil Society*.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 61.

<sup>28</sup> Hairus Salim, M. Ridwan, *Kultur Hibrida: Anak Muda NU di Jalur Kultural*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), h. 1-18; bandingkan dengan Muh. Siddiq, *Gejolak Santri Kota* yang memotret kiprah angkatan muda NU khususnya di LKiS.



paradigma gerakan politik keagamaan NU sebagai wacana rekonstruksi wacana tradisional menjadi tradisionalisme radikal bahkan telah merambah dalam wacana post-tradisional. Wajah NU juga berubah sesuai proses yang dilaluinya beserta kondisi politik yang mewarnai dinamika NU, baik secara intern maupun ekstern. Upaya rekonstruksi wacana tradisional NU tampak pada wacana yang dikembangkan generasi belakangan, yang telah merambah wacana liberalisme bahkan menuju post liberalis yang menampilkan wajah baru NU yang ditampilkan kaum muda NU yang eksis di jalur kultural.

Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya NU adalah untuk melindungi praktik dan pemikiran keagamaan Muslim Indonesia yang berbeda dengan praktik dan pemikiran Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, yang puritanistik. Politik kerakyatan (keagamaan) NU ini cenderung dekat dengan *local* Islam yang merespon situasi internasional dan terhadap situasi nasional tentang maraknya gerakan pembaharuan (puritanisme).

### 3) Politik Kekuasaan.

Meminjam kerangka teori Elnerst Gellner, NU berdiri untuk membela praktis Islam yang cenderung dekat dengan *local* Islam. Dalam kitab *Qanun Asasi Li Jami'ati Nahdlatul Ulama*, KH. Hasyim Asy'ari memperhatikan adanya gerakan keagamaan baru yang menyerukan pemberantasan bid'ah (heterodoksi) dengan “kedok” kembali ke al-Qur'an. Padahal gerakan keagamaan inilah yang sebenarnya memproduksi bid'ah. Pernyataan KH. Hasyim ini bisa dianggap (1) merespons situasi internasional tentang maraknya gerakan Wahabisme di Timur Tengah dan, (2) terhadap situasi nasional tentang maraknya pembaharuan (puritanisme) Islam.<sup>29</sup>

Dari sini bisa disimpulkan, pendirian NU bukan untuk tujuan politik kekuasaan, tetapi politik (keagamaan) kerakyatan. Oleh karena itu, bagi umat Islam Indonesia yang menginginkan pelaksanaan praktek dan pemikirannya dekat dengan tradisi lokalnya, kehadiran NU dinilai memberi perlindungan. Jika ini bisa disebut tindakan politik kerakyatan dalam pengertian luas, maka politik jenis inilah yang patut disebut tingkatan politik NU tertinggi.

Menurut Martin Van Bruinessen NU memang memiliki bobot politik yang cukup besar, karena massa yang bisa dimobilisasi dalam krisis politik. Pada zaman revolusi, dan pada zaman peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, orang NU telah memainkan peranan sangat menonjol- sebagai unsur utama laskar Hizbullah dan Sabilillah pada 1945-1949, dan sebagai pelaku utama pembunuhan terhadap orang-

---

<sup>29</sup> *Nahdlatul Ulama Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, (Jakarta, Kompas: 2020), h. 4.

orang PKI pada 1965-1966. Berkat kekuatan fisiknya, NU memainkan peranan penting dalam perubahan politik pada dua masa peralihan tersebut; tetapi sumbangan penting itu tidak pernah dapat diterjemahkan menjadi pengaruh nyata dalam pemerintahan, dewan perwakilan, maupun masyarakat sipil. Dua figur NU yang paling menonjol pada masa peralihan tersebut, Wahid Hasyim dan Subhan ZE, kemudian disingkirkan (dimarginalisir) dari sistem politik; massa NU tidak dilibatkan dan tetap berada di pinggiran. Tokoh NU yang bisa *survive* dekat pusat kekuasaan adalah Idham Chalid, politisi gaya lama yang tidak mewakili sikap atau ideologi tertentu dan selalu bisa beradaptasi dengan setiap perubahan.<sup>30</sup>

Nelly van Doorn-Harder menggambarkan, peran NU dalam panggung politik nasional terjadi ketika khittah 1926 jadi keputusan organisadalam Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984. Keputusan ini tidak hanya memberi arti pada aktivitas-aktivitas politik NU di tingkat nasional, tetapi juga memfokuskan kembali pada pendidikan, kesejahteraan masyarakat, misi sosial, dan pembangunan ekonomi.<sup>31</sup>

Keputusan kembali ke khittah 1926 disadari jadi starting point NU untuk meletakkan dasar-dasar pembaharuan baik dari sisi *jam'iyah* maupun jamá'ah. NU jadi organisasi dinamis ketika elite-elite pesantren berhasil merubah stigma negatif di kalangan para peneliti dan akademisi yang secara pejoratif menilai NU sebagai organisasi tradisional yang berkonotasi kolot jadi organisasi modern dan progresif.<sup>32</sup> Penilaian tradisional merujuk pada paham-paham keagamaan, yang sebagaimana digambarkan Lukens-Bull, lebih banyak menjalankan tradisi yang

---

<sup>30</sup> Martin Van Bruinessen, *Kata Pengantar, NU: Jama'ah Konservatif yang melahirkan gerakan Progresif* dalam buku *NU Muda Kaum Progresif dan Sekuler Baru*, Laode Ida. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004. Idham Chalid dengan segala kelonggarannya dalam berpolitik, agaknya, lebih mewakili pendirian kiai NU ketimbang tokoh seperti Wahid Hasyim atau Subhan ZE. Para kiyai di daerah tidak pernah punya ambisi mengurus negara, membuat undang-undang atau mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi. Kehidupan mereka lebih sederhana dan pragmatis: pesantren harus hidup, dan pengusaha di daerah yang mendukung kiyai memerlukan tender. Dalam hal ini; Idham sangat pandai memenuhi kebutuhan daerah dan menjembatani jarak pusat- daerah melalui hubungan patronase yang ia jaminkan.

<sup>31</sup> Nelly Van Doorn-Harder, Nahdlatul Ulama (NU), dalam *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, ed. Richard C. Martin (USA: Macmillan Reference, 2019), h. .499-500.

<sup>32</sup> Ahmad Najib Burhani, Kitab Kuning dan Kitab Suci: Pengaruh al-Jabiri terhadap Pemikiran Keagamaan di NU dan Muhammadiyah, *l Masyarakat Indonesia*, Vol. 41, no. 1 (Juni 2015): 27-28, <https://ejournal.lipi.goi.id/diakses-07-11-2020>.

terpelihara melalui sistem pendidikan dan pengutamaan sumber-sumber keagamaan atau karya-karya Islam klasik (*classical Islamic texts*).<sup>33</sup>

Bagi NU dari ketiga macam politik di atas, politik kekuasaan (praktis) adalah politik yang memiliki kedudukan paling rendah. Keterlibatan NU dengan politik kekuasaan (praktis) adalah ketika NU mendukung pendirian Masyumi. Ketika menjadi penyangga Masyumi, tokoh-tokoh NU terlibat perebutan kekuasaan baik untuk jabatan dalam tubuh partai maupun di luar partai. Politik kekuasaan pada masa itu diakhiri dengan perpecahan dan puncaknya ketika NU keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik (1952).<sup>34</sup>

### C. Aplikasi Politik dan Kekuasaan NU

Dalam pembahasan disertasi ini, penulis membagi dan membatasi aplikasi politik NU di era Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi, dan Said Aqil Siradj.

#### 1. Era Abdur Rahman Wahid (Gus Dur)

Nama lengkap Gus Dur adalah Abdurrahman Al-Dakhil. Tetapi populer dengan nama Abdurrahman Wahid. Kata "*ad- Dakhil*" memiliki arti "sang penakluk". Sebuah nama yang diambil dari seorang keturunan Dinasti Umayyad yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di tanah Spanyol.<sup>35</sup> Namun, rupanya kata *Ad- Dakhil* ini tidak cukup dikenal hingga ia kemudian menggantinya dengan "*Wahid*" mengambil nama belakang sang ayah. Pada perkembangannya kemudian ia justru lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus adalah panggilan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti "*abang*" atau "*mas*".<sup>36</sup>

Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara. Ayahnya adalah seorang pengurus organisasi besar Nahdlatul Ulama, yang bernama K.H. Wahid Hasyim. Sedangkan, ibunya bernama Hj. Sholchah adalah putri pendiri pesantren Denayar, Jombang, K.H. Bisri Syamsuri, dari perkawinannya dengan Shinta Nuriyah, mereka dikarunia

---

<sup>33</sup> Ronald A. Lukens Bull, —Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia, *Anthropology & Education Quarterly*, Vol. 32, no. 3 (Sep., 2001): 352, <http://www.jstor.org/stable/3195992>(diakses 24-10-2015).

<sup>34</sup> Syaiful Arif, *Politik NU Pasca Pilpres, Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kengaraan*, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 19-20.

<sup>35</sup> Badiatul Rozikin, *101 Jejak Tokoh Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: c-Nusantara. 2009), h. 35.

<sup>36</sup> Ali Masyakur Musa, , *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, (Jakarta: Erlangga), h. 4.

empat orang anak yaitu, Alissa Qotrunnada Munawaroh, Zannuba Arifah Chafsoh, Annita Hayarunnufus, dan Inayah Wulandari.<sup>37</sup>

Sejak masa kanak-kanak, Gus Dur mempunyai kegemaran membaca dan rajin memanfaatkan perpustakaan pribadi ayahnya.<sup>38</sup> Selain itu, dia juga aktif berkunjung ke perpustakaan umum di Jakarta. Pada usia belasan tahun, Gus Dur telah akrab dengan berbagai majalah, surat kabar, novel, dan buku-buku. Di samping membaca, dia juga hobi bermain bola, catur, dan musik. Bahkan, Gus Dur pernah diminta menjadi komentator sepak bola di televisi. Kegemaran lainnya, yang ikut juga melengkapi hobinya adalah menonton bioskop. Kegemaran ini menimbulkan apresiasi yang mendalam dalam dunia film. Inilah sebabnya Gus Dur pada tahun 1986-1987 diangkat sebagai ketua juri Festival Film Indonesia.<sup>39</sup>

Tahun 1953-1957, setelah tamat SD, Gus Dur melanjutkan belajar di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMPEP) di Tanah Abang.<sup>40</sup> Setahun berikutnya pindah ke SMPEP Gowongan Yogyakarta. Gus Dur tinggal di rumah pemimpin modernis, K.H. Junaidi, ulama anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah. Setelah itu, ia banyak menghabiskan waktunya nyantri di beberapa pesantren terkemuka. Dari tahun 1957 hingga 1959, ia nyantri di Tegalrejo, Magelang. Dari tahun 1959-1963, ia belajar di Mu'allimat Bahrul Ulum Pesantren Tambakberas Jombang, ia juga pernah nyatri di pesantren Krapyak, Yogyakarta dan tinggal di rumah pemimpin NU terkemuka KH. Ahmad Ma'shum.<sup>41</sup>

Masa remaja Gus Dur sebagian besar dihabiskan di Yogyakarta dan Tegalrejo. Didua tempat inilah pengembangan ilmu pengetahuan mulai meningkat. Masa berikutnya, Gus Dur tinggal di Jombang, di Pesantren Tambakberas, sampai kemudian melanjutkan studinya di Mesir. Sebelum berangkat ke Mesir, pamannya telah melamarkan seorang gadis untuknya, yaitu Sinta Nuriyah anak Haji Muh. Sakur. Perkawinannya dilaksanakan ketika Gus Dur berada di Mesir.<sup>42</sup>

Tahun 1964, Gus Dur pergi ke Kairo, Mesir untuk belajar di *Ma'had al-Dimsat* yang berada di lingkungan Al-Azhar Islamic University. Gus Dur dibuat kecewa dengan atmosfer intelektual di Al-

---

<sup>37</sup> Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 71.

<sup>38</sup> Badiatul Rozikin, *op.cit.*, h. 36.

<sup>39</sup> Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 71-72.

<sup>40</sup> Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LkiS, 2010), h. 84.

<sup>41</sup> Badiatul Rozikin, *op.cit.*, h. 36-37.

<sup>42</sup> Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 72.

Azhar yang bisa memadamkan potensi pribadinya, karena teknik pendidikannya yang masih bertumpu pada kekuatan hafalan.<sup>43</sup>

Gus Dur waktu dari Kairo pindah ke Baghdad. Di kota ini, dia merasa cocok karena ia tidak hanya dapat mempelajari sastra Arab, filsafat, dan teori-teori sosial Barat, tetapi dia bisa memenuhi hobinya untuk menonton film-film klasik. Bahkan, Gus Dur merasa lebih senang oleh sistem yang diterapkan Universitas Baghdad, yang dalam berbagai segi dapat dikatakan lebih berorientasi Barat dari pada sistem yang diterapkan al- Azhar. Selama belajar di Timur Tengah inilah, Gus Dur menjadi Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia untuk Timur tengah (1964-1970).

Sepulang dari pengembaranya dari mencari ilmu. Gus Dur kembali ke Jombang dan memilih menjadi guru. Pada 1971, dia bergabung di Fakultas Ushuludin Universitas Tebuireng Jombang. Tiga tahun kemudian, dia menjadi sekretaris Pesantren Tebuireng. Dan pada tahun yang sama, Gus Dur mulai menjadi penulis dan kolumnis. Lewat tulisan-tulisan tersebut, gagasan pemikiran Gus Dur mulai mendapatkan perhatian banyak.<sup>44</sup>

Tahun 1974, Gus Dur diminta pamannya. KH. Yusuf Hasyim untuk membantu di Pesantren Tebuireng, Jombang, dengan menjadi sekretaris. Dari sini Gus Dur mulai sering mendapatkan undangan menjadi narasumber pada sejumlah forum diskusi keagamaan dan kepesantrenan, baik di dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, Gus Dur terlibat dalam kegiatan LSM. Pertama, di LP3ES bersama Dawan Rahardjo, Aswah Mahasin, dan Adi Sasono dalam proyek pengembangan pesantren, kemudian Gus Dur mendirikan P3M yang dimonotori oleh LP3ES.<sup>45</sup>

Memahami pemikiran politik Gus Dur dengan sebagian memahami dari dinamika politik Indonesia itu sendiri. Sumbangan pemikirannya bukan saja pada keteguhannya membicarakan tema-tema sentral yang selalu menyertai perkembangan demokrasi, melainkan juga alternatif-alternatif jawaban yang disodorkan olehnya. Alternatif tersebut jelas bukan yang akan memuaskan semua pihak, tetapi yang penting adalah penemuan dataran-dataran baru yang memungkinkan terjadinya pergerakan-pergerakan yang lebih luwes dan berjangkauan jauh. Dengan cara seperti ini, pengembangan kehidupan politik dapat sekaligus menuju

---

<sup>43</sup> Badiatul Rozikin, *op.cit.*, h. 36.

<sup>44</sup> Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 72.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 72.



perbaikan, tetapi tanpa secara dogmatis<sup>46</sup> mengikuti sesuatu pola baku yang tertutup, sebagus apa pun itu telah dikembangkan.<sup>47</sup>

Tahun 1979, Gus Dur pindah ke Jakarta. Mula-mula dia merintis Pesantren Ciganjur. Sementara, pada awal 1990, Gus Dur dipercaya sebagai wakil khatib syari'ah PBNU. Di sini Gus Dur terlibat dalam diskusi dan perdebatan yang serius mengenai masalah agama, sosial, dan politik dengan berbagai kalangan lintas agama, suku, dan disiplin. Gus Dur semakin serius menulis dan bergelut dengan dunianya, baik dilapangan, kebudayaan, politik, maupun pemikiran ke-Islaman. Karier yang dianggap “menyimpang” dalam kapasitasnya sebagai seseorang tokoh agama sekaligus pengurus PBNU dan mengundang cibiran adalah ketika menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada tahun 1983. Dia juga menjadi ketua juri dalam Festival Film Indonesia (FFI) tahun 1986 dan 1987.

Tahun 1984, Gus Dur dipilih secara aklamasi oleh sebuah tim *abl hall wa al-'aqdi* yang diketuai K.H. As'ad Syamsul Arifin untuk menduduki jabatan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Jabatan tersebut kembali dikukuhkan pada Muktamar ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1989) dan Muktamar di Cipasung, Jawa Barat (1994). Jabatan ketua PBNU kemudian dilepas ketika Gus Dur menjabat Presiden RI ke-4. Selama menjadi Presiden, tidak sedikit pemikiran Gus Dur yang kontroversial pendapatnya sering berbeda dari pendapat banyak orang.<sup>48</sup>

Gus Dur dengan ciri khasnya bercelana panjang berbaju batik, kupiah (songkok nasional) hitam, dan yang khas pakai kacamata tebal. Orang tidak akan mengira dibalik kesederhanaannya itu muncul sesuatu yang mengejutkan, kalau ia berbicara tentang umat Islam Indonesia, oleh para Kiai NU disebut suka *nyeleneh*.<sup>49</sup> Kenyelenehan dan kekontraversialan Gus Dur itu masih berlangsung sampai saat dia menjabat sebagai Presiden hasil pemilihan umum tahun 1999.<sup>50</sup>

Selama masa kepemimpinannya di NU (tiga periode), banyak kronik, dinamika, dan gebrakan sosial-keagamaan yang sebelumnya masih

---

<sup>46</sup> Dogmatis adalah sikap atau perilaku seseorang yang didasari oleh kepercayaan tertentu dengan sangat kuat dan tidak dapat diubah.

<sup>47</sup> Muhammad A.S. Hikam. “Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman *Kumpulan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid*”, (KOMPAS. Jakarta), h. 165.

<sup>48</sup> <http://www.tunas63.wordpress.com/2009/12.../biografi-gus-dur-dan-keluarga>.

<sup>49</sup> Greg Barton, *Biografi Gus Dur*, Yogyakarta: LkiS, 2004. h. 100- 120. Kondisi *nyeleneh* merupakan ciri khas Gus Dur sebagai pribadi, yang tidak di temukan pada tokoh-tokoh NU sebelumnya, termasuk kakek dan ayahnya Gus Dur sendiri. Akan tetapi, justru karena karakter *anomaly* tersebut, posisi NU menjadi kuat dalam proses *bergaining* dengan negara taupun yang lainnya

<sup>50</sup> Akhmad Taufik,. *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005). h, 72.

asing, bahkan dianggap “tabu” kalangan NU. Seperti diketahui, NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang mempunyai karakter tradisional baik pemahaman keagamaan maupun dalam praktiknya. Citra demikian sudah menjadi karakter khas jami’iyah ini, NU ditangan Gus Dur saat itu sudah mengalami transformasi “revolusioner” dalam semua dimensi pemahaman dan sebagian praktik keagamaan tradisional itu.<sup>51</sup>

Pada akhir dasawarsa 1970an dan 1980an, muncullah wacana-wacana baru, yang berani mempertanyakan interpretasi khasanah klasik yang sudah mapan dan mencari relevansi tradisi Islam untuk masyarakat sedang mengalami perubahan cepat (perkembangan revolusioner). Baik dalam aktivitas LSM maupun dalam wacana yang berkembang, perhatian mulai bergeser dari para kiyai sebagai tonggak organisasi NU kepada massa besar “akar rumput” yang merupakan mayoritas jama’ahnya tetapi kepentingannya selama ini lebih sering terabaikan. Dominasi aktivitas dan wacana NU oleh elit tradisional, yang terdiri dari para kiyai besar pendiri NU dan keturunan mereka (gus-gus), telah mulai terdobrak. Sebagian besar aktivis dan pemikir muda yang memberi nuansa baru kepada NU pada dasawarsa 1980an dan 1990an tidak berasal dari kiyai melainkan dari keluarga awam, yang mengalami mobilitas sosial.<sup>52</sup>

Beberapa tulisan Gus Dur yang ditemukan ada 493 buah tulisan sejak awal 1970-an hingga awal tahun 2000. Hingga akhir hayatnya (2009), bisa jadi telah lebih dari 600 buah tulisan Gus Dur. Karya intelektual yang ditulis selama lebih dari dua dasawarsa itu diklasifikasikan kedalam delapan bentuk tulisan, yakni tulisan dalam bentuk buku, terjemahan, kata pengantar buku, epilog buku, analogi

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h., 73.

<sup>52</sup> Perkembangan internal NU tersebut dimungkinkan oleh sejumlah faktor eksternal yang mengurangi isolasi warga NU dari masyarakat luas. Seperti, alumni pesantren untuk meraih pendidikan tinggi. Kehidupan di kampus- kelompok diskusi, interaksi dengan mahasiswa dari latar belakang berbeda, bacaan yang luas, di samping mata kuliah yang beragam-kemudian membantu sebagian mereka untuk memperoleh cakrawala sosial dan intelektual mereka. Faktor lain adalah usaha- usaha untuk menggerakkan proyek perkembangan masyarakat melalui pesantren, yang diperlopori oleh LP3ES dan kemudian melibatkan sejumlah LSM nasional dan internasional lainnya. Dengan demikian, pesantren sedikit demi sedikit mulai ditarik ke dalam jaringan komunikasi internasional. Gerakan LSM mulai menjadi faktor penting di panggung politik internasional pada dasawarsa 1960-an. Di Indonesia, sponsor asing mulai membidani LSM pada dasawarsa 1970-an, dan gerakan LSM menjadi semakin menonjol pada dasawarsa 1980-an. Di sisi lain, mereka bisa muncul karena mendapat dukungan dan perlindungan dari sejumlah tokoh muda dari kalangan elit, seperti Fahmi Saifuddin, Mustafa Bisri, dan Abdurahman Wahid. Wawancara dengan Imdadun Rahmat (Wakil ketua PBNU dan rektor INAIS / Institut Agama Islam Sahid Bogor, 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.

buku, dan makalah, rincian jumlah setiap klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

Tabel 5  
Jumlah Tulisan Gus dur dengan Berbagai Bentuknya Tahun 1970  
hingga Tahun 2000

Buku/Tulisan		Jumlah	Keterangan
1	Buku	12 Buku	Terdapat pengulangan
2	Buku Terjemahan	1 Buku	Bersama Hasyim Wahid
3	Kata Pengantar Buku	20 Buku	-
4	Epilog Buku	1 Buku	-
5	Artikel	41 Buku	-
6	Antologi Buku	263	Diberbagai majalah, surat kabar, dan media massa
7	Kolom	105 Buku	Diberbagai majalah
8	Makalah	50 Buku	Sebagian besar tidak Dipublikasikan

Sumber: inress (2000: 35)

Tabel di atas, jelaslah bahwa Gus Dur tidak sekedar membuat pernyataan dan melakukan aksi-aksi sosial politik, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat sipil belaka, tetapi juga merefleksikannya ke dalam tulisan, baik dalam bentuk artikel, kolom, makalah, maupun kata pengantar buku. Hanya saja, karna buku-buku yang diterbitkan itu dalam bentuk bunga rampai tanpa ada rekontruksi dari Gus Dur, kesan ketidak utuhan bangunan pemikiran tidak bisa dihindari. Akan tetapi, barangkali itulah cermin latar intelektual Gus Dur yang bukan berasal dari tradisi akademik “sekolah modern” yang setiap tulisan mesti terikat dengan suatu metodologi dan referensi formal.<sup>54</sup>

Spektrum intelektualitas Gus Dur mengalami perluasan dari waktu ke waktu, terutama wacana yang dikembangkan. Temuan *inress* (2000) mengidentifikasi perkembangan tersebut sesuai dengan periodisasi per sepuluh tahun, mulai 1970 hingga 2000. Inress memberi perhatian terhadap *jumlah* (kuantitas) dan isi (*content*) dari produk intelektual Gus Dur dalam kurun waktu 10 tahunan. Data tersebut di tunjukkan dalam Tabel 2, sebagai berikut: <sup>55</sup>

<sup>53</sup> Faisol, *Gus Dur & Pendidikan Islam, Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 73.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 74.

<sup>55</sup> Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 128.

Tabel. 6. Tema-tema Tulisan Gus Dur

Periode		Jumlah	Isi
1	1970-an	37	Tradisi Pesantren, Modernisasi Pesantren, NU, HAM, Reinterpretasi ajaran, Pembangunan, Demokrasi.
2	1980-an	189	Dunia pesantren, NU, Ideologi negara (pancasila), Pembangunan, Militarisme,
3	1990-an	253	Pembaruan ajaran Islam, Demokrasi, Kepemimpinan umat, Pembangunan, HAM, Kebangsaan, Partai politik, Gender, Toleransi Agama Universalisme Islam, NU,
4	2000-an	122	Budaya, NU dan partai politik, PKB, Demokratisasi dan HAM, Ekonomi dan keadilan sosial, Ideologi dan negara, Tragedi kemanusiaan, Islam dan

Sumber : inress (2000:38)

Gus Dur mengilhami banyak generasi muda NU untuk bersikap kritis terhadap negara dan kebijaksanaan pemerintah, dan untuk lebih terbuka terhadap kalangan lain, termasuk non- Islam dan kiri. Di samping kitab kuning mereka mencari ilham dari teologi pembebasan, ilmu sosial, pemikiran sosialis, cendekiawan muslim seperti Hasan Hanafi dan penulis-penulis Posmodern.

Kiprah politik Gus Dur dimulai sekitar awal 1980-an. Secara terbuka, Gus Dur menawarkan ide-ide pluralisme, demokrasi, hak-hak asasi manusia, *civil society*<sup>56</sup> dan lain-lain.<sup>57</sup> Di kalangan intelektual Islam Indonesia memperebutkan wacana ini untuk diklaim sebagai representasi gerakan keagamaanya yang sarat muatan politis dan ideologis. Tidak heran kemudian, jika seorang AS.Hikam selalu mengklaim NU sebagai *civil society* karena dianggapnya memiliki kedekatan antara konsep *civil society* dengan tradisi yang dianut NU, bahkan khittah NU dibaca sebagai wujud gerakan kultural sebagai bagian pemberdayaan *civil society*.<sup>58</sup> Kesadaran tersebut semakin diperkokoh dengan

<sup>56</sup> Abdurrahman Wahid, "Islam dan Pemberdayaan *Civil Society*", seperti dikutip AS Hikam, "Wacana Intelektual tentang *Civil Society* di Indonesia", dalam *Paramadina* Vol.1, No.2 (1999), h. 43-44.

<sup>57</sup> Ahmad Rofi' Usmani. *Ensiklopedia Tokoh Muslim Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*. (Jakarta: Mizan Media Utama: 2015).

<sup>58</sup> Muhammad AS.Hikam, "Khittah dan Penguatan *Civil Society* di Indonesia: Sebuah kajian Historis Struktural atas NU sejak 1984", dalam Ellayasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 133-163.

munculnya analisis-analisis sejumlah sarjana dan pengamat yang mengidentikkan NU sebagai gerakan pro-*civil society*, seperti yang dilakukan oleh Douglas E. Remage<sup>59</sup> dan Dhaniel Dhakidae<sup>60</sup> yang menyebut NU sebagai *the last bastion of civil society* di Indonesia. Greg Barton<sup>61</sup> and Robert Hefner<sup>62</sup> juga telah banyak menulis tentang peran NU dalam mendukung perkembangan Islam yang pluralis, toleran dan “sipil”. Bahkan, komparativis politik ternama Alfred Stepan memuji NU sebagai “tulang punggung masyarakat sipil yang toleran”.<sup>63</sup>

Gus Dur dan elite pesantren telah jadi simbol perubahan di NU yang menginspirasi warga nahdliyyin untuk membangun peradaban barudi bumi Indonesia. Gus Dur dan elite pesantren memberi jalanbagi warga nahdliyyin dan warga Indonesia untuk menjalin aliansi strategis antar sesamakelompok pembaharu dalam mendorong reformasi politik dan menciptakan masyarakat adil. Nyatanya Gus Dur memberikan peluang luas bagi intelektual muda NU dan aktivis sosial untuk terlibat dalam PKB dan partai politik pada 1998 hingga Pemilu 1999. Latief menyebutkan,<sup>64</sup> pada rezim Orde Baru tidak sedikit aktivis dan penggerak civil society terlibat dalam politik nasional mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dalam Pemilu 1999.

Gus Dur dan elite pesantren telah jadi simbol perubahan di NU yang menginspirasi warga nahdliyyin untuk membangun peradaban baru di bumi Indonesia. Gus Dur dan elite pesantren memberi jalanbagi warga nahdliyyin dan warga Indonesia untuk menjalin aliansi strategis antar sesama kelompok pembaharu dalam mendorong

---

<sup>59</sup> Douglas E. Remage, “Democratisation, Religious Tolerance, and Pancasila: The Political Thought of Abdurrahman Wahid”, dalam Greg Barton dan Greg Fealy (eds.), *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam, and Modernity in Indonesia* (Clayton: Monash Asia Institute, 1996), h. 254 dan 227.

<sup>60</sup> Dhaniel Dhakidae, “Langkah Non-Politik dari Politik Nahdlatul Ulama”, dalam Ellayasa, KH. Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 125-131.

<sup>61</sup> Greg Barton, *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside* (Honolulu, Hawaii: University of Hawai'i Press, 2002).

<sup>62</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000).

<sup>63</sup> Alfred Stepan and Jeremy Menchik, “Islam in Indonesia: Democratisation From Below”, *Qantara*, 18 November 2010, <https://en.qantara.de/content/islam-in-indonesia-democratisation-from-below>.

<sup>64</sup> Hilman Latief, The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam, *Al-Jāmi'ah*, Vol. 51, no. 2 (2013 M/1435 H): 346. <http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/160>(diakses 12-11-2020).



reformasi politik dan menciptakan masyarakat adil. Nyatanya Gus Dur memberikan peluang luas bagi intelektual muda NU dan aktivis sosial untuk terlibat dalam PKB dan partai politik pada 1998 hingga Pemilu 1999. Latief menyebutkan,<sup>65</sup> pada rezim Orde Baru tidak sedikit aktivis dan penggerak civil society terlibat dalam politik nasional mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dalam Pemilu 1999.

Dengan kiprah dan perannya di berbagai bidang, kiai, politisi,<sup>66</sup> intelektual, budayawan, dan mantan Presiden. Kiprah politiknya sendiri semakin menjulang ketika secara tegas ia terjun ke dunia politik praktis dengan mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),<sup>67</sup> hingga mencapai puncaknya pada 1999-2001, saat presiden ke-4. Namun, jabatan sebagai Presiden berakhir pada Sidang Istimewa MPR 21 Juli 2001.<sup>68</sup>

Berdirinya PKB sebagai wadah politik baru warga NU, dan terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI merupakan tantangan lebih berat bagi gerakan progresif NU. Mereka harus memilih antara area politik praktis dan “perjuangan di jalur kultural” yang telah menjadi ciri khas mereka. Oleh karena itu semanjak menjadi presiden RI, Gus Dur memiliki sejarah besar membangun demokrasi,<sup>69</sup> kebebasan pers dan berbicara, serta perjuangan hak-hak kaum minoritas. Selama berkuasa (1998-2001) ia juga telah memberikan wacana yang menarik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, seperti deskralisasi istana, supermasi sipil, deformalisasi Islam, perebutan tafsir konstitusi (konfliknya dengan parlemen) menjadi wacana politik yang menakjubkan di masanya.

---

<sup>65</sup> Hilman Latief, “The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam”, *Al-Jāmi'ah*, Vol. 51, no. 2 (2013 M/1435 H): 346. <http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/160>(diakses 12-11-2020).

<sup>66</sup> Selama Gus Dur berada dalam oposisi terhadap pemerintah, gerakan progresif NU ini menganggapnya sebagai contoh dan pengayom mereka. Tetapi ketika ia kembali menjalin hubungan baik dengan Soeharto dan membawa Tutut keliling pesantren menjelang pemilu 1997, mereka terpaksa menentukan sikap mereka sendiri dan mengambil jarak dari figur Gus Dur.

<sup>67</sup> Asmawi, PKB, *Jendela Politik Gus Dur*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999), h. 10.

<sup>68</sup> Munawar Ahmad, *Ijtihad Politik Gus Dur Analisis Wacana Kritis*, (Yogyakarta: LkiS. 2010), h. 2.

<sup>69</sup> Gus Dur mengajarkan bahwa pluralisme beragama, dan pemahaman keberagaman beragama yang ada di masyarakat di Indonesia sebagai sesuatu yang harus ditoleransi. Gus Dur datang yang bisa mengayomi minoritas, menggalang kekuatan dengan kelompok sekuler, dan menyerap banyak kelas sosial. Pada masa pemerintahan Gus Dur politik yang demokratis mulai tampak terwujud. Hal ini dapat terlihat tidak ada Gus Dur penghapusan peraturan yang merugikan kaum minoritas.

Namun, banyak pula fenomena politik yang menarik dan unik pada saat Gus Dur memegang tampuk kepemimpinan sebagai ketua Dewan Syuro PKB<sup>70</sup> dan Presiden Republik Indonesia. Kaitanya dengan pengaruh Gus Dur terhadap PKB bisa dilihat manakala setiap terjadi suksesi kepemimpinan dalam tubuh partai, Gus Dur menggunakan tekanan-tekanan kepada beberapa tokoh partai sebelumnya, sehingga tidak heran jika dalam sejarah partai berhasil mencatat bahwa mulai dari Matori Abdul Jalil, Alwi Shihab, Khoirul Anam sampai dengan Muhaimin Iskandar selalu terjadi konflik dengan Gus Dur dan Nahdlatul Ulama sempat mengalami perpecahan politik eksternal cukup tajam dengan berdirinya Partai Kebangkitan Nasional Umat (PKNU)<sup>71</sup> yang dipelopori oleh sebagian tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.

Gus Dur dapat dikatakan sebagai sosok pemimpin yang kharismatik, seperti yang telah peneliti sampaikan di atas, bahwa sosok Gus Dur merupakan sosok seorang pemimpin yang berasal dari tokoh besar, sehingga awal kemunculannya pun sudah menjadi nilai tersendiri bagi para pengikutnya. Selanjutnya dalam proses perkembangan politiknya, Gus Dur juga merupakan sosok yang bisa dikatakan sebagai sosok yang transformasional. Hal ini didasarkan pada perubahan-perubahan yang diimplementasikan Gus Dur dalam bentuk kebijakan-kebijakan politik sehingga dapat mendeskripsikan tipe kepemimpinan politik transformasional, diantaranya :

1. Pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial.

Gebrakan pertama Gus Dur ketika menjabat sebagai Presiden ke-4 RI adalah menghapus eksistensi Departemen Penerangan (Deppen) dan Departemen Sosial (Depsos). Keputusan Gus Dur membubarkan Deppen dan Depsos dilakukan di atas pertimbangan; pembentukan departemen untuk mengurus sebuah bidang persoalan menunjukkan besarnya peranan negara dalam urusan yang

---

<sup>70</sup> Gus Dur menetapkan Pancasila sebagai asas partai. Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah SWT, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menegakkan keadilan, menjaga persatuan, menumbuhkan persaudaraan sesuai dengan nilai-nilai Islam *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*. Partai yang bersifat kebangsaan, demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul karimah

<sup>71</sup> Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) didirikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang berseberangan dengan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pendirian PKNU juga untuk mengoreksi PKB parpol yang dilahirkan PBNU, yang dinilai telah menyimpang jauh dari harapan warga NU. Dalam praktiknya, bukan saja menjadi wadah ulama non-kubu Gus Dur, tapi juga politisi PKB yang keluar akibat konflik internal. Di PKNU ada Alwi Shihab dan juga Choirul Anam. Dengan modal para kiai khos yang memiliki pengaruh luas bagi warga NU. <https://news.detik.com/parpol/d-1059317/partai-kebangkitan-nasional-ulama-34>.

bersangkutan. Maksudnya bahwa aspek-aspek penerangan dan sosial biarlah menjadi urusan masyarakat sendiri. Negara hanya akan mengambil peran minimal. Dengan kata lain negara tentu tidak akan melepaskan tanggung jawab sama sekali, melainkan mengambil peran yang terbatas.<sup>72</sup>

## 2. Membuka Hubungan Dagang dengan Israel

Kebijakan yang tidak kalah kontroversial dalam perjalanan kepemimpinan politik Gus Dur salah satunya adalah ide tentang membuka hubungan dagang dengan Israel, hal ini disampaikan oleh Gus Dur pada acara “Indonesia Next” di Jimbaran Bali 3 hari setelah terpilih sebagai presiden RI ke-4, Oktober 1999. Sontak, gagasan ini langsung mendapatkan perlawanan yang hebat dari berbagai kalangan Islam. Bahkan mereka cenderung membawa kasus ini pada “isu agama”, bukan lagi sebagai isu ekonomi dan kerjasama bilateral antara dua negara berdaulat.<sup>73</sup>

## 3. Pemisahan TNI-POLRI

Pada masa pemerintahan Gus Dur, muncul kebijakan yang kontroversial dikalangan militer kebijakan tersebut adalah pemisahan antara TNI dan POLRI. Alasan mendasar yang

---

<sup>72</sup> Dari kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa Gus Dur mempunyai tiga sifat dasar kepemimpinan dari delapan sifat dasar kepemimpinan yang disampaikan oleh Warren Bennis dalam (Muhammad Syafi'i. *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: PLM, 2007), h. 21). yaitu *Vissioner*, berkemauan kuat (*passion*), dan berani (*courage*). Dalam hal ini Warren Bennis mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Vissioner* adalah mempunyai ide yang jelas tentang apa yang diinginkan. Kemudian yang dimaksud dengan berkemauan kuat (*passion*) adalah mempunyai kesungguhan dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan. Sedangkan, berani (*courage*) mempunyai arti yaitu seorang pemimpin yang mempunyai sifat berani dalam mengambil setiap resiko yang harus dihadapi.

<sup>73</sup> Gus Dur dalam hal ini mencoba untuk menjadi seorang pemimpin yang mempunyai fungsi kepemimpinan sebagai seorang perintis (*pathfinding*), pada konsep ini Stephen Covey dalam Syafi'i menyatakan bahwa bagaimana upaya sang pemimpin memahami dan memenuhi kebutuhan utama para *stakeholder*-nya, misi dan nilai-nilai yang dianutnya, serta yang berkaitan dengan visi dan strategi, yaitu gimana organisasi akan dibawa dan bagaimana caranya agar sampai pada tujuannya (Muhammad Syafi'i. *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, (Jakarta: PLM. 2007), h 21. Namun yang terjadi pasca munculnya kebijakan tersebut adalah berbagai macam pro-kontra yang terjadi di negara ini, akhirnya keinginan untuk mewujudkan hubungan dagang dengan Negara Israel dihentikan, hal ini dikarenakan Gus Dur lebih memilih keutuhan dan kondusifitas Republik Indonesia, sehingga kebijakan ini setelah diperdebatkan oleh beberapa kalangan hanya menjadi isu kebijakan nasional yang tidak pernah terlaksana.

dilakukan Gus Dur dalam kebijakan ini adalah selain untuk semaksimal mungkin melakukan pengurangan sistemik terhadap hak-hak progresif militer yang telah lama dikembangkan di masa orde baru, juga jika TNI dianggap mewakili tanggung jawab keamanan secara militer, maka sesungguhnya POLRI seharusnya menangani keamanan di wilayah sipil. Pengembalian fungsi-fungsi yang demikian ini merupakan langkah-langkah penting untuk mendudukkan kembali organ-organ sipil pada posisi semula.

#### 4. Seringnya Melakukan *Reshuffle* Kabinet

Keputusan yang cukup mengejutkan dan menggemparkan perpolitikan pada saat pemerintahan Gus Dur juga bisa menjadi alasan kalau Gus Dur adalah pemimpin yang benar-benar kontroversial, bagaimana tidak, terdapat lebih dari sepuluh menteri yang pernah di *reshuffle* oleh Gus Dur, bahkan beberapa menteri tersebut adalah orang-orang yang berpengaruh dalam partai politik yang bisa menjadi boomerang dalam pemerintahannya Gus Dur.<sup>74</sup>

#### 5. Mengeluarkan Dekrit Presiden

Memasuki tahun baru 2001, perseteruan antara Presiden dan DPR semakin memanas. DPR tidak dapat di rem untuk menyelenggarakan sidang paripurna guna mengeluarkan memorandum, sedangkan Presiden (Gus Dur) semakin keras melakukan perlawanan. Bagi Gus Dur, selain kasus Bulog dan Brunei itu omong kosong, menjatuhkan Presiden di tengah jalan dengan cara mengeluarkan memorandum adalah inkonstitusional. Oleh sebab itu, sebuah tindakan inkonstitusional bisa dihalangi dengan sebuah dekrit sebelum keadaan menjadi lebih buruk.

Ide mengeluarkan dekrit ini juga semakin menegaskan bahwa kepemimpinan yang dijalankan oleh Gus Dur dalam kapasitasnya sebagai seorang presiden sedikit melukiskan bahwa Gus Dur benar-benar teguh pada pendirian. Meskipun pendapat Gus Dur tentang dekrit merujuk pada pendapat ahli hukum tatanegara, Harun Alrasid,

---

<sup>74</sup> Pada masa pemerintahan Gus Dur, menteri-menteri seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla (JK), Wiranto di-*reshuffle*. Gus Dur meminta Menkopolkum Wiranto mengundurkan diri dari jabatannya karena Gus Dur menganggap Wiranto penghalang upayanya pada reformasi militer dan tudingan Wiranto dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Pada April 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi. Alasannya JK dan Sukardi dituding terlibat korupsi meski Gus Dur tak pernah memberikan bukti kuat. SBY sebagai Menko Polsoskam juga dicopot dari kabinet Gus Dur karena menolak perintah Presiden untuk menyatakan keadaan darurat pada Juni 2001. Gus Dur meminta SBY menetapkan keadaan darurat karena kemelut politik panas dan buntu dengan DPR dan sebagian menteri Gus Dur memintanya mengundurkan diri.

yang mengatakan bahwa di dalam sistem presidensiil masa jabatan Presiden itu sudah *fixed* dan ia tidak bisa dijatuhkan, tapi dunia politik tidak seperti apa yang diinginkan oleh Gus Dur, secara tidak langsung ketika Gus Dur menginginkan adanya dekrit, para pengamat politik dan masyarakat akan menganggap bahwa keputusan Gus Dur cenderung otoriter dan hanya ingin mempertahankan kekuasaan saja.

#### 6. Kunjungan Kerja ke Luar Negeri

Gus Dur merupakan sosok Presiden yang sangat kontroversial, hal ini dapat dilihat dari sikap Gus Dur yang terlalu sering melakukan perjalanan ke luar negeri. Bagaimana tidak, kondisi bangsa yang baru saja mengalami masa transisi dalam sistem kenegaraannya, seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Gus Dur, tapi kenapa justru Gus Dur justru memilih untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, tidak kemudian berdiam di dalam negeri dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat berdampak positif pada negara.<sup>75</sup>

#### 7. Konflik Internal PKB

Konflik yang terjadi dalam internal PKB dimulai ketika Matori Abdul Jalil sebagai ketua PKB hadir dalam sidang istimewa MPR yang bertujuan untuk memakzulkan Gus Dur, hal ini yang kemudian membuat geram Gus Dur, akhirnya sebagai Dewan Penasihat partai, Gus Dur menjatuhkan posisi Matori sebagai ketua PKB pada tanggal 15 agustus 2001 dan melarangnya ikut serta dalam aktivitas partai sebelum mencabut keanggotaan Matori pada bulan November. Tidak hanya sampai disitu, setelah adanya konflik antara Gus Dur dengan Matori yang pada saat itu

---

<sup>75</sup> Tercatat lebih dari sepuluh negara yang pernah dikunjungi Gus Dur pada saat dia menjabat sebagai presiden, diawali pada tahun 2000 Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negerinya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Gus Dur melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Perancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Di bulan April, Gus Dur mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G-77, sebelum kembali melewati Kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Gus Dur sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Perancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya. Abu Niam, "Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur", *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam Volume VI No. 1: 1-20, September 2014, ISSN: 1978-4767*. h. 16.



menjadi ketua partai, pada Muktamar yang diselenggarakan di Surabaya (Oktober 2005) dan Semarang (April 2005) menjadi konflik antara kubu Alwi Shihab dan Muhaimin Iskandar yang mendapatkan dukungan penuh oleh Gus Dur, yang pada akhirnya kasus ini berujung di ranah hukum dan kemudian menjadikan Muhaimin Iskandar sebagai ketua yang sah. Terakhir Gus Dur sebelum meninggal juga masih sempat berbeda pendapat dengan Gus Dur terkait dengan posisi ketua partai, kali ini yang didukung oleh Gus Dur adalah pihak dari Ali Maskur Moesa dan tidak mengakui kubu Muhaimin Iskandar sebagai pengurus partai.<sup>76</sup>

Beberapa kebijakan itulah yang kemudian menunjukkan bagaimana sangat berpengaruhnya Gus Dur dalam setiap momen politik yang terjadi, mulai dari kebijakan Gus Dur sebagai seorang presiden maupun ketika menjabat sebagai ketua dewan penasihat dalam suatu partai. Namun dikarenakan sosoknya yang penuh tekat-tekis dan kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya yang sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Akibat restrukturisasi lembaga pemerintahan menyebabkan kondisi politik menjadi tidak stabil atau sering terjadi pertentangan antar partai bahkan pertentangan intern partai dan gaya Gus Dur yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungannya simpati berubah menjadi antipati, puncaknya Gus Dur pun dilengserkan oleh MPR dan dipaksa keluar dari Istana Negara.

## 2. Era Hasyim Muzadi

Abdul Hasyim Muzadi (KH Hasyim Muzadi) lahir di Bangilan, Tuban, 8 Agustus 1944 dari pasangan H. Muzadi (alm) dan Hj. Rummyati. Latar belakang pendidikan Hasyim seperti halnya kebanyakan warga Nahdliyyin, selalu merupakan perpaduan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama. Pendidikannya ia mulai dari Madrasah Ibtidaiyah Tuban- Jawa Timur 1950-1953. SD Tuban-Jawa Timur 1954-1955. SMPN I Tuban- Jawa Timur 1955-1956. KMI Gontor, Ponorogo-Jawa Timur 1956-1962. PP Senori, Tuban-Jawa Timur 1963. PP Lasem-Jawa Tengah 1963. IAIN Malang-Jawa Timur 1964-1969.

Di lingkungan NU Hasyim pernah menjadi Ketua Ranting NU Bululawang-Malang. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Anak Cabang GP Ansor Bululawang-Malang 1965, Ketua Cabang PMII Malang 1966, Ketua KAMI Malang 1966, serta Ketua Cabang GP Ansor Malang 1967-1971. Wakil Ketua PCNU Malang tahun 1971-1973, Ketua PCNU Malang tahun 1973-1977, Sekretaris PWNU Jawa Timur 1987-1988, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur

---

<sup>76</sup> *Ibid*, Abu Niam, "Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur", h.17.

1988-1992, Ketua Wilayah Jawa Timur tahun 1992-1997. Hingga Ketua Umum PBNU dua periode 1999-2000.

Selain sebagai pengurus organisasi terbesar di Indonesia ini juga dikenal sebagai mubalig yang nyaris tak kenal lelah untuk memberikan ceramah ke berbagai tempat di pelosok negeri ini. Ceramah-ceramah keagamaannya sangat khas. Penuh isi dan tak jarang mengeluarkan *joke-joke* segar yang merupakan ciri khas dari muballigh NU. Keahliannya dalam bidang ceramah diakui oleh banyak kalangan. Menurut Ulinnuha (Staf Pengajar di Sekolah Tinggi *Kulliyatul* Quran, Depok asuhan beliau) Kiai Hasyim memiliki keahlian dalam mengolah kata. Materi yang rumit sekalipun bisa menjadi sangat mudah dicerna pendengarnya. Konon, beliau mengamalkan doa Nabi Daud As yang salah satu faidahnya tidak memberi kesempatan bagi pendengar ceramah kecuali menyimak dan menunggu kalimat demi kalimat.<sup>77</sup>

Dalam bidang tulis menulis, Hasyim terbilang kurang produktif. Beliau hanya menerbitkan tiga karya; *Membangun NU Pasca Gus Dur*, Grasindo, Jakarta, 1999. *NU di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Logos, Jakarta, 1999. *Menyembuhkan Luka NU*, Jakarta, Logos, 2002. Meski demikian, ceramah-ceramah keagamaannya sudah cukup banyak dapat dinikmati di internet.

Pendiri pesantren Al Hikam di Malang dan Depok ini kemudian dipilih menjadi Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama pada periode 1999-2004.<sup>78</sup> Ia pernah terjun ke perpolitikan nasional dengan menjadi calon wakil presiden pada Pemilu 2004. Hasyim mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang maju sebagai calon presiden. Pasangan Mega-Hasyim sempat maju ke putaran kedua pada Pilpres 2004. Namun, pada putaran kedua pasangan Mega-Hasyim dikalahkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan perolehan persentase suara 60, 62 persen-39,38 persen.

Menurutnya, seperti yang disampaikan pada acara Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan di Yogyakarta pada Se Sarasehan Nasional Ulama Pesantren dan Cendekiawan dengan Tema Tentang Keagamaan, Keummatan dan Kebangsaan, di Jl. Letjen Haryono No. 42 Yogyakarta, Selasa (06/05).<sup>79</sup> Arah politik NU tidak menjurus pada kekuasaan namun lebih kepada apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia ke depan.

---

<sup>77</sup><https://lokadata.id/artikel/kiai-hasyim-muzadi-penggerak-islam-kultural>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>78</sup><https://nasional.kompas.com/read/2017/03/16/08020331/perjalanan.kh.hasyim.muzadi.dari.pimpin.pb.nu.hingga.jadi.wantimpres>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>79</sup><https://www.nu.or.id/post/read/51819/kh-hasyim-muzadi--politik-nu-bukan-kekuasaan>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

Pada periode Hasyim Muzadi terdapat adanya transformasi sikap politik NU yang jelas sebagai implementasi khittah NU 1926, yakni NU tidak memainkan politik praktis demi kepentingan kekuasaan, tetapi NU harus memainkan politik moral-kebangsaan. Artinya jika ada suatu hal yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara, maka NU harus turun tangan seperti menyikapi isu terorisme, radikalisme agama. Jika demikian, maka kesan perilaku politik NU yang sesak dengan kontroversi menjadi tidak relevan.

Langkah NU mengembangkan paradigma baru politik moral-kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa cukup bijak, sebagai implementasi khittah NU 1926 dengan membentangkan garis demarkasi antara gerakan kultural NU dengan politik praktis. Upaya NU untuk memberdayakan masyarakat melalui jalur kultural ini didedikasikan sebagai penguatan *civil society*, sehingga NU baik sebagai *jam'iyah* (organisasi) maupun *jama'ah* (komunitas) turut menciptakan negara-bangsa yang kondusif, lebih religius, damai dan demokratis.

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Hasyim kemudian ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.<sup>80</sup> Hasyim Muzadi tutup usia pada Kamis (16/3/2017) pagi. KH Hasyim Muzadi meninggal dunia sekitar pukul 06.15 WIB di kediamannya, Pesantren Al Hikam, Kota Malang, Jawa Timur.

### 3. Era Said Aqil Siradj

Said Aqil Siradj lahir di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, pada 3 Juli 1953. Semasa kecilnya, Said menamatkan pendidikan Madrasah *Ibtidaiyah* (setingkat sekolah dasar) di kampung halamannya. Kemudian, dia melanjutkan pendidikan setingkat sekolah menengah pertama dan menengah atas di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Selain itu, Said Aqil juga tercatat sempat mengenyam pendidikan keagamaan di Arab Saudi selama lebih dari 13 tahun. Beberapa ilmu yang dipelajarinya yaitu keagamaan, filsafat, dan budaya di seputar jazirah Arab, hingga pada akhirnya ia mendapatkan gelar doktor di bidang *usuhuludin* (perbandingan agama) dari Universitas Ummur Qura, Mekkah.

Said Aqil Siradj tercatat memiliki beragam pengalaman organisasi sebagai berikut: 1) Sekretaris Pergerakan Mahasiswa Islam

---

<sup>80</sup> Hasyim Muzadi juga punya ciri khas yang berbeda dengan Gus Dur, karena situasi dan kondisi yang tidak sama. Zaman Hasyim Muzadi, NU memiliki pengaruh besar di dunia internasional. Ada kesamaan antara Gus Dur dengan Hasyim, adalah bagaimana NU berjalan sesuai visi-misi organisasi, termasuk menjadi bagian dalam kepemimpinan nasional. Meski Hasyim belum berhasil dalam kontestasi nasional, bersama Megawati saat itu.

Indonesia (PMII) Rayon Krapyak Yogyakarta, 1972-1974. 2) Ketua Keluarga Mahasiswa NU (KMNU) Mekkah, 1983-1987. 3) Wakil katib 'aam PBNU, 1994-1998. 4) *Katib 'aam* PBNU, 1998-1999. 5) Penasihat Gerakan Anti Diskriminasi Indonesia (GANDI), 1998. 6) Ketua Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB), 1998-sekarang. 7) Penasihat Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI), 1998-sekarang. 8) Wakil Ketua Tim Gabungan Pencari fakta (TGPF) Kerusuhan Mei 1998. 9) Ketua TGPF kasus pembantaian dukun santet Banyuwangi, Jawa Timur (1998). 10) Penasihat PMKRI, 1999-sekarang. 11) Ketua Panitia Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri, 1999. 12) Anggota Kehormatan Matakini, 1999-2002. 13) Rais syariah PBNU, 1999-2004. 14) Ketua Majelis Ulama Indonesia, 2000-2005. 15) Ketua Umum PBNU dengan Rais Aam KH. Sahal Mahfudh, 2010-2015. 16) Ketua Umum PBNU dengan Rais Aam KH. Ma'ruf Amin, 2015-sekarang. 17) Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2017- sekarang.

Said yang mendapat gelar Profesor bidang Ilmu Tasawuf dari UIN Sunan Ampel Surabaya ini menjelaskan tentang hubungan agama dan politik, jika politik dan agama dihubungkan, maka politik akan menjadi radikal. Ketika ada oposisi, maka oposisi akan disingkirkan atas nama kafir, murtad dan lain sebagainya. Peristiwa seperti ini terus terjadi sepanjang sejarah. Jika ada ada ulama yang kritis terhadap pemerintahnya langsung dituduh *zindiq* (munafik), murtad, dan lainnya. Hal ini terjadi karena agama dijadikan alat politik. Sehingga agama dan politik memang sebaiknya dipisahkan. Untuk itu, dia meminta, para politikus tidak berpolitik atau berkampanye dengan mengikutsertakan Allah.<sup>81</sup>

Berbagai isu politik yang berkembang di era kepemimpinannya, dikomentari oleh Said bahkan kelihatan begitu kontras:

1) Pro dan Kontra terhadap Islam Nusantara

Istilah *Islaam Nusantara* yang *booming* pada Muktamar ke-33 tahun Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur. 1 Agustus hingga 5 Agustus 2015 dengan tema utama "*Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia*" kembali mencuat. Pro dan kontra terhadap istilah tersebut sangat ramai di dunia maya maupun dunia nyata. Tuduhan-tuduhan bagi pelaku atau Pencetus istilah Islam Nusantara yang liberal, *ngaco*, munafik, *bid'ah*, pembawa onar, penoda agama dan lain-lain.

Namun ketika ditanya mengenai hal tersebut, dengan santai Said Aqil menjelaskan bahwa Islam Nusantara itu bukanlah aliran

---

<sup>81</sup> <http://m.republika.co.id>, "Said Aqil Siroj: Politik dan Agama Tidak Bolah Saling Bersama" (28 Maret 2017).

atau mazhab baru melainkan tipologi Islam yang *khas*<sup>82</sup> yang memadukan Islam dengan kebudayaan, Islam dengan nasionalisme dan memadukan Islam dengan kekayaan tradisi.

Menurutnya kita harus menyatu dengan budaya, selama budaya itu baik dan tidak bertentangan akan semakin membuat indah Islam, kita tidak boleh menentang atau melawannya. Terkecuali budaya yang bertentangan dengan syariat, seperti zina, berjudi, mabuk dan lainnya.<sup>83</sup>

## 2) Bersama Muhammadiyah Wujudkan Islam Nusantara Berkemajuan

Dalam rangka menyemarakkan Hari Raya Idul Adha 1437 H, PT. Bintang Toedjoe mengundang NU Care-LAZISNU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah NU) dan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah). Ketua umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa jika tahun-tahun sebelumnya dua organisasi ini sama-sama berkorban, maka di tahun 2016 ini Muhammadiyah dan NU berkorban bersama, itu merupakan suatu peningkatan. Ia menambahkan :

“semoga dengan adanya kurban bersama ini, semangat kebersamaan tetap terjaga. Jika NU punya konsep Islam Nusantara, dan Muhammadiyah punya Islam Berkemajuan-nya, maka jika bergerak bersama-sama menjadi Islam Nusantara Berkemajuan”.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> *Khasā'is* ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu mulai dari sejarah, pemikiran, tradisi, ijtihad, cara berdakwah, hingga interaksi sosial. Diantara *Khasais* utama Islam Nusantara adalah sebagai berikut: *I'tidāl*, *tawassuṭ* (moderat), *tasāmuh* (toleran), *tawāzun* (Seimbang), *tasyawur* (Senang bermusyawarah), *ta'awun wa Tadhamun* (Gotong Royong), Bisa beradaptasi dengan budaya dan adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Mengedepankan *Amar Ma'ruf bil Ma'ruf wa Nahi Munkar bi Ghairi Munkar* (Dakwah secara ramah, bukan dengan marah-marah, kekerasan dan kebencian. Senang berkumpul dan bersilaturahmi. Hubungan agama dan negara harmonis, tidak terpisah sama sekali (sekuler), tetapi juga tidak melebur jadi satu (dengan menjadi negara agama). Termasuk dalam hal ini adalah konsep bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Memiliki dan menerapkan 3 *ukhuwah* (*Islamiyah*, *wathaniyah*, dan *basyariyah*). Terbuka terhadap hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Memberikan ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk sama-sama berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada pemisahan ruang secara ketat antara laki-laki dan perempuan.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>84</sup> Achmad Mukafi Niam, “NU Dalam Sikap, Gerak dan Langkah 2016”, (Jakarta: NU Online, 2016), h. 100.



Seusai dilaksanakannya Konferensi Pers I di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, sore harinya dilangsungkan konferensi pers II di Gedung PBNU, lantai 8. Ketua Umum PBNU Said Aqil dan Sekjen PBNU H. Helmy Faishal Zaini hadir dalam konferensi tersebut. Said Aqil berharap agar kerjasama NU dan Muhammadiyah bisa ditingkatkan lagi.

Said menambahkan bahwa: “Tantangan kita semakin berat. Datang dari Kanan Kiri. berbagai paham masuk ke Indonesia. Kalau bukan NU dan Muhammadiyah siapa lagi yang mau mengawal Indonesia ini. maka dari itu, kita harus menyatu lagi, bukan hanya soal sapi”. Imbuhnya.

3) NU Dukung Hukuman Kebiri bagi Pelaku Kejahatan Seksual

Said mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 25/5/2016. Ia menyatakan bahwa pelaku kejahatan atau kekerasan seksual bukan hanya layak dihukum kebiri, melainkan juga patut dihukum mati.<sup>85</sup>

4) Ada yang lebih besar dari pada mengurus Ahok.

Saat ditanya oleh Najwa Shihab dalam program Mata Najwa yang juga dihadiri oleh narasumber Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’uti, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, mengenai apakah yang dilakukan oleh Ahok tergolong penistaan agama? Said, menerangkan bahwa menurutnya ucapan Ahok tersebut telah menyinggung perasaan, khususnya umat Islam:

“kalau keputusan bahwa kasus Pak Ahok penistaan agama atau tidak, itu urusan Bareskrim, prosesnya ada di kepolisian”.<sup>86</sup>

Said Aqil berpendapat bahwa, masyarakat tidak perlu terlalu larut pada kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagaimana dituduhkan oleh sebagian kelompok orang. Menurutnya, sebagai bagian dari cara berdemokrasi yang beradab dalam rangka mengoreksi etika pemimpin, aksi demo 04 November patut diapresiasi, namun setelahnya perkara meski dipercayakan kepada proses hukum yang berlaku. Menurutnya:

“masih banyak urusan yang lebih penting lagi: soal tantangan ekonomi, budaya, radikalisme, terorisme, itu semua

---

<sup>85</sup> Achmad Mukafi Niam, “NU Dalam Sikap, Gerak dan Langkah 2016”, (Jakarta: NU Online, 2016), h. 106.

<sup>86</sup> Achmad Mukafi Niam, “NU Dalam Sikap, Gerak dan Langkah 2016”, (Jakarta: NU Online, 2016), h. 15-16.

lebih besar dari orang satu ini (Ahok)", ujarinya selepas menerima kunjungan Presiden RI Joko Widodo di kantor PBNU, Jakarta, Senin 7/11, 2016 sore.

Namun ia juga menyayangkan kelambanan pemerintah dalam melakukan komunikasi politik dengan rakyatnya. Karenanya, pemerintah harus mengintensifkan kembali dialog lintas tokoh pemuka agama sehingga perbanguan suasana kondusif.

Namun mencermati eskalasi dan perkembangan keadaan di atas, PBNU memberikan pesan moral agar tidak terpecah dan tetap menjaga ukhwhah, diantaranya: 1). PBNU menyeru kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu, senantiasa membangun ukhwhah dan memperkokoh ikatan bangsa. 2). Kepada seluruh pengurus NU dan warga NU untuk secara pro-aktif turut menenangkan situasi, menjaga agar suasana tetap anam damai, terpelihara dan tidak ikut-ikutan terprovokasi dan hasutan. 3). Menghimbau kepada aparat kepolisian untuk segera melakukan tindakan dan langkah sesuai prosedur hukum dan perundangan yang berlaku, agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah. 4). Kepada para pihak yang hendak menyalurkan aspirasinya dengan berunjuk rasa, agar dapat menjaga akhlakul karimah dengan tetap menjaga ketertiban, kenyamanan lalu lintas dan keamanan masyarakat demi keutuhan NKRI. 5). Tetap berdoa kepada Allah agar Indonesia selalu diberi kesejukan dan kedamaian dalam perlindungan, penjagaan dan pertolongan dari Allah.<sup>87</sup>

#### 5) Kontroversi Pemimpin Non Muslim

Said Aqil menyatakan bolehnya seorang muslim memilih pemimpin non muslim, hal tersebut atas dasar pernyataan Ali RA yang dikutip Ibnu Taimiyah yang menyatakan bahwa Negara yang adil akan kekal sekalipun itu Negara kafir. Sebaliknya Negara yang zalim akan binasa sekalipun ia Negara Islam. Atas dasar itulah Said Aqil menyatakan bahwa:

"siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non muslim tapi jujur, itu lebih baik dari pada pemimpin muslim tapi zalim. Di mana saja dan siapa saja".<sup>88</sup>

#### 6) NU Mendukung Pembubaran HTI

Pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 19 Juli 2017 lalu, dengan mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tersebut. Mengenai hal tersebut Said Aqil Siradj

---

<sup>87</sup> Achmad Mukafi Niam, "NU Dalam Sikap, Gerak dan Langkah 2016", (Jakarta: NU *Online*, 2016),h. 15-16.

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 51.

menegaskan PBNU mendukung upaya pemerintah dalam membubarkan organisasi HTI karena memiliki pandangan yang bertentangan dengan Pancasila. Menurutnya, semua pihak patut menjunjung tinggi bentuk negara Indonesia yang berupa negara kesatuan dengan Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

Said menjelaskan, bahwa agama Islam tidak mengatur secara khusus mengenai masalah perpolitikan dan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan, menurut dia, diputuskan dengan cara ijtihad yaitu upaya untuk memutuskan perkara yang tidak dibahas dalam Al-quran dan Hadits dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Meski diakuinya HTI tidak melakukan kekerasan dalam menyebarkan dakwahnya, namun HTI tetap perlu diwaspadai karena memiliki agenda mengubah sistem pemerintahan RI menjadi khilafah.

"Kami bersama 12<sup>89</sup> organisasi keagamaan lainnya pendapatnya sama, menolak kehadiran HTI di Indonesia. Organisasi yang merongrong Pancasila, tidak menghormati kebhinnekaan, tidak menghormati UUD 45, harus dibubarkan" tutur Said Aqil.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Al-Irsyad Al-Islamiah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Mathla'ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI). <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/07/20330571/14.ormas.islam.desak.pemerintah.percepat.pembubaran.hti>. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan, langkah pemerintah terhadap pembubaran HTI haruslah konstitusional berdasarkan prinsip hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut dia, jika terdapat suatu perbedaan, maka harus menempuh jalan peradilan. "Langkah tersebut harus berlaku umum terhadap gerakan apapun yang berlawanan dengan dasar Pancasila dan UUD 1945. Termasuk gerakan komunisme dan separatisme," ujar Haedar saat dihubungi, Senin (8/5). Ia menuturkan, Muhammadiyah secara kelembagaan sangat tegas dan jelas posisi ideologisnya bahwa Negara Pancasila itu *Darul Ahdi wa Syahadah*. Yaitu negara hasil konsensus seluruh kekuatan bangsa dan harus diisi agar sejalan dengan jiwa, pikiran, dan cita-cita pendiri bangsa. Karena itu, setiap warga, organisasi dan komponen bangsa harus bersetuju dan menerima Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setia pada NKRI, serta menjunjung tinggi kebhinnekaan. "Tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip dan keberadaan NKRI yang didirikan tahun 1945 itu," katanya. <https://republika.co.id/berita/opmxcj361/soal-pembubaran-hti-ini-kata-ketum-muhammadiyah>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>90</sup> <https://nasional.tempo.co/read/874995/nahdlatul-ulama-pembubaran-hti-bukan-pembatasan-dakwah-islam/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

Said Aqil Siradj menyayangkan kelompok HTI yang ingin memaksakan pahamnya di Indonesia. Menurutnya:

“paham politik khilafah tidak akan pernah cocok. Karena mereka berbenturan dengan kenyataan sejarah dan keragaman paham, agama, suku, serta bahasa di Indonesia. Di Timur Tengah, mereka bangkit dari kekuatan politik yang berbasis kebangsaan” belum selesai.<sup>91</sup>

7) Aksi 212, disebut Said sarat kepentingan politik.<sup>92</sup>

Aksi Bela Islam (ABI)<sup>93</sup> adalah gerakan protes berbasis solidaritas yang direkatkan oleh sebuah isu tentang penistaan agama dan, dalam konteks lain, Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Banyak tokoh-tokoh Muslim yang hadir dalam ABI yang memiliki jamaah dalam jumlah besar, namun mereka memiliki pola dakwah yang berbeda satu sama lain serta membawa topik-topik ceramah yang juga tidak sama. Beberapa tokoh Muslim atau pimpinan ormas dan pimpinan majlis taklim, seperti Abdullah Gymnastiar Pimpinan Darut Tauhid di Bandung, Muhammad Arifin Ilham pimpinan Majelis Zikir Az-Zikra, Habib Rizieq Shihah Imam Besar FPI, Bachtiar Nasir Ketua GNPF yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Intelktual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Ma'ruf Amin Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan tokoh-tokoh dari ormas Islam lainnya yang memiliki banyak jamaah mampu duduk bersama-sama dalam ABI untuk mengungus isu bersama: protes atas masalah penistaan agama. Tidak sedikit pula tokoh-tokoh Islam lokal dari pelbagai daerah, terutama dari kota satelit di Jawa barat, dan kota-

---

<sup>91</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokrasi Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 48-49.

<sup>92</sup> Agama sekadar dijadikan alat kepentingan, seperti tampak pada praktik Jumatan yang digelar di Monas bukan di masjid. Para pendukung Aksi 212 pun tak luput dari kritiknya. Pernyataan Amien Rais menyoal 74% lahan yang dikuasai asing di era pemerintahan Jokowi, dinilainya sebagai tuduhan salah alamat.

<sup>93</sup> Wacana yang muncul terkait adanya Aksi Bela Islam adalah dipicu oleh tuduhan spesifik tentang penodaan agama oleh Gubernur DKI Basuki Tjahya Purnama. Tetapi seiring dengan meluasnya peserta aksi tersebut, isu-isu yang muncul telah menyentuh banyak isu lain seperti munculnya kembali sentiment anti-Cina, ketidakadilan ekonomi dan politik, hingga kekhawatiran di sektor keamanan dengan aktifnya sel-sel kelompok radikal. Bahayanya perekonomian dikuasai oleh para pendatang etnis Cina bertebaran di media sosial dan di tengah masyarakat, termasuk dikaitkan dengan Pilkada DKI. Pada poin ini, isu kesenjangan muncul tidak terhindarkan. Secara ekonomi, etnis minoritas memegang porsi signifikan dari kue ekonomi nasional. Kampanye untuk memboikot produk-produk asing, serta adanya gerakan untuk membangun ekonomi secara mandiri pasca gerakan Aksi Bela Islam dirasakan oleh masyarakat.

kota besar lainnya yang hadir untuk memberikan dukungan kepada Aksi Bela Islam.

Aksi Bela Islam III terjadi pada 2 Desember 2016 di Jakarta, Indonesia di mana sedikitnya dua juta massa<sup>94</sup> dari seluruh Indonesia kembali menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.<sup>95</sup> Aksi tersebut merupakan peristiwa penuntutan kedua terhadap Ahok pada tahun 2016 setelah unjuk rasa sebelumnya terjadi pada 4 November. Pada awalnya, aksi tersebut rencana diadakan pada 25 November, namun kemudian disepakati diadakan pada tanggal 2 Desember 2016.<sup>96</sup> Aksi ini dilaksanakan di halaman Monumen Nasional, Jakarta dalam keadaan hujan. Jumlah peserta hadir berkisar antara 200 ribu (klaim polisi<sup>97</sup>) hingga jutaan (klaim penyelenggara).<sup>98</sup> Dari bukti - bukti video yang tersebar di berbagai sosial media dan situs berbagi video melalui tangkapan kamera drone, dapat terlihat bahwa jumlah massa meluas hingga memadati area Bundaran Hotel Indonesia (HI). Dalam aksi ini, sejumlah kegiatan yang dilaksanakan adalah berdoa dan melakukan salat Jumat bersama. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara ini dan disambut hangat oleh para peserta aksi.<sup>99</sup>

Said, menganjurkan warga NU untuk tidak bergabung dalam Aksi Bela Islam III dan NU mengeluarkan fatwa bahwa mengikuti sholat jum'at di jalan raya adalah tidak sah. Anjuran Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, kepada warganya untuk tidak

---

<sup>94</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/02/ohiiuf384-sudah-dua-juta-massa-aksi-dari-daerah-berkumpul-di-jakarta>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>95</sup> "Fokus Berita-Aksi Damai 2 Desember". Diakses tanggal 12 Desember 2016.

<sup>96</sup> "Demo 25 November Batal, Diganti 2 Desember". *KiniNEWS*. Diakses tanggal 2 Desember 2016.

<sup>97</sup> "Mass prayer rally in Jakarta against governor 'Ahok'". *BBC News (dalam bahasa Inggris)*. 2016-12-02. Diakses tanggal 01 Desember 2020; *Schonhardt, Sara; Sentana, I. Made (2016-12-03)*. "Indonesia Muslims Push to Jail Christian Politician Accused of Blasphemy". *Wall Street Journal*. ISSN 0099-9660. Diakses tanggal 01 Desember 2020; *Varagur, Krithika*. "Evicted Jakarta Residents Join Hardline Rally Against Governor". *VOA*. Diakses tanggal 01 Desember 2020.

<sup>98</sup> *Rozie, Fachrur*. "GNPF MUI: Peserta Demo 2 Desember Capai 3 Juta Orang". *liputan6.com*. Diakses tanggal 01 Desember 2020; *Muhyiddin; Aminah, Andi Nur*. "Sudah Dua Juta Massa Aksi dari Daerah Berkumpul di Jakarta". *Republika Online*. Diakses tanggal 01 Desember 2020.

<sup>99</sup> "Teriakan Takbir Sambut Presiden Jokowi di Monas". *news.okezone.com*. Diakses tanggal 01 Desember 2020; "Jalan Kaki ke Monas, Jokowi Salat Jumat Bersama Massa Aksi Damai 212". *news.okezone.com*. Diakses tanggal 01 Desember 2020.



turun aksi seperti *fell on deaf ears*, juga tak dihiraukan oleh anggota Muhammadiyah. bukan mengikuti anjuran ketua umumnya, banyak warga NU dan Muhammadiyah yang memilih bergabung dengan Rizieq Syihab, Abdullah Gymnastiar, Arifin Ilham, Bachtiar Nasir, dan Zaitun Rasmin untuk melakukan aksi yang terpusat di tugu Monas (Monumen Nasional) Jakarta.<sup>100</sup>

8) Seruan agar tetap ke Habitat Kultural tahun 2019.

Said Aqil Siradj, dalam tulisannya yang berjudul “Kembalilah Ke Habitat Kultural” di Jawa Pos, menegaskan bahwa Islam kultural memiliki peranan sangat penting bagi kontinuitas misi Islam di muka bumi. Suatu peran yang tak diwarisi Islam politik yang hanya mengejar kekuasaan instan. Karena itu, Islam kultural harus tetap eksis. Lenyapnya pola Islam kultural berarti lenyapnya Islam di dunia yang berakibat pada kehancuran Islam. Lebih jauh lagi. Said Aqil Siradj, menjelaskan bahwa NU harus kembali meneguhkan visinya yang lebih memancarkan independensi dan egalitarian. Politik adalah *grey area*, tempat lalu lalang kepentingan yang bila tak waspada bisa menyeretnya pada kenikmatan sesaat. Karena itu, secara politik warga NU akan lebih baik dibebaskan untuk memilih partai.<sup>101</sup>

Namun dalam skala yang sama, NU melalui elit-elit nya dianggap sudah terlalu jauh dalam melangkah. Ormas terbesar di Tanah Air itu sudah berani blak-blakan mengusulkan tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet berikutnya. "Tidak ada dukungan politik yang gratis!" tegas Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur, KH Agoes Ali Masyhuri (Gus Ali) usai menghadiri Halal bi Halal Keluarga Besar Gabungan Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia (Gapperindo) di Masjid Al Akbar Surabaya, Rabu (19/6) malam. Bahkan, pengasuh Ponpes Bumi Shoawat, Tulangan, Sidoarjo ini yakin jika kader NU yang diusulkan akan pos menteri yang strategis. "Insya Allah akan mendapat posisi yang strategis,"katanya.<sup>102</sup> Hal ini dipertegas oleh pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj dalam peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU di Jakarta, Ahad (27/1/2019), mengindikasikan bahwa dia

---

<sup>100</sup>Ahmad Sholikin, Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III, MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 10 No. 1 2018 (12-33) ISSN 2085-143X.

<sup>101</sup> Said Aqil Siradj, “*Kembalilah Ke Habitat Kultural*”, Jawa Pos.

<sup>102</sup><https://www.merdeka.com/politik/nu-blak-blakan-minta-jatah-menteri-dukungan-nahdliyin-ke-jokowi-tidak-gratis.html>.

sedang bermain politik dengan meminta jatah jabatan kepada penguasa.<sup>103</sup>

Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid mengkritik sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, yang mulai menyiapkan kader-kader Nahdlatul Ulama, untuk mengisi jabatan menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024. Yenny mengatakan, NU sebagai Ormas Islam tidak boleh terkesan meminta-minta jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan menteri. Alasannya, kesan meminta-minta jabatan itu dapat berdampak buruk dalam penilaian publik. Menurut putri kandung almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, NU dapat membantu Pemerintah dengan memberikan saran konstruktif maupun kritik membangun, terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, tanpa perlu kader NU itu turut menduduki kursi-kursi jabatan menteri.<sup>104</sup>

Elite NU harus memosisikan diri sebagai guru bangsa dan teladan masyarakat. Untuk itu, mereka perlu mengembangkan nilai-nilai luhur tersebut dengan memulai dari mereka sendiri. Awal mula yang harus mereka lakukan adalah mengambil jarak dari dunia dan politik kekuasaan. Karena sejarah memberikan kita sebuah pelajaran bahwa kemandulan NU dalam mewujudkan visi dan mengemban misi NU berpulang pada terjebaknya NU dalam politik kekuasaan.<sup>105</sup>

- 9) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta proses RUU HIP dihentikan

PBNU menegaskan Pancasila sebagai kesepakatan final tidak membutuhkan penafsiran lebih luas atau lebih sempit dari penjabaran yang sudah dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945

---

<sup>103</sup>Kutipan lengkap pidatonya seperti ini: "Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Menteri Agama, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, (nanti dianggap) salah semua; nanti banyak (tuduhan) bidah kalau selain NU. Ini bidah nanti. Tari-tari sufi (dituduh) bidah nanti". Bisa dilihat dalam link "<https://tirto.id/pidato-said-aqil-tuduhan-dan-bantahan-nu-minta-jabatan-dfkM>". Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>104</sup>Pernyataan lengkapnya: "Saya mengimbau kepada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika, seolah-olah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan lain sebagainya. Karena peran yang harus dijalankan oleh NU adalah peran yang sinergis dengan Pemerintah, melakukan pemberian masukan-masukan yang konstruktif, ketika ada kritik pun kritik yang membangun. Artinya, pemerintahannya (dijabat) siapa pun, NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat.", <https://kbr.id/nasional/07-2019/yenny-wahid-kritik-sikap-pbnu-yang-terkesan-minta-jabatan-menteri/99847.html>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>105</sup> Abd, A'la, "Kembalikan Roh Utama NU", *Jawa Pos* edisi 11 Juli 2011.

berikut situasi batin yang menyertai rumusan finalnya pada 18 Agustus 1945.

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang merupakan RUU usulan DPR, menjadi sorotan dan menuai polemik hingga pemerintah meminta penundaan pembahasan. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta proses RUU HIP dihentikan. "Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional," tulis PBNU dalam keterangan resmi mereka, Selasa (16/6/2020).

RUU HIP dapat menguak kembali konflik ideologi yang bisa mengarah pada krisis politik. Anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh *founding fathers* bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis.

PBNU memandang tak ada urgensi dan kebutuhan sama sekali untuk memperluas tafsir Pancasila dalam undang-undang khusus. Pancasila sebagai *philosophische grondslag* dan *staats fundamental norm*. Jika dirasakan ada masalah mendasar terkait pembangunan nasional di bidang demokrasi politik Pancasila, jalan keluarnya adalah reformasi paket undang-undang bidang politik (*legislative review*). Begitu pula jika ada masalah terkait dengan haluan pembangunan ekonomi nasional, yang dirasakan menyimpang dari jiwa demokrasi ekonomi Pancasila, maka yang perlu dipersiapkan adalah RUU Sistem Perekonomian Nasional sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) yang secara jelas dimandatkan oleh Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

Selain itu, PBNU menilai di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi COVID-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik.<sup>106</sup>

Di sisi lain dalam kepemimpinan Said Aqil Siroj, ada kelanjut dan perubahan. Dalam kepemimpinan Said Aqil, NU secara internasional semakin dikenal. Peran NU dalam menangani konflik internasional diakui dunia. Said Aqil Siroj ini meskipun pemikirannya moderat namun, ia kembali masuk dalam tokoh muslim paling berpengaruh di dunia dengan menduduki urutan ke-19 untuk tahun 2012 versi *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* Yordania. Sejak menjabat sebagai ketua umum PBNU sejak 2010, ia telah masuk dalam jajaran tokoh elit muslim dunia. Tahun 2010, menduduki peringkat ke-19, 2011, peringkat ke-17 dan tahun 2012

---

<sup>106</sup><https://www.nu.or.id/post/read/120871/sikap-pbnu-terhadap-ruu-hip--perkuat-pancasila-sebagai-konsensus-kebangsaan->. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

peringkat ke-19. Pengaruhnya ini dinilai tak lepas dari besarnya Nahdlatul Ulama dengan pengikut lebih dari 70 juta dan terus melakukan perluasan jaringan. NU memiliki jaringan dari pusat sampai ke tingkat ranting atau desa serta melakukan perluasan cabang di luar negeri dimana banyak anak NU yang belajar di berbagai universitas atau bekerja di berbagai institusi.<sup>107</sup>

NU juga membuka dialog melalui forum-forum Internasional, khususnya yang terkait isu-isu terorisme, konflik bersenjata dan rehabilitasi citra Islam di Barat yang buruk pasca serangan gedung WTC pada 11 September 2001. Ia juga kerap kali membuat acara dengan mengundang ulama-ulama dunia untuk bersama-sama membahas problematika Islam kontemporer dan masalah keumatan. Pada Jumat, 7 Maret 2014, Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert O. Blake berkunjung ke kantor PBNU. Ia menginginkan NU terlibat dalam penyelesaian konflik di beberapa negara. “Kami berharap NU bisa membantu penyelesaian konflik di negara-negara dunia, khususnya di Syria dan Mesir. NU Kami nilai memiliki pengalaman membantu penyelesaian konflik, baik dalam maupun luar negeri,” kata Robert, seperti dilansir NU Online. “Sejak saya bertugas di Mesir dan India, saya sudah mendengar bagaimana peran NU untuk ikut menciptakan perdamaian dunia,” imbuhnya. Raja Yordania Abdullah bin Al-Husain (Abdullah II) juga berkunjung ke PBNU. Ia ditemui Said Aqil, meminta dukungan NU dalam upaya penyelesaian konflik di Suriah.

“Di Timur Tengah, tidak ada organisasi masyarakat yang bisa menjadi penengah, seperti di Indonesia. Jika ada konflik, *bedl* yang bicara,” ungkap Kiai Said. Selain itu, menguapnya kasus SARA di Indonesia belakangan juga kembali marak muncul ke permukaan. “Munculnya kerusuhan bernuansa agama memang sangat sering kita temukan. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia harus terus belajar pentingnya toleransi dan kesadaran pluralitas. Sikap toleransi tersebut dibuktikan oleh Kaisar Ethiopia, Najashi (Negus) ketika para sahabat ditindas oleh orang-orang Quraisy di Mekkah dan memutuskan untuk hijrah ke Ethiopia demi meminta suaka politik kepadanya. Kaisar Negus yang dikenal sebagai penguasa beragama Nasrani itu berhasil melindungi para sahabat Nabi Muhammad SAW dari ancaman pembunuhan kafir Quraisy”.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,41148-lang,id-c,nasional-t,Kang+Said+Jadi+Tokoh+Muslim+Berpengaruh+Dunia.php>. Diakses pada 12 Desember 2020.

<sup>108</sup> Said Aqil Siradj dalam *Dialog Tasawuf Kiai Said: Akidah, Tasawuf dan Relasi Antarumat Beragama* (Khalista, LTN PBNU & SAS Foundation, Cet II, 2014).





## BAB IV DAKWAH KONVENSIONAL NAHDLATUL ULAMA

Sebelum adanya media kontemporer, penyampaian ajaran agama Islam lebih didominasi oleh ceramah verbal<sup>1</sup> dengan bentuk dakwah berupa *tabligh*.<sup>2</sup> *Tabligh* merupakan salah satu metode konvensional, yaitu tatap muka. Media Konvensional merupakan proses produksi dan penyimpanan data atau informasi yang dibagi menjadi dua bagian yaitu media elektronik ( televisi dan radio ) dan media cetak ( koran, CD, atau DVD ).

Dakwah konvensional atau dakwah secara tatap muka memiliki beberapa hal yang membuatnya tidak dapat tergantikan dan tidak boleh ditinggalkan. orang-orang yang datang ke majelis punya ikatan batin yang kuat dan itu yang membedakan dengan dakwah secara online. Mereka sudah ada niat untuk datang ke majelis dan mendengarkan ceramah atau *sense* untuk menerima ilmu sudah terbuka dengan adanya niat. Orang-orang yang bersinergi dengan pendakwah, yang ceramah pun bisa melihat apakah materinya bisa diterima atau tidak dari gerak-gerik mereka, misalnya pendakwah memberikan materi yang susah maka audiensnya diam saja karena mungkin sulit menerima itu.

Selain itu, dakwah secara tatap muka juga memungkinkan penyampaian materi yang lebih rinci dan mendalam. Berbeda dengan dakwah menggunakan media daring yang dalam penyampaian materi yang digunakan dituntut untuk lebih bersifat umum karena *mad'u* yang ingin dicapai sangat heterogen, baik dari segi latar belakang pendidikan maupun adat atau budaya mereka.

---

<sup>1</sup> Menurut bentuknya, komunikasi dibedakan menjadi dua, verbal dan non verbal. komunikasi verbal, yakni bentuk komunikasi yang menggunakan simbol-simbol bermakna dan berlaku umum dalam proses komunikasi melalui suara, tulisan atau gambar. Lebih khusus lagi komunikasi verbal yang menggunakan simbol suara saja. Lihat Ross Buck and C. Arthur VanLear "Verbal and Nonverbal Communication: Distinguishing Symbolic, Spontaneous, and Pseudo-Spontaneous Nonverbal Behavior" dalam *Journal of Communication*, International Communication Association, September (2002), h. 522-533; R. M. Krauss dan S. R. Fussell, "Social Psychological Models of Interpersonal Communication," dalam E. T. Higgins dan A. Kruglanski (Eds.), *Social Psychology: A Handbook of Basic Principles* (New York: Guilford, 1996), h. 655-701; Alī „Abd al- alīm Mahmād, *al-Da'wah al-Islāmiyyah Da'wah „ālamīyyah*, (Kairo: Majlis al-A“lā li Syu“un al-Islāmiyyah, 1969), h. 3-4; Muḥammad al-Gazālī, *al-Da“wah al-Islāmiyyah Tastaqbil Qarnuhā al-Khāmis “Asyar*, (Beirut: Dār al-Mathbā“ah al-„Arabiyyah, tt), h. 12.

<sup>2</sup> Andi Faisal Bakti, *“The Contribution of Dakwah to Communication Studies: Risale-I Nur Collection Perspektife,”* h. 197.

## A. Sejarah Perkembangan Dakwah NU

Pada awal berdirinya NU belum menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Baru pada muktamar tahun 1928, NU menetapkan anggaran dasarnya untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah Belanda. NU kemudian menetapkan tujuannya untuk mempromosikan anutan terhadap empat madzab (Madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) dan mewujudkan kemaslahatan umat. Untuk mencapai tujuan tersebut NU melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan di antara ulama-ulama yang bermadzhab.
2. Mengkaji kitab-kitab klasik untuk diketahui apakah termasuk kitab dari ahlu Sunah wal Jamaah atau ahli *bid'ah* yang untuk selanjutnya menjadi bahan pengajaran agama.
3. Menyiarkan agama Islam yang didasarkan kepada empat madhab.
4. Memperbanyak pendirian-pendirian madrasah-madrasah.
5. Memperhatikan urusan yang terkait dengan masjid, *langgar*, dan pondok pesantren, begitu juga tentang fakir miskin dan anak yatim.
6. Mendirikan badan-badan untuk urusan pertanian, perniagaan dan perusahaan, yang tidak bertentangan dengan *syara*.<sup>3</sup>

NU berkembang pesat pada 15 tahun pertama sejak pembentukannya. Data statistik mengenai periode tersebut menunjukkan pertumbuhan yang sangat jelas. Muktamar NU pertama tahun 1926 dihadiri 96 kiai. Muktamar Kudus/ satu tahun setelahnya dihadiri 146 kiai dan 242 peserta biasa. Pada muktamar tahun 1928, sebanyak 260 kiai hadir dan telah memiliki 35 cabang. Satu tahun setelahnya memiliki 63 cabang dan muktamar keempat mampu menghadirkan 1450 peserta dan peninjau. Satu tahun kemudian (tahun 1933) anggotanya diperkirakan mencapai 40.000 dan setahun kemudian Belanda menyatakan 400 kiai telah bergabung di NU.<sup>4</sup>

Pada tahun 1935 jumlah anggota melonjak mencapai 67.000 orang, yang tersebar di 76 cabang. Pada tahun 1938 NU memiliki 99 cabang dan

---

<sup>3</sup> Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara* (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 12-13. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*). Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khairu Ummah*. (Anggaran Dasar NU, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), h. 27).

<sup>4</sup> Aceng Abdul Aziz, M. Harfin Zuhdi, dkk, *Islam Ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 2016), h. 113.

terdaftar 100.000 anggota. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, NU memiliki 120 cabang.<sup>5</sup>

Kiai merupakan faktor yang menentukan dalam pertumbuhan yang cepat. Setiap kiai yang bergabung membawa puluhan bahkan ratusan pengikutnya. Pengikutnya bukan hanya santri tetapi juga masyarakat sekitar yang mengikuti tokoh kiai tersebut.

NU tidak hanya mengalami pertumbuhan dalam jumlah anggotanya tetapi juga kompleksitas organisasinya. Gagasan untuk mengembangkan pelayanan pendidikan dan perdagangan mendorong dibentuknya dewan-dewan, divisi-divisi, atau departemen-departemen. Desakan untuk merangkul kalangan pemuda dan wanita juga mendorong terbentuknya sayap-sayap organisasi Islam modernis.

## **B. Unsur-unsur Dakwah**

Dakwah merupakan bagian yang pasti dalam kehidupan umat beragama. Dalam ajaran agama Islam, dakwah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada pemeluknya, dakwah pada hakikatnya merupakan tuntunan abadi manusia sepanjang masa,<sup>6</sup> seruan kepada keinsyafan, atau mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.<sup>7</sup>

Menurut Said, dalam mengajak umat agar betul-betul menjadi muslim atau muslimah yang baik, ada etika, metode, dan strategi yang perlu ditaati. "Zaman Nabi Muhammad, para ulama sampai Wali Songo dalam mendakwahkan, menyampaikan agama Islam, berangkat dari akhlakul karimah. Tutur kata yang baik, pergaulan yang baik, menyikapi perbedaan dengan santun. Itu yang dilakukan oleh para Wali Songo, dan ulama-ulama terdahulu. Penulis buku Tasawuf Sebagai Kritik Sosial menyampaikan, mengedepankan Islam sebagai Inspirasi bukan Aspirasi (2006) ini menegaskan bahwa dalam filosofi syariat Islam, menyampaikan syariat Islam itu ada empat hal yang perlu dipegang (dakwah memiliki empat etika), satu, *bit-tadrij, step by step*, gradual. Kedua, *taklilut-taklif*, memperkecil, meminimalisir beban; ketiga, *'adamul jarh*, tidak menyakiti; keempat, *almas-uliyyah*, bertanggungjawab. Artinya, kalau kita menjalankan syariat Islam itu, hendaknya lahir dari kita sendiri. Bukan dipaksa".<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Aceng Abdul Aziz, M. Harfin Zuhdi, dkk, *Islam Ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 2016), h. 112.

<sup>6</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), h. 45.

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h.194.

<sup>8</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/116029/kiai-said-jelaskan-empat-etika-dakwah-dalam-islam-yang-perlu-dipegang>, 31 Januari 2020 06:00 WIB

Dalam berdakwah NU selalu memadukan ajaran Islam tekstual dengan konteks lokalitas dalam kebijakan beragama, melahirkan wawasan dan orientasi politik substantive. Atas dasar itulah yang kemudian NU memiliki pandangan dalam berdakwah bahwa;

1. Islam diturunkan sebagai *rahmatan lil 'aalamiin*, memiliki makna dan fungsi universal yang suci, *fitri*, *hanif* serta dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh umat manusia tanpa harus menghilangkan identitas ras, kebangsaan dan kebudayaan.
2. Islam diturunkan ke dunia bukan untuk menghapuskan segala yang sudah ada dan telah dilakukan dan dihasilkan oleh suatu kelompok budaya, peradaban bangsa, agama, suku dan ras. Keanekaragaman serta perbedaan paham dan aliran kelompok atau golongan merupakan *sunatullah* (sejalan dengan hukum-hukum Allah). Kemajemukan (pluralitas) dalam hidup merupakan *rahmat*, bahkan amanah *Ilahiyah* dan kemanusiaan yang harus dimaknai dan disikapi dengan arif, membuka diri, merangkul dan melakukan dialog secara kreatif untuk menjalin kebersamaan dan kerjasama atas dasar saling menghormati, saling mendukung dan membantu.
3. Bahwa realitas kehidupan harus dilihat secara substantif (hakikiyah), fungsional, terbuka, merangkul dan tidak memusuhi pihak lain. Bahkan dinilai dari kulit luarnya, apalagi dengan sikap *egoisme* yang berlebihan, serta menutup diri dari pihak lain (eksklusif). Nahdlatul al-'Ulamâ memandang, sikap mengklaim kebenaran hanya milik sendiri dan pihak lain selalu salah, serta memaksakan kehendaknya kepada orang lain, sesungguhnya merupakan sikap dan perilaku yang tidak *etis*, tidak pantas dan tidak layak. Karena hal itu akan menimbulkan konflik dan keterpecahan di masyarakat luas.<sup>9</sup>

Melalui hasil sidang Komisi Bahtsul Masail ad-Diniyah al Maudluyah pada Munas Alim Ulama 2017 di Pondok Pesantren Darul Falah, Mataram, NTB, NU pun mengharamkan dakwah dengan konten ujaran kebencian. Wakil Sekretaris Bahtsul Masail PBNU Mahbub Ma'afi mengatakan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak bisa dilakukan dengan kemungkaran karena mengajak kebaikan harus juga dengan kebaikan. "*Amar ma'ruf nahi munkar* tidak dibenarkan melalui ujaran kebencian yang dalam Islam merupakan bagian dari kemungkaran." Ujaran kebencian diharamkan karena menyerang kehormatan pribadi dan golongan yang dilindungi agama.

---

<sup>9</sup> Nuryani dkk, "Konsep Dakwah Kultural Menurut NU", *Al-Idza'ah, Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, P-ISSN: 2613-9707, Volume. 01, Nomor. 02, Juli - Desember 2019, h. 37-38.

"Perpecahan di masyarakat mudah terjadi akibat ujaran kebencian yang menembus batas pertahanan sosial. Kerukunan mudah terkikis dalam suasana dan iklim kebencian itu." Mahbub melanjutkan, "Kini, ujaran kebencian mudah diakses dan tersebar di media sosial seperti *Twitter*, *Facebook*, *Whatsapp*, dan *Youtube*. Ini sulit dibendung dan masuk ke jantung kehidupan sosial masyarakat". Di balik Fatwa MUI dan kesepakatan di Munas Alim Ulama NU di Mataram, meruyaknya ujaran kebencian hingga kini dipicu tajamnya polarisasi saat pilkada DKI. *Musababnya* apalagi kalau bukan politisasi agama. Pilkada DKI telah memberikan pelajaran politik berharga bahwa politisasi agama berdampak buruk bagi masyarakat.<sup>10</sup>

Ketepatan dan keberhasilan dakwah akan dapat terwujud dengan baik apabila unsur-unsur dakwah terpenuhi dengan baik. Seperti: subyek dakwah, materi dakwah, metode dakwah, media dakwah, obyek dakwah.

a. Subjek (Dai)

Setiap muslim dianjurkan untuk menyampaikan dakwah meskipun hanya satu ayat, apalagi yang mengkhususkan diri dibidang dakwah. Hal ini biasa dikenal dengan istilah subyek dakwah (dai). Untuk menunjang keberhasilan dalam dakwahnya seorang dai hendaknya memiliki kepribadian yang kuat, baik yang bersifat rohaniah (psikologis) atau kepribadian yang bersifat jasmaniah (fisik).<sup>11</sup>

Juru dakwah menurut A. Hasjmy adalah para penasihat, para pemimpin, dan pemberi ingat, yang memberi nasihat dengan baik, mengarah dan berkhotbah, memusatkan kegiatan jiwa-raganya dalam *wa'ad* dan *wa'id* (berita pahaladan berita siksaan) dan dalam membicarakan tentang kampung akhirat untuk melepaskan orang-orang yang karam dalam gelombang dunia.<sup>12</sup>

Subjek dakwah bisa berupa perorangan ataupun kelompok. Subjek dakwah perorangan, sebagaimana kiyai memberikan ceramah pengajian pada masyarakat pedesaan, seorang kiai memberikan seminar kepada masyarakat perkotaan dan lain-lain. Abdul Munir Mulkhan mengungkapkan, setidaknya ada tiga komponen dalam subjek dakwah, yaitu: (1) da'i (2) perencanaan, dan (3) pengelola dakwah. Ketiganya dapat disebut da'i, namun perbedaannya terletak pada bidang tugas atau job sesuai dengan kemampuannya masing-masing.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/133703/nu-haramkan-dakwah-berkonten-kebencian>.

<sup>11</sup> Syekh Muhammad ar-Rawi, *ad-Da'wat al Islamiyyah*, h. 35.

<sup>12</sup> A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an* (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1994), h. 144.

<sup>13</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Ideologi Gerakan Dakwah; Episode Kehidupan M. Nasir dan Azhar Basyir* (Yogyakarta: Sipres, 1996), h. 209.



Sementara subjek dakwah kelompok biasanya berupa organisasi atau gerakan dakwah. Nabi sendiri sebagai seorang Rasul, sebagai pembawa risalah, pada awal sejarahnya dalam berdakwah dikerjakan sendiri, tetapi kemudian tidak sebatang kara lagi, hanya dengan satu organisasi yang kuat dan militan, yaitu Daulah Islamiyah di mana Nabi sendiri sebagai rais-nya.<sup>14</sup>

b. Sasaran (*Mad'u*)

Obyek dakwah atau sasaran dakwah (*mad'u*) adalah manusia yang dijadikan sasaran untuk menerima dakwah yang sedang dilakukan oleh da'i. Keberadaan obyek dakwah yang sering kita kenal dengan *Mad'u*, yang sangat heterogen baik ideologi, pendidikan, status sosial, kesehatan, usia dan sebagainya.

Abdul Munir Mulkhan membedakan obyek dakwah menjadi dua kategori. *Pertama*, umat dakwah yaitu masyarakat luas yang belum memeluk agama Islam (non Muslim). *Kedua*, umat *ijabah* yaitu mereka yang telah memeluk agama Islam, di mana dalam prakteknya umat *ijabah* ini terbagi menjadi dua obyek yaitu obyek umum yang merupakan masyarakat mayoritas, awam dengan tingkat heterogen tinggi, dan obyek khusus karena status yang membentuk kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok mahasiswa, kelompok ibu-ibu, kelompok pedagang, kelompok petani, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

c. Materi (*Maddah*)

Materi dakwah pada dasarnya bersumber dari Al-Qur'an dan hadist yang meliputi aqidah, syariah, dan akhlak. Dan dengan adanya perkembangan teknologi dan kemajuan pengetahuan, materi dakwah perlulah dimuati dengan dasar-dasar kehidupan dalam masyarakat global yang senantiasa dilandasi faham keislaman, sehingga tidak hanya sekedar bagaimana pelaksanaan shalat yang benar, puasa yang sah, zakat, haji dan lain-lain, tetapi juga diperkenalkan pola kehidupan kontemporer, seperti bagaimana dakwah dapat merambah ke dunia teknologi informasi, internet, ekonomi yang bercirikan Islam.

Materi dakwah yang dilakukan PBNU terhadap umat dakwah/non muslim adalah: Dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan antara warga negara dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa terus disebarkan.

---

<sup>14</sup> A. Hasjmy, *Dustur Dakwah Menurut al-Qur'an* (Jakarta, PT Bulan Bintang, 1994), h. 58.

<sup>15</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Ideologi Gerakan Dakwah: Episode Kehidupan M. Nastir dan Azhar Basyir* (Yogyakarta: Sipes, 1996), h. 208-209.

Sedangkan materi dakwah yang dilakukan PBNU terhadap umat Ijabah adalah Materi dakwah kepada umat ijabah diperkenalkan pola kehidupan kontemporer, seperti cara dakwah dapat merambah ke dunia teknologi informasi, internet, ekonomi yang bercirikan Islam, cara dakwah bisa diterima dikalangan non muslim dan lain-lain. Mereka juga diajarkan cara pelaksanaan shalat yang benar, puasa yang sah, zakat, haji dan lain-lain, tetapi juga diperkenalkan cara pelaksanaan shalat yang benar, puasa yang sah, zakat, haji dan lain-lain, tetapi juga diperkenalkan pola kehidupan kontemporer. Wawasan Kebangsaan dan Pancasila juga merupakan salah satu materi dakwah NU.

Materi dakwah lainnya yang tepat untuk menghadapi masyarakat modern adalah materi kajian yang bersifat tematik dan menjawab tuntutan zaman (dakwah tekstual dan kontekstual). Beberapa contoh materi dakwahnya: *Aswaja*, *hubb al-waṭan min al-imān*, perdamaian, *ukhuwwah bashāriyyah*, *ukhūwwah waṭaniyyah*, *ukhuwwah Islāmiyyah*.<sup>16</sup>

d. Metode (*Thariqah*)

Metode merupakan cara yang ditempuh oleh seseorang untuk melakukan kegiatan berdasarkan kreatifitasnya masing-masing. Metode dakwah yaitu cara-cara yang dipergunakan oleh seorang da'i untuk menyampaikan materi. Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125, menyebutkan bahwa metode dakwah terbagi menjadi tiga macam, yaitu: *bil hikmah*, *mauidzah al-hasanah*, dan *mujadalah* (dialog).

Salah satu metode berdakwah yang dilakukan yaitu: Pertama, Salah satu strategi berdakwah dikalangan umat dakwah adalah: berdakwah dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan antara warga negara dan mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk badan kerjasama antara umat beragama dengan pemerintah, menyelenggarakan dialog atau seminar, lokakarya dan temu wicara dengan para tokoh pengikut agama lain, memanfaatkan forum komunikasi antar umat beragama dan menciptakan kerjasama antara umat beragama untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi dan keadilan.<sup>17</sup>

Sedangkan metode dakwah kepada umat *ijabah* adalah dengan mengupayakan munculnya *jama'ah* (*mad'u* yang baru) memperbanyak kelompok pengajian sesuai kebutuhan memperbanyak frekwensi kegiatan dakwah, memperbanyak kader-kader

---

<sup>16</sup> Bidang Dakwah, *Forum Discusi Group Penyusunan Modul Dakwah* PP Fatayat NU, Hotel Alia, 12 Oktober 2018.

<sup>17</sup> Siti Uswatun Khasanah, *Memoar Dakwah*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan Agama dan Sosial, 2011), h. 70.

da'i, memperluas sarana, media dan materi dakwah, seperti di internet, CD, Buku, pamflet dan lain-lain, serta mengembangkan bentuk pengajaran Islam berupa paket-paket khusus tentang kajian-kajian klasik atau yang kontemporer, dan ini bisa saja berupa sebuah yayasan.

Disisi lain, dalam aktivitas dakwahnya NU menggunakan metode yang digunakan Walisongo. NU berkomitmen memperkuat pendekatan budaya sebagai salah satu elemen penting dakwah Islam di Tanah Air. Pendekatan budaya sebagai salah satu metode dakwah merupakan cara yang efektif, dimana dengan budayalah agama Islam dapat di terima baik oleh penduduk pribumi awal kedatangan Islam. Upaya yang dilakukan NU dalam melakukan akulturasi budaya yaitu dengan cara sosialisasi ke pondok pesantren yang merupakan basis kaderisasi potensial di kalangan NU. Termasuk pula memberikan penyadaran kepada warga NU akan pentingnya menggunakan budaya dalam berdakwah.

c. Media (*Wasilah*)

Dalam menyampaikan dakwah, media memiliki peranan yang sangat penting, karena media memiliki keterlibatan dalam pembuatan wacana dengan melakukan rekontruksi dan dekontruksi peristiwa. Dakwah dengan menggunakan fasilitas teknologi elektronik seperti TV, internet dan teknologi modern lainnya akan lebih banyak manfaatnya.

Dalam konteks klasifikasi media dakwah berbasis Al-Qur'an Moch. Ali Aziz. dalam analisisnya Aziz mendasarkan diri pada ayat-ayat Al-Qur'an yang dinilainya memuat media penerimaan informasi. Ayat-ayat dimaksud adalah:

1. QS. Al-Nahl (16): 78.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur”.

2. QS. Al-Mu'minun (23): 78.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian, pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.

3. QS. Al-Sajdah (32): 9.

ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ۖ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh (ciptaan)-Nya ke dalam (tubuh)nya dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, (tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur”.

4. QS. Al-Ahqaf (46); 26.

وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَرًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَرُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهٖ يَسْتَهْزِءُونَ

“dan sesungguhnya Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang Kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu dan Kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati; tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit juapun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya”.

5. QS. Al-Mulk (67): 23.

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ الْآفِئَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani bagi kamu. (Tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”

Siti Uswatun merujuk kepada Hamzah Ya'qub membagi sarana dakwah menjadi lima macam, yaitu: lisan, tulisan, audio, visual dan akhlak, dari lima macam pembagian tersebut, secara umum dapat dipersempit menjadi tiga media, yaitu: Pertama, *Spoken Words*, media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap dengan indera telinga, seperti: radio, telepon, dan lain-lain. Kedua, *Printed Writings*, berbentuk tulisan, gambar, lukisan dan sebagainya yang dapat ditangkap dengan mata. Ketiga, *The Audio Visual*, berbentuk gambar hidup yang dapat didengar sekaligus dapat dilihat, seperti televisi, video, film dan sebagainya.<sup>18</sup>

- a. Media Visual. Media visual yang dimaksud adalah bahan-bahan atau alat yang dapat dioperasikan untuk kepentingan dakwah melalui indra penglihatan. Perangkat media visual yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah adalah film slide,

<sup>18</sup> Siti Uswatun Khasanah, *Ber dakwah Dengan Jalan Debat Antar Muslim dan Non Muslim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Press, 2006), Riset menunjukkan bahwa media yang berbeda memiliki persentasi ritensi yang berbeda terhadap pesan. Media cetak 10 %, audio 20 %, visual 30 %, dan video (audio-visual) 50 %. Zakir Naik, “*Forms of Da'wah*”, h. 2. <http://harumakasturi88.blogspot.com/2008/09/forms-of-dawahby-dr-zakir-naik> (22 Juni 2011)

transparasi, *overhead projektor* (OHP), gambar, foto, dan lain sebagainya.

- b. Media *audio*. Media *audio* dalam dakwah adalah alat-alat yang dapat dioperasikan sebagai sarana penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indera pendengaran. Media audio sudah bisa digunakan orang untuk berbagai kegiatan secara efektif. Media audio ini cukup tinggi efektivitasnya dalam penyebaran informasi, terlebih lagi untuk media audio yang dapat digunakan untuk komunikasi dua arah, seperti telepon atau handphone. Dengan media audio, komunikasi dapat berlangsung tanpa batas jarak. Adapun yang termasuk dalam media audio adalah radio dan *tape recorder*.
- c. Media Audio Visual. Media audio visual adalah media penyampaian informasi yang dapat menampilkan unsur gambar (visual) dan suara (audio) secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan dan informasi. Dengan demikian, sudah tentu media ini lebih sempurna jika dibandingkan media audio atau media visual saja. Dengan media ini kekurangjelasan media audio atau kekurangjelasan media visual dapat diatasi karena media audio visual dapat menayangkan unsur gerak gambar dan suara. Adapun yang termasuk dalam media audio visual adalah televisi, film atau sinetron dan video.

Sementara dilihat dari segi sifatnya, media dapat digolongkan menjadi dua kategori: media dakwah tradisional dan media dakwah modern. Media dakwah tradisional berupa berbagai macam seni dan pertunjukan tradisional, dipentaskan secara umum terutama hiburan yang bersifat komulatif. Sedangkan media modern diistilahkan dengan media elektronik yaitu media yang dihasilkan dari teknologi seperti televisi, radio, pers, internet dan sebagainya.

Media dakwah yang dilakukan oleh dai PBNU pada umumnya cenderung masih menggunakan sarana tradisional (oral atau *Spoken Words*, media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap dengan indera telinga, seperti: radio, telepon, dan lain-lain). Namun mereka juga menggunakan media modern seperti: dengan media elektronik yaitu media yang dihasilkan dari teknologi seperti televisi, radio, pers, VCD, internet dan sebagainya (*The Audio Visual*). Mereka juga menggunakan media *Printed Writings*, berbentuk tulisan, gambar, lukisan dan sebagainya yang dapat ditangkap dengan mata.

f. Biaya/*Budget*

Sumber keuangan Nahdlatul Ulama diperoleh dari: Pertama, Uang pangkal adalah uang yang dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota. Kedua, Uang *i'adah syahriyah*



adalah uang yang dibayar anggota setiap bulan. Ketiga, Sumbangan adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Nahdlatul Ulama dan atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Keempat, Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Nahdlatul Ulama dan atau atas kerjasama dengan pihak lain.<sup>19</sup>

Kalau kebetulan dari NU jadi pejabat atau anggota DPR misalnya, dan kita dikasih, ya tetapi itu sifatnya pribadi, bukan lembaga, sebagai bentuk apresiasi warga NU (swadaya) walaupun ada aliran dana itu personal bukan atas nama lembaga, lebih besar dana untuk kegiatan dengan swadaya.<sup>20</sup>

### C. Dakwah Konvensional NU

#### 1. Dakwah Dengan Lisan

Menurut Asmuni Syukir untuk mencapai tujuan dakwah yang efektif dan efisien, beberapa metode dakwah yang dapat digunakan oleh juru dakwah antara lain:

- a. Metode ceramah (retorika). Ceramah adalah suatu metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara seorang da'i atau *mubaligh* pada suatu aktivitas dakwah. Ceramah dapat pula bersifat propaganda, kampanye, berpidato (retorika), khutbah, sambutan, mengajar, dan sebagainya.
- b. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian materi dakwah dengan cara mendorong sasarannya (obyek dakwah) untuk menyatakan sesuatu masalah yang dirasa belum mengerti dan da'i atau *mubaligh* sebagai penjawabnya.
- c. Metode debat (*mujadalah*). Debat adalah mempertahankan pendapat dan ideologinya agar pendapat dan ideologinya itu diakui kebenaran dan kehebatannya oleh musuh (orang lain).
- d. Metode percakapan antar pribadi (percakapan bebas). Percakapan antar pribadi atau individu *conference* adalah percakapan bebas antara seseorang da'i atau *mubaligh* dengan individu-individu sebagai sasaran dakwahnya. Percakapan pribadi bertujuan untuk menggunakan kesempatan yang baik di dalam percakapan atau mengobrol untuk aktivitas dakwah.

---

<sup>19</sup> Hasil-Hasil Muktamar Ke-33 NU, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 87. Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) dan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB. Dan Khairul Anam, Minggu: 07 April 2019.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) dan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB dan Khairul Anam, Minggu: 07 April 2019.

- e. Metode demonstrasi. Berdakwah dengan cara memperlihatkan suatu contoh, baik berupa benda, peristiwa, perbuatan dan sebagainya dapat dinamakan bahwa seorang da'i yang bersangkutan menggunakan metode demonstrasi. Artinya suatu metode dakwah, dimana seorang da'i memperlihatkan sesuatu terhadap sasarannya (massa), dalam rangka mencapai tujuan dakwah yang diinginkan.<sup>21</sup>
- f. Dakwah dengan lisan merupakan salah satu dakwah konvensional NU, yaitu dengan menggunakan sarana tradisional (oral atau *spoken words*, media dakwah yang berbentuk ucapan atau bunyi yang ditangkap dengan indera telinga, seperti: berdakwah dari podium atau mimbar ke mimbar, dari seminar ke seminar, dari radio, telepon, dan lain-lain). Dakwah dengan media konvensional ini tetap berjalan, baik di tingkatan pusat, Lembaga Dakwah PBNU rutin mengadakan pelatihan kader dai. Tiap bulan lembaga tersebut mengadakan pengajian umum di halaman PBNU yang dimulai dengan tahlil, *istighāṣah*, shalawat, dan ceramah umum. Penyampaian pesan-pesan keagamaan melalui media konvensional terbukti efektif sebagai agenda dakwah. Model-model dakwah dalam forum kajian, majelis taklim maupun acara-cara seminar mampu mempengaruhi perspektif kaum muslim agar memahami nilai-nilai agama secara lebih utuh.

## 2. Dakwah dengan Tulisan

Beberapa media dakwah yang dilakukan oleh PBNU dalam tulisan seperti:

### 1) Aula

Majalah bulanan diterbitkan oleh PWNU Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1978. Majalah ini berkantor di PWNU Jawa Timur. Majalah ini dimotori oleh H. Anas Thohir, yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua PWNU. Diantara tokoh NU yang pernah menjadi wartawan majalah ini adalah: Dr. KH. A.Hasyim Muzadi, Drs. H. Choirul Anam, H. Solihin Hidayat, Drs. H. Fuad Anwar, Drs. H. Masduqi Baidlowi, H. Sholeh Hayat, dll.<sup>22</sup>

Majalah ini merupakan satu-satunya media NU yang bertahan lama, meski diterbitkan oleh PWNU namun segmen pasarnya adalah para tokoh dan jamaah NU secara Nasional.

---

<sup>21</sup> Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* ((Surabaya: Al-Ikhlās, 1983), h. 104-160.

<sup>22</sup> Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliah Uswah NU*, (Surabaya: Khalista LTNU Jatim, 2010), h. 105-119.

2) Berita LINO

LINO kepanjangan dari *Lailatul Ijtima* Nahdlatol Oelama. Buletin yang diterbitkan oleh PBNU tahun 1937-an. Selain berisi informasi tentang lailatul ijtima' dan nama-nama warga NU yang telah meninggal dan didoakan bersama, berita LINO juga berisi mengenai masalah-masalah keagamaan, informasi organisasi, politik dan kemasyarakatan, dll. Buletin ini juga pernah terbit di Semarang pada tahun 1970-an dengan pengawas Prof. Dr. Saifuddin Zuhri.

3) Berita Nahdlatol Oelama

Salah satu media NU yang dipimpin oleh KH. Mahfuz Siddiq pada tahun 1934-an. Berkantor pusat di Jl. Sasak 23 Surabaya. Kelanjutan dari 23 Surabaya Swara Nahdlatol Oelama yang dirintis oleh KH. Wahab Hasbullah. Berita ini berbentuk majalah dengan 18 halaman. Terbit pertengahan bulan. Bintang Sembilan

Majalah milik PP Anshor. Biasa disingkat Be-Es. Didirikan pada tahun 1951, yang merupakan amanat hasil kongres di Surabaya.

4) Duta Masyarakat

Koran resmi milik NU. Terbit sejak tahun 1954. Berkantor di kawasan Menteng bekas kantor PP Muslimat NU. Karena diterbitkan sebagai alat propaganda, gaya bahasa yang digunakan koran ini keras dan berani. Para pengelolanya memiliki rasa percaya diri yang begitu tinggi sehingga koran ini dua kali mengalami breidel dari pemerintahan Orde Baru.

Tahun 1974 Duta Masyarakat mati. Hal ini disebabkan karena, sikap politik pemerintahan Orde Baru yang terhadap media. kedua, dikarenakan intern dikalangan NU, yaitu: terhentinya subsidi dana dari PBNU dan pada saat yang sama, banyak pengurus cabang yang tidak mau membayar tagihan karena mereka menganggap koran tersebut adalah milik sendiri sehingga tidak perlu dibayar.

Setelah era reformasi, PBNU menghidupkan kembali koran tersebut sebagai harian umum, bekerja sama dengan Jawa Pos dan berkantor di Graha Pena Surabaya. Tidak lama kemudian Duta Masyarakat lepas dari Jawa Pos dan berkantor sendiri di Jl. Kapuas Surabaya. Namun kemudian koran tersebut mati kembali.

Tahun 2001 Duta Masyarakat dihidupkan kembali dan berkantor di Kutisari Indah Barat VI/I. Bernaung dalam payung PT. Duta Aksara, salah satu usaha milik Yayasan Bisma.

5) Obor Revolusi

Koran harian di Surabaya pada masa-masa kritis menjelang dan sesudah G-30 S/PKI 1965. Obor Revolusi terbit

pada akhir tahun 1964, dipersiapkan untuk memperkuat opini Partai NU. Beralamat kantor di LKBN Antara Surabaya dan Harian Surabaya Post yang dipimpin oleh Aziz Dja'far.

Meski oplahnya tidak terlalu besar namun koran ini sangat disegani untuk mengimbangi koran Suara Rakyat milik PKI. Keduanya bak musuh bebuyutan. Saling mengklaim dan saling menjatuhkan. Setiap terjadi aksi-aksi sepihak PKI, Obor Revolusi akan memuatnya besar-besaran sebagai *headline*.

Setelah PKI dibubarkan pemerintah. Oplah Obor Revolusi semakin lama semakin menurun, hingga akhirnya berhenti terbit.

6) Oetoesan Nahdlatul Ulama

Majalah NU yang diterbitkan pada tahun 1930-an, disamping Swara Nahdlatul Ulama yang telah berdiri terlebih dulu. Dikelola oleh KH. Wahab Hasbullah dan KH. Abdullah Ubaid. Berkantor di Surabaya. Majalah ini cukup membantu perkembangan NU pada masa itu, namun majalah ini tidak berumur panjang.

7) Risalah Islamiyah

Majalah NU yang diterbitkan oleh misi Islam pada tahun 1969, mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan tertanggal 22 Agustus 1969. Majalah ini terbit bulanan dan eksis hingga tahun 1980. Namun sejak tahun 1982 majalah ini berhenti terbit, karena lembaga induknya (misi Islam) juga vakum.

8) Warta NU

Tabloit milik PBNU yang dikelola di bawah koordinasi *Lajnah Ta'lif wan Nasyr* (LTN) Pusat. Terbit sejak tahun 1985 dengan Ichwan Sam sebagai pimpinan umum. Berkantor di PBNU, Jl. Keramat Raya 164 Jakarta Pusat. Para pendiri tabloit ini adalah Ichwan Sam, Slamet Efendi Yusuf, Arifin Junaidi, dan lain-lain.

Melalui tabloit ini PBNU menyosialisasikan keputusan-keputusan organisasi, baik mengenai hasil-hasil muktamar, munas dan beberapa keputusan penting lainnya. Terlebih seputar keputusan untuk kembali ke Khittah NU yang bebas dari politik praktis.

Pada masa jayanya tabloit ini pernah mencapai tiras 48.000 eksemplar dengan peredaran nasional, namun akhirnya mati juga. Sejak tahun 1995, tabloit ini diterbitkan kembali dengan berkantor di PWNU Jawa Timur, Jl. Taya Darmo 96 Surabaya. Namun sejak tahun 2005 tabloit ini tidak terbit lagi.

9) Risalah Nahdlatul Ulama ([www.risalahnu.com](http://www.risalahnu.com))

Majalah resmi milik PBNU. Biasa disingkat RINU. Didirikan tahun 1978. Di antara perintis majalah ini adalah

Slamet Efendy Yusuf, Anwar Nuris dan Saiful Masykur. Sempat terbit beberapa edisi, namun mati.

Dihidupkan kembali pada Mei tahun 2007. Diantara penggagas sekaligus pengelola majalah periode kedua ini adalah Drs. H. Mustafa Helmy dan H. Zis Muzahid, M.Si. Risalah terbit bulalann dengan 114 halaman. Berkantor di lantai 7 Kantor PBNU, Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat.

Berdasarkan laporan tahunan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019 di Surakarta pengelolaan majalah risalah NU terbit bulanan, sementara buletin jum'at Risalah NU ([www.risalahnu.com](http://www.risalahnu.com)), sampai saat ini menerbitkan buletin mingguan tiap hari jum'at dan penerbitan buku Risalah NU (karya-karya ke NU an) dengan tematik 3 bulanan.<sup>23</sup>

Divisi penerbitan buku Risalah NU (karya-karya ke NU an) dengan tematik 3 bulanan ini bertujuan untuk memberikan kemampuan PBNU dalam melakukan pengumpulan naskah dan penerbitan resmi, seperti: a) Penyelenggaraan books challenge untuk membentuk sistem dan proses bisnis penerbitan di Internal PBNU. b) ujicoba penerbitan 5 judul buku dalam waktu 3 bulan (berhasil).<sup>24</sup>

10) Santri

Media komunikasi milik *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* (RMI). Terbit di Surabaya tahun 1996 berkantor di Jl. Raya Darmo 96 Surabaya. Pada tahun 2004 majalah ini sempat berhenti dan terbit lagi. Namun pascamuktamar Solo 2004 pasca pergantian pengurus, Santri sudah tidak terbit lagi.

11) Suluh Nahdlatul Ulama

Majalah ini terbit di Surabaya pada tahun 1957. Dipimpin oleh Umar Burhan, dan juga ditangani oleh H. Mahfudz Syamsul Hadi (ketua PWNU) dan H. Sholeh Mukmin (sekretaris PWNU). Berkantor di PWNU Jawa Timur, Jl. Raya Darmo 96 Surabaya. Majalah ini digunakan sebagai penyambung lidah antara pengurus parta NU dengan masyarakat. Terbit sekitar 3-4 tahun.

12) Suara ANO

Majalah yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Ansuru Nahdlatil Oelama (PB ANO) pada tahun 1937. Hampir semua pengurus cabang berlangganan ANO bahkan di Komisaris Daerah Jawa Tengah bagian selatan (Banyumas, Purbalingga,

---

<sup>23</sup> Laporan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 365-365.

<sup>24</sup> Laporan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 365-365.



BaanjarNEGARA, Wonosobo, Twmanggung, Magelang, Puworejo, Kebumen, Karang Anyar, Cilacap dan Purwokerto).

13) Suara Ansor

Media milik PP GP Ansor diterbitkan tahun 1965an ketika suasana politik nasional sedang panas akibat ulah G 30 S/PKI. Sebagai media perjuangan, Suara Ansor banyak menyoroti perkembangan politik nasional.

14) Swara Nadhlatoel Oelama

Majalah NU yang diterbitkan pada tahun 1930-an. Terbit setiap setengah bulan. Selama tujuh tahun perjalanannya, majalah ini langsung di pimpin oleh KH. Wahab Hasbullah. Berkantor di Jl. Sasak 23 Surabaya.

15) *Taswirul Afkar*

Jurnal diterbitkan oleh Lakpesdam pusat. Berkantor di Jl. Haji Ramli No 22 A Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan dengan Homepage [www.lakpesdam.or.id](http://www.lakpesdam.or.id). Terbit triwulanan dengan 154 halaman.

16) Jurnal ilmiah Islam Nusantara

Jurnal Islam Nusantara diterbitkan oleh Lembaga *Ta'liif wan Nasyir* (LTN) PBNU Jakarta, Indonesia dengan tujuan utama menyebarkan analisis kritis dan orisinal dari para peneliti dan praktisi akademis tentang berbagai isu Pemikiran Islam kontemporer secara lintas perspektif berdasarkan pendekatan Islam Nusantara .

Jurnal ini menekankan pada berbagai isu pemikiran Islam kontemporer secara lintas perspektif berdasarkan pendekatan Islam Nusantara. Ruang lingkupnya terdiri dari; (1) Al-Qur'an dan Hadits, (2) Teologi, (3) Mistisisme Islam, (4) Pendidikan dan Manajemen Islam, (5) Hukum Islam, (6) Ekonomi Islam, (7) Seni dan Sejarah Islam, dan (8) filsafat .

3. Dakwah Dengan Teknologi

a. Radio

Dalam kacamata komunikasi, dunia berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi media berikut segala aspeknya. Banyak hal turut terpengaruh dengan pesatnya perkembangan ini. Misalnya Pola kerja, pola interaksi antar manusia, pola hubungan keluarga, sampai pola penyampaian pesan dan perilaku komunikasi. Salah satu aspek komunikasi yang juga terpengaruh dengan perkembangan ini adalah dakwah. Dakwah merupakan salah satu praktik komunikasi yang mengambil berbagai bentuk, mulai dari komunikasi persona, komunikasi massa dan komunikasi kelompok.

Di era globalisasi, dakwah dihadapkan pada tantangan menyampaikan syiar Islam melalui media massa. Fenomena perubahan ini menghadapkan para da'i pada tantangan baru: bagaimana berdakwah yang efektif di media massa radio. Radio termasuk salah satu media komunikasi massa yang memiliki kemampuan penetrasi kuat terhadap pasar maupun konsumennya. Dibandingkan dengan media elektronik lainnya, radio termasuk murah, mudah dioperasikan, memiliki keunggulan aktualitas yang tinggi dan memiliki daya tarik auditif yang memikat pendengar. Karena itu, dakwah melalui radio dengan demikian memiliki pengaruh yang kuat terhadap komunikannya.

Terdapat beberapa faktor penting yang harus dipikirkan untuk menata ulang pesan-pesan dakwah dalam kemasan paket program radio yang menarik. Faktor itu berupa frekuensi, durasi, timing (momen penayangan), dan penonjolan aspek-aspek auditif. Kemasan paket program radio yang baik, berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor tadi, menjadi bagian dari strategi berdakwah melalui radio untuk mencapai efek yang optimal di tengah komunitas pendengar radio.

Keunggulan radio, seperti dirinci oleh Onong Uchjana Effendy adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Radio bersifat langsung, guna mencapai sasarannya tidak perlu mengalami proses yang kompleks atau rumit. Ini berbeda dengan surat kabar yang harus melalui proses cetak-mencetak dan distribusi jaringan pengecer sebelum sampai ke tangan pelanggan.
2. Radio siaran tidak mengenal jarak dan rintangan. Bagaimanapun jauhnya sasaran khalayak, sepanjang lokasinya masih terjangkau oleh frekuensi gelombang radio, informasi radio dapat disampaikan secara serentak dan seketika. Aktualitas radio termasuk yang tertinggi di antara media komunikasi massa lainnya.
3. Radio siaran memiliki daya tarik yang kuat. Daya tarik tersebut muncul dari kombinasi musik, narasi vokal dan efek suara yang terwujud lewat suara penyiar, lantunan musik, talk show radio, drama radio, kuis dan lain-lain. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan telekomunikasi, diferensiasi dan spesifikasi media komunikasi massa pun kian menajam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Onong Uchjana Effendy: *Radio Siaran Teori Dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 164 –168.

<sup>26</sup> Kasali, Rhenald; *Focusing: Strategi Beriklan di Media Massa* (Jakarta, Gramedia: 1998), h. 23.

Muncul keunggulan lain dari masing-masing media, demikian pula dengan radio, yaitu sifatnya yang personal, lokal, kompak, rileks dan sederhana.

1. Radio bersifat personal, dalam arti mampu menimbulkan keakraban dengan pendengarnya, menumbuhkan ikatan emosional yang bersifat pribadi, mengikis jarak antara lembaga dengan khalayak lewat interaksi yang bersifat langsung dan timbal balik. Sifat personal radio juga muncul akibat segmentasi khalayak yang tajam, terwujud antara lain lewat sapaan akrab penyiar dengan pendengarnya dan program-program yang dirancang melalui pendekatan psikografi dan demografi khalayak secara tajam.
2. Radio bersifat lokal, berfungsi memperkuat ikatan personal antara pendengar dan lembaga. Di sisi lain memudahkan pendekatan penyampaian informasi dalam berbagai bentuk karena dikemas dalam bungkus 'membumi'. Atau dalam prakteknya, dikemas dalam bahasa yang sesuai dengan lingkungannya.
3. Radio bersifat kompak (*compact*), mudah dioperasikan oleh siapa saja, bersifat portable, mudah dipindahkan ke mana-mana, relatif tidak menghabiskan tempat atau membebani orang yang membawanya, dan murah dengan harga relatif terjangkau. Kemajuan dunia elektronika kini juga menghadirkan radio seukuran saku dengan fungsi yang bisa dikombinasikan dengan perangkat-perangkat lain seperti lampu berkemah, tape recorder, walkman dan bahkan televisi.
4. Radio bersifat rileks. Radio tidak mengharuskan pendengarnya meluangkan waktu secara khusus untuk menikmatinya. Sambil menyimak radio orang masih bisa melakukan pekerjaan lain karena tidak dibutuhkan konsentrasi tinggi untuk mendengarkan radio. Ini berbeda dengan karakteristik media massa lain. Untuk membaca koran dan menyaksikan siaran televisi, misalnya, seseorang bahkan harus berkonsentrasi dan meluangkan waktu secara khusus. Menyetir mobil sambil mendengarkan radio adalah sesuatu yang lazim dan tidak berbahaya bila dilakukan. Namun menyetir mobil sambil membaca koran atau menonton televisi akan lain halnya dan konsekuensinya.
5. Radio bersifat sederhana. Simple, baik secara kelembagaan maupun dalam rangkaian proses produksi dari mulai penggarapan acara hingga ke pengudaraan program-programnya. Ini menguntungkan dari segi birokrasi administrasi, waktu dan biaya dibandingkan dengan media massa lainnya.

Di samping sederet kelebihanannya, terdapat pula sejumlah kelemahan radio. Seorang komunikator yang akan melakukan aktivitas komunikasinya di radio perlu mengenali kelemahan-kelemahan ini agar bisa menyiasatinya dalam strategi komunikasi melalui program radio yang dirancangnya. Sejauh ini kelemahan radio yang cukup signifikan adalah sebagai berikut:

1. Radio bersifat selintas dan sesaat. Artinya, informasi apapun yang disajikan di radio hanya singgah sesaat di benak khalayak, tidak meninggalkan kesan atau efek semendalam informasi yang disajikan di media massa lain. Materi pesan yang disampaikan melalui radio tidak terekam dalam bentuk tertulis, seperti media cetak. Pembaca koran bisa mengulangi bacaannya kapan saja, namun pendengar radio tidak bisa semaunya meminta penyiar untuk mengulangi lagi perkataan atau lagu yang dihantarkannya. Kelemahan kedua ini muncul sebagai konsekuensi logis dari sifat radio yang “selintas dan sesaat”.
2. Kendala kebijakan internal lembaga. Kendala ini muncul apabila tidak terdapat kesamaan persepsi antara misi yang ingin direalisasikan pelaksana radio dengan pemilik modal. Radio atau media massa apapun baru akan mandiri dan independen dalam menjalankan kebijakannya apabila pemegang saham mayoritas atau pemilik modalnya memiliki visi yang sejalan dengan tujuan tersebut. Kesamaan visi ini juga akan meminimalisasi kemungkinan friksi dan intervensi pemilik modal terhadap pelaksana radio.

NU memiliki radio *streaming*, yang bisa diakses melalui *Google Play* atau dapat didownload melalui App Store. Yang berisikan Burdah: diisi oleh Gus Mus, kajian Tafsir, cahaya sufi dan pengajian umum. Live radio bisa diakses di: [radio.nu.or.id](http://radio.nu.or.id)

#### b. Televisi

Televisi adalah satu jenis dan bentuk media massa yang paling canggih dilihat dari sisi teknologi yang digunakan, dan paling mahal dilihat dari segi investasi yang ditanamkan. Televisi sangat bergantung pada kekuatan peralatan elektronik yang rumit (inilah yang disebut media teknis). Sebagai contoh, tanpa listrik, siaran televisi tidak mungkin bisa diudarakan. Investasi yang harus dikeluarkan untuk mendirikan sebuah stasiun televisi komersial yang dikelola secara profesional dengan lingkup nasionalpun mencapai ratusan miliar rupiah. Hal itulah yang menyebabkan televisi sangat kompromistik dengan kepentingan

pemilik modal serta nilai-nilai komersial arus kapitalisme global.<sup>27</sup>

Siaran televisi bersifat satu arah. Penonton hanya bisa menerima berbagai program acara yang sudah dipersiapkan oleh pihak pengelola televisi. Penonton tidak bisa menyela, melakukan intrupsi saat itu agar suatu acara disiarkan atau tidak disiarkan. Meskipun demikian menurut teori komunikasi massa, penonton sebagai khalayak televisi bersifat aktif dan selektif. Sehingga meskipun siaran televisi bersifat satu arah, tidak berarti penonton menjadi pasif. Penonton aktif mencari acara yang ia inginkan, selektif untuk tidak menonton semua acara yang ditayangkan.

Di Indonesia, pasca keruntuhan rezim Orde Baru akibat hempasan gelombang reformasi, fenomena liberalisasi dalam media yang ditandai oleh ekspansi dramatik sektor penyiaran, pembentukan stasiun televisi swasta dan ledakan publikasi media baru mulai menyeruak kepermukaan. Liberalisasi media telah memicu munculnya sejumlah media yang memfokuskan sorotannya pada *hot topics* seperti kriminalitas, seksualitas, mistisme dan *entertainment* dalam rangka melanggengkan eksistensinya di tengah arus kompetensi pasar.

Pada saat bersamaan terjadi *milieu* kebangkitan dakwah Islam yang lebih besar, seperti tumbuhnya kelas menengah Muslim perkotaan, dan maraknya kesalehan luar selama lebih dari satu dekade. Akibatnya, sirkulasi massif tabloit-tabloit sensual dan reportase kolosal berita-berita sensasional di kota-kota besar telah memicu kepanikan moral di kalangan aktivis-aktivis Muslim dan organisasi-organisasi Islam yang memandang bahwa hal tersebut sebagai proses westernisasi dan sekulerisasi yang ofensif dan immoral. Mereka khawatir fenomena tersebut akan menggoncang nilai-nilai dan identitas Islam yang telah mapan. Sebagai respon atas situasi tersebut, kalangan Muslim mulai melancarkan serangan balik dengan mengambil alih kontrol atas produksi dan konsumsi media serta produk-produk budaya populer. Pada akhirnya, transformasi radikal *mediascape* dan perubahan rezim politik pasca reformasi pada saat bersamaan telah membuka kanal baru bagi pertumbuhan “budaya populer Islam” di Indonesia.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Siti Uswatun Khasanah, *Jurnalistik Televisi*, (Jakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan Agama Islam, 2014), h. 15.

<sup>28</sup> Hariyadi, “*Islamic Popular Culture and The New Identity of Indonesian Muslim Youths*”, Makalah dipresentasikan dalam 18th Biennial Conference of The Asian Studies Association of Australia di Adelaide, 5-8 Juli 2010, dalam <http://asaa.asn.au/ASAA2010/Paper/Hariyadi.Pdf>, diakses 6 Juni 2018; dan Amrih Widodo, “Writing for God: Piety and Consumption in Popular Islam”, *Inside*



Pada saat itu, kita dengan mudah menyaksikan fenomena berkembangnya produk-produk berlabel Islam dan maraknya penggunaan simbol-simbol Islam dalam program-program media dan Industri budaya Indonesia. Intensitas produksi dan konsumsi sinetron religi bercorak Islam semakin meningkat baik di bioskop-bioskop maupun layar televisi Indonesia, seperti, film Ayat-ayat Cinta, Ketika Cinta Bertasbih, Emak Ingin Naik Haji, Sang Pencerah, Di Bawah Lindungan Ka'bah, sinetron Safa dan Marwa, Pesantren Rock n Roll, Amanah Dalam Cinta, Islam KTP, Ku Pinang Engkau Dengan Basmallah, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah eksposur/ film (pencahayaannya film) simbol-simbol Islam dalam dunia perfilman dan sinetron ini mendapat respons antusias dari pasar Muslim Indonesia.<sup>29</sup>

Selain film dan sinetron religi, *genre* musik pop religi juga mendapat sambutan luas di pasar industri musik Indonesia. Tahun 2005, *Istighfar* (Opic/menjelang ramadhan), sebulan pertama setelah dirilis, album tersebut mampu mencetak *double platinum* dengan penjualan lebih dari 300 ribu kopi.<sup>30</sup> September 2006, Band Ungu (Menyambut Ramadhan 1427 H), merilis lagu *SurgaMU*, hanya dengan waktu 10 hari sejak dirilis, album tersebut telah terjual sebanyak 150 ribu keping dan dalam tempo satu bulan telah memperoleh *double platinum* untuk penjualan di atas 300 keping.<sup>31</sup> Tahun 2010, Gita Gutawa/ Balada Shalawat, pada saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungannya terhadap album tersebut.<sup>32</sup> Tahun 2011, single album Wali, Tobat Maksiat, Abatas juga begitu populer setelah

---

*Indonesia* (Aug-Oct 2008), dalam <http://www.insideindonesia.org/edition-93/writing-for-god-14091121>, diakses 6 Juni 2018.

<sup>29</sup> Aarsal Aminudin, "Islam dalam Film Indonesia: Studi Semiotika Terhadap Film-Film Pasca Orde Baru", dalam <http://pusmedunhas.or.id/wp-content/uploads/2010/05/Islam-Dalam-Film-Indonesia.pdf>, diakses, 10 Juni 2018; Andrimaila, "Film Religi Sebagai Tren Masa Kini", dalam <http://andrimaila.blogspot.com>, diakses 10 Juni 2018, Celebrity Okezone, *Film Religi Masih Booming*, dalam <http://celebrity.okezone.com>, diakses 10 Juni 2018; Lukman Hakim, Citra Islam Dalam Film dan Sinetron, *Surya Online*, 06 Februari 2010, dalam <http://eprints.sunsu-ampel.ac.id/547/1/citra-islam-dalam-film-dan-sinetron-lukmaan-hakim-juni-2010.pdf>. Diakses 10 Juni 2018; dan Antara News, *Film AAC Penuhi Kerinduan Umat Pada Sosok Cerdas*, dalam <http://www.antara.co.id>, diakses 10 Juni 2018.

<sup>30</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/istighfar-\(album\)](http://id.wikipedia.org/wiki/istighfar-(album)), diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

<sup>31</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/ungu-\(grup\\_musik\)](http://id.wikipedia.org/wiki/ungu-(grup_musik)), diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

<sup>32</sup> Pos Kota Online, "Gita Gutawa Didukung MUI", dalam <http://www.poskota.co.id/liburan/2010/08/16/gita-gutawa-didukung-mui>, diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

dijadikan soundtrack sinetron Islam KTP pada program Ramdhan 2011 oleh stasiun televisi SCTV.<sup>33</sup>

Dalam industri media cetak, beberapa lembaga penerbitan Islam juga telah memproduksi majalah-majalah Islami dengan artikulasi yang beragam, mulai dari yang terkesan murah, sensasional dan populis. Seperti majalah *Hidayah*<sup>34</sup>, *Sabli*<sup>35</sup> hingga majalah-majalah elit seperti *Paras* dan *NooR*. Majalah *Paras* dan *NooR* lebih menekankan potret dan gaya hidup Islami seperti fashion, mode, desain rumah, tips memasak dan artikel-artikel bertema Islami.<sup>36</sup> Selain itu ada majalah-majalah Islami lain yang secara khusus di alamatkan kepada wanita Muslim remaja, seperti Amanah, Muslimah, Ummi, Annida dan sebagainya.

NU memiliki TV (NU Channel TV); NU Channel adalah saluran televisi resmi milik PBNU. NU Channel mempunyai visi & misi menjaga kedaulatan NKRI dengan menyebarkan konten yang faktual, mendidik & informatif, serta memperkenalkan wajah Islam Nusantara yang Rahmatan lil 'Alamin.

Program Nuchannel berisikan informasi program-program terkait dengan dunia Islam, seperti: ngaji *on-line* kitab Muhtarul al-Hadist an-nabawiyah<sup>37</sup>, Ngaji Ekonomi Pancasila dan Ekonomi KeTuhanan bersama Dr. KH. Marsudi Syuhud, dilaksanakan setiap hari jam 06.00 WIB di Youtube NU Channel, Facebook NUchannelofficial, Televisi Ninmedia. Ngaji Riyadus Solikhin bersama KH. Marzuqi Mustamar, dilaksanakan setiap hari jam 20.00 WIB di Youtube NU Channel, Facebook nuchannelofficial, Televisi Ninmedia. Ngaji *Online Akhlaq Al-Muslim' Alaatuhi bi*

---

<sup>33</sup> “Tren Lagu Religi di Bulan Ramadhan”, dalam <http://nagaswaramusic.com/berita/detail/891/trend-lagu-religi-di-bulan-ramadhan>, dan Single Abasa Wali di Posisi 1 Weekly Top 10 Flexy Tone, dalam <http://www.nagaswaramusic.com/berita/detail/933/Single-Abatasa-Wali-Posisi-1-Weekly-Top-10-Flexy-Tone>.

<sup>34</sup> Hidayah adalah majalah yang kerap menampilkan cerita-cerita moral sederhana dengan latar tema umum seputar siksa kubur dan adzab di akhirat.

<sup>35</sup> Sabili adalah majalah yang bernada konservatif dan puritan, yang secara berkala memunculkan cerita-cerita tentang konspirasi Yahudi dan Kristen serta artikel-artikel yang mengecam kelompok-kelompok Islam liberal dan sekte-sekte yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah dan Wahidiyah.

<sup>36</sup> Greg Fealy, *Consuming Islam: Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia*, dalam Greg Fealy dan Sally White, ed., *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Singapore: ISEAS Publishing, 2009), h. 21-22.

<sup>37</sup> Diisi oleh Dr. KH. A. Fahrur Razi; Disiarkan dari Pondok Pesantren Annur 1 Bululawang, Malang bersama Gus Fahrur. Kajian ini diselenggarakan setiap hari pukul 05.00. Source dari FB Annursatu Bululawang.

*Al-Mujtama'*. Dibawakan oleh KH. A. Mustofa Bisri setiap hari LIVE jam 22.00 WIB. Kolaborasi dengan GusMus Channel.

Program NU UPDATE adalah salah satu program dari NU Channel yang Khusus untuk update berita terbaru ataupun tanggapan dan juga sikap pandangan yang berkaitan dengan Nahdlatul Ulama baik dalam Politik , Ekonomi dan juga Agama yang bertujuan memberikan informasi positif kepada masyarakat Indonesia. Ngaji *Online-Tafsir al-Jailani*. Disiarkan Dari Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon bersama KH Mustofa Aqil Siroj. Source YT : Khas Kempek. Ngaji kitab Qasidah Burdah, Pengajian rutin Kitab Qosidah Burdah ini di bawakan oleh KH Hilmy Muhammad Hasbullah Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Source YT : Hilmy Muhammad. Ngaji *Online* kitab *Minhajul Abidin*, Pengajian rutin Kitab Minhaj Al Abidin ini di bawakan oleh KH. YAHYA CHOLIL STAQUF LIVE setiap hari jam 12.30 WIB. Source YT: GusMus Channel. Ngaji Online kitab Sulam Taufiq Dibawakan oleh KH. Abun Bunyamin LIVE setiap hari jam 18.30. Source YT : Al Muhajirin TV dan lain-lain.<sup>38</sup>

#### 4. Dakwah dengan Perbuatan

Dakwah *bil-ḥāl* sebenarnya bukanlah merupakan istilah baru dalam dunia dakwah, karena sumber peristilahan tersebut bermula dari al –Qur'an maupun hadits dan juga sirah Nabi. Dari sumber – sumber tersebut kemudian muncul penterjemahan baik dalam dataran normatif maupun empirik. Dakwah *bil-ḥāl* adalah dakwah melalui perbuatan nyata diberbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.<sup>39</sup> Dakwah *bil-ḥāl* adalah dakwah dengan amalan yang nyata.<sup>40</sup> Sedangkan menurut MUI dakwah *bil-ḥāl* adalah kegiatan-kegiatan dakwah yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat.<sup>41</sup>

Nasruddin Harahap, menyatakan bahwa, dakwah *bil-ḥāl* merupakan model dakwah yang sesuai dikembangkan dalam pembangunan atau pengembangan masyarakat, mengingat pengembangan masyarakat menuntut adanya kerja dan karya

---

<sup>38</sup> Nuchannel TV.

<sup>39</sup> Direktorat Jendral Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Dakwah di Kalangan Pemuda dan Remaja*, (Jakarta : Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1986/1987), h. 26.

<sup>40</sup> Masdar F. Mas'ud, *Dakwah Membela Kepentingan Siapa*, (Jakarta: P3M Pesantren, 1989), h. 2.

<sup>41</sup> Direktorat Jendral Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Dakwah di Kalangan Pemuda dan Remaja*, (Jakarta : Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, 1986/1987), h.12.

nyata.<sup>42</sup> Dakwah *bil-hāl* adalah dakwah yang lebih fokus pada amal usaha atau karya nyata yang bisa dinikmati dan bisa mengangkat harkat, martabat, dan kesejahteraan hidup kelompok masyarakat. Dakwah *bil-hāl* lebih mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar mad'u mengikuti jejak dan hal ikhwal da'i (juru dakwah). Dakwah jenis ini mempunyai pengaruh yang besar pada diri penerima dakwah. Pada saat pertama kali Rasulullah SAW tiba di kota Madinah, beliau mencontohkan dakwah bil hal ini dengan mendirikan masjid Quba dan mempersatukan kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam ikatan ukhuwah Islamiyah.

Dalam mendirikan masjid Quba, Rasulullah SAW menjadi subyek pembangunan, para pengikutnya bekerja bukan karena perintah atau ceramah, tetapi melihat tauladan. Dakwah bil hal merujuk kepada ungkapan *lisan al-hal afsah min lisan al-maqal* (bicara realita keadaan, lebih berkesan daripada bicara yang diucapkan). Pada hakikatnya dakwah *bil-hāl* adalah pelaksanaan dakwah *bil qudwah* (keteladanan) dan dakwah bil amal (perbuatan). Dengan kata lain dakwah *bil-hāl* adalah dakwah yang dilakukan melalui penampilan kualitas pribadi dan aktifitas-aktifitas yang secara langsung menyentuh keperluan masyarakat.

Meningkatkan dakwah *bil-hāl* kepada semua umat muslim. Hal ini penting agar supaya umat muslim tersentuh hatinya dan berubah menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa contoh dakwah *bil-hāl* yang telah dilakukan oleh PBNU adalah beasiswa pendidikan, santunan sosial, bakti sosial, pengobatan massal, Pendirian pesantren, pendirian sekolah, pendirian universitas dan sebagainya.<sup>43</sup>

NU sebagai *jam'iyah* yang menganut paham aswaja, tidak terlepas dari persoalan global. Masalah kemanusiaan yang sejalan dengan perkembangan zaman dan era globalisasi. Di sini NU dituntut untuk mampu memberikan jawaban solutif dan menempatkan dirinya pada peran strategis bagi perjuangan kemanusiaan, penegakan keadilan, persamaan dan kesetaraan.<sup>44</sup>

*Baḥth al-masā'il*, yang dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan *mas'ilul fihiyyah* (masalah fiqih) maupun masalah ketauhidan, bahkan masalah-masalah tasawuf. Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan

---

<sup>42</sup> Nasrudin Harahap, *Dakwah Pembangunan*, (Yogyakarta: DPD Golkar Tk. I, 1992), h. 191.

<sup>43</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/78721/pentingnya-meningkatkan-dakwah-bil-hal>

<sup>44</sup> Aceng Abdul Aziz, M. Harfin Zuhdi, dkk, *Islam Ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, (Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 2016), h. 158.

ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pondok pesantren. Bahtsul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis karena persoalan (*masail*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat, dan dikatakan demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara ulama, antara kiai dengan santri, baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam bahtsul masail tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf.<sup>45</sup>

Dakwah *bil-hāl* PBNU diwujudkan dengan pemberian contoh (praktikum) secara nyata kepada mad'u berkaitan dengan perbaikan kehidupan yang ideal menurut Islam. Metode dakwah *bil-hāl* PBNU lebih menekankan pada ajakan kepada umat manusia untuk dapat melakukan dan menerima dakwah secara bersama-sama dan dipraktekkan secara langsung. Dikatakan menerima dan melakukan dakwah secara langsung karena dalam pelaksanaannya, PBNU seringkali mengajak langsung umat Islam untuk tidak lupa memberikan bantuan secara nyata dan langsung kepada saudara sesama muslim dan tidak hanya sebatas memberikan landasan teori semata.

Dakwah *bil-hāl* PBNU direalisasikan dengan melaksanakan aktifitas dakwah sebagai berikut:

1. Aspek Keagamaan meliputi: Pengajian PBNU baik yang bersifat rutin maupun *tentative* (3 bulan sekali)/ kondisional, seperti peringatan hari besar keagamaan, *istighāṣah*, doa bersama dan lain-lain. Santunan terhadap anak yatim fakir miskin. Membentuk masjis taklim dan lain-lain.
  - 1) Aspek keagamaan ini dibawah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan agama Islam yang menganut faham Ahlulsunnah wal Jama'ah. Aspek keagamaan juga diaplikasikan oleh banom-banom NU lainnya, seperti Fatayat, Muslimat, Ansor, PMII, IPPNU, dan IPNU.
  - 2) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama (LTMNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan dan pemberdayaan masjid.
  - 3) Lembaga *Baḥṡ al-Masā'il* Nahdlatul Ulama (LBMNU), bertugas membahas masalah-masalah *maudlu'iyah* (tematik)

---

<sup>45</sup> Sahal Mahfudz, *Bahtsul Masail dan Istimbat Hukum NU; Sebuah Catatan Pendek, dalam Islam Nusantara Dari Ushul Fiqih Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 51.



dan *waqi'iyah* (aktual) yang akan menjadi Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

- 4) Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* Nahdlatul Ulama (LTNNU), bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan dan penerbitan kitab/buku serta media informasi menurut faham *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*.

2. Aspek Perekonomian. Dakwah *bil-hāl* dalam aspek perekonomian ini diwujudkan dalam kegiatan: Pembentukan koperasi. Pembentukan koperasi ini hampir seluruh banom memiliki koperasi sendiri-sendiri, seperti Yasmin (Fatayat NU), Ansor Mart/ Ansor ritel.

- 1) Pengelolaan zakat NU/ Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), bertugas menghimpun, mengelola dan mentasharufkan zakat dan shadaqah kepada mustahiqnya, seperti NU-Care LAZISNU, yang tersebar di 388 Cabang (di 29 Negara yang terdapat PCI NU; Amerika, Malaysia, Turki, Maroko, Australia, Taiwan, Mesir, Tunisia, Rusia, Jerman, Jepang, Perancis, Hongkong, Belanda, Lebanon, Suriah, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, Libya, Canada, Inggris, India, Uzbekistan, Korea, Philipina, Brunai dan Palestina; tersebar di 26 Provinsi di Indonesia, yang belum tersedia di 8 Provinsi; Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Barat dan Maluku)<sup>46</sup>
- 2) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
- 3) Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama (LWPNU), bertugas mengurus, mengelola serta mengembangkan tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya milik Nahdlatul Ulama.

3. Aspek Pendidikan, yang dilakukan PBNU adalah:

- 1) Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dibidang pendidikan dan pengajaran formal, seperti mendirikan sekolah ma'arif.
- 2) *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* Nahdlatul Ulama (RMINU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pondok pesantren dan pendidikan keagamaan.

---

<sup>46</sup> Laporan Banom dan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 327.

Misalnya pada tahun 2017 PBNU melakukan pembangunan pesantren PBNU di Karanganyar dari tanah wakaf 7,5 ha. Di tahun yang sama Oktober 2017, PBNU juga melakukan pembangunan pesantren tahfidz al-Qur'an di Klaten. Hal lain yang dilakukan oleh PBNU terhadap advokasi kelembagaan pesantren, PBNU ikut mengawal proses pembahasan RUU pesantren, tujuannya agar RUU tersebut mengakomodir kepentingan pesantren dan tidak berdampak bagi kemandirian dan kekhasan pesantren dan lain-lain.<sup>47</sup>

- 3) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), bertugas mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.
4. Aspek Organisasi. Aspek organisasi ini diwujudkan dengan pengadaan pelatihan keorganisasian di seluruh tingkatan NU dari pusat sampai ranting. Sebagaimana tertuang dalam amanat Muktamar ke-33 NU di Jombang 2015, yang memuat lima jenis dan model pendidikan kader NU;
  - 1) Kaderisasi struktural. Kaderisasi struktural ini dinamakan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU). Kaderisasi struktural menjadi keharusan bagi pengurus NU di semua tingkatan, dari pengurus besar hingga pengurus ranting, pengurus lembaga, hingga pengurus banom. Kaderisasi struktural bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus dalam memimpin, menggerakkan warga, dan mengelola organisasi. MKNU sendiri hingga minggu keempat bulan Juli 2019 ini, sudah terselenggara yang ke-140.<sup>48</sup>
  - 2) Kaderisasi keulamaan; kaderisasi keulamaan dinamakan Pendidikan dan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK). Kaderisasi keulamaan bertujuan menyiapkan calon jajaran syuriah NU di semua tingkatan kepengurusan. Diharapkan dari padanya lahir ulama-ulama muda yang siap menjadi Syuriah NU.
  - 3) Kaderisasi penggerak NU. Kaderisasi penggerak NU dinamakan Pendidikan Kader Penggerak NU (PKPNU); Kaderisasi penggerak NU bertujuan menyiapkan kader yang memiliki tugas khusus memperkuat, mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-nilai perjuangan NU dalam menggerakkan warga dalam menjalanka

---

<sup>47</sup> Laporan Banom dan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 101-105.

<sup>48</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/110351/ini-lima-jenis-pendidikan-kader-dalam-nu>. Diakses pada tanggal 12 November 2020.

kehidupan keagamaan , sosial, berbangsa, dan bernegara untuk tegaknya Islam Aswaja.

- 4) Kaderisasi fungsional; kaderisasi fungsional bertujuan menyiapkan kader yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab di lima fungsi pokok, antara lain; sebagai pelatih, fasilitator, instruktur, dalam berbagai kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi; sebagai peneliti yang mampu melakukan riset-riset penting di lingkungan NU; sebagai tim leader untuk kegiatan rukyatul hilal; dan sebagai pendamping, penyuluh masyarakat, atau community organizer di berbagai sektor.
  - 5) Kaderisas profesional; Kaderisasi profesional bertujuan menyiapkan kader NU agar memiliki kapasitas dan kredibilitas dalam posisi-posisi tertentu baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi, maupun di perusahaan-perusahaan negara, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kaderisasi fungsional dan profesional berdasarkan kaderisasi di tingkat lembaga dan badan otonom.<sup>49</sup>
5. Aspek Sosial dan Kesehatan. Dakwah *bil-hāl* dalam aspek sosial dan kesehatan terbagi dalam dua kelompok kegiatan, yakni:
- 1) Kegiatan yang bersifat terprogram. Kegiatan sosial yang bersifat terprogram antara lain adalah: a)Pemberian santunan beasiswa kepada anak yatim piatu. b)Pemberian santunan kepada kaum dhuafa. Sedangkan program kesehatan yang bersifat terprogram adalah pemberian penyuluhan kesehatan, khususnya kesehatan dalam lingkup keluarga dan masyarakat.
  - 2) Kegiatan yang bersifat tidak terprogram. Kegiatan sosial yang bersifat tidak terprogram dalam aspek sosial kesehatan meliputi kegiatan yang bersifat kondisional, di mana kegiatan tersebut dilakukan karena sesuatu keadaan, seperti kegiatan sosial dan kesehatan pada korban bencana alam. Seperti: NU peduli banjir Konawe, NU berbagi berkah, NU berkorban, renovasi masjid, NU peduli anak sehat nusantara; seperti bantuan kesehatan yang diberikan salah satunya untuk pengobatan anak-anak penderita tuna rungu di Purwokerto, bantuan kesehatan anggota KOIN NU Pringsewu Lampung, bantuan untuk keluarga muadzin di Cilacap dan lain-lain.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/110351/ini-lima-jenis-pendidikan-kader-dalam-nu>. Diakses pada tanggal 12 November 2020.

<sup>50</sup> Laporan Banom dan Lembaga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 341.

Dakwah *bil-hāl* dalam aspek sosial dan kesehatan ada di bawah:

1. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum. Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama (LKNU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang kesehatan.
2. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama dalam pencegahan dan penanggulangan bencana serta eksplorasi kelautan.
3. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU), bertugas melaksanakan pendampingan, penyuluhan, konsultasi, dan kajian kebijakan hukum

Disisi lain, Dakwah terhadap persoalan-persoalan global yang terus dikembangkan oleh NU adalah:

#### 1. Hak Asasi Manusia (HAM)

Masalah kemanusiaan merupakan masalah global yang melampaui batas-batas etnik, ras maupun ideologi. Sikap penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan, penindasan, dan pemaksaan kehendak merupakan hal yang dimiliki oleh bangsa, suku, agama, dan kelompok manapun disuluruh penjuru dunia.

Islam menentang penindasan terhadap hak-hak kemanusiaan. Seperti Habil, disebut sebagai orang yang durhaka karena telah melakukan pembunuhan terhadap saudaranya Qabil. Ia merampas haknya untuk hidup. Nabi Musapun dengan segala pengorbanannya berusaha untuk melepaskan dar penindasan Fir'aun.

Upaya-upaya penegakkan HAM merupakan masalah global dan tugas manusia secara keseluruhan yang tentunya harus mendapatkan respon serius dari agama manapun. Karena kenyataannya bahwa setiap kelompok, bangsa, ideologi, bangsa dan Negara manapun di seluruh penjuru dunia untuk menggaungkan perjuangan demi penegakkan dan pemenuhan HAM seharusnya menjadi momentum bersama untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, yang jauh dari penindasan, pertumpahan darah, kekerasan, dan kezaliman.

Seperti contoh, kasus yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada muslim Rohingya, PBNU menyatakan sikap: (1) Mengecam segala bentuk tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa segala bentuk tindakan kekerasan adalah tindakan yang sama sekali tidak dibenarkan. (2) Islam mengutuk kekerasan. Bahkan tidak ada satupun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. (3) Mengajak seluruh kepala negara dan pemimpin negara di dunia untuk pro-aktif melawan segala bentuk kekerasan. (4) Mengajak seluruh

umat sedunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi segala bangsa. (5) NU mendesak pihak-pihak terkait, terutama kepada komunitas International dan PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan terhadap muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar. (6) Mendesak ASEAN untuk mengambil sikap dan langkah konkrit, khususnya pada pemerintah Myanmar agar segera mengakui status kewarganegaraan. (7) Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah diplomasi bagi terwujudnya penghormatan atas hak asasi manusia di Myanmar.<sup>51</sup>

Contoh lain adalah kasus pembantaian 31 pekerja di Papua. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU), Helmy Faishal Zaini mengecam kasus pembunuhan terhadap pekerja proyek jalan dan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua. Helmy menilai kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat serius.

Karena itu, Helmy meminta pihak-pihak terkait, terutama pemerintah pusat juga kepala daerah, kepala distrik, kepala kampung, DPR, juga tokoh masyarakat di sana untuk saling bekerjasama dengan aparat keamanan untuk segera menyelesaikan dan mencari akar persoalan ini.

"Ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji dan jelas sekali melanggar HAM harus diusut dengan tuntas. Sebab tugas negara adalah melindungi nyawa rakyatnya," kata, Rabu (5/12/18).<sup>52</sup>

Selasa 10 September 2019 07:46 WIB, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendorong pemerintah menyelesaikan konflik di Papua dan Papua Barat dengan dialog, tidak menggunakan pendekatan militeristik. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian di Bumi Cenderawasih.

Hal itu merupakan salah satu poin pernyataan sikap dari pertemuan para tokoh lintas agama di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Senin 9 September kemarin, membicarakan solusi-solusi terkait penyelesaian konflik Papua.

Said Aqil Siradj meminta pemerintah meniru langkah Presiden RI Ke-4 Abdurrahman Wahid dalam menyelesaikan masalah di Papua, yakni melalui dialog, sehingga menentramkan kehidupan di provinsi paling timur Indonesia itu.

---

<sup>51</sup> Achmad Mukafi Niam, "NU Dalam Sikap, Gerak dan Langkah 2016 (Jakarta: NU *Online*, 2016)", h. 207-208.

<sup>52</sup><https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/05/pj9jgy354-pbnu-pembunuhan-pekerja-di-papua-kejahatan-kemanusiaan>. Diakses pada tanggal 12 November 2020.



Ia mendorong pemerintah agar mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan dalam menciptakan perdamaian di Papua dan sejauh mungkin menghindari pendekatan militeristik yang justru cenderung membuat keadaan semakin buruk," kata Said Aqil. Ia juga mendorong pemerintah untuk menciptakan perdamaian yang abadi di Papua. Menurutnya, hal itu harus diletakkan sebagai puncak dan tujuan dalam membangun kehidupan berbangsa dalam bingkai kebinekaan. "Kami meminta pemerintah dan aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah dan tindakan agar tidak menimbulkan gejala dan permasalahan baru," ujarnya.

Perwakilan dari Konferensi Wali Gereja (KWI), Franz Magnis Suseno berharap kepada segenap tokoh bangsa, pemuka agama, adat dan segenap elemen bangsa untuk bahu-membahu merajut dialog guna merekatkan kebersamaan antarmasyarakat. "Selain itu, pemerintah juga perlu mengutamakan pendekatan musyawarah dalam menanggapi aspirasi-aspirasi masyarakat yang berkembang," katanya.<sup>53</sup>

Masalah kemanusiaan merupakan tuntutan dan tanggungjawab bersama tanpa pandang bulu (*mas-uliyyah insaniyyah*). Dalam hukum Islam juga dikenal dengan lima prinsip universal (*kulliyāt al-khams*) yang dijadikan pertimbangan bagi para ahli fiqih dan hukum Islam dalam menetapkan produk hukum, yaitu: *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-‘aql*, *hifẓ al-māl*, dan *hifẓ al-nasl- wa al-‘ird*.

Menurut Said Aqil Siradj, HAM yang dijelaskan dalam 30 pasal *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), pada dasarnya terangkum kedalam lima prinsip tersebut. Hak bearagama terwadahi dalam *hifẓ al-dīn*. Hak hidup, terbebas dari rasa takut, penganiayaan, penindasan, dan menentukan nasib sendiri tercermin dalam *hifẓ al-nafs*. Hak kebebasan berekspresi, menyatakan pendapat, hak pendidikan, hak berbudaya, berserikat, dan berkumpul terwadahi dalam *hifẓ al-‘aql*. Hak atas jaminan sosial, terbebas dari kelaparan dan upah yang layak terwadahi dalam *hifẓ al-māl*. Sedangkan *hifẓ al-nasl- wa al-‘ird* merupakan muara bagi persamaan derajat dihadapan hukum, hak privasi, hak berkeluarga, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak atas pekerjaan dan hak atas peradilan bebas.<sup>54</sup>

## 2. Gender

Di lingkungan NU, pemberdayaan terhadap kaum perempuan menjadi *concern* utama bagi pembangunan masyarakat. Cita-cita

---

<sup>53</sup> <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/10/337/2102782/pbnu-dan-tokoh-agama-minta-pemerintah-selesaikan-konflik-papua-dengan-dialog>.

<sup>54</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokrasi Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 109.

itulah yang mendasari lahirnya organisasi-organisasi perempuan seperti IPPNU, Muslimat NU, dan Fatayat NU. NU menentang pandangan tradisional di masa sebelum dan menjelang kemerdekaan di mana perempuan hanya dianggap sebagai “*konco wingking* atau teman belakang”.

Secara konseptual, NU pada dasarnya mengembangkan pandangan kesetaraan derajat perempuan dengan laki-laki (dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan kodrat). Beberapa keputusan dilingkungan ulama NU mencerminkan pandangan ini seperti:

- a. Keputusan Konbes Syuriah NU tanggal 17 Sya’ban 1376 H/ 19 Maret 1957 M di Surabaya, yang memperbolehkan kaum wanita menjadi anggota DPR/DPRD;
- b. Keputusan Mukhtar NU tahun 1961 di Salatiga yang membolehkan seorang wanita menjadi kepala desa, dan;
- c. Keputusan Munas Alim Ulama tahun 1997 di NTB, memberikan lampu hijau atas peran publik, hingga menjadi presiden dan wakil presiden. Oleh sebab itu, tidak cukup beralasan jika Islam secara ideologis menolak kepemimpinan perempuan atau mensubordinasi kaum perempuan.

### 3. Demokrasi

Demokrasi, saat ini diakui sebagai sistem terbaik bagi pemerintahan sebuah negara. Hubungan antara Islam dan demokrasi, dalam arti, potensi demokratis Islam sebagai sebuah agama, budaya dan peradaban masih tetap merupakan masalah yang kontroversial. Demokrasi sebagai sebuah fenomena sejarah dalam kehidupan manusia, entah siapa yang pertama kali menciptakan istilah tersebut, namun hal tersebut merupakan buah dari pergulatan yang amat panjang, di mana manusia berupaya untuk mencapai apa yang disebut dengan kebebasan, persamaan, dan hukum dalam sebuah sistem kehidupan bermasyarakat.

Konsep syura diidentikan dengan demokrasi. Ali Abdur Raziq, pada tahun 1926 menulis kitab *al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang intinya bahasannya adalah sebuah negara dapat diterima eksistensinya oleh Islam selama memenuhi tiga sendi pola kenegaraan, yaitu: (1) keadilan (*al’adalah*), (2) persamaan derajat (*al-musawah*), (3) demokrasi (*asy-syura*). Dalam karyanya Abdur Aziq tersebut menegaskan bahwa khilafah bukanlah satu-satunya bentuk negara Islam.<sup>55</sup>

Penegakkan keadilan (*al-qist*); menjaga *ukhuwwah*; melakukan *ishlah*; dan lain sebagainya akan diterima oleh kelompok manapun,

---

<sup>55</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokrasi Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h.16.

muslim atau non muslim, dan dianggap sebagai nilai-nilai kemanusiaan universal yang harus dijaga dan diimplementasikan.

Pemahaman itulah yang dipegang oleh NU ketika menerima Pancasila sebagai dasar negara, bukan syari'at Islam, karena memahami betul bahwa sila-sila yang termuat di dalamnya tidak mengandung segi-segi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, atau tujuan-tujuan syariat Islam yang disebut *maqāṣid al-sharī'ah*. Begitu juga NU bisa menerima keputusan politis penguasa Orde Baru yang mengharuskan semua organisasi sosial (termasuk agama) menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas, dan tidak mentolerir asas-asas yang lain. Bahkan dalam butir ke-4 Deklarasi tentang Hubungan Pancasila Dengan Agama (berisi 5 butir) yang disahkan oleh Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo, Jawa Timur, ditegaskan, bahwa penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.<sup>56</sup>

Dengan demikian, demokrasi (dalam tataran substantif; bukan teknis) harus dilihat dari frame perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai keadilan (*al'adalah*), persamaan derajat (*al-musawah*), menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama (*tasāmuh*), kemerdekaan dan kebebasan berekspresi (*al-hurriyah*), solidaritas (*at-tāwun*) yang akhirnya akan mendorong pada terciptanya sebuah sistem yang berlandaskan syura. Nilai-nilai itulah yang akan membuat masyarakat mampu membangun kebersamaan, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai atau pluralis, dan akhirnya pemerintahan baik.

---

<sup>56</sup> Muhith Muzadi, *Syarat Khittah Nahdlatul Ulama: Rumusan Hasil Lokakarya Pemasyarakatan Khittah NU*, Jakarta, 21-22 Januari 1089, Sekretariat PBNU Jakarta, t.t. h. 61-62.



## BAB V

### DAKWAH KONTEMPORER NAHDLATUL ULAMA

Perubahan media dalam berdakwah berlangsung seiring dengan perubahan teknologi informasi dan komunikasi berbasis internet. Aktivitas dakwah yang sebelumnya melalui mimbar-mimbar dan melalui media konvensional bermigrasi atau mengalami disrupsi<sup>1</sup> ke media berbasis internet. NU adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang mulai memfokuskan berdakwah menggunakan media baru (*new media*). Disrupsi digital membawa konsekuensi pada cara dan pendekatan baru. Hal ini karena khalayak konsumen dan lanskap yang berubah.

Meski tidak secara keseluruhan meninggalkan media konvensional NU sudah mulai menggunakan media kontemporer dan perubahan paradigma terjadi dan mau tidak mau harus diterapkan dalam aktivitas dakwah NU, yang semua bersifat konvensional mengadopsi teknologi media berbasis internet.

#### A. Dinamika Dakwah Kontemporer

Menurut Ahmad Khairul Anam definisi kontemporer adalah yang baru dan yang baru muncul.

Dalam dunia dakwah atau dunia marketing yang kontemporer itu adalah sesuatu yang dimunculkan dan berulang-ulang dan yang sekarang dan viral itu kontemporer.<sup>2</sup> Seperti contoh: istilah *kaffah* itu, istilah kontemporer atau gak? hijab itu kontemporer gak? tapi kita anggap itu kontemporer. Memang sengaja dimunculkan meskipun istilah ini klasik dan sudah lama. Bisa dong kita membuat definisi sendiri, contoh lainnya, Islam itu kontemporer atau klasik? klasik kan? Namun dengan penampilan anak muda yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, munculnya *hijaber-hijaber*, itu menjadi Islam kontemporer.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Istilah “disrupsi” telah dikenal puluhan tahun lalu, tetapi baru populer setelah guru besar Harvard Business School, Clayton M. Christensen, menulis buku berjudul *The Innovator Dilemma* (1997). Buku ini berisi tentang persaingan dalam dunia bisnis, lebih khusus inovasi. Christensen ingin menjawab pertanyaan penting, mengapa perusahaan-perusahaan besar bahkan pemimpin pasar (*incumbent*) bisa dikalahkan oleh perusahaan yang lebih kecil, padahal perusahaan kecil tersebut kalah dalam hal dana dan sumber daya manusia. Jawabannya terletak pada perubahan besar yang dikenal dengan disrupsi.

<sup>2</sup> Hasil wawancara Khoirul Anam, MA (Wakil Pimpinan Redaksi NU Online PBNU) Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

<sup>3</sup> Hasil wawancara Khoirul Anam, MA (Wakil Pimpinan Redaksi NU Online PBNU) Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir



Menurut Fahrurrozi terdapat tiga indikator adanya dakwah kontemporer yaitu (1) da'i kontemporer, (2) dakwah dengan menerapkan materi dakwah yang kontemporer, (3) kegiatan dakwah dengan menggunakan media teknologi kontemporer.<sup>4</sup>

Pada bab sebelumnya (bab satu) Sokhi Huda sudah menyebutkan tentang sketsa konsep dakwah kontemporer yang meliputi dua hal, yaitu: (1) kerangka filosofis dan (2) kerangka metodis.<sup>5</sup> Untuk lebih jelasnya akan penulis urai sebagai berikut:

a. Kerangka Filosofis

Pada era kontemporer pandangan filosofis dakwah perlu diubah menjadi humanis-spiritual, humanis-religius, atau humanis-ilahiah. Paradigma filosofis ini perlu ditancapkan secara kokoh dan dikibarkan secara luas, agar dakwah tidak terjebak kembali ke paradigma periode-periode sebelumnya yang cenderung berwajah ilahiah-humanis.

Ada bedanya antara paradigma humanis-ilahiah dan paradigma ilahiah-humanis. Paradigma humanis-ilahiah bergerak dari manusia ke Tuhan, yang berarti menjadikan manusia sebagai subjek. Tetapi paradigma ilahiah-humanis bergerak dari Tuhan ke manusia, yang berarti menjadikan manusia sebagai objek.

b. Kerangka Metodis

Nuansa metodis yang kompatibel untuk dakwah kontemporer adalah metode-metode yang bersifat dialogis,<sup>6</sup> partisipatif,<sup>7</sup> eksploratif,<sup>8</sup> dan dekoratif.<sup>9</sup> Semua sifat tersebut tetap konsisten pada

---

Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

<sup>4</sup> Fahrurrozi, *Model-model dakwah di Era Kontemporer (Strategi merestorasi umat menuju moderasi dan deradikalisasi)*, (Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017), h. 19.

<sup>5</sup> Sokhi Huda, *Mcnggagas Sketsa Konsep Dakwah Kontemporer (Perspektif historis-paradigmatik)*, t.th.

<sup>6</sup> Sifat dialogis berarti terjadinya komunikasi timbal-balik antara *da'i* dan *mad'u*, metode dakwah tidak memposisikan *da'i* sebagai *superman*, sedangkan *mad'u* sebagai *inferiorman*. Bahkan, hal-hal yang secara sensitif dapat membuat *mad'u* merasa berharga dan penting, diangkat ke permukaan secara sungguh-sungguh sebagai isu pesan dakwah.

<sup>7</sup> Sifat partisipatif berarti keterlibatan aktif *da'i* dalam pemenuhan kebutuhan atau pemecahan persoalan *mad'u*. Sifat ini dapat diterapkan pada model-model *da'wah bi al-hal*, misalnya: beasiswa pendidikan, santunan sosial, bakti sosial, pengobatan massal, dan sebagainya. Pada era kontemporer, sifat partisipatif agama benar-benar teruji; agama mana yang paling berperan dalam usaha membantu manusia untuk mengatasi kebutuhan hidup dan mencapai kesejahteraan, maka agama itulah yang menjadi idola manusia. Di sinilah dakwah tertantang untuk mengembangkan sifat partisipatif dalam metodenya, agar dakwah tidak seperti "senyum di hadapan orang buta atau berteriak di depan orang tuli".

<sup>8</sup> Sifat eksploratif berarti pengungkapan hal-hal yang berkenaan dengan aspek-aspek diri dan kehidupan *mad'u* sebagai titik pusat perhatian. Dalam hal

muara kerangka filosofis sebagaimana penjelasan di muka. Metode apapun dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sirkumstantif (bersifat situasional dan kondisional), dengan memperhatikan keempat sifat itu sendiri.

Era kontemporer yang diwarnai oleh kemajuan yang pesat, utamanya bidang teknologi informasi, turut memacu akselerasi dalam transformasi budaya, ideologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya pada realitas- objektif, dakwah tertuntut untuk merespons kecenderungan era kontemporer tersebut dengan mengakselerasi pendekatan-pendekatan yang efektif dan produktif, sama halnya pada metode-metode dan teknik-tekniknya.

Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan umat manusia semakin mudah untuk berhubungan satu dengan lainnya. Berbagai informasi dan peristiwa yang terjadi di belahan dunia dengan cepat dapat diketahui oleh manusia pada benua yang lain. Era globalisasi yang ditandai oleh semakin majunya teknologi komunikasi juga disebut dengan era informasi. Masyarakat dunia termasuk umat Islam dewasa ini dapat menikmati acara televisi dengan berbagai tayangan. Siaran televisi tersebut bukan hanya terpancar dari jaringan yang bersifat nasional, tetapi juga dapat mengikuti jaringan internasional berkat adanya satelit yang dihubungkan dengan adanya parabola di rumah-rumah penduduk. Komunikasi di satu sisi menyampaikan informasi kepada orang lain terhadap gagasan atau ide kepada orang lain baik menggunakan media maupun tidak menggunakan media sedangkan di sisi lain ingin mengubah pola pikir dan tingkah laku masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini yang saya maksud dengan dakwah kontemporer yaitu dakwah di era sekarang/ kekinian dengan menerapkan materi dakwah yang kontemporer dan kegiatan dakwah dengan menggunakan media teknologi kontemporer. Dalam bab ini penulis membagi dakwah kontemporer menjadi dua bagian, yaitu *new media* dan media sosial.

#### 1. *New Media*

Media baru (*new media*) adalah sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang

---

ini, bahasa dakwah tidak hanya dituntut sesuai dengan bahasa budaya *mad'u*, akan tetapi juga mereferensi pada topik-topik yang dialami oleh *mad'u*.

<sup>9</sup> Sifat dekoratif berarti ramuan dalam kemasan baru yang membuat dakwah tampak lebih indah, menawan, dan menyenangkan. Ramuan ini dilakukan oleh dakwah kontemporer dengan memanfaatkan khazanah model-model dakwah modern, pertengahan, dan klasik. Semua khazanah ini memberikan masukan berharga bagi ramuan dakwah kontemporer.

<sup>10</sup> Muhammad Rajab, "Dakwah dan Tantangannya Dalam Media Teknologi Komunikasi", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol 15. No. 1, Juni 2014, h. 69 .

terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Media baru adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi (perantara) dari sumber informasi kepada penerima informasi. “Media baru memiliki dua unsur utama yakni digitalisasi dan konvergensi. Internet merupakan bukti konvergensi karena menggabungkan beberapa fungsimedia lain seperti audio, video, dan teks”.<sup>11</sup>

Media baru adalah semua bentuk media yang menggabungkan tiga unsur C, yaitu: *computing and information technology* (IT), *communication network*, dan *convergence (digitalized media and information content)*. Media baru yang dapat juga disebut *digital media*, memiliki ciri-ciri di mana informasi menjadi mudah dimanipulasi, berjejaring, padat, mudah diperkecil, dan seolah tidak punya pemilik.<sup>12</sup>

Secara bahasa, media baru (*new media*) artinya saluran penyampaian pesan atau informasi yang baru. Karena baru (*new*), ia berbeda dengan media lama (konvensional). Media konvensional adalah media cetak dan media elektronik (penyiaran), yakni radio, televisi, dan film. Media baru merujuk pada media yang tersaji secara *online* di internet. Untuk mengaksesnya memerlukan perangkat (gadget/gawai) dan koneksi internet. Media baru adalah media online dalam pengertian umum.

Media baru sering dicirikan sebagai teknologi digital yang sangat interaktif. Media baru “sangat mudah diproses, disimpan, diubah, diambil, *hyper-linked* dan, mungkin yang paling radikal dari semuanya, mudah dicari dan diakses. Secara konseptual, media baru dapat dipandang sebagai proses budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan transformasi masyarakat. Pertimbangan ini dan lainnya membantu mendefinisikan media baru dan menjelaskan signifikansinya. Media baru mengubah cara orang di seluruh dunia dihibur dan mengonsumsi informasi.

Contoh teknologi yang termasuk media baru yaitu: (a) Internet dan website, (b) Televisi digital/plasma TV, (c) Digital cinema/3D cinema, (d) Superkomputer/laptop, (e) DVD/CD/blue ray, (f) MP3 player, (g) Ponsel/PDA phone, (h) Video game, (i) RSS feed, (j) Streaming Video, dan lain-lain.<sup>13</sup> Sebagian besar teknologi yang digambarkan sebagai “media baru” bersifat digital,

---

<sup>11</sup> Mc Quail, Denis. *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Alih bahasa oleh Agus Dharma dan Aminudin Ram. Jakarta: Erlangga, 2006), h. 26.

<sup>12</sup> Flew, Terry. *New Media, An Introduction*, second edition. Australia: Oxford University Press. 2005.

<sup>13</sup> Kompasiana. 2010. “Memahami Istilah-Istilah Baru New Media”. <http://new.media.kompasiana.com/2010/02/05/memahami-istilah-media-baru-new-media>.

integratif, interaktif, dapat dimanipulasi, serta bersifat jaringan, padat, mampat, dan tidak memihak.

Media baru meliputi:

a. Situs web dan blog

Website (*web*, *web page*, *site*, situs) adalah tempat sentral dimana *web pages* (halaman) disimpan. Halaman tersebut mengandung konten atau isi dari website. *Home page* (laman) adalah halaman utama dimana seluruh konten saling terhubung. URL (Uniform Resource Locator, *www*) adalah alamat website. Untuk mengakses alamat web tersebut, dibutuhkan *web browser* (Firefox, Chrome, Opera dll).

Beberapa jenis website adalah: 1) Pribadi,<sup>14</sup> 2) *E-Commerce*,<sup>15</sup> 3) Perusahaan,<sup>16</sup> 4) Organisasi,<sup>17</sup> 5) Media,<sup>18</sup> 6) Hiburan<sup>19</sup> dan lain-lain.

b. *Streaming* audio dan video

*Streaming* adalah teknologi untuk mengirimkan konten – berupa data audio atau video – ke **komputer** atau Handphone (HP) melalui

---

<sup>14</sup> Dalam website pribadi seseorang bisa mengeluarkan seluruh isi pikiran dengan membuat website pribadi. Apapun itu, dari mulai curhat, opini publik, karya sastra, hingga catatan perjalanan. Jenis website pribadi atau yang lebih dikenal blog ini memang tidak dibuat untuk profit. Namun, dengan isi yang menarik website ini bisa menghasilkan profit dalam jumlah yang tidak dapat diremehkan.

<sup>15</sup> *e- Commerce* adalah pasar *online*. Pasar atau toko online bukan lagi sesuatu yang asing di telinga masyarakat dunia. Website *e-commerce* menyediakan tempat jual-beli, baik baru maupun bekas, dari merek ternama hingga tanpa merek sekalipun. Apapun website yang menyediakan fasilitas bertransaksi dapat dikategorikan ke dalam website *e-commerce*.

<sup>16</sup> Website perusahaan menampilkan informasi mengenai semua hal yang ingin dipresentasikan perusahaan ke publik. Perbedaan mendasar antara website perusahaan dengan *e-commerce* adalah website ini tidak menjual produk secara langsung, tetapi sebagai media pengenalan produk sekaligus media pencitraan *brand*. Jika Anda bingung contohnya website *company profile*.

<sup>17</sup> Website organisasi atau instansi memuat seluruh program yang ditawarkan oleh instansi atau organisasi terkait. Instansi pendidikan, pemerintahan, hingga LSM atau non-profit masuk dalam kategori website organisasi. Konten yang ditawarkan selain ditujukan kepada pegawai atau calon pegawai ditujukan juga untuk khalayak umum.

<sup>18</sup> Beragam informasi terkini yang dirilis secara cepat dan akurat, kolom-kolom opini, hasil riset, survei terbaru, hingga wawancara dengan tokoh berpengaruh ditampilkan di website ini. Website media mendapatkan profit biasanya dari iklan.

<sup>19</sup> Apapun bidangnya, film, video game, musik, komik, dunia selebriti, termasuk sesuatu yang dapat menghibur adalah jadi konten utama dari website atau *blog* hiburan. Website media dan hiburan memang mirip terutama dalam menyajikan informasi terkini. Bedanya, website hiburan lebih mengutamakan aspek kesenangan.

jalur internet secara konstan, sehingga pengguna bisa langsung menikmati konten tersebut. Sebagai contoh, jika anda biasa nonton video dari *Youtube*, berarti kita telah menikmati konten *streaming*. Jadi konten yang dikirim dari penyedia layanan *streaming* seperti Youtube, bisa langsung dinikmati tanpa harus menunggu semua data selesai dikirim ke komputer atau HP.

Perbedaan antara *streaming* dengan *download*. Sebelum teknologi *streaming* populer, cara untuk menikmati video atau audio dari internet dengan mendownload nya terlebih dahulu. Setelah file tersebut selesai didownload dan tersimpan di komputer atau hp, baru kemudian video atau audio tersebut bisa dinikmati. Kita tetap bisa menikmati file tersebut selama masih tersimpan di komputer atau HP tanpa harus terkoneksi lagi dengan internet. Jadi internet hanya dibutuhkan saat *download* saja.

Sedangkan *streaming*, konten video atau audio yang di kirim bisa segera dinikmati tanpa harus menyimpan file tersebut di komputer atau HP. Memang ada sedikit file yang tersimpan di komputer atau HP sebagai *buffer*, agar konten yang sedang dinikmati tidak terputus jika ada gangguan di jalur internet yang akan berpengaruh pada proses pengiriman data. Setelah konten selesai dinikmati, tidak ada data yang tersimpan di komputer atau hp. Jika kembali ingin menikmati video atau audio tersebut, pengguna harus terkoneksi lagi ke jalur internet. Jadi untuk menikmati konten video atau audio secara streaming, pengguna harus tetap terkoneksi dengan internet.

c. Ruang obrolan (*Chat room*)

*CHAT ROOM* adalah “ruangan-ruangan” di Internet yang para penggunanya dapat saling bercakap-cakap secara langsung melalui pesan berupa teks di layar komputer. *Chat room* dapat menampung sejumlah besar orang, yang dapat saling membaca dan menjawab pesan.

d. Ponsel/Surel (*e-mail*)

Salah satu padanan kata yang santer didengar adalah kata *surel* dan *posel*. *Surel* merupakan akronim dari *surat elektronik*, sedangkan *posel* merupakan akronim dari *pos elektronik*. Kedua kata tersebut sekilas seperti bersinonim sebagai alternatif dari padanan kata *email*. Agar mengetahui perbedaannya, mari kita bandingkan kedua kata tersebut di dalam kalimat berikut ini. 1) Saya mengirim *surel* kepada atasan. 2) Saya lupa kata kunci untuk masuk ke *posel* saya. 3) *Surel* tugas kuliah harus segera dikirim melalui *ponsel*.

e. Komunitas *online*

Komunitas *online* adalah sebuah komunitas yang terbentuk secara virtual (maya) di berbagai layanan internet, misalnya forum online, mailing list, atau grup-grup tertentu. Komunitas yang dimaksud merujuk pada sekumpulan anggota/user yang mempunyai



hobi atau ketertarikan yang sama terhadap sesuatu hal. Tujuannya yaitu untuk saling berbagi cerita, informasi, atau pengalaman lain antar anggotanya tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Lain halnya dengan komunitas nyata yang berarti kegiatan yang biasa dilakukan oleh kelompok tertentu untuk bertemu dan bertatap muka secara langsung antar anggotanya. Komunitas *online*, disebut juga komunitas internet atau komunitas web, yang anggotanya berinteraksi satu sama lain terutama melalui Internet.

Menurut Balasubramanian dan Mahajan, 2001, komunitas virtual atau *online community* adalah entitas apapun yang memenuhi lima jenis karakteristik, yakni perkumpulan orang, anggota rasional, interaksi di *cyberspace* tanpa kesamaan lokasi fisik, keterlibatan dalam proses pertukaran sosial (*social exchange*), dan adanya tujuan, properti/identitas, atau kepentingan maupun minat yang sama antara anggota.<sup>20</sup>

Dalam Koh dan Kim dinyatakan bahwa peneliti ilmu sosial secara umum sepakat bahwa komunitas virtual adalah kelompok yang tempat interaksi primernya adalah di *cyberspace*. Hal ini disebabkan ikut sertanya anggota dari beberapa komunitas virtual dalam komunikasi *offline* di samping *online*.<sup>21</sup>

f. Media sosial dan *platform* berbagi.

Media sosial adalah situs atau layanan daring (*online*) yang memungkinkan pengguna tak hanya mengonsumsi, tapi juga berpartisipasi membuat, mengomentari, dan menyebarkan beragam konten dalam berbagai format: teks, gambar, audio, atau video.

Dengan media sosial, pengguna bisa membangun percakapan, bahkan komunitas, karena media sosial juga mempermudah pertemuan beberapa atau banyak orang dengan minat sama. Media ini juga memudahkan pengelola usaha, organisasi masyarakat, sampai lembaga pemerintah untuk terkoneksi langsung dengan publik.

g. Aplikasi seluler (*Mobile apps*)

*Mobile APP* atau *mobile application*) adalah program komputer yang dirancang untuk berjalan pada peranti bergerak seperti ponsel/tablet atau jam tangan.

h. Iklan web

Iklan *online* adalah iklan yang menggunakan internet sebagai media penyampaian pesan promosi, baik yang ditampilkan melalui

---

<sup>20</sup> Balasubramanian, S., & Mahajan, V. (2001). "The Economic Leverage of the Virtual Community". *International Journal of Electronic Commerce* 5 (3), h. 103-138.

<sup>21</sup> Koh, J., & Kim, Y. G. (2004). "Sense of Virtual Community: A Conceptual Framework and Empirical Validation". *International Journal of Electronic Commerce* 8 (2), h. 75-93.

komputer desktop maupun perangkat mobile. Iklan online pun berbagai macam jenisnya.

i. Media DVD dan CD-ROM

CD/DVD merupakan media yang digunakan pada laptop, PC, dan perangkat lainnya. Dengan penyimpanan CD/DVD kita bisa menonton film, bermain game, mendengarkan musik, dan lainnya.

CD-ROM (*Compact Disc Read-Only Memory*) adalah media yang digunakan untuk membaca sebuah CD, yang hanya bisa “membaca saja”. CD-ROM memiliki dua tipe, yaitu: tipe ATA/IDE yaitu jenis CD-ROM yang memiliki kecepatan membaca data mulai dari 100 hingga 133 Mbps dan tipe SCSI yaitu jenis CD-ROM yang memiliki kecepatan membaca data hingga 150 Mbps, bahkan lebih.

j. Lingkungan realitas virtual

*Virtual reality* (VR), atau realitas virtual adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Di dalam bahasa Indonesia *virtual reality* dikenal dengan istilah realitas maya.

Kelebihan utama dari *virtual reality* adalah pengalaman yang membuat user merasakan sensasi dunia nyata dalam dunia maya. Bahkan perkembangan teknologi *virtual reality* saat ini memungkinkan tidak hanya indra penglihatan dan pendengaran saja yang bisa merasakan sensasi nyata dari dunia maya dari virtual reality, namun juga indra yang lainnya.

Sebuah teknologi dapat dikatakan sebagai virtual reality jika sudah memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

1. Tampilan gambar / grafis / visualisasi 3D tampak nyata dan sesuai dengan perspektif dari penggunaanya
2. Mampu mendeteksi semua gerakan dan respon dari pengguna, seperti gerakan kepala atau bola mata pengguna. Ini dibutuhkan agar tampilan grafis dapat sesuai dengan perubahan dunia 3D dari pengguna itu sendiri.

k. Integrasi data digital dengan telepon, seperti telepon internet.

Smartphone adalah telepon genggam yang mempunyai kemampuan dengan penggunaan dan fungsi yang menyerupai komputer. Belum ada standar pabrik yang menentukan arti smartphone. Bagi beberapa orang, smartphone merupakan telepon yang bekerja menggunakan seluruh perangkat lunak sistem operasi yang menyediakan hubungan standar dan mendasar bagi pengembang aplikasi. Bagi yang lainnya, smartphone hanyalah merupakan sebuah telepon yang menyajikan fitur canggih seperti surel (surat elektronik), internet dan kemampuan membaca buku elektronik (*e-book*) atau terdapat papan ketik (baik sebagaimana jadi maupun dihubungkan

keluar). Dengan kata lain, smartphone merupakan komputer kecil yang mempunyai kemampuan sebuah telepon. Pertumbuhan permintaan akan alat canggih yang mudah dibawa ke mana-mana membuat kemajuan besar dalam pemroses, pengingatan, layar dan sistem operasi yang di luar dari jalur telepon genggam sejak beberapa tahun ini.<sup>22</sup>

Tabel .7.  
Karakteristik Media Konvensional vs Media Baru<sup>23</sup>

Karakter		Media Konvensional	Media Baru
1	Isi	Cenderung terbatas, adanya sensor, pembatasan oleh <i>space</i> , unsur lokalitas	Tidak terbatas, transparan, prinsip global, bebas, publikasi isi cepat
2	Orientasi Fungsi	Kelas elit, mengabaikan universalitas publikasi	Semua kalangan, akses universal
3	Institusi	Terpusat, dikendalikan oleh pemilik, adanya konsentrasi kepemilikan, membutuhkan modal besar	Terdesentralisasi, fleksibel, anonimitas, pengguna sebagai pemilik, hanya untuk modal akses
4	Akses publik	Rendah, satu arah	Sangat luas, multi-arrah, interaktif, kebebasan, kesetaraan ( <i>equality</i> )

- Media Sosial (*Twitter, facebook, intagram, youtube, google plusme, NU Online, 146 Chanel, Aswaja TV, Nutizen, Islamic.com* dan Film.

Media sosial adalah suatu fitur dalam bentuk *website* yang memungkinkan seseorang saling berinteraksi satu sama lain dalam suatu komunitas. Di era modern ini, media sosial mulai menjadi suatu hal yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan lambat laun ia mulai masuk ke berbagai sektor kehidupan, seperti dalam hal pendidikan, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Masyarakat mulai berlomba-lomba dalam menyerap kemanfaatan dari media sosial sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tak terkecuali dalam sektor penyebaran ajaran agama Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah dakwah.

<sup>22</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/91161-ID-penggunaan-smartphone-dalam-menunjang-ak.pdf>

<sup>23</sup> Diolah dari Sparks, Colin. (2001). "The Internet and the Global Public Sphere." Dalam Bennett, W. Lance & Entman, Robert M. (eds). *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*. United Kingdom: Cambridge University Press, h. 75- 95.; Pavlik, John V. (1996). *New Media Technology, Cultural and Commercial Perspectives*. USA: Allyn and Bacon.

Sebagian kalangan menganggap media baru berbeda dengan media sosial. Media sosial merupakan seluruh bentuk media jejaring di internet yang berfungsi untuk menciptakan jejaring komunitas virtual, seperti *Facebook* dan *Twitter*. Pada kesempatan ini media sosial dipandang sebagai bagian dari media baru. Artinya media sosial adalah salah satu bentuk media baru. Dalam konteks politik, media baru yang paling banyak diaplikasikan selain *homepage* atau *website* dan *e-mail* adalah bentuk-bentuk media jejaring tersebut. Media jejaring atau media sosial ini memiliki ciri politis karena dapat menyatukan para pengguna secara virtual layaknya sebuah organisasi dalam kehidupan nyata (riil).

Antony Mayfield<sup>24</sup> dari organisasi *iCrossing* menjelaskan bahwa, media sosial lebih tepat dipahami sebagai *a group of new kinds of online media*, yang memiliki karakteristik berikut:

- 1). **Participation:** *social media encourages contributions and feedback from everyone who is interested. It blurs the line between media and audience.*
- 2). **Openness:** *most social media services are open to feedback and participation. They encourage voting, comments and the sharing of information. There are rarely any barriers to accessing and making use of content – password-protected content is frowned on.*
- 3). **Conversation:** *whereas traditional media is about “broadcast” (content transmitted or distributed to an audience) social media is better seen as a two-way conversation.*
- 4). **Community:** *social media allows communities to form quickly and communicate effectively. Communities share common interests, such as a love of photography, a political issue or a favourite TV show.*
- 5). **Connectedness:** *Most kinds of social media thrive on their connectedness, making use of links to other sites, resources and people.*

Sejalan dengan itu, setidaknya hingga saat ini media sosial dapat dibedakan ke dalam enam jenis, yaitu: *social networks* (Friendster, MySpace, Facebook, Bebo), *blogs* (blogspot, wordpress, multiply), *wikis* (Wikipedia), *podcasts* (iTunes), *forums* (*mailing list*, *website*), *content communities* (*flickr*, *del.icio.us*, *YouTube*), dan *microblogging* seperti *Twitter*. Keseluruhan bentuk media sosial ini telah digunakan secara simultan, dan saling terhubung.

Struktur media baru yang memberi kontribusi pada ruang publik adalah yang dapat memfasilitasi proses perbincangan politik secara *in-group*. Maka media yang lazim dipakai adalah *social networks*, *blog*,

---

<sup>24</sup> Mayfield, Anthony. (2008). “What is social media?” Diakses dari: <http://www.iCrossing.com/ebooks>.

dan *mailing list*. Peter Dahlgren<sup>25</sup> menyatakan bahwa bentuk ruang publik *virtual* di media baru (*net-based public sphere*), bisa diklasifikasi dalam lima kategori, yaitu: *e-government*, *advocacy/activist domain*, *civic forums*, *parapolitical domain*, dan *journalism domain*. Dengan sifatnya yang virtual, interaktif, konvergen, dan global, maka internet hadir sebagai ruang publik yang lebih luas. Media baru membentuk ruang publik berskala internasional.

Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi bagi politik dan demokrasi dapat dibagi dalam empat kategori yaitu: 1. ***Allocution***, menyangkut aspek-aspek: *computerized election campaigns*, *computerized election information*, *computerized civic service and information centers*. 2. ***Consultation***, menyangkut aspek- aspek: *mass public information system* *advanced public information system (internet)*. 3. ***Registration***, menyangkut bidang: *registration system for government and public administration*, *computer-assisted citizens enquiries*, *electronic polls*, *electronic referenda*, *electronic elections*. 4. ***Conversation***, mencakup bidang: *bulletin board systems*, *discussion lists*, *electronic mail and teleconferencing*, *electronic town halls*, *group discussion support system*.<sup>26</sup>

Dakwah dengan memanfaatkan media sosial memang merupakan gaya dakwah baru yang sedang “naik daun” dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, bisa dibilang bahwa media sosial adalah solusi yang paling tepat bagi berbagai permasalahan dakwah di era modern ini. Selain cakupan area persebarannya yang sangat luas, media sosial juga menawarkan berbagai kemudahan dalam kegiatan amar ma’ruf nahi munkar ini, baik bagi para *da’i* (orang yang berdakwah) maupun bagi para *mad’u* (orang yang menerima dakwah).

Generasi milenial sebagai generasi yang memang terkenal menggandrungi sesuatu yang instan dan mudah, tentu memandang bahwa media sosial adalah pilihan yang sangat tepat untuk memperoleh maupun berbagi berbagai informasi, salah satunya informasi keagamaan. Sehingga tidak heran, jika sedikit demi sedikit mereka yang menyebut diri mereka sebagai generasi milenial tersebut mulai meninggalkan dakwah konvensional.

Media sosial menggunakan teknologi berbasis *website* atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk

---

<sup>25</sup> Dahlgren, Peter, “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation, 2005,” *Political Communication*, h. 153.

<sup>26</sup> Van Dijk Tuen. “Models of Democracy and Concepts of Communication.” Dalam Van Dijk, Tuen & Hacker, Kenneth L. (eds). *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. London, Thousand Oaks, (New Delhi: Sage Publication, 2000), h. 40.



dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah *youtube*, *facebook*, *blog*, *twitter*, dan lain-lain.

Menurut Dedik salah satu redaksiislam.co mengatakan NU memang telat dakwah di media online, namun media terus dan selalu berkembang. Masalah Ekstrimesme itu sebetulnya offline. cluster-cluster di google itu memang wahabi dan salafi sudah sangat mendominasi media sosial. Sekarang NU sudah memiliki beberapa media online dan itu menjadi platform NU, seperti: NU Online, 146 Chanel, Aswaja TV, Nutizen, Islamic.com.<sup>27</sup>

a. *Twitter*.

*Twitter* adalah layanan jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). *Twitter* didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Sejak diluncurkan, *Twitter* telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet. Di *Twitter*, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan pengguna terdaftar bisa menulis kicauan melalui antarmuka situs web, pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler.

*Twitter* mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2013, terdapat lebih dari 500 juta pengguna terdaftar di *Twitter*, 200 juta di antaranya adalah pengguna aktif. Lonjakan penggunaan *Twitter* umumnya berlangsung saat terjadinya peristiwa-peristiwa populer. Pada awal 2013, pengguna *Twitter* mengirimkan lebih dari 500 juta kicauan per hari, dan *Twitter* menangani lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari.

Hal ini menyebabkan posisi *Twitter* naik ke peringkat kedua sebagai situs jejaring sosial yang paling sering dikunjungi di dunia, dari yang sebelumnya menempati peringkat dua puluh dua. Tingginya popularitas *Twitter* menyebabkan layanan ini telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai media komunikasi darurat. *Twitter* juga dihadapkan pada berbagai masalah dan kontroversi seperti masalah keamanan dan privasi pengguna, gugatan hukum, dan penyensoran.

*Twitter*, *Facebook*, dan *blog/website* sebagai bentuk media baru paling tren menawarkan potensi untuk ruang interaktif

---

<sup>27</sup> Dedik Priyadi, dalam *Workshop Penyusunan Modul Dakwah PP Fatayat NU*, Jum'at, 08 -09 Maret 2019, Hotel Bintang Wisata Mandiri, Jakarta Pusat.

tersebut. Dulu sempat ada sebuah web blog yang sengaja dirancang untuk diskusi politik yaitu Politikana.com, tetapi sudah tidak beroperasi lagi. Saat ini, diskusi yang menekankan unsur interaktif ini terlihat pada kolom komentar yang tersedia baik pada *website media, blog, Facebook, Twitter*, maupun *Youtube*. Sebagai gambaran berikut ditunjukkan satu contoh diskusi di salah satu web berita media nasional. Dalam diskusi terkait ricuh pemungutan suara di Hongkong karena banyak yang tidak dapat memberikan suara mereka, para *netizen* membahas dengan serius. Dari 284 orang yang terlibat dalam diskusi tersebut, terdapat 685 komentar hingga satu hari setelah kejadian tersebut.<sup>28</sup>

Berdasarkan laporan tahunan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019 di Surakarta performansi sosial media NU dalam hal ini *twitter* mencapai 160 ribu *followers*.<sup>29</sup>

b. *Facebook*

*Facebook* adalah sebuah layanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Hingga September 2012, *Facebook* memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam.

Berdasarkan laporan tahunan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019 di Surakarta performansi sosial media NU dalam hal ini *facebook fans page* mencapai 16 juta likes.<sup>30</sup>

c. *Instagram*

*Instagram* (juga disebut IG atau Insta adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik *Instagram* sendiri. Satu fitur yang unik di *Instagram* adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak Instamatic dan polaroid. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 atau 16:9 yang umum digunakan oleh kamera pada peranti bergerak.

---

<sup>28</sup> Salvatore Simarmat, "Media Baru, Ruang Publik Baru, dan Transformasi Komunikasi Politik Di Indonesia", *Interact*: Vol. 3 No. 2, h. 18-36, November 2014, Prodi Ilmu Komunikasi, Unika Atma Jaya Jakarta.

<sup>29</sup> Laporan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 365.

<sup>30</sup> Laporan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 365.

*Instagram* dapat digunakan di *iPhone*, *iPad* atau *iPod Touch* versi apapun dengan sistem operasi iOS 7.0 atau yang terbaru, aplikasi ini dapat diunduh melalui *Apple App Store* dan *Google Play*. Pada tanggal 9 April 2012, diumumkan bahwa *Facebook* setuju mengambil alih *Instagram* dengan nilai sekitar \$1 miliar.

Berdasarkan laporan tahunan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019 di Surakarta performansi sosial media NU dalam hal ini *instagram* mencapai 400 *follower*.<sup>31</sup>

d. *Youtube*

*YouTube* adalah sebuah situs web berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi Adobe Flash Video dan HTML5 untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.

Kebanyakan konten di *YouTube* diunggah oleh individu, meskipun perusahaan-perusahaan media seperti CBS, BBC, Vevo, Hulu, dan organisasi lain sudah mengunggah material mereka ke situs ini sebagai bagian dari program kemitraan *YouTube*. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video-video yang dianggap berisi konten ofensif hanya bisa ditonton oleh pengguna terdaftar berusia 18 tahun atau lebih. Pada November 2006, *YouTube, LLC* dibeli oleh Google dengan nilai US\$1,65 miliar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan. Pengunggahan

Semua pengguna *YouTube* dapat mengunggah video dengan batas durasi masing-masing 15 menit. Pengguna yang memiliki jejak rekam baik dengan mematuhi Panduan Komunitas *YouTube* diizinkan mengunggah video berdurasi 12 jam, tetapi akunnya perlu diverifikasi (biasanya melalui telepon genggam). Saat *YouTube* diluncurkan tahun 2005, pengguna bisa saja mengunggah video panjang, tetapi batas 10 menit diberlakukan pada Maret 2006 setelah *YouTube* menemukan bahwa kebanyakan video yang melebihi panjang tersebut berupa acara televisi dan film yang tidak diizinkan. Batas 10 Menit Tersebut Ditambah Menjadi 15 Menit Pada Bulan Juli 2010. Ukuran berkas dibatasi hingga 2 GB untuk

---

<sup>31</sup> Laporan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 365.

unggahan dari situs web *YouTube* atau 20 GB jika pengguna memakai penjelajah versi terbaru.

e. *NU Online* ([www.nu.or.id](http://www.nu.or.id))

Situs resmi milik PBNU. Didirikan pada tahun 2002 berkantor di Kantor PBNU Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat, dengan alamat situs: [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id). diantara para pendirinya adalah KH. Hasyim Muzadi, Masduki Baidlawi, Taufiq R Abdullah, Saiful Bahri Anshori dan Mun'im DZ.

Pada tahun 2005 situs ini mendapatkan penghargaan Situs Indonesia terbaik dari majalah *Komputer Aktif* kategori sosial dan kemasyarakatan. sejak Tahun 2006 *NU Online* menurunkan tulisan dalam tiga bahasa: Indonesia, Arab dan Inggris.

Situs inilah yang menjadi sarana penyebaran informasi paling efektif berita-berita perkembangan NU keseluruh dunia. Selain cepat, juga mudah dan murah. *NU Online* inilah yang memelopori penerapan teknologi informasi dikalangan NU.

Berdasarkan laporan lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019 di Surakarta pada rapat pleno PBNU 2019 diinformasi dan berita NU, untuk menyebarkan isebutkan bahwa divisi *NU Online* pada semester II 2019 rata-rata untuk pembaca unik 4.5 pada semester Iijuta/bulan. Rata-rata halaman terbaca 20 juta/bulan.<sup>32</sup>

f. 146 Chanel<sup>33</sup>

164 Channel merupakan platform video yang berada di bawah Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* (LTN) atau lembaga Komunikasi dan Informasi di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang diresmikan pada tanggal 14 Pebruari 2016 dengan Nomor SK 14/A-1/LTN-PBNU/14/2016. Kemudian pada tahun 2018 diluncurkan SK baru dengan Nomor SK 01/A-1/LTN-PBNU/1/2018.

Dalam penyebarannya, 164 Channel lebih konsen pada kanal-kanal media sosial seperti *Youtube*, *Facebook* dan *Instagram*. Konten yang diproduksi pun sangat beragam, seperti pengajian kitab kuning, *live streaming*, ceramah tematik, videografis, teaser, film pendek, *talkshow* dan peliputan kegiatan-kegiatan NU.

---

<sup>32</sup> laporan Lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019, h. 365.

<sup>33</sup> laporan tahunan *production house* 146 channel, Lembaga *Ta'lif Wa Nasyr* Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2019.

Meski demikian, 164 Channel telah meluncurkan TV satelit bernama “Risalah TV” yang pada akhir tahun 2019 mulai siaran percobaan selama 3-5 bulan.<sup>34</sup>

### *Output*

*Broadcaster* di sejumlah kanal antara lain :

- a. Aswaja TV
- b. TV 9
- c. NUtizen
- d. Media Sosial 164 Channel

1. *Youtube*

Channel ini dibuat pada tanggal 14 Februari 2016, sudah mencapai

- 56,500 : *Subscribers*
- 7,8 Juta : *Views*
- 170 : *Videos*
- 78,8 Juta : *Watch time (minutes)*
- 1,3 Juta viewers : Capaian viewer tertinggi

\*) *Data Youtube Analytic per tanggal 23 Mei 2017 (Feb 14, 2016 – October 9, 2019)*

2. *Situs jejaring NU*

3. *Facebook*

Disamping 164 Channel memiliki Fan Page sendiri juga berjejaring (*Cross Posting*) dengan akun-akun besar seperti NU Online (1.6 juta *followers*), Nahdlatul Ulama Organization (360 ribu *followers*), Pagar Nusa, dll.

4. *Twitter*

5. *Instagram*

### *Outcome*

- a. Membentuk persepsi publik dan mengkonstruksi nilai-nilai ke-Islaman yang humanis & pluralis
- b. Menyebarkan Islam yang penuh kedamaian sekaligus menerima perbedaan merupakan *sunnatullah*
- c. Publik mendapat informasi alternatif terkait amaliah-amaliah NU yang acapkali dideskreditkan secara sepihak

---

<sup>34</sup> Cara penyebarannya yaitu, secara umum, ada dua cara dalam menyebarkannya. Yaitu melalui *youtube* jika durasinya lebih dari 8 menit. Dan broadcast melalui Whatsapp, Twitter, Facebook, jika durasi video kurang dari 8 menit. Serta Instagram khusus video berdurasi 60 detik. Video-video tertentu juga ditayangkan di TV9, Aswaja TV dan Nabawi TV.



- d. Menyajikan materi berdasarkan keyword yang sedang trending di Media Sosial. (e.g. Syariah, Dalil, Hijab, Sunnah, Jihad, Hijrah, dll.) kajian *letter leg*
- e. Merebut kembali “pasar pendidikan agama” yang terlanjur dikuasai oleh para pengusung narasi islamisme.

#### Produksi *Content*

Berikut ini adalah beberapa produksi konten unggulan yang sudah diproduksi:

##### 1. Ngopi Bareng Kyai.

Merupakan program *talkshow* 164 Channel yang dipandu oleh *host*. *Talkshow* ini ditayangkan tiap minggu. Ngopi bareng kyai konsisten menghadirkan topik-topik menarik dengan narasumber kelas satu. Sejumlah tamu istimewa akan hadir dan mengisi acara, seperti KH. Said Aqil Siroj, KH. Maruf Amin, KH. Miftahul Achyar, dll



##### 2. Dongeng Anak Nusantara.



Program acara anak durasi 10 menit ini mengajak putra-putri kita untuk menikmati berbagai cerita yang penuh dengan makna dan pesan moral. Dengan dilengkapi berbagai media peraga yang menarik ala santri.

Dongeng anak Nusantara akan memberikan pembelajaran yang baik bagi anak-anak, dengan talent kawakan yaitu Kak *Toni*.

##### 3. Gus NOe

Sebuah film drama humor pendek yang mengadopsi dari joke-joke Gus Dur. Pemeran utama dalam film ini yaitu Gus NOe (Nahdlatuol Oclama). Gus Noe adalah santri sekaligus putra kyai ternama. Ia cerdas, luas ilmunya, penuh kesederhanaan, singkat namun berbobot ketika berbicara, selalu mengenakan sarung dan kopiah yang sudah lusuh, rajin membaca koran, serta joke-jokenya yang sufishistik.

Gus Noe bukan orang, ia adalah karakter yang diperankan oleh aktor. Sebagaimana Semar, Cepot, atau Kabayan. Saat ini sudah diproduksi 3 episode.

##### 4. Suara Santri



Merupakan program *talkshow* 164 Channel yang dipandu oleh *host*. *Talkshow* ini diproduksi dan ditayangkan mengikuti isu terhangat.

5. Video Profil (dokumenter)

Memproduksi video profil lembaga/ Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Saat ini sudah memproduksi video profil Badan Otonom SARBUMUSI, LazisNU Kab. Sukabumi, Profil NU , dll.

6. Jum'at Berkah

Video ceramah/ tausiyah singkat, berdurasi 5 – 10 menit oleh kiai-kiai NU yang ditayangkan setiap malam Jumat.

7. Jurnal Nusantara

Video Jurnalistik (VJ) merupakan satu sebutan baru bagi seorang wartawan televisi, yang tugasnya bukan saja mengumpulkan data untuk dijadikan berita, namun ia juga harus cakap dalam mengambil gambar.

Banyaknya informasi di PBNU yang tidak sampai ke daerah menjadi alasan kuat bagi 164 Production untuk memproduksi video jenis ini.

8. Kajian Kitab Kuning (*Live Streaming*)

164 Production memproduksi pengajian kitab kuning, diantaranya

- a. Kitab *Safinatunnajah*; Rutin tiap hari Senin. (Sudah selesai/hatam)
- b. Kitab *Syarah Arba'in Nawawi*; Tiap hari Selasa, pukul 16.00 bersama KH. M. Taufik Damas Lc. Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta. (Masih berlangsung. Hingga saat ini baru 3 episode)
- c. Kitab *Lubabul Hadits*; Tiap hari Kamis pukul 17.00 bersama Ustadzah Silvia Zahra
- d. Kitab *Ibanatul al Akam*; Tiap hari Senin pukul 17.00 oleh Ustadz Mahbub Ma'afi. (Masih berlangsung, hingga saat ini baru hadits ke 37) Program Ngaji Safinah ini rencananya dibagi menjadi 36 Episode. Masing-masing berdurasi maksimal 30 menit.
- e. Kitab *Adabul Alim wal Muta'allim dan Bahjatul Mahafil* bersama Habib Umar bin Hafidz (Yaman) melalui *Teleconference*; Digelar setiap bulan sekali pada hari Rabu minggu pertama.
- f. Kitab *al Hikam*; Tiap hari Jum'at mulai pukul 13.30-16.00 bersama KH. Miftahul Achyar (Rais Aam PBNU)

9. *Talkshow* Peci dan Kopi

*Talkshow* gaya santri millennial mengupas isu-isu yang sedang berkembang dimasyarakat.

10. Dokumentasi dan Reportase Kegiatan NU

g. Aswaja TV

Kemajuan teknologi yang terus berkembang di zaman ini, mendorong industri media elektronik untuk mengembangkan dan juga beralih menjadi media *live streaming* sehingga dapat dinikmati oleh berbagai khalayak kapanpun dan dimanapun. Dari sekian banyaknya media komunikasi yang ada, televisi masih menjadi pilihan yang dominan di masyarakat untuk mendapatkan informasi.

Saluran televisi analog dan digital yang sebelumnya ada kini berkembang menjadi televisi internet (*TVLive streaming*). *TVLive streaming* adalah situs web yang memiliki tayangan video dengan konsep yang matang, selalu melakukan pembaharuan, dinamis, mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi di lingkungan sekitar, dan dapat diakses oleh publik secara bebas dan dengan berbagai macam pendistribusiannya. Masyarakat dapat mengakses *TVLive streaming* ini hanya dengan menghubungkan komputer pribadi atau *mobile phone* dengan koneksi internet. Teknik penyiaran *TVLive streaming* memiliki kelebihan utama yaitu akses *TVnon stop* 24 jam. Selain itu pengguna *TVLive streaming* tidak perlu khawatir ketinggalan program acara dikarenakan dapat diakses di manapun.

Aswaja TV merupakan salah satu saluran televisi muslim yang ada di Indonesia. TV Islam yang menganut paham *ahlussunnah wal jama'ah* ini diluncurkan pada 25 Juli 2013/ 17 Ramadhan 1434 H atau bertepatan dengan malam Nuzulul Qur'an 1434 H.

Aswaja TV dengan jargon *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah Nahdliyyin Network, The Real Indonesian Moslem Channel*, dapat diakses melalui TV Parabola dengan channel: Satelit Palapa D, Frekuensi: 03932, Symbol Rate: 15800, Polarisasi: Vertikal, Type Video: MPEG2 dan MPEG2. Dengan menggunakan Satelit Palapa tersebut, siaran Aswaja TV tidak hanya menjangkau seluruh NUsantara tetapi meliputi area Asia Tenggara, Australia, hingga Hongkong dan Taiwan.

Aswaja TV dapat disaksikan oleh setiap orang di seluruh dunia tidak hanya melalui TV parabola. Stasiun televisi yang beralamat di Komplek Perkantoran Stadion Lebak Bulus Tribun Timur TS No.1 B Jl. Raya Jagorawi No.1 Jakarta Selatan, dan Studio NUcleus Production yang beralamat di Komplek Triloka (Mabes AURI) Jl.Triloka 1 No.45A Pancoran Jakarta Selatan telah meluncurkan layanan *Live Streaming*.

Keberadaan internet dan *TVLive streaming* sebagai media dakwah, setidaknya menjadi tatanan baru dalam menyampaikan keilmuan dalam memberikan pendidikan dalam ilmu agama. Dan para ulama, dai dan para pemimpin Islam sudah menyadari dan melakukan langkah-langkah baru untuk menjaga dan memberikan

pendidikan kepada generasi muda untuk siap dan matang dalam menghadapi serangan negatif dari media internet. Langkah berdakwah melalui media internet atau *TVLive streaming* diharapkan dapat melahirkan perubahan yang berarti bagi kemajuan akhlak umat dan bangsa. Untuk itu, TV dakwah yang telah mengalami perkembangan harus disajikan dengan cara dan metode yang tepat dan sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tampilan secara aktual, faktual dan kontekstual.

h. Nutizen

NUTIZEN adalah aplikasi yang digawangi oleh anak-anak muda NU dan bergerak di bidang video dan tv streaming. Ada banyak sekali video keislaman dan musik religi yang disajikan sebagai sarana belajar Islam melalui sumber terpercaya. Di aplikasi ini pula pengguna telepon pintar bisa ikut ngaji langsung dengan kiai-kiai sepuh seperti KH Maimoen Zubair, KH Mustofa Bisri, Habib Luthfi, KH Said Aqil Siradj dan lain-lain. Aplikasi ini bisa diunduh gratis di playstore dengan tautan ini.

i. Film

Film adalah salah satu sarana komunikasi massa, selain jaringan radio, televisi dan telekomunikasi. Film membawa pesan-pesan komunikasi untuk diperlihatkan pada penonton. Sesuai yang ingin diberikan oleh sutradara entah dalam drama, horor, komedi, dokumenter dan *action*.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama telah membuat sebuah film "the Santri", yang di sutradarai oleh Livi Zheng. Tak lebih dari seminggu trailer film garapan Nahdlatul Ulama (NU), 'The Santri', diunggah ke *YouTube*. Namun trailer tersebut telah menuai sejumlah kontroversi.

Mereka yang tidak setuju dengan keberadaan film tersebut menilai dari trailer-nya bahwa film itu tak sesuai dengan kehidupan para santri di pesantren yang sebenarnya.

Salah satu yang melayangkan protes terhadap film itu adalah Ketua Umum Front Santri Indonesia (FSI), Hanif Alathas, yang juga menantu Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Menanggapi hal itu, Wakil Sekjen Pengurus Besar NU (PBNU) yang juga sekaligus eksekutif produser dari 'The Santri', Imam Pituduh, akhirnya buka suara. Menurutnya, sebaiknya mereka yang kontra tidak langsung menilai keseluruhan film hanya dari trailer.

"Saya ingin mengajak semuanya tunggu dan tonton 'The Santri', tapi setelah produksi. Setelah nanti selesai, kita tonton, baru kita lihat, film itu ada yang bertentangan atau tidak," kata dia saat ditemui di Kantor PBNU, Kenari, Jakarta Pusat.

Imam juga sekaligus mengajak mereka yang kontra agar terlibat langsung dalam film itu untuk membuktikan bahwa di dalamnya

tidak ada hal yang baginya berlawanan dengan tradisi santri dan ajaran islam.<sup>35</sup>

Media baru dan media konvensional memiliki perbedaan yaitu pada Media Konvensional, penyebaran informasi dilakukan dengan menggunakan media cetak, televisi dan radio, dalam proses penyebarannya perlu melalui beberapa tahap sehingga munculnya berita tidak secepat media baru, informasi yang disampaikan tergantung pada media, dan akses komunikasi kepada para pengguna terbatas. Sedangkan pada media baru adalah penyebaran berita menggunakan jaringan internet, dengan cepat dan dapat menyajikan informasi yang dapat langsung tersambung dengan sumber lain. Pembaca lebih mudah memilih berita yang mereka inginkan, penyebaran informasi atau beritanya tidak perlu menggunakan redaktur / penyunting.

Untuk memudahkan membaca aplikasi dakwah kontemporer NU, penulis merangkumnya dalam sebuah tabel, semata hanya untuk memudahkan membaca:

Tabel .8. Unsur-unsur Dakwah Kontemporer NU

Subyek (Dai)	Obyek (Mad'u)	Materi	Metode	Media	Budget
<i>Slow</i> Tidak Suka berteriak- teriak (berapi- api) Humoris Populis Kitab Kuning Sholawat	Umat Dakwah <sup>36</sup> Umat Ijabah	Aswaja, <i>Hubb al-Waṭan Min al-Imān</i> , <i>Ukhuwwah Bashāriyyah</i> , <i>Ukhūwwah Waṭaniyyah</i> , <i>Ukhuwwah Islāmiyyah</i>	Berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 ( <i>Hikmah</i> , <i>Mauidhoh Hasanah</i> dan Dialogis; Parsipatif; Eksploratif; Dekoratif ;(Kreatif)	<i>Twitter</i> , <i>Facebook</i> , <i>Instagram</i> , <i>Youtube</i> , NU Online, 146 Chancel, Aswaja TV, Nutizen, Islamic.com	Swadaya Masyarakat

Sumber: Hasil wawancara Agus Salim, Abdul Muiz Ali,<sup>37</sup> Maria Ulfa, Khairul Anam,<sup>38</sup> dan Ahmad Fauzih.

<sup>35</sup> <https://hot.detik.com/movie/d-4710678/nu-buka-suara-tentang-kontroversi-the-santri>.

<sup>36</sup> Salah satu strategi dakwah NU dikalangan umat dakwah adalah: berdakwah dengan menjaga nilai-nilai kemanusiaan antara warga negara, mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, membentuk badan kerjasama antara umat beragama dengan pemerintah, menyelenggarakan dialog atau seminar, lokakarya dan temu wicara dengan para tokoh pengikut agama lain, memanfaatkan forum komunikasi antar umat beragama dan menciptakan kerjasama antara umat beragama untuk mengembangkan nilai-nilai toleransi dan keadilan.



Meskipun NU sudah memperbaiki media dakwahnya dengan menggunakan media teknologi kontemporer seperti direkam dengan kamera dan diunggah di media sosial, namun menurut Muhammad As'ad *dosen di Universitas Hasyim Asy'ari, Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang* kemasannya masih konvensional --cara penyampaian yang masih mengikuti ceramah gaya lama, kualitas gambar yang pas-pasan, dan juga penggunaan bahasa yang sebagian besar masih menggunakan bahasa Jawa. Karakteristik ini menunjukkan bahwa dakwah para tokoh NU masih menyasar anggota kelompok mereka sendiri, yakni alumni pesantren yang berdomisili di pulau Jawa terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mereka belum bisa secara kreatif mengemas produk dakwahnya lebih menarik dan "*smart*" sehingga mencuri perhatian anggota masyarakat yang tidak familiar dengan tradisi NU.<sup>39</sup>

Hal senada juga dikatakan oleh Makruf Amin, meskipun sistem dakwah melalui teknologi digital dapat menjadi alternatif dakwah konvensional, tetapi saat ini NU masih terlalu sedikit dalam menggunakan metode dakwah dengan teknologi digital.<sup>40</sup>

## **B. Respon NU terhadap Dakwah Kontemporer**

### **1. Dalam hal internal**

Agus Salim mengatakan bahwa :“Strategi dakwah NU: Kemarin itu kan kita sudah melakukan Rakornas; konsolidasi para dai-dai nasional; bagaimana dai-dai khususnya dai-dai NU menjawab tantangan zaman, makanya dai-dai rakornas, dan intinya tugas dan tanggungjawab itu diemban oleh ulama, ulama itu ya NU, kalau duluan tugas dakwah itu (dai) itu dilakukan oleh para Rosul/Nabi dan kemudian diteruskan oleh para ulama sebagai *warasatul anbiya* / pewaris nabi) sekarang ya kita ini NU, kalau dakwah kemarin itu kita fokus di dunia pesantren, namun di zaman milenial ini kita juga harus menyesuaikan dengan kecanggihan dan teknologi, ujung-ujungnya ya kita harus berdakwah dengan menyesuaikan teknologi komunikasi (IT), maka dalam rakornas

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) dan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Khoirul Anam, (Wakil Pimpinan Redaksi NU *Online* PBNU) Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

<sup>39</sup> Jakarta - <https://news.detik.com/kolom/d-4594814/dakwah-smart-vs-dakwah-konvensional>. Jumat, 21 Jun 2019 13:10 WIB

<sup>40</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5184459/buka-konbes-nu-wapres-ingatkan-pentingnya-penguasaan-teknologi-untuk-dakwah>.

kemarin juga NU mewajibkan agar kita berdakwah di SOSMED namun harus jauh dari finah, juga dari *hoaks*.<sup>41</sup>

## 2. Dalam Hal Eksternal

Beberapa problema besar yang dihadapi dalam dakwah di era kontemporer ini adalah: (1) Pemahaman masyarakat pada umumnya terhadap dakwah lebih diartikan sebagai aktivitas yang bersifat oral *communication (tabligh)* sehingga aktivitas dakwah lebih berorientasi pada kegiatan ceramah. (2) Problematika yang bersifat epistemologis. Dakwah pada era sekarang bukan hanya bersifat rutinitas, tetapi memerlukan rujukan teori-teori dakwah sehingga lebih efektif. (3) Problem yang menyangkut SDM. (4) Aktivitas dakwah masih dilakukan sambil lalu atau menjadi profesi sampingan. Implikasinya banyak bermunculan dai yang kurang profesional. (5) Rendahnya penghargaan masyarakat terhadap profesi dan lemahnya managerial yang dilakukan dai dalam mengemas kegiatan dakwah.



---

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) , Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.



## BAB VI

### KEBERAGAMAN DALAM NAHDLATUL ULAMA (PLURALISME KRITIS)

Pluralisme merupakan keadaan yang majemuk dan beragam dari segi, agama, politik maupun budaya. Di Indonesia, realitas keragaman masyarakat tidak hanya terletak pada budaya atau tradisinya. Lebih dari itu, realitas itu diwujudkan dalam perbedaan agama. Hal itu sangat mudah untuk dilihat, misalnya dari pelbagai perayaan hari-hari besar agama yang diyakini sebagai hari suci bagi agama mereka masing-masing. Seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi, dan Isra' Mi'raj bagi umat Islam. Kemudian perayaan Hari Natal, Wafat dan Kenaikan Yesus Kristus oleh umat Kristiani. Selain itu, ada perayaan Imlek bagi umat Konghuchu, serta Hari Raya Nyepi dan Waisak yang diperingati oleh umat Hindu dan Budha. Inilah sekelumit bukti realitas kemajemukan masyarakat Indonesia dilihat dari sisi praktik keagamaannya saja.<sup>1</sup> Dengan pluralitas inilah kehidupan manusia di dunia selalu dinamis, melalui terus berkembangnya ilmu pengetahuan. Tanpa perbedaan tidak ada diskusi, tanpa diskusi tidak ada ilmu pengetahuan, dan tanpa ilmu pengetahuan tidak ada kemajuan peradaban. Inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad bahwa perbedaan di antara umat manusia adalah rahmat.<sup>2</sup>

Alister E. McGrath dalam Kristian Sulisto menjelaskan bahwa pluralisme agama bisa dibedakan ke dalam dua bagian, yaitu pluralisme agama sebagai sebuah fakta dan pluralisme agama sebagai sebuah ideologi. Pluralisme sebagai sebuah ideologi adalah suatu kepercayaan bahwa pluralisme ini didukung serta diinginkan, dan bahwa klaimklaim normatif yang berbau imperialistik serta bersifat memecahbelah perlu dibuang.<sup>3</sup>

Menurut Amin Abdullah, dalam konteks keindonesiaan terlepas dari sejarah besar pluralisme, kerukunan antar umat beragama sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi bangsa yang majemuk dalam hal agama seperti halnya di Indonesia. Keanekaragaman (pluralisme) agama yang hidup di Indonesia termasuk di dalamnya keanekaragaman paham keagamaan yang ada di dalam tubuh intern umat beragama adalah merupakan kenyataan historis.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika AlQur'an Tentang Keragaman Agama* (Jakarta: R.M. Books, 2007), h. 1.

<sup>2</sup> Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 213.

<sup>3</sup> Kristian Sulisto, "Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis", *Jurnal Veritas* Vol. 2, No. 1, April 2001, h. 51-69. Lebih lengkap lihat Alister McGrath, "The Challenge of Pluralism for the Contemporary Christian Church," *Journal JETS*, Vol. 35, No. 3, September 1992, h. 361.

<sup>4</sup> Amin Abdullah, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999), h. 5

NU adalah organisasi kemasyarakatan yang terkenal dengan pluralismenya, seperti Gus Dur, sosok tokoh humanis yang kontroversial di Indonesia, kegigihannya membela kaum minoritas, HAM dan demokrasi merupakan pemikiran dan tindakannya yang pluralis dan menghargai perbedaan kelompok lain. Melalui Gus Dur juga NU menjadi kelompok yang moderat dan memiliki nilai yang tinggi dalam menghargai perbedaan dan pluralisme di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan oleh Greg Barton<sup>5</sup> and Robert Hefner<sup>6</sup> yang telah banyak menulis tentang peran NU dalam mendukung perkembangan Islam yang pluralis, toleran dan “sipil”. Bahkan, komparativis politik ternama Alfred Stepan memuji NU sebagai “tulang punggung masyarakat sipil yang toleran”.<sup>7</sup>

Namun beberapa bulan terakhir (Juli 2020), tulisan Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi, “The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia”<sup>8</sup> dalam *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 42, No. 1 (2020), pp. 58–84 menyengat warga NU yang membacanya karena mereka berargumen bahwa pluralisme di NU adalah mitos belaka.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Greg Barton, *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside* (Honolulu, Hawaii: University of Hawai'i Press, 2002).

<sup>6</sup> Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000).

<sup>7</sup> Alfred Stepan and Jeremy Menchik, “Islam in Indonesia: Democratisation From Below”, *Qantara*, 18 November 2010, <https://en.qantara.de/content/islam-in-indonesia-democratisation-from-below>.

<sup>8</sup> Tema tersebut juga mengemuka dalam diskusi daring ‘Toleransi dan Pluralisme dalam NU: Mitos atau Realitas?’, Sabtu (27/6). Diskusi ini diadakan Forum Sintesa, komunitas bentukan alumni pers mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (Fisipol UGM), Yogyakarta.

<sup>9</sup> Menurut Mietzner dan Muhtadi, sebagian besar pengikut NU intoleran. Keduanya menggunakan data survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada September 2019. Survei ini mewawancarai 1.520 responden dengan pemilihan responden secara acak bertingkat. Kedua peneliti tersebut menjelaskan temuan peningkatan intoleransi di NU berkaitan dengan perilaku elite NU sejak organisasi berdiri. Seperti, (1) pada masa awal kemerdekaan, NU cenderung berkoalisi dengan kelompok nasionalis ketimbang partai Islam. Berkat koalisinya dengan partai nasionalis, NU mendapat jatah posisi menteri agama. (2) Mietzner dan Muhtadi menilai retorika serupa dilakukan ketika NU dipimpin Gus Dur, pemimpin yang dianggap paling berjasa dalam melakukan transformasi di tubuh NU. Gus Dur memang mengubah pandangan ideologi politik NU dari negara Islam ke model negara yang menghormati ragam agama. Namun, menurut kedua peneliti, hal itu bukan hanya komitmen terhadap pluralisme, tetapi juga buah kesepakatan Gus Dur dengan pemerintahan otoriter Soeharto. Disatu sisi, Soeharto mewajibkan Pancasila sebagai dasar organisasi agar dapat mengontrol kekuatan Islam. Di sisi lainnya, NU menerima kewajiban itu agar NU tetap



Pendapat Mietzner dan Muhtadi banyak menuai kritik,<sup>10</sup> salah satunya Aziz Anwar Fachruddin, Peneliti di Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ia membaca dan membagi artikel itu ke dalam dua jenis argumen. *Pertama*, pembacaan terhadap sejarah NU. *Kedua*, survei terhadap para pengikut NU di akar rumput.<sup>11</sup>

---

memiliki posisi di dalam pemerintahan Soeharto. Saat Gus Dur kemudian naik menjadi presiden, walaupun melahirkan kebijakan progresif terhadap warga keturunan Cina, Gus Dur dianggap sebagai presiden yang cenderung otoriter dengan membekukan parlemen. Setelah jatuh dari kekuasaan, menurut Mietzner dan Muhtadi, reputasi Gus Dur sebagai ikon pluralisme dan toleransi kembali pulih. (3) Setelah kepergian Gus Dur hingga saat ini, NU mengampanyekan “Islam Nusantara” sebagai payung bagi advokasi toleransi dan pluralisme. Mietzner dan Muhtadi menilai wacana tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi-politik. Singkatnya, menurut Mietzner dan Muhtadi, wacana toleransi di tubuh NU tidak bisa dilepaskan dari upaya NU melawan pesaing politik dan mengamankan kepentingan politik, ketimbang gerakan organik.

<sup>10</sup> Azra juga melihat riset ini memang menyakitkan bagi kalangan NU karena dianalisis dari aspek ekonomi politik, sehingga upaya genuine NU dalam meretas toleransi seakan diabaikan. “Perspektif ekonomi politik ini pandangan kritis dan sensitif. Tapi ini kritik penting,” ujar dia seraya mendorong riset ini dijawab dengan riset lain. <https://www.gatra.com/detail/news/483108/politik/toleransi-nu-dianggap-mitos-ini-bahasan-dan-kritiknya>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<sup>11</sup> Kegagalan artikel Mietzner dan Burhanuddin semata-mata karena terbatasnya pembagian kelompok NU menjadi hanya dua entitas, yakni kalangan elit dan akar rumput, yang menunjukkan pengamatan yang tidak seksama oleh Mietzner dan Burhanuddin. Keduanya tidak melihat lapisan “tengah” NU, yaitu intelektual dan aktivis yang bekerja mengadvokasi toleransi di Indonesia. Jika analisis kedua peneliti benar, para aktivis NU yang bergabung di Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam), badan otonom di bawah PBNU, misalnya, tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan politik elite PBNU. Kegiatan dan pekerjaan kelompok pemuda dan organisasi sayap NU tentang isu pluralisme dikecualikan dari pembahasan artikel Mietzner dan Burhanuddin. Kampanye pluralisme dan isu masyarakat sipil lainnya yang menjadi perhatian komunitas NU bahkan sebagian besar digawangi dan digerakkan oleh kelompok pemuda dan organisasi sayap NU, seperti Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) dan sayap pemuda paramiliter Banser. Lebih lanjut, artikel Mietzner dan Burhanuddin gagal untuk mengakui institusi eksternal yang sebagian besar berada di dalam NU, termasuk Wahid Institute, Jaringan GUSDURian, dan Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang ada di berbagai wilayah di Indonesia dan terlibat dalam kampanye tentang isu-isu masyarakat sipil seperti pluralisme atau pengusuran. Tentunya, kampanye NU tentang isu-isu masyarakat sipil seperti toleransi dan pluralisme sebenarnya tidak hanya ditunjukkan oleh elit NU, tetapi juga memberikan peran bagi organisasi eksternal, basis akar rumput, dan kelompok pemuda NU. Peran mereka signifikan dalam memajukan masalah masyarakat sipil di masyarakat Indonesia. Sayangnya, mereka dikecualikan dari survei Mietzner

Beberapa keberatan utama atas artikel Mietzner dan Burhanuddin, adalah kesimpulan mereka terlalu terburu-buru atau bahkan mereka dituduh tidak memahami sejarah politik NU dilihat dari konteksnya. Artikel itu membaca sejarah NU dari sejak masa NU berdiri (melawan kaum “puritan”), era Sukarno (debat di Badan Konstituante, pertentangan dengan Masyumi, peristiwa 1965), era Soeharto (asal tunggal Pancasila 1980-an), era Reformasi (manuver politik Gus Dur), dan pasca-Reformasi hingga kini (melawan FPI, HTI, dll, juga kampanye Islam Nusantara). Untuk menunjukkan bahwa sepanjang tahun 1950-an dan 1960-an NU pada dasarnya intoleran, Mietzner dan Muhtadi menyebut setidaknya tiga peristiwa. Pertama, NU berjuang mengembalikan “tujuh kata” dari Piagam Jakarta dalam perdebatan di Konstituante yang terbentuk pasca-Pemilu 1955. Ini artinya, sebagaimana kelompok politik Islam lainnya, NU dianggap sama-sama mempunyai aspirasi “negara Islam” yang berhadapan dengan kelompok politik nasionalis-sekuler. Kedua, namun secara paradoksal, NU malah mendukung keputusan Presiden Soekarno yang membubarkan parlemen dan Konstituante serta pembubaran Masyumi dan PSI di akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-an. Ketiga, keterlibatan NU dalam pembunuhan massal 1965. Bagi Mietzner dan Muhtadi, dasar yang menggerakkan NU dalam tiga peristiwa itu tiada lain adalah kepentingan diri (*vested interest*).<sup>12</sup>

Pro kontra terhadap pemikiran-pemikiran yang terjadi di dalam tubuh NU karena corak pemikiran NU yang terlalu ke kanan (fundamentalisme religius) maupun ke kiri (liberalisme religius) yang dipelopori oleh kader-kader muda NU. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pemikiran yang ada di dalam NU yang kemudian menggelisahkan warga NU dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Hal tersebut disebabkan karena secara historis, pemikiran moderat NU tidak menolak adanya dinamika dan modernisme paradigma berfikir. Hal

---

dan Burhanuddin. [www.matamatapolitik.com/membongkar-mitos-pluralisme-dinadlatul-ulama-opini/](http://www.matamatapolitik.com/membongkar-mitos-pluralisme-dinadlatul-ulama-opini/)

<sup>12</sup> Menurutya, problematik utama Mietzner dan Muhtadi adalah mereka melepaskan pembacaan sejarah politik NU dari konteksnya. Perdebatan dalam Konstituante masa lalu dibaca dengan perspektif masa kini, sehingga aspirasi untuk mengembalikan rumusan Piagam Jakarta dianggap sebagai tindakan yang secara otomatis mencederai citra NU sebagai organisasi pluralis. Sementara itu, meski memuji Gus Dur sebagai ikon pluralisme yang mentransformasi NU pasca-Mukhtar Situbondo 1984, Mietzner dan Muhtadi mencatat lagi-lagi setidaknya tiga hal yang membuat hal itu tersebut patut dipertanyakan. Pertama, menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, Gus Dur justru meminta mahasiswa untuk tidak melakukan demonstrasi menentang Soeharto. Kedua, segera setelah pemilu 1999, Gus Dur malah ikut mendukung pendapat mayoritas ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Ketiga, ketika posisinya sebagai presiden digoyang, Gus Dur mengancam pembekuan parlemen yang terpilih secara demokratis pada Pemilu 1999 dan pembubaran partai politik yang melawan kebijakannya.

tersebut merupakan cerminan dari fleksibilitas pemikiran yang bisa ke kanan, ke kiri, atau tetap di garis tengah.

Menurut Abdurrahman Wahid aneka pemikiran yang dilontarkan cukup brilian dan melampaui batas normatif ke-NU-an. Bisa ke kanan, bisa kekiri atau tetap di tengah. Menurutnya corak pemikiran NU merupakan “kawin campur” antara agama dan ilmu-ilmu sosial humaniora.<sup>13</sup>

#### A. Pemikiran Kiri Baru Dalam NU

Telah disebutkan pada bab sebelumnya, bahwa penyebutan istilah Islam kiri dan kanan sebenarnya sudah berkembang jauh sebelum masa reformasi di Indonesia. Meski demikian, lebelisasi Islam Kiri dan Kanan ini, merebak begitu luas setelah runtuhnya rezim orde baru dan lahirnya orde reformasi dengan segala sistem pemerintahan dan sosio kultur yang baru di Indonesia. Dengan demikian istilah kiri dan kanan merupakan terma baru untuk memotret gejala yang sebenarnya telah lama hadir dalam kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan muslim Indonesia. Dalam beberapa negara terma ini disederhanakan dengan penyebutan pada kelompok liberal dan konservatif. Kelompok Islam Liberal diistilahkan dengan Kiri Islam sementara kelompok Konservatif diistilahkan dengan Kanan Islam.

Untuk mempermudah mengenal ciri-ciri dan karakter kedua gerakan Islam ini, dapat diurai sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Lahirnya embrio pemikiran Islam liberal dan fundamentalis yang meresahkan banyak tokoh ulama dan kiai NU adalah ketika NU berganti pemimpin dari Abdurrahman wahid ke Hasyim Muzadi. Menurut Jabir Alfaruqi dalam tulisannya NU, Fundamentalisme dan Liberalisme, *Naahdatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik ke negaraan*, h.152; ketika NU berganti pemimpin, NU tidak bisa lagi memberi angin segar dan ladang subur bagi proses berkembangnya pemikiran keislaman, sosial, dan kebudayaan bahkan dinilai telah menjerumuskan NU pada kubangan politik praktis yang berkutat pada kekuasaan. Tampilnya Hasyim Muzadi sebagai calon wapres tahun 2004 merupakan klimak dari krisis di tubuh NU dalam aspek pemikiran kritis. Hal tersebut membuat NU tidak lagi sebagai produsen pemikiran segar, tetapi telah berubah menjadi organisasi yang defensif terhadap pembaruan pemikiran, sehingga NU menjadi statis, resisten, sibuk mengurus isu-isu internal yang kian kurang memikat untuk diwacanakan. Situasi dan kondisi seperti itu menjadikan kader-kader NU yang memiliki intelektual brilian mencoba menjari model pemikiran Islam Liberal dan Fundamental.

<sup>14</sup> <http://fuadmunajat.blogspot.com/2009/02/islam-indonesia-sinergi-kiri-dan-kanan>

Tabel 9.  
Karakter Kiri dan Kanan

Karakter Kiri		Karakter Kanan
1	Pemahaman yang kontekstual bahkan tidak jarang menggunakan pendekatan hermeutika yang selama ini berkembang untuk tafsir bible	Pemahaman yang sangat literal terhadap ajaran Islam
2	Islam merupakan konstruksi historis bahkan dalam pandangan ekstrim mereka al-Quran adalah produk budaya	Keyakinan yang sangat kuat bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan berbagai krisis di negeri ini
3	Negara boleh berbentuk apa saja yang penting nilai Islam dapat ditegakkan	Penting nilai Islam dapat ditegakkan, Perjuangan yang tak kenal lelah menegakkan syariat Islam
4	Bersikap pluralis bahkan dalam pemahaman keagamaan menganut wihdatul adyan	Resistensi terhadap kelompok yang berbeda pemahaman dan keyakinan
5	Menolak Barat dengan konsep oksidentalismenya (sebenarnya tidak menolak)	Penolakan dan kebencian yang nyaris tanpa cadangan terhadap segala sesuatu yang berbau Barat

Dari tabel di atas tersebut dijelaskan bahwa, ciri-ciri Islam konservatif yang cenderung beraliran keras adalah, secara individu orangnya menganut pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama. Cenderung bersikap tidak toleran terhadap pandangan yang berbeda, cenderung mendorong dan memaksa orang lain untuk melaksanakan pemahamannya, membenarkan kekerasan, menolak Pancasila sebagai dasar negara dan menginginkan Islam untuk menjadi dasar negara, atau menginginkan Negara Islam dan Khilafah Islamiyah. Sedangkan organisasi dari kelompok keras atau konservatif ini, memiliki visi dan misi yang sangat tidak toleran kepada perbedaan, dan sikap tersebut ditunjukkan secara frontal dan tersembunyi.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>Abdurrahman Wahid., dkk., *Ilusi Negara Islam (ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Desantara Utama Media, 2009), h. 45-46.

Sementara untuk kelompok Kiri Islam, terlihat lebih moderat dan dinamis. Misalnya, menerima perbedaan, dan menerima Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia. Mereka juga memandang bahwa Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>16</sup>

Menurut Munim DZ identitas NU sebagai Islam “kiri” bukanlah realitas baru yang diperkenalkan akhir tahun 1980-an, ketika komunitas terinspirasi gerakan Islam Kiri Hassan Hanafi dari Mesir. Ternyata gerakan itu telah memiliki akar jauh ke belakang. Suatu ketika setelah PKI dibubarkan, dengan tegas KH Idham Cholid mengatakan di depan Musyawarah Kerja Sarikat Buruhnya NU-Sarbumusi (Sarikat Buruh Muslim Indonesia), bahwa “Meskipun PKI telah dibubarkan, namun kita warga NU tetap berhaluan kiri dan tidak akan berbelok ke kanan, melainkan tetap menjalankan revolusi kiri dalam arti terus membela Pancasila, anti neo-kolonialisme dan imperialisme serta menolak segala bentuk penghisapan atas manusia”.<sup>17</sup>

NU berdiri untuk membela rakyat kecil tertindas baik oleh kolonialisme Belanda, maupun dari imperialisme Barat pada umumnya yang menghisap. Pesantren NU terutama yang berdiri sekitar abad ke-18 hingga ke-19 sedikit banyak dimotivisir oleh semangat itu. Karena itu dengan gigih NU menolak segala bentuk persekongkolan dengan kaum kolonial dan imperialis sebagaimana dilakukan oleh para pemberontak PRRI-Permesta, maka dengan tegas NU mengutuk pemberontakan tersebut, meskipun dikemas dengan label demokrasi atau desentralisasi.<sup>18</sup>

Tidak hanya itu pada tahun 1950-1960-an ada bentuk lain orang NU terutama para elitnya mengekspresikan diri sebagai kelompok kiri (peduli umat/rakyat) dengan memiringkan pecinya ke arah kiri. Sehingga mudah dikenali kalau orang picinya condong ke kiri berarti orang NU. Sebaliknya kalau ketemu orang yang picinya miring ke kanan berarti orang Masyumi sebagai kelompok kanan.

Identitas kekirian NU semakin nampak ketika kelompok Islam kanan beraliansi dengan imperialis (Amerika-Inggris) membentuk PRRI. Maka NU bersama Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan PKI membuat Front Politik bersama anti imperialisme dalam wadah Nasakom (Nasional Agama Komunis). Di sinilah orang sering keliru menyebut NU sebagai oportunis, sebab Nasakom yang dipanglimai Bung karno tidak lain adalah Front perjuangan rakyat melawan penjajahan. Ini bentuk aliansi politik bukan agama dan agendanya jelas

---

<sup>16</sup> Wahid, Abdurrahman, dkk., *Ilusi Negara Islam (ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia)*, (Jakarta: PT. Desantara Utama Media, 2009), h.46-46.

<sup>17</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/7669/nu-sebagai-islam-kiri>.

<sup>18</sup> Munim DZ, <https://www.nu.or.id/post/read/7635/nu-sebagai-islam-kiri>



yaitu mengusir penjajah yang masih bercokol di berbagai perusahaan, yang mengkploitasi alam dan tenaga kerja Indonesia.

Karena itu para kiai sepuh seperti Kiai Muchid Muzadi mendefinisikan kiri sebagai pada komitmen pada perjuangan rakyat, tidak ada kaitannya dengan kelompok sosialis, apalagi komunis dan sebagainya. Kebanyakan mereka itu masih kiri kekanan-kananan atau kelompok Islam kanan yang berislam kekanan-kananan pula, sementara NU lebih mementingkan penghayatan dan pendalaman.<sup>19</sup>

Tabel 10  
Ciri dan Tema sentral yang terdapat dalam Gerakan Kiri Baru

No	Ciri dan Tema sentral yang terdapat dalam Gerakan Kiri Baru	Contoh
1	Berupaya mengubah sistem universitas yang dalam pandangan mereka sistem universitas tersebut terkait sistem kapitalis modern yang manipulatif.	Para mahasiswa yang dipengaruhi aliran ini mengkritik para dosen, media massa dan berbagai kegiatan kampus yang dianggap membawa gaya, nilai dan pola pikir borjuis.
2	Berupaya membebaskan rakyat kecil dari struktur sosial yang tidak adil.	Pemikiran gender. Seperti mengenai masalah; (1) Perempuan, bahwa menurut Gus Dur perlu ada pergeseran paradigma ( <i>shifting paradigma</i> ) bahwa perempuan memiliki kesetaraan dengan lawan jenisnya. Bahwa Kesadaran gender perlu disosialisasikan agar perempuan Indonesia <i>self confident</i> . Salah baca tentang tafsir yang mengatakan bahwa tingkatan laki-laki itu lebih tinggi dibanding.
3	Berupaya menyiapkan program-program aksi (gerakan) bagi pemberdayaan kaum minoritas, miskin dan tertindas tanpa mengenal batas ras, etnis dan sebagainya.	NU terus mengembangkan sikap toleransi antar sesama. Hal ini jelas dan tertuang dalam AD/ART NU <sup>20</sup>

<sup>19</sup> Munim DZ, <https://www.nu.or.id/post/read/7635/nu-sebagai-islam-kiri>

<sup>20</sup> Hasil-Hasil Mukhtar Ke-33 NU, (Jakarta: Lembaga *Ta'rif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 212.



4	Berupaya membentuk satu tatanan atau bentuk masyarakat ideal (semacam <i>extended family</i> pada masyarakat tradisional) sebagai alternatif masyarakat modern yang teralienasi (terasing) dengan keruwetan birokrasinya.	Tentang hubungan antara agama dan negara, menurut Gus Dur: agama dan negara harus dibedakan, akan tetapi tidak boleh dipisahkan. Keinginan menjadikan Islam sebagai warna tunggal atau ideologi negara menunjukan kenyataan bahwa betapa rendahnya kesadaran kenegaraan kaum muslim, karena yang paling penting adalah Islam melindungi masyarakat dari kesewenangan penguasa. <sup>21</sup>
5	Memperjuangkan isu-isu mengenai persamaan dan kebebasan.	NU melalui gerakan intelektualnya memperjuangkan persamaan dalam bidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Persamaan ini merupakan syarat bagi terciptanya keadilan dan masyarakat sipil.

Gagasan Said Aqil yang dianggap kiri oleh beberapa kelompok diantaranya adalah:

- 1) Gagasan Islam Nusantara yang berprinsip *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dan mengedepankan ciri Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*.
- 2) Pada priode 1995-an majalah Aula memuat foto Said Aqiel berkhotbah di dalam gereja Surabaya dengan *background* patung Yesus di atas kepala Said Aqil. Umat Islam sempat menjadi resah dan bertanya-tanya, tentang tampilnya Said Aqil di atas mimbar gereja Aloyius Gonzaga Surabaya pada hari Sabtu malam tgl 28 Feb 1998, yang beritanya dimuat esok harinya Minggu 29 Feb 1998 oleh beberapa media cetak termasuk Majalah Aula milik NU, dengan memampang gambar photo Said Aqiel sedang berkhotbah, dengan *background* gambar Yesus disalib, tepat di atasnya.
- 3) Said Aqil pidato di banyak tempat, membela kepentingan kaum Nasrani, dia mengatakan Islam dan Kristen adalah saudara misan.
- 4) Ketika ada seorang peserta yang mengusulkan Said Aqil menjadi Menteri Agama kalau nanti partainya menang, Said Aqil menanggapi

<sup>21</sup> NU memiliki pandangan unik melalui gagasan-gagasannya. Melalui istilah itu ( pribumisasi Islam) pula, NU memperlihatkan konsistensinya dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari gempuran ideologi ideologi impor. (Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Cet. I, The Wahid Institute 2006). Juga Islam rahmatan lil'alam dan Islam Nusantara yang berprinsip ahlussunnah wal jama'ah dan mengedepankan ciri Islam yang *rahmatan li al-'ālamīn*. PBNU, *Hasil-hasil Mukhtar ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wa al-Nashr PBNU/LTN: 2016), h. 212.

bahwa bila hal itu terjadi, langkah pertama yang dia lakukan adalah membubarkan Departemen Agama (Depag).<sup>22</sup>

- 5) Bacaan Alquran langgam Jawa. Bacaan Alquran dengan langgam Jawa di Istana Presiden saat Isra Mikraj sempat heboh. Ia termasuk salah satu ulama yang membolehkannya. Yang penting, menurutnya, tidak mengurangi tajwid dan *makhraj* hurufnya, sebagaimana dikutip dari *muslimedianeews*. Sebenarnya, ulama-ulama Indonesia lain juga banyak membolehkannya, seperti Quraish Shihab, Ahsin Sakho, Ali Mustafa Yaqub dan lainnya. Oleh karena itu, mau langgam apa saja boleh, yang penting sesuai dengan tajwid dan *makhrajnya*, ya.

Meskipun dianggap sebagai orang yang berpaham kiri, Said Aqil tetap bersikukuh bahwa dirinya bukanlah Kiri, ia mengatakan bahwa:

Aliran-aliran kiri baru dalam NU (Tidak ada, Gus Dur itu selalu sholat, punya pesantren, saya juga sholat, ngaji, hafal *Burdah*, didalam mobil juga saya gunakan untuk ngaji, tidak saya gunakan untuk main HP, coba tanya sama sopir saya, saya juga punya pesantren, kiri dari mananya). ya Salah, saya itu rajin sholat, rajin baca Qur'an, hafal *Burdah*, hafal *Berzanji* masa dikatakan kiri? kiri itu ya seperti sosialis, mirip-mirip komunis. Lah saya saja gak pernah lupa baca *Yasin*, *burdah* hafal, tiap hari baca *tabarok*, masa Kiri? Orang itu tidak kenal saya, coba tanya asisten saya, apa saya lakukan kalau di mobil main HP? Ya saya bukan orang kiri tuh. Gus Dur itu di mobil dzikir terus, tidak pernah lupa membaca *Fatihah* minimal 100 kali dalam sehari, dan itu tidak pernah kurang, sampai bacanya ngatuk-ngantuk, saya tahu.<sup>23</sup> Gus Dur juga gak mungkin kiri.<sup>24</sup>

Masykuri Abdillah sependapat dengan Said Aqil Siradj tentang penolakan kiri dalam NU. Menurutny:

Di dunia untuk gerakan-gerakan Islam itu tidak ada kiri kanan. Peneliti di dunia tidak ada yang membuat tipologi gerakan kiri kanan untuk gerakan-gerakan Islam. Karena sama sekali berbeda, misalnya kanan itu ada di Eropa, itu bisa namun ketika mengatakan

---

<sup>22</sup> 09 Mei 2016, *International Summit of the Moderate Islamic Leaders* (Isomil), di Gedung Jakarta Convention Hall (JCC), pada 9-11 Mei, PBNU berusaha mendorong perdamaian di dunia internasional. Diikuti oleh sekitar 400 peserta, dari berbagai negara, terutama Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia, perwakilan negara-negara Asia, dan kiai-kiai Indonesia, disitu dikatakan bahwa rasa nasionalisme itu bukan ideologi tetapi semangat kebangsaan.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

bahwa kanan itu FPI itu tidak bisa karena FPI itu juga bisa kiri. Karena itu berbeda dengan kanan atau kiri yang ada di Eropa.<sup>25</sup>

Beberapa tokoh NU yang pro adalah:

- (1) Idham Chalid yang mengatakan bahwa: "meskipun PKI telah dibubarkan, namun kita warga NU tetap berhaluan kiri dan tidak akan berbelok ke kanan, melainkan tetap menjalankan revolusi kiri dalam arti terus membela Pancasila, anti neo-kolonialisme dan imperialisme serta menolak segala bentuk penghisapan atas manusia".
- (2) Muchid Muzadi. Ia mendefinisikan kiri sebagai pada komitmen pada perjuangan rakyat, tidak ada kaitannya dengan kelompok sosialis, apalagi komunis dan sebagainya. Kebanyakan mereka itu masih kiri kekanak-kanakan atau kelompok Islam kanan yang berislam kekanak-kanakan pula, sementara NU lebih mementingkan penghayatan dan pendalaman.
- (3) Abdurrahman Wahid: Beberapa orientasi Kiri Islam pemikiran politik Gus Dur diantaranya Pertama, aspek keadilan sosial tanpa keluar dari garis kemanusiaan. Gus Dur menerima finalis Pancasila dan keharusan demokrasi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia tanpa dibatasi oleh dingding-dingding agama, suku, ras, atau budaya. Ketika melihat agama dan budaya, ia menggunakan prinsip "*al-'ādah al-muḥakkamah*", bahwa adat itu dapat dijadikan sebagai hukum. Ketika melihat kondisi bangsa Indonesia yang terpecah menjadi dua natara yang dikuasai dan yang menguasai (ekonomi) ia menggunakan konsep pemikiran Barat. Misalnya Marxisme. Indikasi lain dari Kiri Baru Gus Dur adalah, selain agama Islam, Kristen, Budha dan Hindu, ia memasukan agama Kong Hu Chu, sebagai agama yang di akui di Indonesia. Dalam Kiri Islam, semua manusia adalah sama, tanpa memandang kelas atau status sosial, yang membedakannya adalah tingkatan ketaqwaan dan ke ikhlasannya kepada Allah. Kedua, dalam orientasi Kiri Islam pemikiran politik Gus Dur, ia menggunakan *Maqasid asy-Syariah* yang kemudian digabungkan dengan filsafat humanisme sebagai paradigma atau basisi pemikirannya. Orientasi Kiri Islam, politik Gus Dur lainnya adalah selalu mengedepankan keadilan sosial kebebasan, persamaan serta demokrasi.
- (4) Imdadun Rahmat: Setuju dengan pemikiran ke 3 tokoh NU diatas.

Kontra: NU adalah organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan Nasional Bangsa Indonesia dan sadar mengambil posisi aktif dalam proses

---

<sup>25</sup> Diskusi ringan dengan Masykuri Abdillah, Senin, 13 Januari 2020, Jam 14.00 di SPS UIN Jakarta.

perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945. Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga Negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*al-tasāmuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Dalam aspek keadilan sosial NU tetap tidak keluar dari garis kemanusiaan. NU menerima finalis Pancasila dan keharusan demokrasi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia tanpa dibatasi oleh dinding-dinding agama, suku, ras, atau budaya. Ketika melihat agama dan budaya, NU menggunakan prinsip "*al-‘ādah al-muḥakkamah*", bahwa adat itu dapat dijadikan sebagai hukum.

Sama halnya dengan Ahmad Fauzih, ketika ditanya mengenai Islam kanan dan Islam kiri, seperti Gus Dur, Masdar Farid, Ulil Abshar, Nasarudin Umar yang kemudian dikatakan sudah taubat. Ia mengatakan:

Tidak ada aliran-aliran dalam NU, itukan hanya anggapan orang yang tidak mau tau dengan NU, di NU tidak ada Kiri. Cuma mereka yang dari awal sudah alergi dengan NU atau yang sama sekali tidak mau tahu tentang NU. Jadi mereka yang beranggapan seperti itu karena terpengaruh dengan MEDSOS, artikel-artikel yang mereka baca itu dinarasikan bahwa NU itu liberal, dan itu dibaca oleh banyak orang sehingga persepsi itu muncul, padahal kalau sebetulnya *tabayyun* saja itu tidak ada.<sup>26</sup>

Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat) menambahkan:

---

<sup>26</sup> Wawancara Ahmad Fauzih, Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

Anggapan NU ke kiri itu hanya anggapan orang-orang yang sudah benci atau orang-orang yang sudah terpengaruh dengan artikel-artikel yang menganggap bahwa NU itu ya Liberal.<sup>27</sup>

Said Agil Siradj, NU itu “tengah-tengah”. Konsekuensi NU dengan sikap “jalan tengah” tersebut berdampak pada anggapan *miring* oleh sebagian orang. Terlalu toleran pada budaya lokal, baik sistem kepercayaannya maupun sistem seni budaya dan tradisi Nusantara, membuat NU dituduh sebagai pemuja roh nenek moyang, pembuat bid’ah dan mengakui adanya tuhan selain Allah. NU menjaga keutuhan ajaran dan kehormatan para Walisongo dan lainnya dengan membangun makam dan menjaganya, mengingat jasa mereka. Karena itu, oleh kelompok Islam modernis dan puritan, NU dianggap pengidap TBC (*takhayyul*, *bid’ah* dan *hurafat*).<sup>28</sup>

Rizal Ramli (mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia) menambahkan bahwa NU adalah organisasi yang memiliki anggota mayoritas, Ormas keagamaan paling besar di Indonesia. NU berperan menjaga keseimbangan Indonesia karena wataknya yang selalu di tengah. Ketika ada kekuatan esktrēm baik kiri maupun kanan, NU akan menjadi penyeimbang dan dapat disimpulkan bahwa Watak NU menjaga Keseimbangan Indonesia dari Ekstrem kiri dan kanan. Kemampuan NU untuk terbuka. Artinya, tidak fanatik, tapi terbuka kepada ide-ide baru, menerima nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan agama. Namun, ia menyesalkan saat ini, di media sosial NU menjadi pihak sasaran serangan kalangan tertentu. Islam Nusantara jadi bahan *bully*. Menurut dia, itu tiada lain dari *buzzer* yang dibayar.<sup>29</sup>

Hal senada didukung oleh Zaini Rahman, menurutnya NU itu memiliki paham *tawassuf* (tengah), bukan kiri atau bukan kanan, penjelasannya seperti table berikut:

---

<sup>27</sup> Wawancara Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

<sup>28</sup> Said Agil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara*...., h. 78

<sup>29</sup><http://www.nu.or.id/post/read/94433/watak-nu-jaga-keseimbangan-indonesia-dari-ekstrem-kiri-dan-kanan>. Diakses pada tanggal 09 Juni 2019, pukul 21.07.

Tabel 11.

Perbedaan Fundamental (Kanan), NU (Tengah) , Liberal (Kiri)

Uraian		Fundamental (Kanan) (Radikal; Wahabi, HTI, PKS)	NU (Tengah)	Liberal (Kiri)
1	Teologi	Teosentrisme (Kekuasaan Tuhan)	- Teosentrisme - Antropolisme (Kekuasaan Manusia) <sup>30</sup>	- Pemisahan agama - Spiritualisme (sebelumnya tidak ada agama)
2	Epistimologi	Tekstualis	Teks, Akal dan Realitas (sesuai dengan nalar yang dibangun dalam ilmu-ilmu fiqh dll)	Rasionalis, Pragmatis dan Positivisme
3	Tradisi	Tidak ada tradisi (Haram, Bid'ah)	Tradisi sebagai instrumen dakwah/ sebagai hal yang utama dan sebagai pijakan. <sup>31</sup>	Hedonisme, matrealisme, pragmatisme (abstrak saja, contoh memperingati <i>valinten day</i> , hari ibu, hari cinta) bersifat simbolis
4	Hubungan Agama dan Negara	Integralistik (agama dan negara menjadi satu/ negara tidak boleh berdiri sendiri tanpa agama) <sup>32</sup>	Simbiotik/ bersinergi (Negara wajib ada), <i>maqāsid al-sharī'ah</i> .	Sekuleristik
5	HAM	Tidak ada HAM, yang ada hanyalah Alloh dan kewajiban Manusia <sup>33</sup>	Perlindungan HAM terhadap HAM dan <i>maqāsid al-sharī'ah</i> . <sup>34</sup>	Perlindungan terhadap kebebasan belaka. <sup>35</sup>

Sumber: Zaini Rahman<sup>36</sup><sup>30</sup> Tauhid: al-As'ari dan al Maturidi<sup>31</sup> Nalar berfikir di *al-'ādah al-muḥkkamah*.<sup>32</sup> Oleh karena itu negara harus berbentuk khilafah<sup>33</sup> Hanya kembali kepada teks al-Qur'an dan tidak ada kaidah<sup>34</sup> *hiḥẓ al-dīn, hiḥẓ al-nafs, hiḥẓ al-'aql, hiḥẓ al-māl, dan hiḥẓ al-nasl- wa al-'ird*. Contoh: hak perempuan (hak nafkah dan pengayoman)<sup>35</sup> Contoh, kebebasan nikah sesama jenis, kebebasan tidak beragama, kebebasan homo dll.



Menurut Ma'rif Amin, NU ini adalah kendaraan penyelamat, dari gonjang-ganjing cara berpikir pemahaman keagamaan, yang selama ini ada yang ke kanan dan ke kiri. NU berada ditengah, sebagai penyelamat, kapal NU kayak kapal Nabi Nuh.<sup>37</sup> Ma'ruf menjelaskan, melalui kekuasaan Allah, kapal Nabi Nuh pernah menjadi penyelamat saat banjir besar datang. NU sebagai kendaraan penyelamat juga akan menyelamatkan seluruh umat dari banjir pemahaman keagamaan yang ekstrim.<sup>38</sup>

Berbeda dengan pandangan Imdadun Rahmad, menurutnya:

“ jika fenomena kiri baru dilihat secara longgar itu sih ada bentuknya, *new lived*, bentuknya banyak dan kalau tidak terlalu ketat penggunaannya sih saya lihat di NU ada. Seperti diskusi-diskusi tahun 1990an yang namanya Kiri Islam atau Islam Kiri, LKiS pernah menerbitkan beberapa buku tentang *Al-Yasar Al-Islami* miliknya Hasan al-Bana dan Ali Ashgar, buku itu sebenarnya refleksi dari munculnya ideologi keperpihakan dari anak-anak muda waktu itu, tentang nasib orang kecil, tentang masyarakat Indonesia yang miskin, tertinggal”.<sup>39</sup>

Imdad menambahkan bahwa angkatan mahasiswa muda tahun 1990an seperti Ulil Absor Abdallah, Ahmad Baso, Amsar, Fathan termasuk dirinya sendiri (Imdadun Rahmat), adalah mahasiswa angkatan 1964an. Kalau di Yogyakarta itu angkatannya mas Sastro, Mas Salim, Mas Imam Aziz. Itulah anak-anak muda NU yang gelisah terhadap kegagalan pembangunan, yang memakai paradigma *develomtalisme*, negara yang asetnya diserahkan kepada yang memiliki modal, para pengusaha, para pemodal, para Tionghoa, yang nantinya kalau sudah besar, akan menetes akan memberikan efek, *downisme*. Pembangunan yang semacam sebagai cara untuk mengakumulasi modal kekayaan, para pengusaha besar, konglomerat yang merupakan kroninya Soeharto. Sehingga dari sisi ada akumulasi kekayaan yang menyebabkan kesenjangan luar biasa; nasib orang kecil ya semakin terpuruk, dan itu adalah warga NU.

---

<sup>36</sup> Zaini Rahman, pematari pada konsolidasi pengkaderan dan *Up-Grading* Pengurus Pusat Fatayat NU, 13 Desember 2015, di Hotel Golden Boutique Jakarta.

<sup>37</sup> Ma'ruf Amin saat menghadiri peringatan Harlah NU ke-93. di Lapangan Prawitasari, Cianjur, Jawa Barat, Kamis (14/2).

<sup>38</sup><https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/02/14/pmwi6v354-kiai-maruf-ibaratkan-nu-seperti-kapal-nabi-nuh>

<sup>39</sup> Wawancara dengan Imdadun Rahmat (Wakil ketua PBNU dan rektor INAIS / Institut Agama Islam Sahid Bogor, 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.

Menurutnya di satu sisi gerakan Islam kiri ini merupakan respon terhadap otoritarianisme Orde Baru dimana kekuasaan terakumulasi pada kroni-kroninya Soeharto. Soeharto sebagai individu yang didukung oleh kekuasaan; militer, birokrasi dan partai Golongan Karya (Golkar). Tiga pilar yg memperkuat Soeharto, jadi ini yang menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi miskin, tertindas dan terdolomi. nah itu yang memunculkan keresahan.<sup>40</sup>

Imdad menambahkan dari situlah kemudian banyak teman-teman yang membaca buku-buku kiri, misalnya mas Andi Muwarli menerbitkan buku tafsir Karmak, buku Gramsi, buku-buku Ali Ashgar dan lain-lain, kiri-kiri itu kita baca, tapi teman-teman itu membutuhkan sentuhan Islamnya, kalau hanya membaca buku kiri sajakan, ya kita akan menjadi kiri saja, bukan kiri santri, makanya kita mencari referensi kiri tetapi yang islam, *al-yasar al-islāmī* karya Hasan Hanafi, itu yang kemudian menjadi semacam stempel, bahwa oh ternyata Islam itu kiri banget, islam itu menyerukan perlawanan terhadap akumulasi modal, Islam itu menyerukan perlawanan terhadap otoritarisme penindasan.

“Jadi kalau dikatakan di NU itu tidak ada *new lived* maka tidak sepenuhnya benar. Kalau *new lived* dilihat sebagai fenomena yang longgar itu ada, gerakan anak-anak muda yang kemudian melahirkan kelompok perlawanan, dijogja itu ada SMI kelompok KPMD, anak-anak PMII yang kerjanya hanya demo saja itu yang lahir dari pemikiran kiri islam itu dan coba lihat apakah kiri islam itu terlihat dari *new lived* itu masuk kedalam kiri baru”.<sup>41</sup>

Ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan Said Agil menolak adanya kiri dalam NU, Imdad menjelaskan:

Kenapa Yai Said itu menolak adanya kiri baru dalam NU, mungkin karena Yai said itu datang ke Indonesia menjelang tahun 98-97, sementara gerakan ini lahir dari tahun 1990an, 1991an jadi beliau tidak tahu, (sambil tertawa renyah), coba kalau mba Uswatun tanyanya ke Gus Dur itu pasti jawabnya ada, karena gurunya saya (sambil tertawa renyah).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Imdadun Rahmat (Wakil ketua PBNU dan rektor INAIS / Institut Agama Islam Sahid Bogor, 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Imdadun Rahmat (Wakil ketua PBNU dan rektor INAIS / Institut Agama Islam Sahid Bogor, 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Imdadun Rahmat (Wakil ketua PBNU dan rektor INAIS / Institut Agama Islam Sahid Bogor, 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.

Menurut Hamami mengenai kelompok-kelompok kecil yang ada dalam NU seperti: NU garis Lurus, NU progresif liberal, NU structural dan lain sebagainya kalau sebagai bagian dari penggambaran pemikiran pluralisme kritis itu tidak masalah. Seperti ungkapnya:

Progresif Liberal (aliran kiri baru didalamnya), NU jalan lurus, NU struktural, keberagaman NU dalam ke Indonesiaan (pluralisme kritis) ya tidak masalah, namun NU itu lebih cenderung ke moderasi sebagai jalan tengahnya dan yang dominan, karena NU liberal, NU jalan lurus, NU struktural inikan kecil-kecil semua dan dakwah NU yang sekarang itu tidak mencerminkan tentang aliran kiri baru tetapi lebih mencerminkan tentang moderasi beragama.<sup>43</sup>

Oleh karena itu menurut penulis, dulu pemikiran dakwah yang ada dalam NU telah mempolarisasi menjadi dua katagori besar:

1. Kelompok yang menerima dan terlibat secara intens dalam Pemikiran kiri Islam seperti ungkapan KH Idham Cholid “Meskipun PKI telah dibubarkan, namun kita warga NU tetap berhaluan kiri dan tidak akan berbelok ke kanan, melainkan tetap menjalankan revolusi kiri dalam arti terus membela Pancasila, anti neo-kolonialisme dan imperialisme serta menolak segala bentuk penghisapan atas manusia”.<sup>44</sup>
2. Kelompok yang tidak sepakat dengan istilah Kiri baru atau kelompok yang tidak mau dikatakan sebagai kiri Islam. Kelompok ini lebih cenderung mengatakan dan berkeyakinan bahwa NU adalah organisasi kemasyarakatan yang memegang teguh kepada prinsip-prinsip aswaja (NU itu memiliki paham *tawassut* (tengah) tidak ke Kiri dan tidak ke Kanan, memiliki sikap *tawazzun* dan *tasāmuḥ* sebagai prinsip ajaran Aswaja.

Namun, dakwah NU yang sekarang itu tidak mencerminkan tentang aliran kiri baru tetapi lebih mencerminkan tentang moderasi beragama.

## B. Pluralisme Kritis

Setiap penganut agama memiliki kebebasan untuk meyakini agamanya. Penghormatan terhadap kebebasan beragama bagi setiap orang merupakan perwujudan dari pluralisme agama. Dengan demikian, pluralisme agama selain menjadi prinsip-prinsip universalisme,

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Khamami di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jum'at, 14 Februari 2020, jam 11.00 WIB.

<sup>44</sup> Kiri sebagai pada komitmen pada perjuangan rakyat, tidak ada kaitannya dengan kelompok sosialis, apalagi komunis dan sebagainya. Kebanyakan mereka itu masih kiri kekanak-kanakan atau kelompok Islam kanan yang berislam kekanak-kanakan pula, sementara NU lebih mementingkan penghayatan dan pendalaman.

kebebasan, kesetaraan,<sup>45</sup> nasional, humanisme, transnasional, nilai-nilai global,<sup>46</sup> peradaban, kasih sayang, dan keindahan,<sup>47</sup> akan tetapi juga menjadi hak prerogatif Tuhan<sup>48</sup> bahkan sunnah Allāh.<sup>49</sup>

Di Indonesia, pluralisme agama masih menjadi perdebatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan paham ini bagi umat Islam. Pertimbangan MUI dalam penetapan pengharaman pluralisme agama adalah munculnya keresahan sebagian masyarakat sehingga mengusulkan MUI untuk mengeluarkan fatwa tentang aliran ini sebagai pedoman umat Islam. Dalam menetapkan fatwa, MUI merujuk kepada: a. Al-Qur'an: surat Āli 'Imrān (3): 19 dan 85, al-Kāfirūn (109): 6, al-Ahzāb (33): 36, al-Mumtaḥanah (60): 8-9, al-Qaṣaṣ (28): 77, al-An'ām (6): 116, dan al-Mu'minūn (23): 71 b. Hadis Nabi 'Demi Dzat Yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari umat Islam ini,

---

<sup>45</sup> Heiner Bielefeldt, *Misperceptions of Freedom of Religion or Belief*, Human Rights Quarterly 35 (2013), h. 33–68.

<sup>46</sup> Muhammad Khalid Masud, *The Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions*, in *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*, ed. Sohail H. Hashmi (Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002), h. 136.

<sup>47</sup> Abdul Rozak and others, *Political Thoughts and Socio-Cultural Nationalism Ideologies of Nurcholish Madjidon Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia*, *Asian Social Science*, Vol. 11, No. 27 (2015), h. 142-154.

<sup>48</sup> Ada empat tema pokok yang dijelaskan al-Qur'an tentang pluralisme agama. Pertama, tidak ada paksaan dalam beragama (Qs.2:256). Secara eksplisit, ayat ini menjelaskan manusia diberikan kebebasan dalam memilih agama. Jika seseorang dipaksa untuk memilih agama, ia akan kehilangan diri otentik dalam beragama, yaitu keikhlasan beragama. Kedua, al-Qur'an mengakui pemeluk agama-agama (Qs.2:62). Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia diberi peluang untuk beramal saleh dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketiga, kesatuan kenabian (Qs.42:13). Ayat ini menjelaskan salah satu rukun iman dalam Islam, yaitu meyakini sekalian Nabi dan Rasul secara teologis. Keimanan seperti ini juga menjadi prinsip pluralisme agama. Keempat, kesatuan pesan Ketuhanan (Qs.4:131). Ayat ini menjelaskan bahwa semua Rasul diberikan kitab suci agar menyembah Allah. Ihsan Ali-Fauzi, et.al, *Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar*, dalam *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, Budhy Munawar-Rachman, ed. (Jakarta: Paramadina, 2010), h. xii.

<sup>49</sup> Abdul ,Dubbun Hakim, *Islam, Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme*, dalam *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Madjid*, Abdul Halim, ed. (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006). Alasan Abdul yang mengatakan pluralisme adalah sunnah Allāh dikarenakan kesadaran diri seseorang atas hak eksistensi komunitas lain mengharuskan setiap orang yang berlainan agama melakukan dialog. Tujuan dialog ini adalah untuk menemukan penyelesaian perbedaan secara utuh mengenai pendapat masing-masing agama.

kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka”.<sup>50</sup>

Atas alasan di atas, MUI menetapkan bahwa pluralisme agama adalah haram karena mengajarkan semua agama sama, semua pemeluk agama akan masuk surga dan hidup berdampingan di surga, kebenaran agama relatif, dan setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah.<sup>51</sup> Dengan demikian, MUI menganggap pluralisme sama dengan sinkretisme dan relativisme.<sup>52</sup>

Membincang NU dan pluralisme di era reformasi terdapat tiga tokoh besar yang muncul pada masa itu, yaitu: Abdurahman Wahid (Gus Dur) yang merupakan Ketua Umum PBNU periode 1984-1999, Hasyim Muzadi (Kiai Hasyim) yang menjabat Ketua Umum PBNU pada tahun 1999-2010, dan Said Aqil Siraj (Kiai Said) yang merupakan Ketua Umum PBNU periode 2010 sampai sekarang.

1. Abdurahman Wahid (Gus Dur): Ketua Umum PBNU periode 1984-1999.

Gus Dur, menurut banyak orang, ia adalah seorang tokoh tradisional,<sup>53</sup> tetapi sangat mendukung pluralisme agama.<sup>54</sup> Dalam memahami pluralisme agama, dia menyebutnya dengan istilah

---

<sup>50</sup> HR. Muslim.

<sup>51</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 Tentang Pluralisme, Liberalisme, dan Sekulerisme Agama.

<sup>52</sup> Pendapat MUI ini dikritisi Abd A'la dengan alasan ada dua kemungkinan mengapa MUI mengharamkan pluralisme agama, yaitu: pertama, karena adanya politisasi. Kedua, kemungkinan mereka tidak tahu konsep yang sebenarnya dari pluralisme. Menurut A'la, pluralismemengandung makna yang beragam. A'la memperjelas kembali bahwa pluralisme bukanlah relativisme, akan tetapi bagaimana setiap penganut agama bisa bekerja sama. A'la mencontohkan, al-Quran sebagai kitab suci mengandung kebenaran absolut, namun ketika al-Qur'an dipahami oleh seseorang maka ia menjadi relatif atau nisbi. Yang relatif bukanlah al-Qur'an, akan tetapi pemahaman seseorang atas al-Qur'an. Budhy Munawar-Rachman, ed., *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*, Cct. ke-1 (Jakarta Selatan: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2010). Demikian menurut Azra, ia mengatakan bahwa pengharaman MUI terhadap pluralisme agama adalah keliru. Sebab pluralisme sesungguhnya bukan mencampuradukkan agama (sinkretisme). Pluralisme adalah mengakui bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara terdapat pemeluk agama lain selain Islam. Munawar-Rachman, ed., *Membela Kebebasan Beragama*, h. 206.

<sup>53</sup> Saiful Mujani and R. William Liddle, "Muslim Indonesia's Secular Democracy", *Asian Survey*, Vol. XLIX, No. 4 (July/August2009), h. 575-590.

<sup>54</sup> Alfred C. Stepan, "Religion, Democracy and the Twin Tolerations", *Journal of Democracy*, Vol. 11, No. 4 (October 2000), h. 37-57.



*Islamku, Islam Kita, Islam Anda.*<sup>55</sup> Dia mengatakan bahwa setiap orang tidak boleh memaksakan keyakinannya kepada orang lain (Islamku). Sebab dalam tradisionalisme atau ritual keagamaan yang hidup di tengah masyarakat terdapat kepercayaan dan perbedaan tradisi yang diyakini oleh masyarakat tertentu yang harus dihargai (Islam Anda). Meskipun setiap orang memiliki keyakinan yang berbeda, akan tetapi setiap Muslim harus menciptakan perdamaian (*al-silmi*) dan kepentingan bersama umat Islam (Islam Kita). Islam seharusnya dipahami secara inklusif, demokratis, dan pluralistik.<sup>56</sup>

Dia menolak reduksi Islam yang dapat melemahkan hukum Islam dalam menghadapi tantangan global. Bahkan sebaliknya, konsep hukum Islam harus dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam memahami konsep manusia yang beraneka ragam dan dinamis diperlukan transformasi nilai-nilai fundamental melalui *ijtihad*<sup>57</sup> seiring perubahan zaman. Menurutnya, Muslim Indonesia seharusnya bersikap moderat dan toleran dalam kehidupan sosial yang plural. Landasan pluralisme Gus Dur adalah Islam kosmopolitan.<sup>58</sup> Dengan demikian, setiap orang akan menghargai hak-hak dasar universal dan menghormati keimanan, ideologi, dan budaya orang lain sehingga pada akhirnya menguasai teknologi.<sup>59</sup> Islam kosmopolitan menghasilkan konsep pluralisme dan toleran yang lebih cocok dengan realitas modern Indonesia.

Dia, disamping dikenal dengan konsep humanisme universalnya, ia juga berusaha untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial di tengah masyarakat plural. Keadilan harus ditegakkan tanpa memandang etnisitas dan agama.<sup>60</sup> Pembelaannya kepada kelompok minoritas dirasakan sebagai suatu hal yang berani. Reputasi tersebut sangat menonjol pada era Orde Baru. Dia bersikap tegas menjadi pembela pluralisme dalam beragama. Dalam pemikirannya, dia tidak menginginkan agama menjadi sekedar simbol, jargon, dan menawarkan janji-janji yang serba akhirat sementara realitas kehidupan yang ada dibiarkan tidak tersentuh.

Pada tanggal 7 September 2004, Gus Dur mendirikan Wahid Institut, sebuah lembaga yang memiliki visi untuk mewujudkan

---

<sup>55</sup> Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Ckt. ke-1* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006).

<sup>56</sup> John L. Esposito and John O. Voll, *Makers of Contemporary Islam*, (New York: Oxford University Press, 2001), h. 206.

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 207.

<sup>58</sup> Menurutnya, Islam kosmopolitan adalah pengenalan seseorang terhadap peradaban, institusi, spiritual, dan perilaku manusia.

<sup>59</sup> Abdurrahman Wahid, *Reflection on the Need for a Concept of Man in Islam, Memorandum the Rector of the NU*, 1 May 1983, h. 4.

<sup>60</sup> Listiyo S Santoso, *Teologi Politik Gus Dur* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Jogjakarta, 2004), h. 112.



prinsip dan cita-cita intelektualnya dalam membangun pemikiran Islam moderat dan mendorong terciptanya demokrasi, multikulturalisme, dan toleransi dikalangan kaum muslim di Indonesia dan seluruh dunia. Dalam berbagai programnya, Wahid Institut menggelar kegiatan di lingkungan aktivis muslim progresif dan dialog di antara pemimpin agama-agama dan tokoh politik di dunia Islam dan Barat. Lembaga ini diinisiasi oleh Gus Dur, Gregorius James Barton, Yenny Zannuba Wahid, dan Ahmad Suaedy.

Misi dari The Wahid Institute adalah sebagai berikut: (1) Mengembangkan, merawat dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai dan toleran. (2) Mengembangkan dialog antara budaya lokal dan internasional demi memperluas harmoni Islam dengan berbagai kebudayaan budaya dan agama di dunia. (3) Mendorong beragam inisiatif untuk memperkuat masyarakat sipil dan tata kelola pemerintah yang baik di Indonesia dalam penguatan demokrasi. (4) Mempromosikan partisipasi aktif dari beragam kelompok agama dalam membangun dialog kebudayaan dan dialog perdamaian. (5) Mengembangkan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>61</sup>

## 2. Hasyim Muzadi: Ketua Umum PBNU pada tahun 1999-2010.

Hasyim Muzadi dikenal sebagai sosok kiai yang cukup tulus memosisikan dirinya sebagai seorang pemimpin Indonesia. Selain sebagai ulama, sosok Hasyim cukup "nasionalis" dan pluralis. Apa saja yang dianggap perlu bagi agama, Indonesia, dan NU, Hasyim ikhlas melakukan. Itu sebabnya, dalam kunjungan di AS ini, Hasyim benar-benar seperti mengabdikan diri bagi kepentingan lebih besar. Salah satunya ia tunjukkan dalam bentuk memberikan penjelasan kepada dunia internasional bahwa umat Islam Indonesia adalah umat Islam yang moderat, kultural, dan tidak memiliki jaringan dengan organisasi kekerasan internasional.

Ketika terjadi peristiwa ditabraknya gedung WTC 11 September 2001, di mana AS langsung menuduh gerakan Al Qaeda sebagai pelakunya dan menangkap orang-orang dan kelompok Islam yang diduga terkait dengan jaring Al Qaeda, posisi Islam moderat Indonesia luput dari tuduhan.<sup>62</sup> Namun hal itu bukan berarti persoalan selesai.

---

<sup>61</sup> Untuk menyampaikan gagasan-gagasan pluralisme, demokrasi, dan sebagainya, *The Wahid Institute* juga menerbitkan berbagai macam buku sebagai media untuk mentransformasikan gagasan-gagasan pluralisme ala Gus Dur kepada seluruh masyarakat. [www.wahidinstitut.com](http://www.wahidinstitut.com).

<sup>62</sup> Hasyim Muzadi, *Lebih Dekat dengan KH. Hasyim Muzadi, dalam Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, (Malang: elKapim, 2003), h. x.

Dampak dari *World Trade Centre* runtuh di New York itu semakin memanaskan suhu ketegangan antara kedua belah pihak karena telah merusak simbol kekuatan ekonomi dunia yang menjadi titik awal bagi pemerintah AS dengan sekutunya menabuh genderang perang terhadap terorisme global. Kampanye perang Amerika melawan terorisme adalah dampak tidak langsung pada posisi umat Islam sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas setiap tindakan teror selama bertahun-tahun.

Ketegangan tinggi Islam dan Barat juga dirasakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia. NU sebagai organisasi massa terbesar Islam di Indonesia dengan misi untuk mempromosikan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (*rahmat li al-‘ālamīn*) disebut untuk melepaskan ketegangan terhadap perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai universal Islam.<sup>63</sup>

Pada tanggal 24 Februari 2004, Hasyim Muzadi mendirikan *Conference of Islamic Scholars* (ICIS) di Jakarta.<sup>64</sup> Hasyim Muzadi memiliki pandangan, dunia internasional perlu mengetahui kondisi Islam di Indonesia dan perilaku mereka yang tidak menyetujui tindak kekerasan.<sup>65</sup> Untuk itu perlu upaya komunikasi dengan dunia luar secara intensif. Tak terkecuali dengan AS. Makin banyak dan intens komunikasi maupun kontak ormas-ormas moderat Indonesia dengan internasional dan AS, itu makin positif. Apalagi, di tengah keterpurukan ekonomi, sosial, dan keamanan di Indonesia saat ini, kerja sama internasional jauh lebih berfaedah daripada keterasingan internasional ekonomi, sosial, dan keamanan di Indonesia saat ini, kerja sama internasional jauh lebih berfaedah daripada keterasingan internasional.<sup>66</sup>

Hasyim Muzadi menjadi tokoh yang mendapat tempat diundang pemerintah AS untuk memberi penjelasan tentang pemahaman masyarakat Islam di Indonesia. Ia cukup gamblang

---

<sup>63</sup> Blog resmi (ICIS), [www.icisjakarta.blogspot.com](http://www.icisjakarta.blogspot.com) (diakses 23 Desember 2013).

<sup>64</sup> Ide pembentukan ICIS berasal dari momentum perubahan hubungan politik antara Islam dan Barat yang disebabkan oleh serangan 9 September 2001. Secara struktural, awalnya ICIS berada di bawah PBNU sebagai lembaga internasional yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi NU dan tokoh-tokoh muslim dunia untuk menanggapi isu-isu global. Namun, meski awalnya berdiri atas nama NU, semenjak kepemimpinan Said Aqil Siraj (2010-sekarang) ICIS dipisahkan secara struktural dari PBNU. Meski begitu, ide-ide dan gagasan yang disampaikan dalam ICIS adalah gagasan NU dan melibatkan tokoh-tokoh NU.

<sup>65</sup> A. Hasyim Muzadi, Lebih Dekat dengan KH. Hasyim Muzadi, dalam *Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, (Malang: elKapim, 2003), h. x.

<sup>66</sup> Hasyim Muzadi, "Gangguan itu Sunatullah", *Republika*, 15 Februari 2004. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

menjelaskan peta dan struktur Islam Indonesia. AS beruntung mendapat gambaran itu langsung dari ormas muslim terbesar Indonesia. Indonesia juga bersyukur karena seorang tokoh ormas muslimnya menjelaskan soal-soal Islam Indonesia kepada pihak luar. Soal kelompok-kelompok garis keras di Indonesia-betapapun jumlah dan kekuatannya cuma segelintir-Hasyim mengingatkan AS bahwa mengatasinya harus tidak sembarangan. Tuduhan itu tidak benar secara keseluruhan karena pada saat yang sama, kita masih menyaksikan intensifnya dialog antaragama.<sup>67</sup>

Pemikiran Hasyim Muzadi tentang jihad kebanyakan ia tuangkan dalam bukunya yaitu “*Radikalisme, Fundamentalisme dan Terorisme*”.<sup>68</sup> Apa yang menjadi pokok pemikirannya adalah upaya melakukan reaktualisasi konsep jihad dengan memisahkannya dan membedakannya dengan perang, sekaigus bergerak dan mengkontekstualisasikannya dengan problem yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.<sup>69</sup>

Hal inilah yang sedikit banyak telah membuat nama Nahdlatul Ulama sedikit memiliki *bergaining* di level internasional. Bukan saja karena aktivitasnya yang gencar menyerukan kembalinya Islam sebagai agama *rahmat li al-‘ālamīn*, tetapi sosok Hasyim Muzadi yang menyerukan perang terhadap semua bentuk radikalisme itu, juga telah membuat NU benar-benar menjadi organisasi yang luwes, fleksibel dan mampu bergerak dinamis tanpa ada kesan bahwa Islam NU adalah Islam yang berkarakter besi dan dekat dengan idiom kekerasan.

3. Said Aqil Siraj: Ketua Umum PBNU periode 2010 sampai sekarang  
Untuk mentransformasikan gagasan pluralismenya, Said menyampaikannya melalui *interfaith dialogue* (dialog antar agama), baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti yang dilakukan pada 23 Oktober 2012 lalu ketika menerima kunjungan dari tokoh agama Serbia di Gedung PBNU. Ia menjelaskan bahwa kepada sesama agama harus menghormati karena ada pesan yang sama, dan terlebih untuk Nasrani dan Yahudi, Allah telah menjelaskannya di dalam al Qur’an.<sup>70</sup>

---

<sup>67</sup> KH. Hasyim Muzadi, *Dikala Transisi Tersandung: Narasi Khidmat Nahdlatul Ulama 1999-2004*, (Jakarta: PBNU, 2004), h. 91.

<sup>68</sup> KH. A. Hasyim Muzadi, *Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme*, (Malang: elKapim, 2003), h. 7-11.

<sup>69</sup> KH. A. Hasyim Muzadi, *Gerakan Moral Nasional*, (Malang: elKapim&Alhikam, tt), h. 9-18.

<sup>70</sup> Said Aqil Siraj, *dalam “Silaturahmi Tokoh Agama Serbia-Indonesia”* di Gedung Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) Lt. 5 Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat, 25 Oktober 2013, video tidak dipublikasikan.

Meski demikian, bukan berarti Said Aqil menganggap semua agama benar. Akan tetapi, pluralisme yang dimaksud adalah mengarah ke persoalan sosial. Menurutnya, harus diakui bahwa semua agama mempunyai keinginan yang baik, mereka juga mempunyai cita-cita yang baik. Adapun ketika menyikapi pluralitas yang ada di Indonesia, ia menuturkan bahwa pluralisme atau kebhinekaan itu anugerah. Pluralisme harus dijaga untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang kuat dan berperadaban, yang *mutamaddin*.<sup>71</sup>

Leanord Swidler, menginventarisir sepuluh prinsip dalam dialog antarumat beragama, yaitu: 1) tujuan utama dialog adalah untuk merubah dan meningkatkan persepsi dan pemahaman terhadap realitas dan kemudian berbuat berdasarkan pemahaman tersebut; 2) dialog antarumat beragama merupakan suatu kebutuhan bersama; 3) setiap peserta dialog merupakan pribadi-pribadi yang jujur dan bersungguh-sungguh; 4) setiap peserta juga mempunyai anggapan bahwa partner dialognya merupakan pribadi-pribadi yang jujur dan bersungguh-sungguh pula; 5) setiap partisipan merupakan pribadi yang autentik, dan sadar akan keagamaan masing-masing; 6) setiap peserta yang akan berdialog hendaknya tidak terlalu mempunyai asumsi yang berlebihan, khususnya dalam isu-isu yang sulit untuk disepakati; 7) dialog hanya dapat dilakukan dalam kesederajatan (*equals*); 8) dialog hanya dapat dilakukan dalam suasana saling mempercayai; 9) peserta yang hendak berdialog, hendaknya secara minimal mampu mengkritisi tradisi keagamaannya sendiri; 10) setiap peserta juga secara minimal mempunyai pemahaman terhadap agama lain.<sup>72</sup>

Selain dengan *interfaith dialogue*, pada tahun 2013 Said juga memberikan beasiswa bagi para pelajar Afghanistan untuk belajar tentang Islam Indonesia yang pluralis. Para pelajar tersebut diharapkan mampu memahami Islam yang pluralis ala nahdliyin. Pendidikan itu dilakukan di Universitas NU yang ada di Jawa Tengah, yaitu Universitas Wahid Hasyim Semarang.<sup>73</sup>

Pada tanggal 9-11 Mei 2016, di Gedung Jakarta Convention Hall (JCC), PBNU mengadakan Agenda *International Summit of the Moderate Islamic Leaders* (Isomil) yang berusaha mendorong perdamaian di dunia internasional. Diikuti oleh sekitar 400 peserta, dari berbagai negara, terutama Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia, perwakilan negara-negara Asia, dan kiai-kiai Indonesia.

---

<sup>71</sup> Nam (red), "Said Aqil: Pluralisme itu Anugerah" dalam [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses 10 Mei 2019.

<sup>72</sup> Leanord Swidler, "The Dialogue Decalogue; Ground Rules For Interreligious Dialogue", *Inter-Religio* 5/Spring, 1984, h. 2.

<sup>73</sup> Asnawi Lathif, Mukafi Niam (red), "Penerima Beasiswa NU dari Afghanistan Dikunjungi Dubesnya" dalam [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses 10 Mei 2019.

Said menegaskan bahwa Islam Nusantara, Islam ala ulama Indonesia mengajarkan kedamaian, bukan kekerasan. Said mencontohkan peran Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari yang berhasil menyatukan Islam dengan nasionalisme. "Hasyim Asy'ari menegaskan prinsip *hubb al-waṭan min al-imān* (cinta tanah air merupakan sebagian dari iman). Kiai Hasyim mendialogkan agama dan negara, Islam dan prinsip kebangsaan. Kiai-kiai pesantren Indonesia, berhasil membangun jembatan antara prinsip agama dan negara. "Konflik yang terjadi di Timur Tengah, tidak akan selesai jika belum ada titik temu antara prinsip agama dan prinsip negara, antara Islam dan prinsip kebangsaan. Terang Said.<sup>74</sup>

Melalui agenda Isomil, Said menyatakan bahwa PBNU berusaha menawarkan Islam Nusantara sebagai inspirasi peradaban dunia. "Islam Nusantara itu bukan madzhab. Prinsip Islam Nusantara itu mengajarkan kedamaian, rahmat, kesejahteraan dan memberi ruang bagi kearifan lokal. Sudah saatnya kita mengeksplor pemikiran Islam Nusantara, pemikiran Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lain ke level internasional," terang Said Aqil.<sup>75</sup>

Imdad mengatakan bahwa pluralisme adalah memberikan akses dan hak yang sama kepada semua orang dalam konteks hak-hak sebagai warga negara. Fakta di Indonesia ada etnis-etnis tertentu yang mendominasi perekonomian, misalnya etnis Cina. Pluralisme yang kritis atau pluralisme yang sensitif terhadap keadilan, itu tidak perlu menyerukan hormati hak-hak Tiongho tetapi juga menyerukan orang Tionghoa harus mengembangkan ekonomi kerakyatan, supaya apa? Supaya ada keadilan karena tanpa keadilan, perdamaian kerukunan antar sesama tidak akan *sustainable* (panjang umur) karena orang akan mudah marah karena adanya ketidakadilan. kemudian yang bisa menyulut kemarahan adalah identitas. Ada orang kaya sekali ada orang yang kelaparan, maka itu yang menyulut kemarahan, karena adanya ketidakadilan, karena kalau orang marah yang paling besar menyulut kemarahan ya identitas. isu anti Cina pasti akan muncul padahal isu aslinya adalah ketidakadilan dan isu ketersinggungan.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>75</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/68033/isomil-nu-dorong-perdamaian-dunia>, diakses pada 12 Mei 2019, pukul 19.59 WIB.

<sup>76</sup> Wawancara dengan Imdadun Rahmat (Wakil ketua PBNU dan rektor INAIS / Institut Agama Islam Sahid Bogor, 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.



### C. Budaya Hidup/ Budaya *Amali*

Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan dimasa sekarang adalah; kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri.<sup>77</sup>

Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini terbilang masih sangat minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini bukan berarti bahwa tidak boleh mengadopsi budaya asing, namun banyak budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Seperti masuknya budaya asing yaitu budaya berpakaian yang lebih mini dan terbuka yang sering dikenal istilah " *you can see*" dimana tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang menganut nilai sopan santun dan ditunjang dengan mayoritas penduduknya beragama islam yang menjunjung tinggi cara berpakaian yang dapat menutup aurat. Budaya lokal juga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, selagi tidak meninggalkan ciri khas dari budaya aslinya.

Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada duacara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal,<sup>78</sup> yaitu :

#### 1. *Culture Experience*

*Culture Experience* merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya.

#### 2. *Culture Knowledge Culture*

*Knowledge* Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah.

---

<sup>77</sup> Hildigardis M. I. Nahak, *Effort To Preserve Inddonesian Culture In The Era Of Globalization*; Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi, *Jurnal Sosiologi Nusantara*, V o l . 5 , N o . 1 , T a h u n 2 0 1 9, h. 65.

<sup>78</sup> Sendjaja, S. Djuarsa, *Teori Komunikasi*, (Jakarta, Universitas Terbuka: 1994), h. 286.



Dengan demikian para Generasi Muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri. Selain dilestarikan dalam dua bentuk diatas, kebudayaan lokal juga dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Dengan demikian, setidaknya dapat diantisipasi pembajakan kebudayaan yang dilakukan oleh negara-negara lain.

Persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah terkadang tidak merasa bangga terhadap produk atau kebudayaannya sendiri. Kita lebih bangga terhadap budaya-budaya impor yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagai orang Timur.

Budaya lokal mulai hilang dikikis zaman, Oleh sebab masyarakat khususnya generasi muda yang kurang memiliki kesadaran untuk melestarikannya. Akibatnya kita baru bersuara ketika negara lain sukses dan terkenal, dengan budaya yang mereka ambil secara diam-diam. Oleh karena itu peran pemerintah dalam melestarikan budaya bangsa juga sangatlah penting. Bagaimanapun juga pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal di tanah air.

Budaya yang dianggap masih hidup (*lived culture*) itu selalu berubah-ubah, karena budaya yang selalu hidup. Apa yang selalu berkembang, NU selalu tanggap dengan itu, makanya ada *bahth al-masā'il*, masalah-masalah yang selalu di bahas dalam forum tersebut selalu hangat (*update*), selalu ada isu-isu yang diangkat, sekalipun banyak anggapan yang mengatakan NU itu tradisionalis, mereka selalu menang karena pemikiran mereka itu modern, disatu sisi karena selalu menyesuaikan dengan kondisi yang sedang berlangsung, seperti Islam Nusantara, mereka juga membicarakan itu, sekarang juga ada agama Nusantara, Hindu menurut NU, agama Nusantara mereka dan itu bertentangan dengan Muhamdiyyah.<sup>79</sup>

Untuk lebih lanjutnya akan dibahas pada bab VII, Islam Nusantara; sebagai salah satu substansi dakwah kontemporer NU.

#### **D. Sejarah Keberagaman dalam NU**

Salah satu karakteristik bangsa Indonesia adalah berpikiran terbuka. Oleh karena itu, meskipun Hindu dan Budha adalah agama yang ada terlebih dahulu sebelum Islam, tetapi ketika para Sufi masuk ke Indonesia membawa misi dakwah, masyarakat Indonesia tidak begitu saja menolak. Bahkan, dengan dakwah yang ramah dan substantif, para sufi yang juga dikenal sebagai Walisongo itu berhasil menyebarkan ajaran Islam dengan damai.

---

<sup>79</sup> Hasil diskusi dengan Andi Faisal Bakti, pada Senin, 08 April 2019 di Ruang Wark Bidang Kerjasama UIN Jakarta. Jam. 14.00-16.00.

Dakwah yang dilakukan oleh Walisongo tetap menjaga kebhinekaan yang telah berlangsung di tengah masyarakat. Tradisi dan budaya yang secara substansi syariat (*maqāsid al-sharī'ah*) tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak mereka tolak dan tidak mereka berangus, tetapi Walisongo menggunakan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat sebagai instrumen dakwahnya. Sehingga, keberagaman tradisi, budaya, suku, bangsa, etnis, ras, maupun keyakinan agama yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia harus tetap terjaga, karena embrio Indonesia adalah keberagaman. Seperti yang dikatakan Gus Dur, bahwa "Indonesia lahir karena perbedaan, tanpa ada perbedaan tak ada Indonesia".<sup>80</sup>

Reputasi dari NU sebagai kekuatan toleransi dan pluralisme sudah ada sejak didirikan pada tahun 1926.<sup>81</sup> Komitmen NU dalam merawat keberagaman menjaga NKRI, bagi NU, hidup rukun, damai dan tentram adalah hal penting dalam kehidupan. Karena dalam suasana yang damai dan tenteram umat Islam bisa menjalankan syariat Islam dengan baik, dengan menjaga ketenteraman dan kedamaian menjadi *washilah* dalam menjalankan syariah Islam. Inilah yang menyebabkan NU memandang kelompok lain sebagai saudara sehingga melahirkan konsep *ukhuwwah waṭaniyyah* dan *ukhuwwah bashariyyah*.<sup>82</sup>

Menurut Gus Dur, ketika menjelaskan tentang makna pluralisme, setidaknya selalu menyampaikan tiga ayat al-Qur'an sebagai berikut: "Tidak ada paksaan dalam agama (QS.Al-Baqarah/2: 256)"; "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku" (QS.Al-Kafirun/109: 6); dan "Agama (yang diridai) di sisi Allah adalah Islam". Dari ketiga ayat yang sering disampaikan tersebut menunjukkan bahwa Gus Dur memegang teguh dan bersikap konsisten terhadap agamanya, bahkan bisa dibilang, Gus Dur bersikap "intoleransi" dalam berteologi.<sup>83</sup>

Konsep pluralisme yang dijalani Gus Dur sebenarnya lebih dekat pada konsep yang menyatakan bahwa dalam masyarakat terdapat kelompok-kelompok sosial yang mengatur diri sendiri dan saling berhubungan serta berdampingan, namun masing-masing kelompok

---

<sup>80</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/89542/embrio-indonesia-adalah-keberagaman>. Diakses pada Sabtu, 12 September 2019, jam 14.32 WIB.

<sup>81</sup> Andree Feillard, *NU vis-a-vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk, dan Makna* [NU vis-a-vis the State: Investigating the Content, Form and Meaning] (Yogyakarta, Indonesia: LKiS Publishers, 1999); and Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* [NU: Tradition, Power Relations, and the Search for a New Paradigm] (Yogyakarta, Indonesia: LKiS Publishers, 2014).

<sup>82</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/102070/bahagia-dalam-keberagaman>. Diakses pada Sabtu, 12 September 2019, jam 14.32 WIB.

<sup>83</sup> Ahmad Husnul Hakim, *Rahasia Pluralisme Gus Dur*, dalam Pusat Studi alQur'an dan Kebangsaan PTIQ Jakarta, <http://pusaka.ptiq.ac.id/?p=47> (diakses 24 Desember 2013).

tersebut mempunyai eksistensi yang berbeda. Definisi pluralisme Gus Dur tersebut terlihat mendapatkan pengaruh dari J.S. Furnivall yang menjelaskan bahwa masyarakat plural adalah yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan, namun tanpa membaaur. Keanekaragaman itu terjadi dalam satu unit politik (wilayah).<sup>84</sup>

Menurut Hasyim Muzadi, pluralitas sebenarnya adalah kodrati. Bahkan dalam al-Qur'an menyebut berbagai jenis manusia untuk menunjukkan macam-macam golongan itu ada dan akan terus ada. Jenis-jenis itu, antara lain, muslim, *muttaqīn*, *kafirīn*, *fasiqīn*, *munāfiqīn*, *zālimīn*, *naṣārā* (Nasrani), *yahūdī* (Yahudi), *ṣabi'īn* (agama lokal). Tidak mungkin Alquran menyebutkan sesuatu yang tidak ada. Hanya mungkin tempat, volume, minor, dan mayoritas, serta pergeserannya yang tidak sama. Menurutnya, pluralitas adalah keniscayaan kodrati yang harus dikelola<sup>85</sup> demi menciptakan Islam yang *raḥmat li al-'ālamīn*.

Hasyim Muzadi berpandangan bahwa keharusan menjaga prinsip pluralisme tersebut tidak hanya dalam aspek norma-norma keagamaan, tapi juga dari tinjauan sosiologis. Argumen ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa berdasarkan pengalaman di Indonesia, toleransi dan kerukunan hidup beragama berjalan cukup baik. Islam yang masuk ke Indonesia bercorak sangat akomodatif terhadap budaya lokal.<sup>86</sup>

Tak hanya Gus Dur dan Hasyim Muzadi yang memiliki pandangan atau sikap terkait perbedaan agama, Said Aqil Siraj (Ketua Umum PBNU periode 2010-sekarang) juga memiliki pandangan yang lebih singkat daripada keduanya. Ia menegaskan corak pemahamannya yang menggunakan pendekatan historis dalam memaknai pluralitas agama, baik di Indonesia maupun di dunia. Menurut Said Aqil Siradj:

“Pluralisme atau kebhinnekaan itu anugerah. Pluralisme ini harus kita jaga untuk mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa yang kuat dan berperadaban, yang *mutamaddīn*,” katanya saat memberikan *tausīyyah* di kantor Lemhanas Jakarta, Rabu (1/9).<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Alvin Rabushka and Kenneth A. Shepsle, *Politics in Plural Societies: A Theory of Democratic Instability* (Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1972), h. 11.

<sup>85</sup> <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/23/193670/Ramadhan-Pluralitas-Pluralisme> (diakses 2 Januari 2013). Hasyim Muzadi, *Ramadhan, Pluralitas, dan Pluralisme*, Suara Merdeka, 23 Juli 2012

<sup>86</sup> Hal ini didasarkan pada salah satu pandangan tentang teori masuknya Islam di Indonesia. Lihat, Anders Uhlin, *Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia*, (Bandung: Mizan: 1998), h. 68

<sup>87</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/24478/said-aqil-pluralisme-itu-anugerah>. Diakses tanggal 06 Juni 2019, jam.21.26 WIB.

Said Aqil berharap masyarakat Indonesia yang beragam dapat terus mempertahankan pola hubungan yang harmonis, guna mewujudkan tatanan masyarakat yang berperadaban, atau masyarakat yang *mutamaddin*. Ia mengingatkan, sebelum Indonesia lahir ini telah banyak agama ada Hindu, Budha, dan Kristen dan aliran kepercayaan lainnya. Umat Islam sebagai mayoritas harus tetap mengakui keberagaman ini. "Kita tidak menganggap semua agama benar. Pluralisme yang kita maksud adalah mengarah ke persoalan sosial, namun kita juga harus mengakui bahwa semua agama ini mempunyai keinginan yang baik, mereka juga mempunyai cita-cita yang baik," Ia menegaskan, sikap saling menghormati keberagaman ini menjadi modal dasar dalam membangun bangsa Indonesia.<sup>88</sup>

Menurut Said, keberagaman Indonesia telah didesain Tuhan sejak zaman azali. Masyarakat Indonesia adalah heterogen dengan ragam suku, bahasa, agama dan warna lainnya. "Itu sudah *fadl min Allāh*. Sudah didesain Tuhan, tidak bisa ditawar lagi," jelasnya.

Pengasuh Pesantren Al Tsaqofah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk bersyukur dan gembira karena telah mendapatkan penghargaan dari Tuhan yaitu telah disiapkan menjadi bangsa yang bineka, bukan bagian dari bangsa yang homogen. Keberagaman ini, sambung Said Aqil, sudah ditangkap pendiri Nahdlatul Ulama, KH Muhammad Hasyim Asyari sehingga ia mampu mempertemukan Islam dan nasionalisme. Keduanya saling memperkuat bukan mempertentangkan. Bahkan Kiai Hasyim membuat jargon bahwa nasionalisme bagian dari iman. "Islam adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah Islam," tegasnya. Berbeda dengan negara-negara Timur Tengah. Ulama-ulama di negara tersebut masih belum menerima konsep nasionalisme. Bahkan tidak banyak yang tahu tentang nasionalisme.<sup>89</sup>

Ketika berbicara mengenai keberagaman dalam NU juga tentunya tidak akan terlepas dengan bahasan tipologi, masyarakat (warga) NU. Tipologi masyarakat NU baik yang tradisional maupun modernis dipengaruhi oleh budaya lokal dan pendidikan, tetapi bagaimanapun menurut Said Aqil Siradj orang NU memiliki :

- 1) *Assāsiyyāt* (prinsip yang sama).
- 2). *Khalfiyyah* (*backgroundnya* NU itu pesantren atau cara berfikirnya pesantren) seperti Pak Nuh (Menteri Pendidikan Republik Indonesia) itu, dia bukan orang pesantren tetapi memiliki cara berfikir pesantren, santri itu: orang Islam, akhlaknya baik, hormat sama Kiyai. Meskipun gak pernah nyantri itu.

---

<sup>88</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/24478/said-aqil-pluralisme-itu-anugerah>. Diakses tanggal 06 Juni 2019, jam.21.26 WIB.

<sup>89</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/78690/keberagaman-indonesia-adalah-desain-tuhan>.

- 3) *Ahdāf Ghāyah* itu sama/ tujuan atau cita-cita (memperkuat *Ukhuwwah waṭaniyyah, ukhuwwah Islāmiyyah, ukhuwwah bashariyyah*).<sup>90</sup>

Said Aqil Siradj menambahkan;

Kalau mau tahu ciri orang NU itu gampang, contoh kalau mau jadi imam sholat itu saling dorong menjadi imam/ saling tidak mau ngimami, tapi kalau di luar NU itu berebut jadi Imam, yang merasa jadi pemimpin dia akan maju duluan, kalau di NU, meski ada Gus Mus, Kiyai Ma'ruf, atau siapapun itu akan berebut menjadi makmum bukan imam dan itu bukan basa basi tetapi karena memang tidak merasa saling *suci*. Mungkin orang melihat saya dari luar Sombong tetapi sesungguhnya tidak, Seperti misalnya saya tetap hormat dengan kiyai MWC dengan yang mukanya bersih, yang hafal Qur'an yang *Tarīqah*, saya cium tangan. Tetapi kalau yang menyerang NU ya saya lawan, tidak ada rasa takut buat saya, misalnya: yang nyalah-nyalahin tahlil, yang nyalah-nyalahin ziarah kubur ya saya *goblog-goblogin*. Dengan Kiyai saya tidak berani, meskipun itu kiyai kecil.<sup>91</sup>

Menurut Gus Dur NU itu ada dua: NU Struktural dan NU Kultural. Struktural yaitu Kyai-kyai yang menduduki posisi di Tanfidhiyah dan Syuriah. Sedangkan Kultural yaitu Kyai-kyai yang menghidupkan tradisi NU. Tradisi NU itu diantaranya: khataman Al-Qur'an, ziarah kubur, tawasul, tahlil, istigasah, zikir bersama, peringatan maulid, manakib, ngalab berkah dan lain-lain. NU berkembang karena NU Kultural. Bahwa prinsip gerakan NU kultural metodologinya sama yang dilakukan ketika zaman Walisongo yaitu *al muḥāfazah 'alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhd bi al-jadīd al-aṣlah* (menjaga tradisi lama yang baik, sambil menerima tradisi baru yang baik).

Menurut Moh. Syihabuddin,<sup>92</sup> ada empat tipologi keanggotaan warga NU, antara lain sebagai berikut:

1. NU Anggota

NU Anggota adalah pengurus NU. Mereka adalah orang-orang NU yang berkhidmat di NU sebagai pengurus, berani mengeluarkan uang dan tenaga untuk NU, dan bisa menyempatkan diri berfikir untuk NU.

Secara struktural mereka menjadi bagian dari kepengurusan dan bisa menjalankan kepengurusan itu dengan baik. Tidak ada

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>91</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>92</sup> <https://suluk.id/tipologi-orang-orang-nu/>



kepentingan apa-apa, hanya ingin belajar, berjuang dan beribadah melalui Nahdlatul Ulama. Tipologi masyarakat ini, ini bahkan rela memberikan apa pun kepada NU hanya karena ingin mengikuti jejak para Ulama pesantren dan tidak berkeinginan mengambil keuntungan dari NU.

## 2. NU Jama'ah

NU Jama'ah adalah orang yang sholat berjama'ah di musala atau masjid Nahdlatul Ulama. Mereka bukan pengurus struktural Nahdlatul Ulama, ada yang punya Kartanu dan ada pula yang tidak mempunyai Kartanu.

Mereka menjalankan amaliyah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Selain itu, mereka juga mengikuti jejak pemikiran Nahdlatul Ulama dan bisa mendukung dakwah Nahdlatul Ulama. Orang-orang yang termasuk jama'ah Nahdlatul Ulama ini juga termasuk orang-orang yang ngaji di musholla Nahdlatul Ulama namun tidak menjadi anggota resmi Nahdlatul Ulama.

Amaliyahnya Nahdlatul Ulama, dia qunut shubuh, ikut tahlil, dan juga ada bertarekat pula. Anak-anaknya sekolah di madrasah Nahdlatul Ulama dan mau mendukung Nahdlatul Ulama dalam segala aspek kegiatan. Jika dimintai urunan dia siap memberi dan menyisihkan uangnya untuk Nahdlatul Ulama.

Kebanyakan orang Jama'ah NU adalah orang awam, masyarakat biasa, bukan golongan elit. Mereka hanya ikut para kiai atau pengasuh pondok pesantren saja. Tidak niat aneh-aneh, apalagi memanfaatkan NU sangat mustahil.<sup>93</sup>

## 3. NU Darah Biru

NU darah biru adalah orang-orang keturunan orang yang pernah menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, anak seorang kiai Nahdlatul Ulama, dan putra seorang pengasuh pondok pesantren. Dia tidak belajar melalui proses menjadi Nahdlatul Ulama secara sah, tidak ikut kaderisasi di Banom atau melalui Nahdlatul Ulama, tapi karena bapak-ibunya NU dia menjadi NU. Orang model ini bahkan termasuk putra dari para donatur utama Nahdlatul Ulama.<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Kendati demikian, tipologi ini adalah 80% Nahdlatul Ulama. Masih menyisihkan 20% untuk bergeser tidak menjadi Nahdlatul Ulama. Tipologi ini membutuhkan dukungan dan pertemanan yang dekat dari orang-orang tipologi NU Anggota, agar sifat dan keyakinan Nahdlatul Ulama-nya tetap kuat dan konsisten berjalan di jalan Nahdlatul Ulama, tidak terpengaruh oleh ajakan lainnya. <https://suluk.id/tipologi-orang-orang-nu>.

<sup>94</sup> Tipologi NU darah Biru ini memiliki kadar 60% NU yang menyisihkan 40% untuk tidak menjadi NU. Tipologi ini memerlukan pendekatan dari tipologi NU Anggota agar bisa lebih condong menjadi NU, walaupun hanya mencapai 80%. Upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana mereka ini tetap mau

#### 4. NU Naturalisasi

NU Naturalisasi adalah orang-orang yang bukan NU, bukan jama'ah NU, dan bukan anak keturunan orang NU namun mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh Nahdlatul Ulama, sehingga diajak untuk menjadi Nahdlatul Ulama dan dimasukkan di kepengurusan.<sup>95</sup>

##### 1. Aswaja Arus Utama (moderat, *manhajul fikr*)

###### a. Konsep NU tentang Aswaja

Istilah *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (aswaja) dapat dipahami pada dua pemahaman (*verstehen*). Pertama, dalam kacamata sejarah Islam, istilah ini merujuk pada munculnya wacana tangdingan (*counter discourse*) terhadap membiaknya paham Muktazilah di dunia Islam, terutama pada masa Abbasiyah. Pada akhir abad ke-3 Hijriyah, hampir bersamaan dengan masa berkuasanya Khalifah al-Mutawakkil, muncul dua orang tokoh yang menonjol pada waktu itu, yaitu Abu Hasan al-Asy'ari (260 H- 330 H) di Bashrah dan Abu Manshur al-Maturidi Samarkand. Dari kedua pemikir ulama tersebut, lahirlah kecenderungan baru yang banyak mewarnai pemikiran umat Islam waktu itu, bahkan, hal tersebut menjadi maistream (arus utama) pemikiran keagamaan di dunia Islam yang kemudian mengkristal menjadi sebuah gelombang pemikiran keagamaan yang sering dinisbatkan pada sebutan ahlu sunnah wal jama'ah, yang kemudian populer disebut Aswaja.

Kedua, istilah populer di kalangan umat Islam, terutama didasarkan pada sebuah hadist yang di riwayatkan oleh Abu Daud At-Tarmidzi dan Ibn Majah dari Abu Hurairah yang menegaskan bahwa umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, umat Nashrani akan terpecah menjadi 72 golongan, dan umat Islam

---

memberikan tenaga, uang dan pikirannya untuk Nahdlatul Ulama, tidak untuk yang lain.

<sup>95</sup> Jika kebetulan orang baik maka tipologi orang ini akan bisa memberikan kontribusi bagi Nahdlatul Ulama, namun jika kebetulan jelek maka orang model ini hanya mengambil keuntungan dari Nahdlatul Ulama. Kebanyakan tipologi ini adalah para pegawai BUMN, PNS atau pegawai swasta. Jika Nahdlatul Ulama berkuasa sebagai pemegang kekuasaan di pemerintahan maka orang model ini akan dengan cepat menjadi NU. Namun jika pemerintahan kebetulan bukan Nahdlatul Ulama maka dengan cepat pula mereka akan berubah tidak menjadi NU lagi. Dengan demikian orang dengan Tipologi NU Naturalisasi ini patut dirawat, dibina dan dekati, sekaligus patut pula dicurigai dan diwaspadahi. Harus memberikan kontribusi bagi kebesaran Nahdlatul Ulama, bukan malah menghancurkan Nahdlatul Ulama.

akan terpecah menjadi 73 golongan. Semua golongan tersebut akan masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya.<sup>96</sup>

Menurut Jalal Muhammad Musa dalam karyanya *Nash'at al-Ash'ariyyah wa Ta'awwurihā*, istilah *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (aswaja) mengandung dua pengertian, yaitu *am* (umum) dan *khāṣ* (khusus). Pengertian *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* secara umum merupakan sebutan bagi kelompok pembanding kaum syi'ah. Dalam konteks ini, kaum mu'tazilah, seperti halnya *ash'ariyyah* termasuk di dalam pengertian yang sama, sedangkan dalam pengertian khusus, *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* adalah kelompok *ash'ariyyah* (pengikut madzhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari).<sup>97</sup>

Menurut Said Aqil Siradj Aswaja adalah: "*ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* adalah orang-orang yang memiliki metode berfikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderasi, menjaga keseimbangan dan toleran." (Sa'id Aqil Siradj).

Dalam kontek ke-NU-an, paham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (aswaja) mencakup aspek akidah (teologi), syari'ah, dan akhlak. Aswaja bagi NU merupakan integralisasi ajaran yang mencakup seluruh aspek-aspek keagamaan yang didasarkan pada *manhaj* (pola pemikiran), dalam hal akidah mengikuti paham Asy'ariah dan Maturidiah, dalam hal fiqih melingkupi Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hambali, dalam hal tasawuf mengikuti Abdul Qasim al-Junaidi al-Baghdadi dan al-Ghazali.

Ciri khas NU dalam mengembangkan paham aswaja terdapat dalam dua hal: keharusan bermadzab dan berpegang pada *qā'idah fiqhiyyah: al-muḥāfaẓah 'alā al-qadīm al-sāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*. Pentingnya bermadzhab dalam mengamalkan ajaran Islam, kebenaran dan mudah dijangkau.

Keharusan berpegang teguh pada tradisi para pendahulu (rasulullah, para sahabat, tabi'in dan seterusnya) juga melandasi pemikiran Islam yang dikembangkan Ahmad Ibnu Hanbal. Dalam salah satu suratnya yang ditujukan kepada khalifah al-Mutawakkil (847-861 M/232-486 H), khalifah setelah al-Watsiq, ketika masalah keqadiman dan kemakhlukan al-Qur'an masih ramai diperdebatkan, ia menulis:

---

<sup>96</sup> Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlu sunnah wal Jama'ah*, 1418, h. 23.

<sup>97</sup> Aceng Abdul Aziz dkk: *Islam Ahlusunnah wal Jama'ah*, (Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 2016), h. viii.

“Sesungguhnya tidak hanya satu orang yang meriwayatkan pendapat orang-orang yang telah mendahului kita, bahwa al-Qur’an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Merekalah yang berpendapat seperti itu. sedangkan saya berpendapat tentang kalam Allah hanya sebagaimana yang digambarkan oleh kitab Allah dan hadist Nabi, atau oleh para sahabat beliau juga tabi’in. Sungguh memperdebatkan masalah ini tidak terpuji ”.<sup>98</sup>

Dalam hal aqidah (teologi), sikap NU sama dengan kelompok-kelompok lain yang berkembang di Indonesia, termasuk Persis dan Muhammadiyah, yakni menerima ajaran-ajaran para pendahulu seperti Asy’ari dan Maturidi. Perbedaannya terletak pada hal penerimaan empat madzhab fiqih dan wacana tasawuf al-Junaidi, al-Ghazali, dan imam-imam lain yang sejalan.<sup>99</sup>

Mengembangkan aspek akhlak dalam kontek *ahl al-sunnah wa al-jamā’ah* berarti upaya untuk membimbing manusia dalam mencapai derajat keikhlasan. Dengan keikhlasan, maka perbuatan baik yang dilakukan manusia adalah semata-mata timbul karena kesadaran mental spiritual yang dimilikinya, bukan karena motif-motif lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, seseorang perlu melakukan proses pembiasaan atau pelatihan secara berkesinambungan. Dalam dunia Islam, wacana semacam itu dikembangkan oleh para sufi. Paham *ahl al-sunnah wa al-jamā’ah* menempatkan wacana tasawuf (hasil pemikiran dan kebiasaan hidup yang dijalani oleh para sufi) sebagai alat pendukung dalam rangka mendidik dan membimbing aspek esoterik (batiniah) manusia untuk mencapai nilai-nilai ihsan atau sikap mental spiritual yang senantiasa merasakan kehadiran Allah dalam seluruh ruang kehidupan.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Dikutip dari Muhammad Abu Zahrah: 1996, 183, Gambaran tentang bagaimana NU berpegang teguh kepada prinsip *qā’idah fiqhiyyah: al-muhāfazah ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah* bisa dilihat dalam penjelasan KH. M. Hasyim Asy’ari tentang pengertian bid’ah. Dengan mengutip penjelasan Abul Baqa’ dalam bukunya al-Kulliyyat,

<sup>99</sup> Klaim bahwa istilah *ahl al-sunnah wa al-jamā’ah* hanya diperuntukkan bagi para pengikut mazhab-mazhab besar fiqih Sunni menurutnya istilah tersebut berlaku bagi setiap orang yang berpedoman pada sunah nabi (Latiful Khuluq, pengertian etimologis (bahasa) kata sunnah sebagai jalan dan kebiasaan (tradisi) meskipun tidak disukai. Sedangkan menurut syara’, sunnah merupakan jalan yang disukai dan dijalani dalam agama sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi Muhammad, atau tokoh-tokoh agama lainnya, seperti para sahabat dan tabi’in (KH. Hasyim Asy’ari, 1418 H), h. 5.

<sup>100</sup> HR. Muslim, dikutip dari Muhammad al-Ghazali, 1990 M/1410 H, h. 21.

b. Implementasi Paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*

Koridor bagi pemahaman keagamaan di lingkungan NU adalah *taqḍīm al-naṣṣ ‘alā al-‘aql* (mendahulukan nash atas akal) itulah sebabnya mengapa dalam mengimplementasikan paham aswaja, NU mengenal hirarki sumber ajaran Islam, yaitu mulai dari al-Qur'an, sunnah, ijma (kesepakatan jumhur ulama) dan qiyas (pengambilan hukum melalui metode analogi tertentu).

Hal tersebut merujuk pada sebuah riwayat yang menceritakan dialog antara nabi dengan Mu'adz ibn Jabal menjelang pelepasannya ke Yaman untuk menjadi gubernur. Pada waktu itu, Nabi menanyakan kepada Mu'adz tentang apa yang akan dipakainya sebagai sumber dalam menyelesaikan persoalan-persolan yang di jumpainya. Mu'adz kemudian menjawab secara berurutan (hierarkis) bahwa yang dijadikan pedoman olehnya adalah al-Qur'an, sunnah, dan pada bagian paling akhir ia mengatakan: "*ajtahidu bi ra'yi*" (aku berijtihad dengan pendapatku).<sup>101</sup>

Dalam risalah khittah Nadliyyah, KH. Achmad Shiddiq (1979: 38-40), menjelaskan bahwa paham aswaja memiliki tiga karakter. Pertama, tawassuṭ atau sikap moderat dalam seluruh kehidupan. Prinsip moderasi (*tawassuṭ*) dijadikan sebagai landasan dalam menggali hukum Islam, yakni memadukan antara wahyu dengan rasio, sehingga aswaja tidak terlalu "*ngeteks*" terpaku pada *al-nuṣūṣ al-shar'īyyah* (al-Qur'an dan Hadis), juga tidak liar dalam menggunakan akal pikiran atau lepas dari wahyu. Di samping itu moderasi aswaja juga dapat menjembatani dua kelompok keislaman yang saling berseberangan, yakni kelompok tekstualis dan rasionalis.

Kedua, *al-i'tidāl* atau sikap tegak lurus dan selalu condong pada kebenaran dan keadilan. Prinsip keseimbangan (*ta'ādul*) aswaja terefleksikan dalam ruang kehidupan sosial kemasyarakatan, akomodatif terhadap budaya setempat, tidak mengkafirkan sesama umat Islam (*ahl al-bayt*), dan toleran terhadap non muslim. Ketiga, *al-tawazzun* atau sikap keseimbangan dan penuh pertimbangan. Prinsip netral (*tawazzun*) aswaja berkaitan dengan sikapnya dalam dunia politik, yakni tidak setuju dengan kelompok garis keras yang merongrong pemerintahan, namun tidak membenarkan tindakan penguasa yang lalim. Tiga katakter tersebut berfungsi untuk menghindari *taḡarruf* atau sikap ekstrim dalam segala aspek kehidupan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berasas kepada Pancasila dan Undang-Undang

---

<sup>101</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud dan at-Tirmidzi.



Dasar 1945.<sup>102</sup> Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.<sup>103</sup> Untuk mewujudkan tujuan di atas, maka Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran Islam yang menganut faham *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang takwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustad'afin*).
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya *Khayr al-Ummah*.<sup>104</sup>

## 2. Progresif

Gerakan progresif adalah gerakan yang dilakukan oleh generasi muda NU yang memiliki kesadaran kritis terhadap keberadaan dan kultur NU yang berada pada front terdepan dalam mendinamisasikan gerakan pembaharuan dalam NU. Progresif adalah suatu perubahan yang terjadi, yang sifatnya maju, meningkat, meluas, berkelanjutan atau bertahan selama periode waktu tertentu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dalam bidang politik, progresif orang yang mendukung ide-ide baru dan perubahan sosial yang modern

---

<sup>102</sup> Pedoman, Aqidah dan Asas NU, Hasil-Hasil Mukhtar KE-33 NU, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 25-26.

<sup>103</sup> Anggaran Dasar NU, *Hasil-Hasil Mukhtar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 25-27.

<sup>104</sup> Anggaran Dasar NU, *Hasil-Hasil Mukhtar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), h. 27.

Sejarah munculnya gerakan NU Progresif adalah:

1) Latar belakang Pendidikan dan Sosial;

Mereka yang ditempa melalui pendidikan pesantren, dimana setelah menyelesaikan pendidikan pesantrennya mereka melanjutkan ke Perguruan Tinggi Agama Islam; latar belakang pendidikan pesantren ditambah dengan pendidikan di Timur Tengah.<sup>105</sup>

2) Aktivitas/ Kiprah; Embrio gerakan progresif di dan dari NU adalah dimulai dari kalangan aktivis (aktivis atau mantan aktivis mahasiswa, LSM, dan sebagian kecil aktivis partai politik) dan intelektual yang tergolong masih berusia muda.<sup>106</sup> Pada dekade 1980-an kelompok muda pembaharu NU semakin memperoleh tempat di dalam masyarakat luar NU. Setidaknya ada dua fenomena penting dalam perkembangan gerakan pembaharuan di era 1980-an yang menjadikan mereka semakin memperoleh tempat baik di dalam NU maupun diluar NU.<sup>107</sup>

Di dalam NU bisa dikatakan sebagai awal dari kemenangan kelompok progresif, yang ditandai dengan tampil atau terpilihnya Gus Dur sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU melalui Muktamar Situbondo tahun 1984, dengan KH Ahmad Siddiq sebagai Rois Am-nya. Kedua figur itu sekaligus mengekspresikan bersandingnya generasi muda NU dengan generasi tua yang disegani, yang secara relatif satu pemikiran dalam kaitan dengan upaya-upaya perubahan yang dikehendaki. Dan yang terpenting dalam momentum itu adalah diterimanya gagasan-gagasan utama untuk mengembalikan NU ke garis perjuangannya semula, yang kemudian dikenal dengan istilah “kembali ke khittah 1926”.<sup>108</sup>

---

<sup>105</sup> Laode Ida, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 12-13.

<sup>106</sup> Laode Ida, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 14-15.

<sup>107</sup> Hal ini juga didukung oleh Rumadi dalam disertasinya yang mengatakan bahwa Gerakan intelektualisme NU semakin menampakkan gairahnya sejak pertengahan 1980-an ketika dalam komunitas NU (atau anak-anak muda NU) mulai muncul LSM-LSM. LSM tersebut bukan sekedar melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tapi juga mengusung gagasan dan pemikiran-pemikiran ke-Islaman yang lebih segar dan progresif. Kelompok muda ini mulai berani mendobrak dan mempertanyakan beberapa segi tradisi, bahkan doktrin, yang selama ini diterima begitu saja nyaris tanpa reserve. Rumadi, *Post Tradisionalisme Islam: Wacana Intelektualisme Dalam Komunitas NU*, Istiqra.

<sup>108</sup> Laode Ida, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 16.

- 3) Pada tahun 1980-an terjadi perkembangan yang semarak dalam gerakan LSM di Indonesia.<sup>109</sup>

Pada tahun tersebut samaarak dengan gerakan LSM Indonesia, baik LSM yang bergerak pada pengembangan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan maupun LSM-LSM yang bergerak khusus dalam advokasi atau penyadaran hak-hak rakyat (mengubah sikap kritis masyarakat terhadap negara dengan cara menumbuhkan kesadaran akan HAM, politik maupun ekonomi). Meskipun sebenarnya pada dekade 1970-an, dunia pesantren sendiri sudah ada yang mengenal atau bersentuhan dengan gerakan ala LSM dan mulai menyadari atau mengarahkannya sebagai agen perubahan sosial di lingkungan masyarakat pedesaan.<sup>110</sup>

- 4) Kesadaran yang muncul dalam diri mereka sebagai refleksi kritis terhadap intern NU yang lebih menonjolkan dimensi patron-klien dengan model pendidikan serta ajaran-ajarannya yang konservatif. Dunia LSM dianggap sebagai wahana alternatif utama untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri NU, apalagi sebgai Kyai dan pesantren NU sudah tertarik dan atau di sentuh oleh program-program LSM.<sup>111</sup>

Menurut Laode beberapa tipologi kelompok progresif dalam NU adalah:

- 1) Progresif Transformatif.

Mereka yang secara intern mengupayakan penyadaran terhadap subyek (orang-orang NU) dengan harapan subyeklah yang kelak akan mengubah dirinya sendiri serta melakukan perubahan pada komunitas yang lebih luas, dimana program-program yang biasanya teragendakan secara relatif baik, termasuk di dalamnya memperoleh pengakuan di intern NU.

---

<sup>109</sup> Lihat antara lain Rustam Ibrahim: *LSM, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia*, dalam Rustam Ibrahim (ed): “*Agenda LSM menyongsong tahun 2000*”, Jakarta, LP3ES, h. 10 -11. Dalam sejarah LSM di Indonesia, menurut catatan Rustam Ibrahim, mulai bermunculan sejak tahun 1970an seiring dengan program modernisasi yang dilakukan di awal pemerintahan Orde Baru di mana keterlibatan LSM adalah dalam rangka membantu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan program pemerintah. Namun, pada saat itu barulah muncul LSM yang termasuk dalam katagori fungsional atau pengembang partisipasi masyarakat, sementara LSM-LSM yang bergerak dalam bidang advokasi baru bermunculan pada dekade tahun 1980-an.

<sup>110</sup> Laode Ida, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 17.

<sup>111</sup> Laode Ida, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 22.

Strategi yang dilakukan oleh kelompok progresif ini biasanya secara persuasif, sehingga mereka tidak memperoleh penolakan yang berarti dari kalangan pemegang kuasa tradisional dalam struktur dan kultur NU. Mereka berupaya meletakkan dasar-dasar perubahan di dalam NU dengan mencoba memberikan pencerahan (*enlighten ment*) agar NU tidak terjebak dengan persoalan-persoalan pragmatis politik dan tradisi sehingga tidak mampu menyahuti tuntutan perkembangan yang terjadi, karena NU salah kelola dan salah arah (*mis management*)/ lihat HP.<sup>112</sup> Singkatnya mereka bersikap kritis terhadap kondisi internal NU yang mengkaitkannya dengan dinamika intern dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Tipe progresif transformatif mulai bergerak sejak dekade 1970-an dengan adanya beberapa orang yang mempersoalkan hubungan NU dengan politik yang dianggap telah menjebak atau menjadikan NU hanya memenuhi kepentingan politik segelintir elitnya sementara posisi internal terabaikan. Padahal dari segi kuantitas warga NU semakin banyak kader-kader muda Nuyang terdidik di luar ponpes/ dari perguruan tinggi yang semakin bermunculan. Singkatnya, orientasi gerakan katagori progresif ini lebih terkonsentrasi pada masalah-masalah internal NU, sehingga gerakan perubahan yang dilakukan tidak terlalu berkaitan dengan masalah-masalah eksternal diluar jamaah dan jam iyah NU.<sup>113</sup>

## 2) Tipe Progresif Radikalis.

Mereka yang memperjuangkan kesetaraan (*egaliterian*) dengan menjunjung tinggi atau bersandar pada nilai-nilai HAM dan kultur dasar komunitas kajian-kajian atau pemikiran-pemikiran rasional

---

<sup>112</sup> Menurut Said Budairi yang merupakan salah satu tokoh utama peletak dasar untuk melakukan perubahan di intern NU (Wawancara konfirmatif, 19/07/2002). Fokus utama dari gagasan perubahan yang hendak dilakukan pada tahun 1970an dan awal 1980an adalah meluruskan kembali kultur dan pengelolaan NU yang sudah mulai melenceng, sehingga oleh karena digagaskan untuk pertama kali kembali ke khittah 1926. Searah dengan Budairi, menurut Zaini Rahman, seorang intelektual muda NU yang juga salah seorang penulis buku *Post-Tradisionalisme Islam Menyikap Corak dan Gerakan PMII* (wawancara konfirmatif silang, 20/07/2002), gerakan perubahan yang dilakukan oleh sub kelompok ini pada dasarnya lebih memberi ruang yang lebih luas kepada warga NU dan atau menunjukkan jalan kemana harus bergerak, tetapi mereka tidak memiliki doktrin khusus untuk itu.

<sup>113</sup> Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dari antara lain Said Aqil Budairi, Arif Mudasir Mandan, Masdar F. Mas'oedi, dan Mufid A. Busyairi, yang dikonfirmasi kembali dengan Said A. Budairi dan Helmi Alipada, 19/07/2002. Laode Ida, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 33.

termasuk yang berhaluan kiri<sup>114</sup> dicoba dikembangkan dan disebarluaskan ke dalam dan ke luar komunitas NU dalam bentuk seperti buku, melalui media cetak dan pengembangan wacana melalui kegiatan diskusi, seminar dan sebagainya. tujuannya adalah untuk mendelegitimasi kemapanan yang diciptakan oleh manusia, kemapanan mana yang dianggap berimplikasi pada ketidakadilan dan atau pelanggaran terhadap nilai-nilai HAM. Target perubahan yang diharapkan oleh tipe progresif ini lebih bersifat struktural, utamanya yang berkaitan dengan kekuasaan negara dan atau dengan kekuasaan di intern NU dipertahankan secara turun temurun; dimana semua itu dianggap berdampak pada eksisnya subordinasi dan kooptasi struktural dan kultural.

Dari segi aktivitas-aktivitas yang tergabung di dalamnya, pada dasarnya mereka merupakan campuran dari mereka yang (dari segi usia) tergolong generasi pertama pelaku perubahan dengan generasi-generasi setelahnya. Namun, kebanyakan di antara mereka merupakan generasi NU lapis kedua dari kelompok pertama, yang terdiri dari para aktivis mahasiswa dan alumni yang berkiprah pada kelompok-kelompok kajian baik di kampus-kampus maupun di luar kampus, termasuk di dalamnya berkiprah sebagai aktivis LSM, diantaranya adalah para aktivis muda dari LKiS Yogyakarta dan “kelompok 164” Jakarta. Selain itu, juga terdapat sejumlah aktor yang tergolong generasi tua/senior yang aktif di LSM dan pengelola pesantren, yang juga berperan dalam mengembangkan pemikiran dan kegiatan-kegiatan yang dianggap radikal, bahkan diklaim sebagai kekiri-kirian.

Mereka sering disebut sebagai penyebar “virus pemikiran dan gerakan kiri atau sekuler” kepada komunitas NU, dan atau juga sering diklaim sebagai “tipikal kelompok kiri asal NU”. Sehingga tidak heran kalau Imam Azis, tokoh LKiS Yogyakarta, secara resmi pernah dikirim surat oleh kiyai dari salah satu pesantren di mana surat-surat itu juga disebarkan kepada pesantren-pesantren lain di Yogyakarta dan Jawa Tengah, yang menuduh Azis telah tidak Islam lagi. Namun, tentu saja gerakan pemikiran itu tidak berjalan sendirian, karena mereka turut pula didukung oleh sebagian figur yang tergolong kategori tipe transformis, sehingga dengan demikian gerakan kelompok ini sebenarnya juga memperoleh dukungan moral dari kekuasaan yang bergerak di intern NU

---

<sup>114</sup> Istilah kiri dalam konteks ini dimaksudkan sebagai “anti kemapanan” yang selanjutnya dikembangkan berdasarkan pemikiran rasional dengan mencoba menemukan hakekah kebenaran mendasar yang sebelumnya tidak terungkap karena masyarakat manusia terjebak pada kemapanan yang sudah dianggap eksis dan bemaar.



sendiri. Selain itu, kekuatan memperoleh dukungan yang cukup luas di kalangan anak-anak muda aktivis NU.

Dari segi kegiatan yang mereka lakukan adalah setidaknya terdapat tiga varian dalam tipe kelompok ini.

- a) Mereka yang bergerak pada tingkat wacana, dengan mencoba menafsirkan kembali hakekat atau makna aswaja, menafsirkan kembali konsep-konsep berislam, termasuk di dalamnya menggugat kemapanan kultur NU yang cenderung hegemonik, mengembangkan pemikiran metodologis tentang pencarian kebenaran yang monolitik, sampai pada pemikiran yang merevitalisasi nilai-nilai yang berakar dari tradisi masyarakat lokal yang kemudian disebut sebagai gerakan post tradisionalisme.
- b) Para aktivis yang melakukan aksi-aksi yang langsung berhadapan dengan pemerintah, baik dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan para aktivis dari komunitas di luar NU. Dalam melakukan kegiatan ini umumnya dengan cara-cara yang frontal namun tetap damai (*non violence*), seperti demonstrasi menentang pemerintah yang berkuasa, sebagai perwujudan dari sikap kritis mereka terhadap pemerintah yang otoriter, tidak memperhatikan HAM dan keadilan, yang diharapkan dapat menjadikan kekuatan kontrol yang efektif bagi pemerintah. Wadah kegiatan mereka umumnya tergabung dalam LSM-LSM termasuk kelompok-kelompok studi di kalangan mahasiswa yang berasal dari NU (baik yang berbasis di PMII maupun tidak) yang antara lain tergabung dalam FORKOT, FAMRED dan sejenisnya.
- c) Progresif radikal. Para aktivis yang melakukan aksi-aksi bersama lintas komunitas untuk kemanusiaan dan perdamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktivisnya pada dasarnya berupaya mewujudkan sikap inklusif dalam kehidupan sehari-hari sekaligus berupaya membangun modal sosial lintas komunitas (dengan kekuatan-kekuatan sosial strategis dari luar NU). Dalam upaya dan atau bersamaan dengan aksi-aksi bersama lintas komunitas itu, kelompok progresif ini juga memulainya dengan melakukan penyadaran kedalam diri mereka sendiri, yang antara lain diwujudkan dalam program “sekolah bersama Islam pluralisme”.

Tipe progresif radikal ini, pada dasarnya merupakan perpaduan antara aktivis kampus yang terengaruh oleh pemikiran-pemikiran pembaharuan yang kritis dan berkembang diluar NU. Kiprah dari kelompok progresif radikal ini, terwujud dalam pemikiran-pemikiran yang kemudian diterbitkan dalam bentuk-

bentuk buku bacaan populer dan tulisan-tulisan yang dipublikasikan melalui media cetak. Pengakuan keintelektualan ini muncul dari dalam dan dari luar NU, kendati tidak secara resmi tergabung dalam suatu komunitas akademisi tertentu yang tunduk pada kaidah-kaidah disipliner karena memang kapasitas mereka tumbuh, berkembang dan memperoleh pengakuan sebagai otodidak.<sup>115</sup>

### 3) Progresif Moderat.

Mereka yang memiliki ide-ide tentang perubahan tetapi tidak memiliki ideologi yang jelas yang bisa secara konsisten diperjuangkan. Terhadap dinamika internal, tipe ini selalu berupaya memahami dan akomodatif; demikian juga dengan perkembangan di luar NU, selalu berupaya memahaminya. Oleh karena wataknya yang fleksibel tersebut, kelompok ini lebih bisa diakomodasi baik di dalam maupun di luar NU.

Peran-peran mereka bermacam-macam, ada yang sebagai intelektual, aktivis LSM, pengurus NU dan pengelola pesantren. Misalnya sebagai intelektual; mereka menjelaskan kondisi yang terjadi di dalam NU termasuk keterkaitannya dengan faktor eksternal, juga gagasan-gagasan perubahan baik yang ditawarkan secara langsung sebagai wacana, maupun pemikiran, dan aksi gerakan sosial yang dilakukan oleh para aktivis yang masuk kedalam katagori sebagai kelompok pertama dan kedua. Demikian juga sebagai kiai pengelola pesantren atau mereka pengurus NU, mereka bisa mengakomodasi gagasan-gagasan yang secara pragmatis dianggap bermanfaat bagi perbaikan NU secara umum.

### 4) Progresif Liberal.<sup>116</sup>

Pada bab sebelumnya telah dibahas bahwa liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama dan Dalam masyarakat modern, liberalisme

---

<sup>115</sup> Laode Ida, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 34-37. .

<sup>116</sup> Diskusi ringan dengan Azyumardi Azra pada saat konsultasi penyusunan judul dan bab, apakah Gus Dur, Ulil termasuk katagori JIL, anak-anak muda NU yang bergabung di NGO itu masuk ke kategori mana?. Sabtu, 13 Juli 2019 di SPS UIN Jakarta.

akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas.

Di masa reformasi, NU menunjukkan identitasnya sebagai kantong pemikiran Islam yang cukup berwibawa. Bukan hanya itu, pemikiran-pemikiran tersebut bermetamorfosis menjadi kekuatan yang bersifat transformatif. Pemikiran keagamaan yang progresif digunakan sebagai komitmen untuk melakukan pemberdayaan dan kerja-kerja pembebasan. Secara kultural, munculnya pemikiran progresif di lingkungan NU merupakan produk pergulatan NU dengan masyarakat sipil. Pilihan untuk kembali ke khittah tahun 1984 merupakan pilihan yang sangat tepat, terutama telah mendorong NU menjadi lokomotif *civil society* di Indonesia. Bahkan, komparativis politik ternama Alfred Stepan memuji NU sebagai "tulang punggung masyarakat sipil yang toleran".<sup>117</sup>

Bukan hanya itu, NU telah mempertahankan dan mengembangkan watak kemoderatan dan kerakyatan Islam. Pergulatan antara agama dan realitas yang dinahkodai NU menginspirasi adanya dialektika yang bersifat dinamis dan fungsional antara yang profan dengan yang sakral. Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan nilai yang melangit dan mengawang-awang, melainkan sebagai ajaran yang terlibat langsung dalam pergulatan realitas dan problem kemanusiaan secara umum. Di sinilah, lalu watak Islam bersifat transformatif, moderat, dan progresif sesuai dengan pandangan NU.<sup>118</sup>

Gerakan Islam Liberal sebenarnya adalah lanjutan dari pada gerakan modernisme Islam yang muncul pada awal abad ke-19 di dunia Islam sebagai suatu konsekuensi interaksi dunia Islam dengan *tamaddun* Barat. Modernisme Islam tersebut dipengaruhi oleh cara berfikir barat yang berasaskan kepada rasionalisme, humanisme, sekularisme dan liberalisme. Konsep ini mencerminkan jiwa yang tidak beriman kerana kecewa dengan agama. Konsep tragedi ini mengakibatkan mereka asyik berpandu kepada keraguan, dan dalam proses ini falsafah telah diiktiraf sebagai alat utama menuntut kebenaran yang tiada tercapai.

Oleh sebab itu walaupun Jaringan Islam Liberal di Indonesia bermula tahun 2001, tetapi ide-ide Islam Liberal di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970 dengan munculnya ide sekularisasi dan modernisasi Islam yang dibawa oleh Nurcholis Majid, Harun

---

<sup>117</sup> Alfred Stepan and Jeremy Menchik, "Islam in Indonesia: Democratisation From Below", *Qantara*, 18 November 2010, <https://en.qantara.de/content/islam-in-indonesia-democratisation-from-below>.

<sup>118</sup> Muhammad, "Nahdatul Ulama dan Perubahan Budaya Politik di Indonesia", *al-Harakah*. Vol.12 No.1 Tahun 2010, h. 64-65. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin.

Nasution, Mukti Ali, dan kawan-kawannya, Di Indonesia muncul Nurcholis Madjid (murid dari Fazlur Rahman di Chicago) yang memelopori gerakan firqah liberal bersama dengan Djohan Efendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wachid. Nurcholis Madjid telah memulai gagasan pembaruannya sejak tahun 1970-an. Pada saat itu ia telah menyuarakan pluralisme agama dengan menyatakan: “Rasanya toleransi agama hanya akan tumbuh di atas dasar paham kenisbian (relativisme) bentuk-bentuk formal agama ini dan pengakuan bersama akan kemutlakan suatu nilai yang universal, yang mengarah kepada setiap manusia, yang kiranya merupakan inti setiap agama”.<sup>119</sup>

Kemunculan JIL di Indonesia berawal dari perkumpulan antara Ulil Abshar Abdalla (Lakpesdam NU), Ahmad Sahal (Jurnal Kalam), dan Goenawan Mohamad (ISAI) di Jalan Utan Kayu 68 H, Jakarta Timur, Februari 2001. Tempat ini kemudian menjadi markas JIL. Para pemikir muda lain, seperti Lutfi Asyyaukani, Ihsan Ali Fauzi, Hamid Basyaib, dan Saiful Mujani, menyusul bergabung.

Dalam perkembangannya, Ulil disepakati sebagai koordinator. Semangat dan gelora JIL banyak diprakarsai anak muda, usia 20-35-an tahun. Mereka umumnya para mahasiswa, kolonnis, peneliti, atau jurnalis. Tujuan utamanya: menyebarkan gagasan Islam liberal seluas-luasnya. Oleh karena itu mereka (Ulil dkk) memilih membentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik.<sup>120</sup>

JIL mendaftarkan 28 kontributor domestik dan luar negeri sebagai “juru kampanye” Islam liberal. Mulai Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Jalaluddin Rakhmat, Said Agiel Siradj, Azyumardi Azra, Masdar F. Mas’udi, sampai Komaruddin Hidayat. Di antara kontributor mancanegaranya: Asghar Ali Engineer (India), Abdullah Ahmed an-Na’im (Sudan), Mohammed Arkoun (Prancis), dan Abdallah Laroui (Maroko).<sup>121</sup>

Adapun di antara tokoh muda liberal yang kontroversial dan memicu pertentangan di kalangan umat Islam adalah:

---

<sup>119</sup> Adiyani Husaini dalam makalah Islam Liberal dan misinya menukil dari Greg Barton.

<sup>120</sup> [www. islamlib.com](http://www.islamlib.com).

<sup>121</sup> Jaringan tersebut menurut website ([www.islamlib.com](http://www.islamlib.com)) menyediakan koran, radio, buku, booklet, dan website, untuk mengungkapkan pandangannya pada publik. Kegiatan pertamanya adalah diskusi maya (*milis*). Lalu sejak 25 Juni 2001, JIL mengisi rubrik Kajian Utan Kayu di Jawa Pos Minggu, yang juga dimuat 40-an koran. Isinya artikel dan wawancara seputar perspektif Islam liberal.. [www. islamlib.com](http://www.islamlib.com).

a. Ulil Abshar Abdalla

Ia menolak penafsiran agama yang tidak pluralis atau bertentangan dengan demokrasi yang menurutnya berpotensi merusak pemikiran Islam. Ia mengkritik MUI telah memonopoli penafsiran Islam di Indonesia, terutama karena fatwa yang menyatakan bahwa Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme adalah ideologi sesat.

Hal kontroversial yang pernah diungkapkan adalah “Ulil Abshar juga pernah menyebutkan kalau mukjizat Nabi Musa membelah laut sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran adalah *dongeng*.”

“Kisah tentang penyebrangan Musa di Laut Merah, misalnya, atau banjir Nuh, adalah kisah-kisah yang sulit dipercayai sebagai sesuatu yang pernah terjadi secara faktual. Kisah-kisah itu sebaiknya dipahami secara metaforis saja” (Menyegarkan kembali pemikiran Islam hal 67).<sup>122</sup>

Perilaku kontroversial Ulil yang terbaru adalah Melalui akun JILnya Ulil Abshar Abdalla mengatakan tentang bagi pembenci kaum lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT), setidaknya mesti ingat: komputer yang kalian pakai adalah hasil temuan Alan Turing, seorang *gay* dari Inggris”.<sup>123</sup>

b. Sumanto al-Qurtubi.

Tokoh Islam liberal. Alumnus Fakultas Syariah IAIN Semarang ini terkenal dengan ide-ide liberalnya yang sangat berani. Sumanto adalah doktor bidang antropologi politik dan agama di Boston University Amerika Serikat. Di sebuah Jurnal yang terbit di Fakultas Syariah IAIN Semarang, *Justisia*, ia pernah mengusulkan agar sejumlah ayat al-Quran diamandemen. Belakangan, kaum liberal di Indonesia, semakin terbuka melontarkan wacana perlunya proses “Desakralisasi al-Quran”. Dukungan praktik seks bebas, asal dilakukan suka sama suka, tanpa paksaan. Sumanto al-Qurtubi juga menulis buku, yang dikatakan banyak orang sebagai penistaan terhadap agama “*Lubang Hitam Agama; Mengkritik Fundamentalisme Agama, Menggugat Islam Tunggal*” buku tersebut juga mendapatkan pengantar dari Ulil Abshar Abdalla.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> <https://firanda.com/1344-menurutnya-allah-sang-pendongeng-perspektif-ulil-sang-liberal.html>

<sup>123</sup> [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com).

<sup>124</sup> Muktamar NU ke-13 menolak keras gagasan Islam Liberal; Asrama Haji Donohudan Boyolali, tempat berlangsungnya muktamar NU ke-31 menjadi saksi bisu atas bangkitnya arus konservatisme ormas islam yang berbasis masa tradisional ini. Di setiap sudut di arena muktamar terpampang poster, spanduk,



Sumanto al-Qurtubi melalui akun *Facebook*nya menyatakan kebanggaannya menjadi staf pengajar di Saudi negeri Wahabi tepatnya kampus King Fahd University of Petroleum and Minerals. Pria yang mengaku bercita-cita “MengIndonesiakan Arab”.<sup>125</sup>

c. Abdul Moqsith Ghazali.

Dalam buku *Metodologi Studi al-Qur'an*<sup>126</sup> JIL menawarkan sebuah metode dan pendekatan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an. Dalam buku ini, ada beberapa hal yang menarik untuk kita kaji. Pertama, terkait cara memandang al-Qur'an; kedua, terkait metode bagaimana menafsirkan al-Qur'an; dan ketiga, terkait tujuan dan hasil penafsirannya.

Pertama, terkait cara memandang al-Qur'an. Menurut JIL, agar al-Qur'an bisa dipahami dengan tepat, maka ia harus dikaji secara historis.<sup>127</sup> Oleh karena itulah maka JIL memahami teks al-Qur'an dalam konteks historisnya, yaitu pada waktu ia diwahyukan (*process of revelation*), ditulis (*process of codification*) dan disebarkan (*process of dissemination*). Menurut JIL, wahyu seharusnya jangan dipandang sebagai teks yang sempurna pada saat ketika ia

---

brostur dan selebaran-selebaran yang isinya mengecam gagasan islam liberal yang dianggap membahayakan otoritas dan otentisitas islam sebagai “agama langit”. Selama berlangsungnya muktamar, terutama di forum masa'il diniyah (persoalan keagamaan) telah terjadi pengadilan pemikiran terhadap islam liberal yang mereka anggap sebagai ide sesat dan menyesatkan. Akhirnya para kiyai NU menolak keras gagasan islam liberal yang kebanyakan diusung kaum muda NU cultural serta menyerukan agar struktur NU bersih dari “orang-orang NU liberal” (Sumanto al-Qurtubi, *Lubang Hitam Agama*, hal. 29). <http://lppi-jakarta.blogspot.com/2015/05/kutipan-dari-buku-lubang-hitam-agama.html>

<sup>125</sup> [www.islamlib.com](http://www.islamlib.com).

<sup>126</sup> Buku tersebut ditulis oleh tiga pemikir dan aktivis JIL, yaitu: Abd Moqsith Ghazali, Luthfi Assyaukanie, and Ulil Abshar-Abdalla. Lihat *Metodologi Studi al-Qur'an* (Jakarta: Gramedia, 2009). Selain dari buku ini, sebelumnya JIL juga sudah menerbitkan beberapa buku, di antaranya: *Wajah Liberal Islam di Indonesia* (Jakarta: JIL, 2002), yang diedit oleh Luthfi Assyaukanie; dan *Ijtihad Islam Liberal: Upaya Merumuskan Keberagamaan yang Dinamis* (Jakarta: JIL, 2005), yang diedit oleh Abd Moqsith Ghazali.

<sup>127</sup> Bagi JIL, historisitas al-Qur'an ini didasarkan pada empat hal: pertama, Tuhan telah memilih bahasa manusia (Arab) sebagai alat komunikasi antara Tuhan dan Muhammad; kedua, keterlibatan Nabi Muhammad sebagai penerima dan sebagai penafsir telah sama-sama menentukan proses pengujaran dan tekstualisasi al-Qur'an; ketiga, prinsip graduasi (*tajrid*) yang digunakan oleh al-Qur'an dalam mengejawantahkan ajarannya; dan keempat, sejak turunnya (*tanzil*), al-Qur'an telah berdialog dengan realitas. Lihat Abd Moqsith Ghazali, et.al., *Metodologi Studi Al-Qur'an*, h.142-144.

diturunkan. Setiap kitab suci adalah hasil proses panjang pengumpulan, pengeditan, modifikasi dan kodifikasi dari bentuk awalnya yang terserak sampai pada bentuk akhirnya seperti yang kita ketahui sekarang ini.<sup>128</sup>

Kedua, terkait metode bagaimana menafsirkan al-Qur'an. Berdasarkan pada kajian atas hakikat dan historisitas teks al-Qur'an, maka JIL seakan "meragukan" keabsolutan teks al-Qur'an. Oleh karena itulah maka JIL kemudian menyarankan untuk menafsirkan al-Qur'an secara substansial, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ethico-legis (semangat etis) dari al-Qur'an sebagai pusat edar penafsiran. Sambil menolak pemahaman literal-tekstual<sup>129</sup> terhadap al-Qur'an, JIL menawarkan apa yang mereka sebut dengan penafsiran di balik teks (*beyond text interpretation*).

Ketiga, terkait tujuan dan hasil penafsirannya. Dari metodologi dan hasil-hasil ijtihad JIL dalam beberapa buku dan websitenya, terlihat jelas bahwa tujuan dan kepentingan penafsiran mereka, sesuai dengan misi awal kelahirannya, adalah ingin menampilkan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam liberal, yaitu kebebasan, liberalisme, sekularisme, kesetaraan gender, dan demokrasi.<sup>130</sup>

Adapun sikap NU terhadap JIL, NU tetap menolak pandangan maupun ajaran Jaringan Islam Liberal (JIL). Juru Bicara Forum Kiai Muda (FKM) Jawa Timur KH Abdullah Syamsul Arifin mengatakan dengan tegas bahwa NU secara institusi tidak sepakat dengan ajaran JIL yang diajarkan oleh Penggerak JIL Ulil Abshar Abdalla. "Terdapat tiga poin ajaran Ulil yang tidak sesuai dengan konteks ideologi NU. Ketiga ajaran tersebut antara lain, 1. Pernyataan bahwa semua agama itu benar, 2. Desakralisasi Al Qur'an, 3. Deuniversalisasi Al Qur'an. Kami sangat bertolak belakang dengan ajaran JIL karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. NU tidak memiliki kaitan apapun dengan JIL. Ajaran yang dianut pun jauh berbeda. Sikap tegas NU terhadap JIL sudah terlihat nyata saat diadakannya Muktamar NU 2004 di Boyolali dan Munas NU 2006.

---

<sup>128</sup> Abd Moqsih Ghazali, et.al., *Metodologi Studi Al-Qur'an*, h. 70

<sup>129</sup> Penafsiran Tekstualis adalah penafsiran yang mendasarkan pada makna literal teks al-Qur'an. Penafsirannya terutama didasarkan pada analisis kebahasaan daripada analisis historis. Pendekatan ini dilandaskan pada keyakinan bahwa bahasa al-Qur'an memiliki rujukan yang konkrit dan tidak berubah, serta makna yang cocok bagi segala konteks zaman. Lihat Abdullah Saeed, *The Qur'an: Introduction*, h. 220.

<sup>130</sup> Cucu Surahman, "Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudud", *Journal of Qur'an and Hadith Studies* – Vol. 2, No. 1 (2013), h. 63-86.

NU menganggap ajaran JIL telah menyimpang dari *Ahl al-Sunnah Wa al-Jamā'ah*. Ajaran yang disampaikan para tokoh Islam Liberal merupakan wacana kosong belaka. Sebab saat ditanyai mengenai tiga poin ajarannya tersebut, para tokoh Islam Liberal tidak bisa menjelaskan dalil-dalil yang dipakainya dengan baik dan lengkap. Tokoh Islam Liberal hanya mengutip dalil itu sepotong-sepotong untuk mendukung pemikirannya saja. Ada dalil yang dikutip tidak lengkap. Terkait dengan adanya kabar yang mengatakan bahwa terdapat anggota NU yang juga anggota JIL, Abdullah mengatakan, secara ideologi jika ada anggota NU yang masuk JIL berarti dia sudah keluar dari NU.

Masykuri Abdillah sebagai salah satu ketua PBNU di eranya Hasyim Muzadzipun menambahkan sekaligus menegaskan bahwa JIL itu tidak di inspirasi oleh NU dan tidak ada kaitannya dengan NU, baik dari tokoh-tokohnya maupun kitab-kitab rujukannya bukanlah bersumber dari NU. Di eranya pak Hasyim, PBNU jelas menolak JIL karena itu juga tidak ada kaitannya dengan dakwah NU dan tidak pernah masuk kepada kebijakan NU. Mereka hanya termotivasi dengan uang dan menggunakan NU sebagai proyek.<sup>131</sup>

Jeremy Menchik, telah melakukan survei tahun 2010 tentang para pemimpin cabang, dan penelaahan terhadap pandangan para pengikut NU, dan para pemimpinnya, menyimpulkan bahwa banyak pemimpin NU yang “toleran” tetapi tidak liberal.<sup>132</sup>

### 3. NU Garis Lurus (terkena warna Wahabisme)

Diskursus wacana publik di kalangan NU merambah ke fenomena panas. Banyak orang NU dibuat terpana munculnya arus garis purifikasi Aswaja dari kalangan Nahdliyin, seperti munculnya fenomena Gus Najih Maimun yang mengkampanyekan Daulah Islamiyah dalam tulisan-tulisannya, Gus Luthfi Bashori yang mengklaim memperjuangkan NU Garis Lurus, Kyai Idrus Ramli yang sudah berani menyesatkan KH. Abdurrahman Wahid dan Bu Hj. Shinta Nuriyah dalam video yang diunggah web NU Garis Lurus; dan munculnya web anonim NU Garis Lurus di luar web Gus Luthfi Bashori yang juga membawa jargon NU Garis Lurus.

NU Garis Lurus adalah fenomena arus pemurnian Aswaja yang tumbuh di kalangan Nahdliyin, baik yang ada di [www.nugarislurus.com](http://www.nugarislurus.com) ataupun, situs [www.pejuangislam.com](http://www.pejuangislam.com)., terlepas tidak dimunculkannya pengelola situs [www.nugarislurus.com](http://www.nugarislurus.com). Arus ini di antaranya digulirkan dalam wacana publik oleh

---

<sup>131</sup> Diskusi dengan Masykuri Abdillah, Senin, 02 Januari 2021 di Puri Laras 1 Ciputat.

<sup>132</sup> Jeremy Menchik, *Islam Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*, (New York City, New York: Cambridge University Press, 2016).

Gus Luthfi Bashori. Substansi isinya juga tidak berbeda jauh dengan apa yang dikampanyekan dalam situs [www.pejuangislam.com](http://www.pejuangislam.com) yang diasuhnya, meskipun di bagian-bagian tertentu, [www.nugarislurus.com](http://www.nugarislurus.com) lebih keras dan serampangan.

Munculnya NU Garis Lurus ini bersamaan dengan akan diselenggarakannya muktamar NU di Jombang pada akhir tahun ini.<sup>133</sup> Beberapa pembacaan lain bisa dilakukan terhadap NU Garis Lurus dengan mempertimbangkan beberapa hal. Mereka yang jeli akan melihat berita-beritanya mengarah pada arus untuk menjatuhkan kalangan NU yang banyak bersentuhan dengan KH. Abdurrahman Wahid (dan secara tidak langsung kepada KH. Achmad Shidiq), Gus Mus, Aqil Siradj, dan lain-lain yang benar-benar orang NU. Caranya bahkan sangat frontal dan vulgar, termasuk dengan memanfaatkan sang pemukul, Ust. Idrus Ramli untuk menyesatkan Gus Dur dan Bu Sinta Nuriyah Wahid yang betul-betul orang NU; dan menuduhkan Gus Mus sebagai punggawa pesantren liberal. Pada sisi yang lain ada berita-berita yang mengunggulkan dan memuji-memuji salah seorang tokoh yang hendak mencalonkan Rais Am PBNU.

Dari situ, ada dua kemungkinan yang bisa dibaca: NU Garis Lurus ini ada hubungannya dengan salah satu calon yang ingin mencalonkan menjadi pimpinan NU itu, dan karenanya salah satu calon mengakumulasi seluruh potensi perlawanan untuk menjatuhkan lawannya dengan cara-cara kotor, serampangan, vulgar, dan forntal, sembari dia bersembunyi. Dalam pepatah, calon ini lempar batu sembunyikan tangan. Akan tetapi karena berita-berita dan apa yang dimuat di N U Garis Lurus lebih dalam dari sekadar untuk kepentingan muktamar; lebih berkaitan dengan arus purifikasi Aswaja dan *dawlah islāmiyyah*, maka calon ini dengan sendirinya adalah bagian dari koneksi itu. Muktamar NU hanya salah satu bagian di mana mereka akan bertarung dan mencoba peruntungan.

Namun kemungkinan lain, NU Garis Lurus ini tidak berhubungan dengan salah satu calon, tetapi orang-orang yang mengelola NU Garis Lurus sadar bahwa kepentingannya bisa bertemu dengan salah satu calon yang diunggulkan dan dipuji-puji dalam berita-berita NU Garis Lurus, sembari menghabisi Gus Dur, Gus Mus, KH. Said Aqil Siradj, dan lain-lain. Muktamar NU hanya menjadi salah satu kanal saja, tetapi proyeksi yang sesungguhnya adalah meresahkan masyarakat NU, membentuk arus *dawlah islāmiyyah* di tubuh NU, dan menjadikan generasi Nahdliyin sibuk berurusan dengan soal-soal sektarian.

---

<sup>133</sup> Menurut Masykuri Abdillah, munculnya NU garis lurus ini sebenarnya sudah ada semenjak eranya Hasyim Muzadzi. NU garis lurus ini terinspirasi dari NU sendiri, tokoh-tokoh NU dan kitab-kitabnya.

Dalam hal politik 2019 kemarin, NU garis lurus mendeklarasikan dukungannya pada Paslon Prabowo-Sandi.<sup>134</sup> Berlangsung di Surabaya, Minggu (10/1/2019), deklarasi kemenangan ini pun dilakukan dengan menghadirkan sejumlah ulama di Jawa Timur. Hadir pada kesempatan itu KH. Lutfhi Bashori selaku Imam Besar NUGL, KH. Idrus Ramli (Ketua Umum NUGL), Ust Abbas Duta Luar Negeri NUGL dan beberapa aktivis Pengurus NUGL dari beberapa daerah seperti Pasuruan, Malang, Jember dan Madura.

Acara tersebut berawal dari penyambutan terhadap kedatangan Ustadz Abbas R Mawardi Duta Besar Luar Negeri NUGL yang menetap di Brunei Darussalam. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh para aktivis NUGL untuk bertemu dan mendeklarasikan kemenangan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019.

"NU Garis Lurus sudah ada dan tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Sehingga, deklarasi ini sebagai bentuk peneguhan hati kami untuk bisa memenangkan Prabowo-Sandi di pilpres".<sup>135</sup>

Menurutnya:

"NU struktural boleh saja mendukung Kiai Ma'ruf, namun kami yakin kalangan kultural mendukung Prabowo-Sandi," tegasnya. "Kader nahdliyyin yang mendukung Prabowo-Sandi adalah yang berpikiran cemerlang, berbasis akal sehat, dan visioner. Apalagi, dengan ditopang dengan tokoh-tokoh muda," katanya. Pihaknya menilai hanya Prabowo-Sandi yang bisa mewujudkan kemaslahatan umat. "Dari sisi kepemimpinan, potensi meraup suara, merangkul generasi milenial, dan paham isu ekonomi ada pada sosok Prabowo-Sandi," tegasnya.<sup>136</sup>

Pengasuh Pesantren *Ribath Almutadla* Singosari ini menjelaskan bahwa NUGL merupakan organisasi yang didirikan dengan basis *Nahdliyyin* kultural. Menurutnya, jumlahnya jauh lebih banyak dibanding NU di struktur PBNU (NU Struktural). Berbeda dengan pihaknya, NU Struktural ia sebut mendukung Ma'ruf Amin,

---

<sup>134</sup> <https://surabaya.tribunnews.com/2019/02/10/deklarasi-dukung-prabowo-sandi-nu-garis-lurus-siap-gerus-suara-nu-kultural-untuk-maruf-amin>.

<sup>135</sup> Teges Luthfi Bashori, Imam Besar NUGL kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (10/2/2019).

<sup>136</sup> <https://surabaya.tribunnews.com/2019/02/10/deklarasi-dukung-prabowo-sandi-nu-garis-lurus-siap-gerus-suara-nu-kultural-untuk-maruf-amin>. Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi, 'NU Garis Lurus' Siap Gerus Suara NU Kultural untuk Ma'ruf Amin, Penulis: Bobby Constantine Koloway, Editor: Eben Haezer Panca.



mantan Rais Aam PBNU yang kini menjadi Cawapres dari Joko Widodo.

Yang diperjuangkan oleh *www.nugarislurus.com* ini adalah propaganda dan provokasi: untuk membuat arus pengentalan sektarianise anti Syi'ah, Ahmadiyah, dan kelompok-kelompok lain di dalam diskursus Nahdliyin; melecehkan tokoh-tokoh NU yang benar-benar berjuang untuk NU, seperti KH. Abdurrahman Wahid dan Gus Mus, dan juga pesantren-pesantren yang didedikasikan untuk membina kader-kader NU, seperti PP. Raudlatuth Thalibin, PP Dar at-Tauhid, PP Ciganjur, dan lain-lain; mengungkapkan eksistensi para penentang Pancasila di tubuh NU; dan ikut mengkampanyekan muktamar NU di Jombang dengan menyerukan saatnya NU menghancurkan orang-orang Syi'ah dan liberal di NU, dengan mengunggul-unggulkan dan pembelaan-pembelaan tertentu terhadap sosok. Hasyim Muzadi, di dalam beberapa tulisan *web* ini.

Dari rangkaian jalinan argumentasi, mereka ingin membuat arus *dawlah islāmiyyah* di tubuh NU dengan fondasi purifikasi Aswaja, dan dalam hal ini, mereka menampilkan tulisan-tulisan, video, wawancara, dan sejenisnya dari kalangan NU sendiri seperti Gus Najih Maemun, Gus Luthfi Bashori, Ust. Idrus Romli, dan sejumlah tokoh lain. Ada jalinan terpadu dari berbagai kampanye tulisan dan video yang ada di sini, yang ingin dibangun dengan mengarusutamakan *dawlah islāmiyyah* di tubuh NU dengan fondasi purifikasi Aswaja. Entah sadar atau tidak, orang seperti Gus Najih Maemun, Gus Luthfi Bashori, Ust. Idrus Romli, dan beberapa narasumber telah menjadi pemompa dan pemukul untuk memberikan jalan bagi arus *dawlah islāmiyyah* ini, meskipun dalam detil-detil mereka bisa saja berbeda.

Dari sudut *al-Nahdliyyah*, arus *dawlah islāmiyyah* di dalam NU Garis Lurus dan serapahan-serapahannya kepada tokoh-tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk NU, perlu dilihat kembali. Memang Aswaja bisa saja dipeluk oleh berbagai kelompok. Di Indonesia, Aswaja yang *Shāfi'iyyah* saja, di antaranya ada NW, al-Washliyah, Perti, dan lain-lain. Akan tetapi jelaslah bahwa setiap Aswaja belum tentu NU. Padahal setiap orang NU mesti dan harus berpijak untuk kepentingan NU dan masyarakatnya di tengah sistem sosial dan arus perubahan yang ada di Indonesia. Dalam hal itu, gagasan bukan semata untuk gagasan. Tetapi sejauh mana gagasan itu mampu bisa digunakan untuk membantu dan mengangkat derajat orang Nahdliyin, dengan optik luas dan jauh ke depan, yang kadang harus meliuk-liuk, tidak sekadar garis lurus.

Dari sudut *an-Nahdliyyah* juga, setiap orang yang merasa menjadi NU terikat oleh keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh organisasi NU kalau dia ingin membawa nama NU dan Nahdliyin, termasuk hasil-hasil *Baḥṡ al-Masā'il*

NU, keputusan Khittah NU, dan lain-lain. Kalau ada orang NU yang justru mengampunikan *dawlah islāmiyyah*, sebagaimana dalam NU Garis lurus yang mengatasnamakan NU dan bersebarangan dengan jamiyah NU yang telah menganggap NKRI final dan Pancasila syah sebagai dasar negara, jelaslah perlu diberi teguran. Bahkan dalam berbagai hal lain, tampak bersebarangan secara frontal, maka dapat diposisikan bahwa orang seperti ini dapat dipertanyakan dari sudut *al-Nahḍiyyah*-nya, walaupun bisa saja dianggap syah secara Aswaja, karena memang Aswaja bukan NU saja.

Dari sudut *al-Nahḍiyyah*, juga perlu dilihat bahwa Aswaja diterapkan dalam kondisi dan konteks di Indonesia, berliku-liku dan berbelok-belok. Dari sudut ini, kalau menganggap bahwa NU lurus itu seperti NU Garis Lurus atau seperti Gus Luthfi, Ust Idrus, dan Gus Najih dan tokoh lain yang menjadi pemukul di NU Garis Lurus misalnya, maka yang lain dianggap sebagai bengkok. Padahal justru NU Garis Lurus itu yang tidak memahami sejarah NU yang berbelok-belok, dan karenanya NU Garis Luruslah seben arnya yang menyempal dari tradisi sejarah NU. Sebab dalam perjalanan sebuah bangsa, berjalan lurus itu bisa saja menjadi seperti kuda, kepala batu, dicucuk hidungnya, pakai kacamata tebal, *nggak* boleh *noleh* kanan dan kiri, alias tidak canggih dalam melihat keadaan; dan sejarah NU itu jelas berbelok-belok seiring dengan situasi sosial dan politik.

*al-Nahḍiyyah* juga berarti *al-ukhuwwah al-Nahḍiyyah*, melengkapi *al-ukhuwwah al-Islāmiyyah*, *al-bashāriyyah* dan *al-waṭaniyyah*, dan ini penulis usulkan dimasukkan sebagai nilai-nilai yang mesti dihidupkan di kalangan NU. Dengan ini, memusuhi secara frontal orang-orang yang benar-benar hidupnya didedikasikan untuk masyarakat NU, seperti Gus Dur, Gus Mus, Said Aqil Siraj, NU Garis Lurus benar-benar perlu dipertanyakan dari sudut *al-ukhuwwah al-Nahḍiyyah*-nya. Karenanya, patut dipertanyakan ke-NU-annya, meskipun mereka mungkin telah membungkusnya dengan Aswaja.

Dari uraian singkat ini, umat Islam khususnya warga NU bisa menilai sendiri bagaimana karakteristik dan sikap NU Garis Lurus yang benar. Garis Lurus yang sesuai dengan perjuangan NU yakni sesuai dengan Khittah NU 1984, itulah Garis Lurusnya NU.

Menurut M. Alim Khoiri, warga NU tinggal di Kediri<sup>137</sup>, Paradigma “NU Garis Lurus” yang berusaha untuk ‘meluruskan’ NU dari faham-faham yang mereka anggap bengkok ini, sebetulnya sahsah saja. Hanya, masalahnya ada pada cara berdakwah. Jika kelompok “NU Garis Lurus” ini mengaku sebagai pewaris

<sup>137</sup>

<https://www.nu.or.id/post/read/58449/meluruskan-lldquonu-garis-lurusrdquo>.

perjuangan dakwah Sunan Giri, maka mestinya mereka berkaca pada beliau dalam beberapa hal;

Pertama, sejarah mencatat bahwa, dakwah Sunan Giri banyak melalui berbagai metode, mulai dari pendidikan, budaya sampai pada politik. Dalam bidang pendidikan misalnya, beliau tak segan mendatangi masyarakat secara langsung dan menyampaikan ajaran Islam. Setelah kondisi dianggap memungkinkan beliau mengumpulkannya melalui acara-acara seperti selamatan atau yang lainnya, baru kemudian ajaran Islam disisipkan dengan bacaan-bacaan tahlil maupun dzikir. Dengan begitu, masyarakat melunak hingga pada akhirnya mereka memeluk Islam. Kanjeng Sunan Giri tidak mengenal metode dakwah dengan cara mencela atau bahkan menghina.

Kedua, dalam bidang budaya kanjeng Sunan Giri juga memanfaatkan seni pertunjukan yang menarik minat masyarakat. Beliau juga dikenal sebagai pencipta tembang *Asmaradhana*, *Pucung*, *Cublak-cublak suweng* dan *Padhang bulan*. Lalu tentu saja beliau masukkan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Itu semua dilakukan kanjeng Sunan demi tersebarnya ajaran Islam yang damai. Kanjeng Sunan -sekali lagi- tidak mengajarkan metode berdakwah dengan saling mencemooh atau menghujat mereka yang tak sependapat.

Ketiga, di bidang politik, kanjeng Sunan Giri dikenal sebagai seorang raja. Dalam menjalankan kekuasaannya, beliau tak pernah berlaku otoriter dan semaunya sendiri. Beliau selalu menggunakan cara-cara persuasif untuk menarik minat masyarakat terhadap ajaran Islam. Beliau tidak mencontohkan strategi dakwah dengan cara mencaci maki mereka yang tidak sefaham.

#### Konteks Global dan Lokal

Arus *dawlah islāmiyyah* di kalangan NU ini juga bisa dilihat dengan melihat konteks global dan lokal. Penting ini dilihat, meskipun bisa saja mereka yang menjadi pemukul dalam NU Garis Lurus berargumentasi bahwa yang dilakukannya sebagai wacana ilmiah. Kalaupun ini dianggap benar, posisi ini justru menempatkan mereka dalam arus kenetralan pengetahuan, seakan steril dan sebagai murni kegelisahan individual. Padahal madzhab seperti ini dipegangi kaum positivistik di kalangan dunia barat, disenangi kaum liberal barat.

Sementara mereka sendiri melawan Islam liberal, jadi tampak kenaifannya di titik ini. Belum lagi mereka memiliki proyek pemurnian Aswaja yang di kalangan gerakan pemurnian saja, ini sudah terbukti gagal, adalah titik kritis lain. Oleh karena itu, dapatlah dibaca, mereka secara sadar atau tidak, dengan kenaifan-kenaifannya, keterbatasan-keterbatasan bacaannya tentang

Indonesia dan dunia, justru berani dengan lantang digambarkan NU Garis Lurus, akan memetakan fondasi bagi jalan *dawlah Islāmiyyah* di NU, di tengah situasi yang kompleks di aras global dan lokal.

Penting kemudian melihatnya dari sudut konteks global dan local munculnya arus *dawlah Islāmiyyah* di NU. Dalam konteks global, di timur tengah sedang gencar-gencarnya terjadi tragedi negara-negara yang akan mengalami kemunduran drastis dalam beberapa generasi ke depan: Suriah, Irak, Mesir, Lebanon, Suriah, Palestina, dan lain-lain. Di Suriah dan Irak, orang-orang Sunni yang terjebak dalam pusaran wilayah yang dikuasai kelompok petempur salafi-wahhabi justru yang menjadi korban: dari kalangan salafi-wahhabi mereka tidak akan dipercaya, karena mereka bukan wahhabi; dan dari negara nasional Irak Suriah, mereka dianggap membantu ISIS. Padahal sejatinya yang bertempur adalah negara-negara nasional yang sedang berubah karena dua poros bertarung antara Arab Saudi dkk melawan poros Iran untuk memperebutkan pengaruh politik, dan penataan ulang penguasaan ulang gas-gas bumi; dan AS- Rusia di poros globalnya.

Permusuhan sektarian digunakan *anasir-anasir* yang ada dalam peperangan ini oleh kampanye wahhabi-Saudi sebagai perang Sunni-Syi'ah. Faktanya, justru orang-orang Sunni seperti Syaikh Ramadhan al-Buti mendukung negara nasional, di dalam pemerintah nasional Suriah, dan terbunuh oleh sebuah bom yang dilakukan di masjid ketika ia mengajar; dan orang-orang Sunni di Irak mendukung pemerintah nasional Irak dari kalangan Kurdi, Turkmen, dan Arab, kontras dengan kampanye yang disebarkan kaum salafi-wahhabi di Irak bahwa Sunni melawan Syiah atau Syiah melawan Sunni. Faktanya, pemerintah nasional di Suriah dan Irak sedang bertempur dengan pemberontak yang didukung awalnya oleh negara-negara tetangga; dan yang mendukung pemerintah nasional mereka itu banyak sekali dari kalangan Sunni.

Melihat konteks lokal, ada dua hal penting:

1. Di Indonesia arus NII formal telah pupus, tetapi anak cucu mereka dalam beragam faksi masih terus muncul; dan kelompok yang menginginkan negara Pancasila diganti dengan negara Islam masih ada, baik yang terlibat dalam partai politik ataupun yang tidak terlibat. Kelompok-kelompok ini, hanya akan mungkin bisa berjuang lebih keras, manakala NU bisa ikut mendukung agenda negara Islam dan khilafah. Di tengah situasi seperti ini, mereka menyadari bahwa berhadapan secara frontal dengan kalangan NU, yang sudah banyak para aktivis, kalangan terdidik, dan kiai-kiai cangguh yang terintegrasi dengan negara Pancasila, akan sangat kesulitan. Cara paling memungkinkan adalah bagaimana

membentuk arus *dawlah Islāmiyyah* di NU dari dalam NU sendiri, dengan memanfaatkan kitab kuning dan Aswaja; bertujuan untuk mengiris NU.

2. Kekuatan sesungguhnya di Indonesia sebenarnya adalah: kelompok perusahaan transnasional, tentara, Islam, dan nasionalis; sementara partai politik hanya sebagai wujud tertentu dari pertarungan ini. Di kalangan Islam, kekuatan bersenjata yang ingin menabalkan arus *dawlah Islāmiyyah* telah dilumpuhkan secara meyakinkan dengan hancurnya NII pada 1962. Kelompok NII baru dalam generasi teroris dan lain-lain, hanya sebagai riak-riak yang tidak akan pernah menjadi arus besar *dawlah Islāmiyyah*. Dari sudut ini, yang tersisa dari kekuatan arus Islam adalah kekuatan gagasan yang muncul dari Islam, sementara kekuatan ekonomi dan politik telah lemah, hancur.

NU dalam hal itu memiliki potensi kuat secara ekonomi, pendidikan, dan gagasan. Kuat secara ekonomi dan pendidikan, karena NU mendukung negara nasional Pancasila dan memungkinkan ia terlibat dalam proses membangun dan memperoleh manfaat dari pembangunan. Kalau mau jujur, sebenarnya kekuatan NU itu hanya tinggal dari sudut kultural-pesantren, kemungkinan besar membangun jaringan ekonomi-pendidikan, dan munculnya lapisan terdidik yang luas. Dengan kekuatan NU seperti ini, kelas terdidik NU akan memungkinkan mengkonsolidasikan basis ekonomi, gagasan pengetahuan, gerakan sipil, politik, pendidikan, dan lain-lain.

Ketika ditanya mengenali NU garis Lurus dan Kiri, Said Aqil Siroj menjawabnya dengan tenang namun pasti dengan mengatakan:

“Abaikan saja, itu hanya segelintir orang yang mengatakan, masa kalah dengan fatayat atau anshor yang menganggap garis lurus itu mereka sendiri, kita gak ada garis lurus, garis bengkok, secara resmi NU hanya 1 dengan jaringan RMI (*Rabīṭah Ma’had Islāmiyyah*), Fatayat, Muslimat, Anshor, itukan tangan-tangannya NU, dan yang mengatakan NU garis lurus ya mereka sendiri, masa mau terpengaruh? Yang mengatakan itu hanya beberapa orang, hanya segelintir orang masa mau terpengaruh dengan itu? mau di perhitungkan. Menurut *You*? Itu diperhitungkan? Ya Enggalah, Anshor, Fatayat, Muslimat, RMI, Ma’arif, *Ṭarīqah* dsb masa terganggu dengan segelintir orang?

Said Aqil menambahkan :

“ Jangan membandingkan dengan *small group*, *very very small*, *koyok banyu segelas dibandingkan dengan lautan*, *gak usah di gubris dan Abaikan saja*, karena itu hanya segelintir



orang yang mengatakannya, masa kalah dengan fatayat atau ansornya). NU itu besar, kenapa terganggu dengan Gus Najih, Lutfi Bashori, Abuya Yahya, berapa orang sih? Terserah mereka saja: saya tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan sama saja dan tidak memberikan pengaruh.<sup>138</sup>

#### 4. NU Moderat

Moderat diartikan sebagai sikap atau pandangan yang selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem, atau berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. (KBBI, 589). Jika kita melihat definisi moderat pada kamus bahasa Inggris, maka akan dijumpai kata moderate yang bermakna 1) *average in amount, intensity, quality, etc; not extreme* (rata-rata dalam jumlah, intensitas, kualitas, dan lain-lain; tidak ekstrem); misalnya jumlah yang tidak banyak atau sedikit, kualitas yang tidak bagus atau jelek, intensitas yang tidak sering dan tidak pula jarang, dan seterusnya; 2) *of or having (issu political) opinionsthat are not extreme* (pandangan politik yang tidak ekstrem; misalnya pandangan politik yang tidak ekstrem kiri tau ekstrem kanan; 3) *keeping or kept within limits that are notexcessive* (menjaga dalam batas-batas yang tidak berlebihan); makan atau minum dalam batas-batas yang tidak berlebihan.<sup>139</sup>

Diskursus tentang moderatisme telah menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat di kalangan cendekiawan Muslim Indonesia. Dengan mengutip pendapat Azyumardi Azra dan Ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin yang menjelaskan bahwa istilah Islam moderat memiliki padanan kata dengan istilah *ummatan wasaʿat* atau *al-din al-wasaʿat*, juga pendapat cendekiawan Iran Ali Syariati dan tokoh Muhammadiyah HAMKA, bahwa *al-din al-wasaʿat* berarti bahwa Islam berada di tengah antara esoterisme Kristiani dan eksoterisme Yahudi, pada akhirnya, Burhani memberikan penegasan bahwa istilah *al-din al-wasaʿat* seperti yang dimaksudkan dalam QS 2:143 mesti dimaknai sebagai *center* atau heart, yaitu agama yang menjadi pusat dan jantung peradaban.<sup>140</sup>

Di antara ciri utama Islam moderat antara lain, pertama, menerima demokrasi. Beberapa aktivis Islam membuang kata 'Barat', sedangkan yang lain menerima sebagian yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip *shūrā* dipandang sebagai

---

<sup>138</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>139</sup> Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 1994), h. 798.

<sup>140</sup> Ahmad Najib, "Islam Moderat Adalah Sebuah Paradoks", dalam Muhammadiyah Studies. *Jurnal Ma'arif*, Vol. 3, No. I. 2008.

sinonim bagi demokrasi. Kedua adalah dengan meyakini demokrasi sama artinya dengan menolak gagasan negara Islam yang dikendalikan para ulama. Oleh karena itu, para aktivis Islam moderat percaya bahwa tidak ada seorangpun yang memiliki hak bicara mewakili Allah. Ketiga, salah satu perbedaan utama antara Islam radikal dan moderat adalah sikap terkait masalah penerapan syariah. Bagi Islam moderat, tafsir tradisional terhadap syariah tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan tidak menghormati prinsip HAM. Keempat, menghormati hak-hak perempuan dan agama minoritas. *Kelima* adalah menolak terorisme dan kekerasan illegal (Hizbut Tahrir Indonesia).<sup>141</sup>

Karakteristik yang melekat dalam Islam Moderat inilah yang oleh Fazlurrahman disebut sebagai Islam Neo-modernis. Islam Neo-modernis berusaha berada di tengah dan menjembatani gap yang ada di antara kaum tradisional yang menolak modernitas dengan kaum modernis yang menelan mentah-mentah modernisme Barat. Gerakan neo-modernisme memperjuangkan bagaimana agar kaum Muslim mampu menghadapi tantangan dan peradaban modern dengan tetap berpijak pada khazanah Islam otentik. Sehingga Islam tetap, *ṣāliḥli kulli zamān wa makān*.<sup>142</sup> Bagi Rahman, neo-modernisme inilah prasyarat bagi kemajuan Islam saat ini.

Moderatisme merupakan sebuah istilah atau nomenklatur konseptual yang tidak mudah untuk didefinisikan. Hal ini karena ia menjadi istilah yang diperebutkan pemaknaannya (*highly contested concept*), baik di kalangan internal umat Islam maupun eksternal non-Muslim. Ia dipahami secara berbeda-beda oleh banyak orang, tergantung siapa dan dalam konteks apa ia didekati dan dipahami.<sup>143</sup>

Khazanah pemikiran Islam Klasik tidak mengenal istilah “moderatisme”. Tetapi, penggunaan dan pemahaman atasnya biasanya merujuk pada padanan sejumlah kata dalam bahasa Arab, di antaranya *al-tawassuṭ* (*al-waṣṭ*), *al-qisṭ*, *al-tawazzun*, *al-i’tidāl*, dan semacamnya. Oleh sejumlah kalangan umat Islam, kata-kata tersebut dipakai untuk merujuk pada modus keberagamaan yang tidak melegalkan kekerasan sebagai jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan teologis dalam Islam.

<sup>141</sup> Zakiyah Darajat, Muhammadiyah dan NU, *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 1, No.1, Januari 2017, h. 90.

<sup>142</sup> A. Pribadi dan M.Y. Haryono, *Post Islam Liberal*. (Jakarta: Gugus Press, 2002), h. 221.

<sup>143</sup> John L. Esposito, “Moderate Muslims: A Mainstream of Modernists, Islamists, Conservatives, and Traditionalists,” dalam *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. XXII, No. 3, Summer 2005, h. 12.

Sejumlah pengkaji Islam di Indonesia masih tetap pada pendirian bahwa Islam dinegeri ini terdiri dari versi keberagamaan moderat.<sup>144</sup> Posisi moderat ini diwakili, misalnya, oleh dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi ini dikelompokkan ke dalam versi moderatisme Islam karena ketidaksetujuannya dengan sikap dan pandangan keagamaan kalangan garis keras yang menggunakan cara-cara kekerasan, atau mentransformasi ruang publik secara revolusioner-radikal. Kedua organisasi ini juga sejak awal tidak setuju dengan negara Islam, isu laten yang disusung oleh kalangan Muslim garis keras. Bagi keduanya, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Pancasila sebagai asas ideologisnya, UUD 1945 sebagai basis konstitusinya, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyannya, dianggap sudah cukup mengakomodasi elemen-elemen substantif ajaran Islam moderat yang berbunyi *rahmatan li al-‘ālamīn*.

Dalam konteks nilai-nilai modernitas, NU dan Muhammadiyah tidak menunjukkan sikap perlawanan terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM.<sup>145</sup> Demokrasi adalah nilai universal yang tidak hanya dijumpai di negara-negara demokrasi maju seperti Eropa Barat dan AS, tetapi juga bisa digali dari ajaran Islam karena pada dasarnya Islam sejalan dengan demokrasi. Demikian pula dengan HAM, kedua organisasi ini secara umum menegaskan bahwa Islam sangat mengapresiasi HAM sebagai elemen penting dalam kehidupan umat manusia. Karena HAM pula, Islam terbukti mampu meninggalkan tradisi perbudakan pada masa lalu.

Moderasi atau *wasathiyah* adalah sikap di tengah-tengah, yang tak berlebihan, namun memegang teguh *mabadi al-Syariah* (prinsip-prinsip dalam Syariat). Hal ini sebagaimana dirujuk pada surah al-Baqarah; 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا...

“Dan yang demikian itu Kami telah menjadikan kalian (umat Islam) sebagai *umat* *wasatha* (umat pertengahan) agar kalian menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul

<sup>144</sup> Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context* (Jakarta: Equinox Publishing, 2006), h. 60-64.

<sup>145</sup> Masykuri Abdillah, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy* (Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co. KG, 1997). Lihat juga, Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000).

(Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kalian” (QS. Al-Baqarah: 143).

Menurut Tarmizi Tohor (Sekretaris Ditjen Bimas Islam) Disampaikan pada Dialog Nasional Keagamaan dan Kebangsaan,<sup>146</sup> menyebutkan ada empat prinsip Islam Moderat adalah:

- a) Semangat beragama (*rūḥ al-dīn*) sebagai semangat beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas;
- b) Semangat nasionalisme (*rūḥ al-waṭaniyyah*), mendorong semangat cinta NKRI;
- c) Semangat kebangsaan (*rūḥ al-‘aṣābiyyah*), semangat menjaga keragaman nusantara yang terdiri dari berbagai bahasa, budaya, dan agama;
- d) Ruh kemanusiaan (*rūḥ al-bashāriyyah*), semangat saling menghargai dengan sesama manusia.

Persoalan-persoalan pelik kebangsaan bisa diselesaikan tanpa pertumpahan darah. Masyarakat Indonesia tidak suka dengan sikap ekstrem (*taṭarruf*) yang biasanya sulit bernegosiasi dalam menyelesaikan persoalan. Karakter ekstrem hanya mengenal ”kalah” dan ”menang”. Sementara moderasi akan lebih mengedepankan *win-win solution*, semua merasa menang. Sikap demikian terekam dalam kearifan masyarakat Jawa sebagai *menang tanpo ngasorake*, menang tanpa merendahkan yang lain.

- a) Gerakan (*ḥarakah*) yang didasarkan pada semangat dakwah dan *amr ma’rūf nahyi munkar* yang dilandasi prinsip melakukan perbaikan-perbaikan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Gerakan dakwah dalam proses islamisasi di Indonesia dilakukan dengan mengedepankan kasih sayang (*bi al-ḥikmah wa al-maw‘izat al-ḥasanah*), tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma’rūf*) harus dilakukan dengan cara yang baik, demikian juga dengan mencegah kemungkaran (*al-nahyu ‘an al-munkar*) harus dilakukan dengan cara yang (tidak) mendatangkan kemungkaran baru (*bi ghayr al-munkar*). Inilah prinsip dakwah yang mendasari perkembangan Islam di Indonesia yang hingga kini dianut oleh 87,3 persen masyarakat Indonesia.
- b) Tradisi dan praktik keberagamaan (*al-‘amaliyah al-dīniyyah*), yang membuka ruang terjadinya dialog secara kreatif antara Islam dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Meskipun praktik-praktik keberagamaan memerlukan legitimasi dari sumber-sumber primer Islam, Al Quran dan Hadis, Islam di

---

<sup>146</sup> “Mengarusutamakan Islam Wasatiyah; Menyikapi Bahaya Hoax dan Fitnah bagi Kehidupan Keagamaan dan Kebangsaan” Batam, 17 – 19 Juli 2019.

Indonesia tidak serta-merta melarang tradisi dan amaliah Islam yang bertumpu penghormatan pada tradisi masyarakat. Tradisi atau budaya yang di dalam usul fikih disebut dengan *al-'urf* atau *al-'adat* tidak begitu saja diberangus, tetapi dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Praktik keagamaan demikian inilah yang kemudian menjadi tradisi keberagamaan masyarakat Indonesia.

c) Implementasi moderasi beragama

Paling tidak ada tiga kerangka implementasi moderasi beragama di Indonesia.

1) Moderasi yang terkait dengan komitmen bernegara.

Komitmen bernegara merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana kesetiaan pada konsensus dasar kebangsaan terutama terkait dengan penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, sikapnya terhadap tantangan ideologi yang berlawanan dengan Pancasila. Sebagai bagian dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam konstitusi dan regulasi di bawahnya. Jika seseorang kehilangan komitmen pada kesepakatan-kesepakatan berbangsa, bisa diduga orang tersebut kehilangan watak moderatnya.

2) Penguatan Toleransi (*Tasāmuḥ*)

Penguatan toleransi, baik toleransi sosial, politik, maupun keagamaan. Toleransi merupakan sikap untuk memberikan ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan kelembutan dalam menerima perbedaan. *A gree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) disertai dengan sikap *respect* (hormat), penerimaan (*acceptance*) orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, serta kemampuan berpikir positif dan percaya (*positive thinking and trustworthy*) terhadap orang yang berbeda adalah nilai-nilai penting yang ada dalam toleransi.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi. Sebab, demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa antara lain bisa diukur dari sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap



perbedaan, bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya.

Aspek toleransi tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, tetapi bisa terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya dan sebagainya.

### 3) Anti-radikalisme.

Radikalisme di sini dipahami sebagai suatu ideologi dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan/ekstrem. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk menyorot pihak yang tidak sepaham dengan mereka.

Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan social dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham / aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham / aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.

Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi radikalisme. Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berupaya kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai

ganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata '*radic*', sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. Ketiga adalah kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti 'kerakyatan' atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal.<sup>147</sup>

Ciri – ciri radikalisme lainnya yang perlu diwaspadai yaitu sebagai berikut :

- a) Selalu mengajak kembali langsung kepada Al-Qur'an dan Hadits, tanpa *ittibā'* (mengikuti) pendapat para ulama.
- b) Percaya bahwa perubahan (baik agama maupun negara) hanya bisa dilakukan secara menyeluruh (ekstrim/ melampaui batas kewajaran umum) dan dratis, tanpa cara damai dan bertahap.
- c) Karena itu, mereka sering memaksakan pemahaman ekstrim dengan menuduh orang lain sebagai bid'ah, kafir, sesat, neraka. Bahkan ingin mengubah moral masyarakat beragama dengan cara-cara *khawārijiyyah* (berontak), bukan *tajridiyyah* (bertahap, berproses). Tidak mengakui tradisi yang sudah mengakar, sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Radikalisme agama aturan agama tanpa kompromi norma dan budaya.
- d) Semangat beragamanya sangat tinggi, hingga menjadikan yang sunnah seakan seperti wajib, misalnya jenggot, cingkrang celana, brukut jilbab, dan lainnya. Sedangkan yang '*amaliyyah faḍā'iliyyāt*' (bersifat utama), dianggapnya *bid'ah* dan harus diijrahkan.
- e) Karena semangat tinggi pula, mereka tidak sungkan memaksakan kehendaknya dengan cara-cara memberangus aswaja atas nama teks ajaran Islam yang disebut paling murni. Ini yang membahayakan *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* karena meniru semangat Walisongo dan Kanjeng Nabi dalam menjalankan dakwah secara bertahap.

---

<sup>147</sup> Tarmizi Taher, et.al, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM IAIN), h. xvii – xviii.

- f) Mengklaim kebenaran Islam hanya ada di kelompoknya. Yang lain salah karena dianggap tidak sesuai sunnah Nabi dan Al-Qur'an.
- g) Suka mengedepankan buruk sangka karena merasa dirinya aman dari murka Allah (*ghaḍābillāh*) karena merasa dirinya paling benar sejagad akhirat.

Bagi NU moderasi Islam adalah Islam *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah* (Aswaja), Islam yang berbeda dengan bangsa lain) yang berpedoman kepada Al-Qur'an, Al-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyās. Dalam bidang akidah mengikuti mazhab Imam Abū Ḥasan Al-Ash'arī dan Imam Abū Manṣūr al-Matūrīdī; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Mazhab Empat (Ḥanafī, Mālikī, Shāfi'ī, dan Ḥanbalī); dan dalam bidang tasawuf mengikuti mazhab Imam al-Junayd al-Baghdādī dan Abū Ḥamid al-Ghazālī.

Bentuk operasionalisasi moderasi Islam adalah proses perwujudan nilai-nilai Islam melalui bentuk dakwah.

Tabel 12  
Ciri Islam Moderat

Ciri		Keterangan
1	<i>Iṣlāḥiyyah</i> (reformasi)	Pemikiran, gerakan, dan amalan yang dilakukan para Nahdliyin selalu berorientasi pada perbaikan. Pada aspek pemikiran, misalnya, selalu ada perkembangan di sana ( <i>taṭwīr al-fikrah</i> ), dan karena itu, pemikiran Islam Nusantara adalah pemikiran yang ditujukan untuk perbaikan terus.
2	<i>Akhlaqīyyah</i> (santun)	Segala bentuk pemikiran, gerakan, dan amalan warga Islam Nusantara dilaksanakan dengan santun. Santun di sini berlaku sesuai dengan etika kemasyarakatan dan kenegaraan serta keagamaan
3	<i>Tasāmuh</i> (toleran)	Bersikap toleran, respek kepada pihak lain. Sikap toleran ini tidak pasif, tetapi kritis dan inovatif

4	<i>Taṭawwu‘iyyah</i> (sukarela)	Kesukarelaan ini adalah dalam menjalankan pemikiran, gerakan dan amalan, Nahdliyin tidak boleh memaksakan pada pihak lain ( <i>lā ijbāriyyah</i> ). Artinya, orang NU harus memperhatikan hak-hak orang di luar NU. Secara internal, warga NU juga tak boleh bersikap fatalistik ( <i>jabbāriyyah</i> ), harus senantiasa berusaha dan berinovasi.
5	<i>Tawazzuniyyah</i> , (seimbang)	<i>Tawazzunniyyah</i> ini menimbang dengan keadilan. Prinsip <i>tawassuṭ</i> (moderat) dijadikan sebagai landasan dalam menggali hukum Islam, yakni memadukan antara wahyu dengan rasio, sehingga tidak terlalu “tekstualis” terpaku pada <i>al-nuṣūṣ al-shar‘iyyah</i> (al-Quran dan Hadis), juga tidak liar dalam menggunakan akal pikiran atau lepas dari wahyu. Kata <i>wasaf</i> diatas dapat di tafsirkan dengan makna baik dan adil. Imam Al-Qurthubi dalam kitabnya menafasirkan kata <i>wasaf</i> dengan makna adil dan ditengah-tengah karena sebaik baiknya sesuatu itu pada pertengahannya.
6	<i>Maṣlaḥah Mursalah</i>	Ghazali menegaskan, metode ini pernah digunakan para ulama untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang final, karena dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur’ân dan hadîth, serta menjadi payung bagi semua golongan dan etnis yang berbeda sehingga bisa menghindarkan bangsa ini dari bahaya disintegrasi (Abdul Moqsith Ghazali, 109-109)

7	<i>Istihsān</i>	Ghazali digunakan sebagai salah satu metodologi dalam praktik keberislaman di Nusantara mengingat dalil “apa yang dipandang baik oleh kebanyakan manusia, maka itu juga baik menurut Allah.
8	<i>al-‘urf</i>	Kaidah yang sering dipakai adalah <i>al-‘ādah al-muḥakkamah</i> (adat bisa dijadikan sebagai hukum) dan <i>al-thābit bi al-‘urf ka al-thābit bi al-naş</i> (sesuatu yang telah tetap menurut adat seperti sesuatu yang tetap menurut <i>naş</i> )

(Hasil Wawancara dengan Said Aqil Siraj, Agus Salim, Abdul Muiz Ali, Maria Ulfa, dan Khairul Anam)

Membiarkan radikalisme agama, dalam pandangan Said Agil Siraj sebagaimana disebutkan dalam buku *Meneguhkan Islam Nusantara, 2015*, itu sama artinya sengaja membiarkan pelanggaran demi pelanggaran kemanusiaan terus terjadi. Saat ini banyak kalangan yang mencoba merong-rong kekuatan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Gangguan besar dari luar, dari negara asing yang ingin memecah belah, juga dalam dari negeri sendiri, dengan banyaknya organisasi-organisasi keagamaan yang menginginkan berdirinya negara Islam dan mengkampanyekan khilafah bahkan melalui cara-cara kekerasan. Hal ini dapat membawa perpecahan, seperti yang terjadi di beberapa negara Timur-Tengah yang kondisinya sangat memprihatinkan.

Dalam hal dakwah, ada 3 ciri utama yang menjadi pegangan dakwah ahlussunnah NU:

- b) *al-Tawassuṭ* yakni memiliki sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, sebagaimana disarikan dari firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 143.
- c) *al-Tawazzun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits) sebagaimana dikemukakan dalam Qur'an Surat al-Hadid ayat 25.
- d) *al-I'tidāl* atau tegak lurus, yakni bersikap adil dan tidak berlaku dzalim kepada sesama manusia hanya dikarenakan



sikap kebencian sebagaimana terungkap dalam Qur'an Surat al-Maidah ayat 8.

Selain ketiga prinsip ini, golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Nahdlatul Ulama juga mengamalkan sikap *tasāmuh* atau toleransi. Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini.

Dari karakteristik dan sikap dasar NU di atas sudah sangat jelas dan gamblang bahwasanya memperjuangkan dakwah Islam dengan dibarengi cacian, makian, hinaan, tuduhan sesat menyesatkan bukanlah bagian diri seorang Nahdliyin yang berada di jalan lurus mengikuti risalah dakwah Rasulullah SAW. Dakwah yang diemban Rasulullah SAW adalah dakwah yang santun dan sejuk yang senantiasa mengedepankan ukhuwah yang dilandasi akhlakul karimah. Sebab Rasulullah SAW diutus adalah untuk memperbaiki akhlak ummat, “Sesungguhnya aku diutus, (tiada lain, kecuali) supaya menyempurnakan akhlak yang mulia”, sabda Rasulullah SAW.

Menurut M. Alim Khoiri:

“Kita sebagai warga NU mestinya bangga dengan NU tanpa harus ada embel-embel yang lain. NU adalah NU. Jikalau ada sekelompok orang yang mengaku NU berembel-embel, sejatinya bukan NU sebab NU adalah organisasi Islam yang sah yang dilindungi hukum perundang-undangan. Siapapun yang mengaku-ngaku sebagai NU dengan tambahan embel-embel lain”.<sup>148</sup>

Ia menambahkan ,

“Sebagai Nahdliyin juga mesti tahu bahwa sejak Mukhtar Nahdlatul Ulama tahun 1984, NU sudah mempunyai apa yang dikenal dengan Khittah NU. Arti dari Khittah itu sendiri adalah Garis Lurus. Jadi sudah lama NU berada di Garis Lurus. Jikalau ada yang sekarang mengatakan NU Garis Lurus, diragukan kelurusannya, padahal sudah berpuluh-puluh tahun silam NU sudah berada di jalur Khittah, jalur Garis Lurus. Ibarat mau naik kereta ya sudah ketinggalan jauh. Kita pun mesti tahu garis perjuangan dakwah Islam yang ditempuh NU sudah jelas, mempunyai karakteristik yang *al-Tawassuṭ*, *al-Tawazzun*, *al-I’tidāl*, dan sikap yang *Tasāmuh*. Dalam hal ini, NU

<sup>148</sup>

<http://www.muslimedianews.com/2015/03/inilah-karakteristik-dan-sikap-nu-garis.html>ixzz623j9Uhvy.

berdakwah bukan untuk menghukum atau memberikan vonis bersalah, tetapi mengajak masyarakat menuju jalan yang diridhai Allah SWT”.<sup>149</sup>

Menurut Hamami mengenai kelompok-kelompok kecil yang ada dalam NU seperti: NU garis Lurus, NU progresif liberal, NU struktural dan lain sebagainya kalau sebagai bagian dari penggambaran pemikiran pluralisme kritis itu tidak masalah. Seperti ungkapannya:

Progresif Liberal (aliran kiri baru didalamnya), NU jalan lurus, NU struktural, keberagaman NU dalam ke Indonesiaan (pluralisme kritis) ya tidak masalah, namun NU itu lebih cenderung ke moderasi sebagai jalan tengahnya dan yang dominan, karena NU liberal, NU jalan lurus, NU struktural inikan kecil-kecil semua dan dakwah NU yang sekarang itu tidak mencerminkan tentang aliran kiri baru tetapi lebih mencerminkan tentang moderasi beragama.<sup>150</sup>

#### E. Aktualisasi Dakwah dalam politik NU

Dalam Islam *concern* umat terhadap politik sudah muncul sejak awal lahirnya Islam. Pertikaian kaum muslimin dengan kaum musyrikin sangat tidak mungkin (mustahil) diatasi jika tidak menggunakan strategi atau politik. Tentunya politik yang dimaksud dalam Islam adalah politik yang beretika (bermoral), humanis dan tidak menghalalkan segala cara serta yang mengacu pada legalitas Islam (kaidah fiqih): “*Taşarruf al-imām ‘alā al-ra’iyyah manūṭun bi al-maṣlahah*”, bahwa kebijakan penyelenggara negara atas rakyat senantiasa harus mengedepankan kemaslahatan. Dengan demikian dinamika kehidupan suatu negara, standartnya dilihat efektifitas penyelenggara negara dalam mengimplementasikan aspirasi warganya.

Kekuasaan tertinggi sebetulnya ada ditangan rakyat, bukan ditangan presiden, atau perdana menteri. Karena jabatan politis bukanlah hadiah atau pun kebanggaan, namun tidak lebih sebagai amanah (kepercayaan) atau wakalah (perwakilan) dari rakyat. Oleh karena itu sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bukanlah di tangan para penyelenggara negara tetapi ditangan rakyat.

Dakwah dalam konteks tertentu harus dilakukan melalui kekuasaan, ketika penguasa memiliki otoritas sentralistik dalam masyarakat yang homogen. Berdakwah melalui kekuasaan merupakan salah satu strategi dakwah yang efektif dan sistematis. Kekuasaan

---

<sup>149</sup> <http://www.muslimedianews.com/2015/03/inilah-karakteristik-dan-sikap-nu-garis.html>ixzz623j9Uhvy.

<sup>150</sup> Hasil wawancara dengan Khamami di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jum’at, 14 Februari 2020, jam 11.00 WIB.

(*power*) tidak hanya sebatas kekuasaan politik dan birokrasi. Bisa juga kekuasaan dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Bisa dalam organisasi kemasyarakatan dan keagamaan dan lainnya. Di sinilah reaktualisasi dakwah perlu terus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan zaman. Tantangan dakwah Nusantara yang menghasilkan kearifan tradisi keagamaan lainnya dalam konteks kontemporer juga cenderung dipengaruhi oleh ideologi dan kekuasaan.

Said Aqil Siradj<sup>151</sup> mengatakan bahwa kemaslahatan dalam Islam diproyeksikan untuk memelihara tujuan syariat (hukum Tuhan), yakni meliputi lima prinsip universal (*kullīyyāt al-khams*): (1) menjamin kebebasan beragama (*hifẓ al-dīn*), (2) memelihara kelangsungan hidup (*hifẓ al-nafs*), (3) menjamin kreatifitas berfikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini (*hifẓ al-‘aql*). (4) menjamin pemilikan harta dan properti (*hifẓ al-māl*). Dan (5) menjamin keberlangsungan keturunan, kehormatan serta profesi (*hifẓ al-nasl- wa al-‘ird*). Aktualisasi lima prinsip tersebut dapat dikembangkan dalam kerangka hak-hak asasi manusia (HAM) serta pelaksanaan pemerintah yang demokratis. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk membenturkan nilai-nilai Islam dengan ratifikasi HAM maupun pemerintah sistem demokrasi.

Selama Orde Baru berkuasa, NU memberikan keteladanan bagi keseimbangan yaitu tampil sebagai oposisi terhadap orde baru. Sikap oposisional NU tersebut ikut menguatkan proses penumbangan rezim Soeharto yang cenderung otoriter dan represif. Dukungan NU dalam upaya melakukan perlawanan telah menggerakkan nalar oposisional guna mengukuhkan reformasi dan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan. Karenanya, sumbang sih NU dalam rangsang bangun wacana kebangsaan mempunyai legitimasi yang kuat.

Beberapa aktualisasi dakwah dalam politik NU antara lain:

1. Internal

Pemahaman dan penguatan nilai Aswaja (Islam Nusantara) di PTNU<sup>152</sup> sosialisasi dan pelatihan kurikulum Aswaja di PTNU, sekolah, dan pesantren. Penguatan Islam washatiyah di sekolah dengan tujuan merancang penguatan ajaran Islam *wasatīyyah* di sekolah untuk menangkal paham radikalisme.<sup>153</sup> Pelatihan MKNU

---

<sup>151</sup> Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan; Fiqih Demokratis Kaum Santri*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), h. 4.

<sup>152</sup> Laporan Banom dan Lembaga PBNU tahun 2019 dan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin II Purwakarta, 20-22 September 2019, *Konsolidasi NU Menuju Muktamar ke 34*, Program kerja LPTNU, h. 29.

<sup>153</sup> Laporan Banom dan Lembaga PBNU tahun 2019 dan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin II Purwakarta, 20-22 September 2019, *Konsolidasi NU Menuju Muktamar ke 34*, Program kerja Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, h. 34.

dan PKPNU dengan hasil kegiatan penguatan nilai ke NU an, baik secara fikrah, amaliyah, dan harokah, terbentuknya militansi guru aswaja dan merawat, menjaga, mendakwahkan ideology aswaja an-nahdhiyah dan Islam rahmatan lil'alam<sup>154</sup> dan menerbitkan buku Aswaja untuk Guru dan siswa.<sup>155</sup> Pengembangan dakwah *bi al-ḥāl*, *bi al-māl*, *bi al-qalam*, maupun *bi al-lisān* melalui majlis taklim.<sup>156</sup>

## 2. Eksternal

Pemahaman aswaja dan sosialisasi *manhaj-manhaj* aswaja bukan lagi di sekolah, dan pesantren tetapi melalui media sosial.

## 3. Lokal

Pemahaman aswaja dan sosialisasi *manhaj-manhaj* aswaja. Penguatan strategi kebudayaan Islam Nusantara dan Pengawasan, perlindungan dan pengembangan asset budaya Nusantara, seperti: pengumpulan dan inventarisir bahasa dan aksara daerah Nusantara, konversi dan penerjemahan kitab-kitab kuno dan prasasti Nusantara, pagelaran wayang kulit 1 Muharam, pelestarian dan pembelajaran penulisan Carakan Cirebon dan lain-lain. *Out put* para peserta mengetahui dan memahami tentang hakekat Islam Nusantara sebagai praktek beragama dengan basis sikap kebudayaan dan lokalitas di tengah era globalisasi. *Out come* yang di capai adalah tumbuhnya sikap nasionalisme dan berideologi pancasila.<sup>157</sup>

## 4. Nasional dan Pemerintahan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>158</sup> Tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlusunnah wal Jama'ah untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang berkeadilan demi

---

<sup>154</sup> Laporan Banom dan Lembaga PBNU tahun 2019 dan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin II Purwakarta, 20-22 September 2019, *Konsolidasi NU Menuju Muktamar ke 34*, Program kerja Lembaga Dakwah NU, hal. 171.

<sup>155</sup> Laporan Banom dan Lembaga PBNU tahun 2019 dan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin II Purwakarta, 20-22 September 2019, *Konsolidasi NU Menuju Muktamar ke 34*, Program kerja Persatuan Guru NU Tahun 2019, hal. 41-42.

<sup>156</sup> Laporan Banom dan Lembaga PBNU tahun 2019 dan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin II Purwakarta, 20-22 September 2019, *Konsolidasi NU Menuju Muktamar ke 34*, Program kerja PP Muslimat NU, hal. 125.

<sup>157</sup> Laporan Banom dan Lembaga PBNU tahun 2019 dan Rapat Pleno PBNU 2019 di Pondok Pesantren Al-Muhajirin II Purwakarta, 20-22 September 2019, *Konsolidasi NU Menuju Muktamar ke 34*, Program kerja Lesbumi PBNU, hal. 188.

<sup>158</sup> Pedoman, Aqidah dan Asas NU, Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU, (Jakarta: Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* PBNU, 2016), hal. 25-26.

kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.<sup>159</sup>

5. Internasional:

Mengembangkan Islam Aswaja NU dan Islam Nusantara ke internasional melalui pengiriman dai ke Luar Negeri (seperti Jepang, Belanda, Cairo Mesir),<sup>160</sup> gerakan dakwah Islam *rahmat li al-'ālamīn*, mengembangkan Islam Nusantara di negara-negara lain seperti Arab, Pakistan, Rusia dan lain-lain, mengembangkan Islam *Wasatiyyah*, pendirian PCI (seperti Malaysia, Australia, Singapura, Brunei, Thailand, Vietnam, Kamboja, Jepang, China, Hongkong, Selandia Baru dan lain-lain),<sup>161</sup> ICIS,<sup>162</sup> Mendamaikan Afganistan, memberikan beasiswa pendidikan UNUSIA.<sup>163</sup>

Menurut ketua umum PP Fatayat NU, Anggia Elmarini, sekretaris umum: Margaret Aliyatul Maimunah, Anisa Rahmawati, ketua bidang dakwah PP Fatayat NU Beberapa aktualisasi dakwah dalam politik NU melalui Fatayat NU.<sup>164</sup>

---

<sup>159</sup> Anggaran Dasar NU, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016), h. 25-27.

<sup>160</sup> Laporan Banom dan Lembaga PBNU tahun 2019 dan Rapat Pleno PBNU 2019 DI Pondok Pesantren Al-Muhajirin II Purwakarta, 20-22 September 2019, *Konsolidasi NU Menuju Muktamar ke 34*, Program kerja Lembaga Dakwah NU, h.171.

<sup>161</sup> Setidaknya, saat ini ada dua puluh lima lebih Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) yang tersebar di lima benua, mulai dari Negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Australia, dan benua Amerika. Sumber: <https://www.nu.or.id/post/read/78468/-diaspora-warga-nu-di-luar-negeri>.

<sup>162</sup> *Conference of Islamic Scholars* (ICIS) didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2004 sampai dengan Ahmad Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU periode 1999-2010) dan Dr. N. Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri Republik Indonesia periode 2001-2009). Ide pembentukan ICIS berasal dari momentum perubahan hubungan politik antara Islam dan Barat yang disebabkan oleh serangan 9 September 2001. Secara struktural, awalnya ICIS berada di bawah PBNU sebagai lembaga internasional yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi NU dan tokoh-tokoh muslim dunia untuk menanggapi isu-isu global. Namun, meski awalnya berdiri atas nama NU, semenjak kepemimpinan Said Aqil Siraj (2010-sekarang) ICIS dipisahkan secara struktural dari PBNU. Meski begitu, ide-ide dan gagasan yang disampaikan dalam ICIS adalah gagasan NU dan melibatkan tokoh-tokoh NU.

<sup>163</sup> Hasil wawancara dengan Khamami di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jum'at, 14 Februari 2020, jam 11.00 WIB.

<sup>164</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Umum PP Fatayat NU, Anggia Ermarini, Sekretaris Umum: Margaret Aliyatul Maimunah, Anisa Rahmawati, Ketua Bidang Dakwah PP Fatayat NU. Jum'at 03 Agustus 2019, di Hotel Sofyan, jam 13.30- 14.30 WIB.



1. Melakukan Penguatan Nilai-Nilai Aswaja Melalui Media Elektronik dan Media Sosial ;

Internalisasi Nilai-nilai Aswaja dan Penguatan Institusi Keluarga sebagai fondasi Ketahanan Bangsa dan Negara; Internalisasi Nilai-nilai Aswaja dan Penguatan Institusi Keluarga sebagai fondasi Ketahanan Bangsa dan Negara. Dengan Bentuk Kegiatan; Tayangan Fiqinita di Nova Chanel; Seminar Kebangsaan “Keluarga Masalah sebagai Fondasi Ketahanan Bangsa”; Workshop Modul Dakwah “Keluarga Masalah sebagai Fondasi Ketahanan Bangsa”.<sup>165</sup>

2. Mengembangkan Strategi dan Instrumen Dakwah Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat Global.

Pengembangan instrumen dakwah melalui berbagai media yang bervariasi dan progresif. Sarasehan dan *workshop* anti radikalisme dan terorisme untuk daiyah; Sarasehan pencegahan paham radikalisme dan launching da'iyah anti radikalisme. Memperkuat kelembagaan Forum Da'iyah Fatayat NU dan ikatan Hafidzah Fatayat NU; Mengembangkan strategi dan Instrumen dakwah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat global; Memperluas media dakwah melalui ICT (bisa dimulai dari memfirkankan isu-isu dakwah perspektif Fatayat NU); Meningkatkan kapasitas dan kualitas da'iyah (*Workshop Daiyah* sebagai salah satu *follow-up* dari *launching* daiyah anti radikalisme); Membuat modul dakwah sebagai panduan dakwah daiyah PP Fatayat NU; Untuk meningkatkan capaian program bidang dakwah baik dari segi kualitas maupun kuantitas tetap perlu adanya kerjasama antar pengurus dan bidang. Kegiatan ini kerjasama BNPT dan PP. Fatayat NU yang secara teknis dilakukan oleh Bidang Dakwah.<sup>166</sup>

3. Memperluas Media Dakwah Melalui Teknologi Informasi.

Bentuk kegiatan: Tayangan Fiqinita di Nova Chanel; Kajian Fiqihnya di Kompas TV; Ceramah “on air” bekerjasama dengan PCI Fatayat NU Taiwan untuk TKW; Tahsinul Qur'an “*One Day One Ayat*” via medsos untuk TKW di Singapura, Taiwan dan Hongkong; Bimbingan dan Konsultasi via medsos untuk TKW di Singapura, Taiwan dan Hongkong.

---

<sup>165</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Umum PP Fatayat NU: Margaret Aliyatul Maimunah, Jum'at 03 Agustus 2019, di Hotel Sofyan, jam 13.30- 14.30 WIB.

<sup>166</sup> Hasil Wawancara dengan Anisa Rahmawati, Ketua Bidang Dakwah PP Fatayat NU. Pada hari Jum'at 03 Agustus 2019, di Hotel Sofyan, jam 13.30- 14.30 WIB.

4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Mental dan Spiritual Daiyah Di Wilayah Transmigrasi.

Pelatihan Rohaniawan Daiyah di wilayah transmigrasi. Bentuk kegiatan: Workop dan Pelatihan peningkatan kapasitas dan kualitas daiyah Fatayat NU melalui penguatan wawasan keagamaa yang plural dan perspektif gender. Kerjasama Fatayat NU dengan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

5. Mengembangkan Modul Dakwah Fatayat NU Untuk Perdamaian.

Dilaksanakan oleh Bidang Dakwah Fatayat NU bekerjasama dengan Deputy Perlindungan Perempuan dan Anak KPPA RI. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah: Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku (KSA) perempuan terhadap masalah-masalah radikalisme dan terorisme di Indonesia dan dunia . Peningkatan kesadaran (*awareness*) perempuan terhadap bahaya radikalisme dan terorisme yang mengancam kehidupan anak-anak dan keluarga. Memberikan acuan atau strategi dalam mencegah penyebaran paham radikalisme dan terorisme kepada anak-anak dan keluarga. Menyusun Panduan Dakwah Anti Radikalisme dan Intoleran. Menciptakan perempuan sebagai aktor/duta perdamaian<sup>167</sup>.

6. *Workshop* Integrasi Aspek-aspek Perempuan, Perdamaian dan keamanan dan pencegahan dan perlawanan terhadap esktrimisme berbasis kekerasan.

Bentuk kegiatan, *Workshop* dan lokakarya *Strategic Planning Working Group on Women and Countering Violent Extremism (CVE) dan Preventing Violent Extrimism (PVE)* (Perencanaan Strategi Kelompok Kerja Perempuan dan Pencegahan Kekerasan Ekstrimisme). Stakeholder yang Terlibat: AMAN Indonesia, PP Fatayat, AIDA (Aliansi Indonesia Damai), Wahid Foundation, YPP, C-SAVE, The Habibie Center, Kementrian Sosial, BNPT, Ditjen PAS, Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDeS), Rumah Kitab, KOMNAS Perempuan, Universitas Muhammadiyah, IMC2 (Indonesia Muslim Crisis Center), IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict), DASPR Daya Makara – UI, KPPPA, Ma'arif Institute, UN Women, Fatayat Jawa Timur, Polisi Republik Indonesia, PPIM UIN, Menko Polhukam, Peace Generation Indonesia, Anggota DPR RI, Kementerian Luar Negeri dan Bappenas.

---

<sup>167</sup> Hasil wawancara dengan Ketua Umum PP Fatayat NU, Anggia Ermarini, Pada hari Jum'at 03 Agustus 2019, di Hotel Sofyan, jam 13.30- 14.30 WIB.



## BAB VII

### ISLAM NUSANTARA ; SUBSTANSI DAKWAH KONTEMPORER NU

Pada bab sebelumnya sudah penulis sampaikan bahwa terdapat tiga indikator adanya dakwah kontemporer yaitu pertama, dai kontemporer. Kedua, dakwah dengan menerapkan materi dakwah yang kontemporer. Ketiga, kegiatan dakwah dengan menggunakan media teknologi kontemporer. Dalam hal ini Islam Nusantara menurut penulis adalah materi dakwah kontemporer.<sup>1</sup> Dilihat dari segi materinya Islam Nusantara merupakan salah satu strategi dakwah kontemporer NU. Islam Nusantara sebagai Islam *khāṣ* (khusus) Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, dan adat istiadat yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.<sup>2</sup>

Disebut kontemporer karena istilah tersebut muncul sebagai respon atas konflik Islam di negara-negara lain, termasuk Timur Tengah, sebagai respon dalam rangka membendung Arabisme dan sebagai respon atas kelompok-kelompok Wahabi yang selalu mengatakan “istilah” Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Aceh, Islam Batak itu bukan Islam, *embel-embel* / sebutan-sebutan itu hanya mengotori Islam, Islam yang murni hanya Islam Arab. Konteks kekontemporeran lainnya adalah bahwa Islam Nusantara lahir untuk melawan fundamentalisme, radikalisme, terorisme dan Wahabisme.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Materi dakwah kontemporer harus dikemas secara rapi dan runtut dalam menyelesaikan satu persatu persoalan yang muncul dalam kehidupan modern. Materi dakwah yang harus langsung menyentuh bidang kehidupan manusia modern, seperti kaitannya dengan makanan, pakaian, hiburan dan kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi acuan dasar dalam setiap menghadapi persoalan kehidupan. Pola hidup manusia modern yang cenderung memahami agama secara detail dari setiap persoalan yang muncul, olehnya itu materi dakwah kontemporer harus mampu menyelesaikan kasus perkasus dengan terlebih dahulu menyentuh pikirannya lalu menyentuh hatinya, dengan cara itu mereka mudah menerima materi dakwah tersebut.

<sup>2</sup> Islam Nusantara adalah tipologi, *khāṣā'is*, *mumayyizat* yang tidak dimiliki oleh Timur Tengah, Pakistan, Afganistan, Arab, Sudan, Turki, atau Afrika yang merupakan negara Islam. Menurut Said Aqil Siradj mereka tidak memiliki Islam seperti yang ada di Indonesia *Ḥubb al-Waṭan Min al-Imān* dll. Oleh karena itu (*wa al-ḥāsil*) kenapa problem yang di Timur Tengah itu sampai sekarang masih perang, itu dikarenakan belum ketemu antara nasionalisme dan agama. Di Indonesia ada Hasyim As'ari, itu muslim tenanan, ulama besar dan nasionalis, Islamnya 100% nasionalisnya 100%. Itu loh Islam Nusantaraanya. Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan tokoh-tokoh NU, seperti Said Aqil Siraj (25 Mei) Agus Salim, Imdaddu Rahmat, Khamami, Abdul Muiz Ali<sup>3</sup>, Maria Ulfa, Khairul Anam<sup>3</sup> dan Ahmad Fauzih.

## A. Islam Nusantara Nahdlatul Ulama

Menurut sebagian kalangan konsep Islam Nusantara (IN) dianggap kurang matang (masih sebatas wacana) dalam konteks keilmuan. Karena Frasa ini baru muncul sebagai konsep, ketika akan diselenggarakannya muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur.<sup>4</sup> Unsur lain yang mengotori Islam adalah adanya dialog dengan gagasan-gagasan Barat modern. Konsep kedaulatan rakyat, demokrasi, *nation state*, konstitusi model Barat dan sebagainya adalah penyakit-penyakit yang menggerogoti tidak saja kemurnian Islam, tetapi juga keberadaannya. Sistem politik demokerasi yang sekuler ini mesti diruntuhkan untuk diganti dengan sistem Islami (*nizām al-islāmī*). Sebuah sistem hidup yang lengkap (*kāffah*), sempurna (*kāmīl*), dan meliputi segala sesuatu (*shāmīl*).

Salah satu aktifis HTI, menganggap bahwa konsep Islam Nusantara sebenarnya merupakan pelemahan dan wujud ketidakpercayaan diri dari umat Islam yang takut akan Islam itu sendiri. Menurutny dengan membaca Piagam Madinah yang dibuat Rasulullah SAW, itulah lambang demokrasi dan merupakan perwujudan toleransi, keadilan, dan kesetaraan. Istilah Islam Nusantara sama saja dengan Islam Liberal yang digagas oleh Jaringan Islam Liberal (Ulil Abshar Abdalla) dkk. Islam Nusantara sama saja dengan Islam Konservatif, Islam Moderat, Islam Garis Keras. Apa bedanya? Dari sisi konsep tidak ada berbeda, bahwa Islam Nusantara merupakan sebuah konsep tanpa dasar yang digaungkan untuk menambah pengelompokan dan membuat sebuah faksi-faksi dalam Islam.<sup>5</sup>

Tiar Anwar Bachtiar dalam bukunya Menelisik "Islam Nusantara" menyebutkan bahwa istilah Islam Nusantara cenderung rancu dan cenderung dipaksakan untuk kepentingan-kepentingan politis tertentu. Karena ketika Islam datang ke suatu tempat yang dibawa adalah ajaran. Ajaran Islam itu tidak mewujud pada budaya, tapi pada teks ilahiah yang abadi, yaitu al-Qur'an dan Sunnah.<sup>6</sup>

Front Pembela Islam (FPI) dan gerakan Islam berbasis ideologi Salafi-Wahabi menuduh Islam Nusantara sebagaai upaya NU untuk

---

<sup>4</sup> M. Imadun Rahmat, *Islam Pribumi, Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. xvi.

<sup>5</sup>[http://www.kompasiana.com/anandapujawandra/konsep-islam-nusantara-kesesatan-yang-menyesatkan-analisa-frasa-makna\\_55bef9db3297738d10cca191](http://www.kompasiana.com/anandapujawandra/konsep-islam-nusantara-kesesatan-yang-menyesatkan-analisa-frasa-makna_55bef9db3297738d10cca191).

<sup>6</sup> Pemahaman keagamaan mainstream yang dianut mayoritas umat dinilai bukan Keunikan ekspresi keberislaman masyarakat Indonesia dianggap sebagai kejahiliyahan modern dan jauh dari Islam yang benar,otentik dan asli. Islam Indonesia dianggap telah kehilangan nilai keasliannya semenjak ia mengakomodasi dan berkulturasi dengan budaya dan sistem politik lokal. Adanya warna budaya lokal dipandang telah melahirkan *bid'ah* dan *kufarat*. Oleh karena itu, bagi mereka, Islam Indonesia harus diislamkan kembali dengan puritanisme, pemurnian.



memisahkan Islam dari Arab. FPI, melalui pernyataan Rizieq Shihab, misalnya seringkali mengolok-olok dan bahkan sudah masuk dalam katagori menghina Islam Nusantara sebagai ANUS (Aliran Nusantara).<sup>7</sup> Akronim ANUS tersebut kelihatannya sengaja dilontarkan dan dipilih untuk mendekatkan pemaknaan Islam Nusantara seperti ANUS dalam pengertian yang sebenarnya. Rizieq juga kelihatannya berusaha membujuk publik bahwa Islam Nusantara adalah agenda pribadi Said Aqil meskipun sudah jelas bahwa Islam Nusantara merupakan tema besar Mukhtamar NU Jombang 2015. Pada sisi yang lain di kalangan Salafi-Wahabi lebih memosisikan Islam Nusantara sebagai bid'ah agama terbesar.<sup>8</sup>

Yahya Zainul Ma'arif yang lebih akrab dipanggil Buya Yahya, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bahjah yang berpusat di Cirebon menyoroti Islam Nusantara. Menurutnyanya:

Islam Nusantara itu pelakunya pembawa Islam Liberal, Islam *Ngaco*, orang munafik selalu seperti itu. Orang munafik itu bajunya banyak. Kalau sama orang Hindu pakai baju Hindu, kalau sama orang Budha pakai baju Budha, kalau kumpul sama orang Yahudi pakai lidah Yahudi, kalau kumpul sama orang Islam kayaknya Islam, tapi munafik selalu pakai bajunya macam-macam. Sekarang bajunya Islam Nusantara. Pelakunya pembawa keonaran, menoda aqidah, tak ada perlunya kita (mendukung Islam Nusantara).<sup>9</sup>

MUI Sumbar dan MUI Kab/Kota se-Sumbar, menyatakan tanpa ada keraguan bahwa: "Islam Nusantara dalam konsep/pengertian definisi apapun tidak dibutuhkan di Ranah Minang (Sumatera Barat). Bagi mereka, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun, demikian kesimpulan MUI Sumbar sebagaimana dokumen unggahan akun *Facebook* Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar."<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Pernyataan Rizieq Shihab dalam tautan <http://www.panjimas.com/news/2026/08/21/imam-besar-fpi-kapolri-hati-hati-said-aqil-dedengkot-anus-liberal-pemfitnah-syariat-islam/>, <http://www.laskarislam.com/t10603-habib-rizieq-nu-anus-aliran-nusantara-islam-liberal>, <http://www.suara-islam.com/read/index/15363/JIN-atau-ANUS>, dilihat pada 1 Mei 2018.

<sup>8</sup> Lihat pernyataan Syafiq Riza Basyalamah dalam tautan youtube: <http://www.youtube.com/watch?v=MaG19Dbal5c>, dilihat pada tanggal 1 Mei 2018.

<sup>9</sup> [www.portal-islam.id](http://www.portal-islam.id) . KABAR UMAT, Jul 8, 2018, di akses pada 10 Juli 2018 jam 10.19.WIB.

<sup>10</sup> "*Facebook* Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, pada 23 Juli 2018, dikutip detikcom. Hal tersebut berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Daerah MUI Sumbar dan MUI Kabupaten/Kota Se-Sumbar di Padang, 21 Juli 2018, menghasilkan kesimpulan untuk menolak Islam Nusantara. Ada sejumlah pertimbangan yang melandasi penolakannya, Mereka memiliki sejumlah pertimbangan untuk menolak Islam Nusantara. Pertama, istilah 'Islam Nusantara

Azyumardi Azra mengartikan Islam Nusantara secara umum adalah Islam yang berbeda (distingtif) sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara (kalam Asy'ari, fikih Syafi'i, dan tasawuf Ghazali) menumbuhkan karakter *wasathiyah* yang moderat dan toleran.<sup>11</sup> Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam (*Islamic legacy*) menjadi harapan renaissans peradaban Islam global.

Azyumardi yang menjadi salah satu tokoh menyokong Islam Nusantara, menilai model Islam Nusantara dibutuhkan masyarakat dunia saat ini karena ciri khasnya mengedepankan 'jalan tengah'. Ortodoksi Islam Nusantara menumbuhkan karakter wasathiyah yang moderat dan toleran, Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam menjadi harapan renaissans peradaban Islam global.” Iapun menambahkan bahwa di daerahnya Islam Nusantara itu adalah adat *basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.<sup>12</sup>

Menurut salah satu wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Imdadur Rahmat sekaligus Rektor Institut Agama Islam Sahid (IAIS) Bogor mengatakan bahwa:

“Islam Nusantara merupakan upaya PBNU untuk membendung adanya Arabisasi dengan berbagai kampanye kelompok-kelompok Wahabi yang selalu mengatakan bahwa Islam Murni itu ya Islam Arab, maka sudah sewajarnya kita lawan pemahaman keagamaan yang anti budaya lokal, yang anti tantangan kekinian, karena Islam

---

mengundang perdebatan yang tak bermanfaat dan melalaikan umat Islam dari berbagai persoalan penting. Istilah Islam Nusantara, masih menurut MUI Sumbar, bisa membawa kerancuan dan kebingungan dalam memahami Islam. Istilah Islam Nusantara juga dinilai mengandung potensi penyempitan makna Islam yang universal. Istilah Islam Nusnatara juga sering digunakan untuk merujuk cara beragama Islam yang toleran. Menurut MUI Sumbar, toleransi hanya merupakan satu aspek saja dalam Islam, padahal banyak aspek lain dalam Islam. Islam tidak bisa direduksi hanya menjadi satu aspeknya saja, melainkan harus menyeluruh.”

<sup>11</sup> Azyumardi Azra, *Islam Nusantara*, 2000. [www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1](http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1) Azyumardi Azra membantah identitas IN yang melekat pada diri NU (Muktamar NU ke-33 pada 2015). Hal ini diwujudkan dengan tulisannya yang berjudul “Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal” di tahun 2002 (Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal* (Jakarta: Mizan, 2002), 1-300). Islam Nusantara representasi identitas Nahdlatul Ulama. Dijk membenarkan pendapat tersebut dengan menjabarkan identitas melalui tiga kategori berupa identitas personal, identitas kelompok (group), dan identitas sosial (Teun A. Van Dijk, *Ideology: A Multidisciplinary Approach* (London dan New Delhi: SAGE Publication, 1998), h. 118-122.

<sup>12</sup> Azyumardi Azra; adat adalah lokal genius. Islam datang dan menyebar melalui proses penerjemahan konsep Islam ke bahasa lokal dan pribumisasi. [www.tagar.id/penolak-islam-nusantara-dinilai-hobi-mendiskredit-dibanding-apresiasi](http://www.tagar.id/penolak-islam-nusantara-dinilai-hobi-mendiskredit-dibanding-apresiasi).

itu bukan hanya Islam Arab saja, namun ada Islam Eropa, Islam Jawa, Islam Nusantara yang sama-sama kedudukannya, tidak ada yang lebih tinggi dan lain-lain, itu strategi kita untuk melawan Arabisme, untuk melawan fundamentalisme, radikalisme, terorisme dan Wahabisme. Oleh karena itu Islam Nusantara ya NU itu, yang *tawassuf*, *tawazzun*, *tasāmuḥ*, yang Aswaja dalam pengertian implementasian kekinian *al-akhd bi al-jadīd al-aṣlah*. Yang *al muḥāfaẓah ‘alā al-qadīm al-sālīḥ wa al-akhd bi al-jadīd al-aṣlah*, tradisi lokal kita ambil namun kita tidak anti demokrasi, tidak anti kemajuan, tidak anti gagasan baru, nah itulah Islam Nusantara.<sup>13</sup>

Salah satu Tantangan dari sinergi Islam dan budaya lokal Nusantara yang menghasilkan kearifan tradisi keagamaan dalam konteks kekinian cenderung dipengaruhi oleh ideologi globalisme dengan kapitalisasi sebagai motornya. Globalisasi menunjuk pada dua aspek kehidupan, yaitu ekonomi dan sosial budaya.<sup>14</sup> Tantangan dakwah Nusantara yang menghasilkan kearifan tradisi keagamaan lainnya dalam kontek kontemporer juga cenderung dipengaruhi oleh ideologi dan *power* (kekuatan atau kekuasaan).

Islam Nusantara bukan hanya sebatas kajian/ wacana/ konsep yang ditawarkan oleh ulama-ulama Indonesia (PBNU),<sup>15</sup> cendekiawan-cendekiawan Indonesia, namun juga sebagai modal penting agar Islam Nusantara bisa menjadi membangun peradaban global, sesuai dengan tujuan dan wawasan Islam Nusantara yang berprinsip *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah* dan mengedepankan ciri Islam yang *rahmat li al-‘ālamīn*. Implementasi dari hal itu adalah terciptanya kehidupan keagamaan yang harmonis walaupun berbeda agama, keyakinan dan pemahaman.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Imdadun Rahmat, pada tanggal 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.

<sup>14</sup> Thomas H. Eriksen, *Globalistion Studies in Anthropology* (London: Pluto Press, 2003).

<sup>15</sup> Mukhtamar ke-33 tahun Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur. 1 Agustus hingga 5 Agustus 2015 dengan tema utama “*Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia*”. Menurut A. Khairul Anam, wakil pimpinan redaksi NU *Online* PBNU menyebutkan istilah Islam Nusantara mulai *boeming* ketika menjadi tema mukhtamar, namun penyebutannya itu sudah lama, 3 tahun saya bersama mas Baso mengelola buleten jum’at Islam Nusantara dari semenjak 2007-2008an dan sebelumnya juga ada jurnal IN, bisa di cek di NU *Online*. (Wawancara penulis pada hari: Minggu, tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat.

<sup>16</sup> PBNU, *Hasil-hasil Mukhtamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga *Ta’lif wan Nasyr* PBNU/LTN: 2016), h. 212. Menurut Ahmad Baso, Islam Nusantara menjadi kunci dalam mengamalkan Islam Aswaja atau ahlussunah Waljama’ah, yakni mengajarkan kita istoqomah menjalani sunnah Rasulullah,

Menurut Said Aqil Siroj, Islam Nusantara menjadi referensi dalam memaknai nilai-nilai Islam, yang memberikan ruang bagi kebudayaan. Menurutnya:

Islam Nusantara bukan aliran atau mazhab baru namun tipologi Islam yang *khāṣ*<sup>17</sup> yang memadukan Islam dengan kebudayaan, Islam dengan nasionalisme dan memadukan Islam dengan kekayaan tradisi. Kita harus menyatu dengan budaya, selama budaya itu baik dan tidak bertentangan akan semakin membuat indah Islam, kita tidak boleh menentang atau melawannya. Terkecuali budaya yang bertentangan dengan syariat, seperti zina, perjudi, mabuk dan lainnya.<sup>18</sup>

Karakter Islam Nusantara adalah *tawassuṭ*, *tasāmuh*, *tawazzun*, dan *i'tidāl*, serta selalu berupaya mencari titik temu (konvergensi) di antara berbagai madzhab pemikiran dan aliran keagamaan.<sup>19</sup> Islam Nusantara, sebuah ciri khas dalam memaknai sekaligus mengekspresikan nilai-nilai Islam. Islam Nusantara warisan Wali Songo.<sup>20</sup>

Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat) mengatakan dalam kitab *Muqaddimah* Ibnu

---

sekaligus membangun kehidupan beragama dan berbangsa yang selalu *guyub*, hidup bersama, dan solider dengan sesama. Ahmad Baso, *Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Afid: 2015), hal. 33

<sup>17</sup> *Khāṣ* ini memiliki cakupan yang sangat luas, yaitu mulai dari sejarah, pemikiran, tradisi, ijtihad, cara berdakwah, hingga interaksi sosial. Diantara *khāṣ* utama Islam Nusantara adalah sebagai berikut: *Tawassuṭ* (Moderat), *Tasāmuh* (Tolcran), *Tawazzun* (Seimbang), *Tashawwur* (Senang bermusyawarah), *Ta'awun wa Taqāmun* (Gotong Royong), Bisa beradaptasi dengan budaya dan adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Mengedepankan *Amr al-Ma'rūf bi al-Ma'ruf wa Nahyi al-Munkar bi Ghayr al-Munkar* (Dakwah secara ramah, bukan dengan marah-marah, kekerasan dan kebencian. Senang berkumpul dan bersilaturahmi. Hubungan agama dan negara harmonis, tidak terpisah sama sekali (sekuler), tetapi juga tidak melebur jadi satu (dengan menjadi negara agama). Termasuk dalam hal ini adalah konsep bahwa cinta tanah air bagian dari iman. Memiliki dan menerapkan 3 *ukhuwah* (*Islamiyah*, *wathoniyah*, dan *basyariyah*). Terbuka terhadap hal-hal baru yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Memberikan ruang bagi perempuan dan laki-laki untuk sama-sama berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada pemisahan ruang secara ketat antara laki-laki dan perempuan. Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>19</sup> Said Aqil Siraj, "*Rekonstruksi Aswaja Sebagai Etika Sosial*", dalam Sahal dan Aziz (eds.), *Islam Nusantara*, h. 148-149.

<sup>20</sup> Khabibi Muhammad Lutfi, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal", *Shahih*, Vol. I. Nomor I, Januari-Juni 2016 (LP2M IAIN Surakarta), h. 2.

Chaldun, yang jelas menyebut istilah Nusantara. Orang Arab menyebut Nusantara itu *al-jawāwīyyūn/ Ahl al-Jāwā*, Nusantara itu disebut pada kitab abad 14-15, yang menjadi rujukan dan landasan Islam Nusantara itu dikitab Ibnu Chaldun bahwa:

Islam itu metode pengembangannya tidak dalam satu bentuk “*laysa ‘alā manhaj al-wahīdah*” tidak dalam satu bentuk, tidak dalam satu *manhaj*, tidak dalam satu methodologi, cara tapi proses dakwah itu berubah sesuai sosio, *cultur*, budaya dimana Islam itu harus disebar. Inilah yang menjadi corak, *khaṣā’is, mumayyizāt* Islam Nusantara dengan Islam yang ada di Timur Tengah. Tujuan-tujuan Islam Nusantara seperti yang dikembangkan oleh NU itu, NU itu tidak tekstualis, tidak terjebak kepada *nash-nahs* yang dipahami secara kaku/aterlek, tetapi dilihat dari *Maqāṣid al-Sharī’ah*, dilihat dari *naṣ-naṣ* itu mau dikembangkan dan mau diarahkan kemana dengan tetap mengacu kepada *al-darūrī li al-khams*-nya: *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-māl, ḥifẓ al-‘aql ḥifẓ al-nasl...* nah itulah yang dikembangkan NU dalam Larat Belakang Islam Nusantara”.<sup>21</sup>

Wajah Islam Nusantara yaitu fleksibel dan moderat (memilih jalan tengah), inklusif, toleran, anti kekerasan dan mengakomodasi budaya lokal. Seperti yang sudah di sampaikan oleh Azyumardi Azra,<sup>22</sup> Said Aqil Siraj,<sup>23</sup> atau Din Samsudin: Islam di Indonesia memiliki watak berbeda dengan Islam di negara-negara lain termasuk Timur Tengah, disebabkan oleh cara masuknya Islam di Nusantara berlangsung secara damai. Oleh karena itu Indonesia sejak dulu dikenal sebagai model kerukunan hidup, baik antarumat beragama maupun intraumat agama.<sup>24</sup>

Bambang Pranowo sepakat sesuai dengan fakta sejarah, bahwa dengan cara menoleransi tradisi lokal serta memodifikasinya ke dalam

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat), Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB. Hasil Wawancara dengan Maria Ulfa Anshor dan Khairul Anam. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

<sup>22</sup> Bilal Muhammad, “*Islam Indonesia Beda dengan Islam Timur Tengah*,” dalam <http://www.kiblat.net/2015/03/19/azyumardi-azra-islam-indonesia-beda-dengan-islam-arab/> (diakses 25 Februari 2016).

<sup>23</sup> Bahtiar Rifai, “Said Aqil Siradj: ‘*Islam Indonesia bukan Islam Arab*,’” dalam [m.detik.com/news/wawancara/2978479/said-aqil-siradj-islam-indonesia-bukan-islam-arab](http://m.detik.com/news/wawancara/2978479/said-aqil-siradj-islam-indonesia-bukan-islam-arab) (diakses 25 Februari 2016).

<sup>24</sup> Bilal Ramadhan, “*Din: ‘Watak Islam di Indonesia Beda dengan di Timur Tengah*,’” dalam [m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/11/05/nxbsaz330-din-watak-islam-di-indonesia-beda-dengan-di-timur-tengah](http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/11/05/nxbsaz330-din-watak-islam-di-indonesia-beda-dengan-di-timur-tengah) (diakses 25 Februari 2016).



ajaran Islam dan tetap bersandar pada prinsip-prinsip Islam, agama baru ini dipeluk oleh bangsawan-bangsawan serta mayoritas masyarakat Jawa di pesisir utara. Baik agama maupun budaya tidak dapat mengelak dari proses yang tak mungkin terhindarkan, yakni perubahan. Memang benar, ajaran agama sebagaimana tercantum secara tekstual dalam kitab suci, kata demi kata tetap seperti keadaannya semula. Akan tetapi, begitu ajaran agama harus dipahami, ditafsirkan, dan diterjemahkan ke dalam perbuatan nyata dalam suatu *setting* budaya, politik, dan ekonomi tertentu, maka pada saat itu pemahaman yang didasari ajaran agama tersebut pada dasarnya telah berubah menjadi kebudayaan.<sup>25</sup>

Latar sosial-budaya masyarakat Indonesia juga cinta damai, sehingga Islam di Indonesia berbeda seperti, berwatak damai, moderat, inklusif, toleran dan antikekerasan. Watak ini dianut oleh mayoritas mutlak umat Islam dan telah berlangsung berabad lamanya. Maka hampir dapat dikatakan, sejak dulu tidak ada ketegangan dan pertentangan serius antara Muslim dengan non-Muslim dan juga antara sesama Muslim.

Meskipun tidak dinafikan dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, muslim Indonesia pernah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme asing (Portugis dan Belanda) adalah sebab dan akibat dari serangan Portugis dan Belanda yang melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan Islam Indonesia sehingga solidaritas Islam bangkit dan mendorong mereka melakukan perlawanan-perlawanan. Andi Faisal Bakti menyebutkan beberapa peperangan yang sudah dilakukan oleh bangsa Indonesia seperti:

“*Pertama*, munculnya oposisi atau perlawanan kesultanan Islam berjuang melawan kolonialisme untuk mempertahankan kepentingan ekonomi dan hegemoni politik mereka. *Kedua*, tantangan aristokrat atau perlawanan dari para bangsawan. *Ketiga*, perlawanan perjuangan ulama (menurut wilayah dan lingkungannya) melawan kekuatan asing. *Keempat*, adanya gerakan protes rakyat yang berskala lokal namun pada tingkatan tertentu ada perasaan solidaritas di antara penduduk semua daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pertolongan dari sesama Muslim di daerah lain. *Jihād fī Sabīl Allāh* dan semangat Allah Akbar selalu menjadi lambang perlawanan mereka”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Pranowo, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, (Yogyakarta: Adicita, 1999), h. 20.

<sup>26</sup> Andi Faisal Bakti, *Nation Building: Kontribusi Muslim dalam Komunikasi Lintas Agama dan Budaya terhadap Kebangkitan Bangsa Indonesia*, Tangerang Selatan: Churia Press, 2010, h. 61-112.

Perlawanan Islam terhadap kaum kolonial, menurut Kartodirjo, sangat dipengaruhi oleh tingkah laku solid anti-kafir dan khususnya reaksi mereka terhadap kehadiran kolonial Belanda. Ideologi jihad yang berkembang pada abad ke-17 telah mendorong resistensi terhadap penetrasi kaum kolonial Belanda. Semangat Perang Suci anti-kafir dan jihad telah menguatkan posisi kuat Islam, dan memengaruhi masyarakat untuk bangkit melawan musuh. Signifikansi gerakan tersebut adalah upaya membangun kekuatan bersama serta kekuatan elemen-elemen etnis yang berbeda-beda yang bisa melanjutkan proses penyatuan dan memformulasikan bentuk nasionalisme.<sup>27</sup>

Menurut Zainul Bizawie, Islam Nusantara bukanlah objek keilmuan melainkan subjek keilmuan yang bisa digunakan sebagai pisau analisis budaya muslim lain (bisa digunakan sebagai teori untuk mengkaji Islam). Misalnya, menggunakan kaidah ushul fiqh yang bertujuan *maqāṣid al-shārī'ah* (tujuan syariat), yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, suatu kebaikan dan kemanfaatan yang bernaung di bawah lima prinsip pokok, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-māl*, *ḥifẓ al-'aql* dan *ḥifẓ al-nas*.<sup>28</sup>

Agus Sunyoto pada Halaqah *Kebudayaan Islam Nusantara; Menjaga Tradisi Dari Aras Lokal di Tengah Tantangan Global* yang digelar oleh PWNU Lesbumi Sulawesi Utara, memberikan informasi secara gamblang tentang definisi Islam Nusantara. Menurutnya Islam Nusantara adalah Islam yang rill dengan aneka macam varian perbedaan dan kesamaannya yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar penduduk Indonesia terutama penduduk yang beridentitas Nahdliyyin atau *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah al-Nahdliyyah*, yaitu Islam hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, vernakularisasi antara Islam yang berasal dari berbagai negeri di dunia dengan realitas sosial, budaya sastra pendidikan dan pengetahuan sudah ada di Indonesia.<sup>29</sup>

Islam Nusantara adalah Islam hasil asimilasi, akulturasi dan sinkretisasi antara Islam Universal dengan anasir-anasir lokal melalui ijtihad dan *qiyas* yang dilakukan kalangan sufi yang sangat 'longgar'

---

<sup>27</sup> Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, 1990.

<sup>28</sup> [www.nu.or.id/post/read/59442/milal-bizawie-karakter-islam-nusantara-tidak-homogen](http://www.nu.or.id/post/read/59442/milal-bizawie-karakter-islam-nusantara-tidak-homogen), diakses Kamis, 31/03/2016, 09.15 WIB.

<sup>29</sup> Pemaparan Agus Sunyoto dalam *Halaqah Kebudayaan Islam Nusantara; Menjaga Tradisi Dari Aras Lokal di Tengah Tantangan Global* yang digelar oleh PWNU Lesbumi Sulawesi Utara, 10 Maret 2016.

dalam memaknai dan mengaplikasikan dakwah Islam.<sup>30</sup> Secara teknis Agus Sunyoto menambahkan, Islam Nusantara, adalah “proyek” NU-isasi di kalangan umat Islam yang ada di Indonesia. Setiap ‘kantong-kantong’ muslim yang belum mengerjakan amaliah<sup>31</sup> berNU, maka NU secara struktur maupun kultur memiliki peran untuk melakukan sosialisasi dan mewarnai wilayah tersebut. Lebih jauh, Agus Sunyoto menggambarkan bahwa NU-isasi semata bukan karena ingin menegaskan bahwa cara ber Islam ala NU adalah yang paling benar, melainkan sebagai wujud dari mempertahankan tradisi<sup>32</sup> beragama (Islam Nusantara) yang sudah lama dibangun oleh para ulama Indonesia. Sebab, era global saat ini menjadi momok terhadap identitas bangsa yang berpotensi membentuk masyarakat menjadi lupa atas kediriannya sebagai manusia Nusantara.

Chiara Formichi,<sup>33</sup> mengatakan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari Islam di Indonesia. “Gagasan Islam Nusantara sangat erat dengan budaya dan sejarah Indonesia. Saya tidak tahu bisa diterapkan di negara lain atau tidak, tetapi yang jelas bisa menjadi contoh untuk mengerti mengapa seseorang memeluk Islam,” katanya.<sup>34</sup>

Azhar Ibrahim dari Universiti Nasional Singapura memandang Islam yang terbangun di Indonesia bisa menjadi teladan kepada negara-negara Muslim lain, termasuk warga dunia yang lebih besar. Ia mengatakan “Walaupun tidak menelurkan gagasan filsafat yang rasional ataupun menghasilkan keserjanaan Islam yang tinggi, Islam Nusantara mempunyai potensi besar untuk menyumbang kepada dunia Islam, malah perdaban dunia”. Hal tersebut berakar pada enam poin penting, yakni pengalaman sejarah, orientasi agama yang dominan, pribumisasi Islam yang mengakar, penghargaan dan keteguhan terhadap *turats* (tradisi), terbangunnya institusi atau kelompok yang

---

<sup>30</sup> Pemaparan Agus Sunyoto dalam *Halaqah Kebudayaan Islam Nusantara: Menjaga Tradisi Dari Aras Lokal di Tengah Tantangan Global* yang digelar oleh PWNU Lesbumi Sulawesi Utara, 10 Maret 2016.

<sup>31</sup> Amaliah yang dimaksud adalah sebuah kegiatan ritual ala NU sebagai tradisi keagamanya, seperti; tahlilan, ziarah, manaqiban dan lain sebagainya.

<sup>32</sup> Gagasan Muhammad al-Jabiri tentang tradisi menjadi rekomendasi bacaan. Menurut al-Jabiri, tradisi (al-turaats) adalah “sesuatu yang hadir dan menyertai kekinian kita, yang berasal dari masa lalu, apakah itu masa lalu kita atau masa lalu orang lain, ataukah masa lalu tersebut adalah masa lalu yang jauh maupun dekat”. Baca Muhammad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, Terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2000), h. 24.

<sup>33</sup> Pakar sejarah Islam di Indonesia dari Universitas Cornell di Ithaca, New York. [www.nu.or.id/post/read/60756/pbnu-senang-diskusi-islam-nusantara-digelar-di-gedungpbb](http://www.nu.or.id/post/read/60756/pbnu-senang-diskusi-islam-nusantara-digelar-di-gedungpbb), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.30 WIB.

<sup>34</sup> [www.nu.or.id/post/read/60756/pbnu-senang-diskusi-islam-nusantara-digelar-di-gedungpbb](http://www.nu.or.id/post/read/60756/pbnu-senang-diskusi-islam-nusantara-digelar-di-gedungpbb), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.30 WIB.

mengedepankan wacana Islam inklusif dan dialogis, serta peran ormas dan para pemikir Indonesia yang mencerahkan.<sup>35</sup>

Mohammad Hashim Kamali dalam karyanya, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* tidak menggunakan istilah Islam *wasatiyyah*, yang lazim digunakan di Indonesia. Ia menggunakan istilah 'jalan tengah moderasi Islam' berdasarkan prinsip Al-Qu'ran tentang *wasatiyyah*. Pada level kemasyarakatan, *Islām wasatiyyah* terwujud dalam berbagai organisasi besar Islam, yang umumnya berdiri jauh sebelum kemerdekaan RI. Daftar organisasi *Islām wasatiyyah* itu bisa sangat panjang mulai dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Washliyah, Perti, Mathla'ul Anwar, PUI, Persis, Nahdlatul Wathan, Al-Khairat dan banyak lagi. Organisasi-organisasi ini mengambil "jalan tengah" bukan hanya dalam pemahaman dan praksis keagamaannya, tetapi juga dalam sikap sosial, budaya dan politiknya.<sup>36</sup>

Di sisi lain ada sebagian kelompok yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang tidak akomodatif terhadap tradisi lokal dan *ikhtilāf* ulama dalam memahami ajaran agamanya. Ada sebagian kelompok yang belum mengakui doktrinal Islam terhadap keabsahan eksistensi budaya dan kearifan lokal meskipun tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Adanya kesalahpahaman dan Penolakan pelabelan Nusantara terhadap Islam karena dianggap sebagai pelemahan dan wujud ketidakpercayaan diri dari umat Islam itu sendiri.

Sebagai strategi dakwah NU yang memiliki *manhajul fikr al muhāfazah 'alā al-qadīm al-ṣālih al-akhd bi al-jadīd al-aṣlah*, yakni memelihara yang lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Memelihara hal-hal yang lama yang baik artinya menjaga warisan yang dimiliki. Warisan itu meliputi akidah, yakni akidah *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah*, dan cara berfikir ala NU (*fikrah* Nahdliyah), yaitu cara berfikir moderat, dinamis, dan ber*manhaj*, serta amaliyah nahdliyah. Mengambil hal-hal yang baru yang lebih baik artinya melakukan transformasi, terutama yang menyangkut Ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada saat ini menjadi penentu kemajuan dan daya saing. Salah satu unsur kekontemporernya lainnya adalah kontek melawan fundamentalisme, radikalisme, terorisme dan Wahabisme nah Islam Nusantara itu dalam kontek melawan itu semua.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> [www.nu.or.id/post/read/60756/pbnu-senang-diskusi-islam-nusantara-digelar-di-gedungpbb](http://www.nu.or.id/post/read/60756/pbnu-senang-diskusi-islam-nusantara-digelar-di-gedungpbb), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.30 WIB .

<sup>36</sup> Hashim Kamali dalam karyanya, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah* (Oxford & New York: Oxford University Press, 2015, xi+310 h).

<sup>37</sup> Wawancara dengan Imdadun Rahmat (Wakil ketua PBNU dan rektor INAIS / Institut Agama Islam Sahid Bogor, 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.

Tabel 13.

## Strategi Dakwah NU dalam Mengaplikasikan Islam Nusantara

Pembaharuan	Strategi	Metode	Materi	Media
1. Evaluasi yang terus-menerus terhadap visi-misi dakwah, 2. Analisis situasi dan kondisi, serta perluasan wilayah dakwah yang merambah dunia global baik dunia media maupun wilayah fisik.	Peningkatan pendidikan, ekonomi, posisi sosial dan politik untuk mencapai sumber informasi dan pengambil keputusan	Sesuai al-QS al-Nahl ayat 125, metode dakwah terbagi dalam 3 garis besar ( <i>bi al-hikmah</i> , <sup>38</sup> <i>bi al-maw'izah al-hasanah</i> , <sup>39</sup> dan <i>bi al-mujadalah bi al-ihsan</i> ). <sup>40</sup>  <i>lecturing methode, face to face, discuse, question ansewcred, propaganda, bi al-hāl, bi al-māl, bi al-qalam, infiltration/ dramatyion, dan lain-lain.</i>	Aswaja, <i>ḥubb al-waṭan</i> , Perdamaian, <i>ukhuwwah bashāriyyah</i> , <i>ukhūwwah waṭaniyyah</i> , <i>ukhuwwah Islāmiyyah</i> .	Tradisional dan kontemporer (NU Online, 146 Chanel, Aswaja TV, Nutizen, Islamic.com)

Sumber: Hasil wawancara dengan Said Aqil Siradj, Agus Salim, Imdaddu Rahmat, Khamami, Abdul Muiz Ali<sup>41</sup>, Maria Ulfa, Khairul Anam<sup>42</sup> dan Ahmad Fauzih.

<sup>38</sup> *Bi al-Hikmah* dapat diartikan secara luas sebagai *al-Dakwah bi-al-Siyasah*. Dakwah dengan metode ini yang terlahir pada bidang kehidupan publik di bidang sosial, politik, dan ekonomi berhubungan dengan *good governance* yang secara emansipatif dan partisipatif berusaha membangun, menata dan memanaj kehidupan bersama dalam bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini dakwah diharapkan dapat berperan sentral dalam proses penguatan *civil society* yang merupakan *one of indicator* tulang punggung peradaban. Dalam konteks ini pula dakwah *bi-al-hikmah* perlu diaktualisasikan melalui kegiatan *public pooling lobby* dan *advocation social politic*.

<sup>39</sup> Metode *al-mau'zhah al hasanah* yang merupakan proses *education* dapat diaktualisasikan dalam pendidikan dan penyadaran social politik yang berakar pada *etic and value of Islam*. Karena dengan evaluasi etik dan telogis yang mendasar peradaban manusia dapat terus memperbaharui keabsahan serta relevansinya.

<sup>40</sup> Dakwah *bi-al-mujadalah bi-alihsan* dalam masyarakat “modern “ sekarang perlu dituangkan dalam lembaga-lembaga dakwah dan para “ fungsionarisnya “ untuk mengembangkan *international competncenya* ketika melibatkan diri dalam diskursus seta diskusi-diskusi dan inisiatif-inisiatif nasional maupu internasional.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) dan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa



Terkait isu kapitalis yang menurut beberapa kelompok telah merasuki Islam Nusantara NU untuk kepentingan-kepentingan tertentu, Said Aqil memberikan tanggapan bahwa, itu hanya dugaan orang, justru NU itu ingin mengembalikan Islam kepada fitrahnya/*rahmat li al'alamīn*. Kalau *rahmat li al'alamīn* itu hanya sebuah ungkapan namun prakteknya ya itu tadi akhlakunya. Akhlakunya ikut ulama, *tabi'in*, sahabat dan rasulullah. Contoh sekarang misalnya apakah kemudian dakwah itu identik dengan marah-marah? Nah itulah kalau dakwahnya pingin bener ya ikut NU, karena kalau dakwahnya NU ya punya landasan,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ<sup>43</sup>

Said Aqil sendiri mempertanyakan tentang adanya anggapan tersebut dengan ungkapan:

“Kapitalis bagaimana sih? Mukhtarom kemarin di Jombang itu sedang mencoba meningkatkan pada tiga hal atau tiga sektor;

1. Pendidikan,
2. Kesehatan dan ketiga,
3. Pengusaha kecil. Kita sedang menguasai usaha kecil koperasi, Fahmi Akbar Jogja, sudah 100 an koperasi berdiri dan sudah 100 milyar berputar, seperti *Mabadiku*. Jatim, Jombang; KomnusNU, *wa al-hāsil* lagi tumbuh usaha-usaha kecil NU ini”.<sup>44</sup>

Bagaimana mungkin NU itu kapitalis? kapitalis itu kan membangun kelompok-kelompok konglomerat/ konglomeratisasi dengan memeras keringat dan tidak peduli dengan rakyatnya. Itu kapitalis. Kapitalis itu kelompok elit, kelompok priyayi, yang tidak peduli dengan rakyatnya, yang membangun gerakan konglomerasi itulah kapitalis. Tetapi kalau NU ya, mana mungkin kapitalis? Juga tidak ada menjadi kapitalis, karena sesuai dengan sila kelima itu

---

MUI Pusat) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Khoirul Anam, MA (Wakil Pimpinan Redaksi NU Online PBNU) Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) dan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat), Ahmad Fauzih, Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

(keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Kalau ada orang yang mengatakan NU itu kapitalis berarti orang itu tidak paham NU jadi mengatakan hal itu.<sup>45</sup>

Said Aqil menambahkan:

*Lah wong* rumah kiyai itu terbuka selalu pintu rumahnya, apasaja dimakan bareng bersama santrinya sudah menjadi hal yang biasa dan wajar, bahkan merokok bareng dengan santrinya. Orang NU sendiri tidak ada yang kaya, itu bagaimana sih?” tambahnya.<sup>46</sup>

Said Aqil juga menambahkan bahwa NU dikatakan sosialis juga tidak bisa karena sosialis itu sekuler dan di dalam sosialis itu tidak ada ketuhanan, sedangkan di sila pertama itu: ketuhanan Yang Maha Esa, itu bukan sosialis sekuler. Ia menambahkan bahwa pancasila itu luar biasa, sebagai kesepakatan ideologi negara kita. Negara lain ingin menggabungkan antara agama dan keadilan sosial susahny minta ampun setengah mati, negara lain itu heran dengan Indonesia ada ketuhanan ada keadilan sosial, agama sebagai vertikal itu sulit loh bagi orang luar, taat pada agama dan juga keadilan sosial, kita bisa.<sup>47</sup>

Adapun mengenai anggapan bahwa Islam Nusantara yang digaungkan NU pada muktamar di Jombang yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk membuat suatu kekuasaan dan NU yang oportunis, Agus Salim membantah akan hal tersebut.

Tidak benar, justru NU yang ingin mempertahankan tradisi yang baik, budaya, untuk *budgeting*, dengan menggunakan swadaya masyarakat, mungkin juga NU paling besar kontribusinya terhadap negara, namun NU itu dapat apa?. Agus Salim menambahkan bahwa antara partai dan NU itu berbeda: “kalau NU mau melakukan kegiatan, misalnya *istighāsh*, maka mereka *patungan* (iyuran bersama).<sup>48</sup>

Menurut Maria Ulfah, kepentingannya Islam Nusantara sebetulnya untuk merawat kebhinekaan Indonesia sehingga Islam Indonesia harus beradaptasi dengan konteks tersebut, karena didalam negara itu ada berbangsa, berbangsa dan bermasyarakat, menurut saya berbangsa ini lebih luas ruang lingkupnya dibanding kemasyarakatan meskipun sama-sama menjadikan Aswaja sebagai manhajul fikrnya, dan saya lebih sepakat kalau Islam Nusantara dijadikan sebagai

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) dan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat), Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

ideologi dalam berbangsa.<sup>49</sup> Hal ini didukung oleh Agus Salim, Abdul Muiz dan Ahmad Fauzih tentang IN sebagai ideologi dalam berbangsa NU.<sup>50</sup>

Lain halnya dengan Khairul Anam yang mengatakan bahwa Islam Nusantara bukan ideologi, karena di dalam Islam Nusantara ya memang sudah ada ideologi, ideologi kebangsaan yang diamalkan NU dan ideologi negara Indonesia ini berdasarkan Pancasila yang berdasarkan pada agama-agama pada saat pembentukan negara, bukan negara Islam dan hal tersebut sudah diyakini dan menjadi konsesus/ keputusan bersama ulama-ulama.<sup>51</sup>; Islam Nusantara itu memang ada kebangsaannya, ada kemasyarakatannya, ada *ḥabbl min al-nās, min Allāh* ya sama, namun kalau menurut saya Islam Nusantara itu hanya penamaan saja.<sup>52</sup> Pokoknya IN itu ya apa yang diyakini oleh NU, baik bernegara dan bermasyarakat, itu nama saja.<sup>53</sup>

Kaitannya dengan kekuasaan, Abdul Muiz Ali, salah satu anggota Lembaga Dakwah PBNU sekaligus anggota komisi fatwa MUI Pusat mengatakan:

Islam Nusantara tujuannya bukan untuk kepentingan kekuasaan, atau memperkuat kekuasaan, tetapi Islam Nusantara ini sebetulnya untuk melestrikan tradisi/memperkuat tradisi, yang mulai hilang gara-gara masuknya ideologi yang impor tadi (*trans nasional*) *al-muḥāfaẓah ‘alā qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*.<sup>54</sup>

Tantangan umat hari ini, utamanya NU, adalah globalisasi yang memperhadapkannya dengan kenyataan bahwa para penyebar Islam saat ini yang tak kuasa beradaptasi dengan keberadaan Nusantara.<sup>55</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Maria Ulfa Anshor. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Sabtu, Tanggal, 06 April 2019, Jam 14.00-15. 30 WIB.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Agus Salim, dan Abdul Muiz Ali Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Khairul Anam. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 14.00-15. 30 WIB.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Khairul Anam. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 14.00-15. 30 WIB.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Khairul Anam. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 14.00-15. 30 WIB

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat), Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

<sup>55</sup> Hal tersebut karena ada anggapan bahwa budaya dipandang seolah sebagai produk manusia yang tidak pantas dipertahankan. Bahkan, dalam anggapan mereka, budayabudaya tertentu mengarahkan pada praktek syirik.

Globalisasi bergerak melalui dua jalur, fundamentalisme dan liberalisme Islam. Kedua ideologi transnasional ini menjadi sama-sama mempengaruhi masyarakat Indonesia, khususnya muslim, dalam menjalankan praktek ke-agamaannya.<sup>56</sup> Sesungguhnya, tidak ada yang salah dari penyebaran kedua ideologi tersebut, namun agenda globalisasi yang terdapat di dalamnya, dapat “merusak” tatanan peradaban Nusantara sebagai kekuatan *khāṣ* tersendiri.<sup>57</sup>

## **B. Kontektualisasi Islam Nusantara (*al-muḥāfaẓah ‘alā qadīm al-ṣālīh*)**

Dalam situasi global kontemporer, yaitu ketika Islam acapkali dicitrakan sebagai agama kekerasan, banyak kalangan memimpikan kembali tentang “Islam yang mempesona”, yang toleran dan akomodatif terhadap kearifan lokal. Namun pesona wajah antropologis Islam yang damai itu, sering menghadapi dua masalah atau dipermasalahakan. Pertama, adanya asumsi dari sebagian muslim bahwa Islam yang akomodatif cenderung sinkretis sehingga tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya, unsur-unsurnya bernuansa bid’ah, dan dekat dengan syirik. Kedua, adanya pandangan Islam yang akomodatif terhadap lokalitas tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam, namun pandangan kedua ini cenderung terjebak pada romantisme-antropologika.<sup>58</sup>

NU selalu dikenal dengan organisasi masyarakat Islam yang paling dekat dengan tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Tetap konsen di dalam dakwah dan pergerakannya. Berbagai tradisi yang masih dan terus dikembangkan oleh NU walaupun dianggap oleh kelompok lain sebagai *bid’ah* dan *hufarat*, namun itulah karakter dasar Islam ke Indonesiaan yang sampai saat ini masih dan terus dibangun dan dikembangkan NU. Cara berpikir NU yang terus mempertahankan tradisi tidak lain adalah bahwa NU menjaga warisan leluhur yang telah mengembangkan Islam sambil terus menerus melakukan perubahan yang lebih baik. Kaidah yang akrab di kalangan NU adalah “mempertahankan warisan lama yang baik dan mengambil sesuatu

---

Sementara bagi kalangan yang berpandangan liberal, kebudayaan nusantara dianggap sebagai produk masa lalu, primitif.

<sup>56</sup> Jika yang pertama mengkampanyekan Islam di Indonesia bernuansa Arab ditambah dengan adanya tindakan mengkafir-kafirkan muslim yang menjalankan praktek ibadah sesuai konteks lokal, maka yang kedua bekerja untuk membentuk pribadi muslim lebih liberal dan mengarah pada proses sekurelisasi.

<sup>57</sup> Taufik Bilfagih, Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU Di Tengah Tantangan Global, *JURNAL AQLAM* -- Journal of Islam and Plurality -- Volume 2, Nomor 1, Desember 2016, h. 59.

<sup>58</sup> Moh Sochadha, Tauhid Budaya: Strategi Sinergitas Islam dan Budaya Lokal Perspektif Antropologi Islam, *Jurnal Tarjih*-Volume 13 Nomor 1 (2016), h.16.

yang baru yang lebih baik” (*al-muḥāfazah ‘alā qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*). Itulah yang menjadi fondasi NU tetap mempertahankan tradisi meski tetap melahirkan sesuatu yang baru.

Meski Islam merupakan agama yang datang dari luar Indonesia, namun catatan sejarah, sebagaimana yang telah dibahas di atas, membuktikan kehadirannya berada pada titik ketenangan, kedamaian dan berhasil membaur dengan tradisi masyarakat Nusantara. Selain karena Islam memang merupakan agama damai, para penyebar Islam masa-masa awal mampu menjalankan dakwahnya dengan piawai. Bagi NU, tradisi dakwah yang dilakukan Walisongo, tidak hanya menjadi khasanah peninggalan sejarah. Hingga saat ini, NU memposisikan dakwah Walisongo serta tradisi peninggalannya sebagai amaliah dan sebuah kekhasan yang harus dilestarikan. Maka tak heran, NU pun kemudian dianggap sebagai organisasi ke-agamaan yang tradisional.<sup>59</sup>

Ide Pribumisasi Islam yang digulirkan Gus Dur pada tahun 1980-an adalah penerjemahan dari jargon tersebut. Ide ini sekaligus untuk *mengcounter* pemahaman kalangan Islam fundamentalis yang dipandang ingin melakukan proyek Arabisasi di Indonesia dan menganggap bahwa Islam yang otentik mestilah yang berbau Arab atau Timur Tengah, khususnya yang dipraktikkan oleh generasi Salaf al-Ṣāliḥ. Islam Indonesia mereka nilai sudah tidak murni lagi karena sudah banyak dikotori oleh adat dan hal lain yang berasal dari luar Islam.

Pribumisasi Islam ingin menegaskan bahwa Islam Indonesia yang diwarnai dengan berbagai local wisdom adalah Islam. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap gejala ini, Gus Dur menggagas ide pribumisasi Islam yang memiliki beberapa karakteristik, yaitu *pertama*, Islam tidak dianggap sebagai alternatif ideologi, melainkan hanya dipandang sebagai faktor komplementer saja dalam kehidupan sosial, kultural, dan politik. *Kedua*, toleran dan menghargai tradisi, yaitu perlunya mempertimbangkan konteks lokal Indonesia ketika menerapkan ajaran Islam. *Ketiga*, progresif, bahwa Islam harus bisa berlapang dada untuk berdialog dengan tradisi pemikiran orang lain, termasuk dengan Barat. *Keempat* adalah membebaskan, Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan etnik maupun agama.<sup>60</sup>

Tradisi keagamaan Islam Nusantara yang berkembang sebagai peninggalan ulama terdahulu merupakan kekayaan identitas. Mulai dari praktek keagamaan yang berkaitan dengan memperingati kematian seseorang, syukuran/selamatan, ziarah dan sebagainya telah menjadi

---

<sup>59</sup> Taufik Bilfagih, “Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU Di Tengah Tantangan Global”, *JURNAL AQLAM*, *Journal of Islam and Plurality*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2016, h. 59.

<sup>60</sup> Rahmat, *Islam Pribumi, Islam Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2003). h. 22.



identitas masyarakat Islam Nusantara yang oleh pengaruh globalisasi perlahan mengalami penyusutan. Hal ini, mengantarkan NU untuk selalu siap dari semua sisi. Oleh karenanya, muncullah kemudian strategi lain yang dikelola oleh NU dalam menghadapi arus globalisasi bagi masyarakat nusantara, yakni dengan dirumuskannya Saptawikrama (tujuh strategi kebudayaan) Islam Nusantara. Konsep gerakan ini dilahirkan saat rakernas Lesbumi PBNU<sup>61</sup> pada 26 Januari 2016. Tujuh langkah strategi kebudayaan (*Al-Qawā'id Al-Sab'ah*) tersebut adalah, sebagai berikut;

Menghimpun dan mengkonsolidasi gerakan yang berbasis adat istiadat, tradisi dan budaya Nusantara.

1. Mengembangkan model pendidikan sufistik (tarbiyah wa ta'lim) yang berkaitan erat dengan realitas di tiap satuan pendidikan, terutama yang dikelola lembaga pendidikan formal (ma'arif) dan *Rabīṭah Ma'āhid Islāmiyyah* (RMI).
2. Membangun wacana independen dalam memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara secara ontologis dan epistemologis keilmuan.
3. Menggalang kekuatan bersama sebagai anak bangsa yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika untuk merajut kembali peradaban Maritim Nusantara.
4. Menghidupkan kembali seni budaya yang beragam dalam ranah Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan nilai kerukunan, kedamaian, toleransi, empati, gotong royong, dan keunggulan dalam seni, budaya dan ilmu pengetahuan.
5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan gerakan Islam Nusantara.
6. Mengutamakan prinsip juang berdikari sebagai identitas bangsa untuk menghadapi tantangan global.

Dari sini pentingnya NU untuk mengambil peran strategis dalam melanjutkan agenda gerakan berbasis dakwah Islam Nusantara. Melalui domainnya, NU pun menentukan arah sikap dalam mensosialisasikan Islam Nusantara pada makna yang substantif. Strategi NU tentang dakwah Islam Nusantara yakni dengan meningkatkan refleksi atau kelanjutan dari proses dinamika dalam perjuangan kebangsaan – bersama rakyat, di tengah rakyat dan akhirnya kembali ke rakyat. Sejak awal NU berdiri di baris paling depan menjawab tantangan keras

---

<sup>61</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara....*, h. 78. Lesbumi PBNU saat ini dinahkodai oleh Agus Sunyoto. Sepanjang tahun 2016, Lesbumi selalu aktif dalam kampanye dakwah Islam Nusantara, termasuk ditingkatkan daerah. Bahkan, Saptawikrama menjadi ikon penganugerahan yang diberikan bagi seseorang.

musuh-musuh bangsa. Jam'iyah NU, berani menanggung resiko besar dan berat. Keberanian, dan memiliki inisiatif dalam mengambil keputusan demi membela tradisi rakyat, tradisi Islam Nusantara.<sup>62</sup>

Di bumi Nusantara (Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI) terdapat tradisi dan budaya dalam sistem pengimplementasian ajaran agama, sehingga hal itu menjadi ciri khas Islam di Nusantara yang tidak dimiliki dan tidak ada di negeri lain. Perbedaan tersebut sangat tampak dan dapat dilihat secara riil dalam beberapa hal, antara lain<sup>63</sup>:

1. Dalam implementasi amalan Islam di Nusantara ada tradisi halal bihalal setiap tahun, *haul, silaturahmi* setiap hari raya (Idul Fitri), hari raya ketupat, baca solawat diiringi terbangun, sedekahan yang diistilahkan selamatan 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari, *tingkepan, sepasaran bayi, sepasaran pengantin*, arak-arak pengantin yang meliputi *undang mantu, ngunduh mantu*, sekaligus diadakan *Walimatul 'Urs* baik oleh keluarga wanita maupun keluarga laki-laki, dan tradisi lainnya.
2. Dalam hal berpakaian ada yang memakai sarung, berkopyah, pakaian adat Betawi, Jawa, Papua, Bali, Madura, dan masih banyak model pakaian adat lain, terutama terlihat dalam pakaian pernikahan dimana pengantin dirias dan dipajang di pelaminan, dan lain sebagainya.
3. Dalam hal toleransi pengamalan ajaran Islam, ada yang solat Id di lapangan, di masjid, musalla, bahkan ada hari raya dua kali. Ada yang shalat tarawih 20 rakaat, ada pula yang delapan rakaat. Di antara pelaksanaan tarawih ada yang memisahkannya dengan *taradhi* bagi empat *al-Khulafa' ar-Rasyidin*, dengan shalawat, dan ada yang memisahkannya dengan doa. Dalam acara akikah ada yang diisi dengan shalawatan, dan ada yang diisi tahlilan, dan selainnya.
4. Dalam hal toleransi dengan budaya yang mengandung sejarah atau ajaran, ada di sebagian daerah dilarang menyembelih sapi seperti di Kudus Jawa tengah yang konon merupakan bentuk toleransi Sunan Kudus pada ajaran Hindu yang menyucikannya, adat pengantin dengan menggunakan janur kuning, *kembang mayang*, dan selainnya.
5. Dalam toleransi dengan agama lain ada hari libur nasional karena hari raya Islam, hari raya Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan ada hari libur lainnya.

---

<sup>62</sup> Taufik Bilfagih, "Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU Di Tengah Tantangan Global", *JURNAL AQLAM*, Journal of Islam and Plurality, Volume 2, Nomor 1, Desember 2016, h. 65.

<sup>63</sup> Keputusan *Bahtsul Masail Maudhu'iyah* PWNU Jawa Timur tentang Islam Nusantara, hal. 3. Di Universitas Negeri Malang.

Ketika ditanya Apakah Islam Nusantara itu perlu digaungkan tidak cukup dengan Islam saja? Said Aqil menjawab bahwa sangat perlu karena disaat Afganistan, Timur Tengah penduduknya muslim perang terus, Irak, Yaman, Mesir sampai sekarang konflik belum selesai, tidak selesai-selesai, karena mereka tidak memiliki semangat nasionalisme”*ḥubb al-waṭan min al-imān*” . karena gak ada ulama timur tengah tidak ada yang berani mengatakan itu.<sup>64</sup>

Kaidah yang menyebutkan “*al-muḥāfaẓah ‘alā qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhḍh bi al-jadīd al-aṣlah*” (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik), akan menjadi filterisasi atas bermunculannya tradisi yang dibawa oleh ideologi impor tadi. Sehingga setiap masyarakat Islam Nusantara telah membentuk kepribadiannya sebagai komponen yang bijak dan selalu toleran terhadap perkembangan zaman. Kesadaran ini tentunya wujud dari pemakluman atas kehadiran ideologi transnasional tidaklah dilihat secara hitam-putih. Disinilah pentingnya organisasi sekelas NU berperan untuk membentengi *jam’iahnya*.

Melalui dakwah Islam Nusantara, menurut Said Aqil Siradj, NU secara serius berupaya untuk mengkampanyekan pemahaman terhadap realitas. Dalam sejarahnya upaya pemahaman manusia terhadap realitas menggunakan beberapa cara, antara lain menggunakan *bayān ilāhī* (pemahaman dari Tuhan) yaitu Al-Qur’an dan *bayān nabawī* yaitu Sunnah. Selain itu juga dilakukan dengan menggunakan *bayān al-‘aqlī* (pemahaman akal) yaitu ijma dan qiyas, maka lahirlah ilmu fikih, sehingga masyarakat mampu menjalankan agama dengan terinci dan operasional.<sup>65</sup>

Implementasi Islam Nusantara dan contoh budaya yang masih dihidupkan (*lived cultur*) dalam NU dapat dilihat secara *riil* dalam tabel berikut ini<sup>66</sup> :

---

<sup>64</sup> Youtube: Risalah 9 April 2016: "Islam Nusantara" Bersama Said Aqil Siradj.

<sup>65</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara....*, h.208.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) dan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat), Ahmad Fauzi, Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB. Hasil wawancara dengan Maria Ulfa Anshor dan Khairul Anam. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB

Tabel 14.  
Aplikasi Islam Nusantara.

Ajaran Islam		Nusantara
1	Islamnya menyuruh baca kalimah <i>ṭayyibah</i> .	Nusantaranya ada tahlilan, dzikir sehabis shalat. <sup>67</sup>
2	Islamnya menyuruh shalat <sup>68</sup>	Nusantaranya ditambahi puji-pujian sebelum shalat, sambil menunggu kehadiran jama'ah datang ke masjid, sekaligus sebagai tanda bahwa shalat jama'ah belum ditunaikan. Maksud lainnya juga untuk memberikan nasihat, mengingat kalimat-kalimat penting, seperti asmaul husna, sifat-sifat wajib Allah, sahabat Rasul, doa-doa dan harapan. Tergantung dari puji-pujian yang dilantunkan.
3	Islamnya menyuruh haji ke Mekah	Nusantaranya ada manasik dulu di alun-alun, miniatur ka'bah.
4	Islamnya menyuruh bersedekah	Nusantaranya ada bagi-bagi berkat, 7 hari, 100 hari, 1000 hari, 4 bulanan, 7 bulanan. tingkepan, sepasaran bayi, sepasaran pengantin, arak-arak pengantin yang meliputi undangan mantu, ngunduh mantu, sekaligus diadakan <i>Wafimah al-'Urs</i> baik oleh keluarga wanita maupun keluarga laki-laki, dan tradisi lainnya.
5	Islamnya menyuruh orang mengenal nabi.	Nusantaranya ada peringatan maulid nabi, sholawatan dan pembacaan al-berzanji (biografi nabi).

<sup>67</sup>Dzikir dengan bersuara keras. Sebagaimana dalam Shahih Bukhari, 7857. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata. Nabi Muhammad SAW bersabda, “saya akan berbuat sesuai dengan keyakinan hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku akan selalu bersamanya selama ia ingat kepada Ku. Jika ia ingat (berdzikir) kepada-Ku di dalam hatinya, maka Aku akan memperhatikannya. Dan jika ia menyebut Aku di dalam suatu perkumpulan, maka Aku akan ingat kepadanya di dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan yang mereka adakan” (Shahih al- Bukhari, 7857)

<sup>68</sup> *Uṣallī*. Pada umumnya orang-orang NU menjelang *takbīrāt al-iḥrām* selalu membaca “*Uṣallī Fard...*”. pengucapan itu hukumnya sunnah dan dimaksudkan untuk meneguhkan hati agar dalam memulai shalat bisa konsentrasi, pikiran tidak kemana-mana. Sekalipun tidak melafalkan *uṣallī* dibibir, kalau hatinya sudah niat menjalankan shalat tertentu, maka shalatnya juga tetap sah. sebetulnya kalimat *uṣallī* itu biasa diucapkan untuk memandu hati agar semakin khusus.

6	Islamnya menyuruh orang saling memaafkan.	Nusantaranya ada tradisi mudik, <i>sungkem</i> dan <i>ḥalāl bi ḥalāl</i> pasca lebaran.
7	Islamnya menyuruh nutup aurat.	Nusantaranya pake sarung <sup>69</sup> dan peci. Pake sorjan, blangkon, dan masih banyak model pakian adat lain, terutama terlihat dalam pakian pernikahan dimana pengantin dirias dan dipajang di pelaminan, dan lain sebagainya. <sup>70</sup> atau jeans juga tidak apa-apa, asal jangan ketat-ketat. <sup>71</sup>
8	Islamnya menyuruh " <i>Iqrā'</i> ", membaca dan belajar. <sup>72</sup>	Nusantaranya ada tradisi penulisan " <i>kitāb pegon</i> " (berbahasa jawa, sunda, melayu, dll), juga syair, tembang, lagu, ceria wayang, film dll, untuk mengajarkan agama pada masyarakat.

<sup>69</sup> Diantara budaya yang melekat kuat di kalangan NU adalah pemakaian sarung. Sehingga NU juga mendapatkan julukan kaum sarungan, karena hampir tidak pernah lepas dari sarung. Pada komunitas NU tertentu, sarung tidak sekedar sebagai pakaian, tetapi sekaligus sebagai pembeda dari kaum pembaharu yang diwakili oleh kelompok selain NU.

<sup>70</sup> Menurut Najib Burhani, sebagaimana dikutip oleh Akhmad Sahal, Islam Nusantara yang dipahami sebagai manifestasi dari sikap menghadapi globalisasi tersebut dapat digambarkan dengan istilah "*tanggannya Nusantara, tapi isinya Islam. Bajunya Indonesia tapi badannya Islam*". Lebih jauh, Akhmad Sahal memahami Islam Nusantara ala NU tersebut sebagai wujud dari kontekstualisasi Islam ketika dilihat dari perspektif *ushul* fiqih. NU benar-benar mempertimbangkan perubahan situasi dan kondisi masyarakat, dengan menjadikan prinsip kemaslahatan sebagai tolok ukurnya. Akhmad Sahal, *Islam Nusantara Dari Ushul Fiqh hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h.28.

<sup>71</sup> *Kopiah*. Salah satu pembeda antara NU dengan yang lainnya adalah Kopiah. Menggunakan kopiah selain berfungsi agar tidak ada rambut yang menghalangi anggota sujud ke tempat sujud juga bernilai kesopanan. Memakai kopiah dinilai lebih sopan dibanding tidak menggunakan kopiah.

<sup>72</sup> Kitab Kuning. NU memiliki kitab-kitab rujukan standar. Seperti (1) Tafsir: *Jalālayn, Ibn Kathīr, Munīr, Jamal, Marāghī* dll; (2) Hadist: *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Muslim, Riyāḍ al-Ṣāliḥīn, Bulūgh al-Marām, Arba'īn al-Nawawī, Mukhtaṣar Abī Jamrah, Jawāhir al-Bukhārī, Subul al-salam, Marāghī, Fatāwī, Lubāb al-Ḥadīth*, dll; (3) Fiqih: *Madhāhib al-Arba'ah, Al-Mutawatt'a', Jam' al-Jawāmi', Kifāyah al-Akhyār, Maḥallī, Iqnā', Faḥ al-Wahhāb, Faḥ al-Mu'īn, Minhāj al-Qawīm, Faḥ al-Qarīb, Kāshif al-Sajā, Safīnah al-Najāh, Mabādi' al-Fiqhiyyah*, dll; (4) Tauhid: *Umm al-Barāghīn (Dasūqī), Faḥ al-Majīd, Kifāyah al-'Awwām, Aqīdah al-'Awwām*; (5) Tasawuf: *Ḥikām, Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn, Sirāj al-Ṭālibīn, Mināḥ al-Saniyyah, Tanbīh al-Ghāfilīn, Bidāyah al-Hidāyah, Muraqāh al-'Ubūdiyyah, Kifāyah al-Atqiyā', Naṣā'ih al-Dīniyyah, Naṣā'ih al-'Ibād, Ishād al-'Ibād, Ta'lim al-Muta'allim*, dll.



9	Islamnya menyuruh " <i>tafaquh fi al-din</i> ,"	Nusantaranya ada TPQ, pesantren, UIN/STAI/STAIN dll
10	Islamnya menyuruh berkorban	Nusantaranya pakai kambing atau sapi
11	Islamnya menyuruh selalu ingat kepada Allah	Nusantaranya ada majelis dzikir, istighasah, pengajian akbar .
12	Islamnya menyuruh menghormati dan memuliakan tamu	Nusantaranya - khususnya di beberapa daerah tertentu - selalu disilakan makan (Jawa: <i>disuguh</i> ). <sup>73</sup>
13	Islamnya menyuruh mengenang nenek moyang agar tahu asal-usul dan "tempat kembali" (napak tilas sejarah Nabi Adam as dan Nabi Ibrahim as dalam haji)	Nusantaranya - selain haji tadi - ada tradisi ziarah walisongo, <sup>74</sup> makam leluhur dan haul.
14	Islamnya melarang memanggil Nabi dengan namanya saja	Nusantaranya ada " <i>Kanjeng</i> " Nabi Muhammad, atau Sayyidina.

<sup>73</sup> Selain tradisi menghormati tamu, dalam NU juga dikenal budaya *Kenduri*. Orang NU sangat akrab dengan budaya kenduri, yakni makan bersama dalam wadah yang besar yang biasa dikenal dengan nama asahan atau tumpeng. Makanan yang dimakan juga biasanya sama. Biasanya dilakukan tanpa menggunakan sendok maupun garpu, tetapi dengan menggunakan tangan.

<sup>74</sup> Orang NU biasa melakukan tradisi ziarah. Baik ziarah dilakukan kepada mereka yang masih hidup (*sowan*), tetapi juga kepada mereka yang sudah mati (*Nyekar*). Sebab orang-orang yang sudah mati pada hekekatnya juga sudah dihidupkan kembali. Mereka juga bisa melihat apa saja yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, hanya saja mereka tidak bisa komunikasi dengan mereka. *Nyekar* biasanya disertai dengan membersihkan di sekitar area makam atau kuburan. Rumput yang tinggi dipotong, di cangkul dan dibersihkan, batu nisan yang kurang tepat dibetulkan, lubang-lubang ditutup dan sampah-sampah yang ada dibersihkan. *Nyekar* biasanya dilakukan pada bulan-bulan tertentu, seperti pada bulan Sya'ban (biasanya 3 hari- 1 hari menjelang puasa Ramadhan) dan awal bulan Syawal (sehabis shalat Idul Fitri, banyak warga NU yang datang ke Makam untuk membacakan yasin, tahlil dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal agar mendapatkan ketenangan). Biasanya mereka juga menaburkan bunga agar makam berbau harum dan sedap dipandang. Selain itu tujuan *nyekar* adalah agar suasana makam tampak bersih dan segar, di samping itu juga tujuan *nyekar* adalah agar mengingatkan mereka yang masih hidup bahwa semua orang pada saatnya akan mati.

15	Islamnya menyuruh laki-laki disunat (dikhitan)	Nusantaranya si anak dinaikan ke kuda, diarak, karnaval ramai-ramai, seperti khitanan massal. Selain tasyakuran dan potensi wisata budaya (karena banyak yang nonton dan jualan), juga dimaksudkan agar yang dikhitan senang dan lupa sakitnya.
16	Islamnya menyuruh mengormati orang tua	Nusantaranya - antara lain - berbahasa kromo dan mencium tangan <sup>75</sup> orang tua, dan ngopeni (merawat) dan tidak menitipkannya di pantai Jompo.
17	Islamnya menyuruh diskusiin kalau ada problem ummat ( <i>wa shāwirhum fī al-amri</i> ),	Nusantaranya ada "musyawarah", " <i>baḥṡ al-masā'il</i> ", sidang MPR, dll.
18	Islamnya menyuruh kita bmembuat dan menciptakan negara yang aman, " <i>balād al-amīn</i> ".	Nusantaranya ada NKRI.
19	Islamnya mengajarkan membuat kesepakatan dalam bernegara: "Piagam Madinah".	Nusantaranya ada "Pancasila" yang isinya senafas dengan Islam
20	Islam mengajarkan Khitan	Nusantaranya ada <i>Walimah al-Hitān</i> <sup>76</sup>

<sup>75</sup> Cium Tangan: Salah satu budayaa yang akrab dan familiar di kalangan NU adalah mencium tangan orang yang di hormati. Biasa dilakukan oleh anak kepada orang tua, murid kepada guru, santri kepada kiai/ ustadz, habaib, yang muda kepada yang tualain sebagainya. Mencium tangan sebagai tanda penghormatan kepada mereka. Sebagaimana hadist: dari Zari RA, ketika dia menjadi salah satu delegasi suku 'Abdil Qais. Dia berkata, "kemudian kami bersegera turun dari kendaraan kita, kemudian kami mengecup tangan dan kaki nabi SAW (Sunan Abi Daud, 4548)". Imam Nawawi juga menuliskan dalam salah satu kitab karangannya, bahwa disunahkan mencium tangan orang-orang shaleh dan ulama yang utama. Namun mencium tangan selain orang-oarang itu hukumnya adalah makruh". (Fatwa Imam Nawawi, h. 79).

<sup>76</sup> Arab tidak punya tradisi *Walimah al-Hitān*, *Ḥalāl Bi Ḥalāl* (di sini dari Istana sampai RT), pujian-pujian Jawa itu banyak. Coba kalau orang tidak memiliki majlis, seperti jama'ah tahlilan, *mawlid* nabi ketika ada konflik maka akan sulit untuk dipertemukan, maka media-media tersebut sebagai media rekonsolidasi. Maka kalau NU itu kalau pilihannya kalah orang NU itu tidak

21	Islamnya menyuruh khutbah Jum'at	Nusantaranya Khutbah Jum'at dengan bahasa Indonesia <sup>77</sup>
----	----------------------------------	---

Sumber: Said Aqil Siradj,<sup>78</sup> hasil wawancara,<sup>79</sup> dan pengamatan penulis dilapangan.

Beberapa budaya dan amaliah NU lainnya yaitu:

1. Mengangkat tangan ketika berdoa, baik ketika sedang berdoa biasa maupun ketika qunut<sup>80</sup>.

ngamuk, seperti dulu KH. Hayim Muzadi, kalah, kita tidak marah. Pilihan kita kalah kita tidak marah. Karena ada majlis-majlis Dzikir, shalawat yang menyatukan itu sebagai media rekonsolidasi, Tapi kalau di Timur Tengah, kalau ada masalah, amaka akan sulit di pecahkan atau didamaikan, karena di Timur Tengah tidak seperti kita.

<sup>77</sup> Hal ini yang menjadi salah satu keberatan Said Aqil Sirojd terhadap MUI Sumbar dan MUI Kab/Kota se-Sumbar, menyatakan tanpa ada keraguan bahwa: Islam Nusantara dalam konsep/pengertian definisi apapun tidak dibutuhkan di Ranah Minang (Sumatera Barat). Bagi mereka, nama Islam telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apapun, demikian kesimpulan MUI Sumbar sebagaimana dokumen unggahan akun *Facebook* Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar (*Facebook* Ketua Umum MUI Sumbar, Buya Gusrizal Gazahar, pada 23 Juli 2018, dikutip detikcom). Tanggapan Said Aqil terhadap MUI Sumatra Barat/ Padang yang menolak IN dan mengatakan, "murtad" katanya: Beliau sendiri yang memurtadkan saya, tetapi kenapa khutbah Jum'atnya Buya Gusrizal Gazahar menggunakan Bahasa Indonesia? Karena Khutbah Jum'at pakai Bahasa Indonesia, ya IN itu. kalau tidak mau Nusantara, ya khutbah jum'at pakai bahasa Arab dong dari Awal sampai akhir, seperti paman saya almarhum, paman saya memang tidak mau khutbah jum'at pakai bahasa Indonesia, tetapi dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Arab. Paham tidak *audiens*, itu tidak penting, tetapi karena ini rukunnya sholat Jum'at maka menggunakan bahasa Arab. Dua khutbah pengganti dua rokaat sholat jum'at harus menggunakan bahasa Arab, terserah nanti, mau paham atau tidak itu urusan belakang. Karena kalau masyarakat mau paham, nanti diluar sholat jum'at. MUI dari Sumatra Barat, dia khutbahnya pakai bahasa Indonesia, dia sendiri sedang melakukan IN, tetapi anti IN, itu yang prinsip. (Hasil Wawancara dengan Said Aqil Siradj pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, di Kantor PBNU jalan Keramat Raya, lantai 3, pukul. 19.00-20.30 WIB).

<sup>78</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019, di Kantor PBNU jalan Keramat Raya, lantai 3, pukul. 19.00-20.30 WIB Youtube 164 Chanel, Said Aqil Siraj, Ceramah Gus Muwafiq Ungkap Kenapa Said Aqil Siradj Bilang Semakin Panjang Jenggot Semakin Goblok, Youtube. Diakses tanggal 10 April 2019.

<sup>79</sup> Wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) dan Abdul Muiz Ali (Anggota LDNU sekaligus Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat), Ahmad Fauzih, Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB. Hasil Wawancara dengan Maria Ulfa Anshor dan Khairul Anam. Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

2. Fatihah. Dalam setiap pembukaan rapat atau forum-forum resmi, orang-orang NU biasanya membukanya dengan bacaan Surat Al-Fatihah. Dalam pandangan NU, berkirim fatihah seperti itu, selain untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal, juga berfungsi sebagai taadduban (tatakrama), penghormatan kepada para pendahulu. Sedangkan pemakaian Surat Al-Fatihah sebagai pembuka berfungsi sebagai tabarukan (mengharap berkah) dari surat tersebut.
3. Jabat tangan usai shalat berjama'ah.<sup>80</sup>
4. *Khatm al-Qur'an*. Hampir semua organisasi di bawah payung NU mempunyai *jam'iyyah* (kelompok) *khataman al-Qur'an*. Kadang di lakukan mingguan, dwi mingguan, kadang bulanan. Tempatnya bergiliran di masing-masing rumah anggota.
5. *Semaan*.<sup>82</sup>
6. *Kilatan*. Salah satu budaya khas pesantren NU adalah adanya ngaji kilatan, yaitu pengajian dengan sistem/ model kilat (cepat). Biasa juga disebut dengan ramadhanan, karena lebih banyak dilakukan pada bulan ramadhan.
7. *Sowan*. Istilah yang biasa digunakan santri atau walisantri ketika menghadap kiai. Pemakaian istilah tersebut digunakan oleh mereka yang berstatus lebih rendah saat menemui para tokoh yang dinilai lebih tinggi dan alim. Namun dalam perkembangannya istilah tersebut tidak hanya digunakan oleh santri atau walisantri namun juga para tokoh NU ketika menghadap kiai yang di tuakan.

---

<sup>80</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh: Syekh Abdul Qadir al Jaclani, dalam kitabnya *Al-Ghunya Lī Tālib Tāriq al-Haqq*, Jus I: H. 40, yaitu: "(pasal) tatacara dalam berdoa adalah menengadahkan kedua tangan, bertahmid kepada Allah SWT, membaca shalawat Nabi SAW, lalu memohon hajatnya (apa, yang diinginkan). Ketika berdoa tidak melihat ke atas, dan sesuai berdoa mengusap mukanya dengan kedua tangannya. Karena ada hadist nabi SAW. "Mohonkanlah kepada Allah dengan (menggunakan) telapak tangan kalian." *Al-Ghunya Lī Tālib Tāriq al-Haqq*, Jus I: h. 40.

<sup>81</sup> Secara umum, orang NU meyakini bahwa berjabat tangan sesuai shalat adalah mubah. Tidak ada perintah maupun larangannya yang secara langsung dari Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadist : di riwayatkan dari al-Barra' bin 'Azib, ia berkata "Rasulullah SAW Bersabda "Tidaklah dua orang laki-laki bertemu, kemudian keduanya bersalaman, kecuali diampuni dosanya sebelum berpisah." (Sunan Ibn Majah, 3693). Berdasarkan hadist tersebut ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa bersalaman setelah shalat adalah sunnah.

<sup>82</sup> Nama untuk majlis khataman al-Qur'an. Istilah tersebut pertama kali di gagas oleh KH. Hamim Djazuli (Gus Mick). Dalam pelaksanaannya, biasanya beberapa orang hafidz (penghafal al-Qur'an) duduk bersila di panggung penghormatan. Salah satu dari mereka membaca al-Qur'an *bi al-ghā'ib* (tanpa melihat), sedangkan yang lainnya menyimak, juga dengan tanpa teks. Pembacaan al-Qur'an sampai khatam dalam sehari dan dilakukan dengan cara bergiliran. Sedangkan *mustami'in* (pendengar), menyimaknya dengan *bi al-naẓar* (melihat teks al-Qur'an).

8. *Magengan*.<sup>83</sup>
9. *Suroan*. Bagi kebanyakan orang NU, bulan Suro dalam penanggalan Jawa (Muharam dalam kalender Hijriyah) bernilai sakral. Setidaknya ada dua tanggal yang amat diistimewakan, yaitu tanggal 1 dan tanggal 10. Tanggal 1 Suro (1 Muharam) adalah Tahun Baru Islam, sedangkan tanggal 10 Suro (10 Muharam) adalah tahun kemenangan Islam. karena dinilai istimewa, biasanya jarang orang NU melewatkan kesempatan tersebut. Berbagai macam cara dilakukan dalam memperingati hari istimewa tersebut, misalnya: berpuasa, memperbanyak doa dan bersedekah pada anak yatim. Tradisi tersebut dikenal istilah Suroan. Masing-masing daerah memiliki model yang berbeda. Di Jawa juga dikenal dengan adanya kubur Suro, sebuah makanan khas yang dibuat hanya pada bulan suro.<sup>84</sup>
10. *Baḥṡ al-Masā'il*. Dikoordinasi oleh lembaga Syuriah (legislatif). Forum ini bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam baik yang berkaitan dengan mas'ulul fiqhiyyah (masalah fiqih) maupun masalah ketauhidan, bahkan masalah-masalah tasawuf. Forum ini biasanya diikuti oleh Syuriah dan ulama-ulama NU yang berada di luar struktur organisasi termasuk para pengasuh pondok pesantren. Baḥṡul masail NU merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dikatakan dinamis karena persoalan (*masā'il*) yang digarap selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat, dan dikatakan demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara ulama, antara kiai dengan santri, baik yang tua maupun yang muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan berwawasan luas sebab dalam baḥṡul masail tidak ada dominasi madzhab dan selalu sepakat dalam khilaf.<sup>85</sup>
11. Salam Penutup. Dengan kalimat *Wa Allāhu Muwāfiq ilā Aqwām al-Ṭāriq*. Pada awalnya NU menggunakan salam penutup *Wa billāhi al-*

---

<sup>83</sup> Nama dan salah satu budaya yang melekat pada warga NU, pada hari terakhir di bulan Sya'ban, atau sehari sebelum bulan Ramadhan. Bentuknya adalah sedekah makan makanan matang. Kadang makanan itu dibawa ke masjid atau mushola untuk dimakan bersama, kadang diantar kerumah-rumah tetangga dan kerabat. Maksud dari tradisi magengan tersebut adalah sebagai ungkapan rasa syukur masih diberi kesempatan menemui bulan ramadan. Disamping itu juga sebagai peringatan diperbolehkannya makan terakhir pada siang hari, sebab besoknya sudah tidak masuk bulan Ramadhan yang dilarang makan dan minum di siang hari. Budaya dan amaliah tersebut masih belum pudar, baik di kampung-kampung Jawa maupun Betawi (berdasarkan hasil pengamatan penulis).

<sup>84</sup> Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliah Uswah NU*, (Surabaya: Khalista bekerjasama dengan Lajnah Ta'lif Wan Nasr (LTN NU) Jawa Timur, 2010), h. 150.

<sup>85</sup> Sahal Mahfudz, *Baḥṡul Masail dan Istimbat Hukum NU; Sebuah Catatan Pendek, dalam Islam Nusantara Dari Ushul Fiqih Hingga Paham Kebangsaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), h. 51.



*Tawfiq wa al-Hidāyah Wa al-Riḍā wa al-Ināyah*. Meski tidak ada ketentuan resmi, namun salam penutup itu sudah menjadi kelaziman dipakai dalam pidato maupun dalam penutup surat sejak lama, baik resmi maupun tidak resmi. Namun sejak di pakai oleh Golkar dengan menggunakan kalimat yang sama, NU mengubah menjadi *Wa Allāhu Muwāfiq Ilā Aqwām al-Ṭāriq*.

Adapun mengenai budaya *larung* atau sedekah laut, menurut Said Aqil Siradj sedekah laut, itu tradisi bukan ibadah, adat bukan *ta'abbud*, kalau *ta'abbud* itu juga tidak boleh/musyrik. Tradisi kita yang Arab tidak punya; *Walimah al-Khitān, Ḥalāl Bi Ḥalāl* (di sini dari Istana sampai RT), pujian-pujian Jawa itu banyak. Coba kalau orang tidak memiliki majlis, seperti jama'ah tahlilan, maulid nabi ketika ada konflik maka akan sulit untuk dipertemukan, maka media-media tersebut sebagai media rekonsoliasi. Maka kalau NU itu kalau pilihannya kalah orang NU itu tidak ngamuk, seperti dulu KH. Hayim Muzadi, kalah, kita tidak marah. Pilihan kita kalah kita tidak marah. Karena ada majlis-majlis Dzikir, sholawat yang menyatukan itu sebagai media rekonsoliasi, Tapi kalau di Timur Tengah, kalau ada masalah, amaka akan sulit di pecahkan atau didamaikan, karena di Timur Tengah tidak seperti kita. Pendukung 01, 02 di Jawa Timur, sudah ketemu dan sudah kumpul. Di Jakarta sesama NU pendukung 01 dan 02 sudah ketemu.<sup>86</sup>

Menurut Maria Ulfa Ansor, mengenai budaya larung, kalau seandainya di maknai sebagai budaya maka itu adalah kebudayaan dan salah satu kekayaan dari keragaman budaya Indonesia. Kalau kemudian dimaknai sebagai salah satu budaya TBC, Mari Ulfa Ansor agar kiranya anggapan tersebut perlu di cek terlebih dahulu; apakah kemudian yang mereka lakukan itu adalah persembahan untuk makhluk halus sebagaimana keyakinan animisme? Karena yang melakukannya juga orang muslim, kemudian mereka shalat, mereka suka cita dan tidak ada niatan untuk melakukan persembahan kepada makhluk halus.

Kalau kita memaknainya sebagai budaya, ya itu merupakan salah satu kekayaan dari budaya, kekayaan tradisi ya itu budaya, itu salah satu keragaman budaya Indonesia. Tetapi kalau kita memaknainya apakah itu TBC? ya nanti dulu kita cek dulu, apakah iya seperti itu? padahal mereka melakukannya, mereka nglarung, ngelaut, itu dengan suka cita, bergembira, tidak ada keyakinan bahwa ini adalah persembahan untuk makhluk halus (sebagaimana animisme yang dulu) ini konteksnya berbeda tidak seperti dulu, karena mereka juga muslim, mereka juga ebetulnya shalat, kita bisa cek bahwa nelayan-

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

nelayan itu juga sholat, bahwa mereka itu masih tetap *nglarung* itu ya karena tradisi, tradisi yang sudah turun menurun terlepas dari itu diyakini atau tidak diyakini yaitu tradisi ya itu budaya jadi kebudayaan, dan mereka muslim.<sup>87</sup>

Maria Ulfa menambahkan, tradisi “*nglarung*” itu merupakan salah satu kekayaan tradisi Indonesia yang harus dilestarikan. Namun seandainya persembahan itu dilakukan untuk dipersembahkan kepada selain Allah, ya itu berarti musyrik, tetapi problemnya mereka tidak selalu mengatakan bahwa persembahan itu persembahan kepada selain Allah dan sebetulnya semua itu tergantung juga dari niatnya untuk apa.<sup>88</sup>

Lain halnya dengan A. Khairul Anam mengatakan bahwa budaya Larung/ sedekah laut, tentang kebiasaan sedekah bumi, nyuci keris dan lain-lain adalah bagian dari *tawassul*.

Kalau mau dicari data argumennya sih ada, *tawassul* misalnya, berdoa dengan wasilah, bisa dengan benda, bisa dengan bacaan, bisa dengan amal sholeh tapi semuanya untuk kesana, jadi misalya kita mau menyembuhkan orang dengan minum-minum air putih, sebagai wasilah dan kita doakan, apakah itu berarti kita mengharapkan kepada air putih itu agar bisa menyembuhkan orang yang sakit itu, tentunya tidak, kita tetap mengharapkan kepada Allah SWT melalui pelantara atau wasilah air dan doa, itupun sama dengan kepercayaan orang-orang terhadap benda, keris dan lain sebagainya tetapi bahwa itu misalnya pingin menghilangkan keris atau benda-benda lainnya tidak usah disucikan ya tidak masalah, sebagai *tawassul* saja, optimesme, sebagai *tawassul* (sebagai pelantara saja).

Ahmad Khairul Anam menambahkan bahwa:

umumnya masyarakat NU itu kan santri, pintar membaca kitab kuning, yang *ngelarung* itu sudah hampir tidak ada, kalau ziarah kubur iya, dan bukan hanya NU sebetulnya yang ziarah kubur, termasuk belakangan orang Muhammadiyah juga ziarah kubur. Tetapi misalnya kalau ada orang yang masih melakukan tradisi-tradisi itu, kita biarkan saja, tidak kemudian dikit-dikit kita bilang bid'ah, dikit-dikit khurafat, dikit-dikit tahayul. Kita biarkan saja karena esensinya kita tidak meminta kesana, kita itu Islam. nah itulah bedanya karakter antara Islam Nusantara dengan puritanisme

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Maria Ulfa Anshor Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Sabtu, Tanggal, 06 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Maria Ulfa Anshor Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Sabtu, Tanggal, 06 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

(puritanisme dikit-dikit akan terganggu dengan hal itu, dikit-dikit TBC)<sup>89</sup>

Namun dalam dakwah/ jalannya dakwah tidak selalu mulus, tidak selalu sesuai dengan cita-cita dan harapan. Salah satu Tantangan dari sinergi Islam dan budaya lokal nusantara yang menghasilkan kearifan tradisi keagamaan dalam konteks kekinian cenderung dipengaruhi oleh ideologi globalisme dengan kapitalisasi sebagai motornya. Globalisasi menunjuk pada dua aspek kehidupan, yaitu ekonomi dan sosial budaya.<sup>90</sup>

Melalui dakwah Islam Nusantara menurut Said Aqil Siradj, NU secara serius berupaya untuk mengkampanyekan pemahaman terhadap realitas. Dalam sejarah nya upaya pemahaman manusia terhadap realitas menggunakan beberapa cara, antara lain menggunakan *bayān al-ilāhī* (pemahaman dari Tuhan) yaitu Al Qur'an dan *bayān al-nabawī* yaitu Sunnah. Selain itu juga dilakukan dengan menggunakan *bayān al-'aqlī* (pemahaman akal) yaitu ijma dan qiyas, maka lahirlah ilmu fikih, sehingga masyarakat mampu menjalankan agama dengan terinci dan operasional.<sup>91</sup>

*Manhaj al-Fikr* NU berbeda dengan pola atau cara berislam yang sangat berorientasi pada purifikasi atau pemurnian yang mempunyai hasrat kuat pada keaslian dan masa lalu. *Lived culture* yang terus hidup di NU tidak berorientasi pada masa lalu, namun berpijak pada tradisi, kelokalan, dan kekinian. Beberapa contoh budaya yang terus dihidupkan NU adalah: slametan, puji-pujian sebelum shalat, tahlilan, dzikir shabab shalat, maulid nabi, pembacaan al-berzanji (biografi nabi), halal bihalal pasca lebaran, memakai sarung peci, sorban, istighasah, pengajian akbar, ada tradisi ziarah walisongo, makam leluhur, haul, *baḥṡ al-masā'il*, mempertahankan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

Agus Salim, ketua Lembaga Dakwah PBNU mengatakan bahwa jika agama tanpa budaya itu sempit.

Agama tanpa budaya itu sempit. Contoh misalnya kalau agama budaya itu turun di Arab dengan memakai Gamis, lah kalau di Indonesia itu bagaimana, kalau harus memakai Gamis, lah wong

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara Khoirul Anam, MA (Wakil Pimpinan Redaksi NU Online PBNU) Tempat: Kampus A Universitas Nahdlatul Ulama, Jl. Taman Amir Hamzah 05 Menteng, Pegangsaan, Jakarta Pusat. Hari: Minggu, Tanggal, 07 April 2019, Jam 11.30-13.00 WIB.

<sup>90</sup> Thomas H. Eriksen, *Globalistion Studies in Anthropology* (London: Pluto Press, 2003)

<sup>91</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara....*, h. 208

masyarakat Indonesia itu berkebun, bertani, itu bagaimana? Gak bisa kemudian berkebun, bertani itu memakai gamis.<sup>92</sup>

Agus Salim menambahkan bahwa:

Untuk mengetahui ciri Islam di Nusantara ini gampang, misalnya para Kiyai NU itu khutbah dengan menggunakan bahasa Indonesia, nah itulah salah satu ciri Islam Nusantara. menghargai lokal, toleransi, ciri lainnya dalam masalah ideologi ya tidak terlepas dari madzhab empat. Ciri khas lainnya ya *Ahl al-sunnah wa al-Jamā'ah, tawassuṭ* /moderat (tengah-tengah/ tidak Ektrim Kanan (Fundamental, Islam radikal, Islam garis keras, seperti Wahabi, FPI), tidak Estrim Kiri; Liberalis), disamping tawasut ada tasamuh/toleran. Kenapa kemudian kita harus toleran? Ya itu Aswaja itu dalam hal agama selalu meninjau kepada dua aspek; aspek lahiriyah dan aspek batiniyah. Kalau orang yang paham ini, dia tidak mungkin tidak bertoleransi. Sebagaimana yang difirmankan Allah, “kalau Aku mau, akan kujadikan kalian semua beriman kepadaKu, aku akan jadikan semua orang beriman kepadaku, lalu kenapa kalian memaksa-maksa mereka untuk beriman kepadaku.

Artinya apa: disini Allah sudah menentukan dan menetapkan, lalu kenapa kalian ingin merobah ini? Siapa sih kamu ingin mengubah-ubah sesuatu? Dan ini apa namanya? Kalau menentang AlQur'an? atau sekuat apa sih kamu? Artinya dalam hal toleransi sesuai dengan al-qur'an/ tidak menentang al-Qur'an. Batasan toleransi dalam segi lahiriyah dan insaniyah, kalau dalam segi ideologi maka sudah final (Dalam hal akidah), *lakum dīnukum wa liya al-dīn*, namun dalam hubungan kemanusiaan? Kalau kita berani menghina manusia maka kita sesungguhnya kita telah menghina yang telah menciptakan manusia.<sup>93</sup>

Masih menurut Agus Salim, dalam hal toleransi pengamalan ajaran Islam, ada yang sholat Id di lapangan, di masjid, musalla, bahkan ada hari raya dua kali. Ada yang shalat tarawih 20 rakaat, ada pula yang delapan rakaat. Di antara pelaksanaan tarawih ada yang memisahkannya dengan taradhi bagi empat *al-Khulafā' al-Rāshidīn*, dengan shalawat, dan ada yang memisahkannya dengan doa. Dalam acara akikah ada yang diisi dengan shalawatan, dan ada yang diisi tahlilan, dan selainnya. Dalam hal toleransi dengan budaya yang mengandung sejarah atau ajaran, ada di sebagian daerah dilarang menyembelih sapi seperti di Kudus Jawa tengah yang konon merupakan bentuk toleransi Sunan Kudus pada ajaran Hindu yang menyucikannya, adat pengantin dengan menggunakan janur kuning,

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

kembang mayang, dan selainnya. Dalam toleransi dengan agama lain ada hari libur nasional karena hari raya Islam, hari raya Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan ada hari libur lainnya.<sup>94</sup>

### C. Menghadapi Radikalisme, Arabisme dan Wahabisme (*Wal-akhd bi al-jadid al-aṣlah*.)

Perkembangan Islam di Indonesia pasca disebarakan oleh para wali mengalami kemunduran dalam hal hidup berdampingan dengan penuh kebersamaan di tengah-tengah perbedaan. Setidaknya hal ini dapat dilihat dari awal masuknya Islam di Indonesia (Nusantara). Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya proses Islamisasi secara damai itu karena kepiawaian para *muballigh*-nya dalam memilih media dakwah, seperti pendekatan sosial budaya, tata niaga (ekonomi), serta politik. Dari berbagai literatur terungkap bahwa aspek tersebut menempati posisi cukup strategis dalam upaya untuk melakukan Islamisasi di bumi Nusantara. Hal itu bisa dipahami karena sebagian besar para pedagang kala itu telah memeluk agama Islam, seperti pedagang dari Arab Saudi, maupun dari daerah lain, seperti Gujarat, termasuk juga Cina.

Namun seiring perjalanan waktu, dalam konteks ke Indonesiaan dakwah dan perkembangan Islam mengalami kemunduran dan penuh dengan penodaan. Gejala kekerasan melalui gerakan radikalisme mulai bermunculan. Terlebih setelah kehadiran orang-orang Arab muda dari Hadramaut Yaman ke Indonesia yang membawa ideologi baru ke tanah air telah mengubah konstelasi umat Islam di Indonesia. Ideologi baru yang lebih keras dan tidak mengenal toleransi itu banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi. Ideologi tersebut melahirkan tokoh seperti; Ustadz Abu Bakar Baasyir, Ja'far Umar Talib dan Habib Rizieq Shihab yang dituduh sebagai penganut Islam garis keras.<sup>95</sup>

Kemudian dalam catatan sejarah radikalisme Islam semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi, Sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI). sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama dan sebagainya. Dalam sejarahnya gerakan ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, hanya saja bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya,

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Agus Salim, (Ketua Lembaga Dakwah/ LD PBNU) Tempat: Kantor PBNU, Jakarta Pusat. Hari: Rabu, Tanggal, 10 April 2019, Jam 15.30- 17.30 WIB.

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Said Aqil Siraj, Agus Salim, Abdul Muiz Ali, Imdadu Rahman, Maria Ulfa, dan Khairul Anam.



ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad, dalam rangka mendiskreditkan Islam.

Setelah itu sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih *visible*, lebih militan dan lebih vokal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini *lebih visible*.<sup>96</sup>

Setelah DI, muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal sama. Dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam, 1978.<sup>97</sup> Tidak lama kemudian, setelah pasca reformasi, muncul lagi gerakan yang beraroma terorisme yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang bertebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dll.

Dalam konteks Internasional, realitas politik standar ganda Amerika Serikat (AS) dan sekutunya merupakan pemicu berkembangnya Radikalisme Islam. Perkembangan ini semakin menguat setelah terjadinya tragedi WTC pada 11 September 2001 mengenai tragedi ini AS dan sekutunya disamping telah menuduh orang-orang Islam sebagai pelakunya juga telah menyamakan berbagai gerakan Islam militan dengan gerakan teroris. Selain itu, AS dan aliansinya bukan hanya menghukum tertuduh pemboman WTC tanpa bukti, yakni jaringan Al Qaeda serta rezim Taliban Afganistan yang menjadi pelindungnya, tetapi juga melakukan operasi penumpasan terorisme yang melebar ke banyak gerakan Islam lain di beberapa Negara, termasuk Indonesia.<sup>98</sup>

Dalam konstelasi politik Indonesia, masalah radikalisme Islam telah makin membesar karena pendukungnya juga makin meningkat. Akan tetapi gerakan-gerakan ini terkadang berbeda tujuan, serta tidak mempunyai pola yang seragam. Ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan "negara Islam", namun ada pula yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia; disamping yang memperjuangkan berdirinya "kekhalifahan Islam", pola organisasinya pun beragam, mulai dari gerakan moral ideologi seperti Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut tahrir Indonesia sampai kepada gaya militer seperti Laskar Jihad, FPI dan FPI Surakarta.

---

<sup>96</sup> Azyumardi Azra, dalam Artikel Tempo (15-12-02) "Radikalisme Islam Indonesia".

<sup>97</sup> M. Zaki Mubarak, *Gencologi Islam Radikal di Indonesia*, ( Jakarta :LP3ES, 2008).

<sup>98</sup> Endang Turmudi (cd), *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta :LIPI Press, 2005), h. 5.

Gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia sebagian besar adalah berangkat dari ketidakpuasan dan adanya keinginan untuk menjadikan atau menerapkan syariat Islam di Indonesia, bagi mereka, terjadinya ketidakadilan, banyaknya korupsi, krisis yang berkepanjangan dan ketidakharmonisan antara kaya dan miskin adalah akibat dari tidak diterapkannya syariat Islam.

Radikalisme dalam artian bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Bila dilihat dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham/aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa.

Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi radikalisme. Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata '*radic*', sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. Ketiga adalah kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti 'kerakyatan' atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal.<sup>99</sup>

Faktor-faktor signifikan yang menyebabkan munculnya kekerasan dengan membawa bendera agama, adalah:

1. Faktor kultural. Munculnya ketidakadilan global dan tindakan sewenang-wenang negara yang kuat secara politik, militer, dan

---

<sup>99</sup> Tarmizi Taher, et. all, *Radikalisme Agama*, (Jakarta: PPIM IAIN ), h. xvii – xviii.

ekonomi terhadap umat Islam menjadi pemicu utama lahirnya tindak kekerasan. Bisa dikatakan bahwa aksi-aksi kekerasan seperti peledakan bom, bom bunuh diri, penyanderaan, dan aksi kekerasan lainnya hanyalah sebagai reaksi atas tindakan teror yang dilakukan negara-negara kuat tersebut. Dari segi kultur, politik, maupun ekonomi, Barat mendominasi dunia. Sedangkan peradaban lain dipandang sebagai marginal. Kebangkitan Islam dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan peradaban Barat, terutama sesudah runtuhnya komunisme. Ketidakadilan dan standar ganda yang diterapkan oleh AS memupuk rasa kebencian sebagian kalangan Islam terhadap Barat, terutama Amerika. Maka wajarlah apabila sebagian besar pelaku tindakan kekerasan terhadap obyek-obyek Barat selama ini selalu beralasan bahwa tindakan mereka sebagai balasan terhadap kezaliman dan reaksi terhadap ketidakadilan global, terutama negara besar pengusung ideologi kapitalisme, yakni AS dan sekutunya terhadap kaum Muslim di seluruh dunia.

2. Faktor sosial dan politik. Gejala radikalisme di dunia Islam lahir dalam situasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang oleh pendukung gerakan Islam radikal dianggap sangat merugikan umat Islam terus-menerus yang dilakukan barat seperti dukungan Amerika terhadap rezim korup dan represif Timur Tengah, dukungan membabi buta AS, baik ekonomi maupun militer terhadap Israel dan Invasi AS dan sekutu-sekutunya terhadap Afganistan dan Irak yang dijadikan alasan pembenar pelanggaran terhadap kedaulatan negara, yang sebenarnya ada motif kepentingan AS di Timur Tengah, yaitu akses ekonomi ke Asia Tengah yang banyak memiliki cadangan minyak. Semua tindakan tersebut menimbulkan kemarahan, kebencian dan beban emosional yang mendalam bagi dunia Muslim.
3. Faktor solidaritas dan sentimen agama. Dalam ajaran Islam, semua umat Islam adalah saudara dimana pun berada, baik satu negara maupun lain negara. Mereka diikat oleh satu keyakinan dan satu Iman tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa ataupun kulit. Rasulallah menggambarkan bahwa umat Islam itu seperti satu tubuh yang apabila salah satunya sakit maka tubuh yang lainnya juga akan merasa sakit. Artinya bila seorang atau kelompok Muslim disakiti oleh sesama muslim maka harus dihentikan dan didamaikan. Bila mereka disakiti oleh non muslim maka mereka harus dibela kapan pun dan dimana pun.
4. Dangkalnya pemahaman terhadap agama. Tindakan radikalisme yang berlatar belakang agama banyak dilakukan oleh orang atau kelompok yang memiliki pemahaman agama yang dangkal. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya sikap radikalisme dan ekstrimisme adalah kurangnya pengetahuan agama dan salah dalam memahami teks-teks agama serta kekacauan akidah, kedangkalan berpikir dan emosional. Indikator dari ekstremisme beragama,

menurut Yusuf al-Qardhawi (1981) antara lain fanatisme dan intoleransi sebagai akibat dari prasangka (*prejudice*), kekakuan (*rigidity*), dan kepicikan pandangan (*lack of insight*) sehingga mudah sekali menghakimi orang yang berbeda pandangannya dengan sebutan penganut bid'ah, kafir, fasik, murtad dan sebagainya. Beberapa oknum yang melakukan kegiatan radikalisme dan terorisme diketahui sebagai orang yang memiliki latar belakang pendidikan sekular, seperti Osama bin Laden, Aiman Al-Zawahry, Azhari, Noordin M. Top.

5. Pengaruh penyebaran wacana dan gerakan Islam di Timur Tengah yang lebih dikenal sebagai organisasi transnasional juga menyuburkan gerakan-gerakan radikalisme. Organisasi ini menyebar dan berdiaspora ke seluruh dunia secara besar-besaran. Awalnya organisasi transnasional Islam ini lebih banyak berkiprah dalam persoalan dakwah, seperti Hasan al-Bana, Sayyid Quṭub, Muḥammad Quṭub (*Iḥwān al-Muslimīn*), Abū A'lā al-Mawdūdī (*Jamā'at Islāmī*), Taqīyudīn al-Nabḥānī (*Ḥizb al-Tahrīr*), Luthfi Sayyid (Takfir wa al-Hijrah), Ḥasan al-Turabī (National Islamic Front/NIF), Syaikh 'Abbasi Madanī dan Afi Benhadj (FIS), Syaikh Yāsin (Hammas), Refah (Turki), Taliban (Afghanistan), al-Mujāhidīn (Irak), Jam'iyyah Ruhaniyyah Mobarez (Iran), Hizbullah (Libanon), Wahabī (Arab Saudi), Hizban Nahdlah (Tunisia), al-Ikhwān (Suriah), al Haq (Yaman), Arab Revolutionary Brigades (Kuwait) dan Munazzamat al-'Amal al-Islāmī (Bahrain), Aḥmadiyyah di India, Darul Arqām di Malaysia, Hizbu al-Da'watil Islāmiyyah di Iraq, Jam'iyat al-Da'wah al-Islāmiyya di Libya, al-Majlis al-Alā Shu'ūn al-Islāmiyyah di Mesir, dan Rabīṭah al-'Alam al-Islāmī di Saudi Arabia.
6. Pemahaman yang salah terhadap jihad. Sikap radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme di Indonesia adalah sebuah pemahaman salah tentang jihad. Banyak pemahaman yang keliru tentang jihad sehingga melahirkan stigma dan citra yang menakutkan tentang Islam. Pelaku radikalisme dan terorisme sering melegitimasi tindakannya pada ayat-ayat al-Qur'an secara sembarangan. Mereka memahami teks Al-Qur'an dan Sunah tanpa interaksi secara intens dengan realitas sehingga akan membentuk cara pandang yang sempit hingga berujung pada radikalisme. Mereka (teroris) mengira apa yang dilakukan dengan memakan korban orang yang tidak bersalah termasuk membunuh sendiri (bunuh diri) akan masuk surga.
7. Faktor kemiskinan. Radikalisme yang berbasis kelompok agama terkait erat dengan kemiskinan. Hal ini didukung fakta bahwa radikalisme banyak terjadi di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin. Radikalisme ini diekspresikan dalam bentuk pemberontakan sebagian masyarakat yang kecewa terhadap pemerintahannya yang dinilai telah gagal menciptakan kesejahteraan

rakyatnya, perang saudara antar-etnis, golongan, ideologi demi sebuah kekuasaan dan untuk menguasai kekuasaan, dan yang lainnya. Semua sikap radikalisme ini mempunyai tujuan untuk mengentaskan kemiskinan yang membelitnya.

8. Kebijakan pemerintah yang merugikan umat Islam. Kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepentingan umat Islam juga menjadi salah satu timbulnya sikap radikalisme dan terorisme. Faktor tersebut memiliki kaitan dengan historis umat Islam di Indonesia yang selalu berperan aktif dan menjadi ujung tombak perjuangan dalam setiap revolusi dari jaman penjajahan sampai sekarang tetapi terbelakang dalam menikmati hasil perjuangannya. Karena itu, muncul aksi-aksi menuntut hak atas nama agama, dalam berbagai bentuk aksi kekerasan. Seperti sikap represif yang di praktikkan di Mesir yang berusaha memberangus gerakan Ikwanul Muslimin bahkan membunuh pemimpinnya, Hasan al-Banna yang menyebabkan kemarahan anggotanya sehingga menganggap pemerintah Mesir telah berbuat kejam kepada sebagian kelompok umat Islam sehingga kelompok gerakan Ikwanul Muslimin sering menggunakan cara-cara radikal untuk melawan pemerintah Mesir.
9. Faktor anti Barat. Setelah Uni Soviet hancur dan paham Komunisme pun dapat dipadamkan maka paham Kapitalisme yang dipimpin Amerika Serikat sekarang mempunyai rival baru yang ditakuti yaitu paham ideologi Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Citra Islam yang dianggap oleh Barat adalah sebuah ideologi yang sangat berbahaya yang perlu dibendung penyebarannya. Masyarakat Barat yang cenderung kepada kebebasan yang telah melahirkan paham liberal, yang mengganggu hak-hak azasi manusia dan sistem demokrasi telah merampas hak kebebasan Negara Islam, menginjak-injak hak asasi manusia, dengan menanamkan paham imperialisme-kolonialisme, sehingga melahirkan kesengsaraan bangsa-bangsa terutama terhadap Umat Islam.

#### Karakter Fundamentalis/ puritan /Dakwah Salafi

1. Membid'ahkan dan memusyrikkan amalan-amalan kaum pesantren: *Mawlūdan*, Ziarah Kubur, *Dziba'an*, Tahlil, Dzikir, Tariqah, dan sebagainya. Ini dianggap menodai kemurnian Islam.
2. Literalis (*harfīyyah*): menolak ta'wil dan penafsiran Qur'an dan Sunnah secara yang tersurat.
3. Tidak mengakui akal: membatasi sumber istinbath hanya dengan wahyu. Wahyu merupakan sumber satu-satunya dalam Islam.
4. Anti imam-imam madzhab dan membuang kitab kuning. Hanya menganut Imam Ahmad Bin Hambal versi Ibnu Taymiyyah, dan Muhammad Bin Abdul Wahhab.



5. Intoleran: cenderung memusuhi kelompok lain dan menganggap hanya ajaran kelompoknya sendiri yang benar. Mudah mengkafirkan orang yang tidak seajaran dengan mereka.

#### Karakter Islamis-Radikal dan Kelompok Teroris

1. Kelompok ini memiliki persamaan dengan karakter kelompok fundamentalis (sebagaimana diuraikan di depan).
2. Radikal: menganggap kehidupan Islam dan sistem kenegaraan yang telah ada di dunia muslim sebagai penyimpangan, dan harus diubah dengan cara yang mendasar.
3. Pro-kekerasan: kondisi yang menyimpang harus diluruskan baik dengan jalan dakwah maupun jalan jihad (perang).
4. Fanatik-militant: meyakini dengan mutlak bahwa ajarannya sendiri sebagai kebenaran tunggal yang harus disebarluaskan dengan jalan apapun.
5. Anti-Barat: Barat dipersepsikan sebagai “biang kerok” hancurnya sistem kehidupan yang Islami baik budayanya, intelektualnya, ekonominya, maupun sistem politiknya.
6. Politis: meyakini bahwa kekuasaan politik negara harus diraih karena merupakan kewajiban agama. Mereka yang tidak menerapkan Negara Islam adalah kafir dan boleh dibunuh meskipun orang Islam.
7. *Tatharruf*: menempatkan yang sunnah sebagai wajib, menjadikan yang furu’ sebagai ushul, mengubah yang profan sebagai sakral.

#### Agenda Islamis-Radikal dan Kelompok Terorisme

1. Merobohkan NKRI dan anti Pancasila. Menjadikan Islam sebagai entitas politik. Islam difahami, dipersepsikan dan dipakai sebagai ideologi politik untuk membentuk sistem negara yakni negara Islam (*al-dawlah al-Islāmiyyah*) atau Khilafah Islamiyah versi mereka sendiri.
2. Menerapkan ajaran Islam dalam masyarakat menurut versi mereka. Perempuan harus memakai cadar, pemisahan yang ketat antara laki-laki-perempuan, laki-laki harus memakai jenggot, celana ngatung dan gamis. Tanpa menerapkan hal tersebut, masyarakat dianggap jahiliyah.

Tabel 15. Perbedaan Radikal, Ekstrim, Fundamental dan Terorisme

Aspek	Radikal	Ekstrim	Fundamental	Terorisme
Pengertian	Paham (teori) yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara dratis dan kekerasan (sikap ekstrim dari suatu aliran politik)	Paham keyakinan yang sangat kuat yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum	Paham gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat untuk kembali kepada prinsip-prinsip agama Islam	Teror secara etimologi berarti menciptakan ketakutan yang dilakukan oleh orang atau golongan tertentu. Sementara

		yang berlaku (fanatik yang berlebihan dan keras)	yang fundamental	terorisme adalah paham yang menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan
Tujuan	Mengadakan perubahan sampai keakar-akarnya	Untuk menciptakan masyarakat yang homogen berdasarkan prinsip ideologi yang kaku dan dogmatis, membuat semua warga negara tunduk dengan menekan semua oposisi dan menundukkan minoritas;	Mengajak kepada umat Islam untuk kembali kepada prinsip-prinsip Islam masa lampau (al-Qur'an dan hadist)= kembali kepada masa salaf atau masa sahabat nabi	<p>1. Tujuan Jangka Pendek, meliputi; Memperoleh pengakuan dari masyarakat lokal, nasional, regional maupun dunia internasional atas perjuangannya.</p> <p>2. Tujuan Jangka Panjang, meliputi; menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan, seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara, Mengganti ideologi suatu negara dengan ideologi kelompoknya. Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya. Mempengaruhi kebijakan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional, regional atau internasional.</p>

Indikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung (biasanya berupa evaluasi, penolakan dan , perlawanan)</li> <li>2. Bukan hanya penolakan tetapi berusaha mengganti tatanan tersebut dengan tatanan yang baru</li> <li>3. Keyakinan akan kebenaran bahwa yang mereka ajarkan adalah benar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fanatik yang berlebihan</li> <li>2. Sikap kasar dan keras, buruk sangka terhadap manusia/ suka mengafirkan orang</li> <li>3. Memperbera t yang tidak pada tempatnya</li> <li>4. Mewajibkan atas manusia hal-hal yang tidak diwajibkan Allah dll</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman yang dangkal dan parsial</li> <li>2. Anti intelektual</li> <li>3. Tidak bersumber pada budaya-budaya intelektual tradisional</li> <li>4. Selalu menginginkan kembali ke masa lampai (romantisme pada masa awal Islam)</li> <li>5. Anti Barata</li> <li>6. Menafikan pluralisme</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekerasan sistematis dan purposif,</li> <li>2. membangkitkan emosi publik, kelompok netral, pendukung, dan kontra.</li> <li>3. Dirancang untuk mempengaruhi pilihan politik tiap individu</li> <li>4. Menimbulkan korban atau kerusakan material.</li> <li>5. Untuk mencapai pengaruh politik</li> </ol>
Contoh	Aksi kekerasan, intimidasi, perlawanan terhadap pemerintah, aksi teror, aksi bom bunuh diri dll Kasus internasional: al-Kaida, ISIS dll	Suni-Siah	Pengaruh pemikiran madzhan Muhammad bin Abdul Wahab, Hasan al-Bana	Aksi teror bom bunuh diri di gereja di Surabaya. (Dita meledakkan diri bersama keluarganya) Serangan di Gereja Katolik Santo Yosep, Medan
Akibat	Terjadinya teror kekerasan bahkan menimbulkan konflik dan kekerasan	Menimbulkan perasaan saling mencurigai, pertentangan antara satu dengan yang lain sehingga mengakibatkan perpecahan antar yang lain	Menimbulkan/ menginginkan/ menghilangkan budaya-budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia	Ancaman terhadap nasionalisme, timbulnya rasa was-was di benak masyarakat, kecurigaan yang meningkat antar umat beragama, dll.

Sumber: Tim Forum Daiyah Fatayat NU<sup>100</sup>

<sup>100</sup> Tim Forum Daiyah Fatayat NU (FORDAF) PP. Fatayat NU, *Modul Pelatihan Fatayat NU*, (Jakarta: Gemala, 2019), h. 104-107.

Mengembangkan dan mempertahankan tradisi lama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya diatas merupakan implementasi dari Islam Nusantara, namun itu baru separuhnya (separuh gerakan dakwah NU) *al-muḥāfaẓah ‘alā qadīm al-ṣāliḥ* saja, namun *wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣḥāḥ*-nya (dakwah kontemporer) adalah untuk melawan fundamentalisme,<sup>101</sup> radikalisme,<sup>102</sup> terorisme dan wahabisme.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam sebuah aliran, paham atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas (fundamental). Karenanya, kelompok-kelompok yang mengikuti paham ini seringkali berbenturan dengan kelompok-kelompok lain bahkan yang ada di lingkungan agamanya sendiri. Mereka menganggap diri sendiri lebih murni dan dengan demikian juga lebih benar daripada lawan-lawan mereka yang iman atau ajaran agamanya telah "tercemar". Kelompok fundamentalis mengajak seluruh masyarakat luas agar taat terhadap teks-teks Kitab Suci yang otentik dan tanpa kesalahan. Mereka juga mencoba meraih kekuasaan politik demi mendesakkan kejayaan kembali ke tradisi mereka. (Bruce, Steve. 2000. *Fundamentalisme*. Pertautan Sikap Keberagaman dan Modernitas. Jakarta, Erlangga). Fundamentalisme sering dimaknai sebagai perilaku keagamaan berdasarkan *normative approach* (penghayatan normative) yang skriptural (berdasar teks semata) tanpa melihat persoalan-persoalan substansial lainnya (misal; sejarah, peradaban, iptek). Perilaku *normative approach* ini kemudian melahirkan sibling rivalry yaitu permusuhan antar saudara kandung (maksudnya, Abrahamic Religions Yahudi, Kristen, dan Islam) dengan mengedepankan sikap *truth claim*, merasa paling benar dengan menyalah-menyesatkan agama dan pemeluk lainnya. (NU. *Online*. Rabu, 25 Juli 2018)

<sup>102</sup> Secara umum ada tiga kecenderungan yang menjadi indikasi radikalisme. Pertama, radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung, biasanya respons tersebut muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan atau bahkan perlawanan. Masalah-masalah yang ditolak dapat berupa asumsi, ide, lembaga atau nilai-nilai yang dipandang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kondisi yang ditolak. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada upaya penolakan, melainkan terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan bentuk tatanan lain. Ciri ini menunjukkan bahwa di dalam radikalisme terkandung suatu program atau pandangan dunia tersendiri. Kaum radikal berusaha kuat untuk menjadikan tatanan tersebut sebagai ganti dari tatanan yang ada. Dengan demikian, sesuai dengan arti kata '*radic*', sikap radikal mengandaikan keinginan untuk mengubah keadaan secara mendasar. Ketiga adalah kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa. Sikap ini pada saat yang sama dibarengi dengan penafian kebenaran sistem lain yang akan diganti dalam gerakan sosial, keyakinan tentang kebenaran program atau filosofi sering dikombinasikan dengan cara-cara pencapaian yang mengatasnamakan nilai-nilai ideal seperti 'kerakyatan' atau kemanusiaan. Akan tetapi kuatnya keyakinan tersebut dapat mengakibatkan munculnya sikap emosional di kalangan kaum radikal. (Tarmizi Taher, et.al, *Radikalisme Agama*, PPIM IAIN ; Jakarta h.xvii – xviii). Gerakan radikalisme yang muncul di Indonesia sebagian besar adalah berangkat dari ketidak puasan dan adanya keinginan untuk menjadikan atau menerapkan syariat Islam di Indonesia, bagi mereka, terjadinya ketidakadilan,

Kaidah yang menyebut-kan “*al-muḥāfazah ‘alā qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*” (memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik), akan menjadi filterisasi atas bermunculannya tradisi yang dibawa oleh ideologi impor tadi. Sehingga setiap masyarakat Islam Nusantara telah membentuk kepribadiannya sebagai komponen yang bijak dan selalu toleran terhadap perkembangan zaman. Kesadaran ini tentunya wujud dari pemakluman atas kehadiran ideologi transnasional tidaklah dilihat secara hitam-putih.

Disinilah pentingnya organisasi sekelas NU berperan untuk membentengi *jam’iyahnya*. Melalui dakwah Islam Nusantara, menurut Said Aqil Siradj, NU secara serius berupaya untuk mengkampanyekan pemahaman terhadap realitas. Dalam sejarahnya upaya pemahaman manusia terhadap realitas menggunakan beberapa cara, antara lain menggunakan *bayān al-ilāhī* (pemahaman dari Tuhan) yaitu Al Qur’an dan *bayān al-nabawī* yaitu Sunnah. Selain itu juga dilakukan dengan menggunakan *bayān al-‘aqlī* (pemahaman akal) yaitu ijma dan qiyas, maka lahirlah ilmu fikih, sehingga masyarakat mampu menjalankan agama dengan terinci dan operasional.<sup>104</sup>

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memiliki peran yang penting dalam upaya mencegah radikalisme agama di Indoensia dalam hal ini peneliti memfokuskan peran PBNU tersebut pada tahun 2018. Dalam menjalankan peran ini PBNU bersama dengan lembaga-lembaga dan badan otonomnya bergerak bersama dalam beberapa peran.

#### 1. Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Pemikiran

Dalam menjalankan perannya untuk mencegah radikalisme agama di Indoneisa, PBNU memiliki pemikiran-pemikiran yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap, bertindak, dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Pemikiran-pemikiran ini dirumuskan oleh PBNU melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut:

- a. Melalui Keputusan-keputusan. PBNU membuat beberapa keputusan-keputusan. Dalam hal ini dalam kegiatan Muktamar NU yang selalu dilakukan satu kali dalam setiap periode. Dan pada periode KH. Said Aqil memberikan keputusan terakrit nalisis Ekstrenal NU dalam pertama, kehidupan beragama dan

---

banyaknya korupsi, krisis yang berkepanjangan dan ketidak harmonisan antara kaya dan miskin adalah akibat dari tidak diterapkannya syariat Islam.

<sup>103</sup> Wahabisme mempunyai akar dari seorang pemikir besar, Ibn Taimiyah beberapa abad sebelumnya. Dalam kontekstualisasinya, gerakan wahabi bersinggungan keras dengan kelompok tasawuf dan Islam Syi’ah. Bagi gerakan Wahabi, kelompok-kelompok tersebut tidak mengikuti ajaran seperti yang dicontohkan Rasul.

<sup>104</sup> Said Aqil Siradj, *Islam Sumber Inspirasi Budaya Nusantara....*, h. 208



berbangsa yang melakukan penggolongan kelompok radikal yang ada di Indonesia menjadi 4 golongan berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada kelompok salafi, Jihadi, Takfiri dan Siyasi. Kedua, Gerakan Lintas-Batas Negara, Hakekatnya kelompok ini adalah gerakan sempalan (splinter group) yang lepas dan terpisah dari arus umat (mainstream/amatul ummah). Ketiga, Meningkatnya Propaganda Anti Aswaja dengan fitnah-fitnah.

- b. Melalui Munas dan Konferensi Besar.
- c. Melalui Halaqah. Dalam tradisi budaya NU Halaqah adalah sebuah aktivitas khusus bila berkaitan dengan momen tertentu yang melakukan pembahasan tertentu terhadap masalah-masalah yang dianggap penting untuk di diskusikan.

## 2. Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Administratif

Dalam menjalankan perannya untuk mencegah radikalisme agama di Indonesia, PBNU memiliki peran administratif yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap, bertindak, dan mencari solusi dari permasalahan secara terstruktur dan sistematis yang diberikan dari pusat hingga ke bawah. Peran Administrasi yang dilakukan oleh PBNU melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut: pertama, melalui Instruksi yang dilakukan PP mUslimat dalam memberi Instruksi pada Muslimat wilayah untuk memasukkan materi anti radikalisme dan terorisme di pengajian ibu-ibu. Kedua, Instruksi PBNU kepada lembaga pendidikan berbasis NU untuk meningkatkan daya kritis siswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

## 3. Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Melalui Gerakan

Dalam menjalankan perannya untuk mencegah radikalisme agama di Indonesia, PBNU memiliki gerakan-gerakan yang sistematis dan terstruktur. Dengan membuat pergerakan yang diagendakan dan berkelanjutan. Gerakan ini dirumuskan oleh PBNU melalui beberapa cara, antara lain sebagai berikut: pertama, melalui kaderisasi kepada kader struktural maupun kultural NU.

Seperti kegiatan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama PBNU, Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK), Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) Muharrik Masjid dan Dakwah, dan Pendidikan Kader Dai. kedua, Melalui Pelatihan, seperti Training of Trainer Muharrik Masjid dan Dakwah, Pelatihan dan FGD Kyai Muda; dan ketiga, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga dan badan otonom NU seperti GP Ansor mengadakan kegiatan Kurab satu Negeri dalam upaya mempersatukan umat. Gerakan yang dilakukan oleh fatayat NU melalui berbagai kegiatan internasional

Young Moslem Women Forum Fatayat NU, kolaborasi Program Bidang Advokasi Dan Bidang Dakwah “Perempuan Agen Perdamaian, Bersama Perangi Radikalisme Dan Terorisme”, dan drafting Modul Panduan Penguatan Dakwah Islam Rahmatan Lil ‘Aalami-in Bagi Daiyah. Lalu gerakan yang dilakukan oleh Muslimat NU dalam mencegah radikalisme melalui pengajian rutin, dan pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir adalah gerakan yang dilakukan oleh NU Online dalam menyampaikan pemikiran- pemikirannya kepada publik melalui berbagai tulisan, artikel, dan video dengan dua cara, yaitu Memproduksi konten yang bisa membuat orang tidak mudah terkena virus radikalisme. Konten yang sifatnya alternatif-naratif. Damai, toleran, seperti nilai NU yang tawazun, tasamuh, taawun. Dan Memproduksi konten yang tujuan untuk countering atau menchallenge gagasan yang radikal dalam berbagai konteks, misal politik, sosial-budaya. Menchallenge gagasan khilafah dan takfiri

4. Peran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dalam Merespon Keadaan Pertama, Kritik Terbuka Ketua PBNU Pada BAN-PT. Kedua, PBNU Mendukung Lahirnya Undang-Undang Anti Terorisme yang lebih Tajam. Dan respon yang dilakukan oleh PBNU dalam mencegah radikaisme adalah respon PP muslimat terhadap aksi Bim di Surabaya dan PBNU merespon dengan bergerak ke 41 masjid-masjid yang terpapar radikalisme serta memperkokoh masjid yang tidak terkena radikaisme agar tetap dengan prinsipnya.

Menurut Imdadun Rahmat, salah satu cara mengembalikan pemahaman agama agar tidak radikal adalah:

Dengan ‘*aql (ijmā’ qiyās)* dan prakteknya dengan kitab kuning. Warisan kitab kuning tidak boleh ditinggalkan, karena itu warisan lama, dengan itu orang-orang NU bisa melawan wahabisme, kita menghadirkan warisan lama, kitab kuning. (1) *al-muḥāfaẓah ‘alā qadīm al-ṣāliḥ* (2) *wa al-akhdh bi al-jadīd al-aṣlah*, Karena Aswaja itu dengan juga mengedepankan *aql*, dengan tidak menolak pemikiran-pemikiran baru, tidak menolak demokrasi, tidak menolak perkembangan teknologi. Maka orang-orang NU *welcome* terhadap pemikiran-pemikiran baru itu, *jadīd al-aṣlah* disitulah orang-orang mempertahankan demokrasi, dan itu sekeimbangan antara ‘*Aql* dan *naql*’ nah itulah Islam Nusantara.<sup>105</sup> Mempertahankan tradisi lokal, tradisi kitab kuning, tradisi *selametan* yang dianggap bid’ah oleh kelompok wahabi. Dalam aspek jaduduil ashlah lainnya, NU juga tidak menolak gagasan-

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Imdadun Rahmat, pada tanggal 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB

gasan demokrasi, NKRI, National state, dan itu adalah unsur rasionalitas dari *aql* dan *naql*.

Imdad juga menambahkan bahwa:

Orang kadang salah paham terhadap Islam Nusantara seolah-olah Islam Nusantara itu hanya aspek tradisi lokal saja, padahal ada aspek kemajuan juga. Sempat ditanya kenapa kemudian tidak menggunakan istilah Islam Nusantara Berkemajuan, atau kenapa tidak gandengankan dengan Islam (progresifitas) seperti yang dikatakan Azra? Jawabnya Islam Nusantara itu sudah mencakup keduanya: di dalam Islam Nusantara itu sudah *inklud* di dalamnya progresifitas, mengangkat tradisi lokal dan mengambil kemajuan. Itulah *al-akhdh bi al-jadid al-aṣlah*, tidak anti Barat, Cina dan lain sebagainya.<sup>106</sup>

Beberapa hal yang sudah dilakukan NU dalam pencegahan terhadap paham radikal, fundamental, ekstrim dan terorisme adalah: Bagi NU, radikalisme bertentangan dengan paham Islam. Menurut mantan Rais Am PBNU, Ma'ruf Amin,

Kita harus menjaga umat ini dari cara berpikir radikal yang kerap menimbulkan masalah baik nasional maupun internasional. Baik itu radikal agama maupun radikal sekuler," ujar Kyai Makruf Amin seperti dikutip Republika online.<sup>107</sup>

Dalam soal Pancasila, NU menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah final. Pandangan ini bahkan telah diputuskan dalam forum tertinggi setelah muktamar, yakni Munas Alim Ulama di Situbondo 1983, ketika NU menyatakan kembali ke khittah dan menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Salah satu tokoh penting di balik keputusan ini adalah KH. As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo, Asembagus, Situbondo tempat di mana Munas NU berlangsung. "Seandainya Pancasila dirusak, NU harus bertanggung jawab! Umat Islam wajib membela Pancasila! Ini sudah *mujma' alayh* (konsensus ulama)! Umat Islam wajib menerima Pancasila dan haram hukumnya menolak. Sila pertama itu selaras dengan doktrin tauhid dan *Qul huwa Allahu Aḥad*," tegasnya.<sup>108</sup>

Hal yang sama ditegaskan Kyai Hamid Kajoran, salah seorang kyai sepuh di Magelang, ketika menanggapi anggapan bahwa asas tunggal adalah pemaksaan. "Pancasila itu kan milik kita, hasil

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Imdadun Rahmat, pada tanggal 03 Agustus 2019, Hotel Sofyan. Pukul 12.00-13.00 WIB.

<sup>107</sup> <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/17/nut7al346-kiai-maruf-ingin-nu-menjaga-umat-islam-dari-radikalisme>.

<sup>108</sup> <http://www.muslimoderat.net/2017/04/kh-asad-syamsul-arifin-umat-islam-wajib-menerima-pancasila.html> Diakses pada 22 Maret 2019 pukul 10.56 WIB.

ijtihadnya para ulama dan kyai kita, terutama Hadratussyekh Hasyim As'ary. Lha kalo sekarang mau dijadikan azas tunggal, ya Alhamdulillah. Itu artinya dikembalikan ke kita kok malah kita merasa dipaksa."<sup>109</sup> Karena itu, tidak mengherankan jika NU mendukung sepenuhnya pembubaran HTI.

Menurut Ahmad Ishomuddin, Rois Syuriah PBNU, semua warga bangsa Indonesia yang cinta tanah air dan tidak rela bentuk final NKRI diganti dengan sistem khilafah Islamiyah seperti yang diperjuangkan mati-matian oleh HTI pasti jauh lebih banyak yang mendukung sikap strategis pemerintah RI tersebut. Sudah saatnya yang waras jangan mengalah. Menurut hukum agama, HTI **wajib** dibubarkan dan sikap pemerintah yang telah membubarkan dengan **mencabut** izinnya adalah sah dan langkah yang tepat.<sup>110</sup>

NU juga menganggap toleransi sebagai sesuatu yang sangat penting. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj menekankan bahwa kita memiliki kewajiban untuk terus melakukan dakwah tentang pentingnya toleransi antar umat di negeri ini.<sup>111</sup>

Dalam hal amar ma'ruf nahyi munkar, NU mempertimbangkan prinsip maslahat (kebaikan) dalam pelaksanaannya. Wakil Ketua Lembaga Batsul Masail (LBM) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Mojokerto, Zamroni Umar menjelaskan pola amar ma'ruf nahi munkar versi Imam Ghazali. "NU sebagai organisasi ber-amar ma'ruf nahi munkar dengan senantiasa mengikuti pada pedoman yang ditetapkan para ulama. Hal ini karena menghindari agar dalam mencegah kemungkaran tidak menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar dikarenakan menggunakan metode yang tidak tepat," ujarnya.<sup>112</sup>

Dalam hal kepemimpinan non-muslim, NU juga membolehkan. Dalam acara Halaqoh Kaum Muda NU Jakarta, Ahmad Ishomuddin menegaskan bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan sekarang ini, baik untuk negara maupun level daerah, adalah yang bisa dipercaya dan mampu membawa kemajuan. "Kriteria itu bisa didapat dari seorang

---

<sup>109</sup> <http://www.muslimoderat.net/2017/04/kh-asad-syamsul-arifin-umat-islam-wajib-mencerimapancasila.html> Diakses pada 22 Maret 2019 pukul 10.56 WIB.

<sup>110</sup> Ishomuddin Ahmad, NU Kawal Pembubaran HTI dan Aktivitas Politik Berbalut Dakwahnya Wajib Dihentikan, <http://www.suaraislam.co/nu-kawal-pembubaran-hti-dan-aktivitas-politik-berbalutdakwahnya-wajib-dihentikan> Diakses 2 April 2019, Pukul 11:27 WIB.

<sup>111</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/di-haul-pendiri-nu-kiai-said-pesan-soal-pentingnyatoleransi.html> Diakses pada 25 Maret 2019 pukul 13.26 WIB.

<sup>112</sup> <http://www.nu.or.id/post/read/96008/amar-maruf-nahi-munkar-versi-imam-ghazali> Diakses pada 25 Maret 2019 pukul 14.13 WIB.

pemimpin Muslim maupun non-Muslim, karena keduanya sama-sama punya hak untuk memimpin," ujar Kyai Ishomuddin.<sup>113</sup>

Program lain yang terus digalakkan adalah pengembangan media. "Pertama penyiapan konten. Kita punya NU Channel. Karena kita gak mungkin berharap ke media mainstream yang ada. Kan dari pada kita menunggu datangnya bantuanbantuan itu, lebih baik kita mengerjakan sesuatu. Apalagi kan sekarang era sosial media. Tadi kita *live* di instagram. Kita *follower*-nya sudah lima ratus ribu, sudah setengah juta. Kedua menyiapkan *buzzer-buzzer*-nya. Kemudian yang ketiga itu menyiapkan narasumber-narasumber yang sekarang ini harus didekatkan ke kelompok milenial. Nanti kan jumlah (generasi) milenial akan terus bertambah".<sup>114</sup>

Sejalan dengan pandangan di atas, Savic Ali, disektur NU Online menyatakan:

Itu yang dilakukan NU *online*.... Lewat pendekatan dunia *online*, kita memperbanyak tulisan-tulisan, artikel-artikel atau opini-opini yang memperkuat semangat kebangsaan dan kebhinekaan warga NU. Yang dilakukan adalah memastikan NU tetap toleran sesuai dengan semangat yang dimiliki oleh para founding fathers dan pendiri NU sejak zaman dulu. Dari NU Online, suara kaum muda NU yang pro-kebangsaan dan kebhinekaan semakin kuat. Pandangan Islam yang kebangsaan itu lazim di kalangan anak muda NU. Anak-anak muda NU sangat percaya diri kalau bicara itu karena pengetahuannya terdistribusi dengan baik."

Ungkapan Savic Ali di atas bisa jadi adalah gambaran umum ketahanan NU dari pengaruh ideologi radikal. Bisa dikatakan, daya tahan NU terhadap ideologi radikal cukup baik, setidaknya di tingkat pengurus. Kepengurusan dari tingkat pengurus besar (nasional) hingga ranting (desa) memiliki daya tahan terhadap pengaruh ideologi radikal cukup baik. Semua pengurus NU yang diwawancarai menegaskan bahwa tingkat keterpaparan doktrin dan ideologi radikal di kalangan pengurus sangat rendah. Semua pengurus NU menjamin bahwa kepengurusan NU relatif steril dari pengaruh ideologi radikal, karena mereka sudah melalui seleksi ketat, termasuk dari aspek paham keagamaan radikal. Ini terutama karena kaderisasi yang dilakukan sangat gencar sejak 2012.

Sementara, di bidang pendidikan, menurut Z. Arifin Junaedi,<sup>115</sup> Ketua Umum Ma'arif NU, lembaga di bahwa PBNU yang menangani

---

<sup>113</sup><https://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/07394221/pbnu.musli.m.dan.nonmuslim.berhak.jadi.pemimpin>, Diakses 2 April 2019, Pukul 12:28 WIB

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Sekretaris Umum PP Fatayat NU: Margaret Aliyatul Maimunah, Pada hari Jum'at 03 Agustus 2019, di Hotel Sofyan, jam 13.30- 14.30 WIB.

<sup>115</sup> Dialog ringan dengan Z. Arifin Junaedi, Selasa, 3 Juli 2019 di Kantor Maarif NU.



lembaga-lembaga pendidikan formal di lingkungan NU, menjelaskan tentang beberapa hal yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah pembaruan kurikulum menghadapi gelombang radikalisasi yang begitu kuat. Pembaruan yang dimaksudkan adalah penguatan materi ke-NU-an dan Aswaja, wawasan kebangsaan dan hubungan Islam dengan negara. “Tiga materi penting ini terintegrasi dalam kurikulum kita, mulai kelas 4 MI/SD sampai ke MA atau SMA..

Yang tidak kalah pentingnya untuk disebut di sini adalah berbagai pengajian yang dilakukan oleh para kiai NU, di mana pengajian ini tidak selalu merupakan bagian dari program NU. Pengajian ini berkelindan dengan kuatnya pengaruh pesantren di basis-basis NU. Sering sekali ditemukan materi-materi pengajian ini berisi materi-materi untuk memperkuat identitas ke-NU-an dengan cara memperlawankannya dengan kelompok-kelompok radikal.

Ketahanan dari pengaruh ideologi radikal juga ada di media-media resmi yang dikelola NU. Bahkan, jika berbicara tentang media, banyak anak muda NU yang secara sadar mengembangkan media-media online yang secara kuat melawan ideologi intoleran dan radikal. Sekedar menyebut beberapa, misalnya, islami.co dan alief.id. Sekalipun demikian, bukan berarti NU berhasil sepenuhnya mengamankan jama’ahnya dari pengaruh ideologi radikal. Segencar apapun pengkaderan dan pengajian dilakukan, tidak mungkin bisa membendung pengaruh media sosial, di mana melaluinya konten-konten radikal seringkali disebar. Penyebab lain adalah adanya beberapa putra kiai pesantren yang menempuh pendidikan di Timur Tengah dan pulang membawa bibit-bibit ideologi radikal. Pengaruh kepemimpinan kiai pesantren atas umat di sekitarnya membuatnya bibit-bibit radikalisme itu juga tersebar di kalangan warga NU.

Upaya-upaya Membendung Radikalisme ; Ada beberapa upaya NU yang secara sadar dilakukan untuk membendung radikalisme keagamaan di Indonesia. “Kami memperkuat dan memperbanyak para muharrik, kader penggerak di masjid di seluruh keluarga NU yang ada. Di Ansor, IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat. Di struktur organisasi juga kita melakukan pendekatan keorganisasian dan program. Dalam ketiga level ini kita selalu mengedepankan gerakan-gerakan anti radikalisme dan terorisme”<sup>116</sup>.

#### 1. Dakwah NU dalam Menghadapi Radikalisme

Di Indonesia, pengaruh radikalisme dan ekstrimisme itu bisa dirasakan dan dilihat dengan mudah. Iklim kebebasan yang dibuka sejak reformasi pada 1998, memberi ruang luas berkembangnya radikalisme. Memang jumlah pemuda-pemuda Indonesia yang

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Anisa Rahmawati, Ketua Bidang Dakwah PP Fatayat NU. Pada hari Jum’at 03 Agustus 2019, di Hotel Sofyan, jam 13.30- 14.30 WIB.

terpengaruh faham radikal tidaklah sebanding dengan jumlah mainstream umat Islam yang moderat. Akan tetapi karena mereka mempunyai militansi yang tinggi, terlatih secara militer (teror) dan adanya jaringan Internasional, maka keberadaannya mulai mengganggu ketentraman, ketertiban, stabilitas keamanan khususnya iklim toleransi beragama yang merupakan sendi utama peradaban Indonesia.

Nahdlatul Ulama berpandangan sudah saatnya negara secara lebih serius melibatkan Ormas-ormas Islam meluruskan faham-faham radikal tersebut. Terorisme dan radikalisme, tidak hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah dan aparat keamanan saja. Melibatkan Ormas-ormas besar pendiri republik seperti NU dan Muhammadiyah merupakan langkah yang bijaksana untuk memoderasi pandangan-pandangan yang terlanjur ekstrim dan membentengi lingkungan internal masing-masing dari perembesan radikalisme. Adapun bentuk dan substansi moderasi tersebut diserahkan kepada masing-masing Ormas.

Disamping itu pemerintah mengajak ormas-ormas tersebut untuk memikirkan konsep toleransi yang dapat memelihara iklim toleransi. Pengaruh faham Al Qaeda dan ISIS yang sudah menjalar sekelompok warga bangsa itu perlu diluruskan terutama tentang faham khilafah Islamiyah, jihad, dan pengkafiran.

- a. Khilafah Islamiyah: Baik Al Qaeda maupun ISIS menganggap khilafah Islamiyah sebagai satu-satunya sistem politik Islam, sedang sistem selain itu dianggap kafir. Bedanya, Al Qaeda masih dalam bentuk wacana, sedangkan ISIS sudah memproklamkan khilafah. Nahdlatul Ulama mengartikan khilafah Islamiyah bukanlah suatu sistem politik atau model negara, tetapi sebagai konsep kepemimpinan (Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 30). Nahdlatul Ulama dan para ulama dari Ormas pendiri lain seperti Muhammadiyah, Sarikat Islam, dan kaum nasionalis lainnya telah menyepakati sistem politik yang didasarkan Pancasila sebagai ijtihad bersama, sehingga tidak memerlukan sistem politik lain.
- b. Jihad : Al Qaeda dan ISIS mengartikan jihad dalam arti sempit yaitu hanya perang atau kekerasan. Sedang jihad dalam arti persuasif, pendidikan, dakwah dan kegiatan-kegiatan sosial lain dianggap bukan bagian dari jihad. Pandangan tersebut berbeda secara diametral dengan pandangan mayoritas ulama yang beranggapan bahwa jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Sedangkan jihad dalam artian perang hanyalah sebagai jenis jihad. Bagi ulama NU, jihad tentu saja tidak bermakna sempit (*qitāl*), tetapi berarti luas termasuk membangun perdamaian dan ketertiban sebagai landasan peradaban dunia.

- c. *Takfir*/Pengkafiran: Al Qaeda dan ISIS berkeyakinan golongan di luar mereka adalah kafir. Artinya mayoritas umat Islam lainnya adalah kafir. Menurut Al Qaeda dan ISIS, orang kafir tersebut wajib diperangi (dibunuh), kecuali bersedia membayar upeti (*jizyah*). Mayoritas ulama menganggap, pengkafiran terhadap sesama muslim hanya karena menolak Al Qaeda dan ISIS sama dengan menghilangkan pluralitas/perbedaan yang sudah menjadi kodrat manusia

Dalam lima tahun terakhir, Nahdlatul Ulama telah melakukan langkah-langkah nyata. Dalam Muktamarnya ke 32 di Makassar pada 2010 NU mengajukan tema “Khidmah Nahdliyah Untuk Indonesia Bermartabat”. Tema tersebut disusun berdasarkan keprihatinan merebaknya faham-faham radikal, baik radikal agama maupun ultra liberal, sehingga dikawatirkan meredupkan sikap moderat yang menjadi karakteristik masyarakat Indonesia.

Program aksi tersebut meliputi 3 hal, yakni dakwah, kegiatan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Tersirat di dalamnya kehendak untuk membangun kemandirian umat, mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi memperkuat ajaran ahlussunnah wal jamaah (Islam Nusantara) yang moderat toleran dan menjauhi kekerasan, berkeadilan, dan berkeadaban. Pada Muktamar ke 33 NU di Jombang, Jawa Timur 1-5 Agustus 2015, sikap NU dalam merespon perkembangan global dan nasional semakin dipertegas dengan mengambil tema “Mengukuhkan Islam Nusantara untuk Indonesia Dan Peradaban Dunia.

Secara garis besar program aksi NU, baik yang sedang maupun akan dilaksanakan sebagai berikut:

a. Bidang dakwah

Berupa langkah-langkah afirmasi nilai-nilai *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah al-nahdiyyah* sekaligus untuk menegasi faham-faham radikal di masyarakat terutama melalui program kaderisasi yang intensif. Inti dari dakwah tersebut menegaskan pentingnya Islam Nusantara yang dikembangkan oleh para penyebar Islam sejak awal dakwah Islam di Nusantara yang mampu mewujudkan budaya dan peradaban yang beradab, toleransi, harmoni dan cinta damai. Termasuk dalam kegiatan ini adalah berperan serta dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama dalam level global.

Sebagai contoh, NU menyelenggarakan dialog internasional melalui pengiriman delegasi ke Afghanistan dan juga mengundang ulama Afghanistan berkunjung ke Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan nilai-nilai *Tasāmuḥ* (toleransi), *Tawassuṭ* (moderat), *Tawazzun* (berimbang), *‘Adālah* (keadilan), dan *Ukhuwwah* (persaudaraan) yang meliputi *ukhuwwah Islāmiyyah* (sesama Islam), *ukhuwwah waṭaniyyah*

(sesama warga negara), *ukhuwwah bashariyyah* (sesama umat manusia). Dialog dan saling kunjung itu membuahkan hasil dengan dibentuknya Nahdlatul Ulama Afghanistan pada sekitar Agustus 2014 di Kabul.

b. Bidang sosial

Meliputi pelayanan sosial melalui pemanfaatan zakat, Infaq, dan Shadaqah. Khusus pelayanan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas umat melalui pembaharuan kurikulum yang seimbang antara substansi agama dan keduniawian guna membentuk generasi yang berpandangan luas, teguh pada jati diri bangsa dan mandiri. Studi tentang Islam nusantara mulai dikembangkan agar bisa menjadi alternatif model Islam dunia untuk mengatasi keterpurukan umat Islam. Kegiatan sosial ini penting untuk mewujudkan empati kepada mereka yang termarginalkan secara sosial.

c. Bidang pemberdayaan ekonomi umat.

Kegiatan ini diarahkan untuk mengelorakan jiwa kewirausahaan dikalangan nahdliyin dan pengembangan ekonomi syariah dengan tujuan jangka menengah dan panjang guna membentengi umat dari dominasi kapitalisme global. Kegiatan ini sekaligus untuk mempraktekkan semangat pluralitas dibidang ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, suatu sinergi antara mereka yang kuat secara ekonomi dengan yang lemah demi kemaslahatan bersama.

Program aksi tersebut dilaksanakan pada level struktur mulai dari pengurus besar, wilayah, cabang, lembaga dan badan-badan otonom. Disamping itu program-program tersebut dilaksanakan pada level non struktural (kultur) seperti lembaga-lembaga pendidikan milik warga NU, pesantren, masjid, dan surau-surau.

Sebagai contoh Anshor/Banser menjalankan program moderasi melalui pembentukan densus 99 dengan kegiatan spiritual untuk mendukung kebijakan pemberantasan terorisme dan radikalisme. Muslimat dan Fatayat NU membentuk ribuan pendidikan anak usia dini yang bertujuan menanamkan sikap beragama yang moderat dan toleran. Kami menilai pertemuan ini tepat waktu dan berharap menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi Indonesia dan dunia yang beradab dan berkeadilan. Fenomena atau potensi konflik peradaban haruslah ditransformasikan menjadi dialog antar peradaban.<sup>117</sup>

<sup>117</sup>  
radikalisme.

<https://www.nu.or.id/post/read/58396/peran-nu-dalam-menangkal-radikalisme>.

## 2. Menghadapi Wahabisme dan Arabisme

Said Aqil Siradj dengan tegas mengatakan bahwa Wahabisme merupakan ancaman yang cukup berbahaya bagi kelangsungan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Meskipun kaum Wahabis bukan termasuk teroris, namun Wahabisme, menurut alumnus Pesantren Lirboyo ini, telah menyediakan landasan teologis yang cukup kuat bagi munculnya aksi-aksi terorisme di berbagai belahan bumi ini. lihat saja sejumlah aksi kekerasan yang berwatak teroristik di sejumlah negara di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dan kontribusi dari ajaran dan doktrin Wahabisme.<sup>118</sup>

Statemen Said Aqil di atas tersebut tentu saja bisa dikatakan mewakili sikap NU (PBNU) terhadap menguatnya gerakan Wahabisme kontemporer yang dalam beberapa tahun belakangan ini, terutama pasca reformasi, tampak mencolok sekali di Indonesia.<sup>119</sup> Sebagai organisasi sosial keagamaan yang setia mengamalkan tradisi-tradisi keagamaan yang berbasis budaya lokal seperti *tahlil*, *salawatan*, *istighāṣah*, ziarah wali, dan seterusnya, NU memang kerap menjadi sasaran empuk bagi dakwah-dakwah Wahabi yang sangat puritan dan mencela tradisi-tradisi keagamaan tersebut. Akibatnya, NU selalu mengambil posisi di garda terdepan dalam upaya membela tradisi-tradisi keagamaan lokal tersebut dari serangan kaum Wahabi.

Sikap tegas terhadap Wahabi ini tampaknya bukan suatu yang baru belakangan ini saja ditunjukkan oleh NU, mengingat dalam sejarahnya, latar belakang berdirinya NU pada tahun 1926 sendiri adalah sebagai respon, atau lebih tepatnya bentuk perlawanan para pendiri NU terhadap menguatnya rezim Wahabi di Arab Saudi.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> Wawancara dengan Said Aqil Siradj, Tanggal 25 Mei 2019, Jam 19.00-20.30 WIB di Kantor PBNU.

<sup>119</sup> Indikator menguatnya gerakan wahabisme ini bisa dilihat dari munculnya sekelompok umat Islam dengan pakaian khas Timur Tengah (*jalabiyah* bagi laki-laki dan bercadar bagi perempuan) di ruang-ruang publik Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Yogyakarta dan Bandung dengan aktifitas dakwah yang mencela praktik-praktik keagamaan yang dipandangnya syirik dan bid'ah seperti *tahlil*, *sholawatan*, *maulid nabi*, dan lain sebagainya. Lihat Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad.....*, h.31. Bandingkan juga dengan Ahmad Bunyan Wahib, *Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad*, Electronic Research Paper-Researc Paper Vol. 3 no. 1, 2008, dan M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal:Tranmisi Gerakan Revivalisme Islam ke Indonesia (1980-2002)*, (Jakarta, Erlangga, 2005).

<sup>120</sup> Tentang kaitan berdirinya NU dengan menguatnya Wahabisme di Arab Saudi ini lihat Andre Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, (Yogyakarta: Penerbit LKIS, 1999), h. 7-14. Bandingkan juga dengan Choirul Anam, *Pertumbuhan,dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo: Penerbit Jatayu,1984), h. 54, Alfian, *Sekitar Lahirnya Nahdlatul Ulama (NU)*, Makalah tidak diterbitkan, arsip LKIS



Namun sikap NU terhadap Wahabi kontemporer kali ini menunjukkan sebuah gambaran yang paling vulgar dan lebih kasar dari sikap- sikap mereka sebelumnya. Bahkan dalam beberapa kesempatan dan forum yang diadakan, NU hampir selalu menyelipkan isu akan bahaya ancaman Wahabisme, bukan saja bagi NU sendiri, melainkan juga bagi keutuhan NKRI.<sup>121</sup>

Kampanye anti-Wahabisme ini tampaknya bukan saja bergema di kalangan struktural NU, melainkan juga telah menjadi isu utama di kalangan kelompok kultural NU.<sup>122</sup> Kalangan kaum muda NU di jalur kultural yang sebelumnya kerap bersebrangan dengan kalangan kaum tua yang ada di struktur dan pesantren- pesantren, kini tampak kompak dan bertemu dalam isu besar anti-Wahabisme. Begitu pula sumberdaya struktural berupa kelengkapan organisasi yang dimiliki oleh NU mulai dari tingkat pusat (PBNU) hingga tingkat Ranting yang berada di pedesaan, dimobilisir untuk membendung ekspansi dakwah Wahabi. Rasa keterancaman terhadap Wahabisme seolah telah membangkitkan kembali soliditas dan solidaritas gerakan sosial NU yang sebelumnya banyak diwarnai oleh konflik- konflik internal akibat keterjebakan mereka dalam kubangan politik praktis.<sup>123</sup>

Salah satu komponen yang terlibat cukup intens dalam gerakan anti-Wahabisme di kalangan NU adalah masyarakat NU Yogyakarta. Dengan sumberdaya yang dimilikinya, baik dari elemen struktural maupun kultural, masyarakat NU Yogyakarta tampak cukup pro-aktif dalam meng-*counter* gerakan-gerakan yang diusung oleh kaum Wahabi. dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, banyak kegiatan yang dirancang oleh kalangan NU struktural, baik di tingkat wilayah (PWNU), maupun di tingkat cabang (PCNU), hingga ke tingkat Ranting yang secara eksplisit maupun implisit diarahkan untuk merespon gerakan Wahabi. Begitu juga kelompok

---

Yogyakarta (LIPI Jakarta, 1969), h. 5-6, Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 21-28.

<sup>121</sup> Dalam sejumlah pertemuan konsolidasi yang digelar oleh PBNU, Wahabisme disebut-sebut sebagai ancaman bagi keberlangsungan NKRI dan Islam di Indonesia yang telah dikenal berwatak santun dan damai. Lihat laporannya di [www.nu.or.id/](http://www.nu.or.id/) berita.

<sup>122</sup> Kalsifikasi NU kultural dan NU struktural ini mengacu pada pengakuan yang diberikan oleh tokoh NU sendiri, seperti KH. Muchit Muzadi dalam *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*, Surabaya, Khalista, 2006), h. 35.

<sup>123</sup> Tentang konflik dan intrik internal di dalam tubuh NU akibat permainan politik praktis ini lihat, Endang Turmudzi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta, LKiS, 2004), Khoiruddin, *Politik Kiai, Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis*, (Malang, Avverous, 2009), Khoiro Ummatin, *Perilaku Politik Kiai*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009). Nur Khalik Ridwan dan M. Nur Hasyim, *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

kultural NU dari kalangan anak muda, mahasiswa, pesantren, LSM dan masyarakat *awam* yang terorganisir dalam bentuk jama'ah-jama'ah pengajian di kampung-kampung juga “merekayasa” sebuah gerakan tertentu untuk merespon menguatnya ajaran Wahabi.



## BAB VIII

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dakwah kontemporer adalah dakwah di era kekinian dengan cara menggunakan teknologi (media) yang sedang berkembang, namun dakwah kontemporer tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi yang berkembang saja melainkan juga materinya, media maupun metodenya. Terdapat tiga indikator adanya dakwah kontemporer yaitu (1) da'i kontemporer, (2) dakwah dengan menerapkan materi yang kontemporer, (3) kegiatan dakwah dengan menggunakan media teknologi kontemporer.

Berdasarkan hasil riset menunjukan bahwa:

#### 1. Dinamika dakwah konvensional dan kontemporer NU di era disrupsi.

Berdasarkan hasil riset menunjukan bahwa: Meskipun sekarang eranya digital namun dakwah konvensional atau dakwah secara tatap muka masih memiliki beberapa hal yang membuatnya tidak dapat tergantikan dan tidak ditinggalkan.

- 1) Media dakwah kontemporer NU: Medsos (*Twitter, facebook, intagram, youtube, google plusme*), NU *Online*, 146 Chanel, Aswaja TV, Nutizen, Islamic.com dan Film.
- 2) Materi dakwah kontemporer NU adalah: melawan fundamentalisme, radikalisme, terorisme dan Wahabisme dengan memperkuat *content* Aswaja, trilogi ukhwah (*Ukhuwah Basyariyyah, Ukhuwwah Bashāriyyah, Ukhuwwah Waṭaniyyah, Ukhuwwah Islāmiyyah*), *Hubb al-Waṭan Min al-Imān*, Perdamaian.
- 3) Metode: berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125 (hikmah, *mauidhoh hasanah* dan dialogis; parsipatif; eksploratif; dekoratif ; (kreatif).
- 4) Dai kontemporer NU adalah dai-dai yang tidak hanya menggunakan media teknologi dalam menyampaikan dakwahnya namun juga yang memberikan materi kontemporer.

#### 2. Ideologi dan Politik dalam dakwah NU

##### a. Ideologi NU

Ideologi atau *manhajul fikr* yang diterapkan dalam NU adalah *Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah An-Nahdiyyah*, yang dalam hal keagamaan Nahdlatul Ulama berpedoman kepada Al-Qur'an, As-Sunnah, Al- Ijma', dan Al-Qiyas. Dalam beraqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur

al-Maturidi; dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari Madzhab Empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali); dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam al-Junaid al-Bagdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Dalam hal kemasyarakatan menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada: (1) Sikap *tawassuṭ* dan *i'tidāl*. (2) Sikap *tasāmuh*, (3) Sikap *tawāzun*, dan (4) *Amar ma'ruf nahi munkar*. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nahdlatul Ulama berassas kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan NKRI harga mati.

- b. Dalam hal politik, bagi NU terdapat tiga macam politik: politik kenegaraan, politik kerakyatan (keagamaan), dan politik kekuasaan (praktis).

- 1) Politik kemasyarakatan (keagamaan); hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya NU adalah untuk melindungi praktik dan pemikiran keagamaan Muslim Indonesia yang berbeda dengan praktik dan pemikiran Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, yang puritanistik.
- 2) Politik Kebangsaan (kenegaraan); kontribusi politik kenegaraan NU yang paling jelas adalah dukungan Wahid Hasyim, wakil NU pada PPKI, untuk tidak mencantumkan piagam Jakarta di dalam dasar Negara.
- 3) Politik Kekuasaan; bagi NU dari ketiga macam politik di atas, politik kekuasaan (praktis) adalah politik yang memiliki kedudukan paling rendah.

- c. Politik NU di era Abdurrahman Wahid, Hasyim Muzadi dan Said Aqil Siraj.

- 1) Era Abdurrahman Wahid

Sejumlah kebijakan Gus Dur dalam bidang politik khususnya ketika menjadi presiden RI ke-4, diantaranya: Memisahkan TNI dengan Polri. Membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial karena tak bekerja dengan baik. Mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua. Mengakui Kong Hu Cu dan menjadikan Imlek hari nasional. Mencabut larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Menerapkan Otonomi Daerah.

Pemikiran politik Gus Dur terhadap partai Islam antara lain: Pertama, Gus Dur mengajarkan pluralisme beragama, dan pemahaman keberagaman beragama yang ada di masyarakat yang harus ditoleransi. Kedua, Gus Dur mengayomi minoritas, menggalang kekuatan dengan kelompok sekuler, dan menyerap banyak kelas sosial. Ketiga, pada masa pemerintahan Gus dur politik yang demokratis mulai tampak terwujud.

## 2) Era Hasyim Muzadi

Ijtihad politik Hasyim Muzadi dalam menggabungkan ajaran Islam dan ide-ide kebangsaan memiliki koherensi. Yakni kedua ajaran tersebut mendorong akan terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, dengan konsep *ukhūwwah waḥānīyyah* (persaudaraan bangsa), *ukhuwwah bashāriyyah* (persaudaraan manusia) yang melampaui sekat-sekat etnis, suku dan ras. Dalam konteks kehidupan politik di Indonesia. Ia juga menawarkan solusi bagi tercapainya cita-cita kolektif bangsa. Melalui sistem politik demokrasi sebagai instrumen serta penyadaran dan pemberdayaan masyarakat sipil maka bangsa ini dapat bangkit dari kemiskinan dan terwujudnya masyarakat yang adil serta sejahtera.

## 3) Era Said Aqil Siraj

NU di bawah kepemimpinan Said Aqil Siraj tetap menjaga politik kebangsaan dan mempertahankan sikap independennya dalam momentum politik praktis. Cara yang dilakukan NU adalah dengan istiqomah di jalur organisasi sosial keagamaan dengan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah dan melakukan pelebaran sayap ke dunia internasional dengan membentuk PCINU di beberapa negara. Pada kepemimpinan berikutnya NU juga konsisten terhadap politik kenegaraan dan mengantarkan putra terbaiknya menjadi wakil Presiden. Dalam politik kerakyatan (keagamaan), NU hampir selalu menyampaikan akan bahaya ancaman Wahabisme, radikalisme dan fundamentalisme yang sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Kampanye anti-Wahabisme ini tampaknya bukan saja bergema di kalangan struktural NU, melainkan juga telah menjadi isu utama di kalangan kelompok kultural NU. Kalangan kaum muda NU di jalur kultural yang sebelumnya kerap bersebrangan dengan kalangan kaum tua yang ada di struktur dan pesantren- pesantren, kini tampak kompak dan bertemu dalam isu besar anti-Wahabisme.

## 3. Aliran Kiri Baru dan Pluralisme dalam NU

### a. Aliran Kiri Baru

Terdapat pro dan kontra dalam istilah aliran Kiri baru dalam NU. Ada yang sepakat dan setuju dengan istilah tersebut. Sepakat kalau fenomena kiri baru dilihat secara longgar dan tidak terlalu ketat penggunaannya itu ada dalam NU khususnya di kalangan anak-anak muda NU.

Namun ada juga yang kontra dengan istilah tersebut dengan alasan:



- 1) Istilah tersebut sudah mengalami pergeseran, waktu itu (tahun 1990-an) diterima khususnya lebih ke anak muda NU sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah Orde Baru dan yang dipakai istilah Islam Pembebasan, *mainstrem* Gender dan Islam Transformatif.
- 2) Di dunia untuk gerakan-gerakan Islam itu tidak ada kiri kanan. Peneliti di Dunia tidak ada yang membuat tipologi gerakan kiri kanan untuk gerakan-gerakan Islam.
- 3) Dakwah NU yang sekarang tidak mencerminkan tentang aliran kiri baru tetapi lebih mencerminkan tentang moderasi beragama. Hal tersebut bisa dilihat dalam dakwah kontempornya NU melalui media social.
- b. Pluralisme (pluralisme kritis) diperjuangkan dan dipertahankan dalam NU.

Pluralisme kritis yang dikembangkan oleh NU adalah:

- 1) Aspek keadilan sosial tanpa keluar dari garis kemanusiaan. NU menerima finalis Pancasila dan keharusan demokrasi sematamata untuk kemaslahatan umat manusia tanpa dibatasi oleh dinding-dinding agama, suku, ras, atau budaya.
- 2) Dalam pemikiran-pemikiran politik NU menggunakan *Maqasid asy-Syariah* (1) menjamin kebebasan beragama (*hifẓ al-dīn*), (2) memelihara kelangsungan hidup (*hifẓ al-nafs*), (3) menjamin kreatifitas berfikir dan kebebasan berekspresi serta mengeluarkan opini (*hifẓ al-‘aql*). (4) menjamin pemilikan harta dan properti (*hifẓ al-māl*). Dan (5) menjamin keberlangsungan keturunan, kehormatan serta profesi (*hifẓ al-nasl- wa al-‘ird*), yang kemudian digabungkan dengan filsafat humanisme sebagai paradigma atau basis pemikirannya.
- 3) *Civil Society*. Adapun mengenai kelompok-kelompok kecil yang ada dalam NU seperti: NU garis Lurus, NU progresif liberal, NU struktural dan lain sebagainya adalah bagian dari penggambaran pemikiran pluralisme kritis.
4. Tradisi/ budaya hidup/ budaya *amali* yang dijadikan instrumen dakwah NU.

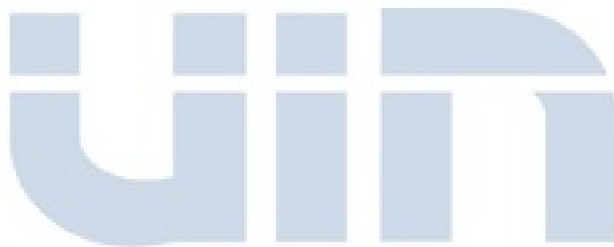
Beberapa contoh budaya yang terus dihidupkan NU adalah: *slametan*, *puji-pujian sebelum shalat*, tahlilan, dzikir sehabis shalat, maulid nabi, pembacaan al-berzanji (biografi nabi), *halal bihalal* pasca lebaran, memakai sarung, peci, *sorban*, *blangkon*, *istighāṣah*, pengajian akbar, ada tradisi ziarah walisongo, makam leluhur, *haul*, *baḥṡh al-masā’il*, mempertahankan NKRI dan pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Mengembangkan dan mempertahankan tradisi lama seperti contoh-contoh diatas merupakan implementasi dari Islam Nusantara, namun itu baru separuhnya (separuh gerakan dakwah NU) *al muḥāfazah ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhd bi al-jadīd al-aṣḥḥ* (dakwah

kontemporer) adalah untuk melawan fundamentalisme, radikalisme, terorisme dan Wahabisme.

## B. Saran

Tentunya dari seluruh gagasan dakwah kontemporer NU, politik NU, pemikiran-pemikiran NU dan Islam Nusantara dalam arti akademik, patut diberi apresiasi untuk konteks kekinian dan minimal diaplikasikan secara kultural. Jika bangsa Indonesia yang mayoritas Islam dibiarkan begitu saja dalam memahami agama secara tekstual, akan berimplikasi pada tindakan yang keluar dari nilai-nilai agama Islam atau tidak akan mampu mengikuti perkembangan zaman, karena dalam NU selalu mengedepankan keadilan sosial, kebebasan, persamaan serta demokrasi. Sesuai dengan tujuan Nahdlatul Ulama adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham *ahl al-sunnah wa al-jamā'ah An-Nahdhiyah*.

Dalam menghadapi tantangan radikalisme dan ekstrimisme berkekerasan yang berkedok agama, perlulah para aktivis dakwah memiliki peranan yang strategis dalam mengubah pandangan keagamaan masyarakat. Tentunya kerjasama yang baik antara Pemerintah, Institusi keagamaan dan pendidikan, Masyarakat Sipil sangatlah diperlukan sehingga terwujud tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri, *Responses of Indonesian Muslim Intellectuals to the Concept of Democracy*, Hamburg: Abera Verlag Meyer & Co. KG, 1997.
- Abdullah, Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1999.
- Abdullah, Irwan, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdul Aziz, Aceng, M. Harfin Zuhdi, dkk, *Islam Ahlusunnah Walkama'ah: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 2016.
- Abû al-Fath al-Bayânûnî, Muhammad Abû al-Fath al-Bayânûnî, *al-Madkhal ilâ 'Ilm al-Da'wah*, Beirut: Muassasat al-Risâlah, 1993.
- Abu Syauk, Ahmad Ibrâhim, *Tārīkh harakah al-Ishlāh wa al-Irsyād wa syaikh al-Irsyādiyyīn Ahmad Muhammad al-Surkatīy fī Indonesia*, Kuala Lumpur: Research Centre International Islamic University Malaysia dan Dār al-Fajr Malaysia, 2000.
- Agama RI, Departemen, *Al-Hikmah AL-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: cv Penerbit Diponegoro, 2007.
- Ahmad, Munawar, *Ijtihad Politik Gus Dur: Analisis Wacana Kritis*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Ahmed, Manzooruddin, *Islamic Political System in the Modern Age: Theory and Practice*, Karachi: 1991.
- Ali Aziz, Moh, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi ke-3, 2012.
- Affandi, Arif (peny.), *Islam Demokrasi Atas-Bawah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Albert, Hans, *Rekonstruksi Nalar Kritis, Revitalisasi Ilmu Kritis dalam Wacana Pluralisme Teoritis*, Yogyakarta, 2014. Diterjemahkan dari buku *Treatise on Critical Reason*, New Jersey: Princeton University Press, 1985.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, Surabaya: Bisma Satu Press, 1998.
- An Nabhani, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup Dalam Islam (Nizham al-Islam)*, alih bahasa Abu Amin dkk, cet. III, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- Appadurai, Arjun, *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
- Aripudin, Acep, *Sosiologi Dakwah*, Bandung: Rosda, 2013.
- ....., *Dakwah Antarbudaya*, Bandung: Rosda, 2012.
- ....., *Perbandingan Dakwah*, Bandung: Rosda, 2014.

- Arif, Syaiful, *Politik NU Pasca Pilpres, Nahdlatul Ulama; Dinamika Ideologi dan Politik Kenegaraan*, Jakarta: Kompas, 2010.
- ....., *Dakwah Damai, Pengantar Dakwah Antarbudaya*, Bandung: Rosda, 2007.
- A. Rahman H.I., Srijanti, dan Purwanto S.K., *Etika Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arnold, TW, *The Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim Faith*, London: Constable, 1913.
- Asmawi, PKB, *Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.
- Aqil Siraj, Aqil, *Rekonstruksi Aswaja Sebagai Etika Sosial*, dalam Sahal dan Aziz (eds.), *Islam Nusantara*.
- ....., Aqil Siradj dalam *Dialog Tasawuf Kiai Said: Akidah, Tasawuf dan Relasi Antarumat Beragama*, Khalista, LTN PBNU & SAS Foundation, Cet II, 2014.
- ....., Aqil Siradj, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokrasi Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, New York: Routledge, 1991.
- Aziz, Aceng Abdul, M. Harfin Zuhdi, dkk, *Islam Ahl al-sunnah wa al-jamā'ah: Sejarah, Pemikiran, dan Dinamika NU di Indonesia*, Jakarta: Pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, 2016.
- Aziz, Moh. Ali, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, Edisi Revisi ke-3, 2012.
- Azra, Azyumardi, *Islam Nusantara: Jaringan Global dan Lokal*, Jakarta: Mizan, 2002.
- ....., Azyumardi *Islam Reformis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- ....., Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII; Akar pembaharuan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- ....., Azyumardi, *Transformasi Politik Islam: Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- ....., Azyumardi, *Renaissance Islam Asia Tenggara; Sejarah Wacana dan Kekuasaan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.
- ....., Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme dan Post Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996
- Bagus, Loren, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Bakti, Andi Faisal, *Nation Building: Kontribusi Muslim dalam Komunikasi Lintas Agama dan Budaya terhadap Kebangkitan Bangsa Indonesia*, Tangerang Selatan: Churia Press, 2010.



- ....., Andi Faisal, *Communication and Family Planing in Islam Indonesia: South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program*, Jakarta: INIS, 2004.
- ....., Andi Faisal, "Pitfalls of the Past Government of Indonesia: Good Governance from the Perpectives of Communication and Development" dalam *Good Governance and Conflict Resolution in Indonesia: From Authoritarian Government to Civil Society*, Jakarta: Logos, 2004.
- Barbaur, Ian G, *Contemporary Issues in Science and Religion*, New York: Torchbooks Harpers Row Publishers, 1996 .
- Barton, Greg dan Greg Fealy (eds.). *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam, and Modernity in Indonesia*, Clayton: Monash Asia Institute, 1996.
- ..... Barton, *Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President: A View from the Inside*, Honolulu, Hawaii: University of Hawai'i Press, 2002.
- Basalim, Umar, *Pro-Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Basit, Abdul, *Wacana Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Press, 2006.
- Baso, Ahmad *Islam Nusantara Ijtihad Jenius dan Ijma' Ulama Indonesia Jilid I*, Jakarta: Pustaka Afid, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keislaman: Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1994.
- Bellah, Robert N., *Religious Evolution*, dalam Robert N. Bellah, ed. *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post Traditional World* , New York: Harper & Row, 1970.
- Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion: The Problem of Relegion in Modern Society*, New York: Macmillan, 1967.
- Bernard, Platdash, *Islamism in Indonesia: Politics in the Emergening Democracy*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Bizawie, Zainul Milal, *Masterpiece Islam Nusantara Sanad dan Jejaring Ulama- Santri (1830-1945)*, Tangsel: Yayasan Compass Indonesiatama, Cetakan Kedua, April 2016.
- Bleicher, Josep, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy and Critique*, London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1980.
- Branston, Gill and Roy Stafford, *The Media Student's Book* (London & New York: Routledge Taylor & Francis Groups Fifth Edition Published, 2003 Branston, Gill and Roy Stafford, *The Media Student's Book* (London & New York: Routledge Taylor & Francis Groups Fifth Edition Published, 2003
- Budi, Hardiman, F. *Kritik Ideologi: Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan* Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Budiardjo, Meriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1982.

- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2007.
- Bruinessen, Martin Van, *Kata Pengantar, NU: Jama'ah Konservatif yang melahirkan gerakan Progresif* dalam buku *NU Muda Kaum Progresif dan Sekuler Baru*, Laode Ida. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Castells, M., *The Rise of the Network Society*, Oxford: Blackwell, 1996.
- Curran, James, *Media and Power*, London : Routledge, 2002.
- Connell, Robert, *Masculinities*, Cambridge : Polity, 1995.
- Christensen, Clayton M. *The Innovator's Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to Fail*. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 1997.
- Denis, Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Alih bahasa oleh Agus Dharma dan Aminudin Ram. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Dhakidae, Dhaniel, "Langkah Non-Politik dari Politik Nahdlatul Ulama", dalam Ellayasa, KH. Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Djafar H, Assegaff . *Islam dan Tantangan Abad Informasi*, Jakarta: Media Sejahtera, 1993.
- Djuarsa, Sendjaja, S. *Teori Komunikasi*, Jakarta, Universitas Terbuka: 1994.
- Eck, Diana L , *Amerika Baru yang Religius*, terj. Piga Hybrida, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Edward G, Carmines and Geoffrey C. Layman. 1997. "Issue Evolution in Postwar American Politics." In Byron Shafer, ed., *Present Discontents*. NJ:Chatham House Publishers.
- Eliraz, Giora, *Islam in Indonesia: Modernism, Radicalism, and the Middle East Dimension*, Brighton: Sussex Academic Press, 2004.
- Ellayasa, KH. Dharwis (ed), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Effendi, Djohan, *Pembaharuan Tanpa Membongkar Tradisi: Wacana Keagamaan di Kalangan Generasi Muda NU Masa Kepemimpinan Gus Dur*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Efendi, Slamet, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Effendy, Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 1984.
- ....., Effendy: *Radio Siaran Teori Dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Eriksen, Thomas H. *Globalistion Studies in Anthropology*, London: Pluto Press, 2003.
- Ezzati, A., *The Spread of Islam: Contrbuting Factors*, Willesden, London: Islamic College for Advanceed Studies Press/ICAS, 2002 .
- Fadeli, Soeleiman dan Muhammad Subhan, *Antologi Sejarah Istilah Amaliah Uswah NU*, Surabaya: Khalista LTNU Jatim, 2010.

- Fahrurrozi, *Model-model Dakwah di Era Kontemporer (Strategi Merestorasi Umat Menuju Moderasi dan Deradikalisasi)*, Mataram: LP2M UIN Mataram, 2017.
- al-Faruqi, Ismail R. dan Lousi Lamnya Al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*, terj. Ilyas Hasan, Jakarta: Mizan, 1998.
- ....., Ismail R al-Faruqi, *The Hijrah*.
- ....., Ismail Raji Al-Faruqi, *The Islamic State and World Order*, dalam bukunya Islam, Brentwood, Maryland; 1984.
- Alfaruqi, Jabir. NU, Fundamentalisme dan Liberalisme, *Nahdatul Ulama: Dinamika Ideologi dan Politik ke Negara*.
- Faisol, Gus Dur & Pendidikan Islam, *Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan di Era Global*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Fealy, Greg dan Sally White, ed., *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Singapore: ISEAS Publishing, 2009.
- ..... dalam *Ijtihad Politik Ulama : Sejarah NU 1952-1967*, (Yogyakarta : LKiS, Cetakan IV, Desember 2009.
- Andree Feillard, *NU Vis a Vis Negara*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Firmansyah, *Mengelola Partai Politik, Komunikasi Dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan pustaka obor Indonesia, 2011.
- Fukuyama, Fancis. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order*. London: Profile Books, 1999.
- Ghazali, Abd Moqsih, Luthfi Assyaukanie, and Ulil Abshar-Abdalla. *Metodologi Studi al-Qur'an*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- ....., Abd Moqsih, *Wajah Liberal Islam di Indonesia*, Jakarta: JIL, 2002.
- Gibb, Hamilton A. R., *Studies on The Civilization of Islam*, USA: Beacon Press, 1962.
- Giddens, Anthony, *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press, 1990.
- Guntur Romli, Mohammad dan Tim Ciputat School, *Islam Kita Islam Nusantara : Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*, Tangerang Selatan: Ciputat School, 2016.
- Gramsci, Antonio, *Quitin Howare* dan Geoffrey Nowell Smith diedit dan diterjemahkan dari Selections From Prison Note-book, Lawrence and Wishart, 1971.
- Hasjmy A., *Dustur Dakwah menurut Al-Qur'an*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994
- Hakim, Lukman, *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiatif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*, Surabaya: Pustaka Eureka Berger, Peter L. 1991.
- Hakim, Abdul Dubbin Islam, *Inklusivisme, dan Kosmopolitanisme'*, dalam *Menembus Batas Tradisi Menuju Masa Depan yang Membebaskan: Refleksi Atas Pemikiran Nurcholish Madjid*, Abdul Halim, ed. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006.

- Hakim, Lukman dkk, *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Hartono, 2003.
- Halîm Mahmûd, Alî ‘Abd, *Fiqh al-Da‘wah al-Fardîyah*, Mesir: Dâr al-Wafâ, 1992.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Pra-Kenabian Hingga Islam di Nusantara*, Jakarta: Gema Insani, 2016.
- ....., *Islam: Rahmah untuk Bangsa*. Cet. I; Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2009.
- Harahap, Nasrudin dkk, *Dakwah Pembangunan*, Yogyakarta: DPD Golkar, 1992.
- Hasyim Syafiq, *Islam Nusantara Dalam Kontek; Dari Multikulturalisme Hingga Tadikalisme*, Yogyakarta: Gading, 2018.
- Hawari, Muhammad, *Reideologi Islam; Membumikan Islam Sebagai Sistem*, Bogor : AlAzhar Press, 2005.
- Hikam, Muhammad A.S, *Gus Dur Menjawab Perubahan Zaman Kumpulan Pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid*. KOMPAS. Jakarta.
- Hefner. Robert W., *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000.
- Heryanto, ed., Ariel, *Popular Culture in Indonesia: Fluid Identities in Post-authoritarian Politic*, London and New York: Routledge Taylor & Francis 2-Library, 2008 .
- Hikam, Muhammad AS, “Khittah dan Penguatan *Civil Society* di Indonesia: Sebuah kajian Historis Struktural atas NU sejak 1984”, dalam Ellayasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Hilmy, Masdar, *Islamism and Democracy in Indonesia: Piety and Pragmatism*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010.
- Hoover, Stewart M. dan Lynn Schofield Clark, eds., *Practicing Religion in the Age of The Media: Explorations in Media, Religion, and Culture*, New York: Columbia University Press, 2002.
- Huda, Nor, *Islam Nusantara Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2007.
- Huda, Sokhi, *Menggagas Sketsa Konsep Dakwah Kontemporer (Perspektif historis-paradigmatik)*, t,th.
- Husin al-Munawar , Said Agil, *Al-Qur’an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Cet. III; Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Ida, Laode, *NU Muda; Kaum Progresif dan Sekulerisme Baru*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Imdadun Rahmat, Muhammad, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.
- Irawan UIN Jakarta, *Diskursus Pluralisme Agama dan Relevansinya dalam Konteks Kehidupan Beragama di Indonesia*. Disertasi, 2017.

- Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah; Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kartodirjo, Sarton, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan Nasional, dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, Jakarta: Gramedia, 1990.
- Kasali, Rhenald; *Focusing: Strategi Beriklan di Media Massa*, Jakarta, Gramedia: 1998.
- Rhenald Kasali, *Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi, Motivasi saja tidak cukup*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Kersten, Carool, *Islam in Indonesia The Contest for Society, Ideas and Values*, New York: Oxford University Press, 2015.
- Khasanah, Siti Uswatun, *Berdakwah Dengan Jalan Debat Antara Muslim dan Non Muslim*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan STAIN Press, 2006.
- ....., Siti Uswatun, *Jurnalistik Televisi*, Jakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan Agama Islam, 2014.
- ....., Siti Uswatun, *Memoar Dakwah: Semangat Dakwah Antara Dai Yang Terlahir Muslim dengan Dai Muallaf*, Jakarta: Pusat Pengembangan Pendidikan Agama Islam, 2014.
- Khadziq, *Islam dan Budaya Lokal: Belajar Memahami Realitas Agama dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Khuluq, Lathiful, *Fajar Kebangunan Ulama: Biografi Kiyai Hasyim Asyari*, Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1998. Syafi'i Ma'arif, Ahmad, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Klopf, Donald W dan James C. McCroskey, *Intercultural Communication Encounters*, Boston: Pearson Education, 2007.
- Kurdi, Mustafa (Mayjen TNI), *Dakwah di Balik Kekuasaan*, Bandung: Rosda, 2012
- Maliki, Zainud.din, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*, Surabaya: LPPAM, 2004.
- Kuntowijoyo. *Muslim Tanpa Masjid: Esai-esai Agama, Budaya, dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. Bandung: Mizan, 2001.
- Kusuma, RM. A.B. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Lawrence, Bruce, *The Quran: A Biography*, diterj. Aditya Hadi Pratama, *Al-Qur'an : Sebuah Biografi*. Cct. I; Bandung: Semesta Inspirasi, 2008.
- L. Esposito, John, *Islam and Politics, 3rded*. Syracuse: Syracuse University Press, 1991



- ....., *Politic Islam and the West*, Center for Counterproliferation Research National Defense University Washington, DC 20319-5066, JFQ/Spring, 2000
- ....., L. Esposito, editor, *Islam in Asia: Religion, Politics and Society*, New York: Oxford University Press, 1987.
- ....., *The Contemporary Islamic Re-vival: A Critical Survey and Bibliography*. New York: Greenwood Press, 1991.
- Lindlof, Thomas R and Bryan C. Taylor, *Qualitative Communication Research Methods*, Second Edition, London, Sage Publications (International Educational and Professional Publisher), 2002.
- Littlejohn, Stephen W and Karen A. Foss, *Teori Komunikasi; Theories of Human Communication*, Edisi 9, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Lubis, Akhyar Yusuf, *Pemikiran Kritis Kontemporer, Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial, Hingga Multikulturalisme*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- ....., *Postmodernisme Teori dan Metode*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Lubis, M. Ridwan, *Agama Dalam Diskursus dan Pergumulan Kehidupan Beragama di Indonesia*, Jakarta: Pusat Kerukunan Umat Beragama Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI, 2015.
- Mahfudz, Sahal, *Baḥṡ al-Masā'il dan Istimbat Hukum NU; Sebuah Catatan Pendek, dalam Islam Nusantara Dari Ushul Fiqih Hingga Paham Kebangsaan*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Mahmūd, 'Alī 'Abd Halīm, *Fiqh al-Dā'wah al-Fardīyah*, Mesir: Dār al-Wafā, 1992.
- Masud, Muhammad Khalid, *The Scope of Pluralism in Islamic Moral Traditions*, in *Islamic Political Ethics: Civil Society, Pluralism, and Conflict*, ed. Sohail H. Hashmi, Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2002.
- Mas'ud, Abdurrahman, *"Dari Haramain ke Nusantara : Jejak Intelektual Arsitek Pesantren"*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mas'ud, Masdar F, *Dakwah Membela Kepentingan Siapa*, Jakarta: P3M Pesantren, 1989.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet. I ; Jakarta: Paramadina, 1992.
- ....., dalam *Kedaulatan Rakyat dalam Masyarakat Madani*, dalam T. Jacob (ed.), *Membongkar Mitos Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- ....., *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.
- M.C. Ricklefs, *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Century*, (Norwalk, CT: Eastbridge, 2006). Diterjemahkan oleh FX Dono Sunardi dan Satrio Wahono, *Mengislamkan Jawa Sejarah Islamisasi di Jawa dan*

- Penentangannya dari 1930 Sampai Sekarang*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- al-Mawardi, *Adab al-Dunyâ wa al-Dîn*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, ed.I, cet.4.
- Menchik, Jeremy, *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*, New York City, New York: Cambridge University Press, 2016.
- Milles, Matthew B. dan Micheal Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods* (Bavery Hills: Sage Publication, 1986.
- Mubarak, M. Zaki, *Gencologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta :LP3ES, 2008.
- Muzadi, Hasyim, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: Logos, 1999.
- ....., Hasyim, *Dikala Transisi Tersandung: Narasi Khidmat Nahdlatul Ulama 1999-2004*, Jakarta: PBNU, 2004.
- ....., Hasyim, *Fundamentalisme, Radikalisme dan Terorisme*, Malang: elKapim, 2003.
- ....., Hasyim, KH. A. Hasyim Muzadi, *Gerakan Moral Nasional*, Malang: elKapim&Alhikam, tt.
- Muzadi, Muhith, *Syarat Khitah Nahdlatul Ulama: Rumusan Hasil Lokakarya Pemasyarakatan Khittah NU*, Jakarta, 21-22 Januari 1089, Sekretariat PBNU Jakarta, t.t. h. 61-62.
- Mowlana, Hamid, *Global Communication in Transition the End of Diversity* London: Sage Publications, 1996.
- Moleong , Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2001.
- MD, Mahfud, *Gus Dur: Islam, Politik dan Kebangsaan* , Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik, Judul Asli: Ideology and Utopia, An Introduction to the Sociology of Knowledge*, Penerjemah: F. Budi Hardiman, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1998.
- al-Mubâr Kafûrî , Shâfi al-Rahmân, *al-Rahîq al-Makhtûm: Bahts fi al-Sîrah al-Nabawiyyah ‘alâ Shahibihâ Afadal al-Shalah wa al-Salâm*. Cet. XXI; Mesir: Dâr al-Wafâ, 2010.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Peradaban Islam*. Cet. I; Bandung: Pustaka Islamika, 2008.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi IV, Yogyakarta: Raka Sarasin, 2000.

- Muhyidin, Asep dkk, *Metode Pengembangan Dakwah*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Mujib, Fatkhul, *Islam dalam Ajaran Samin Kajian Atas Pemahaman Samin terhadap Ajaran Islam di Dusun Jepang Bojonegoro Jawa Timur*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2004.
- Munir, Mulkhan, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana Prenada Media grup, 2009.
- Munir Mulkan, Abdul. *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Islam*, Yogyakarta: SIPRESS, 1984.
- Musa, Ali Masykur, *Membumikan Islam Nusantara, Respon Islam Terhadap Isu-Isu Aktual*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2014.
- ....., Ali Masykur, *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*, Jakarta: Erlangga.
- Mustofa, Kurdi Mayjen TNI (Purn) dalam bukunya *Dakwah Di Balik Kekuasaan*. Bandung: ROSDA, 2012.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Ideologi Gerakan Dakwah: Episode Kehidupan M. Nastir dan Azhar Basyir*, Yogyakarta: Sipres, 1996.
- Muzadi, A. Hasyim, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999.
- ....., A.Hasyim, *Lebih Dekat dengan KH. Hasyim Muzadi, dalam Agenda Strategis Pemulihan Martabat Bangsa*, Malang: elKapim, 2003.
- Nahdlatul Ulama, *Islam Nusantara Inspirasi Peradaban Dunia (Karya Penulis Lomba Esai ISOMIL PBNU 2016)*, Jakarta: Lembaga Ta'lim wan Nasyr PBNU dan Panitia ISOMIL 2016, 2016.
- Na'im, A. A. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Bandung: Mizan, 2009.
- Niam, *NU Dalam Sikap, Gerak dan Langkah 2016*, Jakarta: NU Online, 2016.
- Mitsio Nakamura, Tradisionalisme Radikal: Catatan Muktamar Semarang 1979, dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, Terj. Ahmad Suedi (dkk), *Tradisionalisme Radikal: Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*, Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Nakamura, *The Cultural and Religious Identity of Javanese Muslims: Problems of Conceptualization and Approach* (Prisma, no 31), 1984.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Noer, Deliar, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Jakarta : Rajawali, 1983.
- Norris, Pippa dan Ronald Inglehart, *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*, New York: Cambridge University Press, 2004.
- O. Voll, John and John L. Esposito, *The Contemporary Islamic Re-vival: A Critical Survey and Bibliography*, NewYork: Greenwood Press, 1991.

- P. Piscatori, James (ed.), *Islam in the Political Process*, New York: Cambridge University Press, 1983.
- PBNU, *Hasil-hasil Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta'lim wan Nasr PBNU/LTN: 2016.
- Pearson. Judy C, *Human Communication*, New York : McGraw-Hill, 2003
- Pecheux, Michel, *The Mechanism of Ideological (mis-)Recognition*” dalam Slavoj Zizek (ed.), *Mapping Ideology*, London: UK, 1994.
- Parsons, Talcott, *Religion in Modern Pluralistic Society, Review of Religious Research*, 1996.
- Peter, Dahlgren, “The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation, 2005, ” *Political Communication*.
- Piliang, Yasraf Amir, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, Yogyakarta: Jalasutra, 2004 .
- Poespowardojo, Soerjanto dan Alexanider Seran, *Diskursus Teori-teori Kritis, Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer*, Jakarta: Kompas, 2016.
- Pranowo, Bambang, *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Yogyakarta: Adicita, 1999.
- ....., *Memahami Islam Jawa*, Jakarta: Pustaka Alvabet dan Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), 2011.
- ....., *Islam Faktual: Antara Tradisi dan Relasi Kuasa*, Yogyakarta: Adicita, 1999.
- al- Madkhali, Rabi' b. Hadi, *Manhaj al-Anbiya' fi al-Da'wah ila Allah fi al-Hikmah wa al-'Aql*, Kuwait: Dar al- Salafiyah, 1987.
- Ramage, Douglas E. *Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya: Dalam Era Pasca Tunggal*. Dalam Elyasa K.H. Darwis (editor), *Gus Dur, NU dalam Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Rahardjo, M. Dawam, *Paradigma Al-Quran: Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial*. Cet. I; Jakarta : PSAP Muhammadiyah, 2005.
- ....., Rahardjo., *Intelektual, Intelegensi, dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1996.
- Rahman, Fazlur, *Tema-tema Pokok al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Rahmat, M. Imadun *Islam Pribumi, Mendialogkan Agama Membaca Realitas*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Remage, Douglas E. “ Democracy, Religious Tolerance, and Pancasila: The Political Thought of Abdurrahman Wahid”, dalam Greg Barton dan Greg Fealy (eds.). *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam, and Modernity in Indonesia*, Clayton: Monash Asia Institute, 1996.
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Ketujuh, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015.

- Riyadi, Hendar, *Melampaui Pluralisme: Etika AlQur'an Tentang Keragaman Agama* Jakarta: R.M. Books, 2007.
- Russell, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rustam, Ibrahim: *LSM, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia*, dalam Rustam Ibrahim (ed): "*Agenda LSM menyongsong tahun 2000*", Jakarta, LP3ES.
- Robert W. Hefner, *Civil Islam; Muslim and Democration in Indonesia*, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2000.
- Rofi, Usmani, Ahmad, *Ensiklopedia Tokoh Muslim Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer*, Jakarta: Mizan Media Utama: 2015.
- Romli, Muhammad Guntur dan Tim Ciputat School, *ISLAM KITA ISLAM NUSANTARA : Lima Nilai Dasar Islam Nusantara*, Tangerang Selatan: Ciputat School, 2016.
- Rozikin, Badiatul, *101 Jejak Tokoh Islam di Indonesia*, Yogyakarta: e-Nusantara. 2000.
- Salim, Hairus, M. Ridwan, *Kultur Hibrida: Anak Muda NU di Jalur Kultural*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Santoso, Listioyono, *Teologi Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Jogjakarta, 2004.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Schrems, John, *Understanding Principles of Politics and the State*, PageFree Publishing, 2004.
- Siradj, Said Aqil, *Islam Kebangsaan: Fiqih Demokrasi Kaum Santri*, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Strinati, Dominic, *An Introduction to Theories of Popular Culture*, London and New York: Routledge Taylor & Francis 2-Library, 2015.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Suseno, Franz Magnis, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah (edt.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.
- ....., *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2007.
- Shimogaki, Kazuo, Kiri Islam; *Antara Modernisme dan Posmodernisme; Telaah Pemikiran Kritis Hassan Hanafi*, Yogyakarta: LkiS, 2003.
- Spradley, *Metode Etnografi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007.



- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada: 2002.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Api Sejarah: Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Mengakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Bandung: Salmadani, 1433/2012.
- Syafi'I, Muhammad, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Jakarta: PLM, 2007.
- Syah, Ismail Muhammad dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992.
- Syam, Nina W, *Model-model Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi*, Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2013.
- Syam, *Pemikiran Politik Barat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1983.
- Taher, Tarmizi, *Aspiring for the Middle Path Islam: Religious Harmony in Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Islam and Society IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997.
- ....., Tarmizi, *Radikalisme Agama*, Jakarta: PPIM IAIN.
- Tasmara, Toto, *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gaya Media Pratama 1997.
- Taufik, Akhmad, *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Tehrani, Majid, *Global Communication and World Politics*, London: Lynne Rienner Publishers, Inc, 1999.
- Terry, Flew, *New Media, An Introduction*, second edition. Australia: Oxford University Press. 2005.
- Tim Dant, "A Modern Approach to Ideological Critique" dalam *Knowledge, Ideology and Discourse: A Sociological Perspective*, London: Routledge, 1991.
- Turner, Bryan S, *Teori-Teori Sosiologi Modernitas dan Posmodernitas*, terj. Imam Bachaqi dan Ahmad Baidlowi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Van Dijk, Teun A., *Ideology: A Multidisciplinary Approach*, London dan New Delhi: SAGE Publication, 1998.
- Wahid, Abdurrahman "Universalisme Islam dan Kosmopolitanisme", dalam Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Jakarta, Paramadina, 1995.
- ....., Abdurrahman, dkk., *Ilusi Negara Islam (ekspansi gerakan Islam transnasional di Indonesia)*, Jakarta: PT. Desantara Utama Media, 2009.
- ....., Abdurrahman, dkk, *Membangun Demokrasi*, Bandung: Rosdakarya, 1999.
- ....., Abdurrahman, *Kiai Menggugat Gus Dur Menjawab: Sebuah Pergumulan Wacana dan Transformasi*. Jakarta: Fatma Press, 1998.
- ....., Abdurrahman, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, Cet. ke-1*, Jakarta: The Wahid Institute, 2006.

- Williams R., The Technology and Society, dalam H. Mackay and T. O'Sullivan, ed., *The Media Reader: Continuity and Transformation*, London Sage, 1999.
- Wood. Julia T, *Communication in Our Lives*. Boston: Wadsworth, 2009.
- Woodham J., *Twentieth-Century Design*, Oxford: Oxford University Press, 1997.
- Woodward, Mark R. *Islam in Java : Normatif Piety and Mysticism In The Sultanate of Yogyakarta* (Islam Jawa; Kesalehan Normatif versus Kebatinan), LKis Yogyakarta, 1999.
- Van Bruinessen, Martin, *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- ....., Martin, *NU: Jama'ah Konservatif yang melahirkan gerakan Progresif* dalam buku *NU Muda Kaum Progresif dan Sekuler Baru*, Laode Ida. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Van Dijk, Tuen. "Models of Democracy and Concepts of Communication." Dalam Van Dijk, Tuen & Hacker, Kenneth L. (eds). *Digital Democracy: Issues of Theory and Practice*. London, Thousand Oaks, (New Delhi: Sage Publication, 2000).
- Van Doorn-Harder, Nelly, *Nahdlatul Ulama (NU)*, dalam *Encyclopedia of Islam and the Muslim World*, ed. Richard C. Martin. USA: Macmillan Reference, 2019
- Zizek, Slavoj, (ed.), *Mapping Ideology*, London: UK, 1994.
- Zuhri, Syaifuddin K.H., *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: Al Ma'arif, 1979.

## JURNAL

- Aida, Ridha, "Liberalisme dan Komunitarianisme: Konsep tentang Individu dan Komunitas", *Jurnal Demokrasi*, Vol IV, no.02, tahun 2005, h.99-100. <http://beligede.weebly.com/beligede-blog/20-macam-ideologi-di-dunia>.
- al-Amin, Ainur Rofiq "Transmutation of Ideology Gerakan Hizbut Tahrir", *Akademika*, Vol. 16., No. 2, 2005.
- Asry, M. Yusuf. Merekonstruksi Gerakan Dakwah Masa Depan, dalam: *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*. Volume 11, Nomor 1, Januari-Maret 2012.
- Assyaukani, A. Lutfi, "Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer", *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina*, Volume I. No.1, Juli-Desember 1998.
- Bakti, Andi Faisal. "*Communication, Islam, and Development in Indonesia; An Analysis of the Different Perspective of the South Sulawesi Muslim Population on Family Welfare and Planning*", Montreal: Univercity du Quebec A Montreal, 1998, h. 38-41.

- ....., Andi Faisal. "Mengkaji Islam Sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Tinjauan Interdisipliner Komunikasi" dalam *Perta*, Vol. VII, No.2, (2005), h. 28-32.
- ....., Andi Faisal. "*The Contribution of Dakwah to Communication Studies: Risale-I Nur Collection Perspective*", dalam International Bediuzzaman Symposium, *Knowledge, Faith, Morality and the Future of Humanity*, (Istanbul: Istanbul Ofset, 2010), h. 195-213.
- ....., Andi Faisal. "Islam and Modernity: Nurcholish Madjid's Interpretation of Civil Society, Pluralism, Secularization, and Democracy". Source: *Asian Journal of Social Science*, Vol. 33, No.3, Special Focus: Islam between Holism and Secularisme (2005), pp.486-505. published by: Brill Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/23654384>. Accessed: 22-01-2018.10.01.
- ....., Andi Faisal. "Trend Bakti, Andi Faisal.setter Komunikasi di Era Digital: Tantangan dan Peluang Pendidikan Komunikasi dan Penyiaran Islam" dalam *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 02, Nomor 01, Juni 2012. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel-Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia.
- ....., Andi Faisal, "The Integration of Dakwah in Journalism", *Jurnal Komunikasi Islam*, Volume 05, Nomor 01, Juni 2015.
- ....., Andi Faisal. "*Applied Communication to Dakwah for Peace*", makalah dipresentasikan pada Kuliah Umum di Pascasarjana UIN Alauddin Makasar 1 September, 2009, h. 9.
- ....., Andi Faisal, "*Communication and Family Planing in Islam Indonesia: South Sulawesi Muslim Perceptions of a Global Development Program*", Jakarta: INIS, 2004. h. 40.
- Balasubramanian, S., & Mahajan, V. (2001). "*The Economic Leverage of the Virtual Community*". *International Journal of Electronic Commerce* 5 (3), h. 103-138.
- Basit, Abdul, "Berdakwah Dengan Cerdas", *Jurnal Komunikasi Islam UIN Surabaya*, Nomor 01, Juni 2013, h. 77.
- Bilfagih, Taufik, "Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan NU Di Tengah Tantangan Global", *JURNAL AQLAM -- Journal of Islam and Plurality* -- Volume 2, Nomor 1, Desember 2016, hal 59.
- Burhani, Ahmad Najib, "Kitab Kuning dan Kitab Suci: Pengaruh al-Jabiri terhadap Pemikiran Keagamaan di NU dan Muhammadiyah, Masyarakat Indonesia", Vol. 41, no. 1 (Juni 2015): 27-28, <https://ejournal.lipi.goi.id/diakses> 07-11-2020)
- Christensen, Clayton M. "Disruptive Innovation and Catalytic Change in Higher Education." In *Forum for the Future of Higher Education* (2008), h. 43-48.

- Darajat, "Muhammadiyah dan NU, *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*", Vol. 1, No. 1, Januari 2017, h. 90.
- Esposito, John L. "Moderate Muslims: A Mainstream of Modernists, Islamists, Conservatives, and Traditionalists," dalam *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. XXII, No. 3, Summer 2005, h. 12.
- Fadeli Soeleiman dan Muhammad Subhan, "Antologi Sejarah Istilah Amaliah Uswah NU", (Surabaya: Khalista bekerjasama dengan Lajnah Ta'rif Wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur, 2010
- Fahroji, Moch, "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik terhadap konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol 4 No 12, Juli-Desember 2008, h. 297.
- Farih, Amin, "Nahdlatul Ulama (Nu) dan Kontribusinya Dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Dan Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 24 No. 2, November 2016.
- Foucault, Michel, "*Structuralism dan Post-Structuralism: an Interview*", (Telos: 1983), h. 206.
- Hidayatullah, Rahmat, "Artikulasi Simbol-simbol Islam Dalam Lanskap Budaya Populer Indonesia". *Titik Temu*, Vol. 4, No 2, Januari-Juni 2012.
- Itang & Adib Daenuri, "Sistem Ekonomi Kapitalis, Sosialis dan Islam", *Tazkiya, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Vol. 1 (Januari-Juli 2000), h. 86.
- Kaufman, Cynthia, "*Ideas For Action: Relevant Theory For Radical Change Grant Farred (2000)*". "*Endgame Identity? Mapping the New Left Roots of Identity Politics*". *New Literary History*. 31 (4): 627-648. doi:10.1353/nlh.2000.0045. JSTOR 20057628.
- Koh, J., & Kim, Y. G. (2004). "*Sense of Virtual Community: A Conceptual Framework and Empirical Validation*". *International Journal of Electronic Commerce* 8(2), h. 75-93.
- Kuswanjono, Arqom, "Pluralisme Pancasila", *Jurnal Filsafat*, Vol. 39, Nomor 1, April 2006 Novianti, Kurnia, Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama Dalam Perspektif Antropologi, *Harmoni*, Mei-Agustus 2013.
- Khuluq, Lathiful, "Sarekat Islam: Its Rise, Peak, and Fall", *al-Jamiah*, No. 60, 1997.
- Latief, Hilman, "The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam", *Al-Jāmi'ah*, Vol. 51, no. 2 (2013 M/1435 H): 346. <http://aljamiah.or.id/index.php/AJIS/article/view/160>(diakses 12-11-2020).
- Liddle, R. William, "*Islam Mengisi Sayap Kiri Politik Indonesia*", detikNews, Rabu, 11 Jun 2008. Diakses pada 03 Agustus 2019. Pukul. 11:19 WIB.

- Lukens Bull, Ronald A. "Two Sides of the Same Coin: Modernity and Tradition in Islamic Education in Indonesia, *Anthropology & Education Quarterly*", Vol. 32, no. 3 (Sep., 2001): 352, <http://www.jstor.org/stable/3195992>(diakses 24-10-2015).
- Lutfi, Khabibi Muhammad, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal", *Shahih*, Vol. I. Nomor I, Januari-Juni 2016, LP2M IAIN Surakarta.
- Muhammad, "Nahdatul Ulama dan Perubahan Budaya Politik di Indonesia", *el-Harakah*. Vol.12 No.1 Tahun 2010, h. 64-65. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Hasanuddin.
- Mahmuddin, "Dakwah Kontemporer dan Radikalisme Agama di Bulukumba", *Jurnal al Ulum*, Volume 16 No.02 Desember 2016.
- Miichi, Ken, "Kiri Islam, Jaringan Intelektual dan Partai Politik: Sebuah Catatan Awal", *Afkar*, Edisi No. 10 Tahun 2001, h. 155-156.
- Mudhoffir, Abdil Mughis, *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*, Vol. 18, No. 1, Januari 2013, hal. 77.
- McGrath, Alister, "The Challenge of Pluralism for the Contemporary Christian Church," *Journal JETS*, Vol. 35, No. 3, September 1992, h. 361.
- Muhammad Lutfi, Khabibi, "Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal", *SHAHIH*, Vol. I. No mor I, Januari-Juni 2016 . LP2M IAIN Surakarta.
- Mujani, Saiful and R. William Liddle, ,"Muslim Indonesia's Secular Democracy", *Asian Survey*, Vol. XLIX, No. 4 (July/August2009), h. 575-590.
- Mulyadi, Sukidi, "Violence under The Banner of Religion: The Case of Laskar Jihad and Laskar Kristus," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, 2003.
- Muzani, Saiful, "The Devaluation of Aliran Politics: Views of the Third Congress of PPP", *Studia Islamika*, Vol. 1, No. 3, 1994.
- Nahak, Hildigardis M. I, "*Effort To Preserve Inddonesian Culture In The Era Of Globalization*; Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, V o l . 5 , N o . 1 , T a h u n 2 0 1 9, h. 65.
- Nakamura, "The Cultural and Religious Identity of Javanese Muslims: Problems of Conceptualization and Approach", (*Prisma*, no 31), 1984.
- Nambo, Abdulkadir B dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa, "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)", Volume XXI No. 2 April - Juni 2005, h. 274.
- Niam, Abu, "Tipologi Kepemimpinan Politik Gus Dur", *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam Volume VI No. 1: 1-20, September 2014, ISSN: 1978-4767*. h. 16.
- Prasetyo, Hendro, "Mengislamkan Orang Jawa: Antropologi Baru Islam Indonesia," *Studi Islamika* No.3, Januari-Maret 1994, h. 75.



- Rajab, Muhammad, "Dakwah dan Tantangannya Dalam Media Teknologi Komunikasi", *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol 15, No, 1, Juni 2014, h. 69 .
- Rohim, Abdur, "Fenomena Fundamentalisme Islam Indonesia: MMI", *Akademika*, Vol. 16., No. 2, 2005.
- Rozak, Abdul and others, "Political Thoughts and Socio-Cultural Nationalism Ideologies of Nurcholish Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia", *Asian Social Science*, Vol. 11, No. 27 (2015), h. 142-154.
- Sparks, Colin. (2001). "The Internet and the Global Public Sphere." Dalam Bennett, W. Lance & Entman, Robert M. (eds). *Mediated Politics: Communication in the Future of Democracy*. United Kingdom: Cambridge University Press, h. 75- 95.; Pavlik, John V. (1996). *New Media Technology, Cultural and Commercial Perspectives*. USA: Allyn and Bacon.
- Stepan, Alfred and Jeremy Menchik, "Islam in Indonesia: Democratisation From Below", *Qantara*, 18 November 2010, <https://en.qantara.de/content/islam-in-indonesia-democratisation-from-below>.
- Suharyo, Surono, Mujid F. Amin, *HUMANIKA* Vol. 19 No. 1 (2014) ISSN 1412-9418 Bahasa dan Ideologi : Mengungkap Ideologi dan Kekuasaan Simbolik.
- Sukanto, Amos, "Ketegangan Antar Kelompok Agama Pada Masa Orde Lama Sampai Awal Orde Baru: Dari Konflik Perumusan Ideologi Negara Sampai Konflik Fisik", *Jurnal Teologi Indonesia* 1/1, Juli 2013.
- Sulisto, Kristian, "Teologi Pluralisme Agama John Hick: Sebuah Dialog Kritis dari Perspektif Partikularis", *Jurnal Veritas* Vol. 2, No. 1, April 2001, h. 51-69.
- Surahman, Cucu, Tafsir Kontekstual JIL: Telaah atas Konsep Syariat Islam dan Hudūd, *Journal of Qur'ān and Ḥadīth Studies* – Vol. 2, No. 1 (2013), h. 63-86.
- Soehadha, Moh, "Tauhid Budaya: Strategi Sinergitas Islam dan Budaya Lokal Perspektif Antropologi Islam", *Jurnal Tarjih*-Volume 13 Nomor 1, 2016.
- Sholikhin, Muhammad, "Orientasi Dakwah Islam Keindonesiaan Dan Aktualisasi Nilai-Nilai Lokal", *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi (KOMUNIKA)*, Vol.3 No.2 Juli-Desember 2009 pp.298-311.
- Sholikin, Ahmad, "Gerakan Politik Islam di Indonesia Pasca Aksi Bela Islam Jilid I, II dan III", *MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol 10 No. 1 2018 (12-33) ISSN 2085-143X.
- Stepan, Alfred C. , "Religion, Democracy, and the Twin Tolerations", *Journal of Democracy*, Vol. 11, No. 4 (October 2000), h. 37-57.

- Sumbullah, Umi, "Gerakan Fundamentalisme Islam di Malang: Studi atas Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin, dan Arimatea", *Istiqro*, Vol. VI, No. 01, (Jakarta: DEPAG RI, 2007), h.10.
- Wahib, Ahmad Bunyan, "*Gerakan Dakwah Salafi Pasca Laskar Jihad*", Electronic Research Paper-Researc Paper Vol. 3 no. 1, 2008.
- Wahid, Abdurrahman, "Islam dan Pemberdayaan *Civil Society*", seperti dikutip AS Hikam, "Wacana Intelektual tentang *Civil Society* di Indonesia", dalam *Paramadina* Vol.1, No.2 (1999), h. 43-44.
- Yakub Mubarak, Muhamad, "Problem Teologi Ideologis Komunism"e, *Jurnal Staqafah, Jurnal Peradaban Islam*, <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah>,<http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.976>, <http://beligede.weebly.com/beligede-blog/20-macam-ideologi-di-dunia>
- Zubair, "Jihad dan Kemerdekaan: Studi atas Naskah Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin", Jurnal: *Lektur Keagamaan*, Vol. 9. No.2 November 2011, Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.

## ARTIKEL

- Andrimaila, *Film Religi Sebagai Tren Masa Kini*, dalam <http://andrimaila.blogspot.com>, diakses 10 Juni 2018, Celebrity Okezone, *Film Religi Masih Booming*, dalam <http://celebrity.okezone.com>, diakses 10 Juni 2018.
- Antara News, *Film AAC Penuhi Kerinduan Umat Pada Sosok Cerdas*, dalam <http://www.antara.co.id>, diakses 10 Juni 2018.
- Aminudin, Aarsal, *Islam dalam Film Indonesia: Studi Semiotika Terhadap Film-Film Pasca Orde Baru*, dalam <http://pusmedunhas.or.id/wp-content/uploads/2010/05/Islam-Dalam-Film-Indonesia.pdf>.diakses, 10 Juni 2018.
- Appadurai, Arjun, Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy, *Public Culture* 2/2, 1990 .
- Asshiddiqie, Jimly, "*Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha*", makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.
- Azra, Azyumardi, *Islam Nusantara*, 2000. [www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1Azyumardi](http://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/nq3f9n-islam-nusantara-1Azyumardi) Azra membantah identitas IN yang melekat pada diri NU (Muktamar NU ke-33 pada 2015).
- Berger, Peter L., Reflections on the Sociology of Religion Today, *Sociology of Religion*, 62/4 (Winter 2001): 43-44.

- Hakiem, Lukman, ed. *Fakta & Data Usaha-usaha Kristenisasi di Indonesia*. Jakarta, 1991: Majalah media Dakwah.
- Hakim, Lukman, *Citra Islam Dalam Film dan Sinetron*, *Surya Online*, 06 Februari 2010, dalam <http://eprints.sunsu-ampel.ac.id/547/1/citra-islam-dalam-film-dan-sinetron-lukmaan-hakim-juni-2010.pdf>. Diakses 10 Juni 2018.
- Hakim, Ahmad Husnul, *Rahasia Pluralisme Gus Dur*, dalam Pusat Studi alQur'an dan Kebangsaan PTIQ Jakarta, <http://pusaka.ptiq.ac.id/?p=47> (diakses 24 Desember 2013).
- Hariyadi, *Islamic Popular Culture and The New Identity of Indonesian Muslim Youths*, Makalah dipresentasikan dalam 18th Biennial Conference of The Asian Studies Association of Australia di Adelaide, 5-8 Juli 2010, dalam <http://asaa.asn.au/ASAA2010/Paper/Hariyadi>. Pdf, diakses 6 Juni 2018.
- Husnul Hakim, Ahmad, *Rahasia Pluralisme Gus Dur*, dalam Pusat Studi alQur'an dan Kebangsaan PTIQ Jakarta, <http://pusaka.ptiq.ac.id/?p=47>. diakses 24 Desember 2013.
- Kaufman, Cynthia, *Ideas For Action: Relevant Theory For Radical Change* Grant Farred (2000). "Endgame Identity? Mapping the New Left Roots of Identity Politics". *New Literary History*. 31 (4): 627-648. doi:10.1353/nlh.2000.0045. JSTOR 20057628.
- Lathif, Asnawi Mukafi Niam (red), "Penerima Beasiswa NU dari Afghanistan Dikunjungi Dubesnya" dalam [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), diakses 10 Mei 2019.
- Novianti, Kurnia, *Kebudayaan, Perubahan Sosial, dan Agama Dalam Perspektif Antropologi*, *Harmoni*, Mei-Agustus 2013, h. 16.
- Mietzner and Muhtadi, *The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia*, <https://www.researchgate.net/publication/340611748>. Article in *Contemporary Southeast Asia* · January 2020. Vol. 42, No. 1 (2020), pp. 58-84. ISEAS, Yusof Ishak Institute. DOI: 10.1355/cs42-1c.
- Muhammad, Bilal, "*Islam Indonesia Beda dengan Islam Timur Tengah*," dalam <http://www.kiblat.net/2015/03/19/azyumardi-azra-islam-indonesia-beda-dengan-islam-arab/> (diakses 25 Februari 2016).
- Muzadi, Hasyim, *Gangguan itu Sunatullah*, Republika 15 Februari 2004. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.
- Nafi, M. (2010, Desember 14). *Konsep Imamah dan Negara Islam*. Diambil kembali dari Alhikam Bem Staima: <http://www.alhikambemstaima.co.cc/2010/11/konsep-imamah-dan-negara-islam.html>
- Ramadhan, Bilal, "*Din: 'Watak Islam di Indonesia Beda dengan di Timur Tengah'*," dalam [m.republika.co.id/berita/dunia-](http://m.republika.co.id/berita/dunia-)

- islam/islam nusantara/15/11/05 /nxbsaz330-din-watak-islam-di-indonesia-beda-dengan-di-timur-tengah (diakses 25 Februari 2016).
- Rifai . Bahtiar, "Said Aqil Siradj: '*Islam Indonesia bukan Islam Arab*,'" dalam [m.detik.com/news/wawancara/2978479/said-aqil-siradj-islam-indonesia-bukan- islam-arab](http://m.detik.com/news/wawancara/2978479/said-aqil-siradj-islam-indonesia-bukan-islam-arab) (diakses 25 Februari 2016).
- Rozie, Fachrur. "GNPF MUI: Peserta Demo 2 Desember Capai 3 Juta Orang". *liputan6.com*. Diakses tanggal 01 Desember 2020; Muhyiddin; Aminah, Andi Nur. "Sudah Dua Juta Massa Aksi dari Daerah Berkumpul di Jakarta". *Republika Online*. Diakses tanggal 01 Desember 2020
- Schrems, John, *Understanding Principles of Politics and the State*, (PageFree Publishing, 2004), 234. <http://beligede.weebly.com/beligede-blog/20-macam-ideologi-di-dunia>.
- Setiadi, Bayu. <https://biz.kompas.com/read/2020/03/11/230918328/tips-tips-agar-siap-menghadapi-era-disrupsi>.
- Swidler, Leanord ,The Dialogue Decalogue; Ground Rules For Interreligious Dialogue, Inter-Religio5/Spring 1984, h. 2.
- Widodo, Amrih, Writing for God: Piety and Consumption in Popular Islam, *Inside Indonesia* (Aug-Oct 2008), dalam <http://www.insideindonesia.org/edition-93/writing-for-god-14091121>, diakses 6 Juni 2018.

#### WEBSITE

- Aminudin, Arsal, *Islam dalam Film Indonesia: Studi Semiotika Terhadap Film-Film Pasca Orde Baru*, dalam <http://pusmedunhas.or.id/wp-content/uploads/2010/05/Islam-Dalam-Film-Indonesia.pdf>.diakses, 10 Juni 2018.
- Andrimaila, *Film Religi Sebagai Tren Masa Kini*, dalam <http://andrimaila.blogspot.com>, diakses 10 Juni 2018, Celebrity Okezone, *Film Religi Masih Booming*, dalam <http://celebrity.okezone.com>, diakses 10 Juni 2018.
- Hasyim, Syafiq dan Robin Bush, *NU and Discourses: Islam, Gender Rights, and Tradisional Islamic Society*, makalah yang disampaikan pada Conference on Islam, Civil Society, and Development in Southeast Asia, diselenggarakan oleh University of Melbourne, 11-12 Juli 1998.
- Sahal dan Aziz (eds.), *Islam Nusantara*, 235 dan Bilal Muhammad, "*Islam Indonesia Beda Dengan Islam Timur Tengah*," dalam <http://www.kiblat.net/2015/03/19/azyumardi-azra-islam-indonesia-beda-dengan-islam-arab/> diakses 25 Februari 2016.
- Hakim, Lukman, Citra Islam Dalam Film dan Sinetron, *Surya Online*, 06 Februari 2010, dalam <http://eprints.sunsu-ampel.ac.id/547/1/citra->

islam-dalam-film-dan-sinetron-lukmaan-hakim-juni-2010.pdf.  
Diakses 10 Juni 2018.

- Hariyadi, *Islamic Popular Culture and The New Identity of Indonesian Muslim Youths*, Makalah dipresentasikan dalam 18th Biennial Conference of The Asian Studies Association of Australia di Adelaide, 5-8 Juli 2010, dalam <http://asaa.asn.au/ASAA2010/Paper/Hariyadi>. Pdf, diakses 6 Juni 2018:
- Muhammad, Bilal, “*Islam Indonesia Beda dengan Islam Timur Tengah*,” dalam [http://www.kiblat.net/2015/03/19/azyumardi-azra-islam-indonesia-beda-dengan-](http://www.kiblat.net/2015/03/19/azyumardi-azra-islam-indonesia-beda-dengan-islam-arab/) islam-arab/ (diakses 25 Februari 2016).
- News, Antara, *Film AAC Penuhi Kerinduan Umat Pada Sosok Cerdas*, dalam <http://www.antara.co.id>, diakses 10 Juni 2018.
- Pos Kota Online, Gita Gutawa Didukung MUI, dalam <http://www.poskota.co.id/liburan/2010/08/16/gita-gutawa-didukung-mui>, diakses pada tanggal 13 Juni 2018.
- Ramadhan, Bilal “*Din: ‘Watak Islam di Indonesia Beda dengan di Timur Tengah’*,” dalam [m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/11/05/nxbsaz330-din-watak-islam-di-indonesia-beda-dengan-di-timur-tengah](http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/11/05/nxbsaz330-din-watak-islam-di-indonesia-beda-dengan-di-timur-tengah) (diakses 25 Februari 2016).
- Rifai, Bahtiar, “*Said Aqil Siradj: ‘Islam Indonesia bukan Islam Arab’*,” dalam [m.detik.com/news/wawancara/2978479/said-aqil-siradj-islam-indonesia-bukan- islam-arab \(diakses 25 Februari 2016\).](http://m.detik.com/news/wawancara/2978479/said-aqil-siradj-islam-indonesia-bukan-islam-arab)
- Syuriyah PBNU, Katib, dan Guru Utama *Fiqh-Ushul Fiqh* di Pesantren Sukorejo, Situbondo. [www.nu.or.id/post/read/60834/](http://www.nu.or.id/post/read/60834/metodologi-islam-nusantara) metodologi-islam-nusantara, diakses Kamis, 31/03/2016, 11.13 WIB
- Single Abasa Wali di Posisi 1 Weekly Top 10 Flexy Tone, dalam <http://www.nagaswaramusic.com/berita/detail/933/Single-Abatasa-Wali-Posisi-1-Weekly-Top-10-Flexy-Tone>
- Soeseno, dalam [www.marhaenisme.com](http://www.marhaenisme.com) diunduh Pada 24 September 2017
- Tren Lagu Religi di Bulan Ramadhan*, dalam <http://nagaswaramusic.com/berita/detail/891/trend-lagu-religi-di-bulan-ramadhan>, dan Single Abasa Wali di Posisi 1 Weekly Top 10 Flexy Tone, dalam <http://www.nagaswaramusic.com/berita/detail/933/Single-Abatasa-Wali-Posisi-1-Weekly-Top-10-Flexy-Tone>.
- Widodo, Amrih, *Writing for God: Piety and Consumption in Popular Islam, Inside Indonesia* (Aug-Oct 2008), dalam <http://www.insideindonesia.org/edition-93/writing-for-god-14091121>, diakses 6 Juni 2018.

[http://id.wikipedia.org/wiki/istighfar-\(album\)](http://id.wikipedia.org/wiki/istighfar-(album)), diakses pada tanggal 13 Juni 2018.



[http://id.wikipedia.org/wiki/ungu-\(grup musik\)](http://id.wikipedia.org/wiki/ungu-(grup_musik)), diakses pada tanggal 13 Juni 2018.

[http://www.kompasiana.com/anandapujawandra/konsep-islam-nusantara-kesesatan-yang-menyesatkan-analisa-frasa-makna\\_55bef9db3297738d10cca191](http://www.kompasiana.com/anandapujawandra/konsep-islam-nusantara-kesesatan-yang-menyesatkan-analisa-frasa-makna_55bef9db3297738d10cca191)

[http://www.arahmah.com/news/2015/06/29/meneliskislam nusantara.html](http://www.arahmah.com/news/2015/06/29/meneliskislam_nusantara.html).

[http://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/islam nusantara-1](http://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/islam_nusantara-1).

[http://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/islam nusantara-indonesia-2](http://republika.co.id/berita/kolom/resonansi/15/06/17/islam_nusantara-indonesia-2).

<https://kabar24.bisnis.com/read/20170606/15/659930/political-disruption-berkah-atau-kutukan>. Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020.

[www.nu.or.id/post/read/58077/ini-tema-muktamar-nu-ke-33-di-jombang](http://www.nu.or.id/post/read/58077/ini-tema-muktamar-nu-ke-33-di-jombang), diakses Kamis, 31/03/2016, 13.23 WIB..

[www.nu.or.id/post/read/58821/teks-dan-karakter-islam-nusantara](http://www.nu.or.id/post/read/58821/teks-dan-karakter-islam-nusantara), diakses Rabu, 30/03/2016, 08.20 WIB

[www.nu.or.id/post/read/59035/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara](http://www.nu.or.id/post/read/59035/apa-yang-dimaksud-dengan-islam-nusantara), diakses Kamis, 29/03/2016, 12.39 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/59081/saatnya-islam-nusantara-diekspor](http://www.nu.or.id/post/read/59081/saatnya-islam-nusantara-diekspor), diakses kamis 31/03/2016, 08.42. WIB.

[www.nu.or.id/post/read/59442/milal-bizawie-karakter-islam-nusantara-tidak-homogen](http://www.nu.or.id/post/read/59442/milal-bizawie-karakter-islam-nusantara-tidak-homogen), diakses Kamis, 31/03/2016, 09.15 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/59849/rais-aam-pbnu-islam-nusantara-solusi-peradaban-dunia](http://www.nu.or.id/post/read/59849/rais-aam-pbnu-islam-nusantara-solusi-peradaban-dunia), diakses Selasa, 31/03/2016, 08.51 WIB

[www.nu.or.id/post/read/59849/rais-aam-pbnu-islam-nusantara-solusi-peradaban-dunia](http://www.nu.or.id/post/read/59849/rais-aam-pbnu-islam-nusantara-solusi-peradaban-dunia), diakses Selasa, 31/03/2016, 08.51 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/60392/islam-nu-dan-nusantara](http://www.nu.or.id/post/read/60392/islam-nu-dan-nusantara), diakses Kamis, 31/03/2016, 09.59 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/60458/maksud-istilah-islam-nusantara](http://www.nu.or.id/post/read/60458/maksud-istilah-islam-nusantara), diakses Kamis, 31/03/2016, 09.24 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/60510/landasan-operasional-islam-nusantara](http://www.nu.or.id/post/read/60510/landasan-operasional-islam-nusantara), diakses Kamis, 31/03/2016, 09.54 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/60706/islam-nusantara-dari-nu-untuk-dunia](http://www.nu.or.id/post/read/60706/islam-nusantara-dari-nu-untuk-dunia), diakses Kamis, 31/03/2016, 11.23 WIB..

[www.nu.or.id/post/read/60756/pbnu-senang-diskusi-islam-nusantara-digelar-di-gedungpbb](http://www.nu.or.id/post/read/60756/pbnu-senang-diskusi-islam-nusantara-digelar-di-gedungpbb), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.30 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/60834/metodologi-islam-nusantara](http://www.nu.or.id/post/read/60834/metodologi-islam-nusantara), diakses Kamis, 31/03/2016, 11.13 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/60914/gus-mus-kaget-soal-islam-nusantara-berarti-tidak-pernahngaji](http://www.nu.or.id/post/read/60914/gus-mus-kaget-soal-islam-nusantara-berarti-tidak-pernahngaji), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.35 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/61063/quraish-shihab-dan-islam-nusantara](http://www.nu.or.id/post/read/61063/quraish-shihab-dan-islam-nusantara), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.16 WIB.

[www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual](http://www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.26 WIB.  
[www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual](http://www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.26 WIB.  
[www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual](http://www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.26 WIB  
[www.nu.or.id/post/read/59286/parade-budaya-dan-seni-nusantara-warnai-dies-natalis-ke13-stainu-jakarta](http://www.nu.or.id/post/read/59286/parade-budaya-dan-seni-nusantara-warnai-dies-natalis-ke13-stainu-jakarta), diakses Kamis, 31/03/2016, 09.15 WIB  
[www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual](http://www.nu.or.id/post/read/61182/mengaji-islam-nusantara-sebagai-islam-faktual), diakses Kamis, 31/03/2016, 10.26 WIB.  
[http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/23/193670/ Ramadan-Pluralitas-Pluralisme](http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/23/193670/Ramadan-Pluralitas-Pluralisme) (diakses 2 Januari 2013). Hasyim Muzadi, *Ramadhan, Pluralitas, dan Pluralisme*, Suara Merdeka, 23 Juli 2012.  
<http://www.investorwords.com/713/capitalism.html>.  
 Munim DZ, <https://www.nu.or.id/post/read/7635/nu-sebagai-islam-kiri>

## DOKUMEN

Anggaran Dasar NU, *Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016).  
 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *HASIL-HASIL MUKHTAMAR KE- 33 NAHDLATUL ULAMA, JOMBANG 1-5 AGUSTUS 2015/ 16-20 SYAWAL 1436 H*, Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, Cetakan ke dua, Januari 2016.  
 Keputusan Bahtsul Masail Maudhu'iyah PWNU Jawa Timur Tentang ISLAM NUSANTARA di Universitas Negeri Malang, ISLAM NUSANTARA-PWNU Jawa Timur 13 Februari 2016.  
 Pedoman, Aqidah dan Asas NU, Hasil-Hasil Muktamar KE-33 NU, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2016).

## GLOSARI

Dakwah kontemporer	: Dakwah di era kekinian (sekarang) dengan cara menggunakan teknologi yang sedang berkembang, baik materinya, media, maupun metodenya. Terdapat tiga indikator adanya dakwah kontemporer yaitu (1) <i>da'i</i> kontemporer, (2) dakwah dengan menerapkan materi dakwah yang kontemporer, (3) kegiatan dakwah dengan menggunakan media teknologi kontemporer.
Dekoratif	: Bersifat mendekorasi; meramu dalam kemasan baru yang membuat dakwah tampak lebih indah, menawan, dan menyenangkan. Ramuan ini dilakukan oleh dakwah kontemporer dengan memanfaatkan khazanah model-model dakwah modern, pertengahan, dan klasik.
Dialogis	: Bersifat dialog; Sifat dialogis berarti terjadinya komunikasi timbal-balik antara <i>da'i</i> dan <i>mad'u</i> , metode dakwah tidak memposisikan <i>da'i</i> sebagai <i>superman</i> , sedangkan <i>mad'u</i> sebagai <i>inferiorman</i> . Bahkan, hal-hal yang secara sensitif dapat membuat <i>mad'u</i> merasa berharga dan penting, diangkat ke permukaan secara sungguh-sungguh sebagai isu pesan dakwah.
Disrupsi	: era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental yang mengubah semua sistem, tatanan, dan landscape yang ada ke cara-cara baru.
Eksploratif	: Pengungkapan hal-hal yang berkenaan dengan aspek-aspek diri dan kehidupan <i>mad'u</i> sebagai titik pusat perhatian. Dalam hal ini, bahasa dakwah tidak hanya dituntut sesuai dengan bahasa budaya <i>mad'u</i> , akan tetapi juga mereferensi pada topik-topik yang dialami oleh <i>mad'u</i> .
Facebook	: sebuah layanan jejaring sosial ber Kantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004.
<i>Grebeg</i>	: Kata " <i>grebeg</i> " berasal dari kata " <i>gumrebeg</i> " artinya riuh, ribut dan ramai. Istilah <i>grebeg</i> awalnya berarti "gerak bersama", kemudian menjadi "jalan maja", "iring-iringan". Upacara

	grebeg merupakan upacara terpenting karena mengungkapkan pada tingkat tertinggi, yaitu tindakan raja yang menggerakkan dunia. <i>Grebeg Maulud</i> adalah suatu acara yang diprakarsai Sunan Kalijaga. Acara ini adalah tabligh atau pengajian akbar yang diselenggarakan para wali di depan masjid Demak untuk memperingati Maulud Nabi.
Humanis-ilahiah	: Paradigma yang bergerak dari manusia ke Tuhan, yang berarti menjadikan manusia sebagai subjek
<i>I'alah Syahriyah</i>	: uang yang dibayar anggota setiap bulan
Ideologi	: secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang, seperti bidang politik, sosial, budaya (kebudayaan), dan agama (keagamaan).
Instagram	: juga disebut IG atau Insta adalah sebuah <u>aplikasi berbagi foto dan video</u> yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan <u>filter</u> digital, dan membagikannya ke berbagai layanan <u>jejaring sosial</u> , termasuk milik Instagram sendiri.
Ilahiah –humanis	: Paradigma yang bergerak dari Tuhan ke manusia, yang berarti menjadikan manusia sebagai objek.
Islam kosmopolitan	: Pengenalan seseorang terhadap peradaban, institusi, spiritual, dan perilaku manusia
Islam Nusantara	: Tipologi Islam yang <i>khos</i> yang memadukan Islam dengan kebudayaan, Islam dengan nasionalisme dan memadukan Islam dengan kekayaan tradisi.
Kalimasada	: <i>Kalimasada</i> berasal dari kata <u>Kalimat Syahadat</u> , yaitu sebuah kalimat utama dalam <u>agama Islam</u> . Kalimat tersebut berisi pengakuan tentang adanya <u>Tuhan</u> yang tunggal, serta <u>Nabi Muhammad</u> sebagai utusan-Nya
Kontemporer	: sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berlangsung sampai saat ini.

Konvensional	: Semua hal yang sifatnya mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang lazim digunakan atau berdasarkan kesepakatan banyak orang. Misalnya, kelaziman, kebiasaan, atau adat di suatu tempat. Meskipun arti kata konvensional seringkali didefinisikan sebagai sesuatu yang ketinggalan jaman (kuno) atau cara-cara tradisional yang sudah tidak sesuai dengan kondisi jaman sekarang.
Langgar	: Mushola (tempat beribadah bagi pemeluk agama Islam)
<i>Lived culture</i>	: Tradisi budaya yang selalu berubah-ubah atau <i>cultur</i> yang hidup.
Media Audio	: Alat-alat yang dapat dioperasikan sebagai sarana penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indera pendengaran
Media Visual	: Bahan-bahan atau alat yang dapat dioperasikan untuk kepentingan dakwah melalui indra penglihatan. Perangkat media visual yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah adalah film slide, transparansi, <i>overhead projektor</i> (OHP), gambar, foto, dan lain sebagainya.
Media baru/ New Media	: Penyebaran berita menggunakan jaringan internet. Media baru merujuk pada media yang tersaji secara <i>online</i> di internet.
Mubaligh	: Orang yang berdakwah menyebarkan ajaran Islam
Oportunis	: orang yang menganut paham oportunisme. Oportunisme adalah paham yang semata-mata ingin mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada nilai-nilai tertentu
Partisipatif	: Bersifat parsipatif; keterlibatan aktif <i>da'i</i> dalam pemenuhan kebutuhan atau pemecahan persoalan <i>mad'u</i> . Sifat ini dapat diterapkan pada model-model <i>da'wah bi al-hal</i> , misalnya: beasiswa pendidikan, santunan sosial, bakti sosial, pengobatan massal, dan sebagainya.
Twitter	: <u>layanan jejaring sosial</u> dan <u>mikroblog daring</u> yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 <u>karakter</u> akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280



	<p>karakter yang dikenal dengan sebutan kicauan (<i>tweet</i>).</p>
Umat dakwah	<p>: Masyarakat luas yang belum memeluk agama Islam (non Muslim).</p>
Umat <i>ijabah</i>	<p>: Mereka yang telah memeluk agama Islam, di mana dalam prakteknya umat <i>ijabah</i> ini terbagi menjadi dua obyek yaitu obyek umum yang merupakan masyarakat mayoritas, awam dengan tingkat heterogen tinggi, dan obyek khusus karena status yang membentuk kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok mahasiswa, kelompok ibu-ibu, kelompok pedagang, kelompok petani, dan lain sebagainya</p>
YouTube	<p>: sebuah situs web <u>berbagi video</u> yang dibuat oleh tiga mantan karyawan <u>PayPal</u> pada Februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di <u>San Bruno</u>, California, dan memakai teknologi <u>Adobe Flash Video</u> dan <u>HTML5</u> untuk menampilkan berbagai macam konten video <u>buatan pengguna/kreator</u>, termasuk <u>klip film</u>, <u>klip TV</u>, dan <u>video musik</u>. Selain itu, konten amatir seperti <u>blog video</u>, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.</p>

## INDEKS

### A

Abdul Basit, 2, 5  
 Abdul Muiz Ali, 117, 161, 162, 176,  
 177, 230, 239, 244, 245, 250, 251,  
 252, 253, 258, 263, 270  
 Abdul Munir Mulkan, 15  
 Abdurrahman Wahid, 14, 16, 18, 20,  
 25, 75, 79, 82, 85, 86, 88, 103, 136,  
 169, 170, 173, 184, 213, 214, 216,  
 294, 304, 309  
 Agus Salim, 117, 161, 162, 163, 230,  
 239, 250, 251, 252, 253, 258, 263,  
 268, 269, 270  
 Ahmad Baso, 13, 26, 76, 179, 243,  
 248  
 Akhlaq, 3, 128  
 Akhyar Yusuf Lubis, 47, 50  
 Amar ma'ruf nahi munkar, 3, 294  
 Andi Faisal Bakti, 2, 3, 4, 33, 191,  
 246  
 Aswaja, 11, 12, 13, 27, 31, 68, 113,  
 134, 149, 152, 156, 159, 161, 181,  
 197, 198, 213, 214, 216, 217, 218,  
 220, 228, 233, 235, 236, 243, 244,  
 250, 252, 269, 282, 286, 293, 300,  
 303  
 Aswaja TV, 149, 152, 156, 159, 161,  
 250, 293  
 Azyumardi Azra, 9, 12, 25, 38, 39,  
 42, 207, 209, 221, 223, 242, 245,  
 271, 317

### B

Bahtsul Masail, 322  
 Bambang Pranowo, 22, 245, 246

### C

Cliffort Geertz, 22

### D

Dai, 2, 17, 99, 111, 161, 293, 305  
 Dakwah, 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16,  
 17, 31, 33, 40, 41, 42, 58, 60, 64,  
 69, 96, 97, 107, 108, 109, 111, 112,  
 113, 114, 117, 118, 122, 129, 130,  
 131, 132, 134, 135, 141, 142, 143,  
 151, 152, 161, 162, 163, 192, 231,  
 232, 234, 235, 236, 237, 244, 250,  
 251, 252, 253, 258, 263, 268, 269,  
 270, 275, 286, 290, 293, 296, 299,  
 300, 301, 303, 304, 305, 306, 308,  
 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,  
 318, 323  
 Dekoratif, 161, 323  
 Dialogis, 161, 323  
 Disrupsi, 6, 64, 141, 323

### E

Eksploratif, 161, 323  
 Etnografi, 28, 310

### F

Facebook, 5, 128, 150, 152, 153, 154,  
 155, 156, 161, 241, 263, 323  
 Fahrurrozi, 1, 142, 303  
 Fazlur Rahman, 39, 209  
 Firmansyah, 37, 303

### G

Gender, 85, 137, 296, 319  
 Gill Branson, 13  
 Grebeg, 23, 323

### H

Hamid Mowlana, 4  
 Hasan Hanafi, 85, 180  
 Hasyim Muzadi, 14, 16, 21, 29, 31,  
 51, 79, 92, 94, 118, 155, 169, 183,

185, 186, 187, 193, 216, 235, 294,  
295, 307, 308, 322

Hijab, 157

Humanis-ilahiah, 324

## I

Ian G. Barbaur, 1

Ideologi, 8, 14, 34, 35, 36, 37, 38, 46,  
49, 59, 74, 77, 79, 85, 95, 104, 111,  
112, 169, 247, 270, 293, 300, 301,  
303, 307, 308, 316, 324

Imamah, 42, 44, 45, 314, 318

Imdadun Rahmat, 34, 83, 175, 179,  
180, 189, 243, 249, 282, 283, 290,  
304

Instagram, 153, 154, 155, 156, 161,  
324

Islam Nusantara, 12, 13, 17, 25, 26,  
31, 34, 46, 95, 96, 122, 128, 131,  
167, 168, 173, 177, 189, 191, 228,  
230, 233, 234, 235, 239, 240, 241,  
242, 243, 244, 245, 247, 248, 249,  
250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,  
257, 258, 259, 260, 263, 266, 268,  
269, 279, 280, 282, 283, 288, 296,  
297, 300, 301, 303, 304, 306, 308,  
310, 313, 315, 317, 319, 324

## J

Jimly Asshiddiqie, 36

Josep Bleicher, 1

Julia T. Wood, 29

## K

Kalimasada, 23, 324

Kapitalisme, 52, 275, 309

Karl Marx, 36

Kazuo Shimogaki, 18, 47, 48

Kekuasaan, 8, 10, 34, 35, 46, 56, 57,  
58, 75, 77, 79, 178, 232, 291, 294,  
300, 305, 308, 316

Khabibi Muhammad Lutfi, 12, 244

Khairul Anam, 12, 117, 141, 161,  
230, 239, 243, 245, 250, 253, 258,  
264, 267, 270

Khamami, 181, 232, 235, 239, 250

Khilafah, 41, 42, 170, 276, 287, 314

Kiri Baru, 13, 18, 46, 47, 49, 50, 169,  
172, 175, 295

Kiri Islam, 18, 19, 47, 48, 169, 171,  
175, 179, 310, 315

Komunisme, 275, 317

Kontemporer, 1, 2, 17, 31, 47, 50, 85,  
141, 142, 161, 162, 301, 303, 304,  
306, 309, 310, 312, 315, 324

Konvensional, 17, 107, 117, 149,  
161, 325

Kuntowijoyo, 40, 305

Kurdi Mustofa, 58

Kurnia Novianti, 10, 57

## L

Liberalis, 269

Lived Culture, 27, 31

Luthfi Bashori, 213, 214, 215, 216

## M

Mad'u, 112, 161

Mahmuddin, 2, 315

Maria Ulfa, 161, 230, 239, 245, 250,  
253, 258, 264, 266, 267, 270

Mark R. Woodward, 22, 23, 24

Masykuri, 174, 175, 213, 214, 223,  
299

Materi, 93, 112, 113, 125, 161, 239,  
250, 293

Michel Foucault, 2

Moh. Ali Aziz, 4

Munawir Sjadzali, 38, 39

Munim DZ, 171, 172, 322

## N

Nahdlatul Ulama, 12, 13, 18, 21, 51,  
67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78,  
79, 86, 88, 93, 95, 103, 104, 105,

- 116, 120, 121, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 141, 153, 154, 155, 156, 158, 160, 162, 166, 176, 187, 194, 196, 197, 200, 223, 231, 234, 235, 240, 242, 243, 245, 249, 251, 253, 258, 264, 267, 268, 284, 287, 288, 289, 290, 293, 300, 301, 302, 307, 308, 309, 312, 314, 318, 322
- Nakamura, 24, 26, 75, 76, 308, 315
- Nurcholish Madjid, 39, 40, 182, 209, 303, 313
- O**
- Oportunis, 325
- P**
- Pancasila, 59, 67, 68, 86, 88, 95, 99, 103, 104, 113, 128, 139, 166, 168, 170, 171, 175, 176, 181, 200, 216, 217, 219, 220, 223, 225, 229, 234, 262, 276, 283, 287, 294, 296, 309, 314
- Partisipatif, 325
- Pluralisme Kritis, 20, 46, 50, 181
- Politik, 9, 14, 15, 18, 19, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 58, 59, 60, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 84, 86, 87, 91, 92, 95, 102, 129, 153, 166, 169, 171, 184, 208, 284, 291, 293, 294, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305,
- 307, 308, 309, 310, 311, 314, 315, 316
- Pribumisasi Islam, 25, 255
- R**
- Robert Connell, 9, 34
- S**
- Said Aqil Siroj, 95, 104, 157, 220, 244
- Siti Uswatun, 17, 113, 115, 126, 305
- Sokhi Huda, 2, 142
- Sosialis, 314
- Suharsimi Arikunto, 30
- T**
- Tabligh, 143, 316
- Tarmizi Taher, 27, 227, 272, 279
- Tawazun, 68
- Teknologi, 59, 122, 143, 236, 302, 316
- Toto Tasmara, 4
- Twitter, 5, 149, 150, 152, 156, 161, 293, 325
- Y**
- Youtube, 128, 146, 153, 154, 155, 156, 161, 258, 263
- Z**
- Zaini Rahman, 177, 178, 179, 204



# LEMBAGA DAKWAH

## PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA





**EPISODE 20**

# JAGAT DAKWAH NU

“Dakwah Kontemporer NU: Perubahan, Disrupsi Sosial dan Budaya”

**WULAN SARI AS**  
HOST

**DR. USWATUN HASANAH**  
DOSEN UIJ

# DAKWAH KONTEMPORER NAHDLATUL ULAMA

Perubahan dan Disrupsi Sosial Budaya, Keagamaan, dan Politik



Siti Uswatun Khasanah  
31161200000019



## UJIAN PROMOSI DOKTOR KE 1249

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Kamis, 28 Januari 2021, pukul 13.30 WIB





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**Syarif Hidayatullah**  
**JAKARTA – INDONESIA**

